PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2021-2026





BAPPEDA
KAB WAY KANAN
TAHUN 2021

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2021 NOMOR 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi integrasi sinkronisasi dan strategi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati/walikota terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan

Undang...

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15.Peraturan...

15. Peraturan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan...

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Peleksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1891...

Nomor 1891);

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33.Keputusan...

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009-sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009-sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

37.Peraturan...

37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 141);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

6.Badan...

6. Badan adalah Perangkat Daerah yang mebidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan...

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW Provinsi Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW Kabupaten Way Kanan, RPJPD Kabupaten Way Kanan, RPJPN dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra-PD dan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

BAB V...

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII : Kerangka Pedanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX : Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

(2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi pembangunan daerah

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

(3)Pengendalian...

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

(4) Tindaklanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD.

(5) Perubahan RPJMD yang tidak merubah target indikator sasaran terakhir periode dan nomenklatur Program Prioritas, dilakukan melalui Peraturan Bupati yang mengatur tentang RKPD.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Pasal 7

(1) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(2) Perubahan...

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra-PD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan dengan RPJMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

(2) RKPD Tahun Anggaran 2022 wajib disesuaikan dengan RPJMD ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(4) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD ini.

BAB VII...

(4) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan Kampung wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar…

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 02/1187/WK/2021

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten...

Kabupaten Way Kanan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825). Sebagai daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Way Kanan harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, indikator kinerja daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selanjutnya, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD maka, dalam penyusunannya harus memperhatikan periodesasi RPJPD. RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025 terbagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan per 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 merupakan tahap ke - 4 (empat) RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perumusan Renstra merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD, Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Way Kanan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD adalah dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyelarasan:

- prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan
- rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Pasal 3

Ayat (1)

a. BAB I mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Termasuk juga dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c.BAB III...

c. BAB III menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

d. BAB IV merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

e. BAB V menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi janji politik kepala daerah.

f. BAB VI menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

g. BAB VII memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indicator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakit kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

i. BAB IX Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. organisasi dan tatalaksanapemerintahan daerah;
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
d. keuangan daerah;
e. potensi sumber daya daerah;
f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

- Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah.
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.

Ayat (2)

RKPD 2022 merupakan acuan penyusunan APBD 2022. Sedangkan APBD 2022 merupakan landasan pembiayaan pelaksanaan program RPJMD di tahun 2022.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2026. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Way Kanan, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Blambangan Umpu, 26 Agustus 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GRAFIK ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang **I-1**

1.2 Dasar Hukum Penyusunan **I-6**

1.3 Hubungan Antar Dokumen **I-12**

1.3.1 RPJMD dan RPJM Nasional serta Visi Misi Presiden-Wakil Presiden I-13

1.3.2 RPJMD dan RPJM Nasional serta Visi Misi Gubernur Lampung I-14

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD I-22

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ..... I-23

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RTRW Kabupaten Way Kanan I-24

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) I-27

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Dokumen Perencanaan Lainnya I-27

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 ..... I-35

1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR 2021-2025 ..... I-36

1.3.10 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi I-37

1.3.11 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs) I-38

1.4 Maksud dan Tujuan I-39

1.4.1 MAKSUD I-39

1.4.1 TUJUAN I-39

1.5 Sistematika Penulisan I-39

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-60

2.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI II-60

2.2.2 LAJU INFLASI DAERAH II-69

2.2.3 PDRB PERKAPITA II-70

2.2.4 TINGKAT KEMISKINAN II-71

2.2.5 KEDALAMAN KEMISKINAN II-74

2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) II-75

2.2.7 ANGKA MELEK HURUF II-78

2.2.8 RATA-RATA LAMA SEKOLAH II-78

2.2.9 ANGKA HARAPAN HIDUP II-79

2.2.10 JUMLAH BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN II-80

2.2.11 CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF II-80

2.2.12 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA II-81

2.2.13 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA II-82

2.2.14 RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA II-83

2.2.15 RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS II-83

2.2.16 PRESENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN II-85

2.2.17 NILAI OPINI BPK II-86

2.2.18 PENGUATAN CADANGAN PANGAN II-87

2.2.19 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN II-88
2.2.20 KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB II-90
2.2.21 KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB II-91
2.2.22 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB II-92
2.2.23 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB II-93

2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM II-94
2.3.1 FOKUS URUSAN LAYANAN WAJIB II-94
2.3.2 LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR II-135
2.3.3 LAYANAN URUSAN PILIHAN II-163
2.3.4 PENUNJANG URUSAN II-171

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-178
2.4.1 PDRB DAN PDRB PER KAPITA II-178
2.4.2 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA II-180
2.4.3 PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER KAPITA II-181
2.4.4 ANGKA KRIMINALITAS YANG DILAPORKAN II-181
2.4.5 RASIO KETERGANTUNGAN II-182

2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-192
2.5.1 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2019 ..... II-192
2.5.2 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2019 ..... II-195
2.5.3 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019 ..... II-197
2.5.4 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 ..... II-199
2.5.5 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2020 ..... II-201

2.6 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Way Kanan 2016-2021 ..... II-203

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2

3.1.2 Neraca Daerah III-12

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-19

3.2.1 Proporsi Penggunaaan Anggaran Derah III-19

3.2.2 Analisi Pembiayaan III-21

3.3 Kerangka Pendanaan III-26

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-26

3.3.1 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-33

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat IV-1

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum IV-4

4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah IV-19

4.1.4 Permasalahan Pembangunan Terkait Standar Pelayanan Minimal IV-20

4.2 Isu Strategis IV-26

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1 Visi dan Misi V-2

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUANAN DAERAH VI-1

6.1 Strategi VI-1

6.2 Arah Kebijakan VI-35

6.3 Program Pembangunan Daerah VI-111

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah VII-6

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

8.1 Indikator Makro VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Utama VIII-3
8.3 Indikator Kinerja Daerah VIII-10

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1
9.2 Pedoman Transisi IX-4

DAFTAR TABEL

BAB. I

Tabel I.1 Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 ..... I-14

Tabel I.2 Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 ..... I-15

Tabel I.3 Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 ..... I-29

Tabel I.4 Strategi Prioritas I-30

Tabel I.5 Industri Unggulan Kabupaten Way Kanan I-31

Tabel I.6 Tahapan Pembangunan Industri I-32

Tabel I.7 Lingkup Perwilayahan Industri Kabupatem Way Kanan I-35

BAB. II

Tabel II.1 Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Way Kanan II-2

Tabel II.2 Panjang Sungai dan Luas DAS di Kabupaten Way Kanan II-7

Tabel II.3 Luas Tutupan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Way Kanan II-9

Tabel II.4 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Way Kanan II-12

Tabel II.5 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-13

Tabel II.6 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-17

Tabel II.7 Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2016-2020 ..... II-19

Tabel II.8 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Karet Per Kecamatan Tahun 2016-2021 ..... II-20

Tabel II.9 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Kopi Per Kecamatan Tahun 2016-2020 ..... II-22

Tabel II.10 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Sawit Per Kecamatan Tahun 2016-2020 ..... II-24

Tabel II.11 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Kakao Tahun 2016-2020 ..... II-26

Tabel II.12 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Lada Per Kecamatan Tahun 2016-2020 ..... II-28

Tabel II.13 Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-30

Tabel II.14 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-30

Tabel II.15 Industri Makanan Tahun 2016-2020 ..... II-50

Tabel II.16 Jenis Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-51

Tabel II.17 Jenis Industri Kerajinan Tangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-51

Tabel II.18 Industri Bahan Bangunan Tahun 2016-2020 ..... II-52

Tabel II.19 Industri Perbengkelan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-52

Tabel II.20 Daftar Objek Wisata Kabupaten Way Kanan II-53

Tabel II.21 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-55

Tabel II.22 Jumlah Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-57

Tabel II.23 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-58

Tabel II.24 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-59

Tabel II.25 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota,Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-61

Tabel II.26 PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 - 2020 ..... II-64

Tabel II.27 PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 ..... II-65

Tabel II.28 PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 ..... II-66

Tabel II.29 PDRB Kabupaten Way Kanan atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 ..... II-67

Tabel II.30 Struktur Ekonomi atas ddasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (Persen) II-68

Tabel II.31 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 ..... II-76

Tabel II.32 Kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-77

Tabel II.33 Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016-2020 ..... II-80

Tabel II.34 Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-81

Tabel II.35 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2020 ..... II-82

Tabel II.36 Persentase Penduduk Bekerja di Kabuapaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-83

Tabel II.37 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020 ..... II-84

Tabel II.38 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-85

Tabel II.39 Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2014-2019 ..... II-85

Tabel II.40 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-86

Tabel II.41 Nilai Opini BPK II-86

Tabel II.42 Data Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (Ton) II-88

Tabel II.43 Jumlah Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2016-2020 ..... II-103

Tabel II.44 Jumlah Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015-2020 ..... II-103

Tabel II.45 Jumlah Kunjungan Bayi Tahun 2015-2019 ..... II-104

Tabel II.46 Kampung/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2020 ..... II-105

Tabel II.47 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016-2020 .. II-106

Tabel II.48 Jumlah Penemuan Dan Penanganan Penderitapenyakit TBC BTA Tahun 2016-2020 ..... II-106

Tabel II.49 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC, BTA Tahun 2016-2020 ..... II-107

Tabel II.50 Jumlah Penemuan Kasus Penyakit di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-107

Tabel II.51 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)tahun 2016-2020 ..... II-109

Tabel II.52 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2013–2018 ..... II-109

Tabel II.53 Kasus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan II-110

Tabel II.54 Kasus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan, Provinsi, Nasional dan Global II-110

Tabel II.55 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019 ..... II-111

Tabel II.56 Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-112

Tabel II.57 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-112

Tabel II.58 Capaian Jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2016-2019 ..... II-113

Tabel II.59 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-117

Tabel II.60 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-118

Tabel II.61 Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2016-2019 ..... II-119

Tabel II.62 Deskripsi Kegiatan Lokal di Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 ..... II-120

Tabel II.63 PKWp, PKLp, PPK, dan PPL di Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 ..... II-122

Tabel II.64 Banyaknya Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Banykanya Air Bersih yang disalurkan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 Tahun 2011-2031 ..... II-123

Tabel II.65 Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-126

Tabel II.66 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-127

Tabel II.67 Banyaknya Perumahan Rakyat Menurut Kategori Rumah Per Kecamatan Tahun 2020 ..... II-129

Tabel II.68 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-130

Tabel II.69 Jumlah Penyandang PMKS Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020 ..... II-131

Tabel II.70 Jumlah Penerima PKH Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2019 ..... II-132

Tabel II.71 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-135

Tabel II.72 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-136

Tabel II.73 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-137

Tabel II.74 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-137

Tabel II.75 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-138

Tabel II.76 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2020 ..... II-140

Tabel II.77 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020 ..... II-141

Tabel II.78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-143

Tabel II.79 Jumlah Cakupan Penerbitan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-145

Tabel II.80 Banyaknya Akte Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2016-2020 ..... II-146

Tabel II.81 Banyaknya Kartu Keluarga yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2016–2020 ..... II-146

Tabel II.82 Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-147

Tabel II.83 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-148

Tabel II.84 Prevalensi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-149

Tabel II.85 Indikator Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020 ..... II-151

Tabel II.86 Jumlah Koperasi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-154

Tabel II.87 Jumlah UMKM di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-154

Tabel II.88 Data PMDN Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-155

Tabel II.89 Indikator Kinerja Bidang Perizinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2013-2017 ..... II-156

Tabel II.90 Perkembangan Prestasi Olah Raga Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-158

Tabel II.91 Indikator Bidang Urusan Statistik Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-158

Tabel II.92 Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-160

Tabel II.93 Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019 ..... II-162

Tabel II.94 Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang dan Jagung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019 ..... II-165

Tabel II.95 Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-170

Tabel II.96 Nilai Opini BPK di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 ..... II-173

Tabel II.97 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-173

Tabel II.98 Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-174

Tabel II.99 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-174

Tabel II.100 Katagori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota II-175

Tabel II.101 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 ..... II-175

Tabel II.102 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-176

Tabel II.103 Katagorisasi Penilaian Pemerintah Daerah II-177

Tabel II.104 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2019 ..... II-178

Tabel II.105 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten WayKanan Tahun 2016-2020 ..... II-179

Tabel II.106 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2020 ..... II-180

Tabel II.107 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-181

Tabel II.108 Jumlah Kriminalitas (Crime Total) yang di Laporkan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-182

Tabel II.109 Tingkat Resiko Terkena Kejahatan *(Crime Rate)* di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-182

Tabel II.110 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-183

Tabel II.111 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-184

Tabel II.112 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabuapten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-186

Tabel II.113 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-192

Tabel II.114 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-196

Tabel II.115 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-198

Tabel II.116 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-198

Tabel II.117 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 ..... II-200

Tabel II.118 Realisasi Pencapaian SPM Penanganan Becana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2020 ..... II-201

Tabel II.119 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ..... II-202

Tabel II.120 Evaluasi Indikator Kinerja dan Target RKPD sampai dengan Tahun 2020 ..... II-204

Tabel II.121 Evaluasi Capaian RPJMD dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Sampai dengan Tahun 2020 ..... II-208

BAB. III

Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-4

Tabel III.2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020 ..... III-9

Tabel III.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-10

Tabel III.4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-11

Tabel III.5 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2016 – 2020 ..... III-12

Tabel III.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-14

Tabel III.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 ..... III-20

Tabel III.8 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... III-22

Tabel III.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... III-24

Tabel III.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020 ..... III-25

Tabel III.11 Proyeksi Keuangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026 ..... III-27

Tabel III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026 ..... III-34

BAB. V

Tabel V.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... V-29

BAB. VI

Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kabupaten Way Kanan VI-19

Tabel VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VI-37

Tabel VI.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VI-112

BAB. VII

Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VII-4

Tabel VII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan PendanaanKabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VII-8

BAB. VIII

Tabel VIII.1 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VIII-2

Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VIII-4

Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ..... VIII-12

DAFTAR GRAFIK

BAB. II

Grafik II.1 Status Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 .....II-3

Grafik II.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan terhadap Provinsi, dan Nasional Tahun 2016-2020.....II-61

Grafik II.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi, dan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 .....II-70

Grafik II.4 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020.....II-70

Grafik II.5 Capaian Penurunan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung Tahun 2018 -2020 .....II-71

Grafik II.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....II-72

Grafik II.7 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....II-73

Grafik II.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Rp/Perkapita/Bulan) Kabupaten Way Kanan, 2016-2020 **.....** II-73

Grafik II.9 Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Tahun 2016 –2020.....II-74

Grafik II.10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020.....II-75

Grafik II.11 Perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020.....II-76

Grafik II.12 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....II-78

Grafik II.13 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....II-79

Grafik II.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....II-79

Grafik II.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....II-81

Grafik II.16 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-89

Grafik II.17 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-90

Grafik II.18 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-91

Grafik II.19 Pertumbuhan dan Kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-92

Grafik II.20 Pertumbuhan dan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-93

Grafik II.21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud Tahun 2016-2020 ..... II-94

Grafik II.22 APK Pendidikan di Kab. Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-95

Grafik II.23 APM Pendidikan di Kab. Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-96

Grafik II.24 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2011-2015 ..... II-98

Grafik II.25 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020 ..... II-99

Grafik II.26 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-100

Grafik II.27 Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-101

Grafik II.28 Kasus Kematian Ibu Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-102

Grafik II.29 Indikator Bidang Urusan Pariwisata Kabupaten Way Kanan Tahun 2016- 2019 ..... II-163

Grafik II.30 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-164

Grafik II.31 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-165

Grafik II.32 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-166

Grafik II.33 Pertumbuhan dan Kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-168

Grafik II.34 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 ..... II-169

Grafik II.35 Nilai Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2019 ..... II-177

BAB. III

Grafik III.1 Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2020 ..... III-21

DAFTAR GAMBAR

BAB. I

GAMBAR I.1 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 ..... I-5

GAMBAR I.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-14

BAB. II

GAMBAR II.1 Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan II-4

GAMBAR II.2 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan II-11

GAMBAR II.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Way Kanan II-15

GAMBAR II.4 Peta Sebaran Keterdapatan Sumberdaya Mineral Emas di Kecamatan Kasui, Rebang tangkas dan Blambangan umpu Kabupaten Way Kanan II-34

GAMBAR II.5 Peta sebaran zona urat kuarsa di daerah aliran way umpu dan way neki, wilayah kecamatan Banjit, Baradatu dan Gunung Labuhan II-37

GAMBAR II.6 Peta Sebaran Keterdapatan Sumberdaya Mineral Mangan di Kecamatan Kasui, Rebang tangkas dan Blambangan umpu Kabupaten Way Kanan II-39

GAMBAR II.7 Peta Sebaran Keterdapatan Bahan Galian Trans di Kabupaten Way Kanan II-40

GAMBAR II.8 Peta Sebaran Keterdapatan Singkapan Bahan Galian Andesit di Kecamatan Way Tuba II-42

GAMBAR II.9 Peta Sebaran Keterdapatan Sumberdaya Mineral Andesit di Kecamatan Way Tuba dan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan II-43

GAMBAR II.10 Peta Sebaran Keterdapatan Singkapan Batu Bara di Kec. Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung II-45

GAMBAR II.11 Peta Lokasi Singkapan Batu Gamping Kecamatan Way Tuba II-47

GAMBAR II.12 Singkapan Batu Gamping.....II-48

GAMBAR II.13 Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.....II-113

GAMBAR II.14 Peserta KB Aktif yang Menggunakan Metode Kontrasepsi (MKJP) dan Non MKJP di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 .....II-149

WAY KANAN UNGGUL DAN SEJAHTERA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Way Kanan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M dan Drs. Hi. Ali Rahman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2026 serta

telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berlandaskan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan perencanaan, daerah tetap harus memperhatikan perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-IV (empat) RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 9 dan Pasal 10, selain berorientasi proses, RPJMD Kabupaten Way Kanan juga berorientasi pada substansi, dan disusun menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

2. Pendekatan integrative, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenagan ke dalam satu proses terpadu dan focus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;

3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 harus diintegrasikan juga dengan dokumen RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031 (yang saat ini juga sedang dalam tahap akhir proses revisi), Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten, penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Way Kanan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

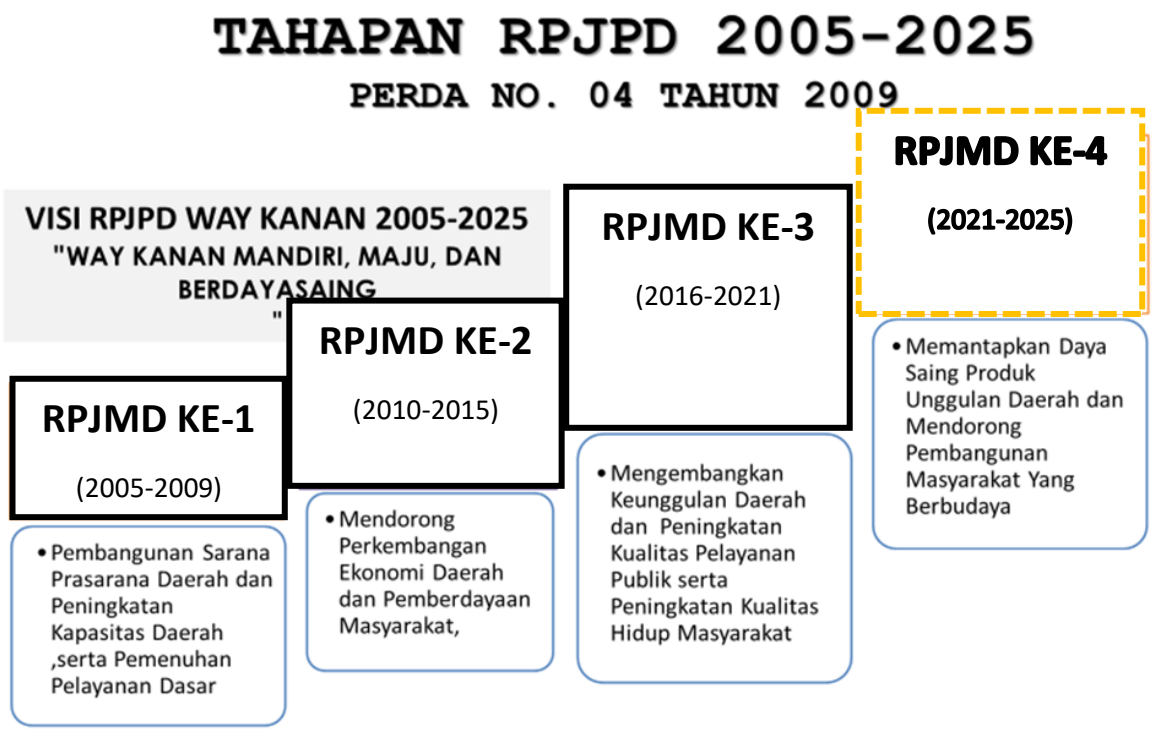
Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Way Kanan serta hasil konsultasi ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Dalam upaya mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2005-2025, yaitu ***"Way Kanan Mandiri, Maju, dan Berdaya Saing"*** dan tujuan pembangunan berkelanjutan arahan dari dokumen RPJPD ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas tahapan pembangunan dan arahan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD 2005-2025



Sumber: *RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwasannya untuk dokumen RPJMD peride 2021-2026 masuk pada tahapan ke-IV (2021-2025), dimana arah kebijakan pembangunan tahap IV adalah "***Memantapkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan Mendorong Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya***". Pembangunan pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan pada periode sebelumnya yang memantapkan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan:

a. Mewujudkan tingkat kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan;

b. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan dukungan potensi daerah yang handal;

c. Mewujudkan manajemen publik yang semakin handal dengan peningkatan profesionalitas aparat pemerintahan daerah;

d. Mewujudkan kuantitas dan kualitas insfratrktur wilayah yang semakin maju dalam mendudkung perkembangan perekonomian daerah;

e. Mewujudkan pembangunan sosial kemasyarakatan yang berbudaya untuk mempercepat pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJPD Kabupaten Way Kanan tahun 2005-2025 diharapkan menjadi pedoman substansi dalam penyusunan dokumen RPJMD tahun 2021-2026 untuk menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 didasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Peleksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009- sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009-sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11);

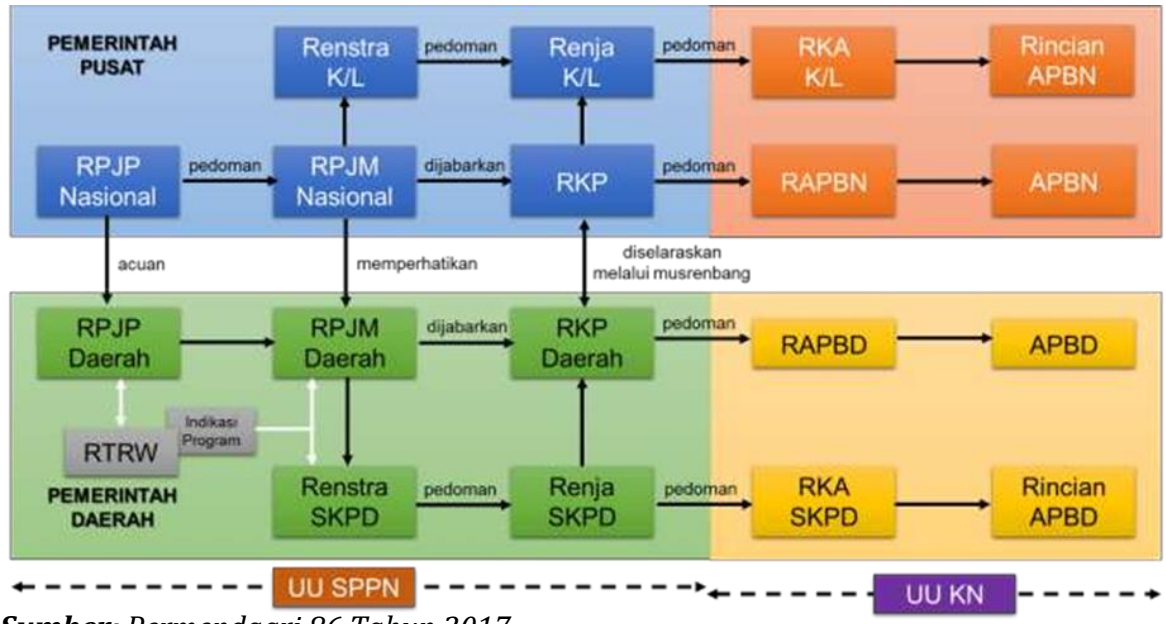
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJMD Kab. Way Kanan Tahun 2021-2024 berpedoman pada RTRW Kab. Way Kanan 2011-2031, RTRW Provinsi Lampung 2011- 2031, RTRW Nasional 2008-2028.

Penyusunan RPJMD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan wilayah yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RPJMD Tahun 2021-2026 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten Way Kanan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: *Permendagri 86 Tahun 2017*

1.3.1 RPJMD dan RPJM Nasional serta Visi Misi Presiden-Wakil Presiden

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

RPJMD Kabupaten Way Kanan juga mengacu pada Visi-Misi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu sebagai berikut:

Visi :

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"

Misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tabel 1.1 Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024

NO	PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2020-2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2.	Mengembangankan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

1.3.2 RPJMD dan RPJMD Provinsi Lampung serta Visi Misi Gubernur Lampung

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan arah kebijakan dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

RPJMD Kabupaten Way Kanan mengacu pada Visi-Misi dari Gubernur Lampung yaitu sebagai berikut:

Visi :

"Rakyat Lampung Berjaya"

Misi :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tabel 1.2 Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
1.	Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukuanan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2.	Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
	Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4.	Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5.	Lampung Menuju Bebas Narkoba a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama b. memberatas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi
6.	Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan : a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetesi b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokerasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik g. Meningatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
7.	Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
	dengan : a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetesi b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokerasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik g. Meningatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
8.	Smart Village a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa b. Memfasilitasi digitaliasi administrasi desa c. e-participation : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi
9.	Pendampingan program pembangunan desa a. Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
10.	Perempuan Berjaya : a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi c. Memfasilitsi pendampingan hukum bagi perempuan.
11.	Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan : a. Mengembangkan fasiltas dan ruang-ruang publik ramah

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
	perempuan dan anak b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak d. Menyediakan dan menfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempt kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik e. Memfasiltasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak f. Memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu
12.	Anak Muda Berjaya : a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda c. Mencetak wirausahawan muda d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
13.	Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada : a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten
14.	Membangun pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
15	Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat : a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi
16.	Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
	bidang pertanian
17.	Mencegah dan memberatas peredaran pupuk palsu
18.	Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitiasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
19.	Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri
20.	Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan : a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengelolahan perikanan. b. Memberikan asurasi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia c. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
21.	Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
22.	Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan : a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia c. Mempercepat pembangunan infrastrutur untuk mendukung pengembangan pariwisata d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
23.	Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
24.	Infrastruktur Lampung Berjaya a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota. b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya. c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi
25.	Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat : a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermurah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur. b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong
26.	Lampung Terang Berjaya. Memproritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada : a. Memepercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik b. Mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi c. Kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian
27.	Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat : a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan b. Mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahtraan rakyat c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
28.	Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan : a. Menyediakan fasiltas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA. c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya
29.	Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan : a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi
30.	Mengembangkan industri pengelolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan
31.	Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui : a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasi sumber daya dan keunggulan lokal b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)
32.	Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembagan dunia usaha dengan : a. Menyederhanakan perizinan b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan d. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi
33.	Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri

NO	AGENDA KERJA UTAMA RPJMD Provinsi 2019-2024
	Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung
34.	Lampung Sehat : a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan dan RPJMD Teknokratik merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan visi, misi, strategi dan arah kebijakan jangka menengah RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Visi :

"LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025"

Misi :

1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RTRW Kabupaten Way Kanan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009-2029. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan rencana struktur, pola ruang, serta arahan pemenfaatan ruang RTRW.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Way Kanan, pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten dengan Strategi meliputi:
    a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
    b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
    c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi;
    d. melestarikan situs warisan budaya bangsa; dan
    e. mempercepat peningkatan infrastruktur yang membuka keterisoliran wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan kabupaten.
2. Kebijakan peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan Strategi meliputi:

a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;

b. meningkatkan infrastruktur pemasaran bagi hasil-hasil pertanian seperti terminal agro, pasar agro, dan akses jalan;

c. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder melalui pengembangan industri agro di pusat kawaan agropolitan Way Tuba;

d. meningkatkan produktivitas subsektor peternakan dan perikanan; dan

e. mengembangkan kegiatan pertanian yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan.

3. Kebijakan perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dengan Strategi meliputi:

a. mengembalikan fungsi lindung pada register 24 dan register 41 mengembalikan fungsinya sebagai fungsi lindung;

b. mengefektifkan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan dam, dan sempadan mata air, mengingat kawasan ini berpotensi sebagai daerah resapan;

c. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;

d. mencegah kerusakan daerah aliran sungai dan mengembalikan fungsi resapan dengan tanaman/vegetasi daya ikat tanah yang baik;

e. membatasi eksploitasi dan eksplorasi kegiatan pertambangan untuk menghindari berkurangnya secara signifikan cadangan bahan tambang dan mineral; dan

f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalu penyuluhan mengenai teknik pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

4. Kebijakan pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan Strategi meliputi:
   a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
   b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi khususnya melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan untuk sektor unggulan dan penetapan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;
   c. Meningkatkan sistem insentif pada kawasan prioritas pembangunan;
   d. mengembangkan Kawasan Industri Terpadu (KIT); dan
   e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agropolitan.
5. Kebijakan pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan, dengan Strategi meliputi:
   a. mengarahkan pertumbuhan penduduk kearah timur dan utara Kabupaten Way Kanan;
   b. membangun pusat pertumbuhan baru pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk rendah untuk merangsang pertumbuhan pada daerah tersebut;
   c. menyediakan fasilitas sebagai pengarah pertumbuhan dan distribusi penduduk; dan
   d. mempercepat serta mengembangkan pusat pertumbuhan dan sentra - sentra produksi.
6. Kebijakan pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal dengan Strategi meliputi:

a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;

b. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;

c. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan

d. mengembangkan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta pemodalan terutama untuk kawasan kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi .

Berdasarkan kajian KLHS diatas, rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan sektoral Dokumen SDGs, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Grand Design Reformasi Birokrasi, RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RPJMD Kabupaten

berbatasan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan dokumen perencanaan sektoral lainnya, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

   Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2040 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020

   Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

   a. Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
   b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
   c. Mewujudkan indutri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
   d. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan provinsi, maka Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Terbangunnya industri kerakyatan berbasis sumberdaya lokal yang unggul, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Berkembangnya kawasan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya industri dan kelembagaan serta terbangunya jejaring kemitraan usaha berbasis teknologi informasi;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung industri kerakyatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem produksi, distribusi dan tata niaga yang mengacu kepada standar mutu produk;
5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.

Adapun tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan yang berbasis pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah:

1. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor IKM;
2. Bertambahnya jumlah Wira Usaha Baru (WUB);
3. Meningkatnya ketrampilan SDM IKM yang kompeten dan potensial;
4. Bertambahnya jumlah unit IKM baru;
5. Meningkatnya IKM yang memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas yang tinggi;
6. Meningkatnya IKM yang berbasis teknologi modern;
7. Berkurangnya ketergantungan bahan baku impor kebutuhan IKM;
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi IKM;
9. Meningkatnya perluasan pasar produk IKM;
10. Meningkatnya perluasan akses sumber pembiayaan; dan
11. Terwujudnya IKM modern yang berbasis Industri Hijau.

Tabel 1.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040

NO	SASARAN	TAHUN			
		2025	2030	2035	2040
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	7,5	8,25	8,5	9,0
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	24,75	25,62	26,48	26,48
3.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	7.887	8.938	9.464	9.464
4.	Nilai Investasi (juta rupiah)	378.736,87	542.310,00	687.883,13	833.456,26

Tabel 1.4 STRATEGI PRIORITAS

TAHUN	NO	STRATEGI PRIORITAS
2021-2030	1	Meningkatkan kulaitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengembangan industri pengelolaan hasil pertanian dan perikanan dan menyiapkan tenaga ahli utuk mendukung pengembangan SDM tersebut
	2	Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi modern dalam percepatan pembangunan hilirisasi indutsri
	3	Menyediakan fasiltas pembiayaan (kredit) dengan bunga yang rendah melalui Kerjasama antara Lembaga keuangan, peerintah daerah dan pusat untuk pengembangan industri
	4	Membangaun dan memantapkan Kawasan industri strategis daerah, meningkatkan iklim usaha dan promosi investasi dan membangun sarana prasarana pendukung (Sumber energi listrik, air bersih, pergudangan dan sarana logistik lainya) secara optimal untuk meningkatkan investasi industri
	5	Membangun dan Mengembangkan jalan kolektor sekunder dan tersier yang terkoneksi dengan jalan nasional
	6	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh industri melalui Pendidikan lanjutan, magang atau kursus
	7	Kerjasama eksportir dengan industri pengolahan untuk industri pengolahan kopi dan lain-lain
	8	Menciptakan iklik dan meningkatkan promosi investasi untuk percepatan pembangunan industri
	9	Mendatangkan tenaga ahli, konsultan dan penyuluh industri

TAHUN	NO	STRATEGI PRIORITAS
		untuk pengembangan tenaga kerja lokal
2031-2040	1	Membangun lembaga Pendidikan pencipta tenaga ahli dan terampil di bidang industri *(community colage)*
	2	Meningkatan inovasi teknologi dalam percepatan hilirisasi industri pertanian, perkebunan dan perikanan
	3	Melanjutkan dan menetapkan Kawasan industri dengan prinsip aglomerasi untuk pengembangan industri pengolahan pertanian perkebuanan dan perikanan yang terkoneksi dengan sistem logistik nasional
	4	Membangun Lembaga penelitian dan pengembangan industri strategis kabupaten way kanan
	5	Membangun kemitraan anatara pengusaha maju/modern dangan pengusaha lokal
	6	Mengembangkan sertifikat indikasi geografis bagi produk-produk industri pengelolaan pertanian, perkebunan dan peikanan di kabupaten way kanan
	7	Bantuan dari pusat untuk pengembangan teknologi dan usaha industri pengolahan pertanian, perkebunan dan perikaan

Tabel 1.5 INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN WAY KANAN

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
1	Industri Pangan	Industri Olahan Kopi	Banjit, kasui, Rebang Tangkas
		Industri Olahan Ubi Kayu	Blambangan Umpu, Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
		Industri Olahan Lada	Gunung Labuhan
		Industri Olahan Bahan Baku Pertanian/Peternakan	Buay Bahuga, bahuga, Banjit, Bumi Agung
		Industri Pengoalahan Minyak Nabati	Bumi Agung, Pakuan Ratu
		Industri kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Baradatu, Blambangan Umpu, Way Tuba
		Industri Gula	Negara Batin, Pakuan Ratu, Bahuga, Negeri Besar, Banjit
		Industri Minuman	Blambanagn Umpu, Baradatu, Way Tuba
2	Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik	Industri Pengolahan Karet	Blambangan Umpu, Negeri Agung, Way Tuba, Pakuan Ratu
3	Industri Furnitur kayu/Barang Dari kayu	Industri Muebel	Way Tuba, Blambangan Umpu
4	Indusrti Bahan Galian Bukan Logam	Industri Batu Bata/genteng, Batu Mulia	Blambangan Umpu, Negara batin
5	Industri Textil/Pakaian Jadi	Industri Tapis dan Batik, Border	Blambangan Umpu, Way Tuba, Baradatu, Buay Bahuga

Tabel 1.6 TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDSUTRI	
		2021-2025	**2026-2040**
1.	Indsutri Pangan	1. Industri Olahan Kopi	
		- Fine Robusta - Kopi Bubuk	- Kopi Mix - Kopi Exstrak

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDSUTRI	
		2021-2025	**2026-2040**
		- Kopi Instan - Kopi Sangrai - Kopi Dekafeinasi - Kosmetik - Olahan Pangan	- Produk Olahan Pangan - Produk Farmasi - Kompos
		2. Industri Olahan Ubi Kayu	
		- Tepung Tapioka - Tepung Mocaf - Tepung Rajabasa - Gaplek dan Tiwul - Gula cair - Olahan Pangan - Kripik	- Bio Ethanol - Kosmetik - Produk Farmasi - Pakan Ternak - Kompos
		3. Industri Olahan Lada	
		- Lada Bubuk - Lada Segar Kemasan - Bahan Obat	- Minyak Lada - Kosmetik
		4. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanaian/Peternakan	
		- Beras Premium - Buah-Buahan segar - Ayam Buras - Ikan Awet - Abon Ikan	- Beras Premium - Buah-Buahan Segar - Ayam Buras - Ikan Kaleng
		5. Industri Pengolahan MInyak Nabati	
		- Minyak Goreng - CPO - Santan dalam Kemasan	- Minyak Sawit Merah - Minyak Lada
		6. Industri Kerupu,Keripik ,Peyek dan Sejenisnya	
		- Aneka Kripik (Pisang,Singkong,pare, jamur, Kentang,Mantang) - Aneka Kerupuk (Ikan,udang,Aci,Singkong, Jengkol Rambak)	- Aneka Kripik (Pisang,Singkong,pare,jamur, Kentang,Mantang) - Aneka Kerupuk (Ikan,udang,Aci,Singkong, Jengkol Rambak)

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDSUTRI	
		2021-2025	**2026-2040**
		- Aneka Peyek	- Aneka Peyek
		7. Industri Gula	-
		- Gula pasir - Gula Aren - Gula Semut - Gula Kelapa	- Gula pasir - Gula Aren - Gula Semut - Gula Kelapa
		8. Industri Minuman	-
		- Minuman Ringan - AMDK	- Minuman Ringan - AMDK
2	Industri Karet/Barang dari karet dan Plastik	Industri Karet Alam dan Sintetis	-
		- Latek - *Crumb Rubber* - Busa - Olahan Kayu Karet - Perelatan Rumah Tangga	- *Engineering natural rubber coumpound* - Aspal Karet - Peralatan Industri
3	Indudtri Furniture, Olahan kayu dan barang dari kayu	- Pengerajinan kayu - Pengawetan kayu - Barang Bangunan dari kayu - Ukiran kayu - Produk kriya dari kayu	- Kayu Lapis - Vaneer
4	Industri bahan Galian Bukan Logam	- Industri bata - Industri Genteng - Indsutri Paving - Batu Mulia - Industri Kaca dan Barang dari kaca	- Industri bata - Industri Genteng - Indsutri Paving - Batu Mulia - Industri Kaca dan Barang dari kaca
5	Industri Textil dan Pakian Jadi	- Kain Tapis - Indsutri Batik - Konveksi - Produk Kriya dan Textile - Bordier - Rajutan	- Kain Tapis - Indsutri Batik - Konveksi - Produk Kriya dan Textile - Bordier - Rajutan

Tabel 1.7 LINGKUP PERWILAYAHAN INDUSTRI KABUPATEN WAY KANAN

NO	LINGKUP PERWILAYAHAN	TAHUN	
		2021-2025	2026-2040
A	PENGEMBANGAN KAWASAN PEMBENTUKAN INDUSTRI (PKPI)		
1	Kabupaten Way Kanan a. Kecamatan Way Tuba b. Kecamatan Buay Bahuga c. Kecamatan Bahuga	Eksisting	Pengembangan
B	PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)		
1	Sentra IKM Olahan Kopi di Banjit	Eksisting	Pengembangan
2	Sentra IKM Bata/Genteng di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan
3	Sentra IKM Gula Aren di Banjit	Eksisting	Pengembangan
4	Sentra IKM Gula Kelapa di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan
5	Sentra IKM Tahun Tempe di Baradatu	Eksisting	Pengembangan
6	Sentra IKM Tahun Tempe di Negeri Agung	Eksisting	Pengembangan
7	Sentra IKM Kerupuk Singkong	Eksisting	Pengembangan
8	Sentra IKM Furniture Olahan Kayu di Way Tuba	Eksisting	Pengembangan
9	Sentra IKM Bata / Genteng di Negara batin	Eksisting	Pengembangan
10	Sentra IKM Tapis di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan
11	Sentra IKM Batik di Blambangan Umpu	Eksisting	Pengembangan

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD daerah lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan strategi dan arah kebijakan jangka menengah RPJMD Kabupaten Way

Kanan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2019-2024.

Visi :

" Mewujudkan Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Agamis , Maju, dan Sejahtera"

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya
2. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis
3. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang prima
5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung

1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR 2021-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD daerah lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan strategi dan arah kebijakan jangka menengah RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR 2021-2025

Visi :

" Terwujudnya Kabupaten Oku Timur yang "Maju Lebih Mulia""

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang berkualitas, adil dan merata.
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sehingga menyerap sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat bersinergi dengan pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI dan Masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
7. Meningkatkan Program Sosial untuk menurunkan angka kemiskinan.
8. Memfasilitasi Lembaga Bantuan Hukum yang dapat mengadvokasi dan membantu persoalan hukum masyarakat.

1.3.10 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Way Kanan disusun sebagai dokumen operasional yang menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi untuk mendukung pembangunan SDM berkualitas dengan memuat program- program pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD.

1.3.11 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs)

Agenda Global 2030 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB dengan peserta 159 negara (termasuk di dalamnya Indonesia) pada akhir tahun 2015. TPB/SDGs menghasilkan 17 Goals/Tujuan dan 169 target dengan periode pelaksanaan tahun 2016-2030.

Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

RAD TPB/SDGs berisi arah kebijakan, indikator TPB/SDGs Kabupaten, dan rencana program aksi /kegiatan, menjadi salah satu acuan dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 MAKSUD

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Way Kanan 5 (lima) tahun kedepan, serta menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan, dalam upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

1.4.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi instrumen dalam pencapaian visi, misi dan sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kabupaten Way Kanan 2021-2026.

b. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan, melalui penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci di Kabupaten Way Kanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

d. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 disajikan dalam 9 Bab sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Membahas gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Way Kanan dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD 2016-2021, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta hasil-hasil rekomendasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang tinjauan kinerja keuangan daerah, dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, serta kebijakan pokok keuangan daerah pada periode lima tahun terakhir. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan kapasitas/kemampuan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, bab ini membahas pula tentang proyeksi dan kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh pada periode lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dengan merujuk pada uraian pada bab-bab sebelumnya, bab ini mengulas tentang hasil rumusan permasalahan dan isu strategis

pembangunan daerah yang masih dan akan menjadi pokok perhatian dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah pada periode lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunann sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Way Kanan, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2026

BAB IX PENUTUP

Memuat ikhtisar keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang dilengkapi dengan pokok-pokok saran/masukan dan atau

rekomendasi yang perlu ditempuh dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sebelum menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi umum daerah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

2.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, memiliki luas wilayah 3.921,63 km^2 atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung. Secara geografis berada diantara arah Utara-Selatan 4.12°-4.58° Lintang Selatan dan arah Timur-Barat 104.17°-105.04° Bujur Timur. Kabupaten Way Kanan berbatasan antara lain dengan:

- Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara;
- Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan;
- Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur; dan
- Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat.

Berdasarkan kondisi, potensi dan letak strategis Kabupaten Way Kanan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang dapat mendorong percepatan pembangunan sejajar dengan daerah lain. Letak strategis di Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera sepanjang 81,9 km merupakan kekuatan yang dapat terus

dikembangkan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu keberadaan jalur Kereta Api dengan 4 (empat) Stasiun, keberadaan Bandara Gatot Subroto yang sudah melayani penerbangan sipil akan semakin membuka konektifitas antara wilayah, keberadaan Daerah Irigasi (DI) Way Umpu, Bendung Way Besai dan Suplesi Way Besai, Daerah Irigasi (DI) Komering mampu menyediakan air untuk budidaya pertanian dan perikanan di beberapa wilayah kecamatan, ini merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin.

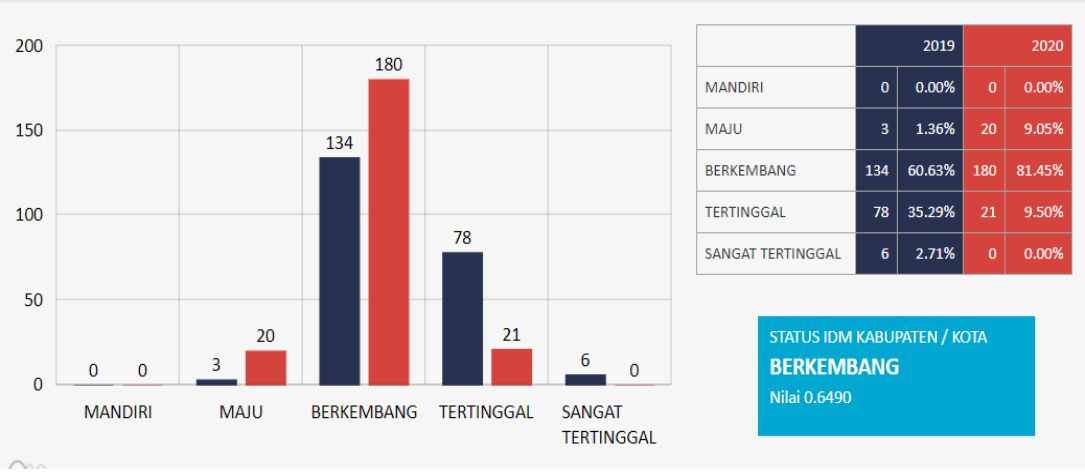
Secara administratif, Kabupaten Way Kanan pada awal terbentuknya di tahun 1999 terbagi dalam 6 wilayah kecamatan 192 kampung, kemudian dengan disahkannya Perda No.33 Tahun 2000 Kabupaten Way Kanan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Pada tahun 2005 dishakannya Perda No.2 Tahun 2005 Kabupaten Way Kanan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, kemudian pada tahun 2002 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2002 menjadi 14 (empat belas) kecamatan, yang meliputi 206 kampung, dan kini dengan Perda No. 1 Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, yang meliputi 221 Kampung dan 6 Kelurahan. Data keseluruhan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Way Kanan beserta jumlah kampung di tiap-tiap kecamatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1. Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Way Kanan

No	KECAMATAN	IBU KOTA	Luas Wilayah		Jumlah	
			(km²)	(%)	Kampung/ Kelurahan	(%)
1	Banjit	Pasar Banjit	331,60	8,46	20	8,81
2	Baradatu	Tiuh Balak Pasar	152,03	3,88	22	9,69
3	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	115,22	2,94	21	9,25
4	Kasui	Jaya Tinggi	150,27	3,83	19	8,37
5	Rebang Tangkas	Gunung Sari	207,18	5,28	10	4,41
6	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	532,99	13,59	13	11,45
7	Way Tuba	Way Tuba	206,25	5,26	13	5,73
8	Negeri Agung	Negeri Agung	562,98	14,36	19	8,37
9	Bahuga	Mesir Ilir	138,22	3,52	11	4,85
10	Buay Bahuga	Bumi Harjo	102,04	2,60	9	3,96
11	Bumi Agung	Bumi Agung	131,75	3,36	10	4,41
12	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	580,34	14,80	19	8,37
13	Negara Batin	Negara Batin	348,40	8,88	15	6,61
14	Negeri Besar	Negeri Besar	362,37	9,24	13	5,73
15	Umpu Semenguk	Negeri Baru			13	
Luas total			**3.921,63**	**100**	**227**	**100**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2021

Grafik II.1 Status Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

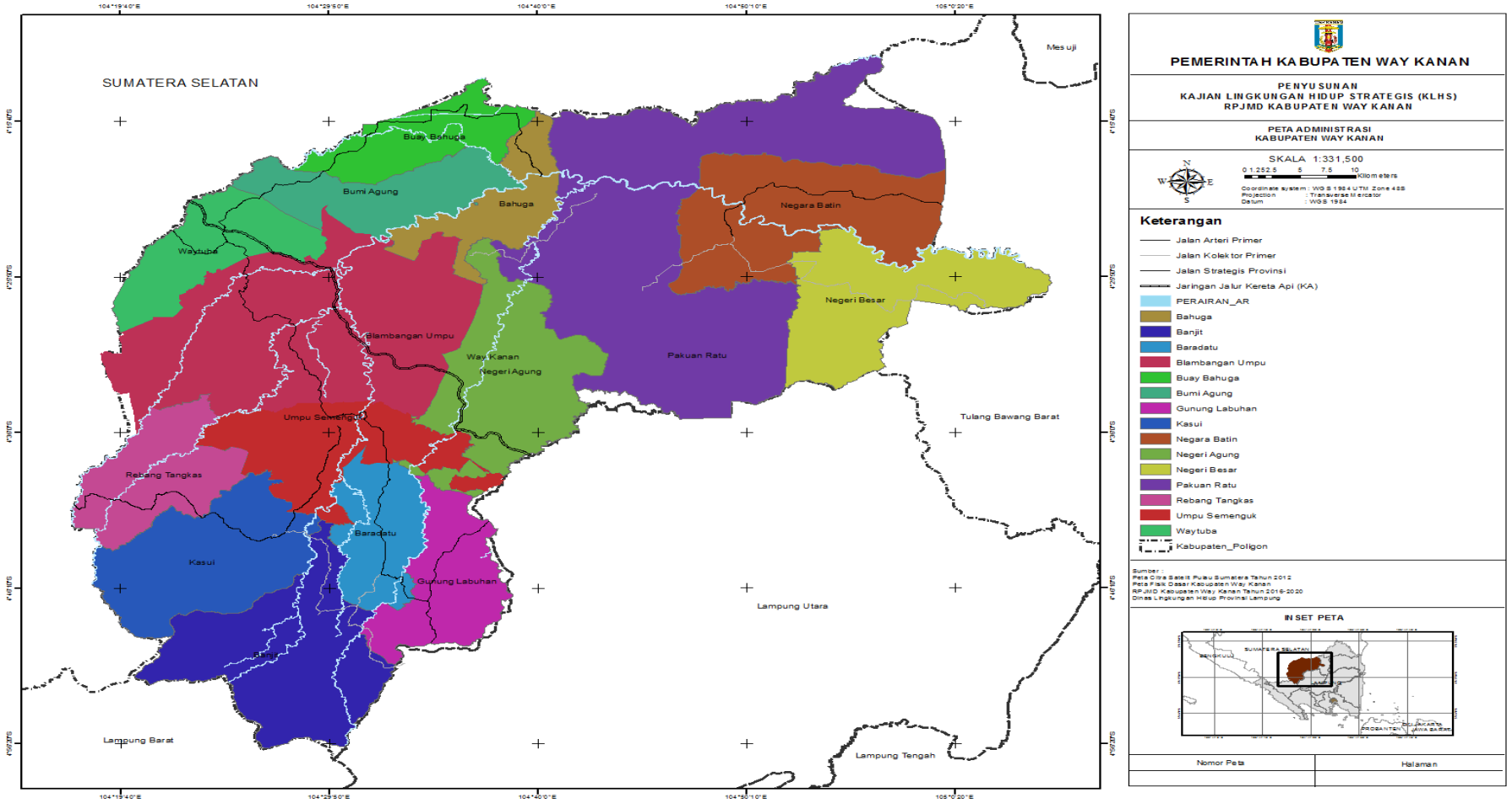


	2019		2020	
MANDIRI	0	0.00%	0	0.00%
MAJU	3	1.36%	20	9.05%
BERKEMBANG	134	60.63%	180	81.45%
TERTINGGAL	78	35.29%	21	9.50%
SANGAT TERTINGGAL	6	2.71%	0	0.00%

STATUS IDM KABUPATEN / KOTA
BERKEMBANG
Nilai 0.6490

Dari 221 kampung, pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi kampung dengan kategori sangat tertinggal, kampung tertinggal sudah berkurang dari 78 kampung menjadi hanya 21 kampung, dan kampung berkembang juga meningkat dari semula 134 kampung meningkat menjadi 180 kampung, serta kampung kategori maju sudah bertambah menjadi 20 kampung dari sebelumnya hanya 3 kampung.

GAMBAR II.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN WAY KANAN



Sumber: *KLHS RPJMD KAB. WAY KANAN 2021-2026*

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Dengan luas wilayah 392.163 Ha, Kabupaten Way Kanan menurut tutupan lahannya terdiri dari tutupan Permukiman Perkebunan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Semak, Sawah, Savana, Sungai, Semak Belukar, Tanah Terbuka, HTI, Hutan Lahan Kering Sekunder.

Berdasarkan data yang diterima, Pertanian Lahan Kering merupakan jenis tutupan lahan paling luas yaitu sekitar 114.437,64 Ha, sedangkan Hutan Tanaman Industri dan tanah terbuka merupakan tutupan lahan paling kecil yaitu seluas 776,48 Ha dan 659,77 Ha.

2.1.1.3 Topografi

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) unit topografis, yaitu: daerah topografis berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin.

Topografi Kabupaten Way Kanan terdiri dari Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450–1500 m dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh hutan vegetasi primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain Bukit Barisan dan Bukit Pesagi. Bentuk medan topografi di Sebelah barat berbukit-bukit, kurang dari 7% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan sedangkan sebelah timur lebih kurang 93% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar berupa sawah serta perkebunan dataran rendah.

Bentang alam daerah Kabupaten Way Kanan juga dapat dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0–15° mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15–25° memilki sebaran kurang lebih 20,2 % dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25-40° memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450–1500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncak tonjolannya ada

pada Bukit Punggur (1700 m), Daerah Kecamatan Banjit dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Remas (1600 m) dan Bukit Duduk (1500 m).

Sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Way Kanan memilki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2019 tercatat pada bulan Oktober, sebesar 35,1 derajat celsius dan terendah pada bulan Agustus, sebesar 22,3 derajat celsius. Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada bulan November dengan 28,6 derajat celsius dan terendah pada bulan Juii dan Agustus dengan 26,5 derajat celsius. Curah hujan tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada bulan Februari dengan 980 mm3.

2.1.1.4 Geologi

Bentang alam Kabupaten Way Kanan secara geologis didominasi oleh grup dataran tufa masam. Grup lain yang terdapat adalah grup dataran, aluvial, volkan. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam datar sampai berkelompok. Kelompok dataran datar hingga bergelombang terdapat pada luasan yang relatif sempit ditemukan di bagian barat wilayah berbatasan dengan grup volkan. Kelompok aluvial dijumpai pada lembah-lembah sungai utama yang mengaliri wilayah ini. Grup volkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk spesifik kerucutnya dibangun oleh lava yang berselang-seling dengan bahan proklastik terdapat pada bagian Barat Daya.

Dari literatur dan peta geologi dapat diinventarisir bahwa bahan tambang utama yang ada di Way Kanan adalah mineral batuan diantaranya: potensi andesit diperkirakan sebesar 176,9 juta m^3 terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Way Tuba, Banjit, Kasui dan Baradatu. Radiosit diperkirakan sebesar 3 juta m^3, Marmer 15,8 juta m^3, Benthonite 60 juta m^3, Kaolin 7,5 juta m^3, Tanah Liat, Gamping dan Phospat terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan potensi tufa 123,6 juta m^3 di Blambangan Umpu dan Baradatu. Pasir Batu 1,3 juta m^3 di Baradatu, Banjit dan Blambangan Umpu. Kandungan bahan galian Besalt diperkirakan sebesar 0,4 juta m^3 di Banjit.

2.1. 1.5 Hidrologi

Kabupaten Way Kanan terdapat cukup banyak sungai. Sungai–sungai tersebut sebagian besar mengalir dari arah barat yang berbukit – bukit menuju ke arah timur yang landai. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigrasi. Selain itu juga memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor perikanan dan pertanian. Keberadaan sungai–sungai tersebut sangat penting bagi masyarakat Way Kanan yaitu menjadi sumber air utama, terutama ketika kekeringan melanda. Oleh sebab itu menjaga kelestarian sungai perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari persoalan daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

1. Menjaga daerah *catcment area*, sehingga air hujan masih tetap tertangkap oleh hutan alam.
2. Selain pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lebih bijaksana.
3. Menjaga kualitas air sungai, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat setempat yang mengandalkan sungai sebagai sumber tangkapan ikan.

Wilayah Kabupaten Way Kanan dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Way Umpu, Way Giham, Way Besai, Way Tahmi dan Way Kanan. Sungai-sungai sebagian besar berfungsi sebagai drainase makro wilayah menuju laut Jawa di pantai Timur Lampung. Sungai-sungai tersebut merupakan bagian dari DAS Tulang Bawang dengan total Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 339.500 Ha. Way Umpu memiliki sub DAS terbesar (91.300 Ha) dengan pola aliran *dendritik* dan mengaliri wilayah-wilayah Kecamatan Banjit, Bahuga, Blambangan Umpu, Kasui dan Pakuan Ratu. DAS kritis berada di sekitar wilayah Timur Kabupaten Way Kanan yang mencakup kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu.

Tabel II.2. Panjang Sungai dan Luas DAS di Kabupaten Way Kanan

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Catchment Area /Daerah Aliran (km^2)
1	Way Kanan	51	1.198
2	Way Pisang	50	386
3	Way Umpu	100	1.179
4	Way Besai	113	870
5	Way Giham	80	506
6	Way Tahmi	60	550

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2021

2.1. 1.6 Klimatologi

Secara umum Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua tipe iklim, yaitu pada bagian barat memiliki curah hujan cukup tinggi, berkisar antara 3000 mm– 500 mm per tahun dan bagian timur memiliki curah hujan yang cukup rendah, berkisar antara 2000 mm – 3000 mm per tahun dengan temperatur rata-rata 26°-30°C.

Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 3 iklim, yaitu:

1. Iklim B : Bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan
   Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu, dan Bahuga.
2. Iklim C1 : Bulan basah 5-6 bulan, bulang kering < 2 bulan
   Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Banjit, dan Baradatu
3. Iklim C2 : Bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulan
   Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya.

Musim hujan berlangsung dari Bulan November sampai dengan Bulan Mei, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Bulan Juni sampai Bulan Agustus. Bulan agak kering adalah Bulan September sampai Bulan Oktober. Jumlah hari hujan di musim penghujan rata-rata tiap bulannya 10–16 hari dan di musim kemarau 4–8 hari.

2.1.1. 7 Penggunaan Lahan

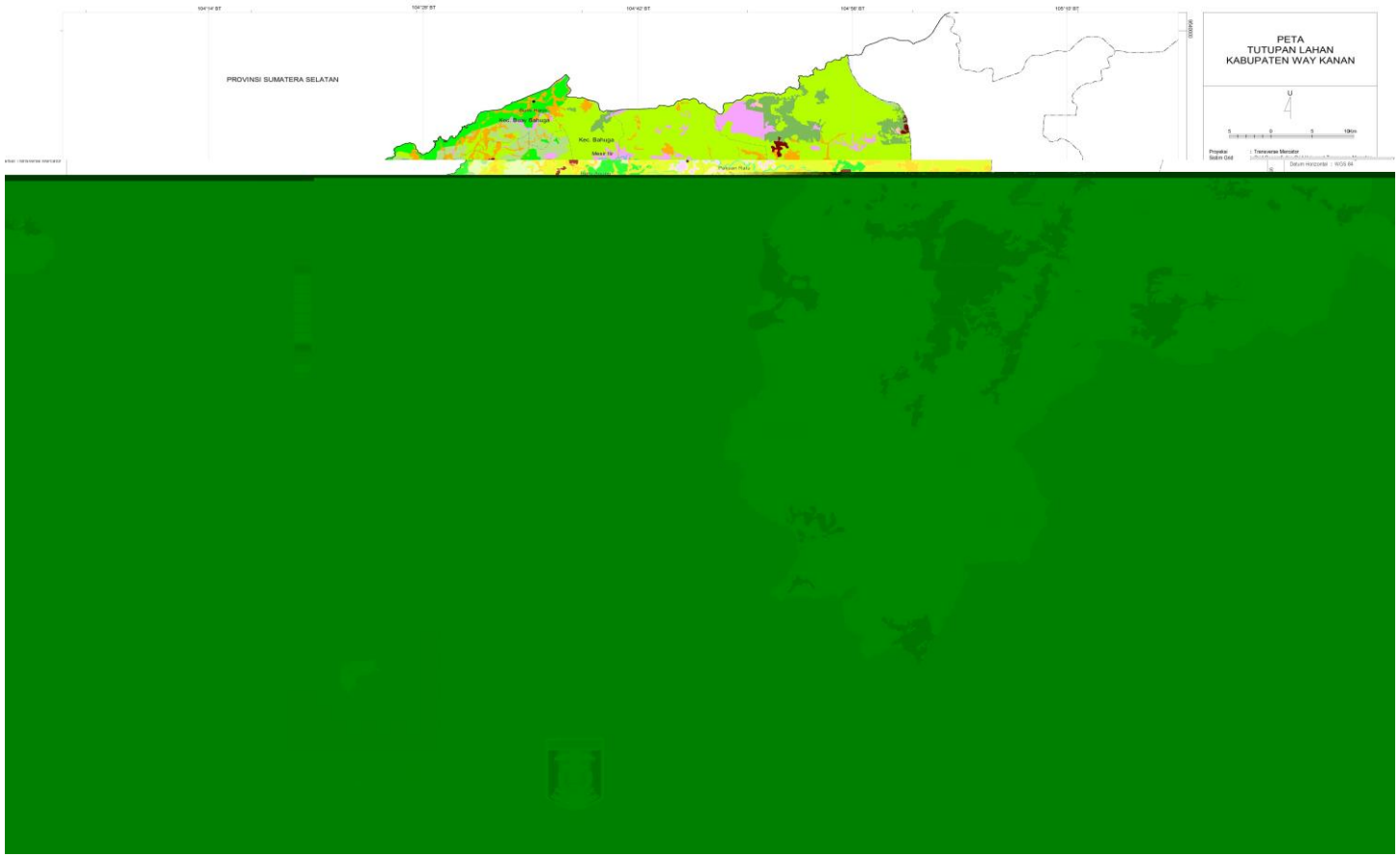
Dengan luas wilayah 3.921,63 Km^2, Kabupaten Way Kanan menurut pola tata guna lahannya dibagi menjadi berbagai kegiatan antara lain; permukiman, jasa, pariwisata, industri, sawah, pertanian lahan kering, kebun campuran, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan, semak belukar, situ/waduk, pertambangan, tanah kosong dan lain-lain yang tidak diidentifikasi. Selengkapnya setiap tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.3. Luas Tutupan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Way Kanan

No	tutupan	HTI	Pemukiman	Per Lhn Kering	Per Lhn Kering campr semak	Savana	sawah	sungai	tanah terbuka	Hutan Lahan Kering Sekunder	semak/ belukar	Perkebunan
1	Kec. Bahuga	1.000	1135.576	5403.26	1.330	1146.016	642.308	61.810	11.537	3636.114	2249.587	
2	Kec. Banjit		481.201	5260.849	13682.271		4269.16					
3	Kec. Baradatu		1073.821	1121.928	7770.651	39.078	2444.382				0.227	
4	Kec. Blambangan Umpu		7905.182	9336.727	28310.818	7941.158	51.208	239.771			17364.73	
5	Kec. Buay Bahuga		1283.101	969.277	1593.581		2392.204				226.004	
6	Kec. Bumi Agung	655.532	2908.982	6730.748	5169.962	312.888	3272.208	142.21	132.08		342.481	191.814
7	Kec. Gunung Labuhan		237.44	3788.639	9245.422		9.648					
8	Kec. Kasui		823.958	29.988	15437.142		113.141			735.243	1039.303	
9	Kec. Negara Batin		3605.944	25642.757	608.284	3789.956	152.47	173.591	355.99		3712.635	4254.774
10	Kec. Negeri Agung	98.565	2401.263	5149.863	3130.657	2893.22					3745.028	5800.82
11	Kec. Negeri Besar		1234.43	16330.27	566.708	650.637		242.679			1145.527	
12	Kec. Pakuan Ratu	21.382	4327.72	30216.837	1013.111	14664.729	187.259		94.580		6176.323	5648.32
13	Kec. Rebang Tangkas		378.908	106.775	13295.993		135.582					
14	Kec. Way Tuba		1905.646	4349.721	9270.349	152.578	462.554	34.299	65.586		4018.476	893.400
		776.479	29703.172	114437.639	109096.279	31590.260	14132.124	894.360	659.773	4371.357	40020.321	16789.128

Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031

GAMBAR II.2 PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN WAY KANAN



Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Dengan luas wilayah 392.163 Ha, Kabupaten Way Kanan menurut penggunaan lahannya terdiri dari Penggunaan Sawah, Pekarangan, Peladangan, Perkebunan, Kolam, Tambak, Rawa, Way Kanan, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Tidak Diusahakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di Wilayah Provinsi Lampung. Kehutanan Way Kanan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hampir seluruh hutan berada di wilayah register, kecuiali satu hutan produksi pada Giham Tahmi. Luas kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan seluas 89.286,42 Hektar yang terdiri dari 22.289,10 Hektar Kawasan lindung 66.997,32 hektar kawasan hutan produksi, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.4 LUAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN WAY KANAN

NO.	KECAMATAN	JENIS HUTAN	
		HUTAN LINDUNG (HEKTAR)	HUTAN PRODUKSI (HEKTAR)
1	Register 24 Bukit Punggur Berbatasan Langsung dengan: Kec. Banjit Kec. Kasui Kec. Rebang Tangkas Lampung Barat, Oku Selatan	20.831,00	-
2	Register 41 Bukit Saka Berbatasan Langsung dengan: Kec. Way Tuba Kec. Rebang Tangkas Kec. Blambangan Umpu Oku Timur	1.116,80	-
3	Register 42 Rebang Berbatasan Langsung dengan: Kec. Blambangan Umpu Kec. Negeri Agung Kec. Bumi Agung	-	13.151,50
4	Register 44 Sungai Muara Dua Berbatasan Langsung dengan: Kec. Negara Batin Kec. Pakuan Ratu Tulang Bawang Barat	-	21.172,58
5	Register 46 Way Hanakau Berbatasan Langsung dengan: Kec. Pakuan Ratu Kec. Negara Batin Kec. Negeri Besar Lampung Utara	-	20.017,29

6	Non Register Giham Tahmi Berbatasan Langsung dengan: Kec. Blambangan Umpu Kec. Rebang Tangkas	-	12.655,95

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Way Kanan yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, menyebabkan wikayah Kabupaten Way Kanan cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar.

Sementara itu ditinjau dari kerawanan bencananya, maka setidaknya terdapat dua kerawanan bencana di Kabupaten Way Kanan, yaitu kerawanan banjir dan longsor/gerakan tanah.

1. Indeks Resiko Bencana

   Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRB ini dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Semakin besar nilai Indek Resiko Bencana maka semakin besar potensi kerugian akibat dari bencana yang terjadi.

   Adapun sebagai gambaran, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Way Kanan seperti dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel. II 5 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Indeks Resiko Bencana
1	2016	131,19
2	2017	131,19
3	2018	131,19
4	2019	131,19
5	2020	131,19

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

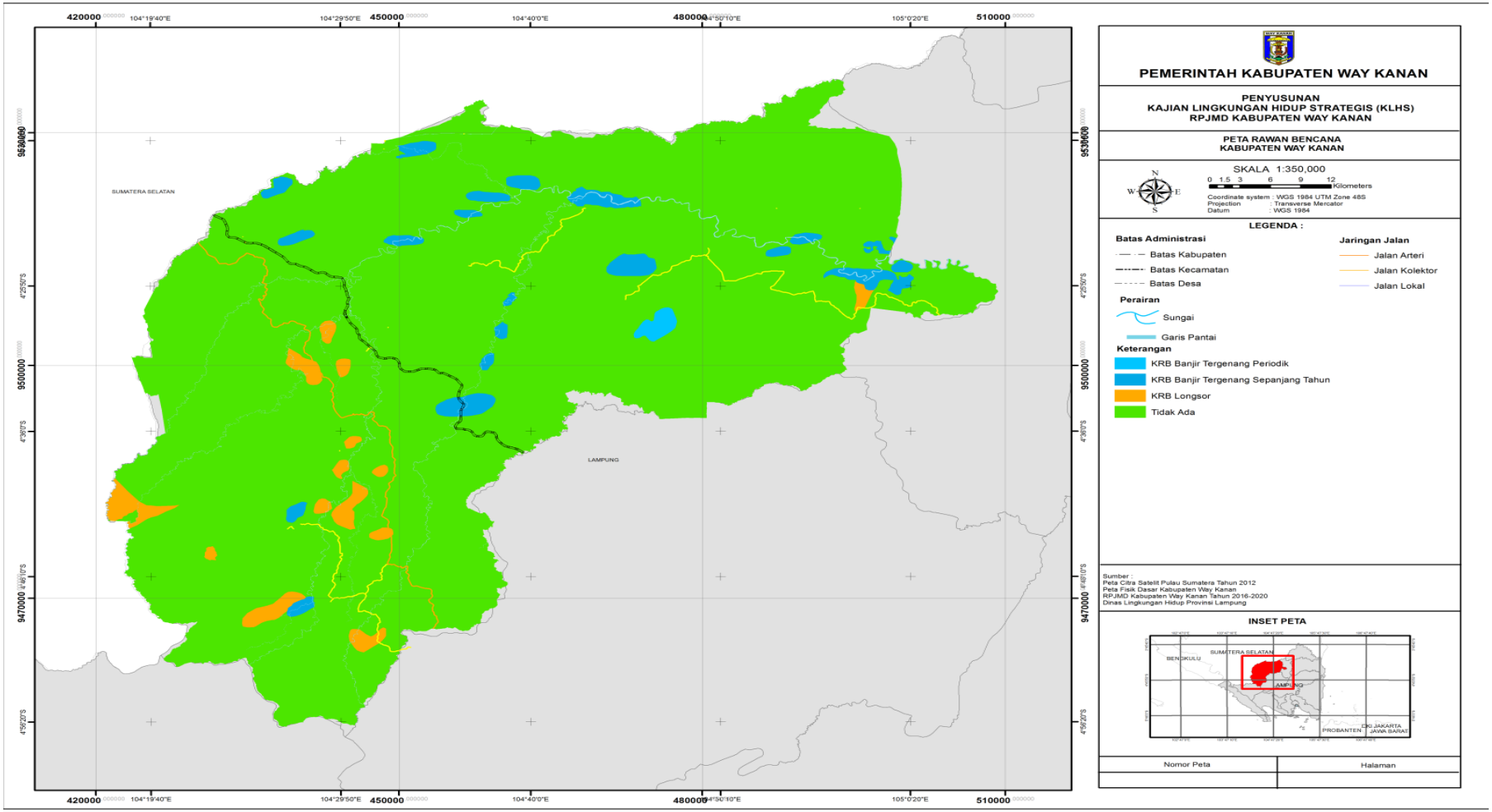
2. Kerawanan Banjir

   Berdasarkan catatan riwayat banjir serta data yang diperoleh dapat diidentifikasi sedikitnya terdapat 3 lokasi yang secara rutin mengalami banjir tahunan yaitu di Kecamatan Negeri Besar dan Kecamatan Negara Batin serta 1 lokasi tergenang periodik di Kecamatan Pakuan Ratu pada saat curah hujan tinggi.

3. Kerawanan Longsor/Gerakan Tanah

   Daerah potensi rawan longsor hanya terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Rabang Tangkas, dan Negeri Agung dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi.

GAMBAR II.3 PETA KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN WAY KANAN



Sumber : *KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026*

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pertanian

Kegiatan sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda/barang biologis (hidup) yang didapat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha lainnya. Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha bercocok tanam, pemeliharaan ternak, budidaya perikanan, perkebunan dan kehutanan.

b. Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub sektor ini meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, sayur-sayuran serta buah-buahan. Jenis tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani adalah padi, sebagai bahan pangan pokok. Selain padi tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Way Kanan adalah Jenis Palawija, yaitu Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah.

Berikut ini adalah gambaran luas panen dan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Way Kanan.

TABEL II.6 LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016- 2020

NO.	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	PADI										
	A. PADI SAWAH	39.812	216.378	42.519	232.536	42.519	232.536	46.606	256.658	38922	171.823
	B. GOGO / LADANG	6.280	22.727	4.348	13.396	4.348	13.396	8.660	23.808	3982	17.584
2.	PALAWIJA										
	A. JAGUNG	20.749	100.861	28.749	129.313	28.749	129.313	15.804	85.485	25525	114.676
	B. UBI KAYU	13.179	366.459	10.076	428.190	10.076	428.190	10.870	241.913	17.375	470.100
	C. UBI JALAR	131	1.233	126	1.186	126	1.186	44	876	70	911
	D. KACANG KEDELAI	97	125	18	23	18	23	459	605	0	0
	E. KACANG HIJAU	246	221	146	131	146	131	7	6	20	202
	F. KACANG TANAH	723	2.840	680	2.671	680	2.671	234	322	15	20.89

Sumber :Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2019, Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Untuk komoditas tanaman pangan padi banyak dihasilkan di Kecamatan Banjit, Bumi Agung, Bahuga dan Buay Bahuga. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana pendukung berupa irigasi, *rice milling plant*, dan suplesi way besai. Untuk komoditas jenis palawija yang mayoritas dibudidayakan adalah jagung dengan sentra produksi di Kecamatan Baradatu, Blambangan Umpu, Rebang Tangkas, Banjit dan Pakuan Ratu. Kemudian tanaman palawija mayoritas lainnya adalah Ubi Kayu dengan sentra produksi di Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Negeri Agung dan Blambangan Umpu.

c. Subsektor Perkebunan

Sub sektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar sedangkan tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan, atau oleh rakyat yang luas arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar. Berdasarkan kondisinya, Kabupaten Way Kanan mempunyai keragaman dan potensi tanaman perkebunan yang sangat spesifik yaitu perkebunan karet, kopi, sawit, kakao, dan lada.

Gambaran umum sektor perkebunan di Kabupaten Way Kanan berdasarkan potensi yang ada adalah sebagai berikut:

TABEL II.7 JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN TAHUN 2016-2020

NO.	KOMODITAS	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1.	Kopi	19.591	7.827	19.445	8.822	21.957	8.722	21.957	8.722	28.303	8.684
2.	Sawit	6.096	15.126	6.267	15.317	13.773	15.574	13.773	15.574	13.765	26.664
3.	Kakao	1.456	3.518	1.419	3.572	1.428	642	1.428	642	1.389	622
4.	Lada	3.872	413	3.795	482	9.171	1.892	9.171	1.892	9.171	1.592
5.	Karet	43.455	90.160	43.465	93.421	30.987	25.580	30.987	25.580	27.349	51.653
		74.470	**529.631**	**74.391**	**121.614**	**77.315**	**52.410**	**77.315**	**52.410**	**79.977**	**89.215**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

TABEL II.8 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN KARET PER KECAMATAN TAHUN 2016-2021

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1	Blambangan Umpu	6.500	12.400	6.500	12.880	1.837	1.206	1.837	1.206	5.588	6.897
2	Banjit	615	1.233	625	1.251	1.005	764	1.005	764	725	1.522
3	Kasui	1.165	2.550	1.165	2.613	3.101	2.785	3.101	2.785	2.189	3.831
4	Baradatu	525	1.073	525	988	423	117	423	117	716	1.243
5	Bahuga	4.520	11.100	4.520	10.725	1.818	1.198	1.818	1.198	3.701	6.890
6	PakuanRatu	9.200	20.160	9.200	19.500	3.314	2.223	3.314	2.223	410	5.519
7	NegeriAgung	3.850	9.900	3.850	9.800	3.397	3.473	3.397	3.473	3.725	6.829
8	Way Tuba	9.800	15.000	9.800	19.600	3.570	2.154	3.570	2.154	3.243	6.707
9	Negara Batin	900	1.960	900	1.950	696	470	696	470	955	1.797
10	RebangTangkas	730	1.500	730	1.458	866	523	866	523	1.108	1.786
11	GunungLabuhan	540	1.044	540	952	2.859	2.821	2.859	2.821	559	951
12	NegeriBesar	390	840	390	832	2.670	2.540	2.670	2.540	626	955
13	BumiAgung	2.230	5.100	2.230	4.950	3.227	3.226	3.227	3.226	2.014	2.942
14	BuayBahuga	2.490	6.300	2.490	5.913	2.204	2.080	2.204	2.080	1.790	3.784
JUMLAH		**43.455**	**90.160**	**43.465**	**93.421**	**30.987**	**25.580**	**30.987**	**25.580**	**27.349**	**51.653**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah produksi karet yang cukup signifikan, pada tahun 2016 jumlah produksi karet mencapai 90.160 Ton, tahun 2017 meningkat menjadi 93.421 Ton. Namun pada tahun 2018 produksi karet menurun drastis menjadi 25.580 Ton, Ini terjadi karena berkurangnya luas Areal sebagai dampak dari adanya alih fungsi lahan ke komoditas lainnya pada tahun 2017 dengan luas areal 43.465 Ha menjadi 30.987 Ha pada tahun 2018. Perkebunan karet termasuk dalam sektor unggulan di Kabupaten Way Kanan yang layak dikembangkan. Karet masih menjadi primadona tanaman perkebunan di Way Kanan. Pada tahun 2020, produksi karet mengalami kenaikan mencapai 51.653 ton dengan luas area tanam 27.349 Ha. Dengan jumlah produksi karet yang cukup banyak, Pemerintah Daerah harus mampu membina dan memperhatikan para petani karet, agar hasil karetnya mampu bersaing dipasaran internasional.

Kemudian untuk luas areal dan jumlah produksi kopi dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini:

TABEL II.9 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN KOPI PER KECAMATAN TAHUN 2016-2020

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1.	Blambangan Umpu	1,92	724	1.900	819	1.443	606	1.443	606	2.150	830
2.	Banjit	6,87	2,934	6.950	3.325	7.278	2.948	7.278	2.948	8.017	3.310
3.	Kasui	6,23	2,565	6.230	2.925	5.076	1.948	5.076	1.948	6.525	2.611
4.	Baradatu	480	148	380	135	358	129	358	129	700	193
5.	Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pakuan Ratu	165	27	70	11	11	4	11	4	310	100
7.	Negeri Agung	200	30	190	33	145	39	145	39	270	36
8.	Way Tuba	260	56	245	50	77	24	77	24	6707	84
9.	Negara Batin	53	11	20	4	-	-	-	-	91	-
10.	Rebang Tangkas	2,3	966	2.370	1.110	5.349	2.091	5.349	2.091	2.242	1.104
11.	Gunung Labuhan	1,1	360	1.080	410	2.220	933	2.220	933	1.268	412
12.	Negeri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Bumi Agung	13	3	10	1	-	-	-	-	23	4
14.	Buay Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**19,591**	**7,827**	**19.445**	**8.822**	**21.957**	**8.722**	**21.957**	**8.722**	**28.303**	**8.684**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Terjadinya kenaikan jumlah produksi kopi dari tahun 2016 sebesar 7.827 Ton menjadi 8.684 Ton pada tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong sektor ini untuk meningkatkan hasil produksinya.

Selanjutnya Sektor perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit, dengan kondisi sebagai berikut:

TABEL II.10 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN SAWIT PER KECAMATAN TAHUN 2016-2020

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PROD5UKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1	Blambangan Umpu	340	750	390	800	570	231	570	231	287	600
2	Banjit	78	182	78	182	566	271	566	271	3972	5926
3	Kasui	195	490	215	518	647	379	647	379	165	331
4	Baradatu	93	218	93	218	465	80	465	80	90	200
5	Bahuga	1,435	3,591	1.435	3.591	2.247	2.708	2.247	2.708	1.524	3.715
6	Pakuan Ratu	400	970	400	970	1.266	1.992	1.266	1.992	410	886
7	Negeri Agung	145	338	145	338	483	96	483	96	138	297
8	Way Tuba	232	572	232	572	745	751	745	751	365	923
9	Negara Batin	83	163	83	163	497	117	497	117	69	150
10	Rebang Tangkas	580	1,605	645	1.680	742	684	742	684	4272	7289
11	Gunung Labuhan	213	500	213	500	897	1.131	897	1.131	209	514
12	Negeri Besar	113	240	113	240	1.243	1.389	1.243	1.389	101	225
13	Bumi Agung	1,615	4,108	1.630	4.134	2.187	4.458	2.187	4.458	1.597	4.032
14	Buay Bahuga	574	1,4	595	1.413	1.217	1.287	1.217	1.287	566	1.576
JUMLAH		**6,096**	**15,126**	**6.267**	**15.317**	**13.772**	**15.574**	**13.772**	**15.574**	**13.765**	**26.664**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Produksi tanaman perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 sebesar 15.126 Ton sampai dengan tahun 2020 sebesar 26.664 Ton, dengan luas lahan pada tahun 2016 seluas 6.096 Ha, menjadi 13.765 Ha pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit dapat dijadikan salah satu komoditas unggulan daerah di Kabupaten Way Kanan.

Salah satu pengembangan dan pembudidayaan komoditas perkebunan yang juga banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Way Kanan adalah perkebunan kakao dengan kondisi sebagai berikut:

TABEL II.11 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN KAKAO PER KECAMATAN TAHUN 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		TAHUN 2020	
		Luas areal (ha)	Jumlahproduksi (ton)	Luas areal (ha)	Jumlahproduksi (ton)	Luas areal (ha)	Jumlahproduksi (ton)	Luas areal (ha)	Jumlahproduksi (ton)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1.	Blambangan Umpu	87	203	87	203	88	45	88	45	92	45
2.	Banjit	75	151	75	154	40	18	40	18	70	31
3.	Kasui	200	578	195	613	147	72	147	72	171	69
4.	Baradatu	65	150	65	156	8	5	8	5	60	19
5.	Bahuga	50	112	50	112	71	31	71	31	5	13
6.	Pakuan Ratu	63	149	62	135	56	24	56	24	69	30
7.	Negeri Agung	77	160	75	174	76	33	76	33	68	23
8.	Way Tuba	135	297	135	311	435	177	435	177	114	55
9.	Negara Batin	79	168	67	125	72	29	72	29	79	30
10.	Rebang Tangkas	195	595	190	630	309	150	309	150	178	86
11.	Gunung Labuhan	80	165	80	180	27	15	27	15	114	53
12.	Negeri Besar	65	138	63	125	63	25	63	25	70	33
13.	Bumi Agung	195	446	185	432	36	18	36	18	214	98
14.	Buay Bahuga	90	210	90	224	-	-	-	-	85	37
JUMLAH		**1,456**	**3,518**	**1.419**	**3.572**	**1.428**	**642**	**1.428**	**642**	**1.389**	**622**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Produksi tanaman kakao di Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 622 Ton dengan luas lahan 1.389 Ha, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar, menjadi sebesar 3,518 Ton dengan luas lahan 1.456. Perkebunan Kakao termasuk dalam sektor yang layak dikembangkan di Kabupaten Way Kanan. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah terhadap upaya-upaya yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi kakao.

Sektor perkebunan selanjutnya yang merupakan unggulan di Kabupaten Way Kanan adalah lada. Luas areal dan jumlah produksi Lada di Kabupaten Way Kanan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

TABEL II.12 LUAS AREAL DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN LADA PER KECAMATAN TAHUN 2016-2020

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1	Blambangan Umpu	310	26	310	35	289	49	289	49	606	40
2	Banjit	315	33	315	35	522	114	522	114	763	134
3	Kasui	700	110	730	112	1.976	443	1.976	443	2.235	450
4	Baradatu	405	47	380	45	1.599	380	1.599	380	1.400	96
5	Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Pakuan Ratu	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-
7	Negeri Agung	98	8	90	11	-	-	-	-	241	50
8	Way Tuba	102	9	95	12	45	13	45	13	225	50
9	Negara Batin	7	0	-	-	-	-	-	-	11	1
10	Rebang Tangkas	385	50	400	55	770	194	770	194	930	125
11	Gunung Labuhan	1,55	131	1.475	177	3.966	699	3.966	699	2.759	646
12	Negeri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bumi Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Buay Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**3,872**	**413**	**3.795**	**482**	**9.171**	**1.892**	**9.171**	**1.892**	**9.171**	**1.592**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Produksi tanaman perkebunan lada pada tahun 2016 produksi sebesar 413 ton dengan luas areal tanam sebesar 3.872 Ha, manjadi sebesar 1.592 Ton dengan luas areal sebesar 9.171 Ha pada tahun 2020.

d. Perikanan

Sub sektor ini meliputi segala pengusahaan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya di sungai maupun di air tawar. Termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan, pengasapan atau pengeringan ikan yang dilakukan oleh nelayan atau rumah tangga. Potensi Perikanan di Kabupaten Way Kanan sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Way Kanan dilalui oleh sungai sungai besar yaitu Sungai Way Kanan, Way Umpu, Way Pisang, Way Besai, Way Tahmi dan Way Giham. Selain dilalui sungai sungai besar sebagai sumber air, ketersediaan pakan juga cukup melimpah yaitu dedak dan katul karena lokasi persawahan dekat dengan sentra perikanan.

Produksi Perikanan di Kabupaten Way Kanan ditunjang oleh perikanan budidaya kolam, dan perikanan perairan umum. Jumlah produksi perikanan dari tahun 2016 (1.583,98 ton) terus mengalami penurunan sampai dengan 2017 (1.498,54 ton). Namun terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 (1.909,66 ton) dengan jumlah produksi perikanan budidaya kolam sebesar 1.710,95 ton dan Jumlah produksi perikanan perairan umum sebesar 198,71 ton. Secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.13 Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	PRODUKSI IKAN (TON)				JUMLAH TOTAL
		PERIKANAN BUDIDAYA			PERIKANAN PERAIRAN UMUM	
		KOLAM	KERAMBA	MINA PADI		
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	1.398,23	-	-	148,60	1.583,98
2	2017	1.442,80	-	-	55,75	1.498,54
3	2018	1.533,28	-	-	195,73	1.729,01
4	2019	1.619,43	-	-	197,73	1.817,14
5	2020	1.710,95	-	-	198,71	1.909,66

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2018
Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019,2020

e. Peternakan

Sub sektor ini meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dimanfaatkan hasilnya, baik dilakukan oleh perorangan (rakyat) maupun perusahaan peternakan. Komoditas ternak di Kabupaten Way Kanan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, unggas (buras, petelur, pedaging) dan itik.

TABEL II.14 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor/Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	33.735	35.825	35.825	37.831	38.092
2	Kerbau	970	979	979	999	1.018
3	Kambing	52.160	52,264	52,264	52.473	52.682
4	Domba	1.641	1,661	1,661	1.744	1.742
5	Babi	5.840	7,256	7,256	7.375	7.484
6	Ayam Kampung	1.938.761	1,977,536	1,977,536	2.462.934	2.220.295
7	Ayam Petelur	87.364	88,252	88,252	116.060	612.061
8	Ayam Pedaging	554.559	566,068	566,068	470.800	185.494
9	Itik	26.629	27,348	27,348	28.230	29.141

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Dari segi potensi keunggulan daerah hewan ternak tersebut sangat layak dikembangkan, mengingat permintaan konsumsi daging sapi dan kambing terus meningkat tiap tahunnya, untuk itu pemerintah kabupaten Way Kanan juga terus berupaya dalam mendorong peningkatan populasi ternak baik besar maupun kecil dalam rangka menjadikan sebagai lumbung ternak di Propinsi Lampung.

Produksi ternak di Kabupaten Way Kanan didominasi oleh kambing dan sapi potong. Selain dua komoditas tersebut, Way Kanan menjadi pemasok babi dengan target penjualan untuk pasar di luar Kabupaten (Tangerang dan Sumatra Selatan). Produksi daging sapi tahun 2020 sebesar 38.092 ekor sedangkan produksi kambing sebesar 52.682 ekor dan babi sebesar 7.484 ekor.

f. Potensi Pertambangan Kabupaten Way Kanan

Secara geologi, wilayah Kabupaten Way Kanan dibentuk oleh Formasi Kikim berumur Paleosen-Oligosen, Formasi Kasai berumur Pliosen-Plistosen dan Satuan Batuan Breksi Gunungapi-Tuf yang diendapkan pada periode Plistosen-Holosen.

Formasi Kikim merupakan satuan stratigrafi tertua di wilayah ini terdiri atas breksi gunungapi, tuf padu, tuf, lava, batupasir dan batulanau. Breksi gunungapi berwarna abu-abu kehijauan hingga ungu, berbutir kasar, terpilah buruk, dengan fragmen andesitik-basaltik menyudut berukuran mencapai 30 cm yang tertanam dalam matriks tufan; diduga merupakan breksi lahar. Tuf berwarna abu- abu kehijauan hingga ungu, padu dan berstruktur aliran. Lava bersusunan andesitik- basaltik. Batupasir berwarna abu-abu, kompak, berukuran butir menengah-kasar, berlapis baik dengan ketebalan 15-30 cm. Batulanau berwarna abu-abu hingga ungu, berlapis baik dengan ketebalan 30 cm, setempat mengandung lensa-lensa batubara. Formasi ini menempati sebagian kecil bagian utara wilayah tersebut dengan karakteristik telah mengalami ubahan hidrotermal dan termineralisasi terutama pada batuan piroklastiknya.

Formasi Kasai terdiri atas konglomerat, batu pasir kuarsa, batu lempung tufan dan tuf asam masif berbatu apung. Konglomerat dengan fragmen

berukuran menengah-kasar, terpilah buruk, berbentuk membundar tanggung terdiri atas batu apung, batuan gunung api terubah dan kuarsa. Batu pasir kuarsa berwarna kuning-putih, agak lunak dan mudah diremas, berukuran butir menengah-kasar, disusun oleh 90% kuarsa dan batu apung dengan struktur perlapisan silang-siur. Batu lempung tufan berwarna abu-abu kekuningan, sedikit terkonsolidasi, mengandung potongan-potongan gelas vulkanik dan kayu terkersikkan. Tuf berwarna putih kekuningan, mengandung batu apung dan masif, dengan struktur perlapisan silang siur. Lignit berupa sisipan-sisipan dan lensa-lensa di dalam satuan-satuan batu pasir dan batu lempung.

Satuan batuan breksi gunung api-tuf terdiri atas breksi lahar, lava dan tuf andesitik-basaltik. Breksi gunung api berwarna abu-abu kehitaman, terpilah buruk disusun oleh fragmen-fragmen menyudut lava andesit berukuran 0,5 - 150 cm. Lava basalt berwarna abu-abu kehitaman, afanitik dan porfiritik, dengan fenokris terdiri atas olivin dan plagioklas berukuran 0,4-1,0 cm. Tuf litik berwarna abu-abu kekuningan hingga coklat, terpilah buruk disusun oleh fragmen-fragmen menyudut berukuran 0,4-1,5 cm yang terdiri atas andesit, tuf, gelas vulkanik dan bahan-bahan karbonan. Tuf hibrid berwarna putih kekuningan, lunak dan mudah diremas, terpilah buruk, bentuk menyudut-membundar tanggung berukuran 0,4-1,0 cm terdiri atas andesit, basalt, gelas, besi oksida, dan bahan-bahan karbonan.

1). Sumberdaya Bahan Galian

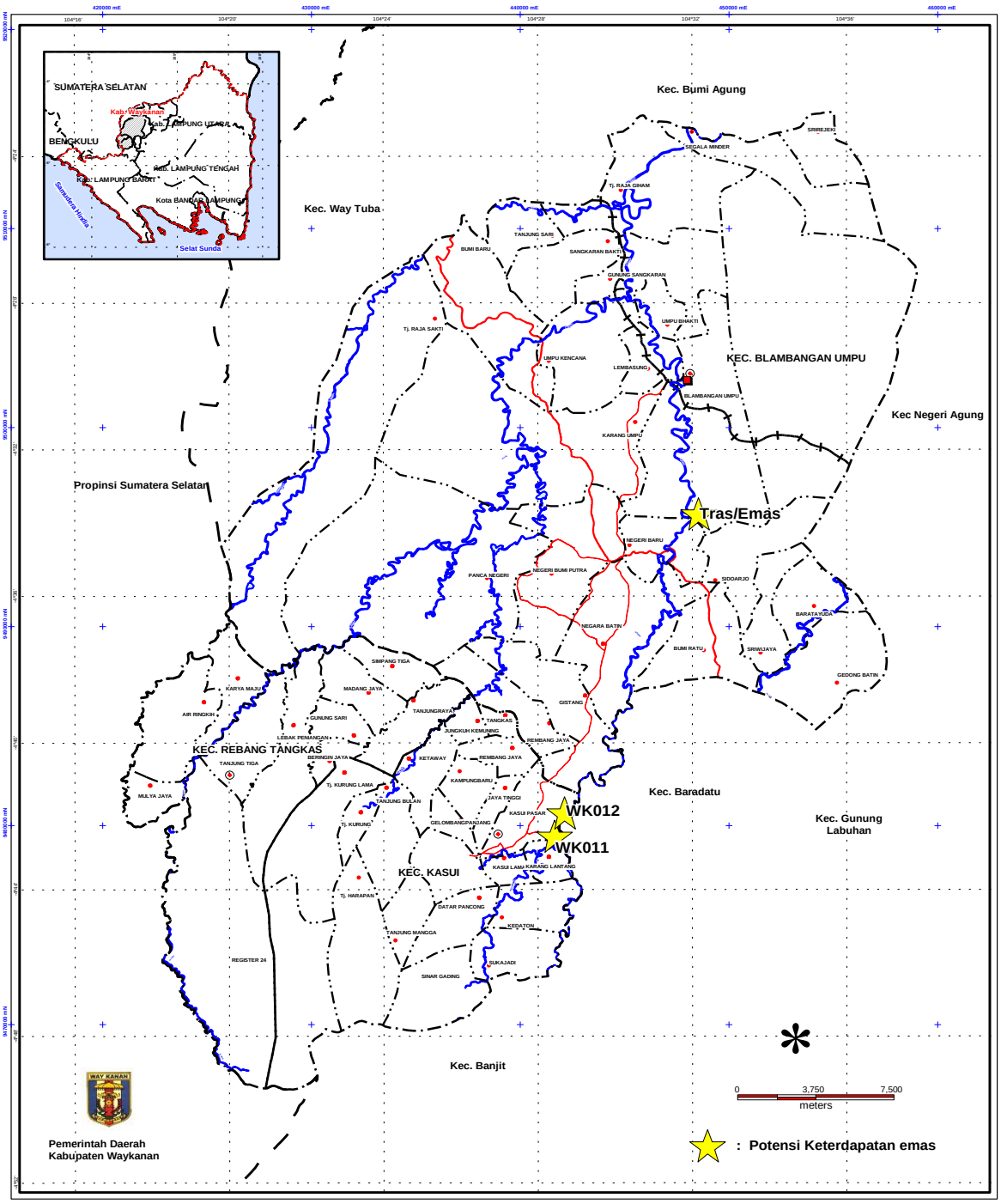
a. Emas

- **Lokasi di Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, dan Blambangan Umpu.**

Ditemukan bahan galian emas berupa cebakan sekunder (*placer*) pada aliran Way Umpu, yang terperangkap di dalam endapan aluvial terdiri dari aneka komponen batuan hasil rombakan formasi-formasi batuan yang lebih tua. Di antara komponen-komponen aluvium tersebut teramati keberadaan bongkah-bongkah urat kuarsa *smoky* dengan bentuk menyudut–membundar tanggung, berstruktur *banded* atau *crustification*. Selain itu dari data disebutkan bahwa di Lokasi Kecamatan Blambangan Umpu ditemukan emas plaser dengan jumlah

sumberdaya tertunjuk 350.000 ton bijih dan 0.354086 ton logam, dan sumberdaya terukur 182.587 ton bijih, 0.184718 ton logam, dengan rata rata kadar Au = 2,6 gr/ton.

Gambar II.4 Peta sebaran keterdapatan sumberdaya mineral emas di Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, dan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan



➢ Kecamatan Baradatu dan Banjit

Di wilayah Kecamatan Baradatu dan Banjit. Sumber emas dilaporkan berasal dari daerah-daerah terubah terpropilitkan yang diterobos urat-urat kuarsa mengandung sulfida pirit. Daerah-daerah tersebut diduga berpotensi

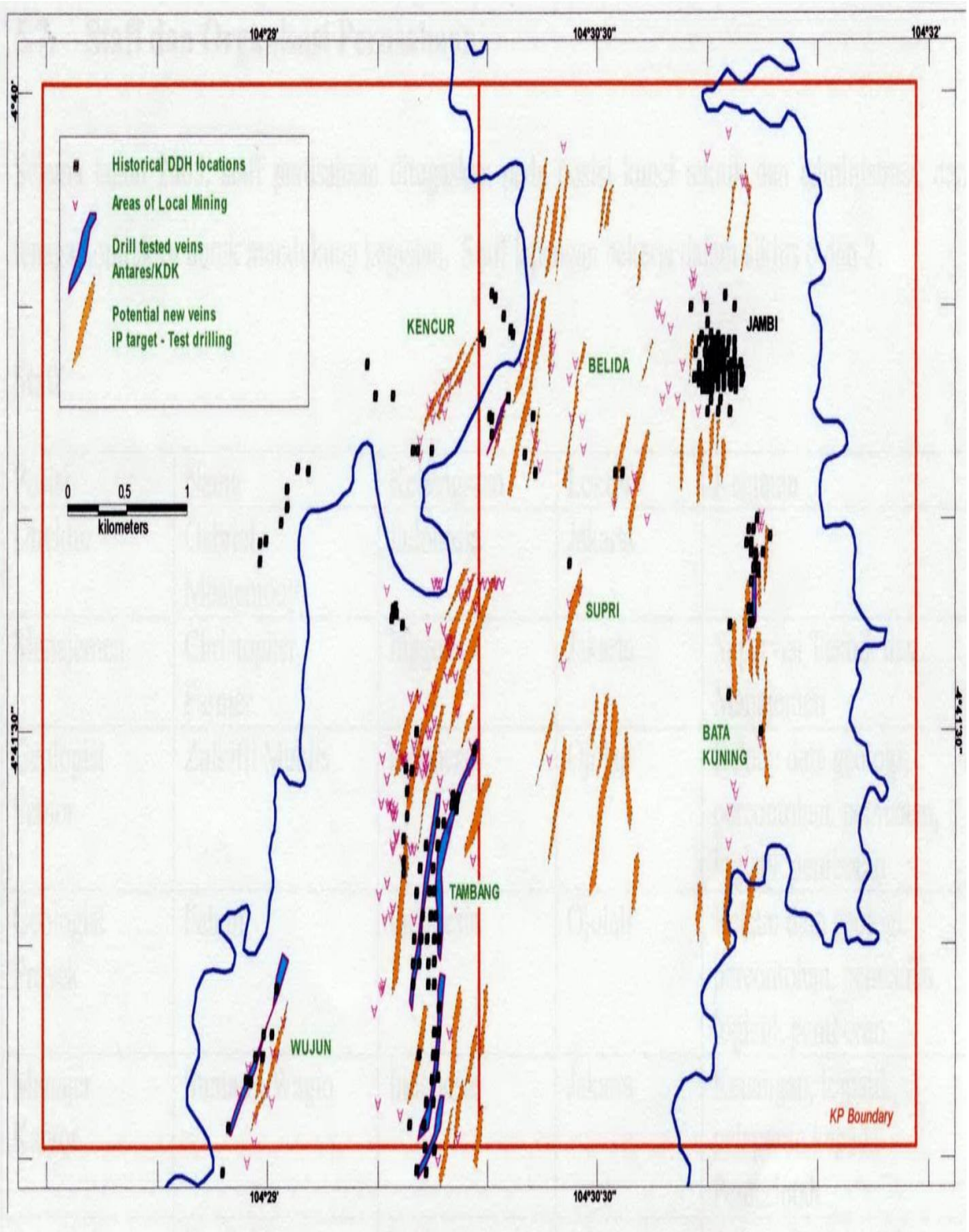
untuk dikembangkan menjadi wilayah pertambangan emas dan hingga saat ini masih merupakan sasaran eksplorasi bagi para investor (PT. Kurnia Dwipa Kencana, 1980-1991; China National Gold Exploration bekerjasama dengan PT. Kurnia Dwipa Kencana, 1992-1995; Antares Mining & Exploration Corporation, Kanada, 1997-1999; PT. Batutua Kharisma Permai/Waykanan Mineral, 2005-saat ini). Sementara para penambang tradisional masih sedang melakukan usaha penambangan di daerah-daerah terindikasi mengandung cebakan emas primer dan atau sekunder (*placer*) di sekitar wilayah aliran Way Umpu dan Way Neki. Hasil eksplorasi terdahulu oleh Antares Mining & Exploration Corporation di daerah termineralisasi telah mengidentifikasi 3 (tiga) prospek Tambang, Chandra dan Siman dengan singkapan-singkapan urat kuarsa yang dapat dirunut sepanjang jurus ± 2500 m berasosiasi dengan zona-zona ubahan hidrotermal selebar ± 800 m, tetapi kemudian eksplorasi dipusatkan di daerah prospek Tambang yang dilengkapi pemboran berpola kisi dengan kedalaman rata-rata 110 m.

Potensi cebakan logam mulia Au dan Ag terdeteksi mengalami peningkatan kadar ke arah kedalaman dan menghasilkan perkiraan sumber daya tereka 7,9 juta ton berkadar 167 gram/ton Ag dan 0,67 gram/ton Au dengan kadar cut off ekivalen 1 gram/ton Au. Eksplorasi pasca-kegiatan terdahulu (Antares Co.) dalam tahun 2005 oleh PT. Batutua Kharisma Permai yang dipusatkan di daerah Ojolali telah mengidentifikasi bahwa daerah bukit Jambi merupakan daerah prospek baru, ditandai oleh keberadaan zona urat kuarsa-karbonat mengandung emas yang menerobos batuan vulkanik terbreksikan terubah hidrotermal dan teroksidasi (serupa *ghostan*).

Pemboran eksplorasi telah dilakukan dalam 2 (dua) fase oleh PT. Batutua Kharisma Permai dengan jumlah kedalaman 1860 m pada periode tahun 1986-1987 dan pemboran berkisi (50 x 25 m) oleh Antares Co. dengan jumlah kedalaman 6650 m pada periode tahun 1997-1998. Dari hasil eksplorasi ini diperoleh informasi sumber daya tereka sebesar 2,0 juta ton bijih berkadar 2,39 gram/ton Au dan 167 gram/ton Ag dengan kadar cut off 0,7 gram/ton Au, termasuk sumber daya di dekat permukaan sebesar 150.000 troy ounce Au.

Serupa dengan hasil pemboran di daerah prospek Tambang, bahwa ke arah kedalaman pemboran menunjukkan peningkatan kadar Au dan Ag. Eksplorasi lanjutan dalam tahun 2007-2008 untuk menemukan cadangan baru dilakukan oleh PT. Batutua Waykanan Mineral di wilayah KP1 dan KP2 serta perluasannya di sebelah utara dan selatan (KP3 dan KP4) yang meliputi luas total 5911,7 Ha sehingga jumlah sumberdaya hipotetik berjumlah sekitar 130.301 m^3 ton. Dari data pada Pusat Sumber Daya Geologi Bandung tahun 2008, untuk potensi sumberdaya emas primer daerah Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit, cadangan yang terkira berjumlah sekitar 870.309 ton bijihdan 12.8719 ton logam dengan kadar rata 0- rata Au = 14.79 gr/ton.

Gambar II.5 Peta sebaran zona urat kuarsa di daerah aliran Way Umpu dan Way Neki, wilayah Kecamatan Banjit, Baradatu dan Gunung Labuhan.



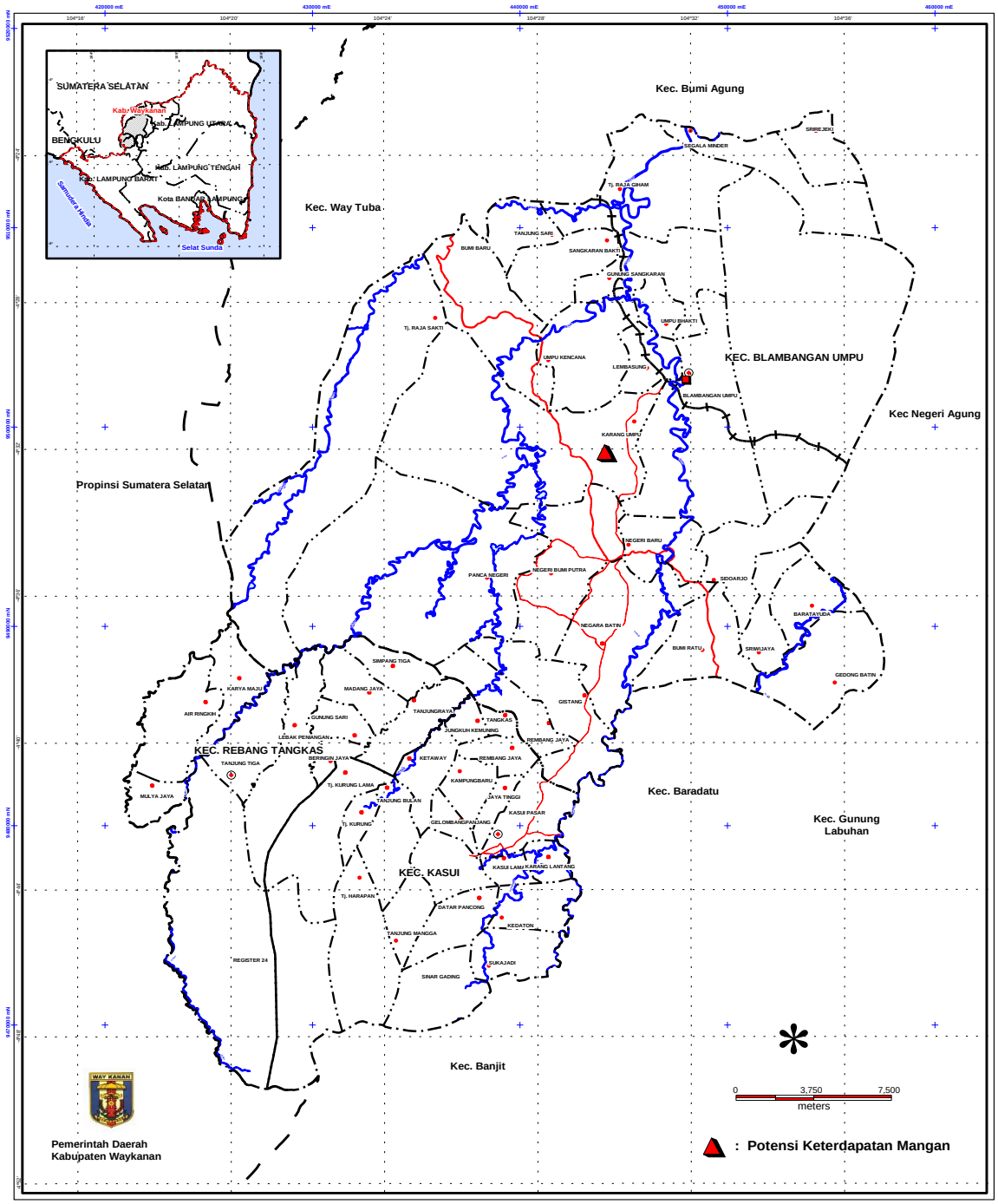
(*Sumber PT.Batutua Kharisma Permai, 2005*)

b. Mangan

Bahan galian mangan di Kabupaten Way Kanan yang sudah ditambang berada di Kabupaten Banjit, dengan pengelola adalah Koperasi tambang Intan Fajar dengan jumlah penambangan sebanyak 14.000 ton. Berdasarkan pengamatan lapangan, terindikasi bahwa di Kecamatan Kasui terdapat pula penyebaran bahan galian tambang tersebut.

Terdapat indikasi sumber daya mangan di daerah Karang Umpu, tetapi belum jelas bagaimana keterjadiannya. Perlu diselidiki lebih jauh apakah terbentuk sebagai zona mineralisasi primer logam mangan (Mn) di dalam sistem mineralisasi stockwork urat kuarsa mengandung logam mulia (Au-Ag), yang terbentuk melalui proses hidrotermal pada kegiatan akhir magmatisme atau sebagai rombakan hasil erosi dari cebakan primer. Hal tersebut dapat terjadi mengingat wilayah Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas dan Blambangan Umpu seperti halnya wilayah Kecamatan Baradatu berada di dalam sistem kaldera yang sebagian wilayahnya disusun oleh Formasi Kikim. Berkaitan dengan produksi bijih mangan (Mn) oleh Koperasi Pertambangan Intan Fajar di wilayah Kecamatan Banjit, Baradatu dan Gunung Labuhan; belum diperoleh informasi perhitungan jumlah total sumber daya atau cadangan bijih yang sedang ditambang dan masa tambang. Namun sumber data sekunder mencatat bahwa telah ditambang sebanyak ±18.000 ton bijih Mangan secara tradisional, yang dijual langsung kepada konsumen dengan sekala perusahaan perorangan.

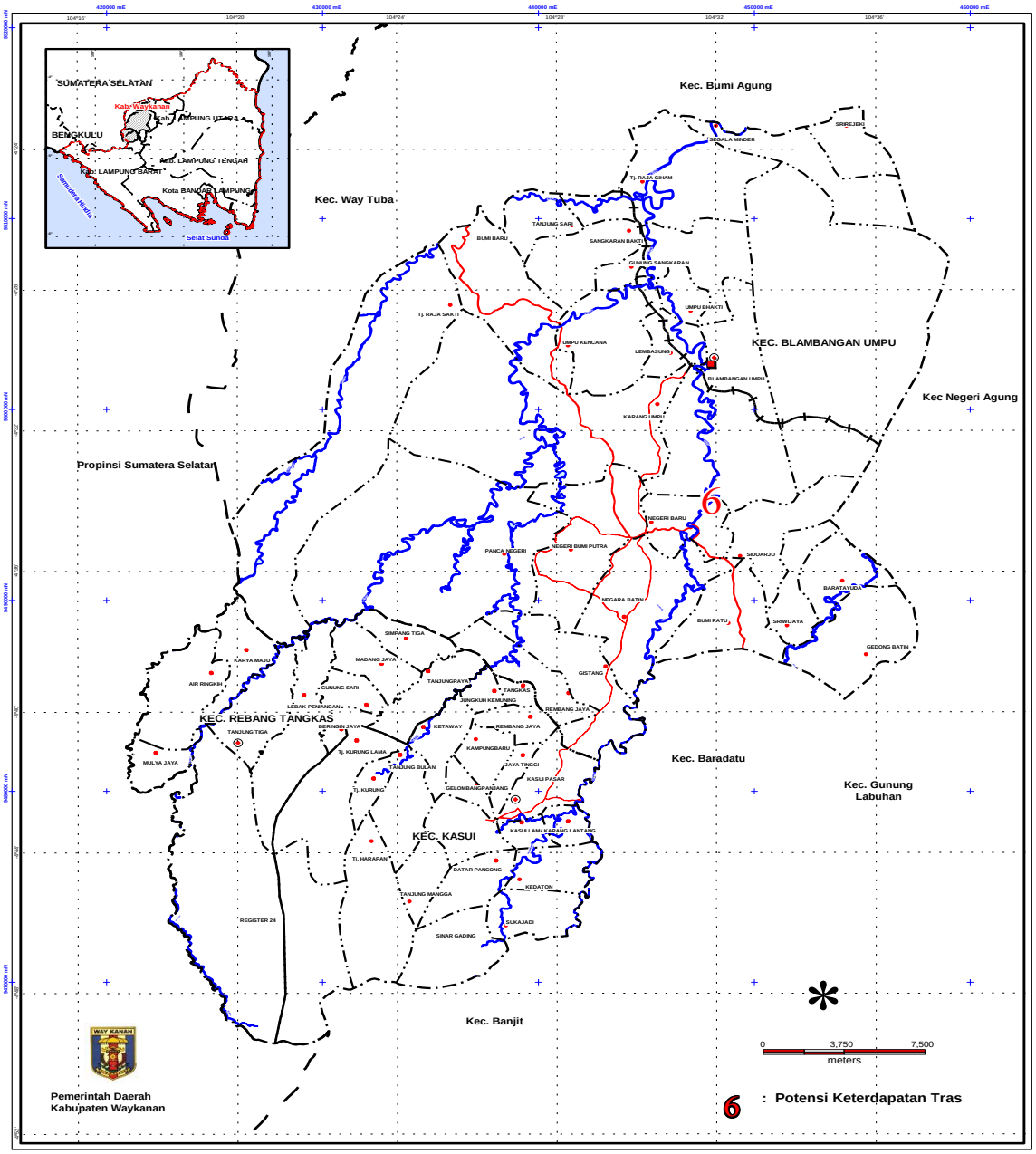
Gambar II.6 Peta sebaran keterdapatan sumberdaya mineral Mangan di Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, dan Blambangan Umpu; Kabupaten Way Kanan



c. Tras

Menurut data Pusat Sumber Daya Geologi Bandung bahan galian tras ini ditemukan disekitar Kampung Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu dengan jumlah sumberdaya hipotetik sekitar 1.000.000 ton. Dimana tras yang ditemukan merupakan hasil pelapukan batuan vulkanik.

Gambar II.7 Peta sebaran keterdapatan bahan galian Tras di Kabupaten Way Kanan



d. Andesit

- Kecamatan Blambangan Umpu.

Berdasarkan hasil data, di Kecamatan Blambangan Umpu terdapat dua daerah yang memiliki sumberdaya andesit ini:

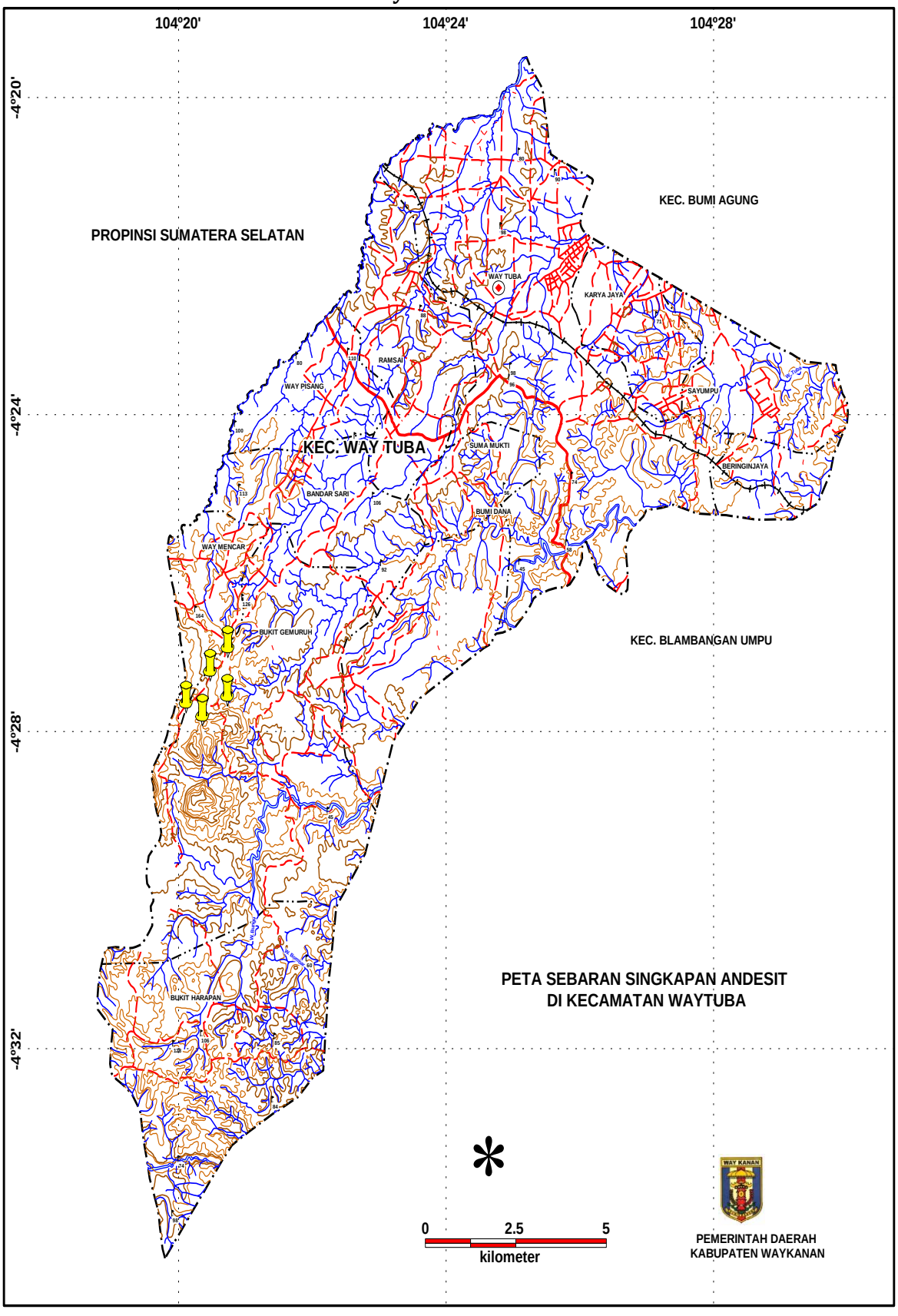
a. Kasui dengan sumberdaya hipotetik sekitar 1.000.000 ton yang digunakan sebagai bahan dasar bahan bangunan.

b. Tanjung Kurung, Kecamatan Blambangan Umpu dengan sumberdaya hipotetik sekitar 15.600.000 ton yang digunakan sebagai pondasi jalan dan bahan bangunan.

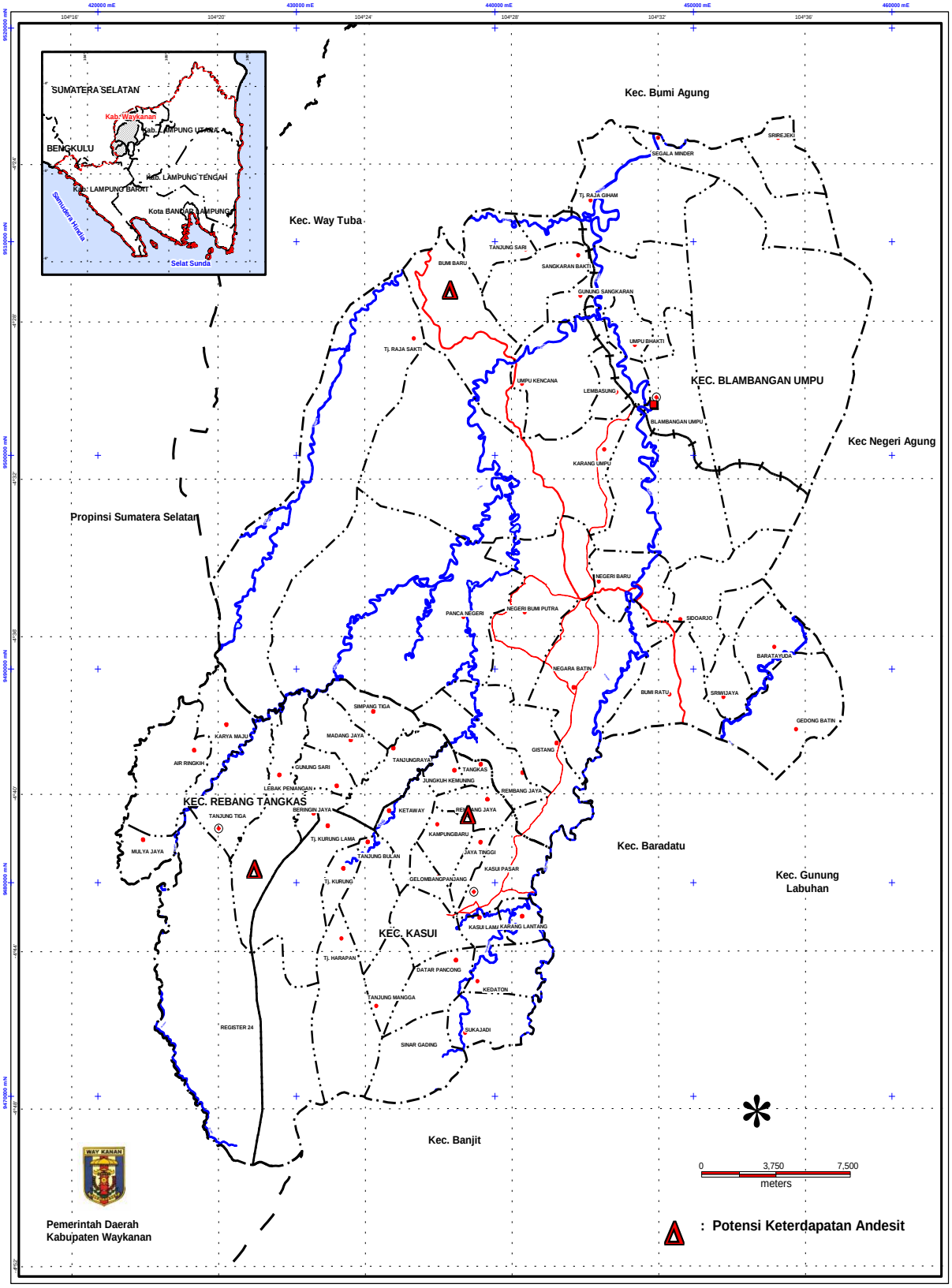
- Kecamatan Way Tuba

Bahan galian andesit dominan ditemukan di Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Way Tuba. Masyarakat sekitarnya mengolahnya untuk dijadikan bahan bangunan atau penimbunan jalan. Andesit yang ditemukan di daerah ini cukup luas, sehingga banyak masyarakat di sana mengandalkannya menjadi mata pencaharian. Berdasarkan data hasil rekapitulasi tahun 2007 dari Pusat Sumber Daya Geologi, di Kampung Bukit Gumuruh tercatat memiliki sumberdaya hipotetik sebesar 1.800.000 ton. Andesit yang dikelola oleh warga ini harus dikembangkan dan dikelola dengan baik, karena selain andesit merupakan bahan galian yang cukup berpotensi, juga dapat memajukan kesejahteraan warga dengan adanya penambangan yang lebih terkelola.

Gambar II.8 Peta sebaran keterdapatan singkapan bahan galian Andesit di Kecamatan Way Tuba



Gambar II.9 Peta sebaran keterdapatan sumberdaya mineral Andesit di Kecamatan Way Tuba dan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

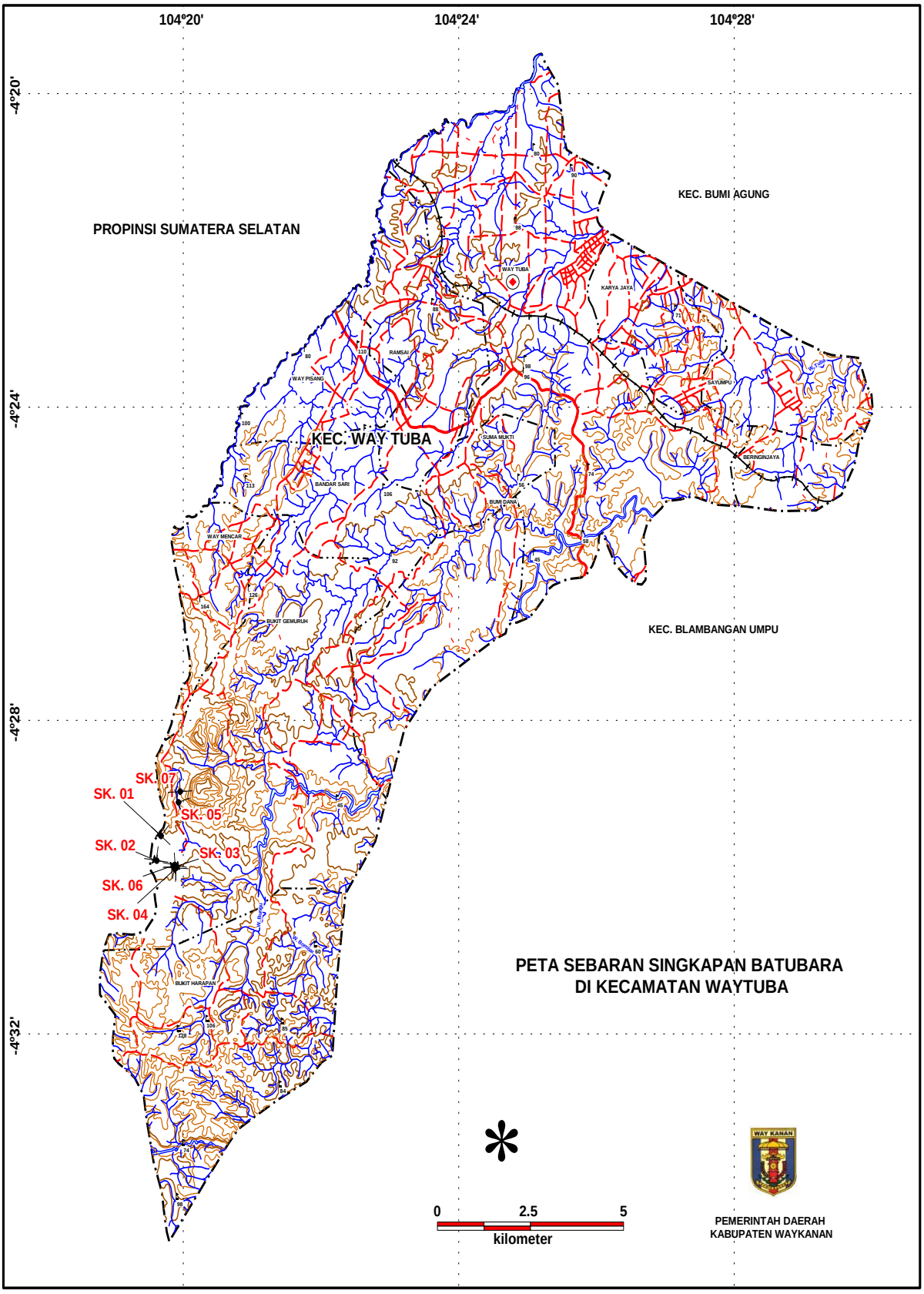


e. Batu Bara

Secara geologi, wilayah Kecamatan Way Tuba, Bumi Agung, Bahuga, dan Buay Bahuga dibentuk oleh Formasi Kikim berumur Paleosen-Oligosen, Formasi Kasai berumur Pliosen-Plistosen, dan Satuan Batuan Breksi Gunungapi-Tuf yang diendapkan pada periode Plistosen-Holosen.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung singkapan batubara di lapangan dan mengacu kepada data sekunder dari pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan, di Kecamatan Way Tuba terdapat 7 singkapan batubara di Dusun Sinar Bukit, Kampung Bukit Gemuruh. Lokasi keterdapatan batubara di Dusun Sinar Bukit, Kampung Bukit Gemuruh dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dari Kota Kecamatan Way Tuba kearah Kota Martapura, Sumatera Selatan melalui lintas Sumatra sampai Simpang Perikanan dengan kondisi jalan aspal yang baik. Kemudian dari Simpang Perikanan menuju ke arah selatan melalui jalan aspal curah dan sebagian baru diperbaiki, serta jalan berbatu melalui Kampung Bandarsari, Bangunrejo, Way Mencar, Bukit Gemuruh. Bahan galian batubara di Kampung Sinar Bukit, Kecamatan Way Tuba yang tersebar di sekitar Sungai Pungkaw, Sungai Kepayang, Sungai Tigai, Sungai Betung, dan Sungai Cekru dengan sumberdaya batubara yang cukup besar $\pm$ 3.134.527 m.ton (terukur) dan 17.462.064 m.ton (terunjuk).

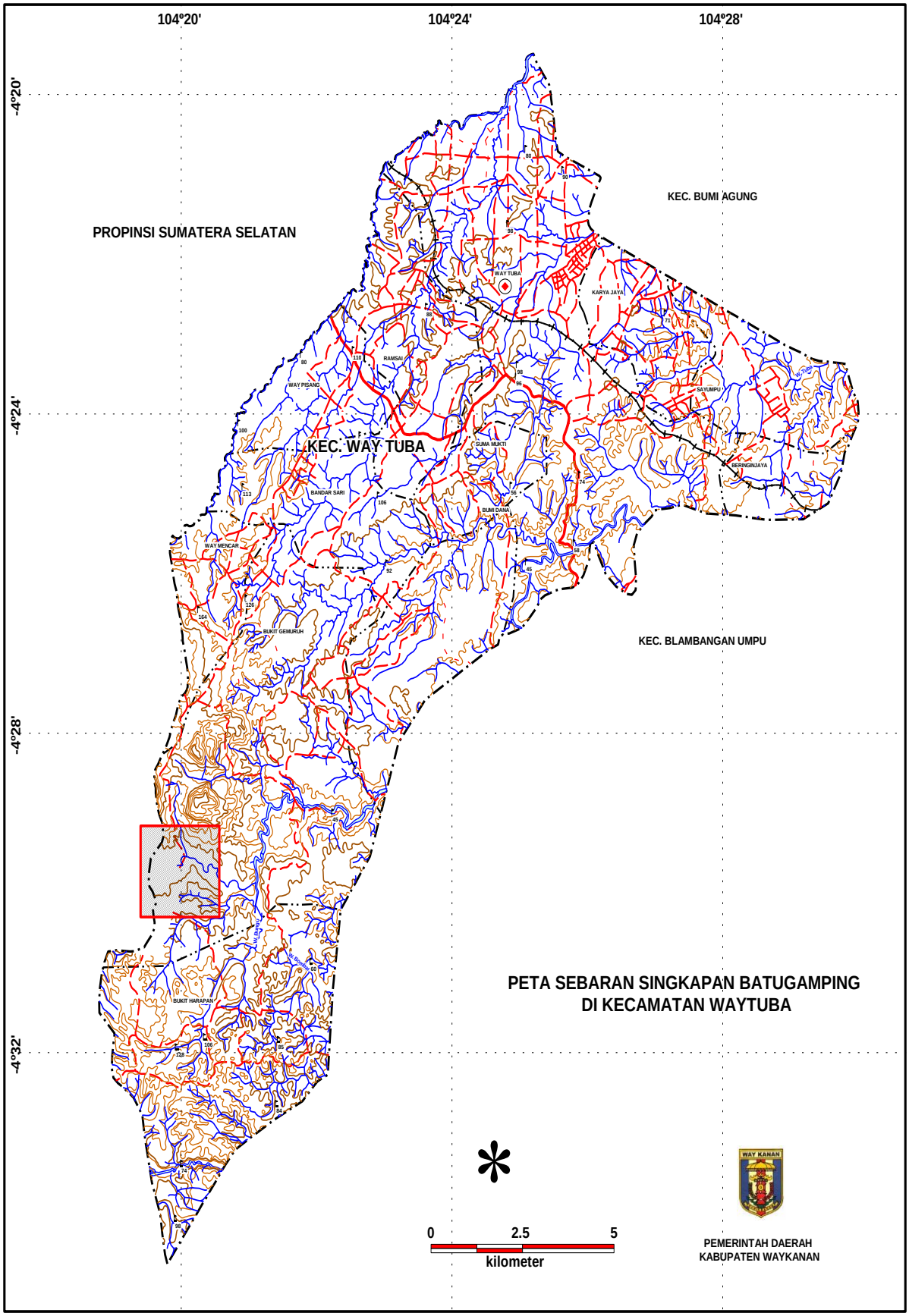
Gambar II.10 Peta sebaran keterdapatan singkapan batubara di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Propinsi lampung



f. Batu gamping

Singkapan batugamping di daerah penelitian pada umumnya ditemukan di lembah-lembah bukit yang dalam atau alur liar sungai dan sebagian berbentuk bukit di kanan kiri jalan di Kampung Bukit Harapan Dusun Sinar Bukit, Kecamatan Way Tuba dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dari Kota Kecamatan Way Tuba kearah Kota Martapura, Sumatera Selatan melalui lintas Sumatra sampai Simpang Perikanan dengan kondisi jalan aspal yang baik. Kemudian dari Simpang Perikanan menuju ke arah selatan melalui jalan aspal curah dan sebagian baru diperbaiki, serta jalan berbatu melalui Kampung Bandarsari, Bangunrejo, Way Mencar, Bukit Gemuruh, Talang Tengah sampai Kampung Bukit Harapan dan Dusun Sinar Bukit sejauh 15 km.

Gambar II.11 Peta Lokasi Singkapan Batugamping, Kecamatan Way Tuba



Gambar II.12 Singkapan Batugamping



Sumberdaya batugamping di Kecamatan Way Tuba, berdasarkan singkapan yang terdapat adalah sebagai berikut:

- **Dusun Sinar Bukit**

Batugamping di Dusun Sinar Bukit, sebagian tertutup oleh soil yang cukup tebal dan memanjang kea rah Barat, dengan ketinggian rata-rata adalah 5 meter, dimana luasnya 3,2 ha. Dengan asumsi berat jenis batugamping adalah 2,7, maka sumberdaya batugamping di lokasi penelitian ini adalah 32.000 m^2 x 5 m x 2,7 = 432.000 ton.

- **Kampung Bukit Harapan**

Luas batugamping di belakang sekolah (lokasi singkapan 1) adalah 4,41 ha, dengan ketinggian 10 meter dan berbentuk kerucut. Maka sumberdayanya adalah sebesar 44.100 m^2 x 10 m x 2,7 x 0,33 = 392.931 ton.

Luas batugamping di depan sekolah (lokasi singkapan 2) adalah 3,62 ha, dengan ketinggian 12 meter dan berbentuk kerucut. Maka sumberdayanya adalah sebesar 36.200 m^2 x 12 m x 2,7 x 0,33 = 387.050,4 ton.

Jadi total sumberdaya tereka batugamping di Kampung Bukit Harapan adalah 1.211.981,4 ton. Untuk mengetahui sumberdaya terukur, maka diperlukan eksplorasi lanjutan dengan melakukan pemboran dan pengukuran topografi.

Berdasarkan data dari Pusat Sumber Daya Geologi, di Kampung Bukit Gumuruh tercatat memiliki sumberdaya hipotetik sebesar 1.800.000 ton. Andesit yang dikelola oleh warga ini harus dikembangkan dan dikelola dengan baik, karena selain andesit merupakan bahan galian yang cukup berpotensi, juga dapat memajukan kesejahteraan warga dengan adanya penambangan yang lebih terkelola.

Kesampaian daerah yang tidak begitu jauh dari jalan besar beraspal dengan kondisi jalan aspal curah dan berbatu hingga sampai lokasi andesit membuat daerah pertambangan bahan galian andesit ini menjadi nilai tambah dalam pertimbangan penetapan kawasan prospek tambang untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk sekitar, selain itu juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan.

g. Industri Pengolahan

Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik atau anorganik ataupun menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin atau proses kimiawi. Pembuatan dapat diproses melalui mesin/pabrik ataupun di rumah tangga. Dalam penghitungan pendapatan regional Kabupaten Way Kanan, sektor ini hanya mencakup kegiatan industri tanpa migas.

1). Industri Makanan dan Minuman

Industri makanan dan minuman di Kabupaten Way Kanan terdapat 17 jenis industri, antara lain: keripik pisang, keripik singkong, emping, opak singkong, kerupuk singkong, kerupuk sagu, susu kedelai, dodol, tahu, tempe dan makanan ringan, dapat dilihat pada tabel:

Tabel II.15 Industri Makanan Tahun 2016-2020

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KERIPIK PISANG	170	170	190	190	221
2	KERIPIK SINGKONG	180	180	200	200	180
3	EMPING	9	9	9	9	10
4	OPAK SINGKONG	204	104	104	104	97
5	KERUPUK SINGKONG	125	125	135	135	98
6	KERUPUK SAGU	54	54	54	54	40
7	SUSU KEDELAI	14	14	14	14	15
8	DODOL	19	19	25	19	25
9	TAHU	191	191	191	191	158
10	TEMPE	355	355	355	355	360
11	MAKANAN RINGAN	140	140	140	140	140
12	KERIPIK JAMUR	1	2	1	2	4
13	KUE BASAH		50	50	50	52
14	KUE KERING		35	35	35	30
15	KERIPIK TEMPE		5	5	5	30
16	ROTI		8	8	8	10
17	MARNING JAGUNG		3	3	3	4
JUMLAH		**1.422**	**1.464**	**1.519**	**1.541**	**1.474**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017, 2018,2019,2020

2). Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan

Kabupaten Way Kanan memiliki industri pengolahan hasil pertanian, hutan dan perkebunan sebanyak 1.798 unit usaha, antara lain jenis industri Mebel Kusen, heuler padi, heuler kopi, Meubelair, kopi bubuk, gula aren, gula kelapa, panglong kayu, ukiran kayu dan pembuatan arang, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.16 Jenis Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Hutan Dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	Jenis Industri	UNIT USAHA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KOPI BUBUK	185	185	185	185	187
2	GULA AREN	165	165	107	107	120
3	GULA KELAPA	77	77	80	80	80
4	MEUBELAIR	320	320	320	320	315
5	MEBEL KUSEN	519	376	367	376	376
6	UKIRAN KAYU	41	41	41	41	35
7	PANGLONG KAYU	65	65	65	65	50
8	HEULER KOPI	150	150	150	160	160
9	HEULER PADI	325	325	325	325	465
10	PEMBUATAN ARANG	4	4	4	4	4
11	JAHE INSTAN	1	3	3	3	6
Jumlah		**1.852**	**1.711**	**1.647**	**1.666**	**1.798**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017, 2018,2019,2020

3). Industri Kerajinan Tangan

Industri kerajinan tangan di Kabupaten Way Kanan terdapat Sepuluh jenis industri dengan 308 unit usaha pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.17 Jenis Industri Kerajinan Tangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SULAM USUS	22	22	22	22	10
2	SULAM TAPIS	13	13	40	40	50
3	ANYAMAN TIKAR	49	49	49	49	50
4	ANYAMAN BAMBU	219	119	119	119	100
5	ANYAMAN ROTAN	35	35	35	35	35
6	ANYAMAN LIDI	17	17	17	17	17
7	BATU MULIA	40	15	10	10	11
8	UKIRAN BAN BEKAS	2	2	2	2	2
9	SULAM BENANG WOLL	25	-	-	-	-
10	SULAM RAJUTAN / TALI KUR		45	45	45	30
11	MONTE-MONTE		10	10	10	3
JUMLAH		**422**	**327**	**349**	**349**	**308**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017, 2018,2019,2020

4). Industri Bahan Bangunan

Industri bahan bangunan terdiri dari jenis industri bata terbanyak di Kabupaten Way Kanan diikuti dengan industri genteng dan batako/paving blok, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.18 Industri Bahan Bangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bata	332	150	150	150	120
2	Genteng	111	95	95	95	95
3	Batako/Paving Blok	76	76	76	76	70
JUMLAH		**519**	**321**	**321**	**321**	**285**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017, 2018,2019,2020

5). Industri Perbengkelan

Industri perbengkelan berjumlah 358 unit usaha terdiri dari jenis industri perbengkelan otomotif dan teralis, dapat dilihat pada tabel:

Tabel II.19 Industri Perbengkelan Kabupaten Way Tahun 201 6– 2020

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA TAHUN 2016	UNIT USAHA TAHUN 2017	UNIT USAHA TAHUN 2018	UNIT USAHA TAHUN 2019	UNIT USAHA TAHUN 2020
1	Perbengkelan Otomotif	267	267	267	267	288
2	Perbengkelan Teralis	80	80	80	80	70
JUMLAH		**346**	**346**	**346**	**346**	**358**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017, 2018,2019,2020

6) Objek Pariwisata

Adapun kondisi pariwisata di Kabupaten Way Kanan obyek wisata dengan sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.20 Daftar Objek Wisata Kabupaten Way Kanan

No	Daerah Potensi Wisata	Kecamatan	Desa/ Kampung	Jarak tempuh dari	
				Kabupaten	Kecamatan
1.	Kampung Wisata	Balambangan Umpu	Gedung Batin	±23 km	±23 km
2.	Makam Tua Siti	Balambangan Umpu	Gedung Batin	±25 km	±25 km
3.	Batu Mahligai	Balambangan Umpu	Gedung Batin	±25 km	±25 km
4.	Curup Jepon	Balambangan Umpu	Negeri Baru	±25 km	±25 km
5.	Curup Kereta	Balambangan Umpu	Rambang Jaya	±25 km	±25 km
6.	Curup Penyandingan	Balambangan Umpu	Panca Negeri	±25 km	±25 km
7.	Curup Aji	Balambangan Umpu	Blambangan	±8 km	±8 km
8.	Water Park Bedeng	Balambangan Umpu	Sidoarjo	±15 km	±15 km
9.	Kencana Resort	Balambangan Umpu	Umpu Kencana	±6 km	±6 km
10.	Curup putri malu (Wisata Ala)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±60 km	±15 km
11.	Suplesi Way Besai	Banjit	Bonglai	±60 km	±20 km
12.	Danau Randing (Wisata Alam)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±60 km	±20 km
13.	Curup kembar bukit duduk (Wisata Alam)	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±70 km	±25 km
14.	Sialang badas (Wisata alam)	Banjit	Juku Batu	±70 km	±20 km
15.	Bendungan Irigasi Way Umpu	Banjit	Rantau Temiang	±47 km	±7 km
16.	Curup Bukit duduk	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±70 km	±18 km
17.	Air Panas Serasan	Banjit	Juku Batu	±60 km	±18 km
18.	Air Terjun Putri Kembar	Banjit	Juku Batu	±70 km	±18 km
19.	Paronama Indah Bukit Duduk (Panorama	Banjit	Kawasan KPH Bukit	±70 km	±20 km
20.	Kampung Tua Jukubatu	Banjit	Juku Batu	±60 km	±15 km

No	Daerah Potensi Wisata	Kecamatan	Desa/ Kampung	Jarak tempuh dari	
				Kabupaten	Kecamatan
21.	Kampung Wisata Bali Sadar	Banjit	Bali Sadar	±45 km	±5 km
22.	Curup Pematang Rindu	Banjit	Menanga Siamang	±60 km	±18 km
21.	Curup Gangsa	Kasui	Kotawai	±60 km	±20 km
22.	Curup Cangkah Kidau	Kasui	Kedaton	±55 km	±15 km
23.	Curup Pengantin	Kasui	Tanjung Kurung	±65 km	±25 km
24.	Curup Ranggau	Kasui	Kedaton	±55 km	±15 km
25.	Curup Susukan	Kasui	Kedaton	±55 km	±15 km
26.	Curup Talang Sembilan	Kasui	Suka Jadi	±65 km	±25 km
27.	Curup Layang- layang	Kasui	Juku Kemuning	±35 km	±15 km
28.	Curup Way Bujukan	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±70 km	±20 km
29.	Curup Pinang Indah	Rebang Tangkas	Gunung Sari	±75 km	±25 km
30.	Curup Maria	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±70 km	±20 km
31.	Goa Batu Grobok	Rebang Tangkas	Lebak Peniangan	±70 km	±10 km
32.	Curup Way Pangkalan	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±75 km	±25 km
33.	Curup Tahmi Besar	Rebang Tangkas	Medang Jaya	±70 km	±20 km
34.	Bendungan Way Mencar	Way Tuba	Mencar Jaya	±50 km	±20 km
35.	Goa Kelelawar	Way Tuba	Bukit Harapan	±49 km	±20 km
36.	Villa Beringin Tujuh	Way Tuba	Bukit Harapan	±50 km	±20 km

No	Daerah Potensi Wisata	Kecamatan	Desa/ Kampung	Jarak tempuh dari	
				Kabupaten	Kecamatan
37.	Villa Masin/Villa Guci	Way Tuba	Vila Indah	±50 km	±20 km
38.	Waterboom Galaxi	Gunung Labuan	Gunung Labuhan	±50 km	±10 km
39.	Curup Kinciran	Gunung Labuan	Bengkulu Tengah	±55 km	±15 km
40.	Curup Anggal	Gunung Labuan	Suka Negri	±55 km	±20 km
41.	Curup Patah	Gunung Labuan	Curup Patah	±50 km	±20 km
42.	Waterpark Rizki	Baradatu	Tiuh Balak	±30 km	±8 km
43.	Curup Semarang	Baradatu	Semarang	±35 km	±10 km
44.	Rumah Adat Peserian Ryachudu	Bahuga	Mes Irllir	±90 km	±2 km

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, 2019

Kabupaten Way Kanan memiliki 9 buah hotel, yaitu 6 di Kecamatan Baradatu dan 3 hotel di Kecamatan Blambangan Umpu. Kesembilan hotel tersebut merupakan hotel melati (hotel non-bintang). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penambahan sebuah hotel di kabupaten Way Kanan tepatnya di Kecamatan Blambangan Umpu.

Tabel II. 21 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2016-2020

KECAMATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Banjit	-	-	-	-	-
Baradatu	3	4	6	6	8
Gunung Labuhan	-	-	-	-	-
Kasui	-	-	-	-	-
Rebang Tangkas	-	-	-	-	-
Blambangan Umpu	2	2	2	3	3
Way Tuba	-	-	-	-	-
Negeri Agung	-	-	-	-	-
Bahuga	-	-	-	-	-
Buay Bahuga	-	-	-	-	-

KECAMATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Bumi Agung	-	-	-	-	-
Pakuan Ratu	-	-	-	-	-
Negara Batin	-	-	-	-	-
Negeri Besar	-	-	-	-	-
Way Kanan	5	6	8	9	11

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.10 Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Way Kanan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 473.575 jiwa yang terdiri 242.874 jiwa penduduk laki-laki dan 230.701 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun sebelumnya, penduduk Way Kanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,40 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 105,28.

Secara rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan kurun waktu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

TABEL II.22 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Registrasi Penduduk di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Banjit	23.163	21.808	44.971	23.342	21.979	45.321	23.504	22.144	45.648	23.638	22.312	45.950	24.266	22.785	47.051
2	Baradatu	19.686	19.174	38.860	19.729	19.221	38.950	19.758	19.258	39 016	19.763	19.299	39.062	22.664	21.890	44.554
3	Gunung Labuhan	14.718	14.339	29.057	14.868	14.487	29.355	15.008	14.631	29.639	15.131	14.777	29.908	16.000	15.599	31.599
4	Kasui	15.831	15.382	31.213	15.9158	15.465	31.380	15.987	18.542	31.529	16.039	15.622	31.661	16.869	15.906	32.775
5	Rebang Tangkas	11.164	10.281	21.445	11.292	10.400	21.692	11.411	10.515	21.926	11.518	10.634	22.152	12.882	12.040	24.922
6	Blambangan Umpu	32.215	30.606	62.821	32.876	31.237	64.113	33.524	31.872	65.396	34.143	32.518	66.661	36.161	34.218	70.379
7	Negeri Agung	18.696	16.657	36.353	11.833	11.008	22.841	19.271	18.214	37.485	19.536	18.496	38.032	19.989	18.995	38.984
8	Way Tuba	11.671	10.855	22.526	18.990	17.936	36.926	11.988	11.159	23.147	12.132	11.313	23.445	13.168	12.521	25.689
9	Bahuga	4.951	4.815	9.766	4.950	4.815	9.765	4.945	4.813	9.758	4.934	4.811	9.745	5.992	5.756	11.748
10	Buay Bahuga	9.972	9.357	19.329	9.975	9360	19.335	9.969	9.360	19.329	9.952	9.361	19.313	10.994	10.496	21.490
11	Bumi Agung	13.186	12.396	25.582	13.252	12.460	25.712	13.307	12.520	25.827	13.348	12.580	25.928	14.638	13.814	28.452
12	Pakuan Ratu	20.878	18.813	39.691	21.051	18.971	40.022	21.208	19.123	40.331	21.342	19.278	40.620	22.656	21.388	44.044
13	Negara Batin	19.792	17.984	37.776	20.126	18.289	38.415	20.448	18.593	39.041	20.751	18.904	39.655	18.587	17.668	36.255
14	Negeri Besar	9.363	8.777	18.140	9.339	8.756	18.095	9.308	8.733	18.041	9.267	8.710	17.977	11.171	10.589	21.760
Jumlah		**225.286**	**212.244**	**437.530**	**227.538**	**214.384**	**441.992**	**229.636**	**216.477**	**446.113**	**231.494**	**218.615**	**450.109**	**246.037**	**233.665**	**479.702**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

b. Komposisi Penduduk

Jumlah Penduduk Way Kanan usia 0-14 tahun berjumlah 126.411 orang, jumlah penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 300.100 orang dan penduduk usia 65 tahun keatas berjumlah 23.598 orang.

TABEL II.23 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki – laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
0-4	23.770	5	22.439	5	46.209
5-9	22.365	5	21.396	4	43.761
10-14	20.612	4	19.747	4	40.359
15-19	19.895	4	19.033	4	38.928
20-24	19.582	4	19.125	4	38.707
25-29	20.299	4	19.135	4	39.434
30-34	20.858	4	19.692	4	40.550
35-39	18.970	4	17.558	4	36.528
40-44	16.909	4	16.149	3	33.058
45-49	14.547	3	13.840	3	28.387
50-54	12.197	3	11.966	3	24.163
55-59	10.601	2	10.307	2	20.908
60-64	8.399	2	7.861	2	16.260
65-69	6.237	1	5.427	1	11.664
70-74	3.767	1	3.437	1	7.204
75 Keatas	3.866	1	3.589	1	7.455
Jumlah	**242.874**	**51**	**230.701**	**49**	**473.575**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2020 berjumlah **473.575** jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,51 %. Jumlah Penduduk Usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 merupakan kelompok umur yang paling besar yaitu berjumlah 300.100 jiwa atau 66,67% dari penduduk Way Kanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan sudah memasuki era 'Bonus Demografi"

Bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara. Berdasarkan komposisi penduduk tersebut diatas terlihat bahwa komposisi penduduk way kanan tertinggi berada

pada usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Way Kanan ini, juga harus difikirkan agar tidak sampai menjadi bencana demografi. Pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak agar warga di usia produktifnya tidak jadi pengangguran intelektual.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan tahun 2019 mencapai 115 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Baradatu dengan kepadatan sebesar 257 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Negeri Besar sebesar 50 jiwa/km2.

TABEL II.24 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ^{2}
1	Banjit	10,10	142
2	Baradatu	9,15	293
3	Gunung Labuhan	6,68	274
4	Kasui	7,05	216
5	Rebang Tangkas	5,13	120
6	Blambangan Umpu	13,98	212
7	Way Tuba	5,24	125
8	Negeri Agung	8,08	189
9	Bahuga	2,36	57
10	Buay Bahuga	4,46	211
11	Bumi Agung	6,00	216
12	Pakuan Ratu	9,14	83
13	Negara Batin	7,61	104
14	Negeri Besar	5,00	60
Jumlah		**100**	**122**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

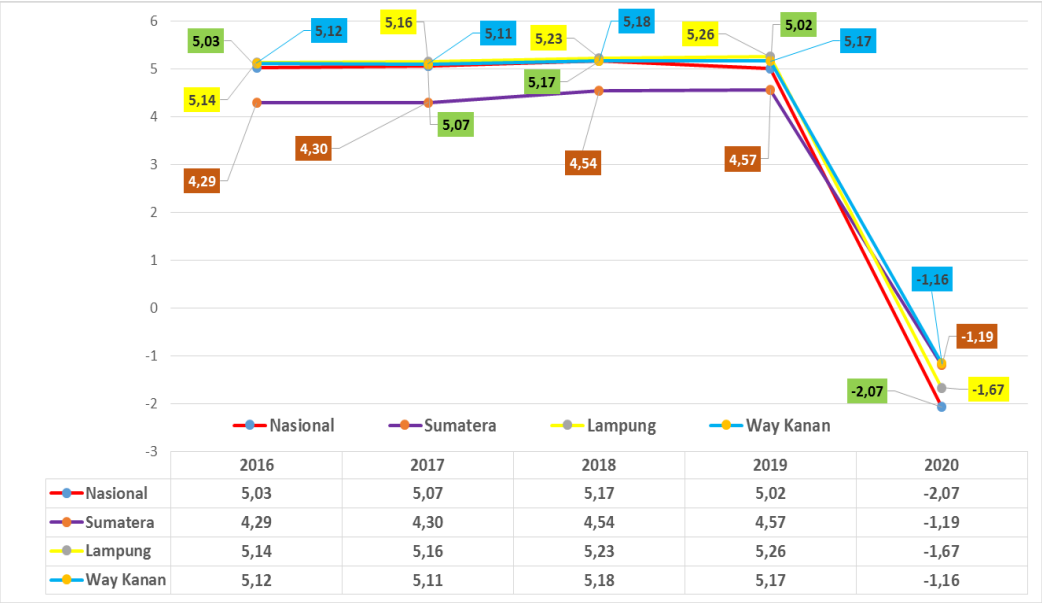
2.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan secara umum mengalami Perlambatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,12%, kemudian menjadi 5,11% pada tahun 2017, pada tahun 2018 berada pada 5,18%, pada tahun 2019 menjadi 5,17% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16 %.

Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16 persen setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5 persen, ini sebagai dampak dari adanya pandemi corona virus-19 selama satu tahun terakhir ini. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Nasional yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen, 1,19 persen dan 2,07 persen.

Perlambatan tersebut identik dengan perlambatan yang terjadi di Provinsi Lampung dan Nasional, dimana perlambatan tersebut berasal dari penurunan pada konsumsi pemerintah yang antara lain ditandai oleh rasionalisasi Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus.

GRAFIK II.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan terhadap Provinsi, dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Sumatera	4,29	4,30	4,54	4,57	-1,19
Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Way Kanan	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
'* Angka Sementar
'**Angka Sangat Sementara

Untuk data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020, menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, kecuali Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Kota Metro, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2020 berada pada urutan ke tiga di Provinsi Lampung. Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 25 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2016-2020

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Tengah	5,61	5,27	5,33	5,35	-1,02
Lampung Barat	5,01	5,03	5,09	5,19	-1,14
Way Kanan	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16
Pesisir Barat	5,30	5,33	5,33	5,37	-1,17
Pringsewu	5,04	5,11	5,01	5,04	-1,21
Pesawaran	5,07	5,01	5,05	5,00	-1,26
Tulang Bawang Barat	5,27	5,55	5,27	5,36	-1,32
Mesuji	5,10	5,20	5,30	5,26	-1,35
Tulang Bawang	5,42	5,45	5,42	5,41	-1,36
Lampung Utara	5,10	5,21	5,31	5,33	-1,45

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Lampung Selatan	5,22	5,46	5,23	5,13	-1,73
Tanggamus	5,18	5,19	5,01	5,02	-1,77
Metro	5,90	5,66	5,68	5,58	-1,79
Bandar Lampung	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,85
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Lampung Timur	4,54	4,58	3,71	3,81	-2,29

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, BPS Provinsi Lampung Tahun 2021

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp.

8.654.796.19,- juta rupiah menjadi sebesar Rp. **9.462.809,19** juta rupiah pada tahun 2020.

Adapun Perkembangan Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan adalah sebesar Rp. **11.060.713.00** Juta kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai sebesar Rp. **14.037.767,24** Juta.

Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019, PDRB masih meningkat dengan pertumbuhan sebesar 5,17%. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16% sebagai akibat dampak dari Covid-19.

Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kabupaten Way Kanan di tahun 2016 sampai dengan 2020 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36, 13% dan sector industri dan pengolahan sebesar 21,43%.

Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB menurut sisi pengeluaran, di tahun 2020 nilainya mencapai Rp **14.037.767** juta. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2019 yang sebesar Rp **13.999.288** juta. Hal serupa juga terjadi pada PDRB ADHK tahun 2020 mencapai Rp **9.462.809** juta, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp **9.573.871** juta.

Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat sebagai berikut ini:

Tabel II-26 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Konstan 2010									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019 *)	%	2020 **)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.067.919.78	3,91	3.135.536.00	2,19	3 209 902,87	2,39	3 274 409,70	2,01	3 298 526,24	0,74
B. Pertambangan dan Penggalian	358.293.49	7,23	387.586.02	8,18	408 370,37	5,36	433.447,73	6,14	448 233,01	3,41
C. Industri Pengolahan	1.740.960.44	4,86	1.847.183.51	6,10	1 973 576,83	6,84	2 123 200,52	7,58	1 945 556,89	-8,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.190.92	5,51	8.651.44	5,62	9.202,73	6,37	9.881,71	7,38	10 778,78	9,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.383.64	5,93	4.609.87	7,01	4.872,52	3,87	5.213,61	7	5 439,49	4,33
F. Konstruksi	661.201.56	6,38	731.435.12	10,62	801.064,01	9,52	846.010,23	5,61	825 743,08	-2,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	844.247.71	6,34	886.605.32	5,02	954.460,04	7,65	1.013.186,18	6,15	1 004 179,63	-0,89
H. Transportasi dan Pergudangan	220.303.56	9,45	235.890.90	7,08	250.889,93	6,36	273 238,55	8,91	261 189,82	-4,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	62.202.87	6,01	67.409.88	8,37	73 104,12	8,45	79.190,63	8,33	76 041,46	-3,98
J. Informasi dan Komunikasi	352.472.75	8,54	385.464.20	9,36	407.415,91	5,69	439.855,12	7,96	475 131,50	8,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	81.705.74	3,04	84.636.57	3,59	85.964,48	1,57	88.830,48	3,33	93 160,53	4,87
L. Real Estate	200.858.88	6,18	216.586.13	7,83	227.025,13	4,82	242.311,37	6,73	238 722,62	-1,48
M, N. Jasa Perusahaan	4.336.98	4,83	4.580.74	5,62	4.694,97	2,49	4.881,33	3,97	4 811,53	-1,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	269.075.25	4,10	280.698.08	4,32	293.240,74	4,47	307.266,97	4,78	321 923,60	4,77
P. Jasa Pendidikan	233.429.37	4,88	246.034.56	5,40	259.134,94	5,32	281.817,79	8,75	293 992,41	4,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.700.51	3,49	83.458.02	4,71	89.063,06	6,72	96.018,34	7,81	106 733,98	11,16
R,S,T,U. Jasa Lainnya	44.502.90	4,08	48.348.82	8,64	50.897,03	5,27	55.110,54	8,28	52 644,62	-4,47
JUMLAH	**8.233.786,34**	**5,12**	**8.654.796.19**	**5,11**	**9 .102 .879,69**	**5,18**	**9 .573. 870,82**	**5,17**	**9 462 809,19**	**-1,16**

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

Tabel II-27 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019 *)	%	2020**)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.113.003.84	37,19	4.412.384,80	36,44	4 706 048,02	36,05	4 905 723,15	35,04	5 072 074,63	36,13
B. Pertambangan dan Penggalian	507.568.55	4,59	557.813,63	4,61	597 067,11	4,.57	640 026,16	4,57	675 002,57	4,81
C. Industri Pengolahan	2.481.594.56	22,44	2.757.140,07	22,77	2 988 512,98	22,89	3 253 961,79	23,24	3 007 863,62	21,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.847.58	0,08	10.427,.58	0,09	11.296,94	0,09	12.369,87	0,09	13 426,97	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.036.34	0,05	6.803,97	0,06	7.241,86	0,06	7 822,28	0,06	8 185,60	0,06
F. Konstruksi	853.383.05	7,72	982.683,95	8,12	1.091.639,61	8,36	1 186 730,91	8,48	1 154 215,51	8,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1.033.627.44	9,35	1.127.024,86	9,31	1 249 229,56	9,57	1 380 220,24	9,86	1 397 758,78	9,96
H. Transportasi dan Pergudangan	288.373.09	2,61	325.237,.89	2,69	348 931,07	2,67	381 207,50	2,72	371 597,31	2,65
I. Penyediaan Akomodasi dan	97.841.09	0,88	109.117,71	0,90	120.383,28	0,92	132 655,07	0,95	128 066,62	0,91
J. Informasi dan Komunikasi	426.889.63	3,86	474.260,66	3,92	503.837,40	3,86	548 830,26	3,92	589 488,07	4,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	115.137.34	1,14	122.894,47	1,01	129.119,63	0,99	135 873,63	0,97	141 925,74	1,01
L. Real Estate	229.922.59	2,08	259.813,02	2,15	280 215,46	2,15	302 254,06	2,16	304 382,76	2,17
M, N. Jasa Perusahaan	6.050.12	0,05	6.445,13	0,05	6.729,47	0,05	7.112,49	0,05	7 148,73	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	389.201.23	3,52	417.091,17	3,44	440 026,58	3,37	465 376,13	3,32	492 715,43	3,51
P. Jasa Pendidikan	334.298.70	3,02	366.345,45	2,96	380 731,91	2,92	425 837,23	3,04	448 451,50	3,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	108.740.75	0,98	114.093,36	0,94	122 934,12	0,94	134 858,86	0,96	151 179,40	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	60.197.03	0,54	67.105,62	0,55	71 295,87	0,55	78 428,71	0,56	74 284,01	0,53
PDRB	**11.060.713.00**	**100**	**12.108.683,35**	**100**	**13.055.240,53**	**100**	**13.999.288,35**	**100**	**14.037.767,24**	**100**

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

Tabel II-28 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta upiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2016	2017	2018*)	2019**)	2020**)
1. Pengeluaran Kusomsi Rumah Tangga	**6.791.036**	**7 452 502**	**8 078 966**	**8 746 927**	**8 919 906**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	4.156.480				
1.b. Pakaian dan Alas kaki	305.527				
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	751.104				
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	608.288				
1.e. Trasportasi, Komunikasi, Reaksi dan Budaya	666.965				
1.f. Hotel dan Restoran	57.772				
1.g. Lainnya	304.899				
2. Pengeluaran Kosumsi LNPRT	**140.345**	**161 079**	**194 807**	**216 404**	**214 898**
3. Pengeluatan Kosumsi Pemerintah	**968.901**	**1.044.103**	**1 083 345**	**1 132 341**	**1 144 349**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**3.404.003**	**3 725 274**	**4 185 379**	**4 556 556**	**4 506 260**
4.a. Bangunan	2.155.057				
4.b. Non-Bangunan	1.208.964				
5. Perubahan Inventori	**40.661**	**30 697**	**16 476**	**2 692**	**19 640**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**-284 234**	**-304 972**	**-503 733**	**-655 632**	**-767 286**
PDRB	**11.060.713**	**12.108.683**	**13 055 241**	**13 999 288**	**14 037 767**

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

Tabel II-29 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2016	2017	2018*)	2019**)	2020**)
1. Pengeluaran Kusomsi Rumah Tangga	**4.860.911**	**5 106 547**	**5 330 367**	**5 599 655**	**5 563 346**
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	2.801.690				
1.b. Pakaian dan Alas kaki	234.487				
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	597.545				
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	461.043				
1.e. Trasportasi, Komunikasi, Reaksi dan Budaya	494.250				
1.f. Hotel dan Restoran	46.832				
1.g. Lainnya	225.065				
2. Pengeluaran Kosumsi LNPRT	**97.762**	**107 423**	**124 135**	**136 226**	**132 820**
3. Pengeluatan Kosumsi Pemerintah	**621.168**	**641 181**	**651 929**	**669 895**	**663 000**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**2.675.919**	**2 817 876**	**3 048 296**	**3 216 242**	**3 119 839**
4.a. Bangunan	1.709.363				
4.b. Non-Bangunan	972.557				
5. Perubahan Inventori	**3.657**	**3 971**	**3 799**	**1 299**	**9 389**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**-25 630**	**-22 701**	**-55 647**	**-49 445**	**-25 585**
PDRB	**8.233.786**	**8 654 296**	**9 102 880**	**9 573 871**	**9 462 809**

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 masih dominasi oleh sektor pertanian dan industry pengolahan. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian dan industry pengolahan masih menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Sebagai gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.30 Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (%)

SEKTOR	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Pertanian, Perikanan, Kehutanan	37,19	36,44	36,05	35,04	36,13
Pertambangan dan Penggalian	4,59	4,61	4,57	4,57	4,81
Industri Pengolahan	22,44	22,77	22,89	23,24	2143
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Kontruksi	7,72	8,12	8,33	8,42	8,42
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,35	9,31	9,57	9,96	9,96
Transportasi dan Pergudangan	2,61	2,69	2,67	2,72	2,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,90	0,92	0,95	0,91
Informasi dan Komunikasi	3,86	3,92	3,86	3,92	4,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,01	0,99	0,97	1,01
Real Estat	2,08	2,15	2,15	2,16	2,17
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	3,44	3,37	3,32	3,51
Jasa Pendidikan	3,02	2,96	2,92	3,04	3,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,94	0,94	0,96	1,08
Jasa Lainnya	0,54	0,55	0,55	0,56	0,53

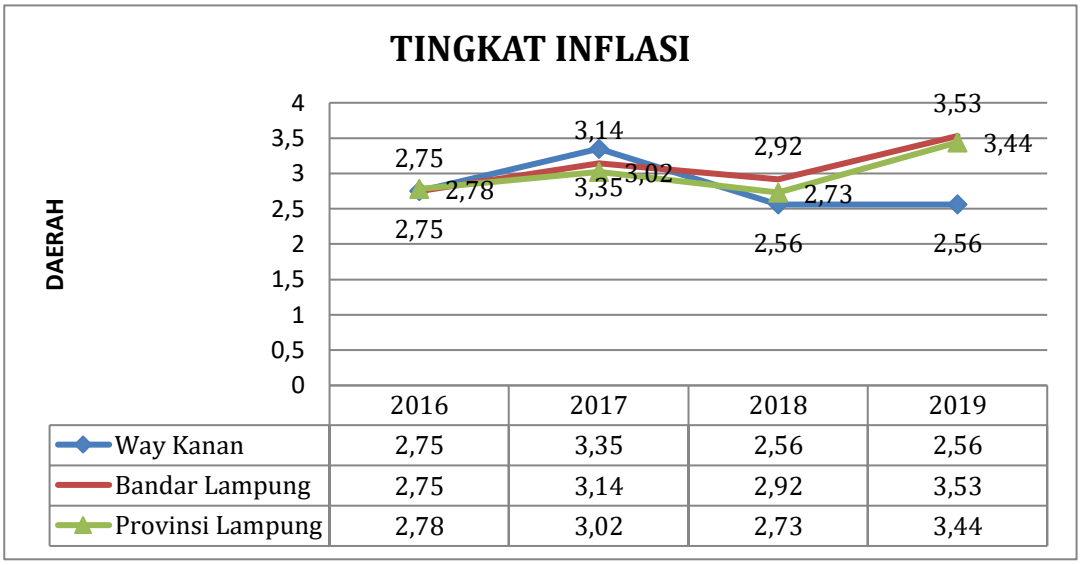
Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

2.2.2 LAJU INFLASI DAERAH

Secara umum inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang ditimbulkan karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. BPS menggunakan pengelompokan inflasi berdasarkan pengelompokan Inflasi Inti dan Inflasi non Inti. Pengelompokan ini disebut disagregasi inflasi. Inflasi Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan Inflasi Non Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). *Volatile Food* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan *Administered Prices* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Laju inflasi di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami pluktuatif pada tahun 2016 sebesar 2,75 %, dan di tahun 2017 naik menjadi 3,35 %, dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 2,56%, namun masih berada di bawah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung masing-masing sebesar 3,44% dan 3, 53 %. Secara rinci tren inflasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

GRAFIK II.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi, dan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019
Way Kanan	2,75	3,35	2,56	2,56
Bandar Lampung	2,75	3,14	2,92	3,53
Provinsi Lampung	2,78	3,02	2,73	3,44

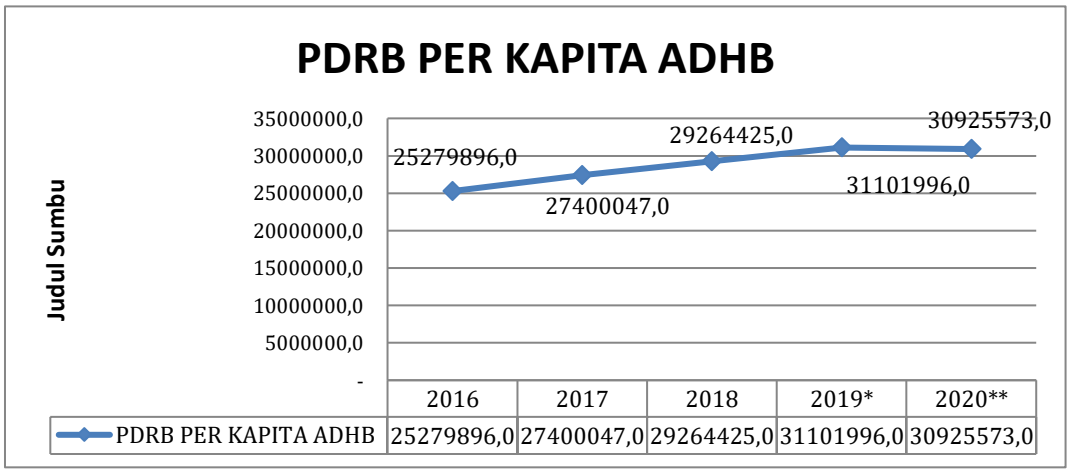
Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020

2.2.3 PDRB PERKAPITA

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Way Kanan juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Per Kapita Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 secara rinci terdapat pada grafik berikut:

GRAFIK II. 4 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019*	2020**
PDRB PER KAPITA ADHB	25279896,0	27400047,0	29264425,0	31101996,0	30925573,0

Sumber: Kabupatn Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

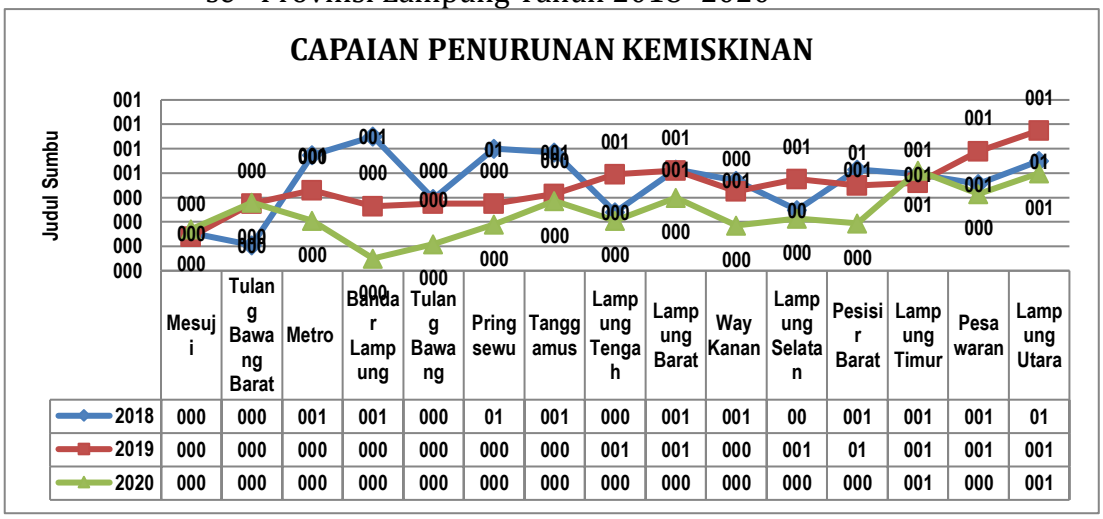
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Way Kanan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 25,278.896 . Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai Rp 31,101.996,-, namun mengalami penuruna di tahun 2020 menjadi Rp 30.925.573,-. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.2.4 TINGKAT KEMISKINAN

Capaian Penurunan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 berada pada peringakat ke 6 (enam) dengan penurunan kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 0,17 point dan masih di bawah Provinsi Lampung sebesar 0,28 point.

GRAFIK II.5 Capaian Penurunan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota se - Provinsi Lampung Tahun 2018 -2020

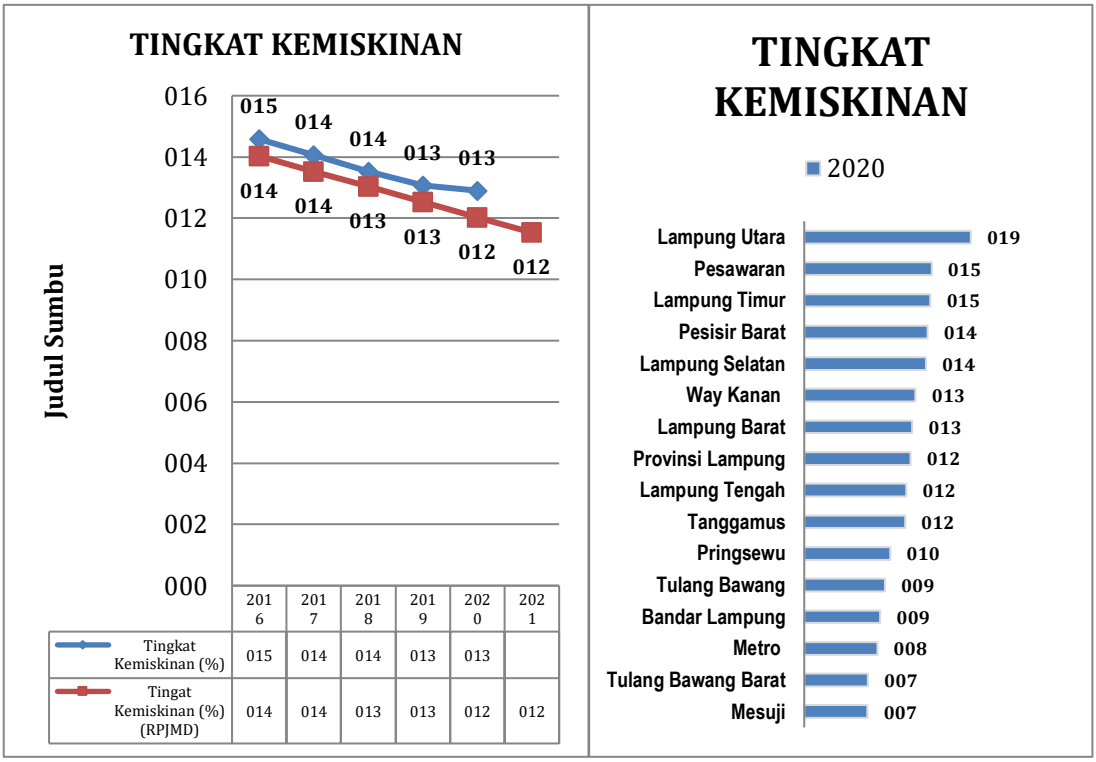


	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Metro	Bandar Lampung	Tulang Bawang	Pringsewu	Tanggamus	Lampung Tengah	Lampung Barat	Way Kanan	Lampung Selatan	Pesisir Barat	Lampung Timur	Pesawaran	Lampung Utara
2018	000	000	001	001	000	01	001	000	001	001	00	001	001	001	01
2019	000	000	000	000	000	000	000	001	001	000	001	01	001	001	001
2020	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	001	000	001

Sumber Data: BPS Provinsi Lampung dan BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap wilayah, termasuk Way Kanan pasti memiliki warga/penduduk miskin. Di Kabupaten Way Kanan, persentase penduduk miskin tahun demi tahunnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 12,90 persen dengan garis kemiskinan Rp. 341.012,-

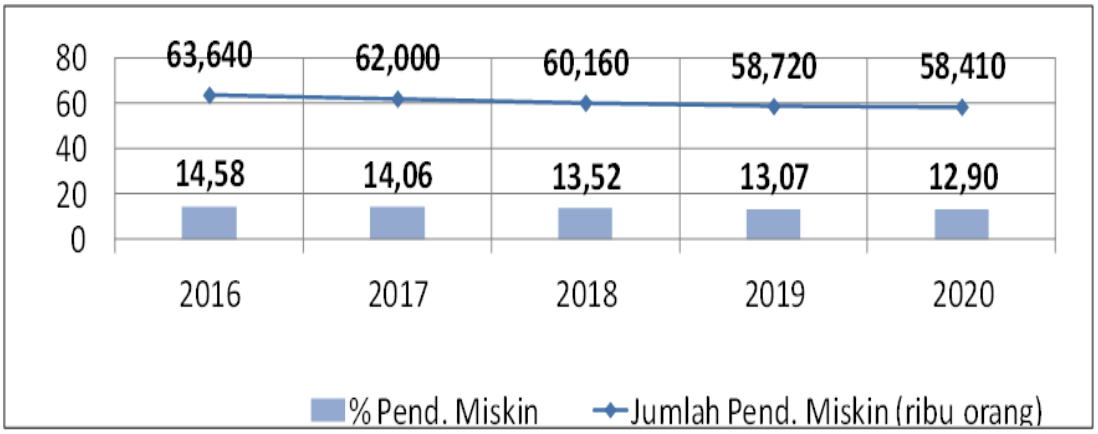
GRAFIK II. 6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber Data: BPS Provinsi Lampung dan BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Upaya penanganan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Langkah yang telah dilaksanakan antara lain yaitu dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dengan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Way Kanan.

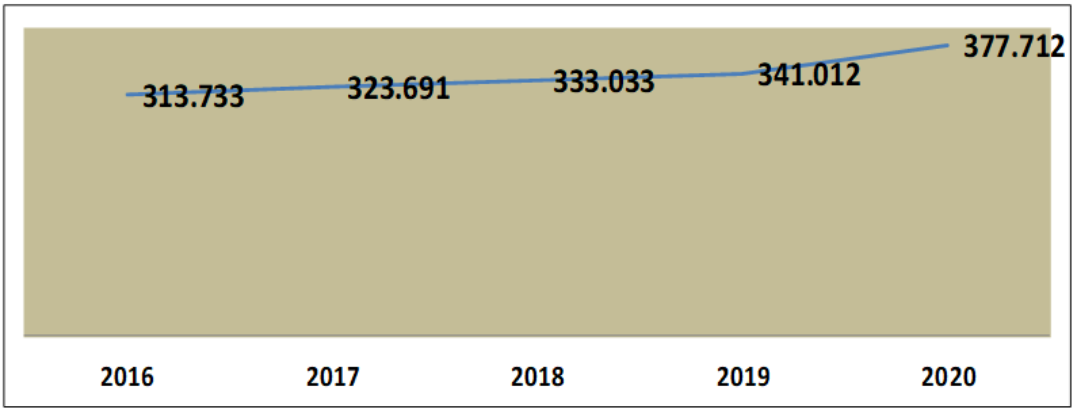
GRAFIK II. 7 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Secara Umum, Persentasi penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2020. Persentase Penduduk miskin Kabupaten Way Kanan tahun 2020 sebesar 12,90 persen turun hanya 0,17 Point dari tahun 2019 mengalami perlambatan disbanding tahun sebelumnya sebesar 0,45 point, ini disebabkan pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk miskin berkurang dari 63.640 ribu Jiwa atau 14,58 persen pada tahun 2016 menjadi 58,410 ribu Jiwa atau 12,90 persen pada Tahun 2020. Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Way Kanan selama periode 2016-2020 turun sebanyak 5.230 ribu orang (2,58 persen).

GRAFIK II. 8 Perkembangan Garis Kemiskinan Rp/Perkapita/Bulan) Kabupaten Way Kanan, 2016-2020

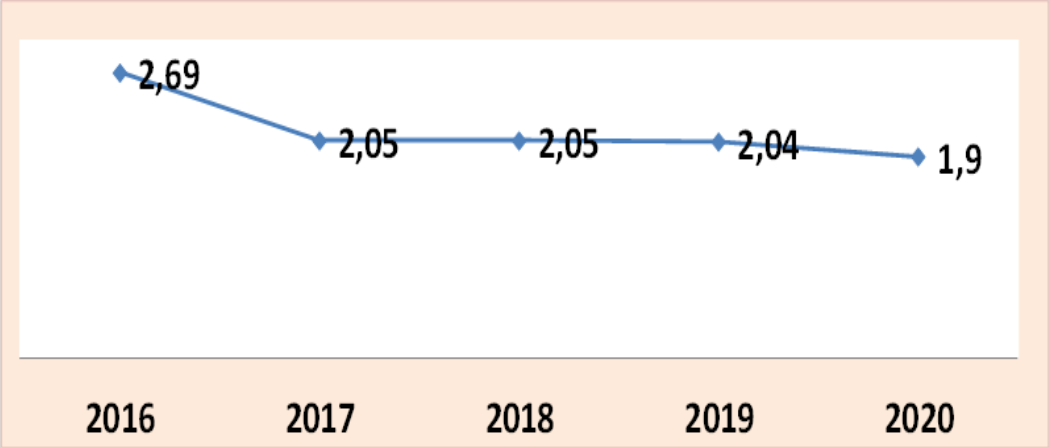


Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Garis Kemiskinan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 meningkat Rp 377.712 perkapita perbulan dibandingkan tahun 2019. Meskipun Garis Kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin pada periode yang sama justru berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mampu mengimbangi kenaikan harga barang. Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

2.2.5 KEDALAMAN KEMISKINAN

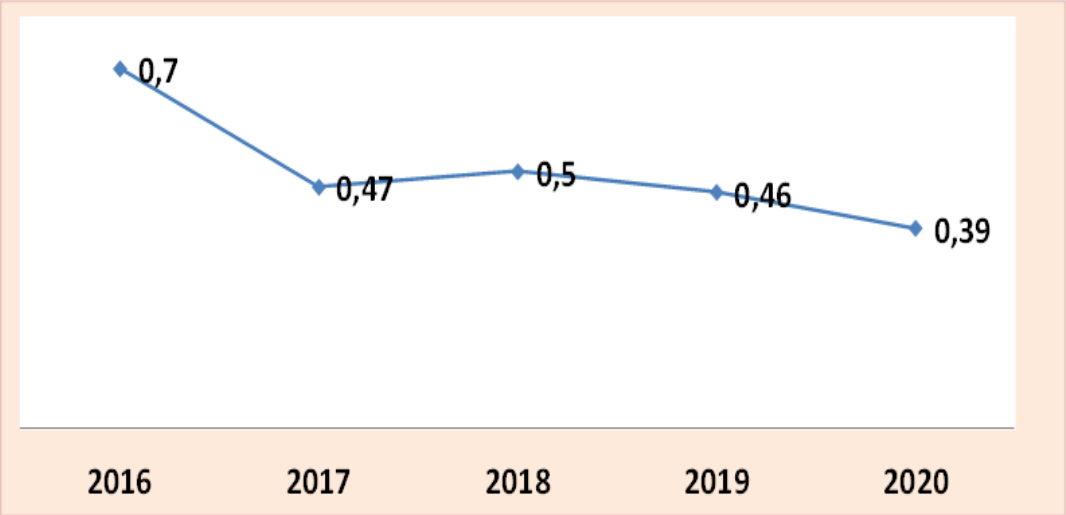
GRAFIK II. 9 Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Tahun 2016 – 2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 1,90 persen nilai indeks, artinya rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Way Kanan cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit

GRAFIK II. 10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Indeks Keparahan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin . Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Way kanan tahun 2020 sebesar 0,39 persen turun 0,07 persen dari tahun 2019, artinya jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin homogen kodisinya.

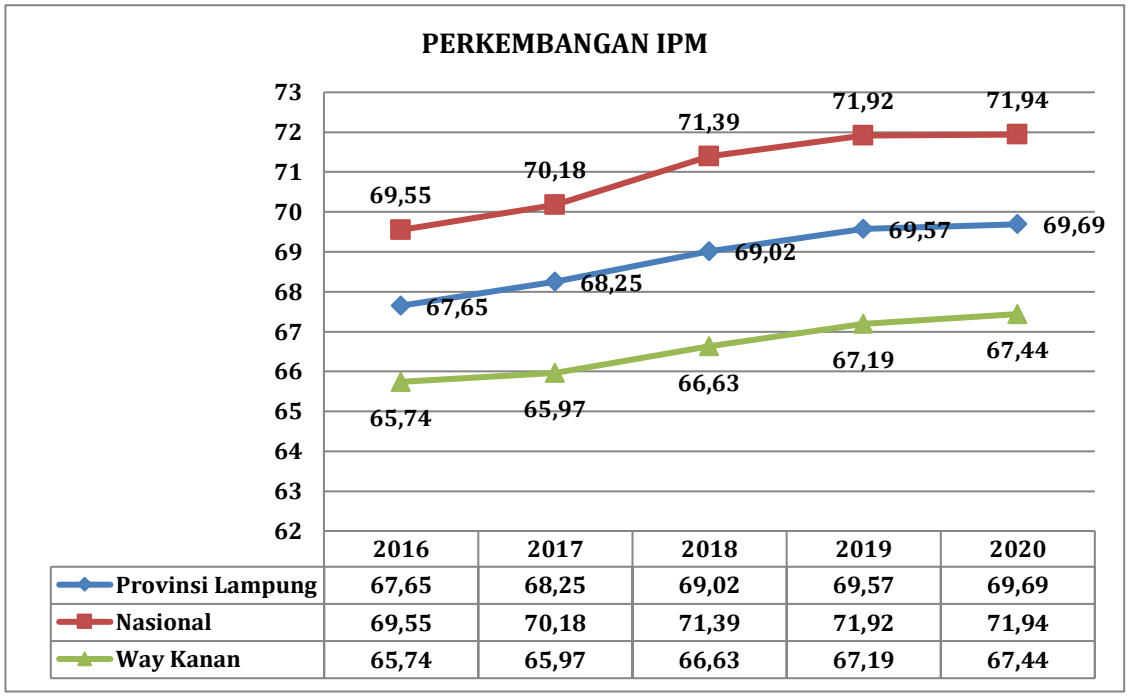
2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dsb. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur Panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

IPM Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2016-2020 secara signifikan mengalami peningkatan yaitu dari **65,74 (2016)** menjadi **67,44 (2020),** namun angka IPM Way Kanan masih berada dibawah rata-rata Provinsi sebesar **69,69** dan Nasional sebesar **71,94**.

GRAFIK II.11 Perkembangan Ipm Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69
Nasional	69,55	70,18	71,39	71,92	71,94
Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2020 berada di bawah 70, atau berstatus ***SEDANG***. Hanya empat Kabupaten/Kota dengan IPM diatas 70,00 yaitu: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Kabupaten Way Kanan berada di perinkat ke- sembilan dari lima belas Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Tabel II. 31 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020
Bandar Lampung	75,34	75,98	76,63	77,33	77,44
Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19
Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,30
Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16
Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69
Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37
Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52
Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36
Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,50	67,80
Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44
Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42
Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97

WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020
Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79
Pesisir Barat	61,50	62,20	62,96	63,79	63,91
Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Gambaran kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan tersaji pada berikut:

TABEL II.32 Kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

KOMPONEN IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,58	68,74	68,95	69,27	69,40
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,31	12,32	12,333	12,35	12,36
3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,33	7,34	7,35	7,39	7,70
4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rp)	8.411	8.522	8.979	9.292	9.102

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Angka Harapan Hidup Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 mencapai 68,58 naik menjadi 69,40 di tahun 2020.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2016-2020) juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 mencapai 12,31 tahun naik menjadi 12,36 Tahun di Tahun 2020.

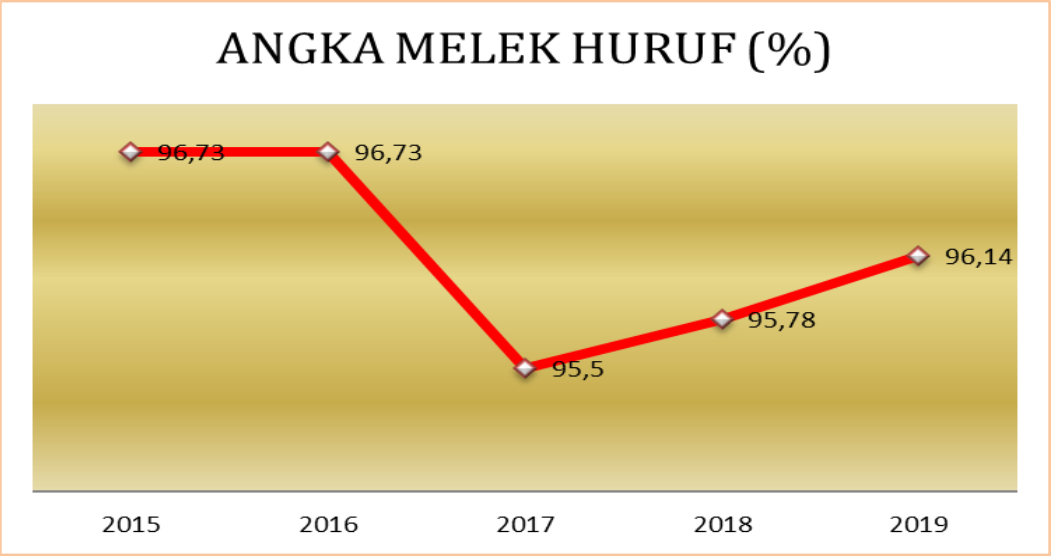
Rata-Rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dari tahun 2016-2020 yaitu pada Tahun 2016 mencapain 7,33 tahun, naik menjadi 7,70 Tahun di tahun 2020.

Pengeluaran Perkapita mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.411.000 naik menjadi Rp. 9.102.000 di Tahun 2020.

2.2.7 ANGKA MELEK HURUF

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Way Kanan secara umum dapat terukur melalui indikator tertentu, salah satu diantaranya adalah angka melek huruf. **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 96,73 persen turun menjadi 95,50 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 95,78 pada tahun 2018, dan 96,14 pada tahun 2019. Perkembangan angka melek huruf setiap tahunnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

GRAFIK II.12 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019



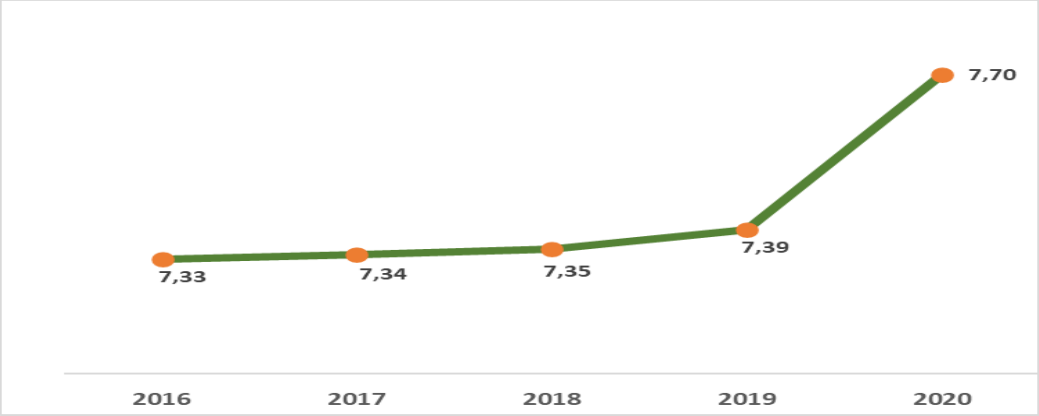
Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020

2.2.8 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 baru mencapai 7,33 tahun terus meningkat menjadi 7,70 tahun pada tahun 2020, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 baru mampu menempuh pendidikan sampai

dengan kelas 7,7 atau putus sekolah di kelas 8. Posisi ini masih dibawah target akhir RPJMD sebesar 7,73 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada gambar berikut.

GRAFIK II.13 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

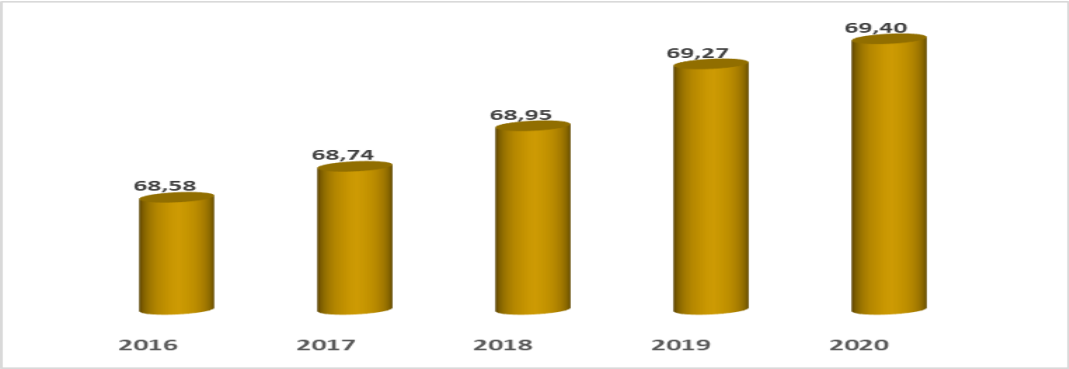


Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.2.9 ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Way Kanan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2016 terlihat AHH penduduk Kabupaten Way Kanan sebesar 68,58 tahun, terus mengalami kenaikan menjadi 69,40 tahun pada tahun 2020. Ini menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dimana dapat dilihat pada grafik berikut.

GRAFIK II.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.2.10 JUMLAH BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB). Variabel Umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah balita gizi buruk ada 6 kasus yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Blambangan Umpu 1 kasus, Puskesmas Negeri Baru 1 kasus, Puskesmas Rebang Tangkas 1 kasus, Puskesmas Serupa Indah 1 kasus, Puskesmas Pisang Baru 1 kasus dan Puskesmas Negeri Agung 1 kasus .

Tabel II.33 Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	5	6	6	6	0

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.2.11 CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan prilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Jumlah desa siaga di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel II.34 Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016-2020

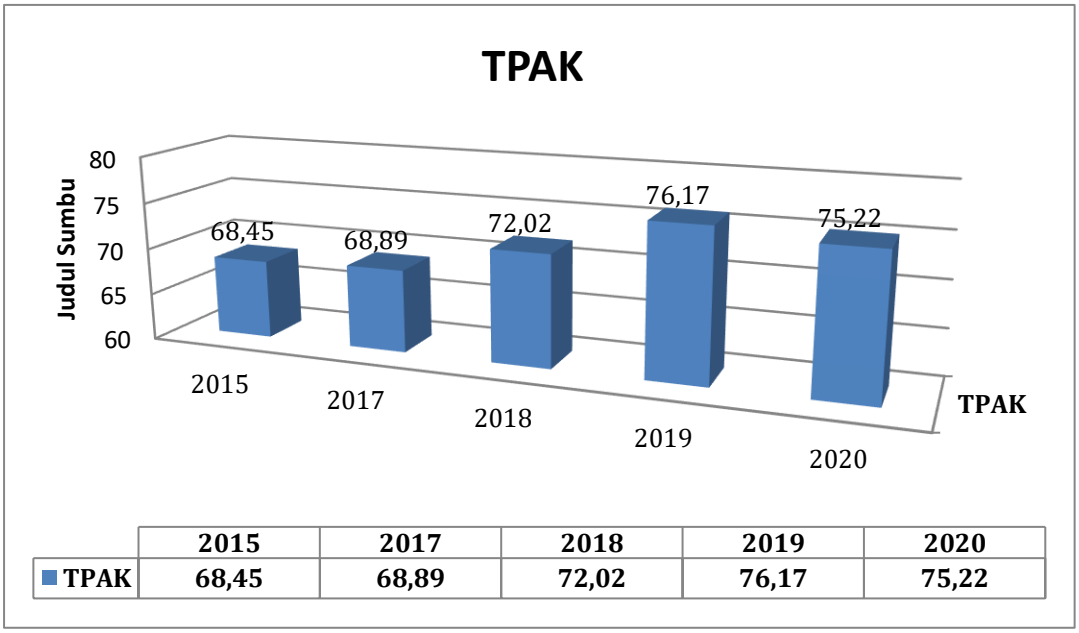
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Desa Siaga Aktif	227	227	227	227	227

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.2.12 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Indikator TPAK digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kegiatan masyarakat terhadap angka pesersediaan tenaga kerja.

GRAFIK II.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



	2015	2017	2018	2019	2020
TPAK	68,45	68,89	72,02	76,17	75,22

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021
Catatan : Tahun 2016 tidak tersedia estimasi kabupaten

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan tahun 2020 adalah 75,22 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 75 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka (persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja) yang dimiliki adalah 3,56 persen.

2.2.13 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Menurut jenis kegiatan utama, persentase penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2015-2020, baik jenis angkatan kerja, bukan angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL II.35 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2020

Jenis Kegiatan Utama	2015 (%)	2017 (Jumlah)	2018 (Jumlah)	2019 (Jumlah)	2020 (Jumlah)
Angkatan Kerja	**68,45**	**218.199**	**230.790**	**247.645**	**253.931**
Bekerja	66,03	211.912	220.524	238.736	244.888
Pengganggguran	2,42	6.287	10.266	8.909	9.043
Bukan Angkatan Kerja	**31,55**	**98.554**	**89.649**	**77.469**	**83.650**
Sekolah	7,83	18.960	18.987	16.051	16.578
Mengurus Rumah Tangga	20,28	74.073	61.773	53.944	53.372
Lainnya	3,43	5.521	8.889	7.474	13.700
TPAK (%)	**68,45**	**69,06**	**72,02**	**76,17**	**75,22**
TPT (%)	**3,53**	**2,88**	**4,45**	**3,59**	**3,56**

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020
Catatan : Tahun 2016 tidak tersedia estimasi kabupaten

Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan tahun 2017 adalah 218.199 penduduk usia kerja/angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki adalah 2,88 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Angkatan Kerja Kabupaten Way Kanan adalah 230.790 penduduk usia kerja/angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki adalah 4,45 persen. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 247.645, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 76,17 persen dan tingkat pengangguran terbukanya sebesar 3,59 persen. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 253.931, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 75,22 persen dan tingkat pengangguran terbukanya sebesar 3,56 persen.

2.2.14 RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel dibawah dapat diketahui bahwa terjadi jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya mengalami pluktuatif. Yang tertinggi pada tahun 2016 sebesar 96,90 % dan terendah pada tahun 2018 sebesar 95,55%.

Tabel II.36 Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk yang Bekerja (%)	96,90	97,72	95,55	96,40	96,20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Tahun 2021

2.2.15 RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS

Banyaknya penduduk produktif (15-64 tahun) disuatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk diwilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut.

Tabel II.37 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020

KELOMPOK UMUR	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15 – 19	7.863	2.776	10.639	19 972	17.323	37.204	19.895	19.033	38.928
20 – 24	14.305	6.884	21.189	20.093	17.828	37.921	19.582	19.125	38.707
25 – 29	17.360	6.851	24.211	18.906	16.828	35.734	20.299	19.135	39.434
30 – 34	17.341	8.961	26.302	17.332	16.461	33.793	20.858	19.692	40.550
35 – 39	15.941	9.762	25.691	16.202	15.820	32.022	18.970	17.558	36.528
40 – 44	15.289	11.075	26.364	15.733	15.890	31.623	16.909	16.149	33.058
45 – 49	14.032	11.386	25.418	14.897	14.782	29.679	14.547	13.840	28.387
50 – 54	12.073	7.285	19.358	12.580	12.419	24.999	12.197	11.966	24.163
55 – 59	10.456	6.538	16.994	11.067	10.186	21.253	10.601	10.307	20.908
60 – 64	7.794	4.356	12.150	8.427	7.445	15.872	8.399	7.861	16.260
65 +	8.665	3.543	12.208	5.687	5.014	10.701	13.870	12.453	26.323
Jumlah	**141.107**	**79.417**	**220.524**	**160.896**	**149.996**	**310.892**	**176.127**	**167.119**	**343.246**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demmand side* (pengganggura).

Tabel II.38 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Way KananTahun 2016-2020

Uraian	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%)	96,90	97,72	95,55	96,40	49,79

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Tahun 2021

Tabel II.39 Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2014-2019

KOMPONEN	2014	2015	2017	2018	2019
LAKI – LAKI	98,19	97,73	91,46	88,75	91,61
PEREMPUAN	93,82	94,03	45,08	54,07	59,59

Sumber :Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020
Tahun 2016 data tidak tersedia

2.2.16 PRESENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN

Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio realisasi PAD terhadap realisasi APBD dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, diawali 3,81 % di tahun 2016 terus meningkat hingga 6,32 % di tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL II. 40 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Ralisasi Pendapatan *(Audited)*	Realisasi PAD *(Audited)*	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan (%)
1	2016	1.164.839.362.140,84	44.346.945.471,84	3,81
2	2017	1.340.655.509.814,86	49.551.283.407,98	3,70
3	2018	1.385.711.587.665,59	56.764.985.088,23	4,10
4	2019	1.398.937.422.542,40	62.353.560.983,81	4,46
5	2020	1.289.460.561.990,25	64.617.681.616,75	5,01

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan (LRA) Tahun 2016-2021

2.2.17 NILAI OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel II.41 Nilai Opini BPK di Kabupaten Way Kanan

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan 2021

Kabupaten Way Kanan memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini

membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 10 tahun berturut-turut (tahun 2010-2020). Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

2.2.18 PENGUATAN CADANGAN PANGAN

Keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini :

a. Regulasi ketahanan pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa regulasi ketahanan pangan mulai ada pada Tahun 2013 yaitu Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Way Kanan masih berlaku sampai saat ini.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Ketersediaan Pangan Utama di Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketersediaan pangan di Kabupaten Way Kanan tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.42 Data Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (Ton)

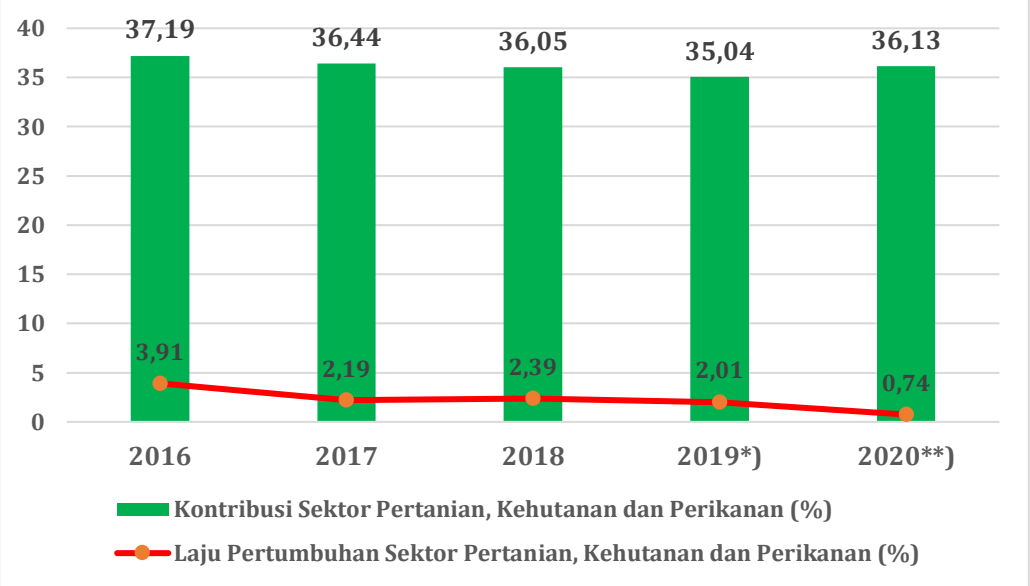
No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi (GKP)	175,188	187.188	210,309	627.548	1.102.850
	Beras	94,867.98	101.366,14	137,640.85	368.444,70	597.215.36
2	Jagung	49,019.77	91.173,93	164,149.28	132.982,59	70.090.43
3	Kedelai	839.15	124,38	19.90	2.063,98	590.04
4	Kc. Tanah	1,806.15	1.024,85	736.30	1.217,56	879.58
5	Kacang Hijau	428.85	219,45	142.00	-3,81	30.78
6	Ubi Kayu	372,789.11	358,232,68	292,590.31	393.925,78	454.625.77
7	Ubi Jalar	1,509.25	1.218,20	1,151.02	170,48	418.91
8	Buah-buahan	26,389.25	0	0	-9.586,97	0.00
9	Sayuran	2,061.63	0	0	-23.541,38	0.00
10	Daging	63.44	171.016,40	85,869.50	88.965,64	181.687.00
	- Sapi	43.37	671,41	67,646.07	72.660,87	72.660.87
	- Kerbau	2.92	1.215,89	1,227.83	1.239,77	1.239.77
	- Babi	5.75	69.609,21	7,022.71	7.082,41	7.082.41
	- Kambing	11.21	98.089,09	9,828.61	9.848,51	98.482.12
	- Domba	0.20	1.430,81	144.28	221,89	2.221.84
	- Unggas	54.77	492.245,41	50,188.80	16.083,82	554.151.32
11	Telur	83.15	508.816,20	51,891.84	60.466,97	700.958.99
	- Ayam Kampung	80.16	497.046,68	50,698.47	59.204,58	700.175.12
	- Ayam Petelur	2.01	4.011,05	405.51	495,63	495.63
	- Itik	0.98	7.758,46	787.86	79,75	288.24
12	Ikan	0.00	1.346,38	1,346.38	5.249,50	1.376.15

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan, tahun 2021

2.2.19 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat Way Kanan.

GRAFIK II.16 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

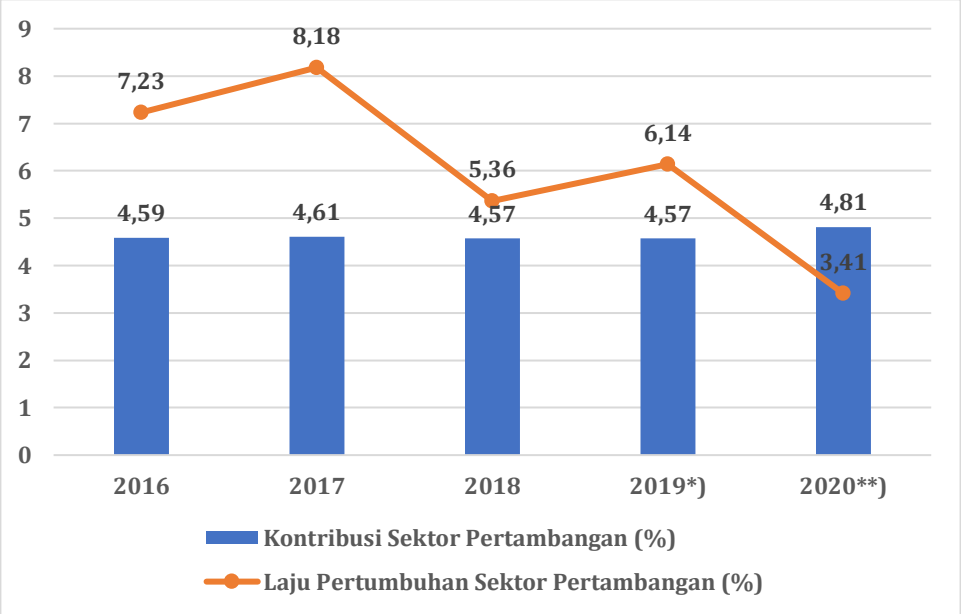
Pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 36,13 persen. Angka ini cenderung naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 35,04.

Selama periode 2016-2020 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Di tahun 2020 pertumbuhan kategori ini melambat dibanding tahun 2019. Basis utama kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Way Kanan adalah pada pertanian tanaman pangan dan perkebunan tahunan. Pada tahun 2019, luas panen tanaman pangan mengalami penurunan yang signifikan sehingga berimbas pada penurunan produksi. Penurunan pada sektor tanaman pangan menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan di sektor ini. Selain itu, produksi tanaman biofrakma seperti jahe dan lengkuas tercatat mengalami penurunan produksi.

2.2.20 KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Seluruh jenis komoditi dalam kategori pertambangan mencakup pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara, pertambangan bijih logam, serta pertambangan lainnya.

GRAFIK II.17 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

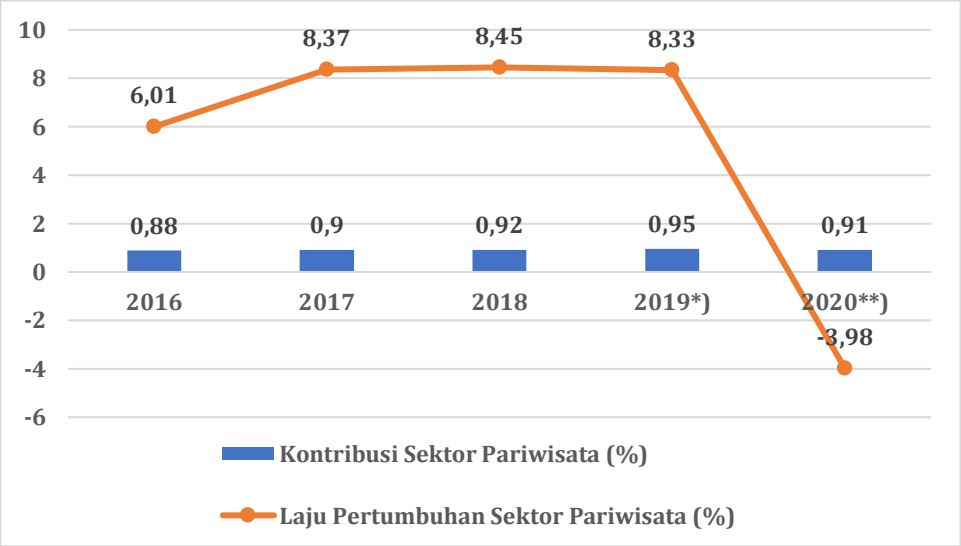
Pada Tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan sebesar 4,59 persen dan terus berfluktuatif hingga mencapai 4,81 persen pada Tahun 2020.

Selama periode 2016-2020 pertumbuhan yang dicapai sector pertambangan dan penggalian trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Di tahun 2016 tumbuh sebesar 7,23 persen dan pada tahun 2020 sebesar 3,41 persen.

2.2.21 KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

GRAFIK II.18 Kontribusi Sektor Pariwisata
Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



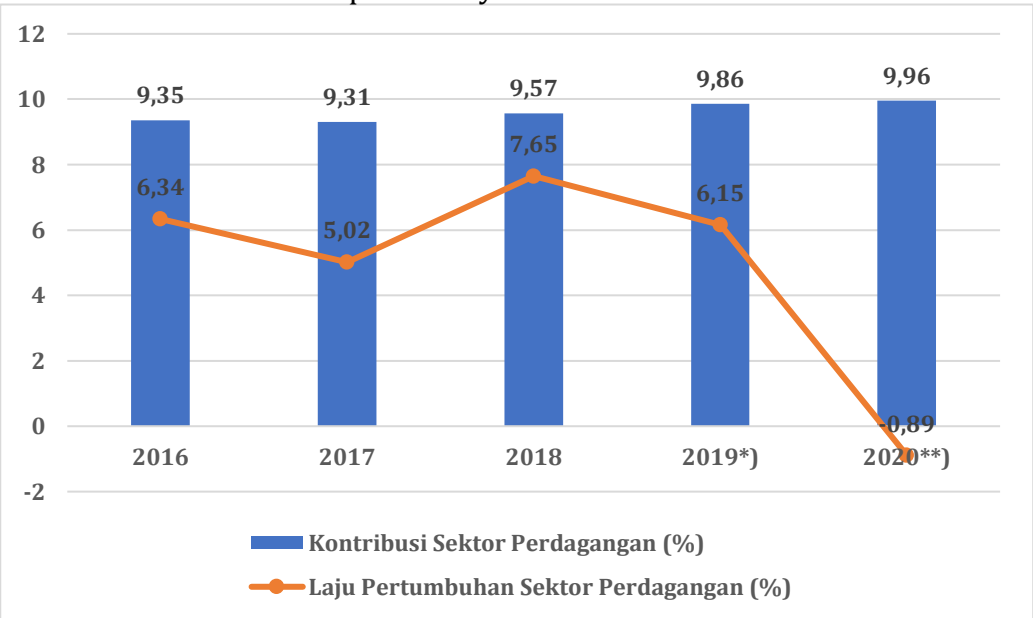
Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Selama lima tahun terakhir kategori penyediaan akomodasi dan makan minim telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ke sector pariwisata di Kabupaten Way Kanan. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB mengalami pluktuatif dari Tahun 2016 sebesar 0,88 persen sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,91 persen. Kondisi ini menunjukkan sektor ini mengalami pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 6,01 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,98 persen sebagai dampak dari virus covid-19. Dan di masa mendatang diharapkan sector pariwisata berpotensi memberikan kontribusi terhadap PDRB yang semakin besar.

2.2.22 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Keberhasilan pembangunan bidang perdagangan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

GRAFIK II.19 Pertumbuhan dan Kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Selama lima tahun terakhir kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ke tiga di Kabupaten Way Kanan. Kontribusi kategori ini pada 2016-2020 berada pada kisaran 9 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini di tahun 2021 adalah sebesar 1,004 triliun rupiah atau sebesar 9,96 persen dari total nilai tambah Way Kanan. Kategori ini didominasi oleh kegiatan perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan yang dialami kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2020 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu terkontraksi sebesar 0,89 persen sebagai dampak dari virus covid-19, dimana di tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 6,15 persen.

2.2.23 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.

Keberhasilan pembangunan bidang industri yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

GRAFIK II.20 Pertumbuhan dan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Peranan kategori Industri Pengolahan merupakan penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Way Kanan di tahun 2020. Nilai peranan kategori ini mencapai 21,43 persen, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 23,24 persen. Nilai ini sejalan dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga mengalami kontraksi di tahun 2020 yakni 8,37 persen.

Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri rumah tangga yang mengolah bahan makanan dan minuman, seperti industri pengolahan kopi/keripik kemasan.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 FOKUS URUSAN LAYANAN WAJIB

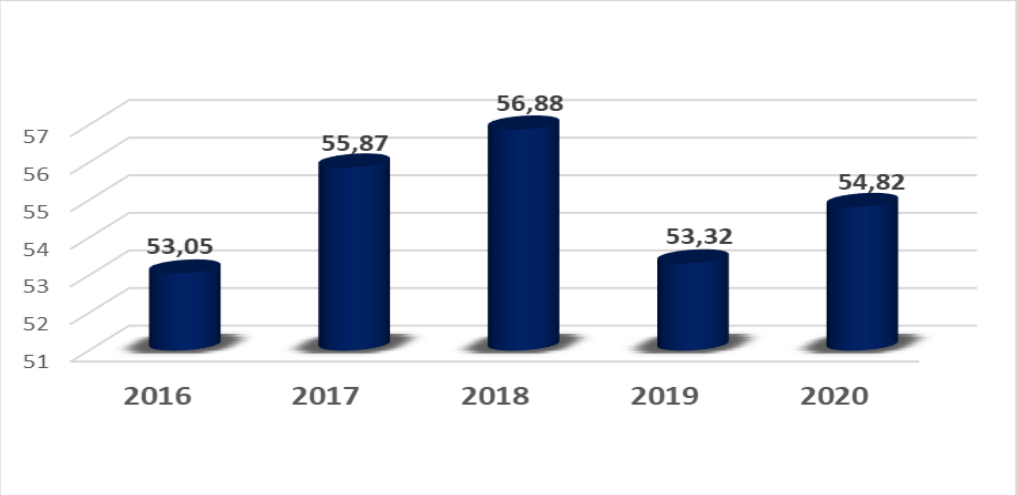
2.3.1.1 PENDIDIKAN

Kinerja pembangunan bidang urusan Pendidikan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan PAUD dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah PAUD, perkembangan APK PAUD Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2018 terus menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 51,22 naik menjadi 56,88 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 turun menjadi 52,92.

GRAFIK II.21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud Tahun 2016-2020

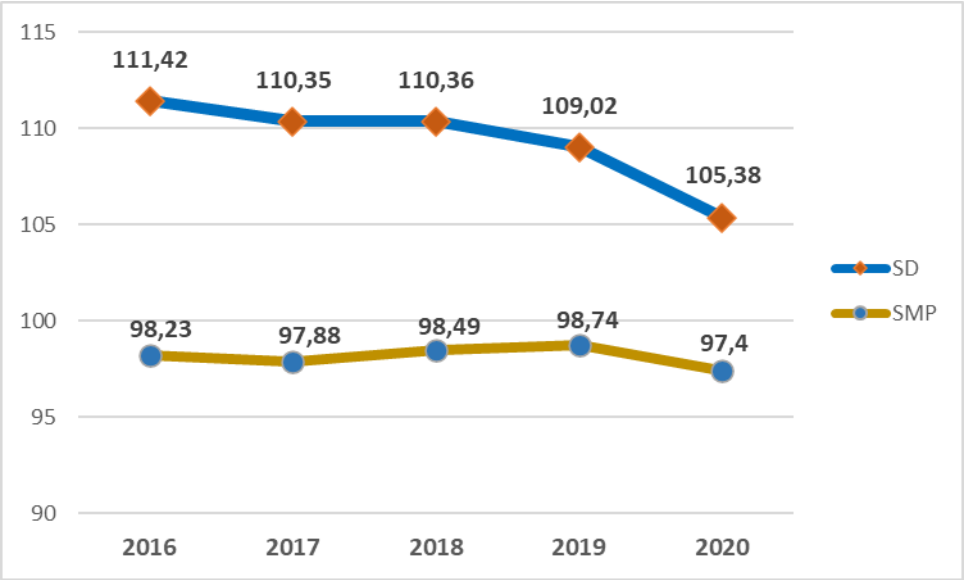


Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2015-2016,
Dinas Pendidikan Dalam Angka Tahun 2017-2020

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan Sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah, gambaran umum APK Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

GRAFIK II.22 APK Pendidikan di Kab. Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

a. Sekolah Dasar (SD)/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan jenjang Sekolah Dasar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Dasar. Perkembangan APK SD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 s.d 2020 mengalami pluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 114,42 turun menjadi 110,35 pada tahun 2017, pada tahun 2018 naik menjadi 110,36 dan pada tahun 2019 turun menjadi 109,02, kemudian turun menjadi 105,38 pada tahun 2020.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dibandingkan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Pertama. perkembangan APK SMP Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 s.d 2020 terus mengalami mengalami pluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 98,23, dan pada tahun 2020 menjadi 97,4.

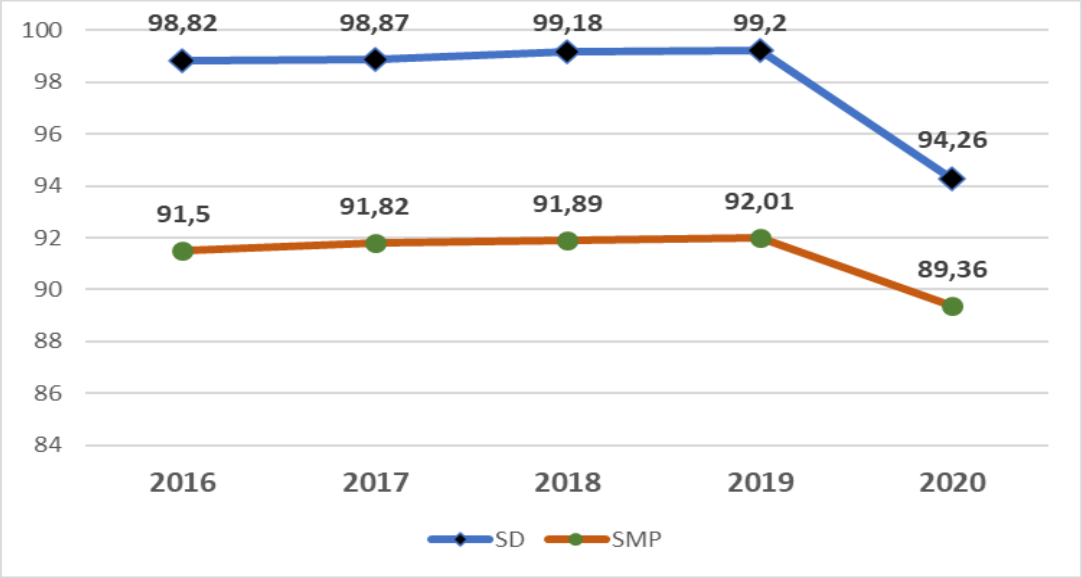
c. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdiri SMA/SMK dan sederajat, merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Atas. Pada periode tahun 2015 s.d 2016, APK mengalami peningkatan pada tingkat SMA/SMK/sederajat tahun 2015 sebesar 67,55 meningkat menjadi 93,99 pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 79,02 pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 85,25 pada tahun 2019.

2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah yang mengikuti jenjang pendidikan sekolah, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah. gambaran umum APM Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 s.d 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

GRAFIK II. 23 APM Pendidikan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

a. Sekolah Dasar (SD)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah dasar yang mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar, perkembangan APM SD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 s.d 2020 mengalami pluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 98,82 naik menjadi 98,87 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 99,18, naik kembali pada tahun 2019 manjadi 99,2, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 94,26.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggambarkan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.perkembangan APM SMP Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 s.d 2019 terus mengalami kenaikan Pada tahun 2016 sebesar 91,5, pada tahun 2019 APM tingkat SMP di Kabupaten Way Kanan Mengalami Kenaikan menjadi 92,01. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 89,36.

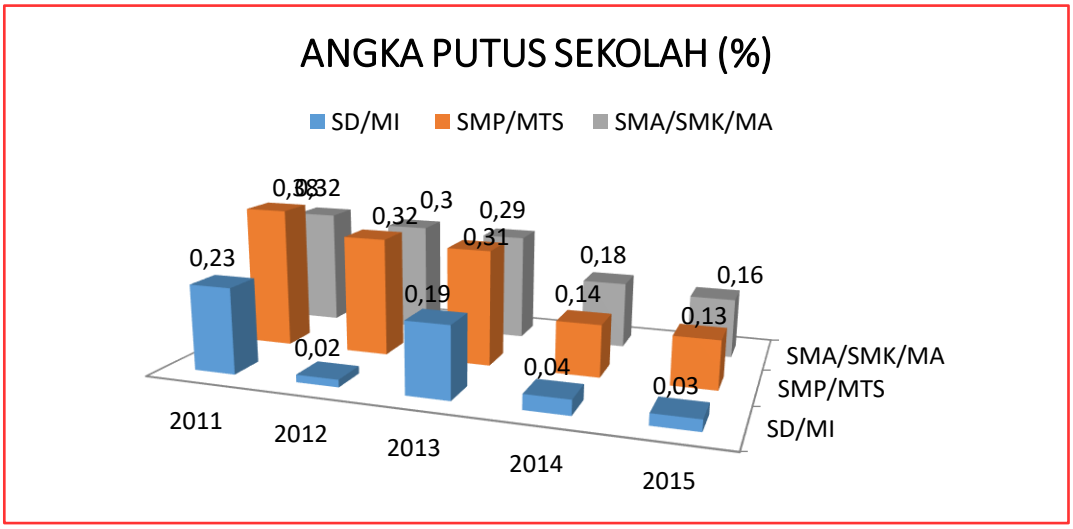
c. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menggambarkan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Atas yang mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Pada periode tahun 2015 s.d 2019, APM pada tingkat SMA/SMK/sederajat mengalami pluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 57 yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 60,82, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 57,63, kemudian meninhkat kembali pda tahun 2019 menjadi 58,61.

2.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dapat di lihat pada gambar berikut:

GRAFIK II.24 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2011-2015



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2015

Jumlah Angka putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI mengalami pluktuatif, pada tahun 2011 sebanyak 0,23 persen, pada tahun 2012 sebanyak 0,02 persen dan pada tahun 2015 sebanyak 0,03 persen. Pada tahun 2017 menurut Data Dinas Pendidikan Jumlah Siswa Putus Sekolah untuk tingkat SD sebanyak 133 siswa.

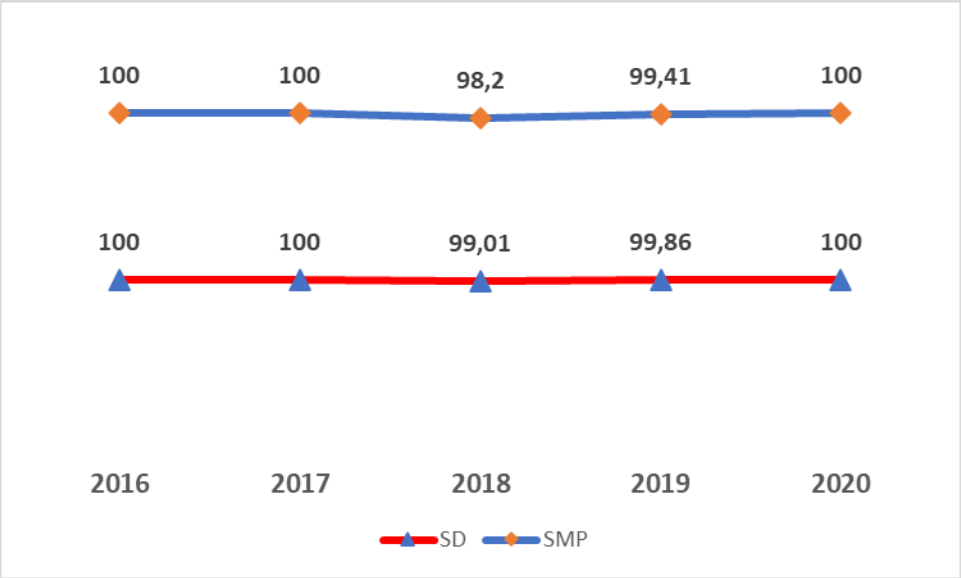
Jumlah Angka putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTS terus mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebanyak 0,38 persen dan pada tahun 2015 sebanyak 0,13 persen. Pada tahun 2017 menurut Data Dinas Pendidikan Jumlah Siswa Putus Sekolah untuk tingkat SMP sebanyak 154 siswa.

Begitu juga Jumlah Angka putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/SMK/MA terus mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebanyak 0,32 persen dan pada tahun 2015 sebanyak 0,16 persen.

2.3.1.1.5 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan SD, SMP, SMA Kabpaten Way Kanan terdapat pada gambar berikut.

GRAFIK II.25 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun 2016 sebesar 100, terus mengalami pluktuatif hingga pada tahun 2020 jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 100 persen.

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS pada tahun 2016 sebanyak 100 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun 2018 sebesar 99,01 persen dan pada tahun 2019 sebesar 99,86 persen. Hingga pada akhirnya pada tahun 2020 naik menjadi 100 persen.

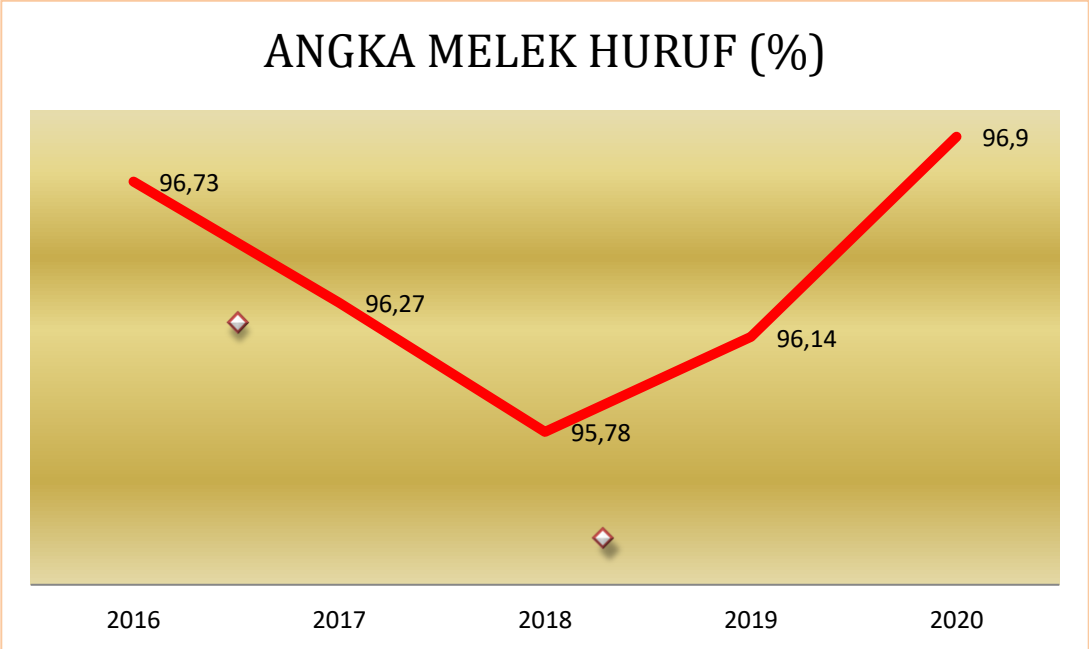
Begitu juga Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebanyak 100 persen, pada tahun 2014 sebanyak 94,75 persen dan pada tahun 2017 sebanyak 100 persen.

2.3.1.1.6 Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Way Kanan secara umum dapat terukur melalui indikator tertentu, salah satu diantaranya adalah angka

melek huruf. Angka melek huruf adalah angka yang dipakai untuk menyatakan persentase penduduk umur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 96,73 persen, namun mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 hingga mencapai 95,78 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 96,14 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 96,90 persen. Perkembangan angka melek huruf setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik berikut.

GRAFIK II.26 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.2 KESEHATAN

Capaian pembangunan bidang Kesehatan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

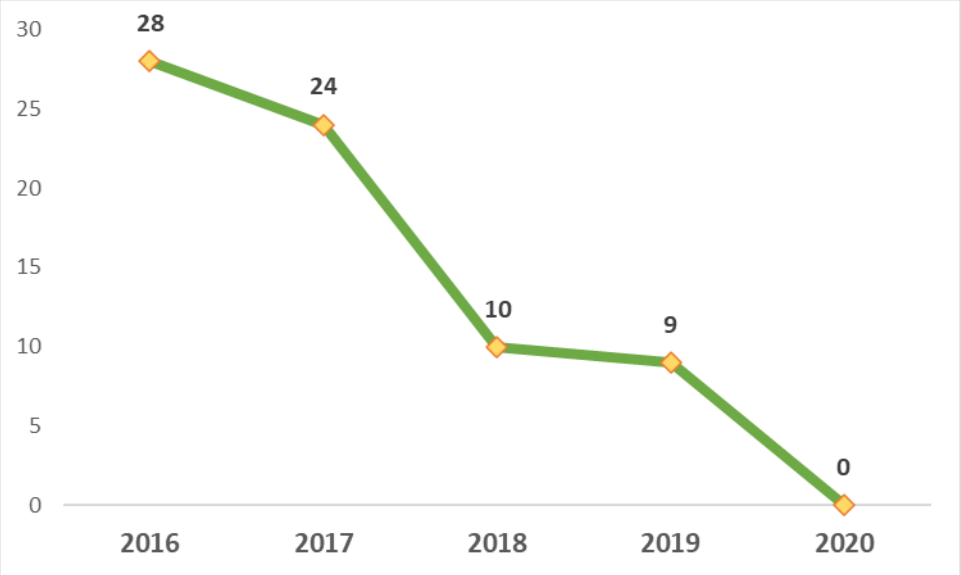
2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup

pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka kematian bayi di Kabupaten Way Kanan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebanyak 28 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 24 kasus, pada tahun 2018 terdapat 10 kasus sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan terdapat 9 kasus serta pada tahun 2020 terdapat 0 kasus. Berikut ini gambar pemetaan kematian bayi.

GRAFIK II.27 Jumlah Kasus Kematian Balita Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber Data: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak yang berumur < 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui pada tahun 2016 kematian balita tidak didapatkan laporan kematian balita. Pada tahun 2017 tidak ditemukan kematian pada balita, kemudian pada tahun 2018 terdapat jumlah kematian balita sebanyak 13 kasus terdiri dari Neonatal (0-28 hari) 8 kasus, Bayi (0-11 bulan) 4 kasus, Anak balita (12-59 bulan) 1 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 9 kasus terdiri dari Neonatal (0-28 hari) 7 kasus, Bayi (0-11 bulan) 2 kasus, tidak ada kasus pada anak balita (12-59 bulan).

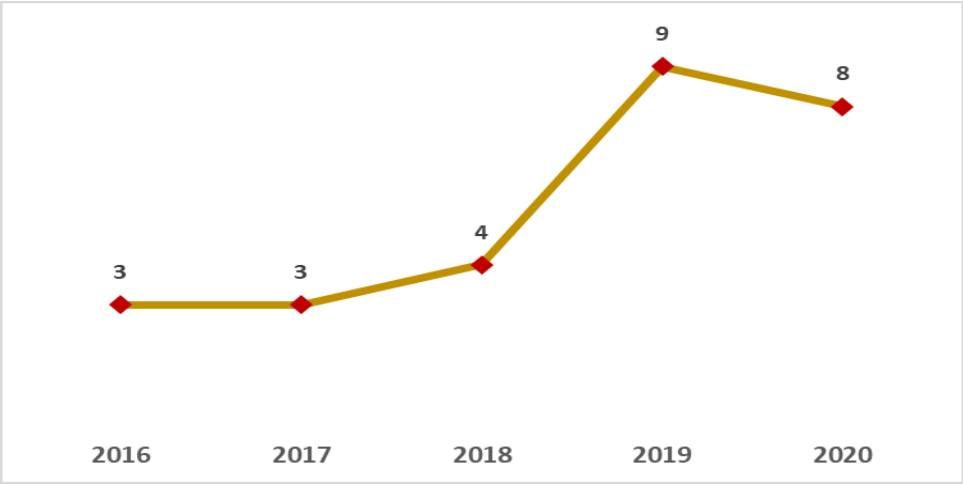
2.3.1.2.3 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan / kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan, indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikaannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Indikator kematian ibu melahirkan di Kabupaten Way Kanan periode tahun 2016-2019 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 terdapat 3 kasus kematian, menjadi 9 kasus pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8 kasus sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

GRAFIK II.28 Kasus Kematian Ibu Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Tahun 2021

Upaya-upaya preventif terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan guna menekan jumlah kasus kematian ibu, kita berharap ke depannya kasus kematian dapat kita minimalisir dengan upaya pencegahannya.

Angka kesakitan penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik penyakit menular maupun tidak menular. Pada pola penyakit yang ada di wilayah kabupaten Way Kanan tahun 2019 berdasarkan laporan bulanan (data kesakitan) SP2TP Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Infeksi akut lain pada saluran nafas bagian atas menjadi peringkat pertama pada pola penyakit rawat jalan dan inap pada tahun ini.

2.3.1.2.4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Di Tangani

Tabel II.43 Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	1.857	1.093	1.063	354	861

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan pada tahun 2016 sebanyak 1.857 kasus, dan paada tahun 2020 sebanyak 861 kasus dari 1.777 perkiraan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan atau sebesar 48,5%.

2.3.1.2.5 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Tabel II.44 Jumlah Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2018	2019	2020
Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	*8.010*	*7.655*	*8.129*	*8.009*	*7.781*

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Pelayanan kesehatan pada ibu antenatal care dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru bumil (K1) yang cakupannya dilihat dari akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan kualitas frekuensi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga. Pada tahun 2020 cakupan kunjungan bumil K4 sebanyak 8.261 orang (93,0%).

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada tahun 2015 sebanyak 8.010 orang dan Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Way Kanan tahun 2020 terdapat sebanyak 7.781 orang (91,7%).

2.3.1.2.6 Jumlah Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan neonatal (KN) merupakan persentase neonatal (bayi kurang dari satu bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal 2 kali dari tenaga kesehatan, satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali pada umur 8-28 hari. Jumlah kunjungan neonatus lengkap di Kab. Way Kanan tahun 2019 sebanyak 8.069.

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dapat dilihat pda table berikut :

Tabel II.45 Jumlah Kunjungan Bayi Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kunjungan bayi	8.091	6.450	7.428	8.125	8.069

Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

2.3.1.2.7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

Program Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) antara lain : Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis dan polio.

Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) tahun 2019 di Kab. Way Kanan adalah sebanyak 227 dari 227 desa/kelurahan (100 %) dengan cakupan imunisasi dasar lengkap sebanyak 8.440 bayi. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi jika cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu. Berarti dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat (*herd immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Tabel II.46 Kampung/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kampung/kelurahan dalam katagori UCI	227	225	227	227	227

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.1.2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel II.47 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan(%)	100	100	100	100	100

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Semua balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mendapatkan perawatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 5 balita tahun 2017 smpai 2019 masing-masing sebanyak 6 balita.

2.3.1.2.9 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC, BTA

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus. Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang menyerang paru-paru. Bakteri TB membunuh jaringan dari organ yang terinfeksi dan mengancam nyawa jika tidak diterapi dengan tuntas.

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di Kabupaten Way Kanan pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat di lihat pada table berikut:

Tabel II.48 Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderitapenyakit TBC BTA Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penemuan dan penanganan Kasus penderita penyakit TBC BTA	439	517	611	756	529

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Tabel II.49 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC, BTA Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penemuan dan penanganan Kasus penderita penyakit TBC BTA (%)	96,91	102,78	110,49	126	81,01

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, persentase keberhasilan pengobatan TBC selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2020 sudah mencapai target yang diharapkan yaitu rata-rata > 90%. Kegiatan untuk menemukan semua kasus TBC dan mengobatinya sampai sembuh serta melaporkan kasus tersebut dalam surveilans program perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk memutus rantai penularan, dalam rangka menanggulangi Tuberkulosis dengan harapan eliminasi TBC tahun 2030 dapat tercapai.

2.3.1.2.10 Penemuan Kasus Penyakit

Berdasarkan data penemuan kasus penyakit di Kabupaten Way Kanan terdapat 10 penyakit terbesar di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2018 sebagaimana tabel berikut.

TABEL II.50 Jumlah Penemuan Kasus Penyakit di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO.	JENIS PENYAKIT	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENYAKIT TEKANAN DARAH TINGGI	28,50	29,815	25.895	20.302	14 228
2	PENYAKIT PADA SYSTEM OTOT DAN JARINGAN PENGIKAT	27,683	28,784	28.784	21.283	9 586
3	INFEKSI AKUT LAIN PADA SALURAN NAFAS BAGIAN ATAS	27,587	26,00	25.610	25.294	25 742
4	DIARE	24,506	15,604	15.740	5.590	2 081

NO.	JENIS PENYAKIT	2016	2017	2018	2019	2020
5	PENYAKIT LAIN PADA SALURAN NAFAS BAGIAN ATAS	14,591	14,523	14.653	19.412	3 920
6	INFEKSI PENYAKIT USUS YANG LAIN	13,827	10.707	11.675	5.363	19 617
7	ASMA	7.808	8.103	7.515	67.011	4 777
8	PENYAKIT KULIT ALERGI	9.677	8.074	7.656	8.704	-
9	PENYAKIT MATA LAIN-LAIN	7.787	7.147	6.784		-
10	PENYAKIT KULIT INFEKSI	6.742	6 470		5.288	1 570
11	PENYAKIT LAINNYA/radang sendi termasuk rematik)/ *Muscular System Disease Gastritis/*			29.938	20.548	-

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Penanganan penyakit dan pemberantasannya di Kabupaten Way Kanan harus terus dilakukan baik melalui upaya prefentif, kuratif dan promotif dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1.2.11 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang masukperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes aibopictus, Aedes aegypty adalah vektor yang paling banyak ditemukan menyebabkan penyakit ini, nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sesudah masa inkubasi virus didalam nyamuk selama 8-10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya. Pada tahun 2017, berdasarkan laporan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdapat 14 kasus, pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak terdapat kasus KLB DBD di Kabupaten Way Kanan.

Jumlah penderita baru penyakit DBD yang ditemukan dan diobati di Kabupaten Way Kanan pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 sebanyak 72 Kasus DBD terdiri dari 24 Kasus Laki-laki dan 48 Kasus Perempuan. Pada tahun 2019, didapatkan hasil temuan kasus

DBD yang tersebar di 20 wilayah kerja Puskesmas yang ada di Kab. Way Kanan sebanyak 114 kasus. Baradatu 11 kasus, Blambangan Umpu 46 Kasus, Negeri Baru 2 kasus, Kasui 18 kasus, Negeri Agung 4 Kasus, Way Tuba 7 Kasus, Sukabumi 3 kasus, Bumi Baru 3 kasus, Serupa Indah 3 Kasus, Rebang Tangkas 3 kasus, Gunung Labuhan 6 kasus, Gisting Jaya 1 kasus, dan Pisang Baru 7 kasus, dan semua penderita ditangani serta mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Tabel II.51 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penemuan dan penanganan Kasus penderita penyakit DBD	56	14	72	114	114

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.1.2.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I dibandingkan total jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 41,63 %. Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata 1 sebanyak 79.146 orang dan Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Way Kanan sebanyak 190.110 orang.

TABEL II.52 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2013–2018

Uraian	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jiwa)					
	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	189.224	189.244	189.244	257.118	265.875	264.776

Sumber Data: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Tahun 2019

2.3.1.2.13 Angka Kejadian Covid-19 Di Kabupaten Way Kanan (S.D Bulan Agustus 2021)

TABEL II.53 Kasus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Kasus Konfirmasi Covid-19	Selesai Isolasi	Kasus Kematian
1	Blaambangan Umpu	119	106	13
2	Baradatu	130	121	9
3	Gunung Labuhan	48	43	5
4	Negeri Agung	50	47	3
5	Pakuan Ratu	25	21	4
6	Negara Batin	30	27	3
7	Negeri Besar	4	4	0
8	Way Tuba	56	53	3
9	Bumi Agung	63	59	4
10	Buay Bahuga	28	27	1
11	Bahuga	16	15	1
12	Kasui	49	44	5
13	Banjit	136	129	7
14	Rebang Tangkas	22	18	4
15	Umpu Semenguk	85	79	6
Total		861	793	68

Sumber : Gugus Tugas Covid-19 Kab. Way Kanan

TABEL II.54 Kasus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan, Provinsi, Nasional dan Global

AREA	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
Global	245.373.039	240.393.618	4.979.421
Nasional	4.243.835	4.088.138	143.388
Lampung	49.541	45.142	3.811
Way Kanan	861	793	68

Sumber : Gugus Tugas Covid-19

2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.3.1.3.1 PEKERJAAN UMUM

Kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.1.3.1.1 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah, baik pembangunan di sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Transporasi yang baik tentunya akan menekan biaya produksi, memudahkan akses dalam mendapatkan barang ataupun menjual barang, serta memperlancar mobilisasi penduduk yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi dan informasi suatu daerah.

Jalan, sebagai salah satu sarana transportasi, di Kabupaten Way Kanan tampak mengalami perbaikan. Meskipun tidak ada penambahan panjang jalan, pembangunan transportasi di Way Kanan agaknya terfokus pada perbaikan kualitas jalan.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sepanjang 607,22 Km dari Panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Way Kanan sepanjang 2.009.89 Km atau sebesar 30,21 %.

Perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.55 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	333,05	511,49	604,42	607,22	607,22
Panjang jalan dalam kondisi Sedang (Km)	336,08	324,31	310,63	327,10	327,10
Panjang jalan dalam kondisi Rusak Ringan(Km)	685,17	624,38	588,09	559,90	559,90
Panjang jalan dalam kondisi Rusak Berat (Km)	655,59	549,71	506,15	515,67	515,67
Jumlah/Total (Km)	**2009,89**	**2009,89**	**2009,89**	**2009,29**	**2009,89**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2015-2016,
Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.3.1.2 Panjang Jalan Menurut Pemerintah Yang Berwenang di Kabupaten Way Kanan

Total panjang jalan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 sepanjang 2.352,89 Km, terdiri dari Jalan Negara sepanjang 81,90 Km, Jalan Provinsi sepanjang 261,10 Km dan Jalan Kabupaten Sepanjang 2.009,89 Km.

Perkembangan panjang jalan menurut Pemerintah yang berwenang dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.56 Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Jenis Jalan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan Negara (Km)	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9
Jalan Provinsi (Km)	261,10	261,10	261,10	261,10	261,10
Jalan Kabupaten (Km)	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89
Jumlah/Total (Km)	2.352,89	2.352,89	2.352,89	2.352,89	2.352,89

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2015-2016, Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.3.1.3 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Di Kabupaten Way Kanan

Total panjang jalan Menurut Permukaan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 sepanjang 2.009,89 Km, terdiri dari Jalan diaspal sepanjang 1145,60 Km, Jalan Krikil sepanjang 544,90Km, Jalan Tanah sepanjang 270,80 Km dan Jalan Lainnya sepanjang 48,60 Km.

Perkembangan panjang jalan menurut jenis permukaan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut :

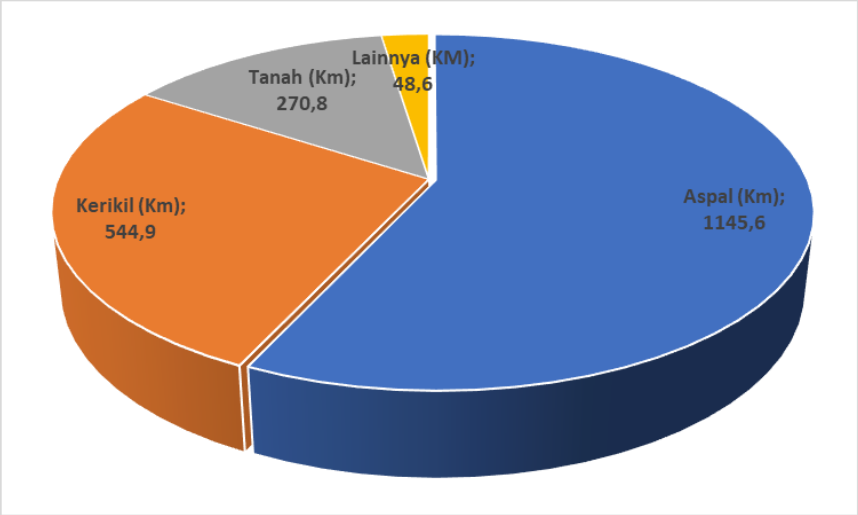
Tabel II.57 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Jenis Permukaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aspal (Km)	927,16	931,81	1046,89	1071,70	1145,60
Kerikil (Km)	0,00	6,96	4,20	4,80	544,90

Jenis Permukaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah (Km)	794,31	782,86	706,95	686,01	270,80
Lainnya (KM)	288,42	288,27	251,86	247,39	48,60
Jumlah/Total (Km)	**2009,89**	**2009,89**	**2009,89**	**2009,89**	**2009,89**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Tahun 2014-2016,
Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Gambar II. 13 Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Way Kanan, 2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020

2.3.1.3.1.4 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tabel. II. 58 Capaian Jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase	27,45	31,37	49,02	66,67
D.I	14	16	25	34

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten way kanan menurut Permen PUPR No: 14 Tahun 2015, tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah irigasi berjumlah 51 Daereh Irigasi (D.I).

Total luas irigasi Kabupaten Way Kanan dalam kondisi cukup mencapai 600.650 M^2 atau sebesar 50 persen dari total 18.783,75 M^2.

Pada tahun 2019 jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 66,67 persen atau sebanyak 34 DI dari target akhir RPJMD sebesar 70 persen.

2.3.1.3.1.5 Jaringan Irigasi

Potensi Lahan Persawahan di Kabupaten Way Kanan didukung oleh banyaknya sungai-sungai yang ada, seperti Way Umpu dengan panjang sungai 100 Km dengan DAS 1.179 Km2, Way Besai dengan panjang sungai 113 Km dengan DAS seluas 870 Km2, Way Tahmi panjang 60 Km dengan DAS 550 Km2, Saluran Cannal Komering panjang 35 Km (wilayah Way Kanan).

Penanganan Jaringan irigasi teknis di Kabupaten Way Kanan pada kondisi saat ini baru memanfaatkan Way Umpu sebagai sumber air irigasi meliputi wilayah 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banjit dan Kecamatan Baradatu dengan masing-masing luas persawahan fungsional 4.064 Ha dan 3.413 Ha.

Kabupaten Way Kanan merupakan lumbung padi yang potensial untuk dikembangkan kedepan dalam upaya perkuatan pangan di daerah, hal ini dapat kita tinjau dari potensi-potensi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten ini baik yang dikelola secara optimal maupun yang belum tertangani secara Optimal oleh Kabupaten seperti Daerah Irigasi (DI) Komering , karena sebagian irigasi ini masuk daerah Kabupaten Way Kanan dengan luas lahan terairi kurang lebih 2.456 Ha dari lahan baku 5.136 Ha yang terletak pada Kecamatan Bumi Agung seluas 860 Ha dan sisanya terletak pada Kecamatan Buay Bahuga dan Bahuga.

Selain DI Komering, Kabupaten Way Kanan memiliki DI Way Umpu dan Way Neki dengan data-data sebagai berikut :

A. DI Way Umpu

- Type bendung : Bangunan Sadap /River Weir
- Lokasi : Desa Rantau Temiang Kecamatan Banjit
- Tahun Bangun : 1977
- Tahun Operasional : 1982

- Perencana : Nippon Koei
- Pelaksana Pembangunan :
- Lahan Rencana : 12.500 Ha
- Lahan Baku : 5.013 Ha
- Lahan Olahan : 7.487 Ha
- Lokasi Lahan Olahan : Kecamatan Banjit : 4.064 Ha,

Kecamatan Baradatu : 3.413 Ha

- Debit Rencana (Q) : 12.442 l/dt
- Luas Basah (L) : 956,0 m
- Saluran Primer dibagi 2 (dua) Saluran yaitu :

a. Bangunan Neki (BN)

- Luas Lahan Olahan : 5.238 Ha
- Debit Rencana (Q) : 7.805 l/dt
- Lokasi Lahan terairi : Kec. Banjit 2.021 Ha, Kec. Baradatu 3.217 Ha
- Panjang Saluran Primer : 28 Km

b. Bangunan Rantau Temiang (BRT)

- Luas Lahan Olahan : 2.249 Ha
- Debit Rencana (Q) : 3.351 l/dt
- Lokasi Lahan terairi : Kec. Banjit 2.043, Kec. Baradatu 206 Ha
- Panjang Saluran Primer : 6,3 Km

B. DI Way Neki

- Type bendung : Bangunan Sadap kecil /Weir
- Lokasi : Desa Jukuh Batu
- Tahun Bangun : 1982
- Tahun Operasional : 1982
- Perencana : Nippon Koei
- Pelaksana Pembangunan : PT.***..
- Lahan Baku : - Ha
- Lahan Olahan : 229 Ha
- Lokasi Lahan Olahan : Kecamatan Banjit : 229 Ha
- Debit Rencana (Q) : 500 l/dt

Untuk itu Pemerintah provinsi Lampung melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji- Sekampung pada tahun 2006 telah melakukan study dan kajian. Kajian terhadap optimalisasi permasalahan pada DI Way Umpu sesuai dengan kewenanganya, sehingga disimpulkan sebagai optimalisasi lahan persawahan yang ada dengan menambah suplay air dari Way Besai /Way Besai river weir and suplection cannal yang terletak pada Umbul Nanas yang terhubung pada BN 5-6 di Kecamatan Banjit.

Data-data sebagai berikut :

- Type bendung : Bangunan Sadap / Way Besai River Weir
- Lokasi : Umbul Nanas Kec. Banjit
- Perencana : Nippon Koei
- Panjang Saluran Primer : 6,7 Km
- Lebar Lahan Pembesan : 100 mtr
- Sasaran : BN 5 - BN 6 Saluran Primer Way Umpu
- Type sasaran : Penambahan Debit / Suplay Cannal
- Debit Rencana : 500 lt/det.

Dimensi Rencana :

1. Dimensi Bangunan Sadap / River wier

- Bentang Sungai : 60 Meter
- Bangunan Pelimpas : Tinggi 7 Meter
- Pintu Air :

2. Dimensi Saluran Primer / Suplection Cananal

Type Saluran : Saluran Terbuka & Talang

Ar : 3.540 Ha
Qr : 6,03 m3/det
b : 3,20 m
h : 1,5 m
m : 0
k : 70
v : 1,303 m/s
l : 0,00050
w : 0,75 m

Way Besai river weir and Suplection Cannal ini adalah secercah harapan bagi Kabupaten Way kanan untuk menjadi daerah lumbung padi terbesar diprovinsi Lampung dalam rangka mendukung program nasional mencapai swasembada pangan nasional dengan perkuatan swasembada pangan didaerah

yang merupakan tanggung jawab bersama baik itu pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya memenuhi Standar Optimalisasi Kebutuhan Hidup Masyarakat guna meningkatkan tarap hidup yang layak dan mensejahteraan masyarakat.

Perhatian Pemerintah pusat dalam upaya realisasi sangat diharapkan, mengingat kewenangan kabupaten hanya terbatas pada pengelolaan jaringan irigasi dengan luasan < 1.000 Ha, disisi lain dukungan Pemerintah propinsi dan segenap stake holder sangat diharapkan dalam upaya realisasi pembangunan ini, karena pertimbangan keuangan Kabupaten serta kewenangan penangan tidak memungkinkan untuk dapat merealisasikan harapan masyarakat ini.

2.3.1.3.1.6 Rumah Tangga Bersanitasi

Di Kabupaten Way Kanan jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 261.128 Unit Dari total jumlah rumah tangga yang ada di sebanyak 423.195 Unit (61,70%).

SPAL adalah Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung dalam tangka atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.

Tabel II.59 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
		Tangki septik/IPAL/ SPAL	Lainnya	
1	2016	34.71	65,29	100
2	2017	33,58	65,65	100
3	2018	28,06	71.94	100
4	2019	23,89	76,11	100
5	2020	42.84	57.16	100

Sumber : Statistik Kesejahtraan Rakyat Kab. Way Kanan Tahun 2016-2020

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.60 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Sumber Air Minum	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	0.40	3.30	-	-	NA
Ledeng meteran, ledeng eceran	1.12	-	0.53	NA	NA
Sumur Bor/Pompa	9.00	13.09	20.18	22,45	27,74
Sumur Terlindung/Sumur tak terlindung	78.98	8.20	12.87	16,46	20,82
Mata Air Terlindung/Mata Air Tak Terlindung	9.86	73.84	63.70	58,98	47,68
Air Permukaan, Air Hujan, lainnya, Tidak Memasak	0.64	NA	2.73	NA	2,89

Sumber : Statistik Kesejahtraan Rakyat Kab. Way Kanan Tahun 2016-2020

Tabel II.61 Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2016-2019

NO	TAHUN	Sumur Gali Berlindung	Sumur Gali dengan Pompa	Sumur Bor Dengan Pompa	Termin al Air	Mata Air Terlindung	Penampung an air Hujan	Depot Air Minum	Perpipaan (PDAM, BPS, PAM)	Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	
		Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	2016	61.466	8956	697	-	2989	0	0	2523	289.607	66,90
2	2017	60.139	8.717	931	-	3008	0	0	2667	300.970	68,10
3	2018	222.091	29336	29902	-	12025	0	0	19216	312.570	70,07
4	2019	223.442	30242	30908	-	12392	0	3251	19807	320.042	71,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

2.3.1.3.2 PENATAAN RUANG

Sesuai dengan konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan, maka strategi pengembangan adalah pemerataan pelayanan dan penjalaran fungsi-fungsi pusatpusat pelayanan. Oleh karena itu perlu pembentukan pusat-pusat yang mampu memberikan pelayanan secara optimal ke seluruh wilayah. Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan (Pusat Kegiatan) di wilayah Kabupaten Way Kanan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana utama penunjang yang pengadaannya dikelola secara terpadu. Penerapan kebijaksanaan setiap sistem kegiatan pembangunan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tiap-tiap wilayah.

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.

Identifikasi kegiatan lokal di Kabupaten Way Kanan yang dapat dijadikan acuan pengembangan PKWp, PKLp, PPK, dan PPL dapat pada Tabel berikut ini.

Tabel II. 62 Deskripsi Kegiatan Lokal di Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031

Kegiatan	Deskripsi
Kawasan Sawah Irigasi	• Irigasi teknis hanya terdapat di Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Way Tuba, Bahuga, BuayBahuga, danBumiAgung

Kegiatan	Deskripsi
Industri skala kabupaten dan beberapa kecamatan	• Industri pengolahan tebu, dan pabrik gula di Kec. Pakuan Ratu • Industri pengolahan Kelapa Sawit di Kec. Bumi Agung • Industri Pengalengan Buah Nanas di Kec. Pakuan Ratu • Industri Batu Belah di Kec. Gunung Labuhan
Pusat pengelolaan air bersih	• IKK Kasui. • IKK Baradatu. • IKK Banjit. • IKK Blambangan Umpu. • KecamatanBumi Agung • IKK Gunung Labuan.
Pasar skala kawasan	• Banjit, Baradatu, dan Kasui
Simpul transportasi skala kabupaten dan beberapa kecamatan:	
1. Bandar Udara	• Pangkalan Udara Gatot Subroto di Kec. Way Tuba
2. Terminal	• Rencana pengembangan terminal di Kec. Pakuan Ratu, dan Way Tuba
Kawasan Wisata	• wisata agro perkebunankaret, kopi, kakao, coklat, ladadankelapasawit di KecamatanBlambanganUmpu, Kasui, Banjit, Baradatu, Bahuga, danPakuanRatu.

Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031

Dengan pertimbangan tersebut, maka rencana PKWp, PKLp, PPK, dan PPL di Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2030 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II.63 PKWp, PKLp, PPK, dan PPL di Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031

No	Nama Kota	Hierarki	Fungsi Utama
1	Perkotaan Blambangan Umpu di Kec. Blambangan Umpu	PKWp	▪ Pusat pemerintahan kabupaten, ▪ Perdagangan ▪ Pertanian ▪ Industri Agro
2	Perkotaan Tiuh Balak Pasar di Kec. Baradatu	PKLp	▪ Pusat pemerintahan kecamatan ▪ Pertanian ▪ Perdagangan ▪ Pusat koleksi dan distribusi
3	Perkotaan Pasar Banjit di Kec.Banjit	PPK	▪ Pusat Pemerintahan kecamatan ▪ Pertanian ▪ Perdagangan ▪ Pusat koleksi dan distribusi
4	Perkotaan Jaya Tinggi di Kec. Kasui	PPK	▪ Pusat Pemerintahan kecamatan ▪ Pertanian ▪ Perdagangan ▪ Pusat koleksi dan distribusi
5	Desa Way Tuba di Kec. Way Tuba	PPL	▪ Pusat Pemerintahan kecamatan ▪ Industri agro
6	Desa Pakuan Ratu di Kec. Pakuan Ratu	PPL	▪ Pusat Pemerintahan kecamatan ▪ wisata
7	Desa Bumi Agung di Kec. Bumi Agung	PPL	▪ Pusat Pemerintahan kecamatan ▪ Industri agro

Sumber: RTRW Kabupaten Way Kanan 2011-2031

Pembangunan bidang tata ruang di Kabupaten Way Kanan khususnya ruang terbuka hijau baru mencapai 20%.

2.3.1.3.3 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kinerja pembangunan bidang perumahan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.1.3.3.1 Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan dari rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air minum layak. Air bersih (dalam hal ini air minum layak) dan sanitasi layak termasuk dalam infrastruktur fisik untuk layanan dasar, guna menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi layak belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan. Rumah Tangga pengguna air bersih di Tahun 2020 atau sebanyak 558 Rumah Tangga, turun dibandingkan dari Tahun 2016 sebanyak **1.277** Rumah Tangga.

Tabel II.64 Banyaknya Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Banykanya Air Bersih yang disalurkan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pelanggan(Rumah Tangga)	1.277	1.256	930	558	558
2.	Air Yang Disalurkan (M3)	304.480	275.817	134.070	130.440	123.182

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Sejalan dengan peningkatan cakupan sanitasi layak, Pemerintah menggalakkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Open Defecation Free (ODF) merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat. Kabupaten Way Kanan melakukan percepatan menjadi kabupaten

yang meraih status "Bebas Buang Air Besar Sembarangan" pada tahun 2019. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pelaksanaan program ODF dengan penurunan perilaku Buang Air Bebas Sembarangan (BABS). Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemenuhan cakupan air minum dan sanitasi layak yaitu : (1) Penyediaan pasokan air bersih baik, (2) Sistem penyediaan air minum dan sanitasi, (3) Penurunan kualitas sumber air baku, (4) Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang (5) Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang belum diikuti dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pembuangan air limbah. Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum dengan sasaran pembangunan daerah yang masih kekurangan sarana sanitasi dasar serta perilaku BABS masyarakat, yakni : Pembangunan MCK Kombinas + IPAL di 14 (empat belas) kampung, dimana 11 unit melalui DAK Sanitasi dan 3 Unit melalui PAMSIMAS.

Sumber daya air memilik peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan kawasan industri dan pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Way Kanan. Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi sistem wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri serta sistem pengendalian banjir.

Pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan air baku di Kabupaten Way Kanan untuk memenuhi kebutuhan domestik,perkotaan, pertanian dan indutri; Pemanfaatan dan pengelolaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian dengan prioritas untuk kebutuhan pokok rumah tangga, pemukiman, pertanian dan indudtri. Pengembangan sistem air minum pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baku dan peningkatan jaringan distribusi. Pengembangan jaringan air baku dan air minum pada wilayah Way Talang Mangga di Kasui, Way Nencar di Way Tuba, Way Nangayu di Banjit, Way Menanga Siamang, Way Tahmi di Rebang Tangkas, Way Umpu. Pemanfaatan sumber- sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan srana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri di Kabupaten Way

Kanan. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada tahun 2017 dilaksanakan dengan pembuatan sumur-sumur air bawah tanah/ bor pada areal permukiman serta daerah-daerah dengan kategori rawan air pada 10 (sepuluh) kecamatan, pembangunan SPAM sebanyak 8 kampung di 7 (tujuh) kecamatan, serta Pembangunan Jaringan SR SPAM di 1 (satu) kampung di kecamatan Pakuan Ratu

Kabupaten Way Kanan terletak pada Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi wewenang Pemerinah Pusat. Pengelolaan sumberdaya air Kabupaten Way Kanan merupakan bagian dari (enam) daerah aliran sungai (DAS) yaitu Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham, dan Way Tahmi. Kabupaten Way Kanan memiliki beberapa wilayah sungai yang berpotensi menjadi sumber penyediaan air bersih, yaitu wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategi nasional, wilayah sungai kabupaten/kota dan wilayah sungai yang melayani kawasan strategi kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Way Kanan berada pada 51 (Lima puluh satu) daerah irigasi.

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikator-indikator yang merupakan hasil dari upaya sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan penyakit berbasis lingkungan Kabupaten Way Kanan. Indikator-indikator tersebut antara lain persentase keluarga memiliki sarana air minum yang dilakukan pemeriksaan, persentase KK terhadap akses jamban sehat, persentase tempat-tempat umum sehat dan desa yang melaksanakan STBM dan SBS.

2.3.1.3.3.2 Persentasee Air Minum Yang Dilakukan Pemeriksaan

Jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat tahun 2019 terdapat 37 (66,1%) dari jumlah sarana air minum 91. Jumlah sarana air minum di IKL ada 70 (76,9%), Jumlah sarana air minum dengan resiko rendah+sedang terdapat 60 (85,7%) dan Jumlah sarana air minum yang di ambil sampel ada 56 (61,5%).

2.3.1.3.3.3 Akses Terhadap Jamban Sehat

Tabel II.65 Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KK/PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK/ PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK/ PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK/ PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	2016	432.914	32	5.264	28.142	113.143	42.905	147.816	266.223	61,5
2	2017	441.922	42	2.236	27.740	107.273	48.327	189.630	299.139	68
3	2018	446.113	44	2.425	38.455	108.833	48.889	191.823	303.081	67,9
4	2019	450.109	4.853	18.618	32.109	124.210	78.640	307.281	450.109	100,0
5	2020	473.575	2.281	3.460	27.515	30.446	84.017	88.469	122.375	100,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun2016- 2020

Berdasarkan data seksi penyehatan lingkungan dinas kesehatan Jumlah penduduk (KK) dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) tahun 2020 ada 122.375 (100,0%) dari 122.375 KK. Jumlah Sarana Sharing Komunal 2.281 dari jumlah KK 3.460, Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) 27.515 dari jumlah KK 30.446 dan Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) 84.017 dari jumlah KK 88.469.

2.3.1.3.4 Tempat-Tempat Umum Sehat

Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat di Kabupaten Way Kanan tahun 2019 ada 1.609 buah (62.6%), Jumlah sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) 257 buah (72.4%) dari 355 buah SD yang diperiksa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 70 (69,3%) buah dari 101 SLTP yang diperiksa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 58 (69%) dari 84 SLTA yang diperiksa, sedangkan tempat-tempat umum di sarana kesehatan yang memenuhi syarat adalah Puskesmas terdapat 19 (100%) PKM dari 19 PKM yang ada, Rumah Sakit 4 RS (100%) dari 4 RS yang ada, sedangkan untuk Tempat Ibadah terdapat 1.175 (60,1%) dari 1.955 Tempat Ibadah yang ada dan untuk Pasar terdapat 26 (48,1%) dari 54 Pasar yanga ada.

Pada tahun 2020 Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat ada 1.224 buah (61.8%), Jumlah sarana pendidikan sekolah dasar (SD) 251 buah (72.3%) dari 347 buah SD yang diperiksa, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 92 (81,4%) buah dari 113 SLTP yang diperiksa, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 54 (78,3%) dari 69 SLTA yang diperiksa, sedangkan tempat-tempat umum di sarana Kesehatan yang memenuhi syarat adalah Puskesmas terdapat 62 buah (83,8%) dari 74 buah TTU yang ada, Rumah Sakit 5 buah (100%) dari 5 buah TTU yang ada, sedangkan untuk Tempat Ibadah terdapat 734 (56,1%) dari 1.309 Tempat Ibadah yang ada dan untuk Pasar terdapat 26 (40,6%) dari 64 Pasar yanga ada.

2.3.1.3.5 Desa Yang Melaksanakan STBM

Desa di Kabupaten Way Kanan tahun 2019 yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), menurut data Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Way Kanan ada 227 desa (100%) yang melaksanakan STBM dan 227 (100%) desa yang melaksanakan Stop BABS (SBS)

Pada tahun 2020 Jumlah Desa di Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ada 227 desa (100%) dan yang melaksanakan Stop BABS (SBS) ada 227 desa (100%) dari 227 jumlah desa yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Tabel II.66 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
			DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	2016	227	102	44,9	11	4,85	8	3,52
2	2017	227	-	0,0	4	5,41	-	0,00
3	2018	227	226	99,6	123	54,19	-	0,00
4	2019	227	227	100	227	100	-	0,00

5	2020	227	227	100	227	100	-	0,00

Sumber : DinSumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.1.3.6 Lingkungan Permukiman Kumuh

Sebaran perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Way Kanan sesuai dengan SK-Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan Nomor B.130/III.10-WK/HK/2014 tentang Kawasan Kumuh di Kabupaten Way Kanan. Adapun Kawasan kumuh ini tersebar di 7 Kecamatan antara lain : Kecamatan Blambangan Umpu Desa Lembasung terletak di RW 1 dengan Luasan ± 1.392 Ha , Kecamatan Baradatu Kampung Tiuh Balak Pasar terletak di RW 2 dengan Luasan ± 2.161 Ha, Kecamatan Banjit Kampung Pasar Banjit memiliki luasan ± 1.630, Kecamatan Kasui Kampung Kasui Pasar terletak di RW 2 dengan luasan ±7.271, Kecamatan Negara Batin Kampung Sri Menanti dengan luasan ± 7.121 Ha, Kecamatan Pakuan Ratu Kampung Pakuan Ratu terletak di RW 4 dengan luasan ± 3.364 Ha, dan Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-Kiling terletak di dusun 4 memiliki luasan ± 11.423 Ha. Namun, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhan rumah layak huni adalah (1) Penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik; (2) Ketimpangan kebutuhan dan ketersediaan rumah (Backlog); (3) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat miskin masih cukup besar dan (4) Terdapatnya Kawasan Permukiman Kumuh.

2.3.1.3.7 Rumah Layak Huni

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Way Kanan didasarkan pada hasil dari kegiatan analisis pada tahap sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, wilayah Kabupaten Way Kanan secara umum menunjukkan

permasalah perumahan dan pemukiman, lebih banyak menunjukkan permasalahan kualitas, terutama dalam hal permasalahan kualitas fisik. Dalam hali ini, kegiatan perbaikan atau peningkatan kualitas perumahan dan permukiman ini diprioritaskan bagi kawasan yang mengidentifikasikan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Mayoritas kondisi umum lingkungannya kumuh dah tidak layak huni.
2. Terkait/ menjadi bagin dari upaya penanggulangn kejadian luar biasa.
3. Tingkat kepadatan tinggi dengan tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar yang tidak memadai (kualitas maupun kuantitasnya)
4. Memerlukan upaya revitalisasi atau re-fungsionalisasi karena keuntungan yang akan diperoleh, melalui progrm konsolidasi lahan.

Tabel II.67 Banyaknya Perumahan Rakyat Menurut Kategori Rumah Per Kecamatan Tahun 2020

Nama Kecamatan	Permanen	Semi Permanen	Sederhana	Jumlah
Banjit	2.737	4.184	6.316	13.237
Baradatu	3.042	2.826	2.909	8.759
Gunung Labuhan	2.434	2.552	2.567	7.553
Kasui	2.204	2.780	3.268	8.252
Rebang Tangkas	2.215	1.341	2.792	6.348
Blambangan Umpu	6.470	30.022	21.165	57.657
Way Tuba	2.096	2.790	2.437	7.323
Negeri Agung	4.340	3.872	1.773	9.985
Bahuga	916	1.031	1.440	3.364
Buay Bahuga	1.826	2.552	1.191	5.569
Bumi Agung	3.312	1.823	1.970	7.150
Pakuan Ratu	7.235	2.045	1.017	10.297
Negara Batin	4.290	1.320	4.249	9.591
Negei Besar	1.458	1.564	2.055	5.076
Jumlah	44.575	60.702	55.149	150.176

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Way Kanan,2021

2.3.1.4 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.3.1.4.1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan perumahan/permukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan/elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meningggalkan sisa rangka fisik.

Berikut data cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Way Kanan tahun 2016-2020.

Tabel II.68 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588

Sumber : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.1.5 SOSIAL

Keberhasilan pembangunan bidang sosial yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.1.5.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini

masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan.

PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja.

Tabel II. 69 Jumlah Penyandang PMKS Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (*)
1	Anak balita terlantar	162	178	165
2	Anak terlantar	192	195	54
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	19	19	13
4	Anak jalanan	11	11	11
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	658	296	256
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	7	7	61
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	6	6	1
8	Lanjut Usia Terlantar	1368	7144	19.933
9	Penyandang Cacat / Disabilitas	1815	2434	2.027
10	Tuna Susila	7	7	7
11	Gelandangan	10	10	22
12	Pengemis	17	17	17
13	Pemulung	115	138	138
14	Kelompokminoritas	13	13	13
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	283	55	55
16	Orang Dengan HIV / AIDS(ODHA)	0	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	27	27	46
18	Korban trafficking	5	5	5
19	KorbanTindak Kekerasan	7	7	7
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	2	-	-
21	Korban Bencana Alam	55	-	13.826
22	Korban Bencana Sosial	3	-	23
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	879	944	949
24	Fakir Miskin	34792	53.027	54.952

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (*)
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	44	-	56
26	Komunitas Adat Terpencil	0	46	-
Jumlah		**40497**	**64586**	**92637**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
Ket : (*) Data bulan Juni 2020

Permasalahan PMKS terbanyak di Kabupaten Way kanan yaitu fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan Korban Bencana Alam. Data PMKS di Kabupaten Way kanan mengalami peningkatan selama periode 2018-2020. Jumlah PMKS tertinggi sebesar 92.623 orang pada Tahun 2020.

Kategori PMKS yang memiliki jumlah tertinggi selama periode tahun 2018-2020 adalah fakir miskin. Jumlah fakir miskin tertinggi di Tahun 2020 sebesar 54.952 orang, dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 34.792 orang.

Tabel II. 70 Jumlah Penerima PKH Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAHUGA	7	242	490	552	585
2	BANJIT	1.281	1.781	3.155	3.054	3.131
3	BARADATU	376	845	1.735	1.738	1.745
4	BLAMBANGAN UMPU	702	1.577	3.107	3.342	3.333
5	BUAY BAHUGA	232	287	563	593	623
6	BUMI AGUNG	234	475	1.044	1.148	935
7	GUNUNG LABUHAN	535	1.082	1.967	1.991	1.761
8	KASUI	789	1.136	2.312	2.211	1.926
9	NEGARA BATIN	331	1.057	1.942	1.963	1.827
10	NEGERI AGUNG	368	940	1.658	1.627	1.607
11	NEGERI BESAR	7	226	697	794	795
12	PAKUAN RATU	423	730	1.779	1.794	2.016
13	REBANG TANGKAS	484	775	1.665	1.793	1.629
14	WAY TUBA	238	529	1.100	1.150	1.156
Jumlah		**6.007**	**11.682**	**23.214**	**23.750**	**23.069**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Jumlah peserta program keluarga harapan pada tahun 2015 sebesar 6.414 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),sampai dengan tahun 2019 peserta Program Keluarga Harapan meningkat menjadi 23.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penanganan PMKS sampai dengan tahun 2019 yang bersumber dari Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 498 Orang disabilitas, 4.893 lansia, 467 ibu hamil, 15.973 anak SD, 8.026 anak SMP, 5.918 anak SMA, dan 9.235 anak usia dini. Bantuan sosial lainnya bagi PMKS antara lain Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Dibidang Komputer, Pangkas/Gunting sebanyak 20 Anak Putus Sekolah, Pendampingan Dan Penguatan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dlm Keluarga Dan Lingkungan Sebanyak 20 Kasus, Pelatihan Bidang Wirausaha Pembuatan Kue , Dan Pembuatan Tempe sebanyak 32 Kelompok Wanita Rawan Sosial, Pelatihan Bidang Wirausaha, Perbengkelan Dan Penguatan Mental sebanyak 10 Kelompok (Eks Napi, Perjudian, Perkelahian, Narkoba), program Raskin/ Rastra/ BPNT Berjumlah 34.792 KPM, Pendampingan 65 ODG Dan Eks ODGJ Dan 20 Orang Terlantar Berupa Bantuan Transport Dan Berobat Serta Bantuan Untuk Orang Terlantar Berupa Santunan, dan Bantuan Alat Perbengkelan Bagi 10 Eks. Penyandang Mental (ODGJ), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 150 Rumah Tangga Miskin, Rehabilitasi Rehab Rumah Rakyat (R3) Bagi 40 Rumah Keluarga Miskin, serta Bantuan 179 KUBE Berupa 80 Kambing , Mesin Giling (Healer), 1 Set Alat Menjahit, 1 Set Alat Pertukangan, Serta Bantuan Modal Usaha @Rp. 20.000.000,-

2.3.1.5.2 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental Tahun 2019 sebanyak 2.027 yang telah ditangani sebanyak 356 orang (17%) berupa Pelatihan Ketrampilan Menjahit, Ketrampilan Service Handphone, Ketrampilan Perbengkelan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Pemberian Bantuan Hibah Berupa Mesin Jahit, Pemberian Bantuan Tali Asih, Pemberian Bantuan Kasur Dan Selimut Serta Sembako, Alat Bantu Disabilitas Kursi Roda, Tongkat Kruk Unit Dan Alat Bantu Dengar, dan Kaki Palsu. Jumlah lanjut usia terlantar tahun 2019

sebanyak 19.933 lansia terlantar. lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 240 (1,2%) lansia berupa pemberian tali asih, serta Pelatihan Seni Membatik Bagi 120 (0,6%) Lanjut Usia Produktif .

2.3.1.5.3 Sistem Perlindungan Sosial

Untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan sejumlah program kesejahteraan sosial terutama dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan persentase cakupan jaminan Kesehatan sebesar 80,60 % dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 229,821 Jiwa (51,1 %), Peserta PBI APBD sebanyak 47,732 Jiwa (10,6 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 45,309 Jiwa (10,1 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 37,997 (8,4 %) Peserta bukan pekerja sebanyak 2,040 Jiwa(0,5 %). Sementara pada Tahun 2019 Kabupaten Way Kanan persentase cakupan jaminan Kesehatan sebesar 69,57 % dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 226.002 Jiwa (47,46 %), Peserta PBI APBD sebanyak 32.949 Jiwa (6,91 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 42.791 Jiwa (8,9 %), Pekerja Penerima Upah sebanyak 22.708 (5,8%)Peserta bukan pekerja sebanyak 1.848 Jiwa(0,3 %) sedangkan Cakupan Jaminan Kesehatan tahun 2018 adalah meningkat menjadi 59,9 % dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah 177.786 Jiwa (41,07 %), Peserta PBI APBD sebanyak 10.789 Jiwa (2,49 %), Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak (9%), Peserta Pekerja penerima upah (PPU) sebanyak (5,9 %), dan peserta Bukan pekerja (BP) sebanyak (0,4 %). Untuk tahun 2017 terjadi peningkatan kepesertaan BPJS kesehatan PBI APBD sebanyak 22.160 Jiwa dan Peningktan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 48.216 Jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.71 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		%	%	%	%	%
1	Jaminan Kesehatan Nasional					
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	41,07	38,77	41,8	47,46	51,1
1.2	PBI APBD	2,49	2,58	2,8	6,91	10,6
1.3	Pekerja penerima upah (PPU)	0,00	5,47	5,9	5,8	8,4
1.4	Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri	4,56	8,61	9,0	8,9	10,1
1.5	Bukan pekerja (BP)	0,00	0,38	0,4	0,3	0,5
2	SUB JUMLAH NON PBI	0,00				19,0
3	Jamkesda	0,00				
4	Asuransi Swasta	1,83				
5	Asuransi Perusahaan	0,00				
JUMLAH		**49,94**	**55,81**	**59,9**	**69,57**	**80,60**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2 LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1 TENAGA KERJA

Keberhasilan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang dicapai Pemkab Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.1.1 Pencari Kerja

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Way Kanan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 yang belum ditempatkan ada sebanyak 1.163 orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, 543 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 620 orang yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini menurun dari tahun 2019, dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kabupaten Way Kanan tercatat sebanyak 2.564 orang 1.142 orang laki-laki dan 1.422 orang perempuan.

Tabel II.72 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Tingkat pendidikan	Jumlah Pencari Kerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/Sederajat	18	48	32	16	12
SLTP/Sederajat	95	286	45	86	64
SLTA/Sederajat	755	2.489	2.000	2.334	1.017
D1/D2	-	-	-	-	
D3	110	157	127	29	16
D4/S1	126	238	167	99	51
S2/S3	-	-	-	-	3
Jumlah	**1.104**	**3.218**	**2.371**	**2.564**	**1.163**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SLTA, sebanyak 87,44 persen, atau sebanyak 1.017 orang. Urutan nomor dua pencari kerja terdaftar terbesar adalah dari kalangan yang berpendidikan SLTP/Sederajat dengan proporsi 5,5 persen, atau sebanyak 64 orang. Sementara hanya ada 3 pencari kerja terdaftar dengan tingkat pendidikan S2/S3.

2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.2.1 Partisipasi Perumpuan di Lembaga Pemerintah

Dalam praktek pelaksanaan pemerintah daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Way Kanan terdapat 5.165 pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 3.335 pegawai. Selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah PNS perempuan lebih banyak dari pada PNS laki-laki. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. 73 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	2.651	2.684	5.335
2017	2.645	2.684	5.329
2018	2.457	2.714	5.171
2019	2.458	2.803	5.261
2020	2.380	2.785	5.165

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.2.2 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota).

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Namun, indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan.

Tabel II. 74 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Proporsi (%)
2016	34	6	15

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Proporsi (%)
2017	34	6	15
2018	34	6	15
2019	36	4	10
2020	36	4	10

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Way Kanan baru mencapai 15% pada pemilu 2014 dan turun menjadi 10 % pada pemilu 2019, ini menunjukkan belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif.

2.3.2.2.3 Angka Melek Huruf Perempuan

Angka Melek Huruf. Selama tiga tahun terakhir (2016-2019), jumlah penduduk laki-laki yang melek huruf menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Angka melek huruf laki-laki pada tahun 2016 sebesar 98,27% sedangkan angka meleh huruf perempuan masih dibawah laki-laki yaitu sebesar 95,08%. Pada tahun 2018 Angka melek dengan persentase sebesar 96,14%.

Tabel. II 75 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	98,27	95,08	96,73
2017	98,00	94,54	96,27
2018	96,71	94,77	95,78
2019			96,14
2020			96,90

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.2.4 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja Laki-laki sebanyak 154.216 Orang, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan p,ada tahun 2019 di Kabupaten Way Kanan sebanyak 93.429 orang atau 60,58 %.

Tabel. II 76 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2020

Kegiatan Utama	Tahun 2017 (%)			Tahun 2018 (%)			Tahun 2019 (%)			Tahun 2020 (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	**149.558**	**68.641**	**218.199**	**147.229**	**83.561**	**230.790**	**154.216**	**93.429**	**247.645**	**158.854**	**95.077**	**253.931**
Bekerja	145.980	65.932	211.912	141.107	79.417	220.524	148.916	89.820	238.736	153.979	90.909	244.888
Pengangguran Terbuka	3.578	2.709	6.287	6.122	4.144	10.266	5.300	3.609	8.909	4.875	4.168	9.043
Bukan Angkatan Kerja	**14.487**	**84.067**	**98.554**	**18.660**	**70.989**	**89.649**	**14.115**	**63.354**	**77.469**	**17.378**	**66.272**	**83.650**
Sekolah	8.157	10.803	18.960	9.796	9.191	18.987	7.910	8.141	16.051	6.114	10.464	16.578
Mengurus Rumah Tangga	3.730	70.343	74.073	4.524	57.249	61.773	2.283	51.661	53.944	2.926	50.446	53.372
Lainnya	2.600	2.921	5.521	4.340	4.549	8.889	3.922	3.552	7.474	8.338	5.362	13.700
Jumlah	164.045	152.708	316.753	165,889	154,550	320,439	168.331	156.783	325.114	176.232	161.349	337.581
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**91,46**	**45,08**	**69,06**	**88,75**	**54,07**	**72,02**	**91,61**	**59,59**	**76,17**	**90,14**	**58,93**	**75,22**
Tingkat Pengangguran	**2,39**	**3,95**	**2,88**	**4,16**	**4,96**	**4,45**	**3,43**	**3,86**	**3,59**	**3,07**	**4,38**	**3,56**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020

2.3.2.3 PANGAN

2.3.2.3.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

lndeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program.

Tabel. II 77 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020

NO	Keterangan	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Pangan (point)	73,63	72,37	73,34

Sumber : IKP Indonesia Tahun 2020

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Way Kanan selalu berusaha untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Keberhasilan pembangunan bidang pertanahan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.4.1 Luas Lahan Bersertifikat

Prosentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2014 seluas 1.261,680 Ha, dibandingkan dengan jumlah seluruh lahan yang ada seluas 8.974,714 Ha mencapai 14,06 %.

2.3.2.4.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Pada tahun 2019 penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Way Kanan terdaftar sebanyak 6 kasus tanah yang memerlukan penyelesaian dan berhasil diselesaikan sebanyak 2 kasus tanah (33,33%).

2.3.2.4.3 Penyelesaian Izin Lokasi

Pada tahun 2019 jumlah izin lokasi yang dikeluarkan sebanyak 1 buah dari permohonan izin lokasi yang masuk sebanyak 5 buah (20 %).

2.3.2.5 LINGKUNGAN HIDUP

Keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini :

2.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang saat ini (2020) IKLH Kabupaten Way Kanan sebesar 63,93

Tabel II.78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	50	53,33	55,33	58,89
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	91,57	79,32	82,31	79,05
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	56,37	56,37	56,37	56,37
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	65,019	62,343	63,84	63,93

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, tahun 2020

2.3.2.5.2 Penegakan Hukum Lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan selama tahun 2014 sebanyak 2 Kasus dan Jumlah kasus lingkungan yang ada sebanyak 2 kasus (100%).

2.3.2.5.3 Penanganan Sampah

Guna mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan salah satunya adalah menciptakan lingkungan permukiman yang bersih melalui pengelolaan limbah dan sampah di perkotaan. Pengelolaan sampah dalam mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan antara lain melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Jumlah usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar, rumah sakit dan hotel di Kabupaten Way Kanan. Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 mencapai 450.109jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Berdasarkan hasil survey dan analisis timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya tahun 2017 diperkirakan sebesar 234 m3, dengan komposisi:

- sampah domestik 187,43 m3
- sampah pasar 18,74 m3 dan
- sampah komersial lainnya 28,12 m3

Dari jumlah timbulan sampah tersebut yang terangkut ke TPA pada tahun 2017 baru mencapai 51,54 m3 per hari atau hanya sekitar 22 % dari jumlah timbulan sampah. Pelayanan pengangkutan sampah tidak hanya meliputi Blambangan Umpu dan sekitarnya saja namun juga meliputi kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Baradatu, Banjit dan Kasui. Hal ini disebabkan belum dapat terpenuhinya pelayanan persampahan di seluruh wilayah perkotaan dan sekitarnya, selain itu belum meratanya program pengomposan dan daur ulang di daerah permukiman sehingga belum dapat mengurangi jumlah sampah yang ada yang akan diangkut ke TPA.

2.3.2.5.4 Kebersihan

Di Kabupaten Way Kanan Jumlah pasar tradisional tergolong baik sampai dengan tahun 2019 sebanyak 53 pasar dan Jumlah seluruh pasar tradisional sebanyak 56 pasar (94,64%).

2.3.2.5.5 Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Dari jumlah 234 m3 sampah yang terangkut ke TPA pada tahun 2019 baru mencapai 51,54 m3 per hari atau hanya sekitar 22 % dari jumlah timbulan sampah. Pelayanan pengangkutan sampah tidak hanya meliputi Blambangan Umpu dan sekitarnya saja namun juga meliputi kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Baradatu, Banjit dan Kasui. Hal ini disebabkan belum dapat terpenuhinya pelayanan persampahan di seluruh wilayah perkotaan dan sekitarnya, selain itu belum meratanya program pengomposan dan daur ulang di daerah permukiman sehingga belum dapat mengurangi jumlah sampah yang ada yang akan diangkut ke TPA.

Di Kabupaten Way Kanan, bila dibandingkan dengan per satuan penduduk Kabupaten Way Kanan yang mencapai 441.992 Jiwa atau setiap penduduk menghasilkan sampah sebesar 0,53 M3.

2.3.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.3.2.6.1 Jumlah Cakupan Penerbitan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kinerja pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini :

Tabel II.79 Jumlah Cakupan Penerbitan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	27,396	29,125	63.991	23.712	47.022
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	35.047	35,387	38.683	41.904	33.328
3.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	32.399	43,874	21.365	19.298	14.175
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	1.787	7,212	1.885	2.113	2.281

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

2.3.2.6.2 Akte Kelahiran yang Dikeluarkan

Di tahun 2018 banyaknya akte kelahiran yang dibuat oleh kantor cacatan sipil sebanyak 18.661, menurun signifikan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 28.888. Penurunan tersebut tidak berlaku di tahun 2019, karena terjadi peningkatan pengeluaran akte kelahiran menjadi 19.298.

Tabel II.80 Banyaknya Akte Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Banjit	7 289	2 030	1 736	2456	1378
2	Baradatu	1 363	3 464	1 417	1144	1170
3	Gunung Labuhan	1 229	2 535	1 244	1722	836
4	Kasui	1 222	2 528	1 106	1452	784
5	Rebang Tangkas	865	2 187	956	446	691
6	Blambangan Umpu	9 699	2 977	2 889	2067	2046
7	Way Tuba	869	692	936	1441	663
8	Negeri Agung	1 572	3 606	1 412	727	1150
9	Bahuga	466	1 145	434	1157	442
10	Buay Bahuga	747	1 507	793	1397	965
11	Bumi Agung	1 075	2 500	1 109	1977	867
12	Pakuan Ratu	8 071	1 550	1 931	1504	1411
13	Negara Batin	1 456	1 239	1 666	805	1130
14	Negeri Besar	1 116	928	1 032	1003	640
Way Kanan		**37 039**	**28 888**	**18 661**	**19 298**	**14 175**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.6.3 Kartu Keluarga yang dikeluarkan

Di tahun 2017 banyaknya kartu keluarga yang dibuat oleh kantor cacatan sipil sebanyak 35.047, menurun signifikan dari tahun 2016 yaitu sebanyak 42.915 Penurunan tersebut kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 38.683, sebanyak 41.904 pada tahun 2019 dan sebanyak 33.328 pada tahun 2020.

Tabel II.81 Banyaknya Kartu Keluarga yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2016–2020

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Banjit	4 136	4 212	4 068	5877	2027
2	Baradatu	2 799	3 489	3 480	2756	2033
3	Gunung Labuhan	2 650	2 498	2 673	3842	2324
4	Kasui	2 354	2 752	3 011	3357	2564
5	Rebang Tangkas	1 631	2 270	2 674	1040	2316

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
6	Blambangan Umpu	5 324	6 112	6 119	4041	5777
7	Way Tuba	1 618	1 969	2 236	3139	1966
8	Negeri Agung	2 528	3 011	3 182	1815	3283
9	Bahuga	715	1 203	1 128	2379	1106
10	Buay Bahuga	1 444	1 298	1 813	2749	1823
11	Bumi Agung	1 907	2 001	2 255	3241	2446
12	Pakuan Ratu	3 706	3 454	3 903	2430	1389
13	Negara Batin	2 591	2 760	3 311	1561	2610
14	Negeri Besar	1 644	1 654	2 050	2251	1664
Way Kanan		**42 915**	**35 047**	**38 683**	**41 904**	**33 328**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Keberhasilan pembangunan desa dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.7.1 PKK Aktif

Jumlah PKK aktif yang ada di Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2020 mencapai 227 kelompok dari total jumlah PKK yang ada sebanyak 227 kelompok (100 %).

Tabel II.82 Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	PKK Aktif	Unit	227	227	227	227	227

Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

2.3.2.7.2 Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal di masyarakat. Posyandu melaksanakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Posyandu dikelompokkan kedalam 4 strata yaitu : posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama dan posyandu mandiri.

Tabel II.83 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Posyandu	Unit	256	421	298	433	433

Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Pada tahun 2019 jumlah posyandu yang ada di kabupaten Way Kanan berjumlah 433 buah yang terdiri dari 27 posyandu pratama, 148 posyandu madya, 212 posyandu purnama dan 46 posyandu mandiri. Dan semuanya termasuk kategori posyandu aktif 433 posyandu (100%).

2.3.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kinerja pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut:

2.3.2.8.1 Peserta KB Aktif Yang Menggunakan Metode Kontrasepsi (MKJP) dan non MKJP

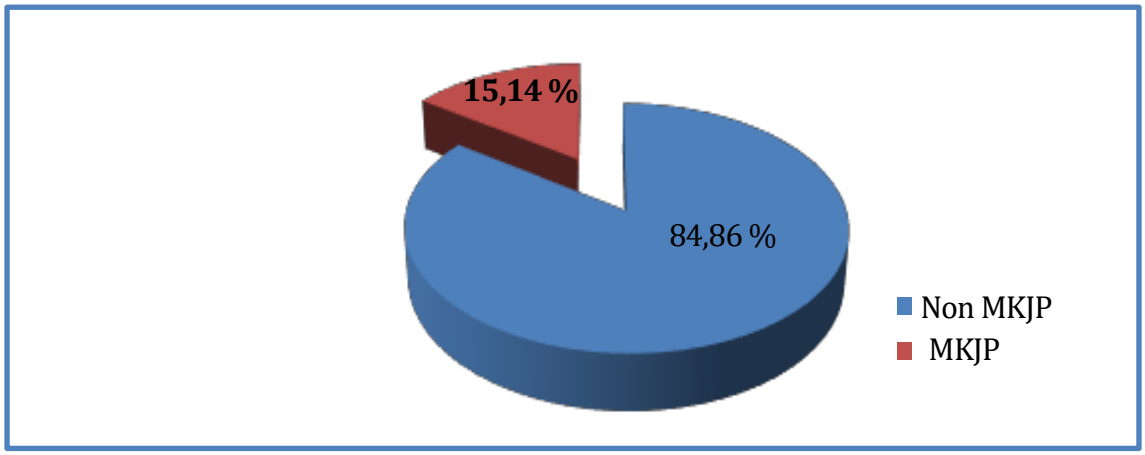
Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun.

Peserta KB aktif merupakan pasangan usia subur, dengan umur 15-49 tahun, yang berstatus kawin dan sedang menggunakan salah satu kontrasepsi. Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada di Kab. Way Kanan tahun 2020 sebanyak 73.417 dan tersebar 14 Kecamatan dengan jumlah PUS terbesar

berada di Kecamatan Blambangan Umpu sebanyak 9.498 PUS, sedangkan jumlah PUS terkecil ada di Kecamatan Bahuga sebanyak 1.782 PUS.

Berdasarkan data Badan KB, KS dan PP, jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Way Kanan tahun 2020 sebanyak 54.888 PUS (74,8%). Peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 8.310 PUS (15,14%) dan non MKJP sebanyak 46.578 PUS (84,86%), yang ditampilkan pada diagram berikut ini :

Gambar II.14 Peserta KB Aktif yang Menggunakan Metode Kontrasepsi (MKJP) dan Non MKJP di Kabuapten Way Kanan Tahun 2020



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2019

2.3.2.8.2 Prevalensi Peserta KB Aktif

Jumlah peserta program KB aktif di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 mencapai 72, Persen, bila dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 97.508 Orang atau (70,78 %).

Tabel II.84 Prevalensi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi peserta KB aktif (%)	71,09	70,78	71,06	71,91	72,37

Sumber Data : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2019,
DinasP3AP2KB tahun 2020 (Data diolah)

2.3.2.8.3 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB Disetiap Kampung/Kelurahan

Sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Way Kanan mempunyai sedangkan jumlah PLKB/PKB di Kabupaten Way Kanan sebanyak 14 orang atau 6,17%.

2.3.2.9 PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan mencakup 4 (empat) bidang pelayanan, yaitu: bidang pelayanan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Berikut ini diuraikan lebih rinci mengenai pelayanan perhubungan di Kabupaten Way Kana.

2.3.2.9.1 Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, yang berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir Kabupaten Way Kanan belum memiliki terminal.

2.3.2.9.2 Transportasi Darat

Moda transportasi darat merupakan moda yang dominan dalam peyelenggaraan urusan perhubungan di Way Kanan. Mobilitas angkutan orang dan

barang sebagian besar masih menggunakan jalan raya. Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, Untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan perbaikan dan modifikasi peralatan pengujian kendaraan guna lebih mengoptimalkan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel II.85 Indikator Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (unit)	1.535	857	955	1250	1070

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan Tahun 2019

2.3.2.9.3 Perkeretaapian

Kabupaten Way Kanan dilewati jalur Kereta Api dengan 6 (Enam) Stasiun yaitu Stasiun Way Pisang, Stasiun Way Tuba, Stasiaun Tanjung Raja, Stasiun Giham, Stasiun Blambangan Umpu, Dan Stasiun Negeri Agung. Moda transportasi perkeretaapian di Way Kanan diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian derah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian.

2.3.2.9.4 Perhubungan Udara

Pembangunan perhubungan udara di Way Kanan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara Gatot Subroto guna menampung penumpang dan barang. Keberadaan Bandara Gatot Subroto menjadi Bandar Udara Komersial yang sudah melayani penerbangan sipil akan semakin membuka konektifitas antara wilayah.

2.3.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Keberhasilan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini :

2.3.2.10.1 W*ebsite* milik pemerintah daerah (*www.waykanankab.go.id.)*

Diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.3.2.10.2 Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Way Kanan terdiri dari : akses internet di semua SKPD, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi.

2.3.2.10.3 Pameran/Expo

Selama tahun 2019, Kabupaten Way Kanan mengikuti kegiatan Pameran /Expo sebanyak 9 Kali.

2.3.2.10.4 Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membuat Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 26 buah yaitu:

a. waykanankab.go.id
b. Fingerprint On-line
c. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
d. SIPERMATA (Sistem informasi perencanaan & manaj data)
e. E-PLANNING
f. SIDATUK (Sistem informasi data terpadu kemiskinan)
g. SPSE 4.1
h. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaaan)
i. E-Katalog

j. SIKEU (Sistem Informasi Keuangan)
k. E-SAKIP
l. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)
m. SIP (Sistem Informasi Pendapatan)
n. SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian)
o. SIMPEG – Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
p. SIAK - Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
q. SPIPISE - Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik
r. SIPO - Sistem Informasi Perusahaan Online
s. CANTIK - cerdas Layanan Perizinan Terpadu Publik
t. PIHPS-SIRADEN - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Sistem informasi Harga Pangan, Komoditas dan Ekonomi
u. SKPG - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gisi
v. SIKDA - Sistem Informasi Kesehatan Daerah
w. ASPAK -Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan
x. SIGIZI - Sistem Informasi Gizi
y. DAPODIKDASMEN - Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah
z. Sistem Informasi Pasar & Industri

2.3.2.11 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Keberhasilan pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.11.1 Koperasi

Koperasi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat turut andil menciptakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang pada umumnya bekerja sebagai petani mengandalkan koperasi unit desa ataupun koperasi kelompok tani sebagai pendukung kelancaran usaha. Jumlah koperasi aktif tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94 koperasi. Jumlah Koperasi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL II.86 Jumlah Koperasi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
KUD	27	27	13	3	3
KOPTAN	46	31	31	3	9
KOPBUN	36	21	21	3	12
KSP	19	14	13	3	7
KSU	268	109	107	19	16
KPRI	5	4	4	3	2
KOPWAN	166	50	39	8	6
KOPPOTREN	11	8	9	-	3
KOPERASI LAINNY	136	102	98	29	36
Jumlah Koperasi	**714**	**366**	**335**	**72**	**94**

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020

2.3.2.11.2 Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah usaha mikro dan kecil yang tersebar di 15 kecamatan sampai dengan tahun 2020 terdapat 34.485 Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel II.87 Jumlah UMKM di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	Kecamatan	JumlahUMKM				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAHUGA	179	179	179	179	847
2	BANJIT	553	680	680	710	2139
3	BARADATU	239	287	287	296	3582
4	BLAMBANGAN UMPU	784	1012	1092	1144	8163
5	BUAY BAHUGA	197	197	247	257	1878
6	BUMI AGUNG	328	328	378	378	1817
7	GUNUNG LABUHAN	349	349	364	398	2476
8	KASUI	485	696	700	824	2788
9	NEGARA BATIN	555	597	597	777	1828
10	NEGERI AGUNG	187	187	187	187	3055
11	NEGERI BESAR	244	244	244	244	1431
12	PAKUAN RATU	186	186	186	186	1469
13	REBANG TANGKAS	281	302	302	350	1588
14	WAY TUBA	3	133	133	201	1424

NO	Kecamatan	JumlahUMKM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah		4570	5377	5576	6131	34485

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

2.3.2.12 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.3.2.12.1 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Way Kanan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, terendah tahun 2018 yaitu -45,99 % dan tertinggi pada tahun 2019 mencapai 114,51%.

Nilai realisasi PMDN di Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 22.916.108.828,- Mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 29.114.625.000,-.

TABEL II.88 Data PMDN Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Tahun		Proyek	Jumlah PMDN (Rp)	Pertumbuhan PMDN (%)
1.	2016			27.515.149.669,-	99,67
2.	2017			25.130.000.000,-	- 8,67
3.	2018			13.572.728.867,-	- 45,99
4.	2019		22	29.114.625.000,-	114,51
5.	2020		18	22.916.108.828,-	- 21,29

Sumber: Dinas PM & PTSP 2021

2.3.2.12.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Pemerintah Kabupaten Waykanan, melakukan 'jemput bola' terkait pelayanan perizinan guna meningkatkan kemudahan iklim berinvestasi dan berusaha di wilayah Kabupaten Way Kanan, guna meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Waykanan. Bagi masyarakat yang ingin membuat izin usaha tidak harus berminggu-minggu. Hanya dengan satu hari sudah bisa dibawa pulang surat izin usaha tersebut.

Berikut Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Bidang Perizinan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013-2017.

TABEL II.89 Indikator Kinerja Bidang Perizinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	Penerbitan Perizinan :					
1	Izin Trayek					
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1290	515	477	292	541
3	Izin Gangguan / HO	601	578	374	383	253
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	590	554	356	329	446
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	560	270	179	262	404
6	Tanda Daftar Industri (TDI)		1	25	4	
7	Tanda Daftr Gudang (TDG)	14	9	12	19	18
8	Izin Usaha Konstruksi (SUJK)	19	12	27	44	41
9	Izin Penyelanggaraan Reklame		19	1	2	4
10	TDUP. Kawasan Pariwisata	10	6	7		7
11	Izin Prinsip Penanaman Modal					1
12	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal					1
13	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal					1
14	Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus					1
15	Izin Pendirian Klinik				2	2
16	Izin Operasional Klinik					
17	Izin Apotik	3	5	4	3	3
18	Izin Laburatorium					
19	Izin Toko Obat					1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018

2.3.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Keberhasilan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.13.1 Gelanggang/Balai Remaja

Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki gelanggang/balai remaja sebanyak 1 unit dan Jumlah penduduk sebanyak 432.914 jiwa (0,0002%).

2.3.2.13.2 Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Way Kanan mencapai 173 unit. Bila dibandingkan dengan per satuan penduduk Kabupaten Way Kanan yang mencapai 432.914 Jiwa adalah sebesar (0,04 %).

2.3.2.13.3 Jumlah Prestasi Olah Raga

Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) adalah salah satu indikator dari IPO yang diukur untuk mengetahui angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Permasalahan pembangunan olahraga di Kabupaten Way Kanan masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga. Permasalahan ini menjadikan indeks partisipasi masyarakat di Kabupaten Way Kanan masih rendah.

Prestasi olahraga dihasilkan dari pembinaan yang berkelanjutan, dan pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat senior guna menghasilkan prestasi Olahraga Kabupaten Way Kanan pada tingkat nasional. Permasalahan peningkatan prestasi Olahraga Kabupaten Way Kanan antara lain belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, Puslatda) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Way Kanan yang memenuhi standar Nasional dan Internasional. Permasalahan tersebut yang menjadikan prestasi olahraga Kabupaten Way Kanan belum maksimal.

TABEL II. 90 Perkembangan Prestasi Olag Raga Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pembinaan olah raga	18,75 %	25 %	18,75 %	31,25 %	8,33%
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	2	2	2	1	
3	Cakupan pembinaan atlet muda		100			
4	Jumlah prestasi olah raga		11 Emas			

Sumber :Dinas PORAPAR Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Memperhatikan perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Way Kanan, selama kurun waktu 2016 hingga 2020 beberapa indikator yang nampak menunjukkan perkembangan yang pluktuatif diantaranya cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2020 sebesar 8,33 persen (dari 12 cabang olahraga hanya 2 cabang yang mendapatkan pembinaan) turun dari tahun sebelumnya sebesar 31,25 persen (dari 16 cabang olahraga hanya 5 cabang yang mendapatkan pembinaan). Jumlah Pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2019 sebanyak 1 orang. Pada tahun 2017 jumlah atlet muda yang dibina sebanyak 100 atlet dengan prestasi olehraga mendapatkan 11 medali emas.

2.3.2.14 STATISTIK

2.3.2.14.1 Buku PDRB dan Way Kanan Dalam Angka

Keberhasilan pembangunan bidang statistik yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap Indikator tersedianya Buku Kabupaten dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten sebagaimana table berikut:

TABEL II.91 Indikator Bidang Urusan Statistik Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/ Tidak	**Ada**	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

2.3.2.15 PERSANDIAN

Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara.

Persentase informasi persandian yang diamankan merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan dan capaiannya pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Semua SKPD di Kabupaten Way Kanan sudah menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Sanapati yang merupakan pelaksanaan kegiatan Jaringan komunikasi sandi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang mencakup kerahasiaan dokumen pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Siber sandi Negara. Sebagai usaha dalam hal pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan pengamanan berkelanjutan atas segala informasi baik yang keluar maupun yang masuk. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut menjaga kerahasiaan informasi yang ada.

2.3.2.16 KEBUDAYAAN

Keberhasilan pembangunan bidang kebudayaan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.16.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Selama tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memfasilitasi penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 1 Kali dalam rangka HUT Way Kanan tahun 2019 yang berupa lomba gitar klasik, pop lampung, pisaan, melukis kreasi batik lampung untuk tingkatan SD, SMP dan umum.

2.3.2.16.2 Perkembangan Kebudayaan

Memperhatikan perkembangan kebudayaan di Kabupaten Way Kanan, selama kurun waktu 2016 hingga 2020 beberapa indikator yang nampak menunjukkan perkembangan yang cukup positif diantaranya jumlah group kesenian, budaya lokal, penyelenggaraan seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Way Kanan dalam membangun seni budaya di daerah berkembang cukup pesat.

Tabel II. 92 Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian				350	350
2	Jumlah budaya Lokal					
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (event)	6	6	6	6	6
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	6	6	6	6	6
5	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan					
-	Benda Cagar Budaya (buah)	14	14	14	14	14
-	Bangunan Cagar Budaya (unit)	3	3	3	3	3
-	Situs Cagar Budaya (Lokasi)	17	17	17	17	17
-	Kawasan Cagar Budaya (kawasan)	8	8	8	8	8

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.2.16.3 Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Jumlah prasarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 278 Sanggar.

2.3.2.16.4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Jumlah benda, situs, banguna dan kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan sebanyak 32 dan terus dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2.3.2.17 PERPUSTAKAAN

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disebutkan bahwa salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan "Koleksi Deposit" dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan, sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

2.3.2.17.1 Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 481 unit yang terdiri dari 1 unit Perpustakaan Daerah, 30 unit Perpus Kampung, 1 unit perpustakaan Pesantren, dan 449 unit perpustakaan sekolah *(310 unit perpustakaan SD, 80 unit perpustakaan SMP, 35 unit perpustakaan SMA dan 24 unit perpustakaan SMK)*

2.3.2.17.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun dan Ketersediaan Buku di Perpustakaan Pemerintah Daerah.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung.

Jumlah pengunjung di perpustakaan Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 sebanyak 17.746 orang, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 13.750 orang. Koleksi buku diperpustakaan juga terus mengalami peningkatan hingga sampai Tahun 2019 adalah sebanyak 23.546 Buku, sebagimana table berikut:

TABEL II.93 Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengunjung	1.374	2.693	7.593	13.750	17.746
2	Jumlah Buku	11.546	13.546	15.546	17.546	23.546

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 2019

2.3.2.18 KEARSIPAN

Keberhasilan pembangunan bidang kearsipan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2019 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.2.18.1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD di Kabupaten Way Kanan dari total 46 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 15 SKPD (21,74 %) yaitu: BKPSDM, BPKAD, BPBD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas TPHP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas

Perhubungan, Dinas P3AP2KB, Dinas Porapar dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

2.3.2.18.2 Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan

Pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan untuk 15 (sepuluh) SKPD yaitu berupa tata cara penyusunan jadwal Retensi Arsip (JRA).

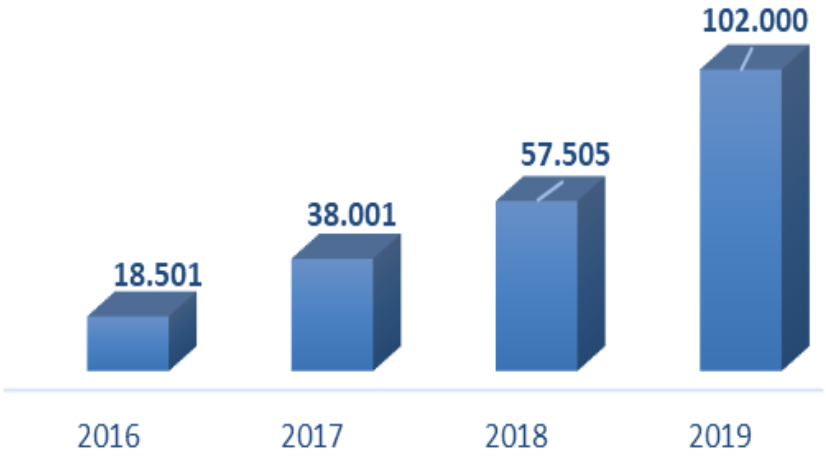
2.3.3 LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 PARIWISATA

Keberhasilan pembangunan bidang pariwisata yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2016-2019 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.3.1.1 Jumlah Kunjungan Wisata

GRAFIK II.29 Indikator Bidang Urusan Pariwisata Kabupaten Way Kanan Tahun 2016- 2019

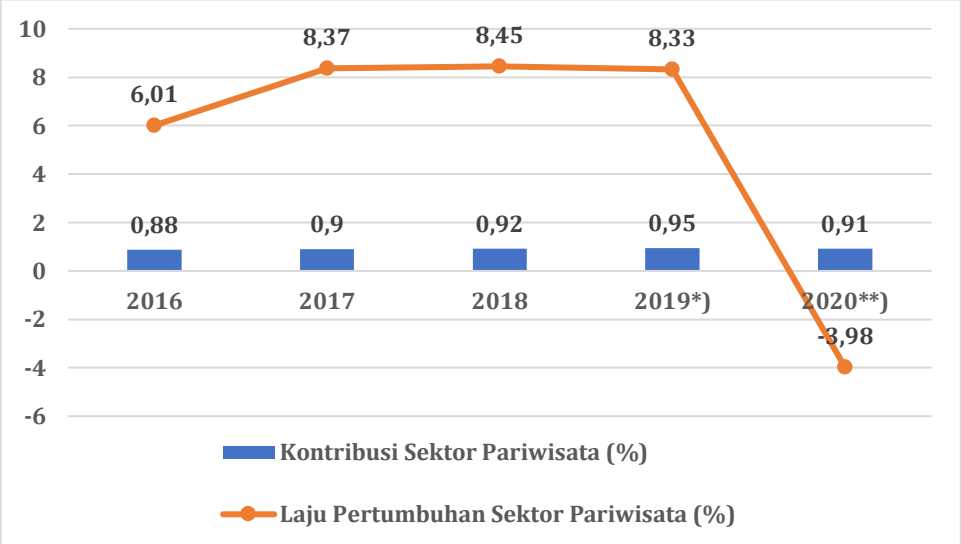


Sumber : Dinas Porapar Tahun 2019

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 sebanyak 18.501 orang meningkat pada tahun 2019 sebanyak 102.000 Orang.

2.3.3.1.2 Kontribusi Sektor Pariwisata

GRAFIK II.30 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Selama lima tahun terakhir kategori penyediaan akomodasi dan makan minim telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ke sector pariwisata di Kabupaten Way Kanan. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB mengalami pluktuatif dari Tahun 2016 sebesar 0,88 persen sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,91 persen. Kondisi ini menunjukkan sektor ini mengalami pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 6,01 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,98 persen sebagai dampak dari virus covid-19. Dan di masa mendatang diharapkan sector pariwisata berpotensi memberikan kontribusi terhadap PDRB yang semakin besar.

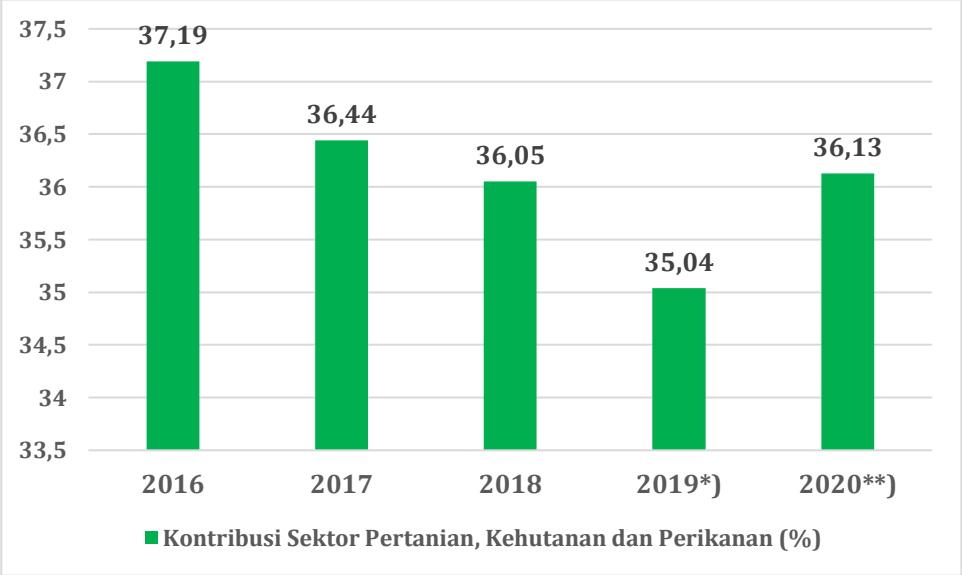
2.3.3.2 PERTANIAN

2.3.3.2.1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Usaha Kehutanan dan

Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat Way Kanan.

GRAFIK II.31 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

2.3.3.2.2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar

Way Kanan merupakan kabupaten yang memiliki potensi di bidang pertanian. Komoditas unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Way Kanan adalah padi dan jagung. Produktivitas padi Sawah adalah sebesar 52,5 , Padi Ladang Sebesar 27,95 dan jagung sebesar 52,57 di tahun 2019.

Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Way Kanan realtif rendah. Kabupaten Way Kanan sendiri masih mengandalkan produk hortikultura kiriman dari kabupaten lain, seperti Lampung Barat, Lampung Timur, dsb.

TABEL II.94 Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang dan Jagung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2019

Tahun	Produktivitas (kw/ha)		
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung
2015	53,21	47,55	45,15
2016	54,35	36,19	48,61
2017	54,69	30,81	44,98

Tahun	Produktivitas (kw/ha)		
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung
2018	50,68	27,49	52,29
2019	52,5	27,95	52,57

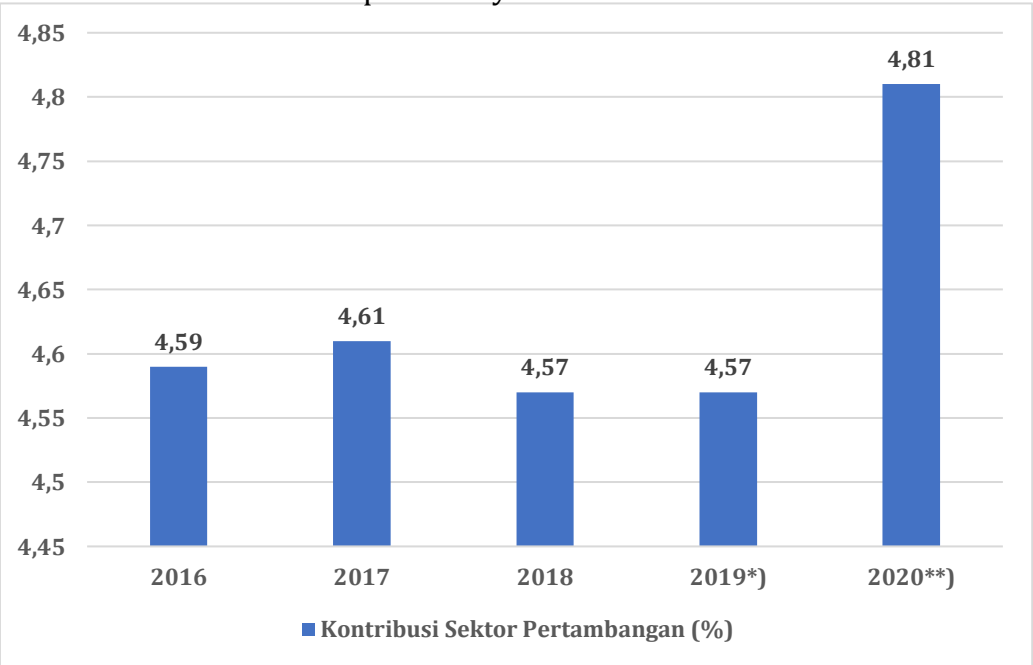
Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2019
Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.3.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.3.3.3.1 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Seluruh jenis komoditi dalam kategori pertambangan mencakup pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara, pertambangan bijih logam, serta pertambangan lainnya.

GRAFIK II.32 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Pada Tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan sebesar 4,59 persen dan terus berfluktuatif hingga mencapai 4,81 persen pada Tahun 2020.

2.3.3.3.2 Rasio Elektrifikasi

Saat ini Rasio Elektrifikasi ditingkat kampung/kelurahan pemasangan listrik telah mencapai 100 persen. Namun masih ada warga di dusun yang belum teraliri jaringan listrik. Dari data yang ada pada tahun 2016 rasio elektrifikasi kampung/kelurahan telah mencapai 100 persen. Namun dari seluruh kampung/kelurahan yang ada di Kabupaten Way Kanan masih ada 52 dusun atau sebanyak 3197 Rumah Tangga Miskin (RPM) dari total 1178 dusun yang belum ada jaringan listriknya.

Pembangunan jaringan listrik pedesaan tidak hanya dilaksanakan oleh PT. PLN, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan juga telah melaksanakan pembangunan jaringan listrik. Pada tahun 2015 telah dibangun jaringan listrik di 39 dusun pada beberapa kampung, dan di tahun 2016 sebanyak 15 dusun. Jaringan yang dibangun melaui dana APBD tersebut berupa jaringan distribusi baru dan normalisasi jaringan yang mengalami drop tegangan.

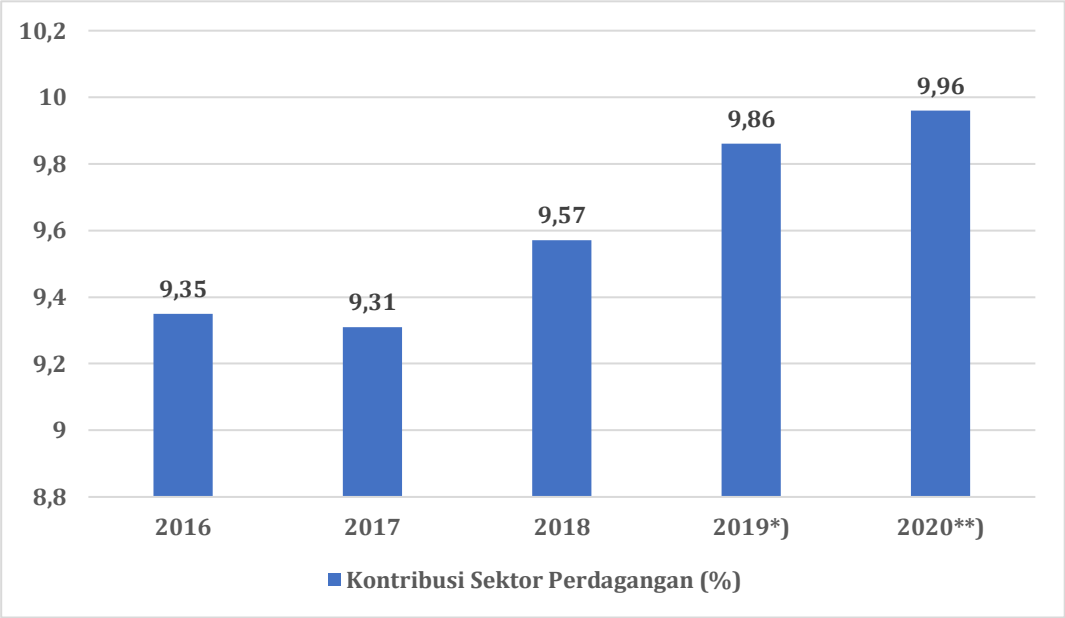
Data Tahun 2017, Rasio Elektrifikasi Way Kanan baru mencapai 75,33%, dilihat dari 221 Kampung dan 6 Kelurahan 100% sdh teraliri listrik.

2.3.3.4 PERDAGANGAN

2.3.3.4.1 Kontribusi sektor Perdagangan

Keberhasilan pembangunan bidang perdagangan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

GRAFIK II.33 Pertumbuhan dan Kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

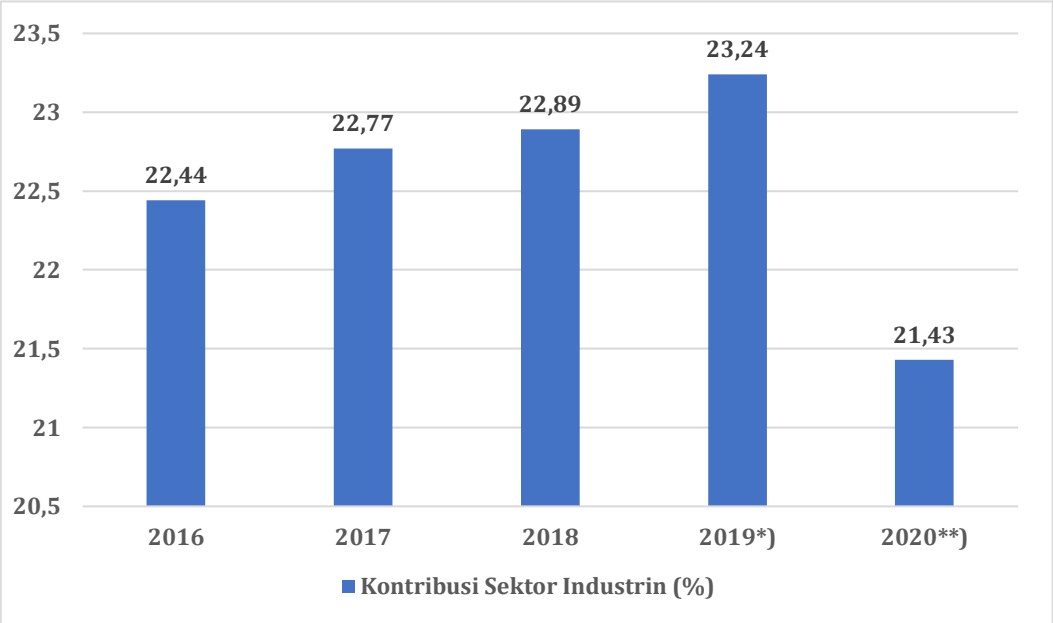
Selama lima tahun terakhir kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ke tiga di Kabupaten Way Kanan. Kontribusi kategori ini pada 2016-2020 berada pada kisaran 9 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini di tahun 2021 adalah sebesar 1,004 triliun rupiah atau sebesar 9,96 persen dari total nilai tambah Way Kanan. Kategori ini didominasi oleh kegiatan perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.

2.3.3.5 PERINDUSTRIAN

2.3.3.5.1 Kontribusi sektor Industri

Keberhasilan pembangunan bidang industri yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

GRAFIK II.34 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Peranan kategori Industri Pengolahan merupakan penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Way Kanan di tahun 2020. Nilai peranan kategori ini mencapai 21,43 persen, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 23,24 persen. Nilai ini sejalan dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga mengalami kontraksi di tahun 2020 yakni 8,37 persen.

Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri rumah tangga yang mengolah bahan makanan dan minuman, seperti industri pengolahan kopi/keripik kemasan.

2.3.3.6 TRANSIMIGRASI

Capaian pembangunan bidang Ketranmigrasian Kabupaten Way Kanan, melalui pemberdayaan masyarakat ex Transmigrasi di 76 Kampung, serta pengembangan Kawasan KTM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks transmigrasi.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016

sebesar persen, menurun menjadi persen di Tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi persen pada Tahun 2020.

2.3.3.7 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.3.3.7.1 Produksi perikanan

Produksi Perikanan di Kabupaten Way Kanan ditunjang oleh perikanan budidaya kolam, dan perikanan perairan umum. Jumlah produksi perikanan dari tahun 2016 (1.583,98 ton) terus mengalami penurunan sampai dengan 2017 (1.498,54 ton). Namun terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 (1.909,66 ton) dengan jumlah produksi perikanan budidaya kolam sebesar 1.710,95 ton dan Jumlah produksi perikanan perairan umum sebesar 198,71 ton. Secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.95 Produksi Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	PRODUKSI IKAN (TON)				JUMLAH TOTAL
		PERIKANAN BUDIDAYA			PERIKANAN PERAIRAN UMUM	
		KOLAM	KERAMBA	MINA PADI		
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	1.398,23	-	-	148,60	1.583,98
2	2017	1.442,80	-	-	55,75	1.498,54
3	2018	1.533,28	-	-	195,73	1.729,01
4	2019	1.619,43	-	-	197,73	1.817,14
5	2020	1.710,95	-	-	198,71	1.909,66

Sumber : Kabupaten Way Kanan dalam Angka Tahun 2018
Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019,2020

Jenis perikanan di Kabupaten Way Kanan adalah perikanan budidaya dengan sarana pembudidayaan berupa kolam. Bila dilihat dari produksi tahun 2020 yaitu sebesar 1.909,66 ton, potensi perikanan Way Kanan bisa dikatakan lebih kurang dari tahun sebelumnya.

2.3.4 PENUNJANG URUSAN

2.3.4.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kinerja pembangunan bidang perencanaan pembangunan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator berikut ini:

2.3.4.1.1 Dokumen Perencanaan

1 Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);

2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);

3 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 346);

4 Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 156);

5 Dokumen Perencanaan RKPD tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016;

6 Dokumen Perencanaan RKPD Perubahan tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 56 Tahun 2017;

7 Dokumen Perencanaan RKPD tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2017;

8 Dokumen Perencanaan RKPD Perubahan tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 Tahun 2018;

9 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 18 Tahun 2018;

10 Dokumen Perencanaan RKPD Perubahan tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 14 Tahun 2019;

11 Dokumen Perencanaan RKPD tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2019;

12 Dokumen Perencanaan RKPD Perubahan tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 21 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019;

13 Dokumen Perencanaan RKPD tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 20 Tahun 2020;

14 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.3.4.1.2 Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai persentase sebesar 100 persen.

2.3.4.1.3 Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam APBD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah

program APBD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 penjabaran Program RPJMD ke dalam APBD mencapai persentase sebesar 100 persen.

2.3.4.2 KEUANGAN

2.3.4.2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan

Kabupaten Way Kanan memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 10 tahun berturut-turut (tahun 2010-2020).

TABEL II.96 Nilai Opini BPK di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan 2021

Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

2.3.4.2.2 Persentase SILPA terhadap APBD

TABEL II.97 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentasi Silva terhadap APBD (%)	3,11	1,88	0,57	-0,55	4,49

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan 2021

2.3.4.2.3 Persentase belaja Pendidikan dan belanja Kesehatan

TABEL II. 98 Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pendidikan (%)	34,32	27,90	28,55	33,80	33,01
Belanja Kesehatan (%)	16,98	16,96	16,32	18,34	16,06

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan 2021

2.3.4.2.4 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

TABEL II.99 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		Total Belanja
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2016	692.043.427.123,00	58,63	488.214.263.342,20	41,37	1.180.257.690.465,20
2	2017	892.148.460.320,00	66,05	458.573.187.127,00	33,95	1.350.721.647.447,00
3	2018	1.026.608.186.923,00	68,39	474.487.094.633,00	31,61	1.501.095.281.556,00
4	2019	907.455.482.970,15	64,76	493.710.306.763,00	35,24	1.401.165.789.733,15
5	2020	449.193.430.145,66	47,30	500.410.365.691,81	52,7	949.603.795.837,47

Sumber : BPKAD Kabupaten Way Kanan 2021

Rata-rata belanja aparatur Kabupaten Way Kanan dibandingkan total belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada pada kisaran 38.97 persen. Pada tahun 2016 proporsi belanja aparatur sebesar 41,37 persen, ditahun 2017 proporsi belanja aparatur sebesar 33,95 persen, ditahun 2018 proporsi belanja aparatur sebesar 31,61 persen, ditahun 2019 proporsi belanja aparatur sebesar 35,24 persen, dan ditahun 2020 proporsi belanja aparatur naik menjadi sebesar 52,70 persen, ini disebabkan oleh refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

2.3.4.2.5 Penetapan APBD

Dalam Kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.3.4.2.6 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal Daerah adalah kemampuan Kauangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiscal daerah. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan dalam 5 (lima) katagori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

TABEL II. 100 Katagori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Rentang IKFD	Katagori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD<0,517	Sangat Rendah
0,517<IKFD<0,747	Rendah
0,747<IKFD<1,168	Sedang
1,168<IKFD<2,145	Tinggi
IKFD>2,145	Sangat Tinggi

Sumber : PMK tentang peta fiscal daerah Tahun 2016-2020

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada kurun tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami pluktuatif, terendah pada tahun 2016 sebesar 0,250 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,703, dengan katagori KPD rendah.

TABEL II. 101 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Indeks KFD	Katagori KFD
1	2016	0,250	Rendah
2	2017	0,540	Rendah
3	2018	0,642	Rendah

No	Tahun	Indeks KFD	Katagori KFD
4	2019	0,703	Rendah
5	2020	0,563	Rendah

Sumber : PMK tentang peta fiscal daerah Tahun 2016-2020

2.3.4.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dari jumlah 5.165 Pegawai di Kabupaten Way Kanan yangmenduduki jabatan fungsional tertentu 2.918 orang, jabatan fungsional umum 1.484 orang dan jabatan struktural berjumlah 763 orang. Jabatan struktural terdiri dari 34 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan 729 menduduki jabatan administrasi. Berdasarkan Jabatan pegawai Kabupaten Way Kanan masih didominasi dengan jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.918 orang atau 56,50%.

TABEL II. 102 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

JABATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Fungsional Tertentu	*4071*	3313	3011	3022	2918
Fungsional Umum	*1033*	1352	1349	1445	1484
Struktural	**748**	**791**	**811**	**794**	**763**
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					
Eselon I	0	0	0	0	0
Eselon II	31	35	35	35	34
Jabatan Administrasi					
Eselon III	153	167	165	164	163
Eselon IV	564	589	611	595	566
Eselon V	0	0	0	0	0
Jumlah	**5852**	**5456**	**5171**	**5261**	**5165**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

2.3.4.4 SEKRETARIAT DAERAH

2.3.4.4.1 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Predikat kepatuhan Tinggi atau Zona hijau diperoleh dari rentang nilai 81-100. Predikat Kepatuhan Sedang atau zona kuning diperolah dari rentang

nilai 51-80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau zona Merah diperolah dari rentang nilai 0-50. Akumulasi nilai tersebut diperolah dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelanggara layanan administrasi baik tingkat Pusat maupun Daerah.

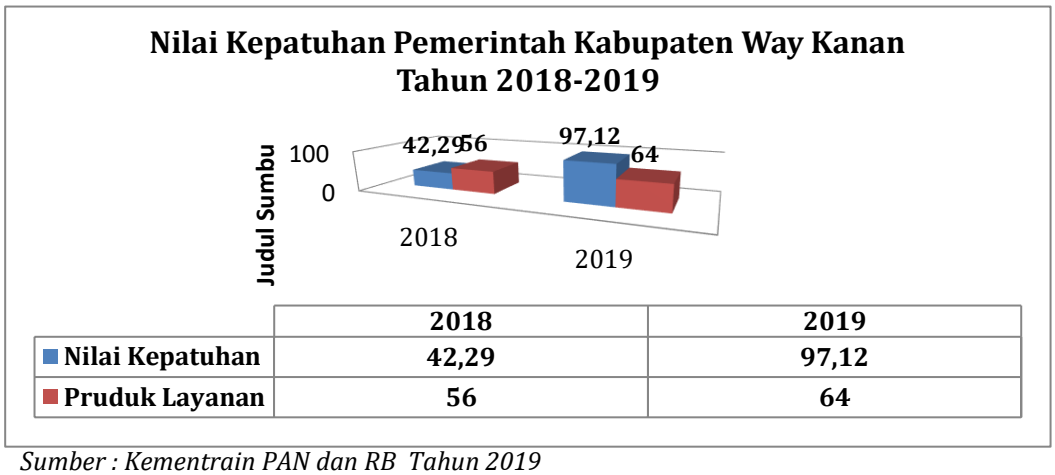
TABEL II. 103 Katagorisasi Penilaian Pemerintah Daerah

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0-50	Rendah	**Merah**
51-80	Sedang	**Kuning**
81-100	Tinggi	**Hijau**

Sumber : Kementrain PAN dan RB Tahun 2019

Berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dari 56 produk layanan administrasi pada tahun 2018 diperoleh nilai 42,29 dan masuk pada zona merah dengan Predikat Kepatuahan Rendah. Pada tahun 2019 dari 64 produk layanan administrasi diperoleh nilai 97,12 dan masuk pada zona hujau dengan Predikat Kepatuahan Tinggi.

Grafik II. 35 Nilai Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2019



Sumber : Kementrain PAN dan RB Tahun 2019

2.3.4.4.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan dari Evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta

birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Way Kanan.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2019 adalah 56,09 atau katagori **"CC",** terinci sebagai berikut:

TABEL II. 104 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2019

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai			
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
a	Perencanaan Kinerja	30	14,15		19,70	19,83
b	Pengukuran Kinerja	25	8		14,07	14,16
c	Pelaporan Kinerja	15	5,78		8,58	8,86
d	Evaluasi Internal	10	3,85		4,48	4,72
e	Capaian Kinerja	20	8,33		8,43	8,52
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**40,11**		**55,56**	**56,09**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**		**CC**	**CC**

Sumber : Kementrain PAN dan RB Tahun 2019

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 PDRB DAN PDRB PER KAPITA

Salah satu indikatortingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan factor-faktor produksi

yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel II.105 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB PerkapitaKabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	11.060,71	12.108,68	13.055,24	13.999,29	14.037,77
b. ADHK 2010	8.233,79	8.654,30	1.102,88	9.573,87	9.462,81
PDRB per kapita (juta Rp)					
a. ADHB	25 279,90	27 400,05	29 264,42	31.101,99	30.925,57
b. ADHK 2010	18 818,79	19 583,31	20 404,87	21.270,11	20.846,82
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,02	4,06	4,20	4,24	-1,99
Jumlah Penduduk (ribu orang)	437 530	441 922	446 113	450 109	479.702
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,07	1,00	0,95	0,90	1,51
Pertumbuhan	5,12	5,11	5,18	5,17	-1.16

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

Perekonomian Kabupaten Way Kanan secara umum terus bergerak ke arah peningkatan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Way Kanan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14.037,77 triliun atau meningkat sebesar Rp. 38.480 milyar dari PDRB tahun 2019 yang sebesar Rp. 13.999,29 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Kabupaten Way Kanan turun dari Rp. 9.573,87 triliun Pada Tahun 2019 menjadi Rp. 9.462,81 triliun pada tahun 2020 atau turun sebesar Rp. 111,06 milyar.

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Way Kanan ini diikuti pula dengan peningkatan PDRB perkapita. Meskipun nilai PDRB perkapita belum mampu

menunjukkan peningkatan yang sebenarnya dari daya beli masyarakat, PDRB perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi rata-rata PDRB perkapita suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 31.101,99,- secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai Rp. 30.925,57,-.

2.4.2 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah.

Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan.

Tabel II.106 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp.)	614.702	753.307	753.307	847.500	895.889

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Way Kanan tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Rp. 614.702 per kapita tahun 2016 menjadi Rp 895.889 per kapita tahun 2020. Dengan rincian 489.163 makanan dan 406.728 bukan makanan. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya meningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.4.3 PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PERKAPITA

Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya.

Tabel II.107 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (%)	42	43	44	45	45,40

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020) pengeluaran rata- rata per kapita penduduk Way Kanan untuk kebutuhan non makanan proporsinya relatif stabil yaitu kisaran antara 42 - 45 persen. Ini mengindikasikan, bahwa kesejahteraan masyarakat Way Kanan semakin meningkat. Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

2.4.4 ANGKA KRIMINALITAS YANG DILAPORKAN

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak

dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel II.108 Jumlah Kriminalitas *(Crime Total)* yang dilaporkan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas yang di Laporkan	558	494	305	429	425

Sumber : Statistik Keamanan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

Dalam rentang tahun 2016-2020, angka kriminalitas sebanyak 558 kasus pada tahun 2016 hingga 425 kasus pada tahun 2020, artinya angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan.

Tabel II.109 Tingkat Resiko Terkena Kejahatan *(Crime Rate)* di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Resiko Terkena Kejahatan	127,53	111,78	68,37	95,31	

Sumber : Statistik Keamanan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman suatu wilayah. Pada tahun 2019 terlihat bahwa Way Kanan memiliki crime rate sebesar 95,31 yang berarti bahwa setiap 100.000 orang penduduk di Kabupaten Way Kana nada sebanyak 95 orang memiliki resiko terkena tindak kriminalitas.

2.4.5 RASIO KETERGANTUNGAN

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara

ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Tabel II.110 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ketergantungan (%)	50,44	50,33	50,15	49,98	48,44

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2016, angka *dependency ratio* untuk Way Kanan sebesar 50,44 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 50-51 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.4.5.1 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Perkembangan ICOR Kabupaten Way Kanan, dapat dilihat pada gambar berikut.

Berdasarkan penghitungan pada tabel 17 terlihat bahwa besaran ICOR tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 Angka ICOR Way Kanan bertanda negatif sebesar -28,90. ICOR tahun 2020 tersebut bertanda negatif karena output di tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Kabupaten Way Kanan dimana kondisi ekonomi mengalami penurunan. Penanaman barang modal baru pada tahun 2020 belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum atau tidak efesien.

Berdasarkan nilai ICOR, dapat dikatakan bahwa perekonomian Way Kanan di tahun 2020 kurang efesien dibandingkan tahun 2019. Kabupaten Way Kanan pada kenyataannya masih sangat membutuhkan banyak investasi untuk mendongkrak perekonomian. Kabupaten Way Kanan kaya akan potensi sumber daya alam. Namun pemanfaatannya masih kurang optimal dikarenakan kurangnya investasi yang masuk di Way Kanan. Investasi di semua sektor seperti industri, pariwisata, angkutan dan pertanian selain mampu meningkatkan produksi juga menyerap tenaga kerja.

Tabel II. 111. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	8 233,79	8 654,30	9 102,88	9 573,87	9 462,81
Perubahan (Miliar Rp)	401,39	420,51	448,58	470,99	(111,06)
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.675,92	2.817,88	3.048,30	3.216,24	3.119,84
ICOR	6,67	6,70	6,80	6,83	-28,09

Sumber: PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
*Angka sementara
**Angka sangat sementara
( ) Bernilai negatif

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II. 112 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabuapten Way Kanan Tahun 2016-2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA					KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
				2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
A	**FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**									
I	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian**									
1	Pertumbuhan PDRB	%	5.2	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16	6	
2	PDRB adhb	Juta Rp	10,113,877	11.060.713	12.108.683,35	13.055.240,53	13.999.288,35	14.037.767,24	18.434.157	Beluam Tercapai
3	PDRB per kapita adhb	Rp.	23,362,324	25,280,000	27,520,000	29.264.425	31.101.996	30,925,573	40,268,653	Beluam Tercapai
4	Laju Inflasi	%	5.5	2.75	3.35	2.56	2.56	2.56	5.5	Melampaui
5	Indeks Pembangunan Manusia	poin	65,09	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	70.9	Beluam Tercapai
6	Tingkat Kemiskinan	%	14,53	14,58	14,06	13,52	13,07	12,90	11,53	Beluam Tercapai
7	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	%	1.86	2.69	2.05	2.05	2.04	1.90	0.91	Beluam Tercapai
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.13	1.43	1.00	1,00	0.90	1,51	0.85	Beluam Tercapai
9	Rata-rata pengeluaran perkapita	Rp.	543,008	614,702	753.307	753.307	847.500	895 889	758,090	Melampaui

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA					KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
				2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Makanan	Rp.	308,803	341,365	426.263	426.263	475 166	489 163	406,489	Melampaui
	Bukan Makanan	Rp.	234,205	273,337	327.044	327.044	372 334	406 728	351,601	Melampaui
B.	**FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.	**Pendidikan**									
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,89	7.33	7.34	7.35	7,39	7,70	7.73	Beluam Tercapai
2	Kesehatan									
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.4	68.58	68.8	68.95	69,27	69,40	69	Melampaui
2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	Poin	40,78	41.48	49,50	49,2	112,15	101,05	30,98	Beluam Tercapai
2.3	Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH	Poin	4,07	2.21	2,97	2,97	1,14	1,89	3,05	Beluam Tercapai
3	Sosial									
3.1	Tingkat Kemiskinan	%	14.53	14.58	14.06	13,52	13,07	12,90	11,53	Beluam Tercapai
3.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	%	1.86	2.69	2,05	2,05	2,04	1,90	0.91	Beluam Tercapai
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
A	**Pelayanan Urusan Wajib**									
1	**Pendidikan**									
1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	Poin	100	100	99,73	99,55	99,82	99,82	100	Beluam Tercapai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA					KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
				2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.2	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun	Poin	94.45	97.07	95,47	78,75	96,31	96,31	100	Beluam Tercapai
1.3	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 tahun	Poin	68.17	21.56	63,23	57,63	65,85	65,58	80.01	Beluam Tercapai
1.4	Angka Partisipasi Sekolah 19-24 tahun	Poin	17.35	65.74	22,26	22,26	10,71	10,71	29.95	Beluam Tercapai
2	**Kesehatan**									
2.1	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	Poin	40,78	41.48	49,50	49,2	112,15	101,05	30,98	Beluam Tercapai
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH	Poin	4,07	2.21	2,97	2,97	1,14	1,89	3,05	Beluam Tercapai
3	Pekerjaan Umum									
3.1	Kondisi infrastruktur jalan dalam kondisi mantap	%	35	36,05	36,05	45,53	50,98	52,73	75	Beluam Tercapai
3.2	Penanganan Jalan Strategis	Km	n/a	120,10	311,652	449,792	504,822		666	
3.3	Dokumen RDTR	dokumen	0	0	0	0	0	0	8	Beluam Tercapai
3.4	Dokumen RTBL/Zonasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	8	Beluam Tercapai
3.5	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	39	39	39	43,1	66,67		70	
4	Perumahan									
4.1	Rumah angga Pengguna Air Bersih	%	43.63	35,93	66,32	54,46	61,44	61,40	57	Melampaui
5	**Perhubungan**									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA					KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
				2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
5.1	Terminal Tipe C	unit	0	0	0	0	0	0	1	Beluam Tercapai
5.2	e-government	%	n/a	1	15	15	15	46	50	Beluam Tercapai
6	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**									
6.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0.00022732	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.002569901	Beluam Tercapai
6.2	Penanganan daerah rawan bencana	kecamatan	5	5	14	14	14	15	5	Melampaui
7	Lingkungan Hidup									
7.1	Penanganan Kualitas Air Sungai	sungai	1	1	1	1	1	1	1	sesuai
B	**Pelayanan Urusan Pilihan**									
1	**Pertanian**									
1.1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	3,5	3.91	2,19	2,39	2,01	0,74	4,60	Beluam Tercapai
2	Perdagangan									
2.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4.91	6.34	5,02	7,65	6,15	-0,89	5.65	Beluam Tercapai
3	Perindustrian									
3.1	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	5,9	4.86	6,10	6,84	7,58	-8,37	6.8	Beluam Tercapai
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA					KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
				2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**									
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian**									
1.1	Peraturan Daerah (PERDA) yang disahkan	buah	8	9	6	17	9	10	8	Melampaui
1.2	Peraturan Bupati (Perbub) yang disahkan	buah	40	60	45	58	41	45	40	Melampaui
1.3	Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	n/a	20	20	20	20	20	100	Beluam Tercapai
1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan	Orang	5643	5335	5329	5.362	5.361	5.165	6000	Beluam Tercapai
1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.2	5.14	5.11	5.21	5,17	-1,16	6	Beluam Tercapai
B	**Fokus Iklim Berinvestasi**									
1	**" Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian"**									
1.1	Angka kriminalitas	kasus	557	558	494	305	429	425	400	Beluam Tercapai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA					KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
				2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.2	Jumlah demo	Kali	3	1	1	1	1	1	1	sesuai
C	Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Kependudukan dan catatan sipil									
1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.13	1.43	1.00	1.00	0.90	1,51	0.85	Beluam Tercapai

2.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

2.5.1 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2020

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020 oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II. 113 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penduduk Usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	85 %	80,25 %	94,41
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	100 %	95,46 %	95,46
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	20 %	13,16 %	65,80

***Sumber** : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020*

Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar

Capaian utama dalam pendidikan dasar adalah dari upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas.

Ketersediaan lembaga penyelenggara sekolah merupakan implikasi dari program pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi peserta didik pendidikan dasar, saat ini jumlah lembaga SD adalah sebanyak 313 SD, SMP adalah sebanyak 88 SMP, MI adalah sebanyak 37 MI serta MTs adalah sebanyak 31 MTs.

Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan dasar (jenjang SD/MI dan SMP/MTs) adalah sebanyak 77.433 peserta didik serta jumlah warga negara usia 7-15 tahun adalah sebanyak 80.502 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan dasar adalah sebesar 96,19% dari rencana target 100%, artinya masih ada 3,81% warga negara usia 7-15 tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan dasar.

2. Jenis Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal diselenggarakan melalui pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan (LKP), pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lain sebagainya.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) adalah salah satu lembaga pendidikan kesetaraan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal (non formal) dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga

dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itulah PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada disekitar lingkungannya agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pada tahun 2020 jumlah lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) adalah sebanyak 36 lembaga yang terdiri dari 16 PKBM dan 20 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dari 36 lembaga tersebut, yang aktif hanya 28 lembaga yaitu 14 PKBM dan 14 LKP, dengan partisipasi warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah sebanyak 3.034 warga belajar dan warga negara usi 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan atau menengah adalah sebanyak 23.046 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan adalah sebesar 13,16% dari rencana target 20%, artinya masih ada 20.012 warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan dan berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan.

3. Jenis Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan prasekolah dengan sasaran anak usia 0-6 tahun. Program PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter.

Program PAUD dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pendidikan yang dikelola secara formal melalui Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) dan pendidikan yang dikelola secara nonformal yang dilaksanakan berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah lembaga PAUD pada tahun 2019 yaitu sebanyak 347 lembaga PAUD yang yang terdiri dari 159 TK, 173 KB, 15 SPS dan 25 RA. Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan anak usia dini adalah sebanyak 13.336 peserta didik serta jumlah warga negara usia 5-6 tahun adalah sebanyak 17.676 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan

anak usia dini adalah sebesar 75,45% dari rencana target 80%, artinya masih ada 24,55% warga negara usia 5-6 tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini.

2.5.2 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN. SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) layanan dasar yaitu :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

b. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir d. Pelayanan kesehatan balita

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II.114 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	91,70
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,60
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	91,20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (%)	Realisasi (%)
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,80
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	29,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	54,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	37,60
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	85,00
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penduduk dengan Gangguan jiwa berat yang terlayanani kesehatan	100	79,30
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	68,20
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	52,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 2020

2.5.3 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Bidang Pekerjaan Umum

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. Bidang Perumahan Rakyat

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Way Kanan tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL II.115 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2020

TABEL II.116 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%	%

2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2020

2.5.4 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Way Kanan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah seuai dengan indikator kinerjanya masing-masing. Berikut penjelasan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban umum cenderung meningkat dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan tersebut Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di Pemerintahan Daerah ialah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.

TABEL II.117 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	%
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakkan Hukum PERDA dan PERKADA	100 %	100 %	100 %	100
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	100 %	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan, 2020

Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM B i da ng Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatkan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan yang dilakukan adalah penegakkan ketertiban umum dan pengawasan penegakkan perda, dimana pada tahun 2020 dilaksanakan di 14 Kecamatan dan pengawasan pelanggaran perda sebanyak 42 kali.

b. Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian utama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah persentase kejadian kebakaran yang ditangani. Dari upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 98%.

2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jenis pelayanan dasar pada SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana Tahun 2020 oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II.118 Realisasi Pencapaian SPM Penanganan Becana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi bencana	100%	100%	2,23%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	100%	2,75%
3	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	67,07%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, 2021

2.5.5 REALISASI PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL TAHUN 2020

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar tersebut terdiri atas 5 (lima) layanan dasar yaitu :

a. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar panti

b. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dipanti/ LKSA

c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut Usia Terlantar diluar panti d. Pelayanan Rehabilitasi Sosila Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Napzah

e. Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota.

Tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL II.119 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Target Capaian	Realisasi	Capaian %
1	Rehabiltasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	70%	23,91%	23,91
2	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	70%	15,04%	15,04
3	Rehabiltasi Sosial Dasar anak Diluar Panti	70%	8,20%	8,20
4	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana Daerah	70%	64,73%	64,73
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusunya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	70%	1,64%	1,64

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2021

2.6 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Way Kanan 2016-2021

Evaluasi hasil Capaian indicator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.120 Evaluasi Indikator Kinerja dan Target RKPD sampai dengan Tahun 2020

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi					Kondisi Akhir RPJMD	Capaian Target
										2016	2017	2018	2019	2020		
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatu	1	Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1	Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	1	Peraturan Daerah(PERDA) yang disahkan	Buah	8	9	6	17	9	10	8	125 %
						2	Peraturan Bupati (Perbub) yang disahkan	buah	40	60	54	58	41	45	40	112,5%
				2	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1	Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	n/a	20	20	20	20	20	100	20%
				3	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan	orang	5.643	5335	5329	5.362	5.361	5.165	6000	86,08%
2.	Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi	1	Terwujudnya kondisi infrastruktur dasar yang baik	1	Peningkatan kondisi infrastruktur sumberdaya air	1	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	39	39	39	43,14	66,67		70	95,24%
				2	Peningkatan kondisi infrastruktur Jalan	1	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	%	35	36,05	36,05	45,53	50,98		75	67,97%
						2	Penanganan jalan strategis	km	n/a	120,10	311,652	449,792	504,822		666	75,80%
				3	Peningkatan kondisi pemukiman dan lingkungan pemukiman	1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	43.63	35,93	66,32	54,46	61,44		57	107,79%

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi					Kondisi Akhir RPJMD	Capaian Target
										2016	2017	2018	2019	2020		
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	Terwujudnya penataan kawasan	1	Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.	1	Dokumen RDTR	Dokumen	0	0	0	0	0	0	8	0%
						2	Dokumen RTBL/zonasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	8	0%
		3	Tertatanya arus barang dan manusia serta informasi	1	Terwujudnya sistem transportasi , telekomunikasi dan komunikasi serta informatika daerah	1	Terminal Tipe C	Unit	0	0	0	0	0	0	1	0%
						2	e-government	%	n/a	1	15	15	15	46	50	92 %
3.	Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda	1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Way Kanan Yang terdidik, sehat, Relegius, Berkarakter dan Berakhlak mulia	1	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta membangun karakter dan jatidiri masyarakat.	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65.09	65.74	65.97	66,63	67,19	67,44	70.9	95,12 %
						2	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.89	7.33	7.34	7.35	7,39	7,70	7.73	99,61%
						3	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	Poin	100	100	99,73	99,55	99,82	99,82	100	99,82%
						4	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun	Poin	94,45	97.07	95,47	78,75	96,31	99,82	100	99,82 %
						5	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 tahun	Poin	68,17	21.56	63,23	57,63	65,85	65,58	80,01	81,96 %
						6	Angka Partisipasi Sekolah 19-24 tahun	Poin	17,35	65.74	22,26	22,26	10,71	10,71	29,95	35,76%

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi					Kondisi Akhir RPJMD	Capaian Target
										2016	2017	2018	2019	2020		
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan keluarga berencana	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.4	68.58	68.8	68.95	69,27	69,40	69	**100,39 %**
						2.	Angka Kematian Ibu(AKI)/100.000 KH	Poin	40.78	41.48	49,50	49,2	112,15	101,05	30.98	112,15
						3.	Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH	Poin	4.07	2.21	2,97	2,97	1,14	1,89	3.05	1,14
						4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.13	1.43	1,00	1,00	0,90	1,51	0.85	177,65 %
		2.	Pemberdayaan masyarakat	1.	Menurunkan angka kemiskinan	1.	Tingkat kemiskinan	%	14.53	14.58	14.06	13,52	13,07	12,90	11.53	111,88 %
						2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	%	1.86	2.69	0,47	2,05	2,04	1,90	0.91	208,79 %
4.	Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah	1.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan produk unggulan daerah	1.	Pengembangan produk unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.2	5.14	5.11	5.21	5,17	-1,16	6	-19,33 %
						2.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	3.5	3.91	2,19	2,39	2,01	0,74	4.60	16,09 %
						3.	PDRB adhb	Juta Rp	10.113.877	11.080.713	12.160.783	13.167.069,68	14.123.865,80	14.037.767	18.434.157	76,15%
						4.	PDRB per kapita adhb	Rp	23.362.324	25.280.000	27.520..000	29.500..000	31.378.770	30.925.573	40.268.653	76,80 %
						5.	Laju Inflasi	%	5.5	2.75	3,35	2,56	2,56	2,56	5.5	46,55%
						6.	Rata-rata pengeluaran/kapita	Rp	543.008	614.702	753.307	753.307	847.498	895.889	758.090	118,18%
							Makanan	Rp	308.803	341.365	426.263	426.263	475 164	489.163	406.489	120,34 %
							Bukan Makanan	Rp	234.205	273.337	327.044	327.044	372 334	406.728	351.601	115,68 %

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi					Kondisi Akhir RPJMD	Capaian Target
										2016	2017	2018	2019	2020		
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif	1.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan	1.	Pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, industri, pariwisata dan perdagangan daerah.	1.	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	5.9	4.86	6,10	6,84	7,58	-8,37	6.8	-123,09 %
						2.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4.91	6.34	5,02	7,65	6,15	-0,89	5.65	-15,75 %
6.	Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	1.	Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, dan berkurangnya dampak bencana	1.	Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif	1.	Angka kriminalitas	Kasus	557	558	494	305	429	425	400	106,25 %
						2.	Jumlah Demo	kali	3	1	1	1	1	1	1	100 %
				2.	Mengurangi dampak bencana	1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0.00022732	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.00066588	0.0025699	25,91%
						2.	Penanganan daerah rawan bencana	kecamatan	5	5	14	14	14	14	5	280%
		2.	Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup	1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.	Penanganan kualitas air sungai	sungai	1	1	1	1	1	1	1	100%

Tabel II.121 Evaluasi Capaian Rpjmd dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan sampai dengan Tahun 2020

NO	INDIKATOR MAKRO	KONDISI AWAL TAHUN 2015	PELAKSANAAN RKPD					
			REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2021
1.	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	65,09	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	70,9
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,4	68,58	69	68,95	69,278	69,40	69
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,89	7,33	7,73	7,35	7,39	7,70	7,73
4.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp)	543.008	614.702	758.090	753.307	847.498	895.889	758.090
5.	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16	6
6.	PDRB ADHB (Juta Rp.)	10.113.877-	11.060.713	12.108.683,35	13.055.240,53	13.999.288,35,-	14.037.767,24,-	18.438.157
7.	PDRB Perkapita ADHB (Rp.)	23.362.324,-	25.280.000	40.268.653,-	29.500.000*	31.378.770,84,-	30.925.573,-	40.268.653,-
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	14,53	14,58	14,06	13,52	13,07	12,90	11,53
9.	Laju Inflasi	5,5	5,5	2,75	3,35	2,56	2,56	5,5

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah. Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis APBD Kabupaten Way Kanan dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2016 – 2020. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun yang tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang- undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya.

Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 –2020

N0	URAIAN	RAELISASI T.A 2016 (Audited)	RAELISASI T.A 2017 (Audited)	RAELISASI T.A 2018 (Audited)	REALISASI T.A 2019 (Audited)	REALISASI T.A 2020 (Audited)	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	**PENDAPATAN**	**1.164.839.362.140,84**	**1.340.655.509.814,86**	**1.385.711.587.665,59**	**1.398.937.422.542,40**	**1.289.460.561.990,25**	
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**44.346.945.471,84**	**49.551.283.407,98**	**56.764.985.088,23**	**62.353.560.983,81**	**64.617.68.616,75**	9,94
3	Pendapatan Pajak Daerah	10.650.926.839,80	15.182.720.242,85	18.384.787.051,05	19.861.796.637,42	16.543.967.957,26	13,74
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.015.768.535,00	886.384.802,00	1.383.814.694,30	1.830.633.400,15	1.434.965.549,12	13,51
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.743.449.975,21	3.117.487.414,22	3.924.887.624,74	4.626.354.313,07	4.204.876.084,55	12,07
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.936.800.121,83	30.364.690.948,91	33.071.495.718,14	36.034.776.633,17	42.433.872.025,82	9,27
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.120.413.259.869,00**	**1.282.103.326.406,88**	**1.275.629.959.577,36**	**1.275.130.047.458,59**	**1.289.460.561.990,25**	2,90
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**908.456.210.688,00**	**1.034.484.642.816,00**	**1.023.173.721.974,00**	**990.355.064.471,00**	**883.983.659.212,00**	0,29
11	Bagi Hasil Pajak	23.061.729.883,00	21.978.934.882,00	16.489.468.943,00	14.149.845.685,00	11.609.352.602,00	-15,45
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.688.878.810,00	14.801.988.245,00	13.724.222.749,00	6.074.100.068,00	7.727.449.998,00	31,10
13	Dana Alokasi Umum	656.605.460.000,00	650.838.237.000,00	655.518.878.000,00	681.902.953.000,00	621.970.133.000,00	-1,23
14	Dana Alokasi Khusus	223.100.141.995,00	346.865.482.689,00	337.441.152.282,00	288.228.165.718,00	242.676.723.612,00	5,59

N0	URAIAN	RAELISASI T.A 2016 (Audited)	RAELISASI T.A 2017 (Audited)	RAELISASI T.A 2018 (Audited)	REALISASI T.A 2019 (Audited)	REALISASI T.A 2020 (Audited)	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**142.172.112.000,00**	**182.260.346.000,00**	**181.629.793.000,00**	**196.749.376.000,00**	**192.902.501.000,00**	**8,56**
18	Dana Penyesuaian	142.172.112.000,00	182.260.346.000,00	181.629.793.000,00	196.749.376.000,00	192.902.501.000,00	8,56
19	Dana Otonomi Khusus	-	-	-			
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**69.784.937.181,00**	**65.358.337.590,88**	**70.826.444.603,36**	**88.025.606.987,59**	77.377.656.931,50	3,55
23	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	69.784.937.181,00	65.358.337.590,88	70.826.444.603,36	88.025.606.987,59	77.377.656.931,50	3,55
26	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**79.156.800,00**	**9.000.900.000,00**	**53.316.643.000,00**	**61.453.814.100,00**	70.579.063.230,00	2948,36
27	Pendapatan Hibah	-	9.000.000.000,00	53.295.943.600,00	61.427.280.000,00	70.562.145.500,00	130,58
28	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-			
29	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.156.800,00	900.000,00	20.699.400,00	26.534.100,00	16.917.730,00	523,25
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				-		
33	**BELANJA**	**1.007.497.666.264,20**	**1.104.374.810.727,00**	**1.264.041.297.836,00**	**1.146.344.974.140,15**	**978.959.348.056,87**	0,04
34	**BELANJA OPERASI**	**729.458.199.022,20**	**747.369.386.008,00**	**797.873.059.965,00**	**847.998.066.014,15**	**823.609.458.215,53**	3,15
35	Belanja Pegawai	488.214.263.342,20	458.573.187.127,00	474.487.094.633,00	493.710.306.763,00	509.696.369.755,31	1,17

N0	URAIAN	RAELISASI T.A 2016 (Audited)	RAELISASI T.A 2017 (Audited)	RAELISASI T.A 2018 (Audited)	REALISASI T.A 2019 (Audited)	REALISASI T.A 2020 (Audited)	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Belanja Pegawai (Tidak Langsung)				-		
	Belanja Pegawai (Langsung)				-		
36	Belanja Barang dan Jasa	222.470.666.680,00	273.442.298.881,00	305.104.300.992,00	326.531.194.747,15	255.548.670.734,22	4,94
	Belanja Bunga	-	-	1.334.597.340,00	6.539.264.504,00	1.512.271.073,00	-19,22
	Belanja Subsidi			-	-		0,00
37	Belanja Hibah	16.084.769.000,00	12.366.400.000,00	13.069.067.000,00	16.123.800.000,00	53.256.146.653,00	59,06
38	Belanja Bantuan Sosial	2.688.500.000,00	2.987.500.000,00	3.878.000.000,00	5.093.500.000,00	3.596.000.000,00	10,72
41	**BELANJA MODAL**	**277.836.967.242,00**	**356.898.424.719,00**	**465.984.737.871,00**	**297.966.565.126,00**	**131.440.284.186,34**	**-8,23**
42	Belanja Tanah	-	1.469.588.750,00	-			-25,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	29.938.613.972,00	16.920.563.219,00	37.427.530.326,00	48.763.204.797,00	54.391.003.250,00	29,89
44	Belanja Gedung dan Bangunan	29.743.207.800,00	71.733.898.150,00	79.983.006.725,00	63.988.030.290,00	40.394.390.741,00	23,95
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	216.961.904.070,00	266.109.453.400,00	346.358.598.270,00	183.935.117.345,00	34.390.010.275,34	-18,85
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.193.241.400,00	664.921.200,00	2.215.602.550,00	1.280.212.694,00	2.264.879.920,00	55,91
49	**BELANJA TAK TERDUGA**	**202.500.000,00**	**107.000.000,00**	**183.500.000,00**	**380.343.000,00**	**23.909.605.655,00**	**1579,48**
50	Belanja Tak Terduga	202.500.000,00	107.000.000,00	183.500.000,00	380.343.000,00	23.909.605.655,00	1579,48
54	**TRANSFER**	**172.760.024.201,00**	**246.346.836.720,00**	**237.053.983.720,00**	**254.820.815.593,00**	**75.125.657.136,00**	**-6,05**
55	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**781.000.000,00**	**800.000.000,00**	**2.100.000.000,00**	**-**	**2.420.000.000,00**	**21,64**

N0	URAIAN	RAELISASI T.A 2016 (Audited)	RAELISASI T.A 2017 (Audited)	RAELISASI T.A 2018 (Audited)	REALISASI T.A 2019 (Audited)	REALISASI T.A 2020 (Audited)	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
56	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	781.000.000,00	800.000.000,00	2.100.000.000,00	-	2.420.000.000,00	21,64
59	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**171.979.024.201,00**	**245.546.836.720,00**	**234.953.983.720,00**	**254.820.815.593,00**	**257.863.508.800,00**	**-6,07**
60	Bantuan Keuangan Kepada Propinsi	-	-	-	637.787.784,00	,00	
61	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	-	-				
62	Bantuan Keuangan Kepada Desa	171.163.533.481,00	244.731.346.000,00	234.138.493.000,00	253.377.520.000,00	257.863.508.800,00	12,16
63	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	815.490.720,00	815.490.720,00	815.490.720,00	805.507.809,00	0,00	-25,31
66	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**	**1.180.257.690.465,20**	**1.350.721.647.447,00**	**1.501.095.281.556,00**	**1.401.165.789.733,15**	**1.239.242.856.856,87**	**1,84**
68	**SURPLUS I (DEFISIT)**	**(15.418.328.324,36)**	**(10.066.137.632,14)**	**(115.383.693.890,41)**	**(2.228.367.190,75)**	**50.217.705.133,38**	**-360,02**
70	**PEMBIAYAAN**						
71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**65.494.894.090,65**	**36.251.179.816,29**	**124.348.552.184,15**	**7.964.838.293,74**	**(7.568.198.738,29)**	-22,56
72	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.494.894.090,65	36.251.179.816,29	25.185.042.184,15	7.964.838.293,74	(7.568.198.738,29)	-84,64
	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	99.163.510.000,00			
75	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**13.825.385.950,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**13.395.438.750,00**	**30.590.877.500,00**	318,79

N0	URAIAN	RAELISASI T.A 2016 (Audited)	RAELISASI T.A 2017 (Audited)	RAELISASI T.A 2018 (Audited)	REALISASI T.A 2019 (Audited)	REALISASI T.A 2020 (Audited)	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
76	Penyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.800.000.000,00	120,00
77	Pembayaran Pokok Piniaman Dalam Neqeri	12.825.385.950,00	-	-	12.395.438.750,00	24.790.877.500,00	0,00
79	**PEMBIAYAAN NETTO**	**51.669.508.140,65**	**35.251.179.816,29**	**123.348.552.184,15**	**(5.430.600.456,26)**	**(38.159.076.238,29)**	**179,10**
81	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**36.251.179.816,29**	**25.185.042.184,15**	**7.964.858.293,74**	**(7.658.967.647,01)**	**12.058.628.895,09**	**-138,13**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri atas tiga kelompok sumber pendapatan utama yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama Periode tahun 2017 – 2020, proporsi kontribusi dari ketiga sumber tersebut memiliki perkembangan dengan tren yang berbeda sehingga terjadi pergeseran struktur pendapatan daerah (Tabel III-2). Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada periode 2017 – 2020 tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,90 persen; PAD tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,94 persen, Pendapatan Transfer rata-rata pertumbuhan sebesar 11,82 persen; lain-lain pendapatan yang sah tumbuh dengan rata-rata sebesar 2.948,36 persen.

Tabel III.2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun 2017 (*Audited*)	Tahun 2018 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	Tahun 2020 (*Audited*)	Rata-rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11,74	14,56	9,85	3,63	9,94
1.2	Pendapatan Transfer	35,73	6,93	29,40	-24,79	11,82
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	11.270,98	492,35	15,26	14,85	2.948,36

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

3.1.1.2 Belanja Daerah

Pada periode tahun 2016 – 2020, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar 93,80 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja. Besarnya deviasi capaian relaisasi belanja perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan antara lain 1) penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2) optimalisasi realisasi

belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada di sekitar 100 persen, mengindikasikan capaian yang optimal. Capaian tertinggi belanja daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2018 sebesar 94,64 persen dengan realisasi 1,264 triliun rupiah. Sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 92,13 persen dengan realisaasi 1,007 triliun rupiah. Meskipun dengan persentase capaian bervariasi pada periode 2016 – 2018, realisasi belanja daerah maupun target yang ditetapkan terus meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2020.. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel III-3 di bawah ini:

Tabel III.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran (*Audited)*	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
1	2016	1,086,792,036,052.86	1,007,497,666,264.20	92,13	-79.294.369.789
2	2017	1.175.129.763.215,29	1.104.374.810.727,00	93,98	-70.754.952.488
3	2018	1.331.234.571.397,00	1.264.041.297.836,00	94,64	-67.193.273.561
4	2019	1.212.814.666.271,81	1.146.344.974.140,15	94,52	-66.469.692.132
5	2020	1.044.344.064.360,70	978.959.348.056,87	93,74	-65.384.716.304

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

Belanja daerah dibedakan menjadi empat, yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tak terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang meberikan manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih adari 1 (satu) periode akuntansi. Belnja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diperediksi sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daearah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2016 Belanja Operasi sebesar 62 persen; pada tahun 2017 sebesar 55 persen; pada tahun 2018 sebesar 53 persen; pada tahun 2019 sebesar 61 persen, pada tahun 2020 sebesar 66,46 persen.

Belanja Modal pada tahun 2016 sebesar 24 persen; pada tahun 2017 sebesar 26 persen; pada tahun 2018 sebesar 31 persen; pada tahun 2019 sebesar 21 persen, pada tahun 2020 sebesar 10,61 persen.

Belanja Tak Terduga pada tahun 2016 sebesar 0,017 persen; pada tahun 2017 sebesar 0,008 persen; pada tahun 2018 sebesar 0,012 persen; pada tahun 2019 sebesar 0,027 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 1,93 persen.

Sedangkan Belanja Transfer pada tahun 2016 sebesar 15 persen; pada tahun 2017 sebesar 18 persen; pada tahun 2018 sebesar 16 persen; pada tahun 2019 sebesar 18 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 21 persen. Perkembangan proporsi belanja daerah ditunjukan pada Tabel III-4:

Tabel III. 4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi Tahun 2016 (*Audited*)	Proporsi Tahun 2017 (*Audited*)	Proporsi Tahun 2018 (*Audited*)	Proporsi Tahun 2019 (*Audited*)	Proporsi Tahun 2020 (*Audited*)	Rata-rata Proporsi
1	Belanja Operasi	62	55	53	61	66,46	59,49
2	Belanja Modal	24	26	31	21	10,61	22,52
3	Belanja Tak Terduga	0,017	0,008	0,012	0,027	1,93	0,40
4	Belanja Transfer	15	18	16	18	21,00	17,60
	Total Belanja	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pada periode pengamatan tahun 2016 – 2020, rata-rata capaian realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar 79,514 persen. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Capaian target pembiayaan Kabupaten Way Kanan ditunjukkan pada Tabel III-5 dibawah ini:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun Anggaran *(Audited)*	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
1	2016		51.669.508.141		
2	2017	35.251.179.816,29	35.251.179.816	100	0,00
3	2018	124.185.042.184,15	123.348.552.184	99,33	836.490.000
4	2019	(5.430.580.456,26)	(5.430.600.456)	100	20.000,00
5	2020	(38.844.055.147,01)	(38.159.076.238,29)	98,24	(684.978.908,72)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nominal pembiayaan netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, pembiayaan netto di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2016 hingga 2020 menunjukan capaian yang berpluktuatif. Capaian pembiayaan netto mencapai rata-rata 79,514 persen. Selanjutnya nilai realisasi juga meningkat dari 51,669 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi (38,159) miliar rupiah pada tahun 2020.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen

pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca daerah Kabupaten Way Kanan secara rinci ditunjukkan pada Tabel III-6

Tabel III.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN 2016 *(Audited)*	TAHUN 2017 *(Audited)*	TAHUN 2018 *(Audited)*	TAHUN 2019 *(Audited)*	TAHUN 2020 *(Audited)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	32.408.198.626,29	21.450.619.817,15	1.254.844.371,74	309.935.703,29	4.264.658.605	268,18
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	590.010.871,00	169.092.570,00	51.291.636,00	32.400.768,00	10.675.081	-61,22
5	Kas di Bendahara BLUD	55.904.359,00	56.128.179,00	2.001.310.536,00	1.599.829.281,00	7.492.021.680	953,56
6	Kas di Bendahara FKTP	6.757.156.576,00	6.119.357.683,00	5.713.571.979,00	5.591.131.742,70	0,00	-29,55
7	Kas di Bendahara BOS	62.094.555,00	243.870.322,00	311.300,00	8.290.680.823,00	323.409.918	665810,37
8	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0		
10	Piutang Pajak	1.842.693.443,47	1.605.137.938,87	2.131.432.319,07	2.304.897.386,07	3.109.605.815	15,74
11	Piutang Retribusi	89.596.171,00	79.322.546,00	79.322.546,00	157.075.843,88	204.418.078	29,17
12	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	7.939.031.344,00	23.156.100.650,86	40.321.377.296,10	27.900.628.403,51	23.415.258.913	54,73
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	45.025.000,00	40.025.000,00	40.025.000,00	40.025.000,00	40.025.000	-2,78
14	Piutang Lainnya	6.225.275.630,00	14.985.324.322,00	14.030.433.571,00	7.365.502.089,00	7.510.521.319	22,20
15	Penyisihan Piutang	-1.310.560.871,74	-825.102.873,46	-1.611.780.090,77	-2.339.835.866,42	-1.159.974.869	13,26
16	Persediaan	9.070.180.860,50	15.207.770.053,73	16.338.017.249,45	22.219.757.573,69	15.593.830.803	20,32
17	**Jumlah Aset Lancar (3 s.d 16)**	**63.774.606.564,52**	**82.287.646.209,15**	**80.350.157.713,59**	**73.472.028.747,72**	**60.804.450.343,31**	**0,22**

No	URAIAN	TAHUN 2016 *(Audited)*	TAHUN 2017 *(Audited)*	TAHUN 2018 *(Audited)*	TAHUN 2019 *(Audited)*	TAHUN 2020 *(Audited)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
18							
19	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
20	Investasi Non Permanen						
21	Dana Bergulir	92.170.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	0,00
22	Penyisihan Dana Bergulir	-92.170.000,00	-92.170.000,00	-92.170.000,00	-92.170.000,00	-92.170.000,00	0,00
23	Investasi Permanen						0,00
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.974.450.055,97	20.055.496.597,32	22.668.707.537,31	23.981.181.005,94	30.329.490.355,55	15,86
25	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0		0,00
26	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (20 s.d 25)**	**16.974.450.055,97**	**20.055.496.597,32**	**22.668.707.537,31**	**23.981.181.005,94**	**30.329.490.355,55**	**15,86**
27							
28	**ASET TETAP**						
29	Tanah	143.638.728.808,00	146.009.610.658,00	146.513.942.658,00	148.447.017.358,00	151.779.542.258,00	1,39
30	Peralatan dan Mesin	318.147.483.353,00	337.269.277.200,00	344.263.219.747,00	340.062.004.129,74	380.424.467.222,74	4,68
31	Gedung dan Bangunan	475.920.110.963,00	529.837.502.411,00	626.416.423.652,00	663.543.152.246,00	710.273.838.366,00	10,63
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.884.358.726.640,00	2.164.850.321.094,00	2.526.124.594.114,00	2.711.023.606.236,00	2.734.483.725.543,34	9,94
33	Aset Tetap Lainnya	23.936.902.901,00	29.596.316.381,00	41.154.139.884,00	52.196.879.238,00	61.330.167.416,00	26,76
34	Kontruksi Dalam Pengerjaan	5.000.537.128,00	18.557.910.047,00	3.259.220.497,00	2.841.867.497,00	5.521.831.447,00	67,54
35	Akumulasi Penyusutan	-1.202.558.483.016,27	-1.375.923.448.584,07	-1.571.954.629.244,04	-1.714.558.626.238,00	-1.743.673.897.803,07	9,86

No	URAIAN	TAHUN 2016 *(Audited)*	TAHUN 2017 *(Audited)*	TAHUN 2018 *(Audited)*	TAHUN 2019 *(Audited)*	TAHUN 2020 *(Audited)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
36	**Jumlah Aset Tetap (29 s.d 35)**	**1.648.444.006.776,73**	**1.850.197.489.206,93**	**2.115.776.911.307,96**	**2.203.555.900.466,74**	**2.300.139.674.450,01**	**8,78**
37							
38	**DANA CADANGAN**						
39	Dana Cadangan	0	0	0	0		
40	**Jumlah Dana Cadangan (39)**	**0**	**0**	0	0		
41							
42	**ASET LAINNYA**						
43	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0			
44	Aset Tak Berwujud	486.172.000,00	563.062.000,00	1.008.712.000,00	1.028.712.000,00	1.028.712.000,00	32,32
45	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-102.230.000,00	-102.230.000,00	193,84
46	Aset Lain-lain	212.360.304.031,00	174.702.872.651,00	170.617.097.817,00	222.256.454.093,00	198.068.640.547,00	3,40
47	**Jumlah Aset Lainnya (43 s.d 46)**	**212.846.476.031,00**	**175.250.934.651,00**	**171.610.809.817,00**	**223.182.936.093,00**	**198.995.122.547,00**	**3,44**
48							
49	**JUMLAH ASET (17+26+36+40+47)**	**1.942.039.539.428,22**	**2.127.791.566.664,40**	**2.390.406.586.375,86**	**2.524.192.046.313,40**	**2.590.268.737.695,87**	**9,17**
50							
51	**KEWAJIBAN**						
52	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
53	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.560.090.616,00	2.610.156.065,00	1.056.471.529,00	**83.892.865,00**	32.136.389,00	-59,99
54	Utang Bunga			377.464.359,00	591.758.247,00	5.525.425.210,00	222,63
55	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri			12.395.438.750,00	49.581.755.000,00	61.977.193.750,00	81,25

No	URAIAN	TAHUN 2016 *(Audited)*	TAHUN 2017 *(Audited)*	TAHUN 2018 *(Audited)*	TAHUN 2019 *(Audited)*	TAHUN 2020 *(Audited)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
56	Pendapatan Diterima Dimuka			0	5.000.000,00	11.552.197,80	32,76
57	Utang Belanja	1.661.491.439,00	2.491.902.566,00	8.319.574.434,00	49.325.215.426,00	36.393.805.108,00	187,63
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.671.348.093,00	18.076.837.907,00	18.294.074.732,00	16.514.592.387,00	2.955.771.555,00	-18,82
59	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 s.d 55)**	**20.892.930.148,00**	**23.178.896.538,00**	**40.443.023.804,00**	**116.102.213.925,00**	**106.895.884.209,80**	**66,14**
60							
61	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
62	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank			86.768.071.250,00	37.186.316.250,00		-25,00
63	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank			86.768.071.250,00	37.186.316.250,00		-39,29
64	**JUMLAH KEWAJIBAN (56)**	**20.892.930.148,00**	**23.178.896.538,00**	**127.211.095.054,00**	**153.288.530.175,00**	**106.895.884.209,80**	**112,50**
65							
66	**EKUITAS**						
67	**EKUITAS**	1.921.146.609.280,22	2.104.612.670.126,40	2.263.195.491.321,86	2.370.903.516.138,40	2.483.372.853.486,07	6,65
68	**JUMLAH EKUITAS (61)**	**1.921.146.609.280,22**	**2.104.612.670.126,40**	**2.263.195.491.321,86**	**2.370.903.516.138,40**	**2.483.372.853.486,07**	**6,65**
69							
70	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58+62)**	**1.942.039.539.428,22**	**2.127.791.566.664,40**	**2.390.406.586.375,86**	**2.524.192.046.313,40**	**2.590.268.737.695,87**	**7,53**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2019

A. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (current asset) dan aset non lancar/ tetap (long-term asset).

Jumlah Aset Lancar sebesar 63,774 miliar rupiah pada tahun 2016 naik menjadi 82,287 miliar rupiah pada tahun 2017, namun terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 73,472 miliar dan pada tahun 2020 menjadi Rp 60.804 milyar, dengan rata - rata pertumbuhan 0,22 persen.

Jumlah investasi jangka Panjang terus mengalami peningkatan yang semula sebesar 16,974 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 30.329 miliar rupiah pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 15,86 persen.

Jumlah aset tetap juga terus mengalami peningkatan yang semula 1,648 triliun rupiah pada tahu 2016 menjadi 2.300 triliun rupiah pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 8,78 persen.

Jumlah aset lainnya berpluktuatif, mengalami penurunan yang semula sebesar 212,846 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 171,610 miliar rupiah pada tahun 2018, namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 223,182 miliar rupiah, dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 198.995 miliar rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan 3,44 persen.

Secara keseluruhan jumlah aset Kabupaten Way Kanan meningkat yang semula sebesar 1,942 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 2.590 triliun rupiah pada tahu 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 7,53 persen.

B. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jumlah total kewajiban Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan yang semula sebesar 20,892 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 153,288 miliar rupiah pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 106.895 miliar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan 112,50 persen.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Jumlah ekuitas dana Kabupaten Way Kanan yang semula sebesar 1.921 triliun rupiah pada tahun 2016 meningkat menjadi menjadi 2.483 triliun rupiah pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 6,65 persen.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Way Kanan, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembengunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Berikut Tabel III-7 menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Way Kanan.

Tabel III.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) *Audited*	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) *Audited*	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2016	488.214.263.342,20	1.180.257.690.465,20	41,37%
2	Tahun 2017	458.573.187.127,00	1.350.721.647.447,00	33,95%
3	Tahun 2018	474.487.094.633,00	1.501.095.281.556,00	31,61%
4	Tahun 2019	493.710.306.763,00	1.401.165.789.733,15	35,24%
5	Tahun 2020	509.696.369.755,31	1.239.242.856.856,87	41,13%

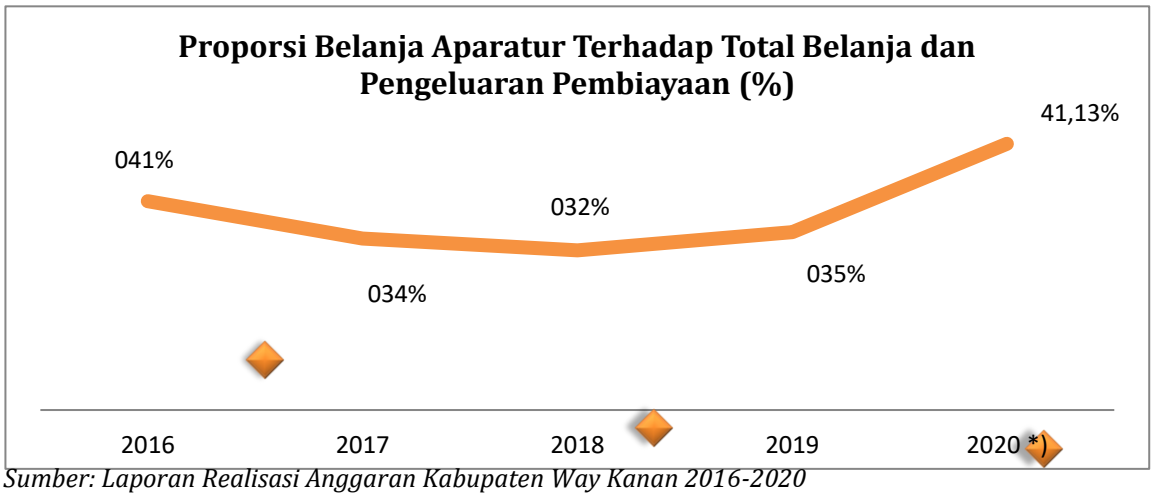
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

Pada tahun 2016, jumlah Belanja Aparatur sebesar 488,214 miliar rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 1,180 triliun rupiah, di tahun 2017 belanja aparatur sebesar 458,573 miliar rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 1,350 triliun rupiah, ditahun 2018 belanja aparatur sebesar 474,487 miliar rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 1,501 triliun rupiah, dan di tahun 2019 belanja aparatur sebesar 493,710 miliar rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 1,401 triliun rupiah, di tahun 2020 belanja aparatur sebesar 509.696 miliar rupiah, dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 1.239.242 miliar rupiah.

Rata-rata belanja aparatur Kabupaten Way Kanan dibandingkan total belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada pada kisaran 36,66 persen. Pada tahun 2016 proporsi belanja aparatur sebesar 41,37 persen, ditahun 2017 proporsi belanja aparatur sebesar 33,95 persen, ditahun 2018 proporsi belanja aparatur sebesar 31,61 persen, ditahun 2019 proporsi belanja aparatur sebesar 35,24 persen, dan ditahun 2020 proporsi belanja aparatur naik menjadi sebesar 41,29 persen, ini disebabkan oleh refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid-19

pada tahun 2020. Perkembangan proporsi belanja aparatur ditunjukan pada Grafik III-1:

Grafik III.1 Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2020 (*Audited)*



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

3.2.2 Analisi Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel III.8 menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit riil.

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan periode 2016 – 2020 mengalami defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2016 sebesar 15,418 miliar rupiah, pada tahun 2017 sebesar 10,066 miliar rupiah, pada tahun 2018 sebesar 115,383 miliar rupiah, pada tahun 2019 sebesar 2,228 miliar rupiah, dan pada tahun 2020 Surplus sebesar 84.721 miliar rupiah. Seperti digambarkan pada Tabel III.8 di bawah ini:

Tabel III.8 Defisit Riil Anggaran tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun 2016 (Rp) *Audited*	Tahun 2017 (Rp) *Audited*	Tahun 2018 (Rp) *Audited*	Tahun 2019 (Rp) *Audited*	Tahun 2020 (Rp) *Audited*
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.164.839.362.140,84	1.340.655.509.814,86	1.385.711.587.665,59	1.398.937.422.542,40	1.289.460.561.990,25
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.180.257.690.465,20	1.350.721.647.447,00	1.501.095.281.556,00	1.401.165.789.733,15	1.239.242.856.856,87
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	51.669.508.140,65	35.251.179.816,29	123.348.552.184,15	(5.430.600.456,26)	(38.159.076.238,29)
	Defisit riil	(15.418.328.324,36)	(10.066.137.632,14)	(115.383.693.890,41)	(2.228.367.190,75)	84.721.516.252,78

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pada tahun 2016 Kabupaten Way Kanan mengalami defisit riil sebesar 15,418 miliar rupiah tetapi dapat ditutupi dengan SiLPA sebesar 65,494 miliar rupiah dengan proporsi mencapai 424,78 persen, ditahun 2017 defisit riil sebesar 10,066 miliar rupiah tetapi dapat ditutupi dengan SiLPA sebesar 36,251 miliar rupiah dengan proporsi mencapai 360,13 persen, ditahun 2018 Kabupaten Way Kanan mengalami defisit riil sebesar 115,838 miliar rupiah ditutupi dengan SiLPA sebesar 25,185 miliar rupiah dengan proporsi sebesar 21,83 persen, ditahun 2019 Kabupaten Way Kanan mengalami defisit riil sebesar 2,228 miliar rupiah ditutupi dengan SiLPA sebesar 7,964 miliar rupiah dengan proporsi sebesar 357,43 persen. Ditahun 2020 Kabupaten Way Kanan mengalami surplus sebesar 84.721 miliar rupiah. Tabel III.9 menunjukan komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan sebagai penutup defisit riil.

Tabel III.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2021

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		Tahun 2016 (Rp)	**Tahun 2017** (Rp)	**Tahun 2018** (Rp)	**Tahun 2019** (Rp)	**Tahun 2020** (Rp)	**Tahun 2021** (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	65.494.894.090,65	36.251.179.816,29	25.185.042.184,15	7.964.838.293,74	(7.658.967.647,01)	12.058.628.895,09
2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan						
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			99.163.510.000,00			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6.	Penerimaan Piutang Daerah						

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

Tabel III.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Jumlah SiLPA	25.185.042.184	100	7.964.838.294	100	- 7.568.198.738	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD	- 7.429.882.560	- 30	- 2.218.453.865	- 28	- 3.029.207.563	40
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	- 13.161.948.110	- 52	- 15.149.198.128	- 190	- 14.241.506.650	188
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain PD Yang Sah	-	-	-	-	-	-
5	Pelampauan Transfer Pemerintah Provinsi	- 37.845.837.598	- 150	- 61.430.487.012	- 771	- 38.861.270.539	513
6	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	4.443.000	0	- 226.385.900	- 3	- 1.513.136.770	20
7	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	67.234.573.561	267	71.365.577.259	896	69.018.771.509	- 912
8	Pelampauan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan	- 836.490.000	- 3	- 20.000	- 0	90.768.909	- 1
9	Efisiensi / Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan 2016-2020

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Way Kanan bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi, dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Way Kanan 2021–2026 ditunjukkan pada Tabel III.10 berikut:

Tabel III.11 Tabel Proyeksi Keuangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**PENDAPATAN**						
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**						
4.1.01	Pajak Daerah	20.005.000.000,00	21.205.000.000,00	22.689.671.000,00	24.504.844.000,00	25.000.000.000,00	26.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.246.051.500,00	2.260.361.000,00	2.418.587.000,00	2.612.074.000,00	2.700.000.000,00	2.750.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.985.000.000,00	37.500.000.000,00	38.500.000.000,00	39.500.000.000,00	40.000.000.000,00	40.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**62.836.051.500,00**	**65.765.361.000,00**	**68.608.258.000,00**	**71.816.918.000,00**	**73.200.000.000,00**	**75.250.000.000,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**						
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.108.968.225.000,00	1.149.694.243.000,00	1.169.058.128.000,00	1.188.189.290.000,00	1.204.593.075.000,00	1.221.274.937.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	913.081.804.000,00	951.694.243.000,00	968.058.128.000,00	984.189.290.000,00	999.593.075.000,00	1.015.274.937.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum	654.801.465.000,00	688.194.243.000,00	703.058.128.000,00	717.689.290.000,00	732.093.075.000,00	746.774.937.000,00
	(1). DBH	18.425.995.000,00	20.000.000.000,00	21.500.000.000,00	22.500.000.000,00	23.000.000.000,00	23.500.000.000,00
	(2). DAU	636.375.470.000,00	668.194.243.000,00	681.558.128.000,00	695.189.290.000,00	709.093.075.000,00	723.274.937.000,00
	DAK Transfer Khusus	258.280.339.000,00	263.500.000.000,00	265.000.000.000,00	266.500.000.000,00	267.500.000.000,00	268.500.000.000,00
	(1). DAK Fisik	119.820.718.000,00	125.000.000.000,00	126.000.000.000,00	126.500.000.000,00	127.000.000.000,00	127.500.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(2.). DAK Non Fisik	138.459.621.000,00	138.500.000.000,00	139.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.500.000.000,00	141.000.000.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	9.865.812.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	186.020.609.000,00	188.000.000.000,00	189.000.000.000,00	190.000.000.000,00	191.000.000.000,00	192.000.000.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	107.721.461.997,00	85.000.000.000,00	86.000.000.000,00	86.500.000.000,00	87.000.000.000,00	87.500.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	107.721.461.997,00	85.000.000.000,00	86.000.000.000,00	86.500.000.000,00	87.000.000.000,00	87.500.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendapatan Transfer	**1.216.689.686.997,00**	**1.234.694.243.000,00**	**1.255.058.128.000,00**	**1.274.689.290.000,00**	**1.291.593.075.000,00**	**1.308.774.937.000,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**						
4.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	53.396.200.000,00	55.500.000.000,00	56.000.000.000,00	56.500.000.000,00	57.000.000.000,00	57.500.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**53.396.200.000,00**	**55.500.000.000,00**	**56.000.000.000,00**	**56.500.000.000,00**	**57.000.000.000,00**	**57.500.000.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.332.921.938.497,00**	**1.355.959.604.000,00**	**1.379.666.386.000,00**	**1.403.006.208.000,00**	**1.421.793.075.000,00**	**1.441.524.937.000,00**

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	**BELANJA**						
5.1	**BELANJA OPERASI**						
5.1.01	Belanja Pegawai	543.560.148.845,00	548.775.389.000,00	559.750.896.000,00	565.348.404.000,00	571.001.888.000,00	576.711.907.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.324.377.742,00	285.000.000.000,00	286.000.000.000,00	275.000.000.000,00	275.000.000.000,00	275.000.000.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.525.425.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.052.704.668,00	69.954.268.000,00	70.454.269.000,00	120.954.269.000,00	70.454.269.000,00	70.454.269.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	**856.962.656.465,00**	**908.729.657.000,00**	**921.205.165.000,00**	**966.302.673.000,00**	**921.456.157.000,00**	**927.166.176.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**						
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	35.226.296.095,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00	36.000.000.000,00	37.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	29.566.240.339,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	62.939.552.208,00	90.221.982.000,00	97.463.176.000,00	82.636.510.000,00	136.771.723.000,00	146.715.914.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	50.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	**128.532.088.642,00**	**156.221.982.000,00**	**163.463.176.000,00**	**138.636.510.000,00**	**198.771.723.000,00**	**209.715.914.000,00**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**						

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**6.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**						
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.600.000.000,00	2.750.000.000,00	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	279.949.999.640,00	289.007.965.000,00	291.898.045.000,00	294.817.025.000,00	297.765.195.000,00	300.742.847.000,00
	Jumlah Transfer	**282.449.999.640,00**	**291.507.965.000,00**	**294.498.045.000,00**	**297.567.025.000,00**	**300.565.195.000,00**	**303.642.847.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.273.944.744.747,00**	**1.358.459.604.000,00**	**1.381.666.386.000,00**	**1.405.006.208.000,00**	**1.423.793.075.000,00**	**1.443.524.937.000,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**58.977.193.750,00**	**-2.500.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	61.977.193.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**63.977.193.750,00**	**2.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**-58.977.193.750,00**	**2.500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	1.332.921.938.497,00	1.355.959.604.000,00	1.379.666.386.000,00	1.403.006.208.000,00	1.421.793.075.000,00	1.441.524.937.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	**1.337.921.938.497,00**	**1.360.959.604.000,00**	**1.384.666.386.000,00**	**1.408.006.208.000,00**	**1.426.793.075.000,00**	**1.446.524.937.000,00**
	Dikurangi :						
4	Belanja Tidak Langsung	543.560.148.845,00	548.775.389.000,00	559.750.896.000,00	565.348.404.000,00	571.001.888.000,00	576.711.907.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	63.977.193.750,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**730.384.595.902,00**	**809.684.215.000,00**	**821.915.490.000,00**	**839.657.804.000,00**	**852.791.187.000,00**	**866.813.030.000,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 2016– 2021 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demikian pembangunan ke depan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi dan diatasi yang kemudian dirumuskan sebagai permasalahan pembangunan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mengakibatkan kesenjangan pencapaian kinerja yang telah dicapai saat ini dan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan demi pencapaian yang lebih baik.

Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:

4.1.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

4.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Perlambatan

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan secara umum mengalami Perlambatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016

sebesar 5,12%, kemudian menjadi 5,11% pada tahun 2017, pada tahun 2018 berada pada 5,18%, pada tahun 2019 menjadi 5,17% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,16 %. Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16 persen setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5 persen, ini sebagai dampak dari adanya pandemic corona virus-19 selama satu tahun terakhir ini.

4.1.1.2 PDRB Per Kapita yang belum Optimal

Di tahun 2020 Pendapatan per Kapita Kabupaten Way Kanan hanya sebesar 30.925 Juta, masih jauh di bawah capaian Provinsi Lampung yaitu sebesar 42,69 Juta dan capaian Nasional sebesar 59,065 Juta pada kurun waktu yang sama, dan baru mencapai 77,79 % dari target masa akhir RPJMD yaitu sebesar 40.269 Juta.

4.1.1.3 Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020 sebesar 12,90 persen, menurun 0,17 poin dibanding 2019 sebesar 13,07 persen tetapi masih berada di bawah target akhir RPJMD sebesar 12,03 persen.

Capaian Penurunan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 berada pada peringakat ke 6 (enam) dengan penurunan kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 0,17 point dan masih di bawah Provinsi Lampung sebesar 0,28 point.

4.1.1.4 Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2016-2020 secara signifikan mengalami peningkatan yaitu dari **65,74 (2016)** menjadi **67,44 (2020),** namun angka IPM Way Kanan masih berada dibawah rata-rata Provinsi sebesar **69,69** dan Nasional sebesar **71,94**, dan masih berada di bawah target akhir RPJMD sebesar 70,90 poin.

Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2020 berada di bawah 70, atau berstatus ***SEDANG***. Hanya empat Kabupaten/Kota dengan

IPM diatas 70,00 yaitu: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Kabupaten Way Kanan berada di peringkat ke- sembilan dari lima belas Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

4.1.1.5 Angka Melek Huruf yang belum Optimal

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 96,73 persen turun menjadi 95,50 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 95,78 pada tahun 2018, dan 96,14 pada tahun 2019, ini artinya masih ada lebih kurang 4 persen yang belum dapat membaca dan menulis.

4.1.1.6 Rata-Rata Lama Sekolah Belum Optimal

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 7,32 tahun terus meningkat menjadi 7,39 tahun pada tahun 2019, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 7,3 atau putus sekolah di kelas 8. Posisi ini masih dibawah target akhir RPJMD sebesar 7,73 tahun.

4.1.1.7 Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Way Kanan selama beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Berbagai masalah kesehatan ditemui di berbagai daerah. Adapun masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan, antara lain:

a. Masih terdapat kasus balita gizi buruk. Berdasarkan data Pada tahun 2019 jumlah balita gizi buruk ada 6 kasus.

b. Masih adanya Angka kesakitan penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik penyakit menular maupun tidak menular, seperti TBC,

Infeksi akut lain pada saluran nafas bagian atas, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis dan polio.

4.1.1.8 Menurunnya Pertumbuhan Beberapa Sektor Terhadap PDRB

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020, kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan. Menurunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ditunjukkan dari data Tahun 2019, dimana kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan sebesar 0,95 persen dan terus menurun hingga mencapai 0,91 persen pada Tahun 2020.

Kondisi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 23,24 persen pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 21,43 persen.

4.1.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Secara lebih rinci, berikut ini kami sajikan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Way Kanan:

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan di Kanupaten Way Kanan antara lain:

a. Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun;

b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;

c. Masih kurangnya sarana dan prasaran pendidikan yang memadai;

d. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;

e. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;

f. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Way Kanan antara lain:

a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar;

b. Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah;

c. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes);

d. Masalah gizi masyarakat;

e. Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan;

f. Kurangnya ketersediaan dan mutu farmasi dan peralatan kesehatan;

g. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;

h. Masih adanya angka *stunting*; dan

i. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) di masyarakat.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih rendahnya Panjang jalan dalam kondisi mantab;

b. Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi;

c. Kondisi baik jaringan irigasi baru mencapai 66,67 persen pada tahun 2019;

d. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;

e. Belum optimalnya Akses Berkelanjutan penduduk Terhadap Air Minum Berkualitas dan sanitasi baik di kawasan perkotaan maupun di Kawasan perdesaan;;

f. Semua kawasan strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masih berupa hasil kajian dan belum ditetapkan dengan peraturan daerah;

g. Perlunya penguatan penataan ruang eksisting guna kepentingan investasi, dan bangunan serta ketersediaan lahan untuk kepentingan publik;

h. Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan ber IMB masih rendah;

b. Belum optimalnya Penyediaan pasokan air bersih baik;

c. Belum optimalnya Sistem penyediaan air minum dan sanitasi;

d. Penurunan kualitas sumber air baku;

e. Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang;

f. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang belum diikuti dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pembuangan air limbah;

g. Masih adanya kawasan pemukiman kumuh (seluas 34,362 Ha) dan rumah tidak layak huni.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran;

b. Masih Kurangnya Sarana Prasarana Pemadam kebakaran;

c. Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam;

d. Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja);

e. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat;

f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum.

6. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial, yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini disebabkan oleh:

a. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;

b. Belum optimalnya penanganan bencana sosial;

c. Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan *human trafficking*;

d. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial;

e. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan

f. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.1.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan terkait tenaga kerja adalah: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 75,22 persen di tahun 2020; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi yaitu 3,56 persen di tahun 2020. Akar permasalahan dari permasalahan tenaga kerja, antara lain:

a. Lapangan kerja terbatas;

b. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;

c. Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;

d. Masih Kurangnya pendidikan/latihan keterampilan kerja;

e. Belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan bidang ketenagakerjaan;

f. Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding pedesaan;

g. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

a. Masih Rendahnya sosialisasi dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

b. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh KB, saat ini hanya 8 orang penyuluh KB untuk 15 (lima belas) Kecamatan;

c. Tingkat partisipsasi angkatan kerja perempuan yang rendah;

d. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;

e. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi dan pembangunan;

f. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Bidang Pangan

Permasalahan di bidang pangan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan adalah:

a. Skor Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2019 sebesar 72,37 poin. Angka ini sudah cukup baik, namun masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung sebesar 77,33 poin;

b. Masih rendahnya indeks pemanpaatan sebesar 51,42 poin pada tahun 2019;

c. Ketidakstabilan harga pangan;

d. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras;

e. Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH);

f. Distribusi dan logistik pangan yang belum optimal.

4. Bidang Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Way Kanan selalu berusaha untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan

pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup ditemui masalah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Masih rendahnya Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 sebesar 63,93 poin.
b. Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
c. Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R (Reduce, Reuse and Recycle);
d. Masih rendahnya jangkauan pelayanan persampahan;
e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
f. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan ilegal;
g. Meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

a. Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator database;
b. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;

c. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;

d. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan Kampung, meliputi:

a. Belum adanya roadmap pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

b. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan Kampung;

c. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung;

d. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat Kampung dalam upaya keberdayaan ekonomi Kampung;

e. Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka kemiskinan perkotaan;

f. Belum optimalnya penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

g. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kampung;

h. Lemahnya akses terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan publik.

8. Bidang Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan di Kabupaten Way Kanan yaitu:

a. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal

perkotaan serta integrasi antar moda angkutan;

b. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;

c. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah;

d. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;

e. Masih tingginya *overloading* angkutan barang;

f. Belum tersedianya terminal tipe c;

g. Belum optimalnya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang.

9. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi:

a. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/system Informasi/website, data, serta infrastruktur TI;

b. Belum adanya standar keamanan informasi;

c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;

d. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI.

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

a. Jumlah Koperasi aktif yang masih terbilang kecil, di tahun 2020 sebanyak 94 Koperasi;

b. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM;

c. Minimnya Modal dan masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;

d. Masih rendahnya SDM pengelola UMKM;

e. Kurangnya Inovasi dan Penerapan Teknologi oleh pelaku UMKM;

f. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal;

g. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

11. Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal, yaitu:

a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;

b. Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal;

c. Menurunnya realisasi Penanaman Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 sebesar 22.916 Milyar Rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 29.114 milyar Rupiah.

12. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;

b. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga;

c. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

d. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Way Kanan yang memenuhi standar nasional dan internasional.

13. Bidang Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

a. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum adanya aturan daerah tentang wali data.

14. Bidang Persandian

a. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas;

b. Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan masih sedikit.

15. Bidang Kebudayaan

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan Masyarakat;

b. Lemahnya pemahaman sejarah lokal;

c. Lemahnya data serta informasi kebudayaan;

d. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Kabupaten Way Kanan di dalam dan luar negeri.

16. Bidang Perpustakaan

Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

a. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan;
b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan; dan
c. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.
d. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

17. Bidang Kearsipan

Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penataan tertib arsip; dan
b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

1. Bidang Perikanan

Permasalahan di bidang perikanan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil perikanan;
b. Pemasaran hasil Perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir;
c. Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh Petani.

2. Bidang Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan masih kecil yaitu sekitar 0,91 persen pada Tahun 2020.

Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan terhadap pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);

b. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan ; dan

c. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

3. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Kabupaten Way Kanan, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Selama periode 2016-2020 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;

b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura);

c. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;

d. Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya Alih fungsi lahan pertanian;

e. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke

hilir;

f. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;

g. Kurang efektif dan efisien penanganan paska panen;

h. Masalah anomaly cuaca;

i. Rendahnya akses permodalan.

4. Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kabupaten Way Kanan yaitu:

a. Promosi produk industri lokal (asal way kanan) masih dirasa kurang;

b. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan;

c. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai; dan

d. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

5. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

a. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;

b. Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM;

c. Belum optimalnya antisipasi terhadap berkembangnya revousi industri 4.0;

d. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

4.1.2.4 Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah:

a. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal.

b. belum optimalnya kelengkapan data dan infomasi pembangunan daerah, serta

c. belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

2. Keuangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada kurun tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami pluktuatif, terendah pada tahun 2016 sebesar 0,250 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,703, dengan katagori KPD rendah.

3. Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan kebutuhan;

b. Kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis.

c. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme ASN.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini

belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

a. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;

4.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

4.1.3.1 Masih Tingginya Jumlah Kriminalitas dan Resiko terkena tindak kejahatan.

Dalam rentang tahun 2016-2020, angka kriminalitas sebanyak 558 kasus pada tahun 2016 hingga 425 kasus pada tahun 2020, artinya angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan.

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman suatu wilayah. Pada tahun 2019 terlihat bahwa Way Kanan memiliki crime rate sebesar 95,31 yang berarti bahwa setiap 100.000 orang penduduk di Kabupaten Way Kana nada sebanyak 95 orang memiliki resiko terkena tindak kriminalitas.

4.1.3.2 Masih tingginya pengeluaran konsumsi pangan perkapita

Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan akan meningkat. Pada tahun 2020 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita sebesar 45,50 persen, Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

4.1.3.3 Masih rendahnya PDRB dan PDRB perkapita

Perekonomian Kabupaten Way Kanan secara umum terus bergerak ke arah peningkatan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Way Kanan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14.037,77 triliun, namun masih dibawah target Akhir RPJMD sebesar 18.434.157 trilyun, baru sebesar 76,62 persen.

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Way Kanan ini diikuti pula dengan peningkatan PDRB perkapita. pada tahun 2019 mencapai Rp.31.378.767,-. namun masih dibawah target Akhir RPJMD sebesar 40.268.653, baru sebesar 77,92 persen.

4.1.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TERKAIT STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. SPM Bidang Pendidikan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut:

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan;

b. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan;

c. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan;

d. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM (Anak Tidak Sekolah – ATS dan Peserta Didik Miskin – PDM).

2. SPM Bidang Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang

Kesehatan di Kabupaten Way Kanan yang belum dapat mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Regulasi Peraturan Pemerintah yang cukup jauh waktu terbitnya dengan regulasi pelaksanaan dan regulasi teknis :

   a) Regulasi pelaksanaan yaitu Permendagri nomor 100 tahun 2018 baru diundangkan pada tanggal 19 November 2018;

   b) Regulasi teknis yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 baru keluar pada tanggal 31 Januari 2019;

   c) Setelah keluar Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 dan Permendgari nomor 100 tahun 2018 tersebut SPM Bidang Kesehatan belum dapat segera di implementasikan karena jajaran kesehatan menunggu keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang baru terbit/diundangkan pada tanggal 31 Januari 2019. Sehingga mulai bulan Januari barulah dapat memulai mempersiapkan pelaksanaan SPM bidang kesehatan baik SPM Bidang Kesehatan tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tim Penerapan SPM Kabupaten Way Kanan baru terbentuk dengan SK Kepala Daerah pada akhir 2019.

3. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM Bidang Kesehatan (turun lapangan untuk sensus mencari sasaran SPM BK). Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Kesehatan di Dokumen Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan Dokumen Rencana Tahunan (Renja). Hal ini akan sedikit menyulitkan ketika akan melakukan evaluasi anggaran SPM BK tahun 2019 sesuai

Permendagri 100 tahun 2018 karena belum ada dana khusus untuk SPM BK berdasarkan jenis layanan.

4. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD/Renstra) sampai tahun 2019 dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) 2019 belum mengakomodir kegiatan SPM Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga kegiatan di DPA SKPD 2019 belum ada kegiatan dan anggaran berdasarkan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai Permendagri 100 tahun 2018.

5. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang akan melaksanakan SPM bidang kesehatan. SDM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan terbatas khususnya yang ada di pelayanan kesehatan dasar (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP : Puskesmas) belum cukup secara jenisnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 (belum semua puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan) dan secara jumlah. Jumlah yang kurang akan menyulitkan untuk melakukan pendataan sasaran SPM BK yang sifatnya sensus (100%) dan secara jenis tenaga yang tidak standar akan menyebakan pemberian pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar tenaga termasuk terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih untuk masalah kesehatan jiwa secara standar.

6. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menegakkan diagnosis penyakit secara standar membutuhkan sarana (alat kesehatan) prasarana (reagent, stik pemeriksaan dll) khususnya untuk Penyakit tidak Menular/PTM (Hipertensi, Diabetes Militus) di Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan SPM BK Kabupaten Kota.

7. Keterbatasan obat dan BMHP untuk melakukan layanan standar masih belum tersedia cukup di puskesmas terutama obat untuk penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus/DM, Orang dengan gangguan

jiwa) karena selama ini Kabupaten Kota mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar sedangkan pusat mengadakan obat program (bagaimana dengan obat untuk program PTM).

8. Pemahaman SPM BK yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten hingga ke Puskesmas).

9. Pencatatan SPM BK yang belum maksimal untuk SPM BK khususnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas dan Klinik swasta). Pelaporan SPM BK yang belum optimal mulai dari klinik swasta ke puskesmas, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Way Kanan masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan berbagai persoalan, sebagai berikut:

a. Masih kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pelayanan SPM;

b. Masih kurangnya SDM secara teknis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum mengingat banyaknya jumlah kegiatan yang spesifik membutuhkan keahlian pada bidang tertentu.

4. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah :

a. Masih kurang/minimnya personil yang memiliki sertifikasi PPNS;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana kebakaran;

c. Masih kurangnya data tentang pelanggaran Perda oleh dinas yang terkait;

d. Kurang nya kerjasama antara Dinas yang mempunyai Perda dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Penanganan Bencana Kabupaten Way Kanan baik permasalahan internal dan eksernal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan atau solusi adalah sebagai berikut:

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub- Urusan Bencana;

b. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan;

c. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana;

d. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Way Kanan, sehingga menguragi akses jalannya kegiatan karena alokasi atau anggaran selain terbatas juga di alihkan untuk penangan Wabah Virus Corona yang mememrlukan penaganan cepat;

e. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

5. SPM Bidang Sosial

Permasalahan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Way Kanan adalah:

a. Keterbatasan Anggaran Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM. Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Sosial di Dokumen Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra). Namun sudah terdapat dana khusus SPM dalam Dokumen Rencana Tahunan (Renja) meski belum sesuai anggaran yang dibutuhkan karena keterbatasan Anggaran di kabupaten. Hal ini akan menyulitkan ketika akan melakukan evaluasi anggaran SPM tahun 2020 sesuai Permendagri 100 tahun 2018 karena belum ada dana khusus untuk SPM berdasarkan jenis layanan;

b. Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD/Renstra) sampai tahun 2020 dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) 2020 belum mengakomodir kegiatan SPM Bidang Sosial di Kabupaten sehingga kegiatan di DPA SKPD 2020 belum ada kegiatan dan anggaran berdasarkan jenis layanan SPM sesuai Permendagri 100 tahun 2018, namun terdapat kegiatan- kegiatan dengan sasaran dan output yang sama dengan SPM sehingga kegiatan-kegiatan tersebut diasumsikan peruntukkannya sebagai kegiatan pencapaian SPM;

c. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Sosial yang akan melaksanakan SPM bidang Sosial. SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan terbatas khususnya yang ada di pelayanan Sosial. Jumlah yang kurang akan menyulitkan untuk melakukan pendataan sasaran SPM yang sifatnya Capaian (100%) dan secara jenis tenaga yang tidak standar akan menyebakan pemberian pelayanan Sosial belum sesuai dengan standar tenaga termasuk terbatasnya tenaga Sosial yang terlatih untuk masalah Sosial secara standar;

d. Sarana Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana untuk

Melakasanakan Pencapaian Target SPM Kabupaten /Kota;

e. Pemahaman SPM yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan Sosial tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Sosial;

f. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan SPM yang belum maksimal untuk SPM khususnya di Fasilitas Pelayanan PMKS Belum Optimalnya Peras PSKS dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahetraan social;

g. Kurang kerja sama antara dinas sosia lkabupaten Way Kanan dengan pihak luar seperti dinas terkait dan dunia usaha csr dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan social;

h. Adanya Pandemi Covid-19 mengurangi frekuensi kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian SPM;

i. Kabupaten Way Kanan terdapat beberapa kecamatan dan daerah yang rawan bencana sehingga diperlukan banyak persedian logistic dalam penanganan bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Way Kanan.

4.2 Isu Strategis

Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Way Kanan2005-2025, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (*global*), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Way Kanan, maka ada beberapa isu utama yang diperkirakan akan menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan pada periode 2021-2026, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai pihak mengakui, dampak ekonomi yang dirasakan akibat Covid-19 jauh lebih hebat dari

periode-periode sebelumnya. MenterI Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap sisi perekonomian saja, tapi juga kesehatan hingga sosial suatu Negara;

2. Sejumlah indikator yang menunjukkan Indonesia sedang mengarah ke **jurang resesi**. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal II dan tren ekonomi kuartal III dan IV yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pentingnya usaha pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional bagi masyarakat. Indonesia harus **memperkuat sektor-sektor primer terutama sektor pertanian** untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan kekuatan ekonomi lokal maka masyarakat tidak terlalu bergantung pada ekonomi global;

3. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia;

4. Impor produk pertanian yang selama ini belum bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri pun mengalami kendala, karena perubahan kebijakan dari negara-negara eksportir yang berusaha untuk menyimpan hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri. Situasi ini, bisa semakin buruk jika pandemi Covid-19 terjadi berkepanjangan. Semakin lama pandemi ini berangsung, semakin kompleks masalah pangan yang dihadapi;

5. Pertumbuhan bahan makanan organik di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Pertumbuhannya mencapai 15-20

persen, didorong peningkatan daya beli masyarakat. Alasan konsumen **memilih produk organik** menurut riset adalah ingin hidup lebih sehat. Karena ada kelebihan produk organik dibandingkan produk non-organik, yaitu bebas pestisida dan bebas GMO (genetically modified food);

6. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Kabupaten Way Kanan dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan mendukung lumbung pangan nasional;

7. Masih benyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten Way Kanan yang belum termanfaatkan secara optimal;

8. Perusahaan perjalanan digital Booking.com menemukan kecenderungan wisata mengarah kepada pariwisata berkelanjutan pasca-pandemi virus corona (Covid-19);

9. Ada kecenderungan masyarakat lebih ingin merencanakan liburan ke **destinasi wisata domestik**, ketimbang vakansi keluar negeri ketika pandemi mereda. Artinya, ada kecenderungan masyarakat untuk mengobati bosan dengan melakukan perjalanan ke tujuan yang lebih dekat dengan rumah atau hanya sekadar staycation di sebuah hotel;

10. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni Sustainable Development Goal (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara temasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kabupaten Way Kanan telah menindaklanjutinya melalui SK Tim Penyusunan RAD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kanupaten Way Kanan Tahun 2017-2021;

11. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa isu sebagai berikut :

    a. Pilar Sosial

        1) Rasio Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B;
        2) Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan;
        3) Iklim yang kondusif, aman dan nyaman bagi pelaku ekonomi dalam rangka menarik investor masuk;
        4) Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SSJN Bidang Kesehatan;
        5) Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan;
        6) Jumlah BLK, BKK;
        7) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
        8) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN;
        9) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah;
        10) Jumlah Cakupan pelayanan bencana alam;
        11) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social;
        12) Persentase Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan;
        13) Kondisi sarana prasarana pertanian dalam keadaan baik;
        14) Laju pertumbuhan sektor pertanian;
        15) Prevalensi Malnutrisi pada anak balita;

16) Prevalesi anemia pada Ibu Hamil, Remaja Putri dan Lansia;
17) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH);
18) Jumlah Angka kesakitan akibat penyakit tidak menular (Hypertensi, Diabetes Mellitus, dan Kesehatan jiwa) masih tinggi;
19) Persentase Angka Harapan Hidup;
20) Penyalahgunaan napza di wilayah perkotaan dan kampung masih tinggi;
21) Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan;
22) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil;
23) Persentase Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita (AKAba);
24) Kegiatan pengendalian penyakit menular (TB, HIV, Covid-19) belum optimal;
25) Masalah terkait dengan perlindungan anak masih sering ditemui;
26) Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi semua cara;
27) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern;
28) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR);
29) Meningkatkan unmeet need pelayanan kesehatan;
30) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
31) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat;
32) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat;
33) Angka rata-rata lama sekolah;
34) APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD);

35) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B;
36) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;
37) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
38) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan;
39) Persentase Keterwakilan perempuan di DPR;
40) Persentase Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II);
41) Meningkatkan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi.

b. Pilar Ekonomi

1) Peningkatan produktifitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktif pemuda dalam aktivitas ekonomi;
2) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun;
3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per tahun;
4) Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5) Persentase Lapangan Pekerjaan di kabupaten Way Kanan;
6) Jumlah pasar tradisional untuk membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan digunakan sebagai tempat promosi;
7) Jumlah Penduduk yang mendapatt Akses Internet;
8) Pembangunan Terminal Tipe C;
9) Penyediaaan dan revitalisasi Prasarana (Jalan dan Jembatan) sebagai akses utama;
10) Pemanfaatan Limbah atau sampah melalui penumbuhan inovasi Tepat Guna (TTG);
11) Persentase penduduk miskin di Kabupaten Way Kanan;

12) Jumlah Desa Tertinggal di kabupaten Way Kanan;

13) Kapasitas dan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/investor dengan potensi di Way Kanan;

14) Proporsi individu yang menggunakan internet;

15) Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB.

c. Pilar Lingkungan

1) Tersedianya air baku yang cukup bagi masyarakat Way Kanan;

2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;

3) Kondisi prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. (proporsi embung dalam kondisi baik);

4) Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);

5) Jumlah penduduk yang menerima fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni akibat program relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6) Persentase Ruang Terbuka Hijau terutama di Kawasan perkotaan untuk memenuhi 30% sesuai amanah Undang-undang nomor 26 tahun 2007;

7) Tersedianya MCK yang layak di permukiman;

8) Tingkat Ketahanan pangan di Kabupaten Way Kanan;

9) Koordinasi dan pengawasan pengelolaan limbah terutama limbah hasil budidaya peternakan dan limbah industry;

10) Kawasan perkebunan harus disesuaikan dengan kesesuaian fisik (Agroekosistem) dan status Kawasan untuk menciptakan nilai tambah perkebunan yang memberikan nilai manfaat yang inklusif dan memberikan manfaat bagi sekitar kawasan.

d. Pilar Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan
   1) Produk hukum dan penegakan hukum dalam tata ruang;
   2) Keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislative;
   3) Kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, Pendidikan dan pelatihan.

12. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan e-commerce pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk sutau produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya e-commerce berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan;

13. Revolusi **Industri 4.0** memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan **mengakses dunia dan layanan digital**. Di masa depan, inovasi teknologi juga akan mengarah pada keajaiban sisi penawaran, dengan keuntungan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Biaya transportasi dan komunikasi akan turun, logistik dan rantai pasokan global akan menjadi lebih efektif, dan biaya perdagangan akan berkurang, yang semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh ekonom Erik Brynjolfssondan Andrew McAfee, revolusi dapat menghasilkan ketimpangan yang lebih besar, khususnya dalam potensinya untuk **mengganggu pasar tenaga kerja;**

14. **Bank Dunia** dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia dalam bahaya **krisis air global**. Laporan bersama Bank Dunia dan PBB menyatakan saat ini 40 persen populasi dunia mengalami kelangkaan air. Laporan yang disusun berdasarkan penelitian selama dua

tahun tersebut mengatakan 700 juta orang akan menderita akibat kelangkaan air parah pada 2030;

15. (UNESCO) tahun 2018 menyatakan bahwa sebanyak 1,9 juta orang di Lampung tinggal di kawasan langka air. Beberapa daerah di Lampung, seperti Metro, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, dan Pesisir Barat, kondisi ketersediaan air bersihnya cukup memprihatinkan;

16. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, gangguan di sektor pertanian dan ketahanan pangan jadi ancaman di depan mata. Kebakaran lahan menjadi tentangan terberat;

17. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau;

18. Kerusakan, pendangkalan dan pencemaran sungai akibat penambangan ilegal, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan;

19. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain Ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam pembangunan desa;

20. Penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2019 berjumlah 450.109 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95%. Jumlah Penduduk Usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 merupakan kelompok umur yang paling besar yaitu berjumlah 300.100

jiwa atau 66,67% dari penduduk Way Kanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan sudah memasuki era 'Bonus Demografi'. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersedian tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan, agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif;

21. Upaya Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan human human trafficking, belum optimalnya penanganan bencana sosial dan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta masih sering terjadinya konflik sosial dan belum memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , RPJMD Provinsi dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, saat ini telah sampai pada periode pembangunan jangka menengah tahap ke-4 (empat) dari RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025, yaitu periode 2021-2026. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap 4 dari RPJP Kabupaten Way Kanan 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2019-2024 menjadi pedoman utama dalam pembangunan lima tahun Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

5.1 Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake hoders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dengan mendasarkan kepada modal dasar Kabupaten Way Kanan, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 2005-2025, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025, maka Visi Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 adalah :

"Way Kanan Mandiri, Maju, dan Berdaya Saing"

Way Kanan yang Mandiri adalah keinginan menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang mandiri pada periode 20 tahun kedepan. Kata-kata mandiri ini menunjuk pada kjemandirian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Way Kanan yang Maju adalah Way Kanan sebagai Kabupaten yang maju. Kata maju menunjukkan kemajuan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan pendapatan perkapita yang meningkat, pemerataan tingkat distribusi pendapatan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Way Kanan yang Berdayasaing adalah Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi direction untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh

satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Way Kanan 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut:

1. Memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan dukungan potensi daerah yang handal;
3. Mewujudkan manajemen publik yang semakin handal dengan peningkatan profesionalitas aparat pemerintah daerah;
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang semakin maju dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah;
5. Mewujudkan pembangunan sosial kemasyarakatan yang berbudaya untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tahapan Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025 adalah:

1. RPJM Kesatu (2006 – 2011)
2. RPJM Kedua (2011 – 2016)
3. RPJM Ketiga (2016 – 2021)
4. RPJM Keempat (2021 – 2026)

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepal Daerah terpilih adalah:

"Way Kanan Unggul dan Sejahtera"

Filosofinya:

Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul:

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

Makna Sejahtera:

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dalam rangka mencapai visi *" **Way Kanan Unggul dan Sejahtera** "* tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Misi 1

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan

organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

Misi-2:

"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi-3:

"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah"

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemi covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi-4:

"Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur".

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Keberadaan Bandara Gatot Subroto, sarana tansportasi kereta api, dan jalur Lintas Tengah Sumatera serta Tol Sumatera perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi dan destinasi wisata.

“Seiiring dengan itu perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi petani, pengusaha kecil, pengrajin, dan koperasi perlu didukung dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian, penyuluh industri, tenaga pendamping UMKM, penyuluh koperasi dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

Selain itu, perlu dikembangkan tatanan baru aktivitas ekonomi dalam menghadapi pendemi Covid 19.

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama tersebut antara lain:

Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Agenda Kerja:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dilakukan dengan langkah-langkah:
   a. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (outcome) berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
   b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih handal.
   c. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (cascade down) dari level pemerintah daerah kepada perangkat daerah hingga level individu.
   d. Menyusun rencana aksi setiap setiap perangkat daerah (PD) sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodok/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal.
   e. Menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunakan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang.
   f. Melakukan evaluasi internal atas imlementasi manajemen kinerja PD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk

mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing PD.

2. Opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), dengan cara peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penataan aset daerah.
3. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dilakukan dengan langkah:
   a. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
   b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan dana perimbangan.
   c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan lain-lain pendapatan yang sah.
4. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan pemetaan, identifikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum daerah secara berkala untuk mewujudkan harmonisasi produk hukum yang efektif, sehingga mengurangi produk hukum daerah yang tidak harmonis.
5. Meningkatkan penguatan organisasi perangkat daerah, yang dilakukan dengan penyusunan struktur organisasi didasarkan pada kinerja yang akan dicapai, agar struktur organisasi tersebut dapat efektif mencapai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, tetapi juga memperhatikan proses bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif.
6. Meningkatkan kualitas ketatalaksanaan, yang dilakukan dengan penyusunan kebijakan tentang proses bisnis internal yang menggambarkan hubungan tata kerja antar Perangkat Daerah didasarkan pada kinerja yang akan dicapai.
7. Meningkatkan kualitas pengawasan, dilakukan dengan langkah:

a. Membangun unit kerja Zona Integritas serta memaksimalkan peran Inspektorat dalam mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

b. Memperkuat penerapan sistem integritas dengan membuat kebijakan terkait penangan gratifikasi, benturan kepentingan, dan mengimplementasikan SPIP kedalam SOP, penempatan SDM, manajemen resiko, dan lain-lain.

8. Meningkatkan pelayanan publik, dimana setiap unit yang memberikan pelayanan publik agar melakukan reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupun SOP pelayanan, dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Bagian Organisasi.
9. Meningkatnya inovasi daerah.
10. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dilakukan dengan mendorong penerapan e-government secara merata dalam manajemen pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang bersifat transaksional.
11. Meningkatkan sistem manajemen SDM, yang dilakukan dengan menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik, sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan pegawai berkelanjutan serta sebagai dasar pemberian *reward dan punishment.*
12. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara.
13. Meningkatkan kualitas arsip daerah.
14. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat daerah.
15. Meningkatkan kualitas layanan sekretaria DPRD.

Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Agenda Kerja :

16. Meningkatkan kualitas tutupan hutan, kualitas udara, kualitas air dan menjaga sumber mata air, dilakukan dengan beberapa langkah:
    a. Gerakan tanam pohon sumber air disepanjang sempadan sungai dan ruang terbuka hijau.
    b. Pengelolaan persampahan (Bank Sampah, TPA) dan mendorong gerakan kebersihan lingkungan.
    c. Pencegahan pencemaran air sungai.
    d. Pencegahan pencemaran udara.
    e. Penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

Agenda Kerja :

17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, dilakukan dengan langkah-langkah:
    a. Mengurangi angka kematian ibu, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.
    b. Mengurangi angka kematian bayi, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin.
    c. Mengurangi angka kematian balita, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, dan balita.
    d. Mengurangi angka stunting

e. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia pendidikan dasar.

f. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif.

g. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut.

h. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberculosis, dan

i. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

18. Meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan langkah-langkah :

    a. Meningkatkan angka partipasi sekolah.

    b. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi penduduk putus sekolah untuk mengikuti Pendidikan luar sekolah.

    c. Mendorong dan memfasilitasi sekolah untuk diakreditasi sehingga kualitas pelayanan sekolah semakin baik.

    d. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas guru.

    e. Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan sarana prasarana sekolah.

19. Menurunkan angka kemiskinan, dengan beberapa langkah sebagai berikut:

    a. Pengelolaan data terpadu kemiskinan yang semakin baik dan akurat, dilakukan dengan melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara rutin dan dikelola dengan sistem SIKNG dan SIDATUK (Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan)

    b. Penanganan kemiskinan, dimana berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 terdapat 12,90% atau 58.410 jiwa.

    c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin terutama pada persentil 1- 13.

20. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan laju pertumbuhan penduduk.
21. Meningkatkan kualitas hidup anak, dilakukan dengan melakukan pemenuhan hak-hak dasar anak, perlindungan khusus anak, dan peningkatan kualitas keluarga.
22. Meningkatkan keberdayaan perempuan, yang dilakukan dengan pengarutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan.
23. Meningkatkan keberdayaan masyarakat kampung yang diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun.
24. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
25. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat.

Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Agenda Kerja :`

26. Mengembangkan Kawasan Pangan (food estate) di Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung dan Way Tuba, Blambangan Umpu
27. Meningkatkan produksi, mutu dan usaha komoditas tanaman pangan (terutama padi, jagung, ubi kayu), dengan beberapa langkah yaitu:
    a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
    b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman pangan yang ada.
    c. Pengembangan Kawasan Tanaman Padi

- Pengembangan Kawasan pertanian padi organik dan padi unggul varietas lokal.
- Mendorong perluasan areal layanan Daerah Irigasi Way Umpu, Suplesi Way Besai, dan Daerah Irigasi Komering, serta meningkatkan indeks pertanaman padi dengan cara merehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, cetak sawah baru, serta pemberdayaan P3A.
- Pengembangan tanaman refugia sebagai upaya pengendalian hama tanaman padi.
- Memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman padi.

d. Pengembangan kawasan tanaman pangan lainnya terutama singkong, jagung, kedelai.

e. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman pangan.

f. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman pangan.

28. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman hortikultura semusim (sayur-sayuran, dan tanaman biofarmaka serta tanaman hias semusim), dengan beberapa langkah yaitu:

    a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.

    b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman hortikultura yang ada.

    c. Pengembangan Kawasan tanaman sayur-sayuran.

    d. Pengembangan Kawasan tanaman biofarmaka dan tanaman hias semusim.

e. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman hortikultura.

f. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman hortikultura.

29. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman hortikultura tahunan (buah-buahan dantanaman hias tahunan) dengan beberapa langkah yaitu:

    a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.

    b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman hortikultura yang ada.

    c. Pengembangan kawasan tanaman buah-buahan.

    d. Pengembangan Kawasan tanaman tanaman hias.

    e. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman hortikultura.

    f. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman hortikultura.

30. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman perkebunan semusim, dengan beberapa langkah yaitu:

    a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.

    b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman perkebunan semusim yang ada.

c. Pengembangan kawasan tanaman perkebunan semusim (tebu, tembakau, dan lain-lain).

d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman perkebunan semusim.

e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman perkebunan semusim.

31. Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman perkebunan tahunan, dengan beberapa langkah yaitu:

    a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.

    b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman perkebunan tahunan yang ada.

    c. Pengembangan kawasan tanaman perkebunan tahunan (karet, kopi, lada, kakao, sawit, kelapa, dll).

    d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman perkebunan tahunan.

    e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman perkebunan tahunan.

32. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging serta telur, dengan beberapa langkah yaitu:

    a. Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.

    b. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi peternakan yang ada.

c. Pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ternak unggas dan ternak lainnya berbasis kawasan.

d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan peternakan.

e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan peternakan.

33. Meningkatkan produksi ikan dan olahan ikan, dengan beberapa langkah, yaitu:

    a. Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh perikanan dengan tugas memfasilitasi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang ada dan mampu memaksimalkan potensi perikanan yang ada.

    b. Pengembangan kawasan sentra perikanan.

    c. Pengembangan pembenihan dan bina usaha perikanan.

    d. Pengembangan budidaya dan bina usaha perikanan.

    e. Pengembangan perikanan tangkap.

    f. Pengembangan produk olahan ikan.

    g. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan perikanan.

    h. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan perikanan.

34. Meningkatkan industri olahan terutama meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Kabupaten Way Kanan terutama diprioritaskan pada komoditas unggulan, dengan beberapa langkah, yaitu:

    a. Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh industri dengan tugas memfasilitasi kelompok industri mikro dan kecil yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.

b. Pengembangan kawasan industri mikro dan kecil terutama yang berbasis pertanian dengan tetap memfasilitasi industri mikro kecil yang berbasis non pertanian.

c. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan industri mikro dan kecil.

d. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan industri mikro dan kecil.

35. Memperluas pasar produk di pasar dalam negeri, dilakukan dengan beberapa langkah:

    a. Fasilitasi dan pembinaan penjualan produk (termasuk secara online) untuk pelaku UMKM, petani, koperasi, industri kecil dengan dukungan tenaga pendamping.

    b. Fasilitasi dan Promosi produk unggulan daerah.

    c. Fasilitasi dan pembinaan pedagang di pasar pemda, pasar kampung, pertokoan, dan warung.

    d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan perdagangan.

36. Meningkatkan usaha pariwisata, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:
    a. Mendorong adanya tenaga pendamping pariwisata dengan tugas memfasilitasi kelompok sadar wisata yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.

    b. Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan fokus pada destinasi wisata unggulan.

    c. Pengembangan promosi wisata dan pengembangan sumberdaya pariwisata.

    d. Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan destinasi wisata unggulan.

e. Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan kampung wisata.

37. Meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi.
38. Meningkatkan usaha transportasi dan pergudangan.
39. Meningkatkan kualitas dan efisiensi penanaman modal.
40. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

    f. Mengembangkan wirausaha mandiri dengan memfasilitasi pelatihan bagi penduduk usia kerja yang menganggur,

    g. Mendorong penduduk usia kerja yang saat ini hanya mengurus rumah tangga agar dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja produktif dengan diberikan pelatihan.

    h. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja melalui Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih penduduk usia kerja.

41. Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

    i. Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh koperasi dengan tugas memfasilitasi koperasi yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.

    j. Mendorong pengembangan koperasi menjadi koperasi sehat.

    k. Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga pendamping usaha mikro dan kecil dengan tugas memfasilitasi usaha mikro dan kecil yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.

    l. Mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil.

Upaya mewujudkan Visi “Way Kanan Unggul Dan Sejahtera” menghadapi berbagai keterbataan yaitu (1) keterbatasan waktu, (2) keterbatasan

sumberdaya manusia, (3) keterbatasan anggaran, dan (4) keterbatasan kewenangan, untuk itu perlu skala prioritas dalam pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan menjadi 3 Prioritas Wajib, 3 Prioritas Unggulan, dan 3 Prioritas Penunjang. Prioritas Wajib terdiri dari (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, dan (3) Perlindungan Sosial. Prioritas Unggulan terdiri dari (1) Pertanian, (2) Usaha Mikro Kecil, (3) Pariwisata. Prioritas Penunjang terdiri dari (1) Infrastruktur, (2) Lingkungan Hidup, dan (3) Biorokrasi.



Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Way Kanan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dari 4 Misi dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 terdapat 4 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Birokrasi

   Tujuan Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah Meningkatkan Kualitas Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2026 sebesar 53,93 poin.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

   Tujuan Misi 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan target pada tahun 2026 sebesar 69,49 poin.

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

   Tujuan Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah, adalah Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dengan target pada tahun 2026 sebesar 69,55 poin

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah

   Tujuan Misi 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur, adalah Meningkatkan Perekonomian Daerah yang indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target selama periode 2021-2026 rata-rata tumbuh sebesar 4,03%.

Sasaran Dari 4 Misi dan 4 Tujuan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 terdapat 49 sasaran. yang terdiri dari 11 sasaran pada misi 1, 7 sasaran pada misi 2, 17 sasran pada misi 3, dan 14 sasaran pada misi 4, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Birokrasi

   Upaya meningkatkan kualitas birokrasi dengan target indeks reformasi birokrasi pada tahun 2026 sebesar 53,93 poin, dicapai dengan 11 sasaran, yaitu:

1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 63,64 poin.

1.2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 91,96 poin.

1.3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0,750 poin.

1.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 9,30 poin.

1.5. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator Nilai Komponen Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 9,50 poin.

1.6. Meningkatnya Kinerja Organisasi, dengan indikator Nilai Komponen Kinerja Organisasi, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 6,45 poin.

1.7. Meningkatnya Inovasi Daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 45 poin.

1.8. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 86 poin.

1.9. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE , pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 3,25 poin.

1.10. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dengan indikator Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 20%.

1.11. Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah dengan indikator Kualitas Pengelolaan Arsip, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 43,40 poin.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan target indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 69,49 poin, dicapai dengan 7 sasaran, yaitu:

2.1. Meningkatnya Kualitas Lahan dengan indikator Indeks Kualitas Lahan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 66,41 poin.

2.2. Meningkatnya Kualitas Air dengan indikator Indeks Kualitas Air, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 58,84 poin.

2.3. Meningkatnya Kualitas Udara dengan indikator Indeks Kualitas Udara, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 80,55 poin.

2.4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Persentase Sampah yang di Kelola, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100 %.

2.5. Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100 poin.

2.6. Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)

dengan indikator Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100%.

2.7. Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 39,52%.

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan target indeks pembangunan manusia pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 69,55 poin, dicapai dengan 17 sasaran, yaitu:

3.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 70,7 tahun.

3.2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 12,48 tahun.

3.3. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 7,88 tahun.

3.4. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Cakupan PMKS yang tertangani, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 11,72%.

3.5. Meningkatnya Budaya Baca dengan indikator Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 70,7%.

3.6. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indikator Angka Kemiskinan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 9,99%.

3.7. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dengan indikator Indeks Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Kategori Madya.

3.8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk yang rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai dibawah 0,9 %.

3.9. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung dengan indikator Indeks Desa Membangun, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0,6683 poin.

3.10. Meningkatnya Pembangunan Gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 88,54 poin.

3.11. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda dengan indikator Cakupan Pembinaan Pemuda, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0,09%.

3.12. Meningkatnya Kualitas Olahraga dengan indikator Cakupan Pembinaan Olahraga, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 56,67%.

3.13. Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah dengan indikator Cakupan Pembinaan Kebudayaan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 79%.

3.14. Mengurangi Dampak Bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 131.19 poin.

3.15. Meningkatnya Ketertiban Daerah dengan indikator Cakupan Ketertiban, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 65%.

3.16. Menurunnya Konflik Sosial dengan indikator Angka Konflik Sosial, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0 kasus.

3.17. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 74,15 poin.

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah

Upaya meningkatkan perekonomian daerah dengan target laju pertumbuhan ekonomi yang targetnya selama periode 2021-2026 rata-rata tumbuh 4,03%, dicapai dengan 14 sasaran, yaitu:

4.1. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 3,92%.

4.2. Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 3,83%.

4.3. Meningkatnya Usaha Konstruksi dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.

4.4. Meningkatnya Usaha Perdagangan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.

4.5. Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.

4.6. Meningkatnya Usaha Pariwisata dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.

4.7. Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian dengan indikator Persentase Koperasi Sehat, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 78,43%.

4.8. Meningkatnya Usaha Mikro dengan indikator Persentase usaha mikro per jumlah penduduk, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 7,50%.

4.9. Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 6,71 poin.

4.10. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 75%.

4.11. Berkembangnya Ekonomi Kreatif dengan indicator Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 4,41%.

4.12. Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan dengan indicator Persentase Jalan Mantap, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 63,4%.

4.13. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang dengan indicator Ketaatan Terhadap RTRW, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100%.

4.14. Terkendalinya Inflasi dengan indicator Laju Inflasi, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan berkisar 3-5%.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 terdiri dari, yaitu :

TABEL V. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"															
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1,1		Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	50,92	51,13	51,43	51,93	52,43	52,93	53,53	53,93	53,93
			1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	56,09	57,64	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	63,64
			1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	n/a	n/a	80,93	82,84	84,88	87,08	89,43	91,96	91,96
			1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,703	0,563	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750	0,750
			1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	n/a	9,18	9,20	9,22	9,24	9,26	9,28	9,30	9,30
			1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan	Nilai Komponen Pemerintahan	Poin	n/a	9,38	9,40	9,42	9,44	9,46	9,48	9,50	9,50

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				Yang Bersih Dan Bebas KKN	Yang Bersih Dan Bebas KKN										
			1.1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	n/a	4,64	4,95	5,25	5,55	5,85	6,15	6,45	6,45
			1.1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	n/a	419	30	33	36	39	42	45	45
			1.1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Poin	n/a	80	81	82	83	84	85	86	86
			1.1.9	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,52	2,05	2,3	2,55	2,75	3,01	3,15	3,25	3,25
			1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan	%	0	0	10	12	14	16	18	20	20
			1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	Poin	n/a	32,39	34,4	36,4	38,4	40,40	42,40	43,40	43,40

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	2,1		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,840	63,93	67,22	67,83	68,43	69,04	69,10	69,49	69,49
			2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	56,37	56,37	58,72	61,14	63,57	65,99	66,10	66,41	66,41
			2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	55,33	58,89	58,34	58,44	58,54	58,64	58,74	58,84	58,84
			2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	82.31	79,05	80,05	80,15	80,25	80,34	80,45	80,55	80,55
			2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang di Kelola	%	80.35	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Poin	25	25	50	100	100	100	100	100	100
			2.1.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan	Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3	%	n/a	21,43	37,5	53,57	67,86	82,14	100	100	100

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				beracun (LIMBAH B3)											
			2.1.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup	%	n/a	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52
3	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah	3,1		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,19	67,44	67,69	67,99	68,39	68,89	69,39	69,55	69,55
			3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,27	69,40	69,55	69,75	70	70,3	70,6	70,7	70,7
			3.1.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35	12,36	12,38	12,4	12,42	12,44	12,46	12,48	12,48
			3.1.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,39	7,70	7,73	7,76	7,79	7,82	7,85	7,88	7,88
			3.1.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah	Cakupan PMKS yang tertangani	%	n/a	5,72	6,72	7,72	8,72	9,72	10,72	11,72	11,72

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				Kesejahteraan Sosial (PMKS)											
			3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan	%	n/a	n/a	69,55	69,75	70	70,3	70,6	70,7	70,7
			3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	13,07	12,90	12,75	12,35	11,90	11,4	10,7	9,99	9,99
			3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
			3.1.8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,89	1,51	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
			3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6489	0,6541	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683	0,6683
			3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,22	88,19	88,23	88,27	88,32	88,37	88,44	88,54	88,54

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	Cakupan Pembinaan Pemuda	%	n/a	n/a	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09
			3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	n/a	29,17	30,00	33,33	40,00	46,67	56,67	56,67	56,67
			3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	Cakupan Pembinaan Kebudayaan	%	n/a	n/a	50	60	70	75	77	79	79
			3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19
			3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	Cakupan Ketertiban	%	n/a	n/a	40	45	50	55	60	65	65
			3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,45	73,55	73,65	73,75	73,85	73,95	74,05	74,15	74,15
4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung	4.1		Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17	-1,16	2	3	4	5	5	5,2	4,03
			4.1.1	Meningkatnya Usaha Pertanian,	Laju Pertumbuhan	%	2,01	0,74	2	3	4	4,5	5	5	3,92

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Ketersediaan Infrastruktur			Kehutanan, dan Perikanan	Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan										
			4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	7,58	-8,37	1	3	3,5	4,5	5	6	3,83
			4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	5,61	-2,40	2	3	5	6	6	6	4,67
			4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,15	-0,89	2	3	5	6	6	6	4,67
			4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi	%	8,91	-4,41	2	3	5	6	6	6	4,67

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					dan Pergudangan										
			4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	8,33	-3,98	2	4	6	7,5	6	7,5	5,50
			4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Koperasi Sehat	%	N/A	N/A	9,80	19,61	39,22	63,73	73,53	78,43	78,43
			4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	N/A	7,19	7,24	7,29	7,35	7,40	7,45	7,5	7,50
			4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6,74	-28,09	6,73	6,72	6,71	6,70	6,70	6,70	6,71
			4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,17	75,22	74	75	75	75	75	75	75
			4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan	%	0	0	0	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41

No	Misi	Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
					Pelaku Ekonomi Kreatif										
			4.1.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	46,48	52,73	48	56,56	58,51	60,5	62,4	63,4	63,4
			4.1.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			4.1.14	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembagunan tahunan *(milestone)* Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

6.1. Strategi

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program

pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode 2021-2025 adalah **"*Memantapkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan Mendorong Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya*".** Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021- 2026 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kabupaten Way Kanan. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman

(*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity* (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Way Kanan menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*).

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan 11 sasaran pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 yaitu ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"*** dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
   1) **Sasaran 1.1.1** : Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
   Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah" dilakukan melalui 7 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.1.1***: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah, (2) ***Strategi 1.1.1.2***: Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, (3) ***Strategi 1.1.1.3***: Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, (4) ***Strategi 1.1.1.4***: Meningkatkan kualitas evaluasi internal Pemerintah Daerah, (5) ***Strategi 1.1.1.5***: Meningkatkan kualitas capaian kinerja , (6) ***Strategi***

1.1.1.6: Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD, (7) ***Strategi 1.1.1.7***: Meningkatkan pendampingan dan asistensi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah.

2) **Sasaran 1.1.2**: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui 6 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.2.1***: Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, (2) ***Strategi 1.1.2.2***: Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD, (3) ***Strategi 1.1.2.3***: Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) ***Strategi 1.1.2.4***: Meningkatkan Penyerapan Anggaran, (5) ***Strategi 1.1.2.5***: Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah yang Baik, (6) ***Strategi 1.1.2.6***: Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3) **Sasaran 1.1.3**: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.3.1***: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4) **Sasaran 1.1.4**: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.4.1***: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, (2) ***Strategi 1.1.4.2***: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, (3) ***Strategi '1.1.4.3***: Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala, (4) ***Strategi 1.1.4.4***: Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi Pelayanan Publik.

5) **Sasaran 1.1.5**: Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.5.1***: Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (2) ***Strategi 1.1.5.2***: Meningkatkan Pencegahan

Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (3) ***Strategi 1.1.5.3:*** Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa

6) Sasaran 1.1.6: Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kinerja Organisasi" dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.6.1***: Penataan Organisasi Perangkat Daerah, (2) ***Strategi 1.1.6.2***: Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara, (3) ***Strategi 1.1.6.3***: Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi Kinerja Organisasi, (4) ***Strategi 1.1.6.4***: Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (5) ***Strategi 1.1.6.5***: Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan, (6) ***Strategi 1.1.6.6***: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan.

7) Sasaran 1.1.7: Meningkatnya Inovasi Daerah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Inovasi Daerah" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.7.1***: Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, (2) ***Strategi 1.1.7.2***: Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan.

8) Sasaran 1.1.8: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.8.1***: Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik, (2) ***Strategi 1.1.8.2:*** Meningkatkan Keamanan Informasi

9) Sasaran 1.1.9: Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.9.1***: Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal, (2) ***Strategi 1.1.9.2:*** Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE*, (3)* ***Strategi 1.1.9.3:*** Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE, *(4)* ***Strategi 1.1.9.3:*** Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE.

10) Sasaran 1.1.10: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.10.1***: Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan.

11) Sasaran 1.1.11: Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 1.1.11.1***: Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip, (2) ***Strategi 1.1.11.2***: Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah yang Dilestarikan.

2. Untuk mewujudkan 7 sasaran pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"*** dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1) Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Lahan

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Lahan" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.1.1***: Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan, (2) ***Strategi 2.1.1.2***: Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) ***Strategi 2.1.1.3***: Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat.

2) Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Air

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Air" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.2.1***: Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan, (2) ***Strategi 2.1.2.2***: Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat.

3) Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Kualitas Udara

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Udara" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.3.1***: Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara, (2) ***Strategi 2.1.3.2***: Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat.

4) **Sasaran 2.1.4**: Meningkatnya Pengolahan Sampah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Cakupan Pengurangan Sampah" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.4.1***: Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah.

5) **Sasaran 2.1.5**: Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Untuk mencapai sasaran "Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.5.1***: Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), (2) ***Strategi 2.1.5.2***: Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten.

6) **Sasaran 2.1.6**: Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.6.1***: Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3

7) **Sasaran 2.1.7**: Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 2.1.7.1***: Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

3. Untuk mewujudkan 17 sasaran pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah"*** dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1) **Sasaran 3.1.1**: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" dilakukan melalui 8 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.1 .1***: Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (2) ***Strategi 3.1.1.2***: Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (3) ***Strategi 3.1.1.3***: Meningkatkan Status Gizi Masyarakat, (4) ***Strategi 3.1.1.4***: Menurunkan Angka Kesakitan, (5) ***Strategi 3.1.1.5***: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, (6) ***Strategi 3.1.1.6***: Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA, (7) ***Strategi 3.1.1.7***: Meningkatkan Kualitas Air Minum, (8) ***Strategi 3.1.1.8***: Meningkatkan Kualitas Perumahan.

2) **Sasaran 3.1.2**: Meningkatnya Harapan Lama Sekolah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Harapan Lama Sekolah" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.2.1***: Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, (2) ***Strategi 3.1.2.2***: Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar, (3) ***Strategi 3.1.2.3***: Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama, (4) ***Strategi 3.1.2.4***: Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi.

3) **Sasaran 3.1.3**: Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.3.1***: Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan.

4) **Sasaran 3.1.4**: Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.4.1***: Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, (2) ***Strategi 3.1.4.2***: Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

5) Sasaran 3.1.5: Meningkatnya Budaya Baca

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Budaya Baca" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.5.1***: Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah, (2) ***Strategi 3.1.5.2***: Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar.

6) Sasaran 3.1.6: Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Untuk mencapai sasaran "Menurunnya Tingkat Kemiskinan" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.6.1***: Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan, (2) ***Strategi 3.1.6.2***: Optimalisasi Program Perlindungan Sosial, (3) ***Strategi 3.1.6.3***: Pemberdayaan Masyarakat Miskin, (4) ***Strategi 3.1.6.4***: Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak.

7) Sasaran 3.1.7: Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Hidup Anak" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.7.1***: Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak, (2) ***Strategi 3.1.7.2***: Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak, (3) ***Strategi 3.1.7.3***: Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga.

8) Sasaran 3.1.8: Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Untuk mencapai sasaran "Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.8.1***: Meningkatkan Pengendalian Penduduk, (2) ***Strategi 3.1.8.2***:

Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana, (3) ***Strategi 3.1.8.3***: Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

9) Sasaran 3.1.9: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung" dilakukan melalui 17 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.9.1***: Meningkatkan Kualitas Kampung, (2) ***Strategi 3.1.9.2***: Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi, (3) ***Strategi 3.1.9.3***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu, (4) ***Strategi 3.1.9.4***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit (5) ***Strategi 3.1.9.5***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu (6) ***Strategi 3.1.9.6***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui (7) ***Strategi 3.1.9.7***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu (8) ***Strategi 3.1.9.8***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga (9) ***Strategi 3.1.9.9***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba (10) ***Strategi 3.1.9.10***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung (11) ***Strategi 3.1.9.11***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan (12) ***Strategi 3.1.9.12***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas (13) ***Strategi 3.1.9.13***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin (14) ***Strategi 3.1.9.14***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar (15) ***Strategi 3.1.9.15***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga (16) ***Strategi 3.1.9.16***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung (17) ***Strategi 3.1.9.17***: Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk.

10) Sasaran 3.1.10: Meningkatnya Pembangunan Gender

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Pembangunan Gender" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.10.1***: Meningkatkan Keberdayaan Perempuan, (2) ***Strategi 3.1.10.2***: Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan.

11) Sasaran 3.1.11: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda" dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.11.1***: Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda, (2) ***Strategi 3.1.11.2***: Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor, (3) ***Strategi 3.1.11.3***: Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader, (4) ***Strategi 3.1.11.4***: Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, (5) ***Strategi 3.1.11.5:*** Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan.

12) Sasaran 3.1.12: Meningkatnya Kualitas Olahraga

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Olahraga" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.12.1***: Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi, (2) ***Strategi 3.1.12.2***: Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan, (3) ***Strategi 3.1.12.3***: Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi.

13) Sasaran 3.1.13: Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah" dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.13.1***: Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah, (2) ***Strategi 3.1.13.2***: Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat, (3) ***Strategi 3.1.13.3***: Melestarikan Kesenian Tradisonal, (4) ***Strategi 3.1.13.4***: Pembinaan Sejarah Lokal, (5) ***Strategi 3.1.13.5***: Melestarikan dan Mengelola Cagar Budaya.

14) Sasaran 3.1.14: Mengurangi Dampak Bencana

Untuk mencapai sasaran "Mengurangi Dampak Bencana" dilakukan melalui 8 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.14.1***: Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana, (2) ***Strategi 3.1.14.2***: Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana, (3) ***Strategi 3.1.14.3***: Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana, (4) ***Strategi 3.1.14.4***: Meningkatkan Penanganan Bencana, (5) ***Strategi 3.1.14.5***: Pengurangan Wilayah Rawan Bencana, (6) ***Strategi 3.1.14.6***: Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana, (7) ***Strategi 3.1.14.7***: Meningkatkan

Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana, (8) ***Strategi 3.1.14.8***: Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran.

15) Sasaran 3.1.15: Meningkatnya Ketertiban Daerah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Ketertiban Daerah" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.15.1***: Meningkatkan Penegakan Perda, (2) ***Strategi 3.1.15.2:*** Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan, (3) ***Strategi 3.1.15.3:*** Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.

16) Sasaran 3.1.16: Menurunnya Konflik Sosial

Untuk mencapai sasaran "Menurunnya Konflik Sosial" dilakukan melalui 6 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.16.1***: Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, (2) ***Strategi 3.1.16.2:*** Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (3) ***Strategi 3.1.16.3:*** Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, (4) ***Strategi 3.1.16.4:*** Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi, (5) ***Strategi 3.1.16.5:*** Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, (6) ***Strategi 3.1.16.6:*** Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.

17) Sasaran 3.1.17: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah" dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) ***Strategi 3.1.17.1***: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, (2) ***Strategi 3.1.17.2***: Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat, (3) ***Strategi 3.1.17.3***: Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, (4) ***Strategi 3.1.17.4***: Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan, (5) ***Strategi 3.1.17.5***: Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Untuk mewujudkan 14 sasaran pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 yaitu ***"Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur"*** dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

   1) **Sasaran 4.1.1**: Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

   Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan" dilakukan melalui 47 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.1.1***: Meningkatkan Produksi Padi, (2) ***Strategi 4.1.1.2***: Meningkatkan Produksi Padi Gogo, (3) ***Strategi 4.1.1.3***: Meningkatkan Produksi Padi Organik, (4) ***Strategi 4.1.1.4***: Meningkatkan Produksi Jagung, (5) ***Strategi 4.1.1.5***: Meningkatkan Produksi Ubi Kayu, (6) ***Strategi 4.1.1.6***: Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya, (7) ***Strategi 4.1.1.7***: Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim, (8) ***Strategi 4.1.1.8***: Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim, (9) ***Strategi 4.1.1.9***: Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim, (10) ***Strategi 4.1.1.10***: Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim, (11) ***Strategi 4.1.1.11***: Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim, (12) ***Strategi 4.1.1.12***: Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan, (13) ***Strategi 4.1.1.13***: Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan, (14) ***Strategi 4.1.1.14***: Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi, (15) ***Strategi 4.1.1.15***: Meningkatkan Produksi Tanaman Lada, (16) ***Strategi 4.1.1.16***: Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao, (17) ***Strategi 4.1.1.17***: Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit, (18) ***Strategi 4.1.1.18***: Meningkatkan Produksi Tanaman Karet, (19) ***Strategi 4.1.1.19***: Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa, (20) ***Strategi 4.1.1.20***: Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan

Lainnya, (21) ***Strategi 4.1.1.21***: Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu, (22) ***Strategi 4.1.1.22***: Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau, (23) ***Strategi 4.1.1.23***: Meningkatkan Produksi Ternak Sapi, (24) ***Strategi 4.1.1.24***: Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau, (25) ***Strategi 4.1.1.25***: Meningkatkan Produksi Ternak Kambing, (26) ***Strategi 4.1.1.26***: Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya, (27) ***Strategi 4.1.1.27***: Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur, (28) ***Strategi 4.1.1.28***: Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging, (29) ***Strategi 4.1.1.29***: Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras, (30) ***Strategi 4.1.1.30***: Meningkatkan Produksi Ternak Itik, (31) ***Strategi 4.1.1.31***: Meningkatkan Produksi Ikan Lele, (32) ***Strategi 4.1.1.32***: Meningkatkan Produksi Ikan Nila, (33) ***Strategi 4.1.1.33***: Meningkatkan Produksi Ikan Gurame, (34) ***Strategi 4.1.1.34***: Meningkatkan Produksi Ikan Emas, (35) ***Strategi 4.1.1.35***: Meningkatkan Produksi Ikan Patin, (36) ***Strategi 4.1.1.36***: Meningkatkan Produksi Ikan Baung, (37) ***Strategi 4.1.1.37***: Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya, (38) ***Strategi 4.1.1.38***: Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele, (39) ***Strategi 4.1.1.39***: Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila, (40) ***Strategi 4.1.1.40***: Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame, (41) ***Strategi 4.1.1.41***: Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas, (42) ***Strategi 4.1.1.42***: Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya, (43) ***Strategi 4.1.1.43***: Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, (44) ***Strategi 4.1.1.44***: Meningkatkan Produksi Ikan Olahan, (45) ***Strategi 4.1.1.45***: Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan, (46) ***Strategi 4.1.1.46***: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani, (47) ***Strategi 4.1.1.47***: Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan.

2) Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan" dilakukan melalui 8 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.2.1***: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri, (2) ***Strategi 4.1.2.2***: Meningkatkan Produksi Industri Pangan, (3) ***Strategi 4.1.2.3***: Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik, (4) ***Strategi 4.1.2.4***: Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu, (5) ***Strategi 4.1.2.5***: Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal, (6) ***Strategi 4.1.2.6***: Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi, (7) ***Strategi 4.1.2.7***: Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH, (8) ***Strategi 4.1.2.8***: Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri.

3) **Sasaran 4.1.3**: Meningkatnya Usaha Konstruksi

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Konstruksi" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.3.1***: Pengembangan Jasa Konstruksi.

4) **Sasaran 4.1.4**: Meningkatnya Usaha Perdagangan

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Perdagangan" dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.4.1***: Meningkatnya Promosi Produk Ekspor, (2) ***Strategi 4.1.4.2***: Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri, (3) ***Strategi 4.1.4.3***: Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan, (4) ***Strategi 4.1.4.4***: Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, dan Tera Ulang (5) ***Strategi 4.1.4.5:*** Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

5) **Sasaran 4.1.5**: Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.5.1***: Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum, (2) ***Strategi 4.1.5.2***: Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas

Angkutan Jalan, (3) ***Strategi 4.1.5.3***: Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

6) Sasaran 4.1.6: Meningkatnya Usaha Pariwisata

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Pariwisata" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.6.1***: Meningkatkan Kunjungan Pariwisata.

7) Sasaran 4.1.7: Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian" dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.7.1***: Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, (2) ***Strategi 4.1.7.2***: Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, (3) ***Strategi 4.1.7.3***: Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP, (4) ***Strategi 4.1.7.4***: Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, (5) ***Strategi 4.1.7.5***: Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi.

8) Sasaran 4.1.8: Meningkatnya Usaha Mikro

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Usaha Mikro" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.8.1***: Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, (2) ***Strategi 4.1.8.2***: Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, (3) ***Strategi 4.1.8.3***: Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

9) Sasaran 4.1.9: Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal" dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.9.1***: Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

10) Sasaran 4.1.10: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.10.1***:

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan, (2) ***Strategi 4.1.10.2***: Meningkatkan Kesempatan Kerja, (3) ***Strategi 4.1.10.3***: Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) ***Strategi 4.1.10.4***: Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial.

11) Sasaran 4.1.11: Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Untuk mencapai sasaran "Berkembangnya Ekonomi Kreatif" dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.11.1***: Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, (2) ***Strategi 4.1.11.2***: Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif.

12) Sasaran 4.1.12: Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.12.1***: Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan, (2) ***Strategi 4.1.12.2***: Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, (3) ***Strategi 4.1.12.3***: Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, (4) ***Strategi 4.1.12.4***: Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten.

13) Sasaran 4.1.13: Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang" dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.13.1***: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang, (2) ***Strategi 4.1.13.2***: Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang, (3) ***Strategi 4.1.13.3***: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang, (4) ***Strategi 4.1.13.4***: Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung dan Lingkungannya.

14) Sasaran 4.1.14: Terkendalinya Inflasi

Untuk mencapai sasaran "Terkendalinya Inflasi" dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) ***Strategi 4.1.14.1***: Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok, (2) ***Strategi 4.1.14.2***: Terkendalinya Harga

Pangan Pokok, (3) ***Strategi 4.1.14.3***: Terlaksananya Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.

TABEL 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Way Kanan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
MISI 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik					
1.1	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1.1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.4	Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah
				1.1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja
				1.1.1.6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD
				1.1.1.7	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1	Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
				1.1.2.2	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
				1.1.2.3	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
				1.1.2.4	Meningkatkan Penyerapan Anggaran
				1.1.2.5	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik
				1.1.2.6	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
					Pemerintah Daerah (LKPD)
		1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1.1.3.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.4.1	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
				1.1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
				1.1.4.3	Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala
				1.1.4.4	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik
		1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	1.1.5.1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				1.1.5.2	Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				1.1.5.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa
		1.1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1.1.6.1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah
				1.1.6.2	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara
				1.1.6.3	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi
				1.1.6.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				1.1.6.5	Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
					Pemerintahan
				1.1.6.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan
		1.1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah	1.1.7.1	Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
				1.1.7.2	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan
		1.1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1.1.8.1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik
				1.1.8.2	Meningkatkan Keamanan Informasi
		1.1.9	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.1.9.1	Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal
				1.1.9.2	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
				1.1.9.3	Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
				1.1.9.4	Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
		1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	1.1.10.1	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan
		1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	1.1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip
				1.1.11.2	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan
MISI 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup					
2.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	2.1.1.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
	Hidup				Kerusakan Lahan
				2.1.1.2	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				2.1.1.3	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	2.1.2.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan
				2.1.2.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat
		2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	2.1.3.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara
				2.1.3.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat
		2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	2.1.4.1	Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah
		2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	2.1.5.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
				2.1.5.2	Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
		2.1.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	2.1.6.1	Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3
		2.1.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan	2.1.7.1	Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
			Hidup		Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia					
3..1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1.1 .1	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
				3.1.1.2	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)
				3.1.1.3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
				3.1.1.4	Menurunkan Angka Kesakitan
				3.1.1.5	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
				3.1.1.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA
				3.1.1.7	Meningkatkan Kualitas Air Minum
				3.1.1.8	Meningkatkan Kualitas Perumahan
		3.1.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	3.1.2.1	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
				3.1.2.2	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar
				3.1.2.3	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama
				3.1.2.4	Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi
		3.1.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	3.1.3.1	Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan
		3.1.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang	3.1.4.1	Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
			Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Kesejahteraan Sosial
				3.1.4.2	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	3.1.5.1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah
				3.1.5.2	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar
		3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3.1.6.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan
				3.1.6.2	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial
				3.1.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin
				3.1.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak
		3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	3.1.7.1	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak
				3.1.7.2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak
				3.1.7.3	Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga
		3.1.8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	3.1.8.1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk
				3.1.8.2	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana
				3.1.8.3	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
		3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	3.1.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
				3.1.9.2	Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi
				3.1.9.3	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu
				3.1.9.4	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit
				3.1.9.5	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu
				3.1.9.6	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui
				3.1.9.7	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu
				3.1.9.8	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga
				3.1.9.9	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba
				3.1.9.10	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung
				3.1.9.11	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan
				3.1.9.12	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas
				3.1.9.13	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin
				3.1.9.14	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar
				3.1.9.15	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga
				3.1.9.16	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung
				3.1.9.17	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk
		3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	3.1.10.1	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan
				3.1.10.2	Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
		3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	3.1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda
				3.1.11.2	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor
				3.1.11.3	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader
				3.1.11.4	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
				3.1.11.5	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan
		3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	3.1.12.1	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi
				3.1.12.2	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan
				3.1.12.3	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi
		3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	3.1.13.1	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
				3.1.13.2	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat
				3.1.13.3	Melestarikan Kesenian Tradisonal
				3.1.13.4	Pembinaan Sejarah Lokal
				3.1.13.5	Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya
		3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	3.1.14.1	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana
				3.1.14.2	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana
				3.1.14.3	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
				3.1.14.4	Meningkatkan Penanganan Bencana
				3.1.14.5	Pengurangan Wilayah Rawan Bencana

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
				3.1.14.6	Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana
				3.1.14.7	Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana
				3.1.14.8	Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran
		3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	3.1.15.1	Meningkatkan Penegakan Perda
				3.1.15.2	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan
				3.1.15.3	Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
		3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	3.1.16.1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				3.1.16.2	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				3.1.16.3	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				3.1.16.4	Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi
				3.1.16.5	Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
				3.1.16.6	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
		3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	3.1.17.1	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				3.1.17.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat
				3.1.17.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
				3.1.17.4	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
				3.1.17.5	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang mantap					
4.1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	4.1.1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.1.1.1	Meningkatkan Produksi Padi
				4.1.1.2	Meningkatkan Produksi Padi Gogo
				4.1.1.3	Meningkatkan Produksi Padi Organik
				4.1.1.4	Meningkatkan Produksi Jagung
				4.1.1.5	Meningkatkan Produksi Ubi Kayu
				4.1.1.6	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya
				4.1.1.7	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim
				4.1.1.8	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim
				4.1.1.9	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim
				4.1.1.10	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
					Organik Semusim
				4.1.1.11	Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim
				4.1.1.12	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan
				4.1.1.13	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan
				4.1.1.14	Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi
				4.1.1.15	Meningkatkan Produksi Tanaman Lada
				4.1.1.16	Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao
				4.1.1.17	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit
				4.1.1.18	Meningkatkan Produksi Tanaman Karet
				4.1.1.19	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa
				4.1.1.20	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya
				4.1.1.21	Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu
				4.1.1.22	Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau
				4.1.1.23	Meningkatkan Produksi Ternak Sapi
				4.1.1.24	Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau
				4.1.1.25	Meningkatkan Produksi Ternak Kambing
				4.1.1.26	Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
				4.1.1.27	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur
				4.1.1.28	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging
				4.1.1.29	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras
				4.1.1.30	Meningkatkan Produksi Ternak Itik
				4.1.1.31	Meningkatkan Produksi Ikan Lele
				4.1.1.32	Meningkatkan Produksi Ikan Nila
				4.1.1.33	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame
				4.1.1.34	Meningkatkan Produksi Ikan Emas
				4.1.1.35	Meningkatkan Produksi Ikan Patin
				4.1.1.36	Meningkatkan Produksi Ikan Baung
				4.1.1.37	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya
				4.1.1.38	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele
				4.1.1.39	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila
				4.1.1.40	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame
				4.1.1.41	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas
				4.1.1.42	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya
				4.1.1.43	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
				4.1.1.44	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
				4.1.1.45	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan
				4.1.1.46	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani
				4.1.1.47	Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan
		4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	4.1.2.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri
				4.1.2.2	Meningkatkan Produksi Industri Pangan
				4.1.2.3	Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik
				4.1.2.4	Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu
				4.1.2.5	Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal
				4.1.2.6	Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi
				4.1.2.7	Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH
				4.1.2.8	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri
		4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	4.1.3.1	Pengembangan Jasa Konstruksi
		4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	4.1.4.1	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor
				4.1.4.2	Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri
				4.1.4.3	Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
					Perdagangan
				4.1.4.4	Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, dan Tera Ulang
				4.1.4.5	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	4.1.5.1	Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum
				4.1.5.2	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
				4.1.5.3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
		4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	4.1.6.1	Meningkatkan Kunjungan Pariwisata
		4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	4.1.7.1	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				4.1.7.2	Meningkatkan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				4.1.7.3	Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP
				4.1.7.4	Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
				4.1.7.5	Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi
		4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	4.1.8.1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro
				4.1.8.2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
					Usaha Kecil
				4.1.8.3	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	4.1.9.1	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto
		4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	4.1.10.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan
				4.1.10.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja
				4.1.10.3	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
				4.1.10.4	Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial
		4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	4.1.11.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
				4.1.11.2	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif
		4.1.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	4.1.12.1	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
				4.1.12.2	Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				4.1.12.3	Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
				4.1.12.4	Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten
		4.1.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	4.1.13.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang
				4.1.13.2	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang
				4.1.13.3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
				4.1.13.4	Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung dan Lingkungannya
		4.1.14	Terkendalinya Inflasi	4.1.13.1	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
				4.1.13.2	Terkendalinya Harga Pangan Pokok
				4.1.13.3	Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian

6.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka penjabaran strategi perlu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Secara umum tahapan arah kebijakan di jabarkan sebagai berikut:

- Arah Kebijakan Tahun 2021 adalah membangun ketahanan sumberdaya manusia, ketahanan ekonomi, penataan birokrasi, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- Arah Kebijakan Tahun 2022 adalah Meningkatkan ketahanan sumberdaya manusia, melakukan pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas birokrasi, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- Arah Kebijakan Tahun 2023 adalah Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia, percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan akuntabilitas birokrasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Arah Kebijakan 2024 adalah Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, mengembangkan produk unggulan daerah, meningkatkan kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Arah Kebijakan Tahun 2025 adalah Percepatan pembangunan sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, percepatan pengembangan produk unggulan daerah, percepatan kinerja birokrasi, dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Arah Kebijakan Tahun 2026 adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

TABEL 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	1.1.1.1	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten
		1.1.1.2	Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.1.1.3	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		1.1.1.4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	1.1.2.1	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
		1.1.2.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala
		1.1.2.3	Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.1.2.4	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.1.3.1	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu
1.1.4	Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah	1.1.4.1	Melakukan evaluasi internal sesuai standar	Melakukan evaluasi internal sesuai standar	Melakukan evaluasi internal sesuai standar	Melakukan evaluasi internal sesuai standar	Melakukan evaluasi internal sesuai standar	Melakukan evaluasi internal sesuai standar
1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	1.1.5.1	Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati	Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati	Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati	Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati	Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati	Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati
1.1.6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	1.1.6.1	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1.1.6.2	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan
		1.1.6.3	Meningkatkan kualitas SAKIP RSUD	Meningkatkan kualitas SAKIP RSUD	Meningkatkan kualitas SAKIP RSUD	Meningkatkan kualitas SAKIP RSUD	Meningkatkan kualitas SAKIP RSUD	Meningkatkan kualitas SAKIP RSUD
		1.1.6.4	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum
		1.1.6.5	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP
		1.1.6.6	Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD
		1.1.6.7	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial
		1.1.6.8	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.1.6.9	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB
		1.1.6.10	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan
		1.1.6.11	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH
		1.1.6.12	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		1.1.6.13	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK
		1.1.6.14	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan
		1.1.6.15	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo
		1.1.6.16	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM
		1.1.6.17	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP
		1.1.6.18	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar
		1.1.6.19	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		1.1.6.20	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.1.6.21	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan
		1.1.6.22	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan
		1.1.6.23	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		1.1.6.24	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah
		1.1.6.25	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD	Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD
		1.1.6.26	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA
		1.1.6.27	Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD	Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD
		1.1.6.28	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA
		1.1.6.29	Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM	Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM	Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM	Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM	Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM	Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM
		1.1.6.30	Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat	Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat	Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat	Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat	Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat	Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat
		1.1.6.31	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu
		1.1.6.32	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui
		1.1.6.33	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.1.6.34	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu
		1.1.6.35	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga
		1.1.6.36	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu
		1.1.6.37	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung
		1.1.6.38	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba
		1.1.6.39	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas
		1.1.6.40	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan
		1.1.6.41	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin
		1.1.6.42	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar
		1.1.6.43	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga
		1.1.6.44	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung
		1.1.6.45	Meningkatkan kualitas SAKIP	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kecamatan Umpu Semenguk	SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk	SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk	SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk	SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk	SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk
		1.1.6.46	Meningkatkan kualitas SAKIP Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas SAKIP Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas SAKIP Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas SAKIP Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas SAKIP Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas SAKIP Badan Kesbangpol
1.1.7	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.1.7.1	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD
1.2.1	Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1.2.1.1	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran
1.2.2	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	1.2.2.1	Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
1.2.3	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.2.3.1	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah
1.2.4	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	1.2.4.1	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Optimalisasi Penyerapan Anggaran
1.2.5	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang	1.2.5.1	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah	Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Baik							
1.2.6	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1.2.6.1	Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan	Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan	Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan	Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan	Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan	Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan
		1.2.6.2	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
1.3.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1.3.1.1	Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah
		1.3.1.2	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah
		1.3.1.3	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
		1.3.1.4	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar
		1.3.1.5	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan
		1.3.1.6	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar
		1.3.1.7	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan	Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
						Timbangan		Timbangan
		1.3.1.8	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
		1.3.1.9	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
		1.3.1.10	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)
		1.3.1.11	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)
		1.3.1.12	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)
		1.3.1.13	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)
		1.3.1.14	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan
		1.3.1.15	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan	Meningkatkan Pendapatan Dari	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan	Meningkatkan Pendapatan Dari

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan
		1.3.1.16	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
		1.3.1.17	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir
		1.3.1.18	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)
		1.3.1.19	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
1.4.1	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	1.4.1.1	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP
		1.4.1.2	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan
		1.4.1.3	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan
		1.4.1.4	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.4.1.5	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial
		1.4.1.6	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan
		1.4.1.7	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.4.1.8	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.4.1.9	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol
1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1.4.2.1	Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik
		1.4.2.2	Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik	Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik	Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik	Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik	Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik	Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik
		1.4.2.3	Melakukan survei pelayanan publik	Melakukan survei pelayanan publik	Melakukan survei pelayanan publik	Melakukan survei pelayanan publik	Melakukan survei pelayanan publik	Melakukan survei pelayanan publik

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.4.2.4	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Kinerja DPRD	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Kinerja DPRD	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Kinerja DPRD	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Kinerja DPRD	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Kinerja DPRD	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Kinerja DPRD
1.4.3	Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala	1.4.3.1	Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum	Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum	Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum	Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum	Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum	Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum
		1.4.3.2	Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah	Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah	Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah	Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah	Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah	Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah
		1.4.3.3	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.4.4	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik	1.4.4.1	Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik	Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik	Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik	Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik	Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik	Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik
1.5.1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.5.1.1	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi
1.5.2	Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.5.2.1	Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi	Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi	Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi	Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi	Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi	Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi
1.5.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa	1.5.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
1.6.1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1.6.1.1	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja
1.6.2	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	1.6.2.1	Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian	Meningkatkan kualitas tertib administrasi	Meningkatkan kualitas tertib administrasi	Meningkatkan kualitas tertib administrasi	Meningkatkan kualitas tertib administrasi	Meningkatkan kualitas tertib administrasi

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				kepegawaian	kepegawaian	kepegawaian	kepegawaian	kepegawaian
		1.6.2.2	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara
		1.6.2.3	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1.6.2.4	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan
		1.6.2.5	Meningkatkan kualitas ASN RSUD	Meningkatkan kualitas ASN RSUD	Meningkatkan kualitas ASN RSUD	Meningkatkan kualitas ASN RSUD	Meningkatkan kualitas ASN RSUD	Meningkatkan kualitas ASN RSUD
		1.6.2.6	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum
		1.6.2.7	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP
		1.6.2.8	Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD	Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD	Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD	Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD	Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD	Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD
		1.6.2.9	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial
		1.6.2.10	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		1.6.2.11	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB
		1.6.2.12	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan
		1.6.2.13	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.6.2.14	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		1.6.2.15	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PMPK	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PMPK
		1.6.2.16	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan
		1.6.2.17	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo
		1.6.2.18	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM
		1.6.2.19	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP
		1.6.2.20	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar
		1.6.2.21	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		1.6.2.22	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan
		1.6.2.23	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan
		1.6.2.24	Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP	Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP
		1.6.2.25	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		1.6.2.26	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.6.2.27	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD
		1.6.2.28	Meningkatkan kualitas ASN Bappeda	Meningkatkan kualitas ASN Bappeda	Meningkatkan kualitas ASN Bappeda	Meningkatkan kualitas ASN Bappeda	Meningkatkan kualitas ASN Bappeda	Meningkatkan kualitas ASN Bappeda
		1.6.2.29	Meningkatkan kualitas ASN BPKAD	Meningkatkan kualitas ASN BPKAD	Meningkatkan kualitas ASN BPKAD	Meningkatkan kualitas ASN BPKAD	Meningkatkan kualitas ASN BPKAD	Meningkatkan kualitas ASN BPKAD
		1.6.2.30	Meningkatkan kualitas ASN Bapenda	Meningkatkan kualitas ASN Bapenda	Meningkatkan kualitas ASN Bapenda	Meningkatkan kualitas ASN Bapenda	Meningkatkan kualitas ASN Bapenda	Meningkatkan kualitas ASN Bapenda
		1.6.2.31	Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM	Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM	Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM	Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM	Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM	Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM
		1.6.2.32	Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat	Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat	Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat	Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat	Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat	Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat
		1.6.2.33	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu
		1.6.2.34	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui
		1.6.2.35	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit
		1.6.2.36	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu
		1.6.2.37	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga
		1.6.2.38	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu
		1.6.2.39	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung
		1.6.2.40	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
						Tuba		Tuba
		1.6.2.41	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas
		1.6.2.42	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan
		1.6.2.43	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin
		1.6.2.44	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar
		1.6.2.45	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga
		1.6.2.46	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung
		1.6.2.47	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk	Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk
		1.6.2.48	Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol	Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol
1.6.3	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi	1.6.3.1	Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi
1.6.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.6.4.1	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		1.6.4.2	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas	Menyelenggarakan Administrasi Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas	Menyelenggarakan Administrasi Umum

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.6.4.3	Menyelenggarakan Administrasi Umum RSUD	Menyelenggarakan Administrasi Umum RSUD	Menyelenggarakan Administrasi Umum RSUD	Menyelenggarakan Administrasi Umum RSUD	Menyelenggarakan Administrasi Umum RSUD	Menyelenggarakan Administrasi Umum RSUD
		1.6.4.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum
		1.6.4.5	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Satpol PP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Satpol PP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Satpol PP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Satpol PP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Satpol PP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Satpol PP
		1.6.4.6	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD
		1.6.4.7	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial
		1.6.4.8	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		1.6.4.9	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB
		1.6.4.10	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan
		1.6.4.11	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup
		1.6.4.12	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.6.4.13	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK
		1.6.4.14	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan
		1.6.4.15	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo
		1.6.4.16	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM
		1.6.4.17	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP
		1.6.4.18	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar
		1.6.4.19	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		1.6.4.20	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan
		1.6.4.21	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan
		1.6.4.22	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP
		1.6.4.23	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan
		1.6.4.24	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah
		1.6.4.25	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD
		1.6.4.26	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda
		1.6.4.27	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD	Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD
		1.6.4.28	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda	Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda
		1.6.4.29	Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM	Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM	Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM	Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM	Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM	Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM
		1.6.4.30	Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat	Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat	Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat	Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat	Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat	Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat
		1.6.4.31	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu
		1.6.4.32	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui
		1.6.4.33	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit
		1.6.4.34	Menyelenggarakan Administrasi Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum	Menyelenggarakan Administrasi Umum

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kecamatan Baradatu	Kecamatan Baradatu	Kecamatan Baradatu	Kecamatan Baradatu	Kecamatan Baradatu	Kecamatan Baradatu
		1.6.4.35	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga
		1.6.4.36	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu
		1.6.4.37	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Agung
		1.6.4.38	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba
		1.6.4.39	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas
		1.6.4.40	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan
		1.6.4.41	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin
		1.6.4.42	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar
		1.6.4.43	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga
		1.6.4.44	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.6.4.45	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk	Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk
		1.6.4.46	Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol	Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol	Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol	Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol	Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol	Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol
1.6.5	Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	1.6.5.1	Menata Administrasi Pemerintahan	Menata Administrasi Pemerintahan	Menata Administrasi Pemerintahan	Menata Administrasi Pemerintahan	Menata Administrasi Pemerintahan	Menata Administrasi Pemerintahan
		1.6.5.2	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		1.6.5.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.6.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan	1.6.6.1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
		1.6.6.2	Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		1.6.6.3	Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		1.6.6.4	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan
1.7.1	Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.7.1.1	Pengembangan inovasi dan teknologi	Pengembangan inovasi dan teknologi	Pengembangan inovasi dan teknologi	Pengembangan inovasi dan teknologi	Pengembangan inovasi dan teknologi	Pengembangan inovasi dan teknologi
1.7.2	Meningkatkan	1.7.2.1	Meningkatkan penelitian dan	Meningkatkan penelitian	Meningkatkan penelitian	Meningkatkan penelitian	Meningkatkan penelitian	Meningkatkan penelitian

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Penelitian dan Pengembangan		pengembangan Pembangunan Daerah	dan pengembangan Pembangunan Daerah	dan pengembangan Pembangunan Daerah	dan pengembangan Pembangunan Daerah	dan pengembangan Pembangunan Daerah	dan pengembangan Pembangunan Daerah
1.8.1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	1.8.1.1	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola
1.8.2	Meningkatkan Keamanan Informasi	1.8.2.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
1.9.1	Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal	1.9.1.1	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal
1.9.2	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	1.9.2.1	Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE	Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE	Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE	Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE	Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE	Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE
1.9.3	Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE	1.9.3.1	Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE	Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE	Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE	Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE	Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE	Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE
1.9.4	Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE	1.9.4.1	Meningkatkan Aspek Layanan SPBE	Meningkatkan Aspek Layanan SPBE	Meningkatkan Aspek Layanan SPBE	Meningkatkan Aspek Layanan SPBE	Meningkatkan Aspek Layanan SPBE	Meningkatkan Aspek Layanan SPBE
1.10.1	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	1.10.1.1	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan
		1.10.1.2	Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan
		1.10.1.3	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak
		1.10.1.4	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan
		1.10.1.5	Meningkatkan Pengelolaan	Meningkatkan Pengelolaan	Meningkatkan Pengelolaan	Meningkatkan Pengelolaan Profil	Meningkatkan Pengelolaan	Meningkatkan Pengelolaan Profil

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Profil Kependudukan	Profil Kependudukan	Profil Kependudukan	Kependudukan	Profil Kependudukan	Kependudukan
1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip	1.11.1.1	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip
1.11.2	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan	1.11.2.1	Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola	Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola	Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola	Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola	Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola	Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola
		1.11.2.1	Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan
2.1.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan	2.1.1.1	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan
2.1.2	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.1.2.1	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
2.1.3	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat	21.3.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
2.2.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan	2.2.1.1	Mengendalikan Pencemaran Sungai	Mengendalikan Pencemaran Sungai	Mengendalikan Pencemaran Sungai	Mengendalikan Pencemaran Sungai	Mengendalikan Pencemaran Sungai	Mengendalikan Pencemaran Sungai
		2.2.1.2	Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan	Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan	Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan	Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi	Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan	Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kualitas Air	Kualitas Air	Kualitas Air	dan Kualitas Air	Kualitas Air	dan Kualitas Air
		2.2.1.3	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
2.2.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat	2.2.2.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
2.3.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara	2.3.1.1	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara
2.3.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat	2.3.2.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
2.4.1	Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah	2.4.1.1	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R
		2.4.1.2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
2.5.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	2.5.1.1	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Lingkungan Hidup (RPPLH)		RPPLH Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten
2.5.2	Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	2.5.1.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
2.6.1	Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.6.1.1	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.7.1	Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	2.7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten
		2.7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
3.1.1	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	3.1.1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil
		3.1.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.1.2	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	3.1.2.1	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir
		3.1.2.2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
3.1.3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	3.1.3.1	Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)
		3.1.3.2	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
		3.1.3.3	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)
		3.1.3.4	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar
		3.1.3.5	Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
3.1.4	Menurunkan Angka Kesakitan	3.1.4.1	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar
		3.1.4.2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.1.4.3	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
		3.1.4.4	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar
		3.1.4.5	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar
		3.1.4.6	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
		3.1.4.7	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
		3.1.4.8	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten
		3.1.4.9	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas
3.1.5	Meningkatkan Mutu	3.1.5.1	Meningkatkan Ketersediaan	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Pelayanan Kesehatan		Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%)
		3.1.5.2	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%)	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%)
		3.1.5.3	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%)	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%)	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%)	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%)	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%)	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%)
		3.1.5.4	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas
		3.1.5.5	Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas
		3.1.5.6	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga
		3.1.5.7	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
		3.1.5.8	Meningkatkan Pembinaan Posyandu	Meningkatkan Pembinaan Posyandu	Meningkatkan Pembinaan Posyandu	Meningkatkan Pembinaan Posyandu	Meningkatkan Pembinaan Posyandu	Meningkatkan Pembinaan Posyandu
		3.1.5.9	Meningkatkan Pengeolaan	Meningkatkan Pengeolaan	Meningkatkan Pengeolaan	Meningkatkan	Meningkatkan Pengeolaan	Meningkatkan

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Keuangan BLUD di Puskesmas	Keuangan BLUD di Puskesmas	Keuangan BLUD di Puskesmas	Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas	Keuangan BLUD di Puskesmas	Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas
3.1.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA	3.1.6.1	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit
		3.1.6.2	Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD	Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD	Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD	Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD	Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD	Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD
		3.1.6.3	Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS
3.1.7	Meningkatkan Kualitas Air Minum	3.1.7.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten
3.1.8	Meningkatkan Kualitas Perumahan	3.1.8.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		3.1.8.2	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten
3.2.1	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	3.2.1.1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD
		3.2.1.2	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD
		3.2.1.3	Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.2.1.4	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		3.2.1.5	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD
		3.2.1.6	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD
		3.2.1.7	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD
		3.2.1.8	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD
		3.2.1.9	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD
		3.2.1.10	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini
		3.2.1.11	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
		3.2.1.12	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		3.2.1.13	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD
		3.2.1.14	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.2.2	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar	3.2.2.1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD
		3.2.2.2	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD
		3.2.2.3	Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik	Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik	Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik	Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik	Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik	Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik
		3.2.2.4	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik
		3.2.2.5	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik
		3.2.2.6	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD
		3.2.2.7	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik
		3.2.2.8	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD
		3.2.2.9	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.2.2.10	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD
		3.2.2.11	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD
		3.2.2.12	Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD
		3.2.2.13	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD
		3.2.2.14	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar
		3.2.2.15	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
		3.2.2.16	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		3.2.2.17	Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar
3.2.3	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	3.2.3.1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP
		3.2.3.2	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP
		3.2.3.3	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Kualitas

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.4	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.5	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.6	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.7	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.8	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.9	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.10	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat
		3.2.3.11	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik
		3.2.3.12	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.2.3.13	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP
		3.2.3.14	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		3.2.3.15	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		3.2.3.16	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
		3.2.3.17	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP
		3.2.3.18	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
		3.2.3.19	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		3.2.3.20	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP
3.2.4	Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi	3.2.4.1	Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi	Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi	Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi	Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi	Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi	Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi
		3.2.4.2	Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah
3.3.1	Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan	3.3.1.1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.3.1.2	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan
		3.3.1.3	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan Kesetaraaan	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan Kesetaraaan	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan Kesetaraaan	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan Kesetaraaan	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan Kesetaraaan	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan Kesetaraaan
		3.3.1.4	Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan
		3.3.1.5	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan
		3.3.1.6	Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan
		3.3.1.7	Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan
		3.3.1.8	Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kesetaraan	Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kesetaraan
		3.3.1.9	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan
		3.3.1.10	Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan	Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan	Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan	Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan	Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan	Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan
		3.3.1.11	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan
		3.3.1.12	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kesetaraan	Kesetaraan	Kesetaraan	Kesetaraan	Kesetaraan	Kesetaraan
3.4.1	Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3.4.1.1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.2	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.3	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.4	Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.5	Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.6	Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.7	Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti
		3.4.1.8	Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.9	Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial
		3.4.1.10	Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.4.1.11	Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial
3.4.2	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.4.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		3.4.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3.5.1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah	3.5.1.1	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan
		3.5.1.2	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan
		3.5.1.3	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
		3.5.1.4	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan
		3.5.1.5	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari
		3.5.1.6	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan
		3.5.1.7	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan
3.5.2	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar	3.5.2.1	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.5.2.2	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan
		3.5.2.3	Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan
		3.5.2.4	Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
		3.5.2.5	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan	Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan	Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan	Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan	Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan
		3.5.2.6	Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan
3.6.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	3.6.1.1	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13
		3.6.1.2	Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
3.6.2	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial	3.6.2.1	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
		3.6.2.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST)	Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST)	Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST)	Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST)	Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST)	Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST)
		3.6.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah
		3.6.2.4	Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional	Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional
		3.6.2.5	Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah
		3.6.2.6	Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh
		3.6.2.7	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah
		3.6.2.8	Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU
3.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	3.6.3.1	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin
		3.6.3.2	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan
		3.6.3.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura
		3.6.3.4	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan
		3.6.3.5	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.6.3.6	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan
		3.6.3.7	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan
		3.6.3.8	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan
		3.6.3.9	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan
		3.6.3.10	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro
		3.6.3.11	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja
		3.6.3.12	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung Eks Transmigrasi	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung Eks Transmigrasi	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung Eks Transmigrasi	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung Eks Transmigrasi	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung Eks Transmigrasi	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung Eks Transmigrasi
		3.6.3.13	Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin
		3.6.3.14	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kampung
3.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak	3.6.4.1	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.6.4.2	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR
3.7.1	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	3.7.1.1	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
		3.7.1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
3.7.2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak	3.7.2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan
3.7.3	Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	3.7.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak
3.8.1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	3.8.1.1	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk
3.8.2	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	3.8.2.1	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana
3.8.3	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	3.8.3.1	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)
		3.8.3.2	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.8.3.3	Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja
		3.8.3.4	Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga
3.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung	3.9.1.1	Meningkatkan Penataan Kampung	Meningkatkan Penataan Kampung	Meningkatkan Penataan Kampung	Meningkatkan Penataan Kampung	Meningkatkan Penataan Kampung	Meningkatkan Penataan Kampung
		3.9.1.2	Meningkatkan Kerjasama Kampung	Meningkatkan Kerjasama Kampung	Meningkatkan Kerjasama Kampung	Meningkatkan Kerjasama Kampung	Meningkatkan Kerjasama Kampung	Meningkatkan Kerjasama Kampung
		3.9.1.3	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung
		3.9.1.4	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung
		3.9.1.5	Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung
3.9.2	Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi	3.9.2.1	Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi	Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi	Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi	Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi	Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi	Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi
3.9.3	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	3.9,3.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9,3.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan
		3.9,3.3	Meningkatkan Koordinasi	Meningkatkan Koordinasi	Meningkatkan Koordinasi	Meningkatkan Koordinasi	Meningkatkan Koordinasi	Meningkatkan Koordinasi

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9,3.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9,3.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.4	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	3.9.4.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.4.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan
		3.9.4.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.4.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.4.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.5	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu	3.9.5.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.5.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan
		3.9.5.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.5.4	Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum
		3.9.5.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.6	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui	3.9.6.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan
		3.9.6.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.6.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.6.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.7	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu	3.9.7.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.7.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.7.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.7.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.7.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.9.8	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga	3.9.8.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.8.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.8.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.8.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.8.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.9	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba	3.9.9.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.9.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.9.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.9.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.9.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.10	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung	3.9.10.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9. 10.2	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kampung	Kampung	Kampung	Masyarakat Kampung	Kampung	Masyarakat Kampung
		3.9. 10.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9. 10.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9. 10.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.11	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan	3.9.11.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9. 11.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9. 11.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9. 11.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9. 11.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.12	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas	3.9.12.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.12.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.12.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.9.12.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.12.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.13	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin	3.9.13.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.13.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.13.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.13.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.13.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.14	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar	3.9.14.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.14.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.14.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.14.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.14.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.9.15	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga	3.9.15.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.15.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.15.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.15.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.15.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.16	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung	3.9.16.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.16.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		3.9.16.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.16.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.16.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.9.17	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk	3.9.17.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3.9.17.2	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Kampung	Kampung	Kampung	Masyarakat Kampung	Kampung	Masyarakat Kampung
		3.9.17.3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3.9.17.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3.9.17.5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung
3.10.1	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	3.10.1.1	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)
3.10.2	Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan	3.10.2.1	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan
3.11.1	Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda	3.11.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula
3.11.2	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor	3.11.2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula,	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten
3.11.3	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader	3.11.3.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.11.4	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	3.11.4.1	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten
3.11.5	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	3.11.5.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
3.12.1	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	3.12.1.1	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi
3.12.2	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan	3.12.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
3.12.3	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi	3.12.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
3.13.1	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah	3.13.1.1	Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan
		3.13.1.2	Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan	Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan	Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan	Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan	Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan	Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan
3.13.2	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat	3.13.1.2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten
3.13.3	Melestarikan Kesenian Tradisonal	3.13.2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.13.4	Pembinaan Sejarah Lokal	3.13.4.1	Pembinaan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah Lokal
3.13.5	Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya	3.13.5.1	Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya
3.14.1	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana	3.14.1,1	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana
3.14.2	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	3.14.2.1	Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani	Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani	Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani	Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani	Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani	Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani
3.14.3	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	3.14.3.1	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
3.14.4	Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana Meningkatkan Penanganan Bencana	3.14.4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten
		3.14.4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten
3.14.5	Pengurangan Wilayah Rawan Bencana	3.14.5.1	Pengurangan Wilayah Banjir	Pengurangan Wilayah Banjir	Pengurangan Wilayah Banjir	Pengurangan Wilayah Banjir	Pengurangan Wilayah Banjir	Pengurangan Wilayah Banjir
3.14.6	Meningkatkan Pelayanan Bencana KebakaranMembangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana	3.14.6.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
3.14.7	Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat	3.14.7.1	Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat	Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat	Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat	Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat	Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat	Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Bencana							
3.14.8	Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran	3.14.8.1	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
3.15.1	Meningkatkan Penegakan Perda	3.15.1.1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati
3.15.2	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan	3.15.2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3.15.3	Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	3.15.3.1	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
3.16.1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.16.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.16.2	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3.16.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.16.3	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.16.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3.16.4	Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan	3.16.4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi		Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3.16.5	Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.16.5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
3.16.6	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	3.16.6.1	Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		3.16.6.2	Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
		3.16.6.3	Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
		3.16.6.4	Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat
		3.16.6.5	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong
		3.16.6.6	Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.16.6.7	Meningkatkan Penggunaan Tanah	Meningkatkan Penggunaan Tanah	Meningkatkan Penggunaan Tanah	Meningkatkan Penggunaan Tanah	Meningkatkan Penggunaan Tanah	Meningkatkan Penggunaan Tanah
3.17.1	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.17.1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
3.17.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat	3.17.2.1	Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
3.17.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.17.3.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten
3.17.4	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	3.17.4.1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten
3.17.5	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	3.17.5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten
4.1.1	Meningkatkan Produksi Padi	4.1.1.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi
		4.1.1.2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi
		4.1.1.3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi
		4.1.1.4	Pengelolaan Irigasi untuk	Pengelolaan Irigasi untuk	Pengelolaan Irigasi untuk	Pengelolaan Irigasi untuk	Pengelolaan Irigasi untuk	Pengelolaan Irigasi untuk

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Pertanaman Padi	Pertanaman Padi	Pertanaman Padi	Pertanaman Padi	Pertanaman Padi	Pertanaman Padi
		4.1.1.5	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten
4.1.2	Meningkatkan Produksi Padi Gogo	4.1.2.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo
		4.1.2.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo
		4.1.2.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo
4.1.3	Meningkatkan Produksi Padi Organik	4.1.3.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik
		4.1.3.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik
		4.1.3.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik
4.1.4	Meningkatkan Produksi Jagung	4.1.4.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung
		4.1.4.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.1.4.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung
4.1.5	Meningkatkan Produksi Ubi Kayu	4.1.5.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu
		4.1.5.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu
		4.1.5.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu
4.1.6	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	4.1.6.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya
		4.1.6.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya
		4.1.6.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya
4.1.7	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	4.1.7.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Sayuran (Olerikultura) Semusim	Sayuran (Olerikultura) Semusim	Sayuran (Olerikultura) Semusim	Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Sayuran (Olerikultura) Semusim	Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim
		4.1.7.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim
		4.1.7.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim
4.1.8	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	4.1.8.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim
		4.1.8.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim
		4.1.8.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim
4.1.9	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	4.1.9.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.1.9.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim
		4.1.9.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim
4.1.10	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	4.1.10.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim
		4.1.10.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim
		4.1.10.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim
4.1.11	Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	4.1.11.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim
		4.1.11.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim
		4.1.11.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim
4.1.12	Meningkatkan Produksi Tanaman KopiMeningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	4.1.12.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan
		4.1.12.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan
		4.1.12.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan
4.1.13	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	4.1.13.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan
		4.1.13.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Starategi		Arah Kebijakan						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan
		4.1.13.3	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan
4.1.14	Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi	4.1.14.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi
		4.1.14.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi
		4.1.14.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kopi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kopi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kopi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kopi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kopi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kopi
4.1.15	Meningkatkan Produksi Tanaman Lada	4.1.15.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada
		4.1.15.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada
		4.1.15.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.1.16	Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao	4.1.16.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao
		4.1.16.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao
		4.1.16.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao
4.1.17	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	4.1.17.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit
		4.1.17.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit
		4.1.17.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit
4.1.18	Meningkatkan Produksi Tanaman Karet	4.1.18.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet
		4.1.18.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.1.18.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet
4.1.19	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa	4.1.19.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa
		4.1.19.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa
		4.1.19.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa
4.1.20	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	4.1.20.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya
		4.1.20.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya
		4.1.20.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya
4.1.21	Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu	4.1.21.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.1.21.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu
		4.1.21.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu
4.1.22	Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau	4.1.22.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau
		4.1.22.2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau
		4.1.22.3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tembakau	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tembakau	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tembakau	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tembakau	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tembakau	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tembakau
4.1.23	Meningkatkan Produksi Ternak Sapi	4.1.23.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi
		4.1.23.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi
		4.1.23.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner
4.1.24	Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau	4.1.24.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.1.24.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau
		4.1.24.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner
4.1.25	Meningkatkan Produksi Ternak Kambing	4.1.25.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing
		4.1.25.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing
		4.1.25.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner
4.1.26	Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya	4.1.26.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya
		4.1.26.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya
		4.1.26.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner
4.1.27	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam	4.1.27.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Petelur		Peternakan Ayam Petelur	Peternakan Ayam Petelur	Peternakan Ayam Petelur	Peternakan Ayam Petelur	Peternakan Ayam Petelur	Peternakan Ayam Petelur
		4.1.27.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur
		4.1.27.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner
4.1.28	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging	4.1.28.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging
		4.1.28.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging
		4.1.28.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Veteriner
4.1.29	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras	4.1.29.1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras
		4.1.29.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras
		4.1.29.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner
4.1.30	Meningkatkan	4.1.30.1	Penyediaan Dan	Penyediaan Dan	Penyediaan Dan	Penyediaan Dan	Penyediaan Dan	Penyediaan Dan

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Produksi Ternak Itik		Pengembangan Sarana Peternakan Itik	Pengembangan Sarana Peternakan Itik	Pengembangan Sarana Peternakan Itik	Pengembangan Sarana Peternakan Itik	Pengembangan Sarana Peternakan Itik	Pengembangan Sarana Peternakan Itik
		4.1.30.2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik
		4.1.30.3	Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner
4.1.31	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	4.1.31.1	Pengelolaan Budidaya Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Ikan Lele
		4.1.31.2	Pengawasaan Budidaya Ikan Lele	Pengawasaan Budidaya Ikan Lele	Pengawasaan Budidaya Ikan Lele	Pengawasaan Budidaya Ikan Lele	Pengawasaan Budidaya Ikan Lele	Pengawasaan Budidaya Ikan Lele
4.1.32	Meningkatkan Produksi Ikan Nila	4.1.32.1	Pengelolaan Budidaya Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Ikan Nila
		4.1.32.2	Pengawasaan Budidaya Ikan Nila	Pengawasaan Budidaya Ikan Nila	Pengawasaan Budidaya Ikan Nila	Pengawasaan Budidaya Ikan Nila	Pengawasaan Budidaya Ikan Nila	Pengawasaan Budidaya Ikan Nila
4.1.33	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	4.1.33.1	Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame
		4.1.33.2	Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame	Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame	Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame	Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame	Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame	Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame
4.1.34	Meningkatkan Produksi Ikan Emas	4.1.34.1	Pengelolaan Budidaya Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Ikan Emas
		4.1.34.2	Pengawasaan Budidaya Ikan Emas	Pengawasaan Budidaya Ikan Emas	Pengawasaan Budidaya Ikan Emas	Pengawasaan Budidaya Ikan Emas	Pengawasaan Budidaya Ikan Emas	Pengawasaan Budidaya Ikan Emas
4.1.35	Meningkatkan Produksi Ikan Patin	4.1.35.1	Pengelolaan Budidaya Ikan Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin
		4.1.35.2	Pengawasaan Budidaya Ikan Patin	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin
4.1.36	Meningkatkan Produksi Ikan Baung	4.36.1	Pengelolaan Budidaya Ikan Baung	Pengelolaan Budidaya Ikan Baung	Pengelolaan Budidaya Ikan Baung	Pengelolaan Budidaya Ikan Baung	Pengelolaan Budidaya Ikan Baung	Pengelolaan Budidaya Ikan Baung

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.36.2	Pengawasaan Budidaya Ikan Baung	Pengawasaan Budidaya Ikan Baung	Pengawasaan Budidaya Ikan Baung	Pengawasaan Budidaya Ikan Baung	Pengawasaan Budidaya Ikan Baung	Pengawasaan Budidaya Ikan Baung
4.1.37	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya	4.1.37.1	Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya	Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya	Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya	Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya	Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya	Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya
		4.1.37.2	Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya	Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya	Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya	Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya	Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya	Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya
4.1.38	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	4.1.38.1	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele
		4.1.38.2	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele
4.1.39	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	4.1.39.1	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila
		4.1.39.2	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila
4.1.40	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	4.1.40.1	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Gurame
		4.1.40.2	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame
4.1.41	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas	4.1.41.1	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas
		4.1.41.2	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas	Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas
4.1.42	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	4.1.42.1	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya	Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		4.1.42.2	Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya	Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya	Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya	Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya	Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya	Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya
4.1.43	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	4.1.43.1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
		4.1.43.2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap
4.1.44	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	4.1.44.1	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan
4.1.45	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	4.1.45.1	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan
4.1.46	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	4.1.46.1	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula
		4.1.46.2	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut
		4.1.46.3	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya
		4.1.46.4	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama
		4.1.46.5	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan
4.1.47	Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan	4.1.47.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4.2.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri	4.2.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.2.2	Meningkatkan Produksi Industri Pangan	4.2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan
4.2.3	Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik	4.2.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
4.2.4	Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu	4.2.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu
4.2.5	Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	4.2.5.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam
4.2.6	Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi	4.2.6.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi
4.2.7	Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	4.2.7.1	Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.2.8	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	4.2.8.1	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri
		4.2.8.2	Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional
4.3.1	Pengembangan Jasa Konstruksi	4.3.1.1	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi
4.4.1	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor	4.4.1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten
4.4.2	Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri	4.4.2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
4.4.3	Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi	4.4.3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
4.4.4	Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	4.4.4.1	Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
4.4.5	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4.4.5.1	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
4.5.1	Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum	4.5.1.1	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.5.2	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	4.5.2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
4.5.3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya	4.5.4.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
		4.5.4.2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4.6.1	Meningkatkan Kunjungan Pariwisata	4.6.1.1	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera
		4.6.1.2	Meningkatkan Pemasaran Wisata	Meningkatkan Pemasaran Wisata	Meningkatkan Pemasaran Wisata	Meningkatkan Pemasaran Wisata	Meningkatkan Pemasaran Wisata	Meningkatkan Pemasaran Wisata
		4.6.1.3	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata
4.7.1	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	4.7.1.1	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
4.7.2	Meningkatkan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	4.7.2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.7.3	Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP	4.7.3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
4.7.4	Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	4.7.4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
4.7.5	Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi	4.7.5.1	Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi	Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi	Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi	Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi	Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi	Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi
		4.7.5.2	Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi	Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi	Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi	Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi	Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi	Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi
		4.7.5.3	Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi	Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi	Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi	Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi	Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi	Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi
4.8.1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro	4.8.1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
4.8.2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	4.8.2.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
4.8.3	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan	4.8.2.2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Kecil	Mikro Kecil	Mikro Kecil	Mikro Kecil	Mikro Kecil	Mikro Kecil
4.9.1	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.9.1.1	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal
		4.9.1.2	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal
		4.9.1.3	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal
		4.9.1.4	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		4.9.1.5	Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi	Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi	Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi	Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi	Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi	Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi
4.10.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan	4.10.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
4.10.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	4.10.2.1	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.10.3	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	4.10.3.1	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja
4.10.4	Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial	4.10.4.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten
4.11.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.11.1.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual					Kreatif		Kreatif
4.11.2	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif	4.11.2.1	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
4.12.1	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.12.1.1	Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
		4.12.1.2	Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten
4.12.2	Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.12.2.1	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
		4.12.2.2	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
4.12.3	Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	4.12.3.1	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten
		4.12.3.2	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten
4.12.4	Meningkatkan Saluran Drainase Jalan Kabupaten	4.12.4.1	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik
4.13.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	4.13.1.1	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang
4.13.2	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	4.13.2.1	Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang
4.13.3	Meningkatnya Kualitas	4.13.3.1	Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran	Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak	Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak	Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak	Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak	Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak

Starategi		Arah Kebijakan						
		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Pengendalian Ruang		Tata Ruang	Lanjut Pelanggaran Tata Ruang	Lanjut Pelanggaran Tata Ruang	Lanjut Pelanggaran Tata Ruang	Lanjut Pelanggaran Tata Ruang	Lanjut Pelanggaran Tata Ruang
4.13.4	Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung Dan Lingkungannya	4.13.4.1	Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah	Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah	Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah	Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah	Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah	Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah
		4.13.4.2	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya
4.14.1	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	4.14.1.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten
4.14.2	Terkendalinya Harga Pangan Pokok	4.14.2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.14.3	Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	4.14.3.1	Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian

6.3 Program Pembangunan Daerah

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan diatas, maka untuk pelaksanaaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan Nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																		
1	**Meningkatkan Kualitas Birokrasi**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**51,13**	**51,43**	**970.990.062.896**	**51,93**	**1.039.526.849.128**	**52,43**	**1.062.629.114.618**	**52,93**	**1.113.028.096.989**	**53,53**	**1.087.722.598.635**	**53,93**	**1.085.209.569.906**	**53,93**	**6.359.106.292.172**	
1,1	**Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten**	**Poin**	**57,64**	**58,64**	**16.679.916.423**	**59,64**	**18.389.626.384**	**60,64**	**20.170.744.193**	**61,64**	**19.541.626.321**	**62,64**	**24.539.002.635**	**63,64**	**24.539.002.635**	**63,64**	**123.859.918.591**	
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	20,09	20,3	**14.333.751.860**	20,5	**15.792.356.041**	21,1	**17.079.384.693**	21,8	**16.379.384.693**	22,5	**20.345.098.979**	22,5	**20.345.098.979**	22,5	**104.275.075.244**	Bappeda
1.1.1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	%	100	100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
1.1.1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	200.000.000	100	500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	6.800.000.000	Bappeda
1.1.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100	416.681.299	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
1.1.1.4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	%	n/a	100	13.618.136.900	100	14.707.928.800	100	14.707.928.800	100	14.707.928.800	100	17.707.928.800	100	17.707.928.800	100	93.157.780.900	Sekwan
1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	14,22	14,32	**1.102.878.880**	14,42	**1.234.204.841**	14,85	**1.352.433.653**	15,3	**1.352.433.653**	15,8	**1.978.147.939**	15,8	**1.978.147.939**	15,8	**8.998.246.904**	Bappeda /Sekretariat Daerah
1.1.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu	%	n/a	100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
1.1.2.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu	%	n/a	100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
1.1.2.3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%	n/a	100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
1.1.2.4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan	%	n/a	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100	416.681.299	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Poin	8,86	9,15	**50.000.000**	9,45	**55.000.000**	9,75	**200.000.000**	10,15	**220.000.000**	10,55	**242.000.000**	10,55	**242.000.000**	10,55	**1.009.000.000**	Sekretariat Daerah
1.1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	%	30	40	50.000.000	50	55.000.000	60	200.000.000	70	220.000.000	80	242.000.000	80	242.000.000	80	1.009.000.000	Sekretariat Daerah
1.1.4	Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Internal	Poin	4,84	5,17	**397.525.000**	5,5	**441.125.000**	5,84	**545.970.046**	6,17	**506.265.344**	6,5	**756.265.344**	6,5	**756.265.344**	6,5	**3.403.416.076**	Inspektorat
1.1.4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Nilai SAKIP OPD	Poin	47,92	50,34	397.525.000	52,75	441.125.000	55,17	545.970.046	57,58	506.265.344	60	756.265.344	60	756.265.344	60	3.403.416.076	Inspektorat
1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Komponen Capaian Kinerja	Poin	9,63	9,83	**107.000.000**	10,07	**117.700.000**	10,35	**150.000.000**	10,7	**165.000.000**	11,05	**181.500.000**	11,05	**181.500.000**	11,05	**902.700.000**	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase IKU Bupati Yang Tercapai	%	n/a	60	107.000.000	61	117.700.000	62	150.000.000	63	165.000.000	64	181.500.000	65	181.500.000	65	902.700.000	Sekretariat Daerah
1.1.6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Poin	47,92	50,34	**616.048.183**	52,75	**687.153.001**	55,17	**755.868.301**	57,58	**831.455.132**	60	**914.600.645**	62,5	**914.600.645**	62,5	**4.719.725.907**	
1.1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	60,03	61,03	41.000.000	62,03	45.100.000	63,53	49.610.000	65,03	54.571.000	66,53	60.028.100	68,03	60.028.100	68,03	310.337.200	Dikbud
1.1.6.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES	Poin	61,72	62,72	27.291.500	63,72	35.020.650	65,22	38.522.715	66,72	42.374.987	68,22	46.612.485	69,72	46.612.485	69,72	236.434.822	Dinkes
1.1.6.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PU	Poin	50,07	52,07	28.500.000	54,07	31.350.000	56,07	34.485.000	58,07	37.933.500	60,07	41.726.850	61,07	41.726.850	61,07	215.722.200	Dinas PU
1.1.6.4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	49,16	51,16	23.650.000	53,16	26.015.000	55,16	28.616.500	57,16	31.478.150	59,16	34.625.965	60,16	34.625.965	60,16	179.011.580	Satpol PP
1.1.6.5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPBD	Poin	45,78	49,78	15.000.000	52,78	16.500.000	54,78	18.150.000	56,78	19.965.000	58,78	21.961.500	60,78	21.961.500	60,78	113.538.000	BPBD
1.1.6.6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINSOS	Poin	32,09	37,09	79.940.206	41,09	87.934.227	46,09	96.727.649	51,09	106.400.414	56,09	117.040.456	60,09	117.040.456	60,09	605.083.407	Dinsos
1.1.6.7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS NAKERTRANS	Poin	57,43	58,43	19.261.500	59,43	21.187.650	60,93	23.306.415	62,43	25.637.057	63,93	28.200.762	63,93	28.200.762	63,93	145.794.146	Nakertrans
1.1.6.8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB	Poin	31,89	37,89	9.594.600	43,89	10.554.060	48,89	11.609.466	53,89	12.770.413	57,89	14.047.454	60,89	14.047.454	60,89	72.623.446	PPPA DALDUK KB
1.1.6.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN	Poin	52,94	54,44	15.000.000	55,94	16.500.000	57,44	18.150.000	58,94	19.965.000	60,44	21.961.500	61,94	21.961.500	61,94	113.538.000	Ketahanan Pangan
1.1.6.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS LH	Poin	50,26	52,26	26.000.000	54,26	28.600.000	56,26	31.460.000	58,26	34.606.000	60,26	38.066.600	61,26	38.066.600	61,26	196.799.200	Dinas LH
1.1.6.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS DUKCAPIL	Poin	17,13	32,13	8.876.000	38,13	9.763.600	43,13	10.739.960	49,13	11.813.956	55,13	12.995.352	60,13	12.995.352	60,13	67.184.219	Dukcapil
1.1.6.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PMPK	Poin	63,16	64,16	4.870.800	65,16	5.357.880	66,16	5.893.668	67,16	6.483.035	68,16	7.131.338	69,16	7.131.338	69,16	36.868.059	Dinas PMPK
1.1.6.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN	Poin	54,34	55,34	4.500.000	56,34	4.950.000	57,84	5.445.000	59,34	5.989.500	60,84	6.588.450	62,34	6.588.450	62,34	34.061.400	Dinas Perhubungan
1.1.6.14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS KOMINFO	Poin	8,78	23,78		33,78	4.500.000	43,78	4.950.000	48,78	5.445.000	53,78	5.989.500	60,78	5.989.500	60,78	26.874.000	Dinas Kominfo
1.1.6.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM	Poin	31,51	41,51	9.499.700	46,51	10.449.670	51,51	11.494.637	56,51	12.644.101	58,51	13.908.511	60,51	13.908.511	60,51	71.905.129	Koperasi UKM
1.1.6.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PM PTSP	Poin	48,22	53,22	11.500.000	56,22	12.650.000	57,72	13.915.000	59,22	15.306.500	60,72	16.837.150	62,22	16.837.150	62,22	87.045.800	Dinas PM & PTSP
1.1.6.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PORAPAR	Poin	31,33	41,33	13.000.000	46,33	14.300.000	51,33	15.730.000	53,33	17.303.000	55,33	19.033.300	60,78	19.033.300	60,78	98.399.600	Porapar
1.1.6.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Poin	41,73	58,64	9.500.000	59,64	10.450.000	60,64	11.495.000	61,64	12.644.500	62,64	13.908.950	62,64	13.908.950	62,64	71.907.400	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.1.6.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PERIKANAN	Poin	39,59	43,59	7.000.000	48,59	7.700.000	53,59	8.470.000	55,59	9.317.000	58,09	10.248.700	60,09	10.248.700	60,09	52.984.400	Dinas Perikanan
1.1.6.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS PERKEBUNAN	Poin	34,37	36,37	5.000.000	40,37	5.500.000	45,37	6.050.000	50,37	6.655.000	55,37	7.320.500	60,37	7.320.500	60,37	37.846.000	Dinas Perkebunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	1.1.6.21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS TPHP	Poin	60,22	61,22	22.446.000	62,22	24.690.600	63,72	27.159.660	65,22	29.875.626	66,72	32.863.189	68,22	32.863.189	68,22	169.898.263	Dinas TPHP
	1.1.6.22 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS INDAG	Poin	41,27	41,27	12.000.000	60	13.200.000	61,5	14.520.000	63	15.972.000	64,5	17.569.200	65,5	17.569.200	65,5	90.830.400	Dinas Indag
	1.1.6.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH	Poin	60,5	61,5	48.000.000	62,5	52.800.000	64	58.080.000	65,5	63.888.000	67	70.276.800	68,50	70.276.800	68,50	363.321.600	Sekretariat Daerah
	1.1.6.24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	Poin	62,17	63,17	8.500.000	64,17	9.350.000	65,67	10.285.000	67,17	11.313.500	68,67	12.444.850	70,17	12.444.850	70,17	64.338.200	Sekretariat DPRD
	1.1.6.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPEDA	Poin	64,24	65,25	19.540.400	66,25	21.494.440	67,75	23.643.884	69,25	26.008.272	70,75	28.609.100	72,25	28.609.100	72,25	147.905.196	Bappeda
	1.1.6.26 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD	Poin	60,63	61,63	65.288.777	62,63	71.817.655	64,13	78.999.420	65,63	86.899.362	67,13	95.589.298	68,63	95.589.298	68,63	494.183.811	BPKAD
	1.1.6.27 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPENDA	Poin	52,71	53,71	8.500.000	55,71	9.350.000	57,71	10.285.000	59,71	11.313.500	61,71	12.444.850	63,71	12.444.850	63,71	64.338.200	BAPENDA
	1.1.6.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BKPSDM	Poin	46,1	51,1	7.088.700	54,1	7.797.570	57,1	8.577.327	59,1	9.435.060	61,1	10.378.566	63,1	10.378.566	63,1	53.655.788	BKPSDM
	1.1.6.29 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP INSPEKTORAT	Poin	70,72	70,97	3.200.000	71,23	3.520.000	71,48	3.872.000	71,74	4.259.200	72	4.685.120	72,30	4.685.120	72,30	24.221.440	Inspektorat
	1.1.6.30 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan B. Umpu
	1.1.6.31 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Kasui
	1.1.6.32 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Banjit
	1.1.6.33 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Baradatu
	1.1.6.34 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Bahuga
	1.1.6.35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Pakuan Ratu
	1.1.6.36 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Negeri Agung
	1.1.6.37 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Way Tuba
	1.1.6.38 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan R. Tangkas
	1.1.6.39 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan G. Labuhan
	1.1.6.40 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Negara Batin
	1.1.6.41 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Negeri Besar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	1.1.6.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Buay Bahuga
	1.1.6.43 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Bumi Agung
	1.1.6.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35	5.124.350	35	26.492.200	Kec.Umpu Semenguk
	1.1.6.45 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL	Poin	46,96	51,96	10.000.000	54,96	11.000.000	56,96	12.100.000	58,46	13.310.000	59,96	14.641.000	54,96	14.641.000	54,96	75.692.000	Kesbangpol
	1.1.7 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	%	n/a	100	**72.712.500**	100	**62.087.500**	100	**87.087.500**	100	**87.087.500**	100	**121.389.730**	100	**121.389.730**	100	**551.754.460**	Inspektorat
	1.1.7.1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	%	n/a	100	72.712.500	100	62.087.500	100	87.087.500	100	87.087.500	100	121.389.730	100	121.389.730	100	551.754.460	Inspektorat
1,2	**Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Poin**	**n/a**	**80,93**	**315.499.338.756**	**82,84**	**322.001.555.756**	**84,88**	**330.023.885.374**	**87,08**	**387.885.587.546,63**	**89,43**	**324.098.885.374**	**91,96**	**324.098.885.374**	**91,96**	**2.003.608.138.181**	**BPKAD**
	1.2.1 Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Poin	n/a	12.0	**52.472.664.817**	13.20	**53.556.367.650**	14.52	**54.893.422.587**	15.97	**64.537.039.615,27**	17.57	**53.905.922.587**	19.33	**53.905.922.587**	19.33	**333.271.339.842**	BPKAD
	1.2.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	%	n/a	100	52.472.664.817	100	53.556.367.650	100	54.893.422.587	100	64.537.039.615,27	100	53.905.922.587	100	53.905.922.587	100	333.271.339.842	BPKAD
	1.2.2 Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Poin	n/a	20	**52.472.664.817**	20	**53.556.367.650**	20	**54.893.422.587**	20	**64.537.039.615,27**	20	**53.905.922.587**	20	**53.905.922.587**	20	**333.271.339.842**	BPKAD
	1.2.2.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD	%	n/a	100	52.472.664.817	100	53.556.367.650	100	54.893.422.587	100	64.537.039.615,27	100	53.905.922.587	100	53.905.922.587	100	333.271.339.842	BPKAD
	1.2.3 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	n/a	12.93	**52.472.664.817**	13.19	**53.556.367.650**	13.45	**54.893.422.587**	13.72	**64.537.039.615,27**	14.00	**53.905.922.587**	14.28	**53.905.922.587**	14.28	**333.271.339.842**	BPKAD
	1.2.3.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	%	n/a	60	52.472.664.817	61	53.556.367.650	62	54.893.422.587	63	64.537.039.615,27	64	53.905.922.587	65	53.905.922.587	65	333.271.339.842	BPKAD
	1.2.4 Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran	Poin	n/a	20	**52.472.664.817**	20.4	**53.556.367.650**	20.81	**54.893.422.587**	21.22	**64.537.039.615,27**	21.65	**53.905.922.587**	22.08	**53.905.922.587**	22.08	**333.271.339.842**	BPKAD
	1.2.4.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyerapan Anggaran	%	n/a	100	52.472.664.817	100	53.556.367.650	100	54.893.422.587	100	64.537.039.615,27	100	53.905.922.587	100	53.905.922.587	100	333.271.339.842	BPKAD
	1.2.5 Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin	n/a	1.00	**52.472.664.817**	01.05	**53.556.367.650**	1.10	**54.893.422.587**	1.16	**64.537.039.615,27**	1.22	**53.905.922.587**	1.28	**53.905.922.587**	1.28	**333.271.339.842**	BPKAD
	1.2.5.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin	n/a	1.00	52.472.664.817	01.05	53.556.367.650	1.10	54.893.422.587	1.16	64.537.039.615,27	1.22	53.905.922.587	1.28	53.905.922.587	1.28	333.271.339.842	BPKAD
	1.2.6 Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Poin	15	15	**53.136.014.672**	15	**54.219.717.505**	15	**55.556.772.442**	15	**65.200.389.470,27**	15	**54.569.272.442**	15	**54.569.272.442**	15	**337.251.438.972**	BPKAD
	1.2.6.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Opini	WTP	WTP	52.472.664.817	WTP	53.556.367.650	WTP	54.893.422.587	WTP	64.537.039.615,27	WTP	53.905.922.587	WTP	53.905.922.587	WTP	333.271.339.842	BPKAD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	1.2.6.2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	60	60	663.349.855	65	663.349.855	70	663.349.855	75,00	663.349.855	80,00	663.349.855	85,00	663.349.855	85,00	3.980.099.130	BPKAD
	1,3 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	**Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**	**Poin**	**0,563**	**0,6061**	**1.638.548.056**	**0,6463**		**0,6841**		**0,730**		**0,740**		**0,750**		**0,750**		
	1.3.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	11	4	**1.638.548.056**	5	**1.676.103.497**	6	**3.391.972.488**	7	**3.936.744.817**	8	**5.221.122.789**	9	**4.804.441.490**	9	**20.668.933.138**	Bapenda
	1.3.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	11	4	708.282.528	5	708.282.528	6	1.530.502.738	7	1.802.888.902	8	2.402.220.745	9	2.402.220.745	9	9.554.398.186	Bapenda
	1.3.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%		4	708.282.528	4,8	708.282.528	5,5	1.530.502.738	6,08	1.802.888.902	6,6	2.402.220.745	6,6	2.402.220.745	6,6	9.554.398.186	Bapenda
	1.3.1.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp	27.650.000	28.756.000		30.138.500		31.797.500		33,733,000		35,945,000		35,945,000		35,945,000	0	Dinas LH
	1.3.1.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp	186.135.000	193.580.400		202.887.150		214.055.250		227.084.700		241.975.500		241.975.500		241.975.500	0	Dinas Indag
	1.3.1.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Rp	166.141.000	162.786.640		170.925.972		180.693.170		192.088.235		205.111.166		205.111.166		205.111.166	0	Dinas Indag
	1.3.1.6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Rp	95.528.000	99.349.120		104.125.520		109.857.200		116.544.160		124,186,400		124,186,400		124,186,400	0	Dinas Indag
	1.3.1.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Tera Ulang Timbangan	Rp	0	10.000.000		10.500.000		11.100.000		11.800.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000	0	Dinas Indag
	1.3.1.8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	0	100.000.000		105.000.000		111.000.000		118,000,000		126,000,000		126,000,000		126,000,000	0	Dinas Kominfo
	1.3.1.9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	Rp	134.400.000	139.776.000		141.120.000		149.184.000		158.592.000		169.344.000		169.344.000		169.344.000	0	Dinas TPHP
	1.3.1.10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Rp	160.101.000	166.505.040		174.510.090		182.147.864		191.275.325		201.992.424		201.992.424		201.992.424	0	Dinas PU
	1.3.1.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Rp	6.467.750	6.726.460		7.049.848		7.437.913		7.890.656		8.408.076		8.408.076		8.408.076	0	Dinas PU
	1.3.1.12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Rp	25.472.250	26.491.140		27.764.753		28.764.753		29.764.753		30.764.753		30.764.753		30.764.753	0	Dinas PU
	1.3.1.13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Rp	20.000.000	20.800.000		21.800.000		23.000.000		24.400.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	0	Dinas PU
	1.3.1.14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	541.571.549	463.234.411		486.396.132		514.190.197		546.616.606		583.675.359		583.675.359		583.675.359	0	Dinas PM PTSP
	1.3.1.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Rp	12.000.000	12.480.000		13.080.000		13.800.000		14.640.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000	0	Dlnas Perikanan
	1.3.1.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	1.000.000	2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	Dinas Porapar
	1.3.1.17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp	38.800.000	40.352.000		42.292.000		44.620.000		47.336.000		50.440.000		50.440.000		50.440.000	0	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.3.1.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Rp	19.000.000	19.526.959		23.422.532		24.562.532		25.892.532		27.412.532		27.412.532		27.412.532	0	BPKAD
1.3.1.19	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100		100	1.560.136.766	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
1,4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik**	**Poin**	**9,18**	**9,20**	**5.536.974.460**	**9,22**	**6.278.475.276**	**9,24**	**6.491.131.088**	**9,26**	**6.305.708.943**	**9,28**	**7.313.786.673**	**9,30**	**6.710.200.035**	**9,30**	**38.636.276.475**	
1.4.1	Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Terhadap Stansar Pelayanan Dari Ombudsman	Poin	97,12		**2.861.862.000**		**2.559.606.500**		**2.843.816.500**		**2.711.448.167**		**3.535.223.667**		**3.535.223.667**		**18.047.180.501**	
1.4.1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Poin		83.23	737.622.000	83.45	448.900.000	84.15	550.000.000	84.15	400.000.000	85	600.000.000	90	600.000.000	90	3.336.522.000	Dinas PM & PTSP
1.4.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Poin	97	98	200.000.000	98	200.000.000	99	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Kesehatan
1.4.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan	Poin	73	74	100.000.000	75	100.000.000	76	100.000.000	77	100.000.000	78	100.000.000	80	100.000.000	80	600.000.000	Dinas Perhubungan
1.4.1.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial	Poin	92,00	93	19.000.000	95	11.000.000	96	45.200.000	97	45.200.000	98	45.200.000	100	45.200.000	100	210.800.000	Dinas Sosial
1.4.1.5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Poin	100	100	43.200.000	100	44.404.500	100	44.404.500	100	44.404.500	100	100.000.000	100	100.000.000	100	376.413.500	Dinas Nakertrans
1.4.1.6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA	Poin	100	100	1.651.090.000	100	1.601.090.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	10.552.180.000	Dinas Dukcapil
1.4.1.7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Poin	100	100	0	100	95.282.000	100	95.282.000	100	112.913.667	100	412.913.667	100	412.913.667	100	1.129.305.001	Dinas Dukcapil
1.4.1.8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP	Poin	33,5	35	23.590.000	36	31.820.000	37	31.820.000	38	31.820.000	39	50.000.000	40	50.000.000	40	219.050.000	Dinas TPHP
1.4.1.9	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standa Pelayanan Publik Di Lingkup Badan Kesbangpol	Poin	100	100	87.360.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	222.910.000	Kesbangpol
1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Survei Eksternal Pelayanan Publik	%	3,67	3,99	**2.200.000.000**	4,34	**2.649.608.000**	4,69	**2.453.053.812**	5,04	**2.400.000.000**	5,39	**2.350.000.000**	5,39	**2.350.000.000**	5,39	**14.402.661.812**	Sekretariat Daerah
1.4.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Pelayanan Publik Yang talah mengikuti diklat terkait pelayanan	%	60	60		61	449.608.000	62	253.053.812	63	200.000.000	64	150.000.000	64	150.000.000	64	1.202.661.812	BKPSDM
1.4.2.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan SOP Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi	%	60	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	85	100.000.000	85	600.000.000	Sekretariat Daerah
1.4.2.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Publik yang di Survei	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	600.000.000	Sekretariat Daerah
1.4.2.4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin		70.25	2.000.000.000	71.50	2.000.000.000	72.30	2.000.000.000	73.50	2.000.000.000	74.25	2.000.000.000	74.50	2.000.000.000	74.50	12.000.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	1.4.3 Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala	Persentase Produk Hukum yang harmonis	%	100	100	**402.399.960**	100	**1.007.173.276**	100	**1.107.173.276**	100	**1.107.173.276,00**	100	**1.307.173.276**	100	**703.586.638**	100	**5.634.679.702**	Sekretariat Daerah
	1.4.3.1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	%	0	50	151.199.980	60	453.586.638	70	503.586.638	80	503.586.638,00	100	603.586.638	100	301.793.319	100	2.517.339.851	Sekretariat Daerah
	1.4.3.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan produk hukum daerah	%	1.286	1.22	151.199.980	1.22	453.586.638	1.22	503.586.638	1.22	503.586.638,00	1.22	603.586.638	5	301.793.319	5	2.517.339.851	Sekretariat Daerah
	1.4.3.3 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000,00	100	100.000.000	100	100.000.000	100	600.000.000	Sekretariat Daerah
	1.4.4 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik	Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	43,38	51,61	**72.712.500**	54,83	**62.087.500**	58,06	**87.087.500**	61,29	**87.087.500**	64,51	**121.389.730**	64,51	**121.389.730**	64,51	**551.754.460**	Inspektorat
	1.4.4.1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	43,38	51,61	72.712.500	54,83	62.087.500	58,06	87.087.500	61,29	87.087.500	64,51	121.389.730	64,51	121.389.730	64,51	551.754.460	Inspektorat
1,5	**Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN**	**Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN**	**Poin**	**9,38**	**9,40**	**692.220.500**	**9,42**	**762.750.941**	**9,44**	**964.024.558**	**9,46**	**924.319.856**	**9,48**	**1.294.336.372**	**9,50**	**1.294.336.372**	**9,50**	**5.931.988.600**	**Inspektorat**
	1.5.1 Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3	3	**397.525.000**	3	**441.125.000**	3	**545.970.046**	3	**506.265.344**	3	**756.265.344**	3	**756.265.344**	3	**3.403.416.076**	Inspektorat
	1.5.1.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi	%	48,38	51,61	397.525.000	54,83	441.125.000	58,06	545.970.046	61,29	506.265.344	64,51	756.265.344	64,51	756.265.344	67,73	3.403.416.076	Inspektorat
	1.5.2 Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Integritas SPI	Poin	0	50	**72.712.500**	54	**62.087.500**	58	**87.087.500**	62	**87.087.500**	66	**121.389.730**	70	**121.389.730**	70	**551.754.460**	Inspektorat
	1.5.2.1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	%	48,38	51,61	72.712.500	54,83	62.087.500	58,06	87.087.500	61,29	87.087.500	64,51	121.389.730	64,51	121.389.730	67,73	551.754.460	Inspektorat
	1.5.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Poin	0	10	**221.983.000**	15	**259.538.441**	30	**330.967.013**	35	**330.967.012,86**	40	**416.681.299**	40	**416.681.299**	40	**1.976.818.064**	Sekretariat Daerah
	1.5.3.1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Poin	0	10	221.983.000	15	259.538.441	30	330.967.013	35	330.967.012,86	40	416.681.299	40	416.681.299	40	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
1,6	**Meningkatnya Kinerja Organisasi**	**Nilai Komponen Kinerja Organisasi**	**Poin**	**4,64**	**4,95**	**620.869.661.013**	**5,25**	**677.205.436.167**	**5,55**	**689.867.906.504**	**5,85**	**686.768.059.177**	**6,15**	**709.076.449.241**	**6,45**	**709.334.214.149**	**6,45**	**4.093.121.726.251**	**Sekretariat Daerah**
	1.6.1 Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama SKPD Yang Tercapai	%	75	75	**50.000.000**	80	**55.000.000**	80	**200.000.000**	80	**220.000.000**	80	**242.000.000**	80	**242.000.000**	80	**1.009.000.000**	Sekretariat Daerah
	1.6.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi	%	70	75	50.000.000	80	55.000.000	85	200.000.000	90	220.000.000	100	242.000.000	100	242.000.000	100	1.009.000.000	Sekretariat Daerah
	1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	58	61	**3.331.232.600**	62	**4.407.693.500**	63	**4.187.039.730**	64	**4.353.085.565**	64	**4.153.085.565**	65	**4.410.850.474**	65	**22.742.987.434**	BKPSDM
	1.6.2.1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	%		90	1.146.597.600	90	989.095.000	90	1.026.581.380	90	1.026.581.380	90	1.026.581.380	90	1.026.581.380	90	6.242.018.120	BKPSDM
	1.6.2.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%		88		88	1.000.000.000	88	500.000.000	88	400.000.000	88	200.000.000	88	200.000.000	88	200.000.000	BKPSDM
	1.6.2.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	Poin	81,56	83,56	15.000.000	84,56	16.500.000	85,56	18.150.000	86,56	19.965.000	87,56	19.965.000	87,56	21.961.500	87,56	111.541.500	Dinas Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.6.2.4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Poin	75,71	77,71	61.250.000	78,71	77.875.000	79,71	85.662.500	80,71	94.228.750	81,71	94.228.750	81,71	103.651.625	81,71	516.896.625	Dinas Kesehatan
1.6.2.5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Poin	75,47	77,47	116.650.000	78,47	128.315.000	79,47	141.146.500	80,47	155.261.150	81,47	155.261.150	81,47	170.787.265	81,47	867.421.065	Dinas PU
1.6.2.6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP	Poin	35,42	37,42	217.500.000	38,42	239.250.000	39,42	263.175.000	40,42	289.492.500	41,42	289.492.500	41,42	318.441.750	41,42	1.617.351.750	Dinas Sat Pol PP
1.6.2.7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Poin	51,66	53,66	20.000.000	54,66	22.000.000	55,66	24.200.000	56,66	26.620.000	57,66	26.620.000	57,66	29.282.000	57,66	148.722.000	BPBD
1.6.2.8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial	Poin	55,17	57,17	24.200.000	58,17	26.620.000	59,17	29.282.000	60,17	32.210.200	61,17	32.210.200	61,17	35.431.220	61,17	179.953.620	Dimsos
1.6.2.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans	Poin	37,5	39,5	32.000.000	40,5	35.200.000	41,5	38.720.000	42,5	42.592.000	43,5	42.592.000	43,50	46.851.200	43,5	237.955.200	Nakertrans
1.6.2.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB	Poin	50,34	52,34	10.000.000	53,34	11.000.000	54,34	12.100.000	55,34	13.310.000	56,34	13.310.000	56,34	14.641.000	56,34	74.361.000	PPPA DALDUK KB
1.6.2.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Poin	52,91	54,91	9.100.000	55,91	10.010.000	56,91	11.011.000	57,91	12.112.100	58,91	12.112.100	58,91	13.323.310	58,91	67.668.510	Ketahanan Pangan
1.6.2.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Poin	53,09	55,09	19.000.000	56,09	20.900.000	57,09	22.990.000	58,09	25.289.000	59,09	25.289.000	59,09	27.817.900	59,09	141.285.900	Dinas LH
1.6.2.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil	Poin	49,3	51,3	12.500.000	52,3	13.750.000	53,3	15.125.000	54,3	16.637.500	55,3	16.637.500	55,30	18.301.250	55,3	92.951.250	Dukcapil
1.6.2.14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	51,77	53,77	5.600.000	54,77	6.160.000	55,77	6.776.000	56,77	7.453.600	57,77	7.453.600	57,77	8.198.960	57,77	41.642.160	PMPK
1.6.2.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Poin	48,5	50,5	5.000.000	51,5	5.500.000	52,5	6.050.000	53,5	6.655.000	54,5	6.655.000	54,50	7.320.500	54,5	37.180.500	Dinas Perhubungan
1.6.2.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo	Poin	48,15	50,15		51,15	5.000.000	52,15	5.500.000	53,15	6.050.000	54,15	6.050.000	54,15	6.655.000	54,15	29.255.000	Dinas Kominfo
1.6.2.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	45,69	47,69	11.900.000	48,69	13.090.000	49,69	14.399.000	50,69	15.838.900	51,69	15.838.900	51,69	17.422.790	51,69	88.489.590	Koperasi UKM
1.6.2.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMPTSP	Poin	55	57	39.650.000	58	43.615.000	59	47.976.500	60	52.774.150	61	52.774.150	61,00	58.051.565	61	294.841.365	Dinas PM PTSP
1.6.2.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar	Poin	50,8	52,8	22.125.000	53,8	24.337.500	54,8	26.771.250	55,8	29.448.375	56,8	29.448.375	56,80	32.393.213	56,8	164.523.713	Porapar
1.6.2.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Poin	66,11	68,11	10.500.000	69,11	11.550.000	70,11	12.705.000	71,11	13.975.500	72,11	13.975.500	72,11	15.373.050	72,11	78.079.050	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.6.2.21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan	Poin	46,31	48,31	22.250.000	49,31	24.475.000	50,31	26.922.500	51,31	29.614.750	52,31	29.614.750	52,31	32.576.225	52,31	165.453.225	Dinas Perikanan
1.6.2.22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan	Poin	40,5	42,5	4.500.000	43,5	4.950.000	44,5	5.445.000	45,5	5.989.500	46,5	5.989.500	46,50	6.588.450	46,5	33.462.450	Dinas Perkebunan
1.6.2.23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP	Poin	71,66	73,66	20.000.000	74,66	22.000.000	75,66	24.200.000	76,66	26.620.000	77,66	26.620.000	77,66	29.282.000	77,66	148.722.000	Dinas TPHP
1.6.2.24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Indag	Poin	49,53	51,53	10.500.000	52,53	11.550.000	53,53	12.705.000	54,53	13.975.500	55,53	13.975.500	55,53	15.373.050	55,53	78.079.050	Dinas Indag

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.6.2.25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah	Poin	62,05	64,05	489.550.000	65,05	538.505.000	66,05	592.355.500	67,05	651.591.050	68,05	651.591.050	68,05	716.750.155	68,05	3.640.342.755	Sekretariat Daerah
1.6.2.26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	Poin	61,09	63,09	693.760.000	64,09	763.136.000	65,09	839.449.600	66,09	923.394.560	67,09	923.394.560	67,09	1.015.734.016	67,09	5.158.868.736	Sekretariat DPRD
1.6.2.27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA	Poin	55,91	57,91	50.000.000	58,91	55.000.000	59,91	60.500.000	60,91	66.550.000	61,91	66.550.000	61,91	73.205.000	61,91	371.805.000	Bappeda
1.6.2.28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	Poin	83,09	85,09	20.000.000	86,09	22.000.000	87,09	24.200.000	88,09	26.620.000	89,09	26.620.000	89,09	26.620.000	89,09	146.060.000	BPKAD
1.6.2.29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA	Poin	58,14	60,14	20.000.000	61,14	22.000.000	62,14	24.200.000	63,14	26.620.000	64,14	26.620.000	64,14	26.620.000	64,14	146.060.000	BAPENDA
1.6.2.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	Poin	54,03	56,03	37.000.000	57,03	40.700.000	58,03	44.770.000	59,03	49.247.000	60,03	49.247.000	60,03	49.247.000	60,03	270.211.000	BKPSDM
1.6.2.31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT	Poin	78	80	30.300.000	81	33.330.000	82	36.663.000	83	40.329.300	84	40.329.300	84,00	40.329.300	84	221.280.900	Inspektorat
1.6.2.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu	Poin	59,11	61,11	7.700.000	62,11	8.470.000	63,11	9.317.000	64,11	10.248.700	65,11	10.248.700	65,11	10.248.700	65,11	56.233.100	Kecamatan B. Umpu
1.6.2.33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui	Poin	45,5	47,5	7.000.000	48,5	7.700.000	49,5	8.470.000	50,5	9.317.000	51,5	9.317.000	51,50	9.317.000	51,5	51.121.000	Kecamatan Kasui
1.6.2.34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Banjit	Poin	48,33	50,33	7.700.000	51,33	8.470.000	52,33	9.317.000	53,33	10.248.700	54,33	10.248.700	54,33	10.248.700	54,33	56.233.100	Kecamatan Banjit
1.6.2.35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Baradatu	Poin	45,42	47,42	7.700.000	48,42	8.470.000	49,42	9.317.000	50,42	10.248.700	51,42	10.248.700	51,42	10.248.700	51,42	56.233.100	Kecamatan Baradatu
1.6.2.36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga	Poin	47,33	49,33	7.700.000	50,33	8.470.000	51,33	9.317.000	52,33	10.248.700	53,33	10.248.700	53,33	10.248.700	53,33	56.233.100	Kecamatan Bahuga
1.6.2.37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Pakuan Ratu	Poin	43,1	45,1	7.700.000	46,1	8.470.000	47,1	9.317.000	48,1	10.248.700	49,1	10.248.700	49,10	10.248.700	49,1	56.233.100	Kecamatan Pakuan Ratu
1.6.2.38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Agung	Poin	45	47	7.700.000	48	8.470.000	49	9.317.000	50	10.248.700	51	10.248.700	51,00	10.248.700	51	56.233.100	Kecamatan Negeri Agung
1.6.2.39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Way Tuba	Poin	43,88	45,88	7.700.000	46,88	8.470.000	47,88	9.317.000	48,88	10.248.700	49,88	10.248.700	49,88	10.248.700	49,88	56.233.100	Kecamatan Way Tuba
1.6.2.40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Rebang Tangkas	Poin	33,41	35,41	7.700.000	36,41	8.470.000	37,41	9.317.000	38,41	10.248.700	39,41	10.248.700	39,41	10.248.700	39,41	56.233.100	Kecamatan R. Tangkas
1.6.2.41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Gunung Labuhan	Poin	45,55	47,55	7.700.000	48,55	8.470.000	49,55	9.317.000	50,55	10.248.700	51,55	10.248.700	51,55	10.248.700	51,55	56.233.100	Kecamatan G. Labuhan
1.6.2.42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin	Poin	58,8	60,8	7.700.000	61,8	8.470.000	62,8	9.317.000	63,8	10.248.700	64,8	10.248.700	64,80	10.248.700	64,8	56.233.100	Kecamatan Negara Batin
1.6.2.43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Besar	Poin	49,33	51,33	7.700.000	52,33	8.470.000	53,33	9.317.000	54,33	10.248.700	55,33	10.248.700	55,33	10.248.700	55,33	56.233.100	Kecamatan Negeri Besar
1.6.2.44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga	Poin	42,33	44,33	7.700.000	45,33	8.470.000	46,33	9.317.000	47,33	10.248.700	48,33	10.248.700	48,33	10.248.700	48,33	56.233.100	Kecamatan Buay Bahuga
1.6.2.45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bumi Agung	Poin	38,88	40,88	7.700.000	41,88	8.470.000	42,88	9.317.000	43,88	10.248.700	44,88	10.248.700	44,88	10.248.700	44,88	56.233.100	Kecamatan Bumi Agung

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.6.2.46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Kec.Umpu Semenguk	Poin	55	57	7.700.000	58	8.470.000	59	9.317.000	60	10.248.700	61	10.248.700	61,00	10.248.700	61	56.233.100	Kec.Umpu Semenguk
1.6.2.47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL	Poin	48,82	50,82	40.000.000	51,82	44.000.000	52,82	48.400.000	53,82	53.240.000	54,82	53.240.000	54,82	53.240.000	54,82	292.120.000	Badan Kesbangpol
1.6.3	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi	Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	56,25	62,5	**72.712.500**	68,75	**62.087.500**	75	**87.087.500**	81,25	**87.087.500**	87,5	**121.389.730**	87,50	**121.389.730**	87,5	**551.754.460**	Inspektorat
1.6.3.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	56,25	62,5	72.712.500	68,75	62.087.500	75	87.087.500	81,25	87.087.500	87,5	121.389.730	87,50	121.389.730	87,5	551.754.460	Inspektorat
1.6.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	**605.539.994.973**	100	**660.470.774.253**	100	**671.978.986.260**	100	**667.532.689.788**	100	**688.408.333.981**	100,00	**688.408.333.981**	100	**3.982.339.113.235**	Seluruh SKPD
1.6.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	%	100	100	299.354.165.739	100	309.667.778.976	100	321.932.240.000	100	330.997.978.454	100	341.705.392.835	100	341.705.392.835	100	1.945.362.948.839	Dinas Pendidikan
1.6.4.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan	%	100	100	93.694.645.943	100	125.677.309.984	100	120.369.486.001	100	109.830.834.705	100	110.527.120.887	100	110.527.120.887	100	670.626.518.407	Dinas Kesehatan
1.6.4.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	%	100	100	8.092.619.719	100	8.585.878.743	100	8.824.368.500	100	9.306.805.350	100	10.287.485.885	100	10.287.485.885	100	55.384.644.082	Dinas PU
1.6.4.4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP	%	100	100	3.320.712.752	100	3.506.367.412	100	3.817.064.708	100	3.850.661.762	100	3.845.584.112	100	3.845.584.112	100	22.185.974.857	Dinas Sat Pol PP
1.6.4.5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas BPBD	%	100	100	2.278.767.200	100	2.465.793.060	100	3.061.943.060	100	3.220.848.374	100	3.416.189.874	100	3.416.189.874	100	17.859.731.442	BPBD
1.6.4.6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial	%	100	100	2.908.248.700	100	3.284.305.214	100	3.442.792.764	100	3.430.191.799	100	3.594.770.858	100	3.594.770.858	100	20.255.080.193	Dinas Sosial
1.6.4.7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans	%	100	100	2.237.688.600	100	2.460.197.775	100	2.582.277.046	100	2.448.356.369	100	2.578.540.708	100	2.578.540.708	100	14.885.601.206	Dinas Nakertrans
1.6.4.8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB	%	100	100	4.381.274.500	100	4.847.127.820	100	5.043.519.238	100	5.041.148.291	100	5.326.483.889	100	5.326.483.889	100	29.966.037.628	Dinas PPPA DALDUK KB
1.6.4.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan	%	100	100	1.903.752.400	100	2.053.529.285	100	2.160.545.235	100	2.080.964.537	100	2.183.408.909	100	2.183.408.909	100	12.565.609.275	Dinas Ketahanan Pangan
1.6.4.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	2.469.934.140	100	2.789.618.005	100	2.780.931.158	100	2.640.105.000	100	2.884.831.389	100	2.884.831.389	100	16.450.251.081	Dinas Lingkungan Hidup
1.6.4.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil	%	100	100	3.304.716.000	100	3.621.495.275	100	4.199.114.784	100	4.196.528.288	100	4.452.725.522	100	4.452.725.522	100	24.227.305.391	Dinas Dukcapil
1.6.4.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	100	4.904.193.685	100	5.395.785.135	100	5.394.633.347	100	5.393.366.380	100	5.491.972.717	100	5.491.972.717	100	32.071.923.981	Dinas PMK
1.6.4.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	%	100	100	2.204.886.050	100	2.450.688.195	100	2.649.643.195	100	2.648.493.695	100	2.647.229.245	100	2.647.229.245	100	15.248.169.625	Dinas Perhubungan
1.6.4.14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	%	100	100	2.878.187.954	100	2.367.447.665	100	2.485.345.048	100	2.264.214.816	100	2.376.850.806	100	2.376.850.806	100	14.748.897.096	Dinas Kominfo

Kode							Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1							*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
							1.6.4.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM	%	100	100	2.239.498.100	100	2.411.304.885	100	2.530.693.146	100	2.442.253.105	100	2.562.941.611	100	2.562.941.611	100	14.749.632.458	Dinas Koperasi Dan UKM
							1.6.4.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PM PTSP	%	100	100	3.660.064.300	100	4.080.755.015	100	4.087.614.991	100	4.078.081.485	100	4.191.878.737	100	4.191.878.737	100	24.290.273.265	Dinas PM PTSP
							1.6.4.17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar	%	100	100	2.573.534.100	100	2.788.170.555	100	2.802.457.858	100	2.798.207.733	100	2.793.532.596	100	2.793.532.596	100	16.549.435.437	Dinas Porapat
							1.6.4.18 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	%	100	100	2.391.535.800	100	2.386.635.800	100	2.506.411.370	100	2.389.909.658	100	2.543.231.811	100	2.543.231.811	100	14.760.956.250	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
							1.6.4.19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan	%	100	100	2.273.639.100	100	2.438.257.555	100	2.635.040.055	100	2.552.185.835	100	2.754.202.887	100	2.754.202.887	100	15.407.528.319	Dinas Perikanan
							1.6.4.20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan	%	100	100	3.024.154.400	100	3.520.158.385	100	3.619.113.385	100	3.517.963.885	100	3.734.209.110	100	3.734.209.110	100	21.149.808.275	Dinas Perkebunan
							1.6.4.21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas TPHP	%	100	100	10.261.138.500	100	11.132.478.751	100	11.427.809.691	100	11.475.832.402	100	11.994.574.353	100	11.994.574.353	100	68.286.408.051	Dinas TPHP
							1.6.4.22 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag	%	100	100	3.765.987.646	100	4.141.390.566	100	4.433.167.622	100	4.421.171.081	100	4.826.677.288	100	4.826.677.288	100	26.415.071.492	Dinas Indag
							1.6.4.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	%	100	100	25.354.831.721	100	24.964.171.515	100	24.469.638.504	100	23.299.263.307	100	23.647.252.432	100	23.647.252.432	100	145.382.409.911	Sekretariat Daerah
							1.6.4.24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100	27.916.627.660	100	27.511.982.643	100	28.848.957.475	100	27.345.696.080	100	27.959.162.700	100	27.959.162.700	100	167.541.589.258	Sekretariat DPRD
							1.6.4.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda	%	100	100	3.909.075.600	100	3.950.121.560	100	4.091.108.283	100	4.075.445.773	100	4.322.196.417	100	4.322.196.417	100	24.670.144.050	Bappeda
							1.6.4.26 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPKAD	%	100	100	36.920.598.932	100	40.315.168.068	100	37.307.364.800	100	37.297.044.858	100	38.133.290.694	100	38.133.290.694	100	228.106.758.046	BPKAD
							1.6.4.27 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda	%	100	100	6.826.835.959	100	7.361.545.074	100	7.858.410.074	100	7.854.961.574	100	8.001.168.224	100	8.001.168.224	100	45.904.089.129	Bapenda
							1.6.4.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM	%	100	100	3.250.389.298	100	3.199.470.693	100	3.557.019.349	100	3.547.971.652	100	3.784.092.188	100	3.784.092.188	100	21.123.035.370	BKPSDM
							1.6.4.29 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	%	100	100	8.364.018.589	100	9.493.864.982	100	9.690.179.982	100	9.586.126.482	100	9.881.667.632	100	9.881.667.632	100	56.897.525.299	Inspektorat
							1.6.4.30 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Blambangan Umpu	%	100	100	2.261.847.992	100	2.469.571.487	100	2.605.378.352	100	2.486.156.545	100	2.802.121.506	100	2.802.121.506	100	15.427.197.388	Kec Blambangan Umpu
							1.6.4.31 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Kasui	%	100	100	2.348.200.400	100	2.641.055.785	100	2.771.960.909	100	2.676.212.300	100	3.024.494.616	100	3.024.494.616	100	16.486.418.626	Kec.Kasui
							1.6.4.32 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Banjit	%	100	100	2.054.493.800	100	2.301.015.100	100	2.431.372.516	100	2.490.522.554	100	2.596.411.694	100	2.596.411.694	100	14.470.227.358	Kec Banjit
							1.6.4.33 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu	%	100	100	4.087.867.600	100	4.597.833.825	100	4.883.415.288	100	4.708.012.456	100	5.083.602.080	100	5.083.602.080	100	28.444.333.329	Kec Baradatu
							1.6.4.34 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga	%	100	100	1.375.089.500	100	1.490.545.400	100	1.563.948.969	100	1.604.297.797	100	1.662.552.587	100	1.662.552.587	100	9.358.986.840	Kec Bahuga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.6.4.35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Pakuan Ratu	%	100	100	2.319.250.826	100	2.498.092.396	100	2.614.705.545	100	2.697.806.975	100	2.864.394.583	100	2.864.394.583	100	15.858.644.908	Kec Pakuan Ratu
1.6.4.36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Agung	%	100	100	1.336.788.252	100	1.470.087.577	100	1.562.285.568	100	1.579.756.099	100	1.717.386.816	100	1.717.386.816	100	9.383.691.128	Kec Negeri Agung
1.6.4.37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Way Tuba	%	100	100	1.775.084.000	100	1.907.468.675	100	2.023.934.010	100	2.060.093.991	100	2.110.438.040	100	2.110.438.040	100	11.987.456.756	Kec Way Tuba
1.6.4.38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Rebang Tangkas	%	100	100	1.226.497.700	100	1.329.175.450	100	1.406.598.178	100	1.429.579.301	100	1.541.965.011	100	1.541.965.011	100	8.475.780.651	Kec Rebang Tangkas
1.6.4.39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan	%	100	100	1.603.818.700	100	1.727.500.840	100	1.831.751.187	100	1.863.589.846	100	2.016.598.209	100	2.016.598.209	100	11.059.856.991	Kec Gunung Labuhan
1.6.4.40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negara Batin	%	100	100	1.658.425.110	100	1.784.501.420	100	1.887.239.196	100	1.925.945.210	100	2.073.110.125	100	2.073.110.125	100	11.402.331.186	Kec. Negara Batin
1.6.4.41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Besar	%	100	100	1.499.989.806	100	1.620.924.321	100	1.713.828.162	100	1.748.641.965	100	1.881.980.987	100	1.881.980.987	100	10.347.346.228	Kec Negeri Besar
1.6.4.42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Buay Bahuga	%	100	100	1.266.938.400	100	1.368.099.070	100	1.443.133.374	100	1.471.559.412	100	1.582.210.133	100	1.582.210.133	100	8.714.150.522	Kec Buay Bahuga
1.6.4.43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bumi Agung	%	100	100	1.074.694.200	100	1.163.991.410	100	1.233.775.481	100	1.248.742.855	100	1.353.903.557	100	1.353.903.557	100	7.429.011.060	Kec Bumi Agung
1.6.4.44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk	%	100	100	848.856.900	100	940.118.600	100	998.200.485	100	998.963.609	100	1.092.926.805	100	1.092.926.805	100	5.971.993.204	Kec. Umpu Semenguk
1.6.4.45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol	%	100	100	2.136.428.700	100	2.291.994.305	100	2.398.568.370	100	2.510.196.142	100	2.555.570.915	100	2.555.570.915	100	14.448.329.347	Badan Kesbangpol
1.6.5.	Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	2,98	3,2	**753.599.940**	3,3	**1.660.759.914**	3,4	**1.810.759.914**	3,5	**1.810.759.914**	3,6	**2.110.759.914**	3,7	**2.110.759.914**	3,7	10.257.399.510	Sekretariat Daerah (Tapem)
1.6.5.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	%		0	251.199.980	20	553.586.638	40	603.586.638	60	603.586.638	80	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Tapem)
1.6.5.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	%		17	251.199.980	33	553.586.638	50	603.586.638	67	603.586.638	83	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Tapem)
1.6.5.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	2,98	3,2	251.199.980	3,3	553.586.638	3,4	603.586.638	3,5	603.586.638	3,6	703.586.638	3,7	703.586.638	3,7	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Tapem)
1.6.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan	Cakupan Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan	%	100	100	**11.122.121.000**	100	**10.549.121.000**	100	**11.604.033.100**	100	**12.764.436.410**	100	**14.040.880.051**	100	**14.040.880.051**	100	**74.121.471.612**	Sekretariat Daerah
1.6.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	2.780.530.250	100	2.637.280.250	100	2.901.008.275	100	3191109103	100	3.510.220.013	100	3.510.220.013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
1.6.6.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100	2.780.530.250	100	2.637.280.250	100	2.901.008.275	100	3191109103	100	3.510.220.013	100	3.510.220.013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
1.6.6.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	2.780.530.250	100	2.637.280.250	100	2.901.008.275	100	3191109103	100	3.510.220.013	100	3.510.220.013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.6.6.4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	%	100	100	2.780.530.250	100	2.637.280.250	100	2.901.008.275	100	3191109103	100	3.510.220.013	100	3.510.220.013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
1,7	**Meningkatnya Inovasi Daerah**	**Indeks Inovasi Daerah**	**Poin**	**419**	**30**	**317.500.000**	**33**	**237.189.135**	**36**	**352.378.670**	**39**	**352.378.670**	**42**	**502.378.670**	**45**	**502.378.670**	**45**	**2.264.203.815**	**Bappeda**
1.7.1	Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	5	10	**158.750.000**	10	**118.594.568**	10	**176.189.335**	10	**176.189.335**	10	**251.189.335**	10	**251.189.335**	10	**1.132.101.908**	Bappeda
1.7.1.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	5	10	158.750.000	10	118.594.568	10	176.189.335	10	176.189.335	10	251.189.335	10	251.189.335	10	1.132.101.908	Bappeda
1.7.2	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	%	1	1	**158.750.000**	1	**118.594.568**	1	**176.189.335**	1	**176.189.335**	1	**251.189.335**	1	**251.189.335**	1	**1.132.101.908**	Bappeda
1.7.2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	%	1	1	158.750.000	1	118.594.568	1	176.189.335	1	176.189.335	1	251.189.335	1	251.189.335	1	1.132.101.908	Bappeda
1,8	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**Poin**	**80**	**81**	**1.237.000.000**	**82**	**2.373.640.000**	**83**	**2.507.802.600**	**84**	**2.123.640.000**	**85**	**3.167.363.790**	**86**	**3.167.363.790**	**86**	**14.576.810.180**	**Dinas Kominfo**
1.8.1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	80	81	**1.237.000.000**	82	**2.323.640.000**	83	**2.323.640.000**	84	**2.000.000.000**	85	**2.923.640.000**	86	**2.923.640.000**	86	**13.731.560.000**	Dinas Kominfo
1.8.1.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	80	81	1.237.000.000	82	2.323.640.000	83	2.323.640.000	84	2.000.000.000	85	2.923.640.000	86	2.923.640.000	86	13.731.560.000	Dinas Kominfo
1.8.2	Meningkatkan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Poin	n/a	200	**0**	225	**50.000.000**	250	**184.162.600**	275	**123.640.000**	300	**243.723.790**	350	**243.723.790**	350	**845.250.180**	Dinas Kominfo
1.8.2.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Poin	n/a	200		225	50.000.000	250	184.162.600	275	123.640.000	300	243.723.790	350	243.723.790	350	845.250.180	Dinas Kominfo
1,9	**Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE**	**Poin**	**2,05**	**2,30**	**120.000.000**	**2,55**	**980.200.000**	**2,75**	**980.200.000**	**3,01**	**120.000.000**	**3,15**	**980.200.000**	**3,25**	**980.200.000**	**3,25**	**4.160.800.000**	**Dinas Kominfo**
1.9.1	Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal	Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	2	2,3	**30.000.000**	2,55	**245.050.000**	2,75	**245.050.000**	3,01	**30.000.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**1.040.200.000**	Dinas Kominfo
1.9.1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	2	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3,25	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
1.9.2	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2,18	2,3	**30.000.000**	2,55	**245.050.000**	2,75	**245.050.000**	3,01	**30.000.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**1.040.200.000**	Dinas Kominfo
1.9.2.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2,18	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3,25	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
1.9.3	Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2	2,3	**30.000.000**	2,55	**245.050.000**	2,75	**245.050.000**	3,01	**30.000.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**1.040.200.000**	Dinas Kominfo
1.9.3.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3,25	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
1.9.4	Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	2	2,3	**30.000.000**	2,55	**245.050.000**	2,75	**245.050.000**	3,01	**30.000.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**245.050.000**	3,25	**1.040.200.000**	Dinas Kominfo
1.9.4.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	2	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3,25	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
1,10	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data**	**Cakupan Satu Data Way Kanan**	**%**	**0**	**10**	**1.013.085.560**	**12**	**1.156.322.400**	**14**	**856.675.880**	**16**	**706.675.880**	**18**	**1.370.488.880**	**20**	**1.370.488.880**	**20**	**6.473.737.480**	**Bappeda / Kominfo**
1.10.1	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan	%	0	10	**1.013.085.560**	15	**1.156.322.400**	15	**856.675.880**	15	**706.675.880**	15	**1.370.488.880**	15	**1.370.488.880**	15	**6.473.737.480**	Bappeda / Kominfo
1.10.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	10	65.000.000	15	73.678.000	15	250.000.000	15	100.000.000	15	250.000.000	15	250.000.000	15	988.678.000	Dinas Kominfo

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.10.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	10	293.631.960	15	324.888.800	15	340.488.880	15	340.488.880	15	520.488.880	15	520.488.880	15	2.340.476.280	Bappeda
1.10.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	10		15		15		15		15	100.000.000	15	100.000.000	15	200.000.000	Dinas PPPADALDUK dan KB
1.10.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	0	30	654.453.600	40	716.427.600	60	224.859.000	80	224.859.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	2.320.599.200	Dinas Dukcapil
1.10.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	0	100	0	100	41.328.000	100	41.328.000	100	41.328.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	623.984.000	Dinas Dukcapil
1,11	**Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah**	**Kualitas Pengelolaan Arsip**	**Poin**	**32,39**	**34,4**	**7.385.818.128**	**36,4**	**10.141.653.069**	**38,4**	**10.414.365.751**	**40,40**	**8.300.100.595**	**42,40**	**15.379.707.000**	**43,40**	**13.212.500.000**	**43,40**	**64.834.144.543**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip**
1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	%	n/a	10,87	**51.000.000**	21,74	**51.000.000**	32,61	**75.000.000**	43,48	**75.000.000**	53,35	**75.000.000**	67,39	**75.000.000**	67,39	**402.000.000**	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
1.11.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	%	n/a	10,87	51.000.000	21,74	51.000.000	32,61	75.000.000	43,48	75.000.000	53,35	75.000.000	67,39	75.000.000	67,39	402.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
1.11.2	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan	Persentase Arsip Statis Daerah Yang Di Lestarikan	%	n/a	16,7	**7.334.818.128**	20	**10.090.653.069**	23	**10.339.365.751**	25	**8.225.100.595**	28	**15.304.707.000**	30	**13.137.500.000**	30	**64.432.144.543**	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
1.11.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dikelola	%	n/a	16,7	51.000.000	20	51.000.000	23	75.000.000	25	75.000.000	28	75.000.000	30	75.000.000	30	402.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
1.11.2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	%	n/a	5	48.000.000	10		15	150.000.000	20	150.000.000	25	150.000.000	30	150.000.000	30	648.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Misi 2.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan																			
2	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Poin**	**63,93**	**67,22**	**7.235.818.128**	**67,83**	**10.039.653.069**	**68,43**	**10.114.365.751**	**69,04**	**8.000.100.595**	**66,10**	**15.079.707.000**	**66,49**	**12.912.500.000**	**66,49**	**63.382.144.543**	**Dinas LH**
2.1	**Meningkatnya Kualitas Lahan**	**Indeks Kualitas Lahan**	**Poin**	**56,37**	**58,72**	**105.447.811**	**61,14**	**105.447.811**	**63,57**	**440.000.000**	**65,99**	**355.000.000**	**66,10**	**570.000.000**	**66,41**	**670.000.000**	**66,41**	**2.245.895.623**	**Dinas LH**
2.1.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan	Persentase Luas Penanaman Pohon di Lahan Kritis	%	NA	20	**50.000.000**	20	**50.000.000**	20	**170.000.000**	20	**135.000.000**	20	**200.000.000**	20	**300.000.000**	20	**905.000.000**	Dinas LH
2.1.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	%		20	50.000.000	20	50.000.000	20	170.000.000	20	135.000.000	20	200.000.000	20	300.000.000	20	905.000.000	Dinas LH
2.1.2	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	%		30	**49.275.478**	30	**49.275.478**	30	**150.000.000**	30	**100.000.000**	30	**200.000.000**	30	**250.000.000**	30	**798.550.956**	Dinas LH
2.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	%		30	49.275.478	30	49.275.478	30	150.000.000	30	100.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	798.550.956	Dinas LH
2.1.3	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat Yang Di Diklat dan Disuluh Pelestarian lahan	%		20	**6.172.333**	40	**6.172.333**	60	**120.000.000**	80	**120.000.000**	100	**170.000.000**	100	**120.000.000**	100	**542.344.667**	Dinas LH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan			10	6.172.333	10	6.172.333	10	120.000.000	10	120.000.000	10	170.000.000	10	120.000.000	10	542.344.667	Dinas LH
2,2	**Meningkatnya Kualitas Air**	**Indeks Kualitas Air**	**Poin**	**58,89**	**58,34**	**5.623.440.833**	**58,44**	**6.427.275.774**	**58,54**	**6.832.158.751**	**58,64**	**4.758.219.000**	**58,74**	**11.177.500.000**	**58,84**	**11.027.500.000**	**58,84**	**45.846.094.359**	**Dinas LH**
2.2.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan	Persentase Penanaman Pohon Di Sempadan Sungai	%		20	**5.617.268.500**	20	**6.421.103.441**	20	**6.767.158.751**	20	**4.693.219.000**	20	**11.112.500.000**	20	**11.012.500.000**	20	**45.623.749.692**	Dinas LH
2.2.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Sungai Yang Ditangani	%		60	30.000.000	65	30.000.000	75	170.000.000	80	135.000.000	85	200.000.000	90	100.000.000	90	665.000.000	Dinas LH
2.2.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	%	0	1	1.629.049.500	1	2.432.884.441	2	2.597.158.751	3	1.500.000.000	4	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	16.159.092.692	Dinas PU
2.2.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	0	0	3.958.219.000	1	3.958.219.000	2	4.000.000.000	3	3.058.219.000	4	6.912.500.000	5	6.912.500.000	5	28.799.657.000	Dinas PU
2.2.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Air	%		20	**6.172.333**	40	**6.172.333**	60	**65.000.000**	80	**65.000.000**	100	**65.000.000**	100	**15.000.000**	100	**222.344.667**	Dinas LH
2.2.2.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Air	%		10	6.172.333	10	6.172.333	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	15.000.000	10	222.344.667	Dinas LH
2,3	**Meningkatnya Kualitas Udara**	**Indeks Kualitas Udara**	**Poin**	**79,05**	**80,05**	**42.882.533**	**80,15**	**42.882.533**	**80,25**	**75.000.000**	**80,34**	**95.000.000**	**80,45**	**165.000.000**	**80,55**	**65.000.000**	**80,55**	**485.765.067**	**Dinas LH**
2.3.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara	Persentase Penanaman Pohon Di Titik Pencemar Udara	%		20	**36.710.200**	20	**36.710.200**	20	**60.000.000**	20	**80.000.000**	20	**100.000.000**	20	**50.000.000**	20	**363.420.400**	Dinas LH
2.3.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara	%		55	36.710.200	60	36.710.200	65	60.000.000	70	80.000.000	75	100.000.000	80	50.000.000	80	363.420.400	Dinas LH
2.3.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Udara	%		20	**6.172.333**	40	**6.172.333**	60	**15.000.000**	80	**15.000.000**	100	**65.000.000**	100	**15.000.000**	100	**122.344.667**	Dinas LH
2.3.2.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	%		10	6.172.333	10	6.172.333	10	15.000.000	10	15.000.000	10	65.000.000	10	15.000.000	10	122.344.667	Dinas LH
2,4	**Meningkatnya Pengelolaan Sampah**	**Timbunan Sampah Yang Dikelola**	**Ton**	**14.643**	**16.134**	**1.378.392.450**	**17.654**	**3.028.392.450**	**18.516**	**2.567.207.000**	**19.394**	**2.566.881.595**	**20.987**	**2.867.207.000**	**20.987**	**1.000.000.000**	**20.987**	**13.408.080.495**	**Dinas LH dan Dinas PU**
2.4.1	Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	%	22,03	24,08	1.378.392.450	26,00	3.028.392.450	27,03	2.567.207.000	28,00	2.566.881.595	30,02	2.867.207.000	30,02	1.000.000.000	30,02	13.408.080.495	Dinas LH
2.4.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	%	2,01	2,05	1.378.392.450	1,92	1.428.392.450	1,03	1.567.207.000	0,97	1.566.881.595	2,02	1.867.207.000	2,02		2,02	7.808.080.495	Dinas LH
2.4.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangkut	%	n/a	90		92	1.600.000.000	94	1.000.000.000	96	1.000.000.000	98	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.600.000.000	Dinas PU
2,5	**Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan**	**Poin**	**25**	**50**	**0**	**100**	**350.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**75.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**0**	**100**	**625.000.000**	Dinas LH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.5.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase Penanganan Volume Sampah	Poin	25	50	0	100	350.000.000	100	0	100	-	100	0		0	100	0	Dinas LH
2.5.1.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	%		0		100	350.000.000	100		100		100				100		Dinas LH
2.5.2	Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%	0	100	0	100	0	100	50.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000		0	100	275.000.000	Dinas LH
2.5.2.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%		100		100		100	50.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000			100	275.000.000	Dinas LH
2,6	**Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)**	**Persentase Penanganan Limbah B3**	**Poin**	**21,43**	**37,5**	**29.916.500**	**53,57**	**29.916.500**	**67,86**	**50.000.000**	**82,14**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**259.833.000**	**Dinas LH**
2.6.1	Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	21,43	37,5	29.916.500	53,57	29.916.500	67,86	50.000.000	82,14	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	259.833.000	Dinas LH
2.6.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	21,43	37,5	29.916.500	53,57	29.916.500	67,86	50.000.000	82,14	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	259.833.000	Dinas LH
2,7	**Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup**	**Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup**	**Poin**	**39,52**	**39,52**	**55.738.000**	**39,52**	**55.738.000**	**39,52**	**100.000.000**	**39,52**	**100.000.000**	**39,52**	**100.000.000**	**39,52**	**100.000.000**	**39,52**	**511.476.000**	**Dinas LH**
2.7.1	Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	39,52	39,52	55.738.000	39,52	55.738.000	39,52	100.000.000	39,52	100.000.000	39,52	100.000.000	39,52	100.000.000	39,52	511.476.000	Dinas LH
2.7.1.1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	%		100	17.650.000	100	17.650.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	235.300.000	Dinas LH
2.7.1.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	%	18,87	35,85	38.088.000	53,83	38.088.000	69,81	50.000.000	84,91	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	276.176.000	Dinas LH
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah																			
3	**Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**67,44**	**67,69**	**222.797.172.603**	**67,99**	**247.966.387.660**	**68,39**	**249.011.497.410**	**68,89**	**247.719.721.633**	**69,39**	**265.820.639.220**	**69,55**	**267.873.685.328**	**69,55**	**1.501.189.103.854**	
3,1	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**69,40**	**69,55**	**85.351.812.997**	**69,75**	**103.793.884.581**	**70**	**106.032.472.581**	**70,3**	**101.887.667.693**	**70,6**	**108.278.140.929**	**70,7**	**110.898.879.929**	**70,7**	**616.242.858.710**	
3.1.1	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	101	217	**9.522.219.600**	205	**11.000.000.000**	194	**11.000.000.000**	183	**11.000.000.000**	183	**12.700.000.000**	183	**12.700.000.000**	183	**67.922.219.600**	Dinas Kesehatan
3.1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	93	100	5.000.000.000	100	5.700.000.000	100	5.700.000.000	100	5.700.000.000	100	6.400.000.000	100	6.400.000.000	100	34.900.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	91,7	100	4.522.219.600	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	100	6.300.000.000	100	6.300.000.000	100	33.022.219.600	Dinas Kesehatan
3.1.2	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.14	19	10.000.000.000	18	12.000.000.000	17	12.000.000.000	16	12.000.000.000	16	12.000.000.000	16	12.000.000.000	16	70.000.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir	%	95	100	4.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	32.000.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	91,2	100	5.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	38.000.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.1.3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	5,95	21,1	10.140.904.991	18,4	10.520.984.940	16	10.443.387.000	14	10.480.984.940	14	10.732.087.607	14	10.732.087.607	14	63.050.437.085	Dinas Kesehatan
3.1.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	%	7,4	8,5	5.293.387.000	7	5.393.387.000	5,5	5.343.387.000	4	5.343.387.000	4	5.332.087.607	4	5.332.087.607	4	32.037.723.214	Dinas Kesehatan
3.1.3.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	1,9	4,6	2.600.000.000	3,8	2.000.000.000	3	2.000.000.000	2,5	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	12.600.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.3.3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	%	88,8	82	1.500.000.000	84	2.000.000.000	86	2.000.000.000	88	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	11.500.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.3.4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	89	100	501.318.551	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.501.318.551	Dinas Kesehatan
3.1.3.5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	72,6	75	246.199.440	78	127.597.940	82	100.000.000	85	137.597.940	90	400.000.000	90	400.000.000	90	1.411.395.320	Dinas Kesehatan
3.1.4	Menurunkan Angka Kesakitan	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate)	%	90	90	5.436.204.300	90	7.386.204.300	90	7.386.204.300	90	7.443.429.030	90	7.760.000.000	90	7.760.000.000	90	43.172.041.930	Dinas Kesehatan
3.1.4.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar	%	38	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.4.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar	%	85	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.4.3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	79	100	550.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.550.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.4.4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	%	68	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.4.5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	53	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
3.1.4.6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	29	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.1.4.7 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	49	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
	3.1.4.8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	%	100	100	136.204.300	100	156.204.300	100	153.000.000	100	186.904.300	100	360.230.000	100	360.230.000	100	1.352.772.900	Dinas Kesehatan
	3.1.4.9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	%	100	100	250.000.000	100	230.000.000	100	233.204.300	100	256.524.730	100	399.770.000	100	399.770.000	100	1.769.269.030	Dinas Kesehatan
	3.1.5 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Akreditasi Puskesmas	Poin	2.1	2.4	27.563.661.700	2.6	38.740.460.841	2.65	40.937.058.781	2.75	43.508.136.111	2.75	46.825.448.781	2.75	49.446.187.781	2.75	247.020.953.995	Dinas Kesehatan
	3.1.5.1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)	%	80	80	2.000.000.000	83	3.000.000.000	85	3.000.000.000	90	3.200.000.000	90	3.200.000.000	90	3.200.000.000	90	17.600.000.000	Dinas Kesehatan
	3.1.5.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)	%	5	10	2.000.000.000	15	3.000.000.000	20	3.000.000.000	25	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	17.000.000.000	Dinas Kesehatan
	3.1.5.3 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)	%	0	5	2.000.000.000	10	3.000.000.000	15	3.000.000.000	20	3.000.000.000	25	3.000.000.000	25	3.000.000.000	25	17.000.000.000	Dinas Kesehatan
	3.1.5.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin	%	100	100	2.000.000.000	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	17.184.155.705	Dinas Kesehatan
	3.1.5.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	%	20	30	1.171.089.700	40	6.603.629.700	50	6.803.629.700	60	7.103.629.700	70	7.603.629.700	70	7.603.629.700	70	36.889.238.200	Dinas Kesehatan
	3.1.5.6 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	%	50	50	150.000.000	55	110.000.000	60	113.310.000	65	100.000.000	70	316.105.100	75	316.105.100	75	1.105.520.200	Dinas Kesehatan
	3.1.5.7 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	%	42	45	142.572.000	45	100.000.000	45	124.287.940	45	100.000.000	45	321.492.840	267	321.492.840	267	1.109.845.620	Dinas Kesehatan
	3.1.5.8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif			50	200.000.000	55	200.000.000	60	200.000.000	65	142.775.270	65	140.000.000	65	140.000.000	65	1.022.775.270	Dinas Kesehatan
	3.1.5.9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas dengan Pengeolaan Keuangan BLUD	%	95	95	17.900.000.000	100	19.690.000.000	100	21.659.000.000	100	23.824.900.000	100	26.207.390.000	100	28.828.129.000	100	138.109.419.000	Dinas Kesehatan
	3.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73,85	75	14.483.084.406	76	16.561.234.500	77	16.561.234.500	78	9.750.529.612	79	10.556.016.541	80	10.556.016.541	80	78.468.116.100	RSUD ZAPA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.1.6.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Status Akreditasi Rumah Sakit	Katagori	Perdana	Madya	13.463.084.406	Madya	10.305.709.500	Madya	10.305.709.500	Utama	5.305.709.500	Utama	5.305.709.500	Paripurna	5.305.709.500	Paripurna	49.991.631.906	RSUD ZAPA
3.1.6.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	%	81	83,5	1.000.000.000	85	6.172.525.000	90	6.172.525.000	95	4.361.820.112	100	5.167.307.041	100	5.167.307.041	100	28.041.484.194	RSUD ZAPA
3.1.6.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	%	50	60	20.000.000	70	83.000.000	80	83.000.000	90	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	435.000.000	RSUD ZAPA
3.1.7	Meningkatkan Kualitas Air Minum	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	n/a	1	8.205.738.000	2	7.385.000.000	3	7.504.588.000	4	7.504.588.000	5	7.504.588.000	6	7.504.588.000	6	45.609.090.000	Dinas PU
3.1.7.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	n/a	1	8.205.738.000	2	7.385.000.000	3	7.504.588.000	4	7.504.588.000	5	7.504.588.000	6	7.504.588.000	6	45.609.090.000	Dinas PU
3.1.8	Meningkatkan Kualitas Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	1	0	2	200.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	6	200.000.000	6	1.000.000.000	Dinas PU
3.1.8.1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	1		2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	6	500.000.000	Dinas PU
3.1.8.2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	1		2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	6	500.000.000	Dinas PU
3,2	**Meningkatnya Harapan Lama Sekolah**	**Angka Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**12,36**	**12,38**	**83.131.226.367**	**12,4**	**86.156.666.825**	**12,42**	**84.576.479.895**	**12,44**	**87.086.529.895**	**12,46**	**89.640.279.895**	**12,48**	**89.640.279.895**	**12,48**	**520.231.462.772**	
3.2.1	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Poin	39,35	39,37	2.625.000.000	39,4	3.870.000.000	39,45	3.575.000.000	39,75	3.707.500.000	40	3.790.000.000	42,5	3.790.000.000	42,5	21.357.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	%	n/a	42,67	550.000.000	66,67	700.000.000	80	700.000.000	93,33	400.000.000	96	350.000.000	100	350.000.000	100	3.050.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	%	n/a	46,67	480.000.000	66,67	660.000.000	80	650.000.000	93,33	400.000.000	96	360.000.000	100	360.000.000	100	2.910.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik	%	51,62	53,10	200.000.000	53,83	200.000.000	54,57	500.000.000	56,05	550.000.000	59,00	550.000.000	66,37	550.000.000	66,37	2.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik	%	n/a	44,25	150.000.000	47,20	150.000.000	49,13	250.000.000	53,10	250.000.000	56,05	250.000.000	64,90	250.000.000	64,90	1.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	%	n/a			79,67	250.000.000	87,64	250.000.000	87,64	262.500.000	89,24	270.000.000	91,63	270.000.000	91,63	1.302.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	%	n/a			36,87	205.000.000					44,25	625.000.000	44,25	625.000.000	44,25	1.455.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	%	n/a	42,67	375.000.000	66,67	375.000.000	80	450.000.000	93,33	525.000.000	96	540.000.000	100	540.000.000	100	2.805.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	%	n/a			51,62	610.000.000			60,47	500.000.000					73,75	1.110.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.2.1.9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	%	n/a	65	150.000.000	75	150.000.000	85	200.000.000	90	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	%	n/a	35,40	250.000.000	39,68	250.000.000	44,99	300.000.000	47,57	350.000.000	54,57	350.000.000	54,57	350.000.000	54,57	1.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	%	n/a	38,35	270.000.000	42,77	120.000.000	50,15	75.000.000	59,00	75.000.000	66,37	75.000.000	73,75	75.000.000	73,75	690.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.12	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	%	n/a	44,25		48,67		51,62		54,57	70.000.000	59,00	70.000.000	66,37	70.000.000	66,37	210.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Akreditasi PAUD	Poin	25,96	27,43	200.000.000	29,50	200.000.000	32,45	200.000.000	36,87	75.000.000	44,25	100.000.000	50,15	100.000.000	50,15	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar	APK SD	Poin	107,05	107,2	52.680.000.000	107,25	51.355.000.000	107,4	53.355.000.000	107,5	58.635.693.257	108	56.119.193.257	108,5	56.119.193.257	108,5	328.264.079.771	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	%	n/a	35	340.000.000	40	340.000.000	42,5	680.000.000	50	800.000.000	55	880.000.000	62,5	880.000.000	62,5	3.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	%	100	100	42.500.000.000	100	42.500.000.000	100	45.000.000.000	100	50.000.000.000	100	46.800.000.000	100	46.800.000.000	100	273.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	65,76	66,61	1.700.000.000	67,46	1.700.000.000	68,14	1.750.000.000	68,99	1.890.000.000	70,27	2.014.193.257	74,53	2.014.193.257	74,53	11.068.386.514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	n/a	25,48	1.200.000.000	31,85	1.200.000.000	35,03	600.000.000	39,81	830.693.257	47,77	900.000.000	52,55	900.000.000	52,55	5.630.693.257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	55,73	57,01	1.000.000.000	60,51	1.000.000.000	63,69	1.000.000.000	66,88	1.000.000.000	70,06	1.000.000.000	73,25	1.000.000.000	73,25	6.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	n/a			31,85	375.000.000	33,44	545.000.000			35,03	500.000.000	38,22	500.000.000	38,22	1.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	52,55	1.800.000.000			57,96	1.825.000.000			63,69	2.000.000.000	63,69	2.000.000.000	63,69	7.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	%	n/a	71,43	225.000.000	76,53	225.000.000	76,53	375.000.000	78,57	375.000.000					81,63	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	%	n/a	66,88	2.500.000.000	70,06	2.500.000.000			73,25	2.000.000.000					79,62	7.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	%	n/a	35	640.000.000	40	640.000.000	42,5	680.000.000	50	700.000.000	55	880.000.000	62,5	880.000.000	62,5	4.420.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.2.11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	%	100	100	125.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.2.2.12 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.2.13 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	%	n/a	62,90	250.000.000	68,47	250.000.000	70,86	300.000.000	75,00	320.000.000	77,71	375.000.000	77,71	375.000.000	77,71	1.870.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.2.14 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	%		57,32	75.000.000	63,69	75.000.000	70,06	75.000.000	73,25	75.000.000	76,43	75.000.000	79,62	75.000.000	79,62	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.2.15 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Poin	99,36	99,5	75.000.000	99,65	75.000.000	99,85	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.2.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%	n/a	70,06	200.000.000	73,25	200.000.000	76,43	100.000.000	79,62	200.000.000	85,99	200.000.000	87,58	200.000.000	87,58	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.2.17 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	%	99,36	99,5		99,65		99,85		100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Poin	90,18	90,2	26.520.583.187	90,5	28.675.830.187	90,8	26.340.643.257	91,5	23.437.500.000	92	27.777.500.000	92,5	27.777.500.000	92,5	160.529.556.631	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	%	n/a	40	225.000.000	42,86	225.000.000	50,00	262.500.000	53,57	281.250.000	57,14	300.000.000	60,71	300.000.000	60,71	1.593.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	%	100	100	17.850.000.000	100	17.850.000.000	100	17.955.000.000	100	18.060.000.000	100	18.112.500.000	100	18.112.500.000	100	107.940.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	62,40	63,36	4.300.000.000	72,04	6.300.000.000	73,42	1.000.000.000	74,79	850.000.000	77,13	1.700.000.000	79,89	1.700.000.000	79,89	15.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	n/a			54,95	500.000.000			71,43	1.275.000.000					82,42	1.775.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	65,9	69,23	630.000.000			76,92	3.100.000.000			85,71	2.480.000.000	90,11	2.480.000.000	90,11	8.690.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.6 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	68,1	71,43	1.015.583.187	76,92	1.250.000.000			80,22	750.000.000	84,62	1.000.000.000	86,81	1.000.000.000	86,81	5.015.583.187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.7 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	63,7					71,4	500.000.000			76,9	500.000.000	80,2	500.000.000	80,2	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.8 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a			38,5	750.000.000			44,0	750.000.000					51,6	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	%	n/a			49,5	175.000.000			52,7	105.000.000					56,0	280.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2.3.10 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat	%	n/a			27,5	350.000.000			38,5	350.000.000					54,9	700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.2.3.11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a			44,0	600.000.000	51,6	700.000.000			60,4	800.000.000	60,4	800.000.000	60,4	2.900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	%	n/a	59,52	225.000.000			65,48	750.000.000			71,43	750.000.000	74,40	750.000.000	74,40	2.475.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	%	n/a	40	225.000.000	42,86	225.000.000	50,00	262.500.000	53,57	281.250.000	57,14	300.000.000	60,71	300.000.000	60,71	1.593.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	%	n/a	68,13	1.500.000.000			74,73	1.200.000.000			80,22	1.000.000.000	83,52	1.000.000.000	83,52	4.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	85.643.257	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	535.643.257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	%	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP	%	n/a	64,84	125.000.000	68,02	125.830.187	72,64	250.000.000	75,93	250.000.000	78,13	275.000.000	80,66	275.000.000	80,66	1.300.830.187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%	n/a	76,92	75.000.000	80,22	75.000.000	83,52	75.000.000	86,81	75.000.000	89,01	75.000.000	93,41	75.000.000	93,41	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Akreditasi SMP	Poin	96,59	96,9	200.000.000	97,2	100.000.000	98,5	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.3.20	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	%	n/a	62,64		69,23		73,63		78,02	110.000.000	81,32	110.000.000	84,62	110.000.000	84,62	330.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.4	Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	10	75	1.305.643.180	80	2.255.836.638	85	1.305.836.638	90	1.305.836.638,00	100	1.953.586.638	100	1.953.586.638	100	10.080.326.370	Sekretariat Daerah
3.2.4.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	10	75	251.199.980	80	553.586.638	85	603.586.638	90	603.586.638,00	100	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah
3.2.4.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	%	0	50	1.054.443.200	50	1.702.250.000	50	702.250.000	50	702.250.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	6.661.193.200	Dinas PU
3,3	**Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah**	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**7,70**	**7,73**	**3.618.000.000**	**7,76**	**3.618.000.000**	**7,79**	**3.032.050.000**	**7,82**	**2.846.000.000**	**7,85**	**1.460.000.000**	**7,88**	**1.460.000.000**	**7,88**	**16.034.050.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
3.3.1	Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan	Indeks Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	1,53	**3.618.000.000**	1,86	**3.618.000.000**	2,16	**3.032.050.000**	2,41	**2.846.000.000**	2,77	**1.460.000.000**	3,19	**1.460.000.000**	3,19	**16.034.050.000**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.3.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	18,28	3.618.000.000	19,15	3.618.000.000	20,08	3.032.050.000	21,62	2.846.000.000	23,17	1.460.000.000	24,71	1.460.000.000	24,71	16.034.050.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3,4	**Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Cakupan PMKS yang tertangani**	**%**	**5,72**	**6,72**	**684.114.246**	**7,72**	**1.401.570.162**	**8,72**	**1.809.370.162**	**9,72**	**1.778.719.969,71**	**10,72**	**2.178.719.970**	**11,72**	**2.178.719.970**	**11,72**	**10.031.214.478**	**Dinas Sosial**
3.4.1	Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	18.18	19.18	181.714.286	20.18	294.396.886	21.18	602.196.886	22.18	571.546.694	23.18	771.546.694	24.18	771.546.694	24.18	3.192.948.138	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.4.1.1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	17.41	18.41	19.000.000	19.41	11.000.000	20.41	45.200.000	21.41	45.200.000	22.41	45.200.000	23.41	45.200.000	23.41	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	6.7	7.7	10.714.286	8.7	195.396.886	9.7	195.396.886	10.7	164.746.694	11.7	164.746.694	11.7	164.746.694	11.7	895.748.138	Dinas Sosial
	3.4.1.3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	4.8	5.8	19.000.000	6.8	11.000.000	7.8	45.200.000	8.8	45.200.000	9.8	45.200.000	10.8	45.200.000	10.8	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	1,54	2,54	19.000.000	3,54	11.000.000	4,54	45.200.000	5,54	45.200.000	6,54	45.200.000	7,54	45.200.000	7,54	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.5 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	1.21	2.21	19.000.000	3.21	11.000.000	4.21	45.200.000	5.21	45.200.000	6.21	45.200.000	7.21	45.200.000	7.21	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.6 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	%	1,52	2,52	19.000.000	3,52	11.000.000	4,52	45.200.000	5,52	45.200.000	6,52	45.200.000	7,52	45.200.000	7,52	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.7 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial	%	0	1	19.000.000	2	11.000.000	3	45.200.000	4	45.200.000	5	45.200.000	6	45.200.000	6	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.8 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	%	1,75	2,75	19.000.000	3,75	11.000.000	4,75	45.200.000	5,75	45.200.000	6,75	45.200.000	7,75	45.200.000	7,75	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.9 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	%	12,54	13,54	19.000.000	14,54	11.000.000	15,54	45.200.000	16,54	45.200.000	17,54	45.200.000	18,54	45.200.000	18,54	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.1.10 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	%	0,04	1,04		2,04		3,04		4,04		5,04	200.000.000	6,04	200.000.000	6,04	400.000.000	Dinas Sosial
	3.4.1.11 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	%	0,02	1,02	19.000.000	2,02	11.000.000	3,02	45.200.000	4,02	45.200.000	5,02	45.200.000	6,02	45.200.000	6,02	210.800.000	Dinas Sosial
	3.4.2 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	502.399.960	100	1.107.173.276	100	1.207.173.276	100	1.207.173.276,00	100	1.407.173.276		1.407.173.276	100	6.838.266.340	Sekretariat Daerah (Kesra)
	3.4.2.1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	100	100	251.199.980	100	553.586.638	100	603.586.638	100	603.586.638,00	100	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Kesra)
	3.4.2.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	251.199.980	100	553.586.638	100	603.586.638	100	603.586.638,00	100	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Kesra)
	3,5 Meningkatnya Budaya Baca	**Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan**	**%**	**n/a**	**69,55**	**10.699.500.000**	**69,75**	**10.502.400.000**	**70**	**10.502.400.000**	**70,3**	**10.402.400.000**	**70,6**	**10.752.400.000**	**70,9**	**10.752.400.000**	**70,9**	**63.611.500.000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah / Dinas Pendidikan**
	3.5.1 Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Untuk Perpustakaan Daerah			61	5.700.000.000	68	5.600.000.000	75	5.600.000.000	82	5.500.000.000	90	5.700.000.000	90	5.700.000.000	90	33.800.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/ *outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.5.1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%		20	750.000.000	40	750.000.000	60	750.000.000	80	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	4.500.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.1.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%		66	1.500.000.000	75	1.500.000.000	84	1.500.000.000	93	1.500.000.000	98	1.500.000.000	98	1.500.000.000	98	9.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.1.3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%		20	500.000.000	40	400.000.000	60	400.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	2.200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.1.4	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%		20	2.300.000.000	40	2.300.000.000	50	2.300.000.000	60	2.300.000.000	70	2.300.000.000	90	2.300.000.000	90	13.800.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.1.5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	%		48	250.000.000	48	250.000.000	48	250.000.000	72	250.000.000	96	350.000.000	96	350.000.000	96	1.700.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.1.6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	%		20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	1.200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.1.7	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%		13	200.000.000	26	200.000.000	40	200.000.000	45	200.000.000	53	300.000.000	66	300.000.000	66	1.400.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Untuk Perpustakaan Pendidikan Dasar	%		45	4.999.500.000	49	4.902.400.000	53	4.902.400.000	58	4.902.400.000	63	5.052.400.000	69	5.052.400.000	69	29.811.500.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%		50	750.000.000	52	652.900.000	57	652.900.000	62	652.900.000	67	752.900.000	72	752.900.000	72	4.214.500.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%		50	1.000.000.000	52	1.000.000.000	57	1.000.000.000	62	1.000.000.000	67	1.000.000.000	72	1.000.000.000	72	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2.3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%		50	350.000.000	52	350.000.000	57	350.000.000	62	350.000.000	67	350.000.000	72	350.000.000	72	2.100.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2.4	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari	%		30	200.000.000	32	200.000.000	37	200.000.000	42	200.000.000	47	250.000.000	52	250.000.000	52	1.300.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2.5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%		20	2.500.000.000	40	2.500.000.000	50	2.500.000.000	60	2.500.000.000	80	2.500.000.000	90	2.500.000.000	90	15.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3.5.2.6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%		10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	1.197.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
3,6	**Menurunnya Tingkat Kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**%**	**12,90**	**12,75**	**4.542.981.779**	**12,35**	**7.719.291.957**	**11,90**	**7.809.795.240**	**11,4**	**7.498.273.028**	**10,7**	**7.847.927.393**	**9,99**	**7.847.927.393**	**9,99**	**4.409.297.797**	**Lintas SKPD**
3.6.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kemiskinan	%	100	100	302.105.086	100	584.982.286	100	554.603.216	100	1.023.953.024	100	523.953.024	100	523.953.024	100	3.513.549.658	Dinas Sosial / Bappeda
3.6.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	%	12,7	12,2	10.714.286	11,7	195.396.886	11,2	195.396.886	10,7	164.746.694	10,2	164.746.694	9,7	164.746.694	9,7	895.748.138	Dinas Sosial
3.6.1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100	291.390.800	100	389.585.400	100	359.206.330	100	859.206.330	100	359.206.330	100	359.206.330	100	2.617.801.520	Bappeda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.6.2 Optimalisasi Program Perlindungan Sosial	Cakupan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Miskin	%	2,45	3,45	2.042.857.143	4,45	4.631.587.543	5,45	4.631.587.543	6,45	Rp4.058.986.775	7,45	4.508.986.775	8,45	4.508.986.775	8,45	24.382.992.553	Dinas Sosial
	3.6.2.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	%	1,02	2,02	10.714.286	3,02	195.396.886	4,02	195.396.886	5,02	164.746.694	6,02	164.746.694	7,02	164.746.694	7,02	895.748.138	Dinas Sosial
	3.6.2.2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%	1,39	2,39	10.714.286	3,39	195.396.886	4,39	195.396.886	5,39	164.746.694	6,39	164.746.694	7,39	164.746.694	7,39	895.748.138	Dinas Sosial
	3.6.2.3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah	%	0,04	1,04	10.714.286	2,04	195.396.886	3,04	195.396.886	4,04	164.746.694	5,04	164.746.694	6,04	164.746.694	6,04	895.748.138	Dinas Sosial
	3.6.2.4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional	%	47,3	47,29	10.714.286	47,28	195.396.886	47,28	195.396.886	47,28	164.746.694	47,28	164.746.694	47,28	164.746.694	47,28	895.748.138	Dinas Kesehatan
	3.6.2.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	%	6,9	7,1	2.000.000.000	7,2	2.000.000.000	7,3	2.000.000.000	7,4	2.000.000.000	7,5	2.000.000.000	7,6	2.000.000.000	7,7	12.000.000.000	Dinas Kesehatan
	3.6.2.6 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	%	24,5	30		35	200.000.000	40	200.000.000	45	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	60	1.000.000.000	Dinas PU
	3.6.2.7 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	%	n/a	0		12,35	1.450.000.000	11,78	1.450.000.000	11,21	1.000.000.000	10,64	1.450.000.000	10,64	1.450.000.000	10,08	6.800.000.000	Dinas PU
	3.6.2.8 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	%	n/a	20		20	200.000.000	40	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	80	1.000.000.000	Dinas PU
	3.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%		2,08	1.314.552.571	2,08	1.327.421.990	2,08	1.398.304.343	2,08	1.280.206.592	2,08	1.489.687.457	2,08	1.489.687.457	2,08	8.299.860.409	
	3.6.3.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	%	0	0.15	6.700.000	0.15	16.130.000	0.15	16.168.500	0.15	16.130.000	0.15	18.750.000	0.15	18.750.000	0.15	92.628.500	Dinas Sosial
	3.6.3.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan	%		0.15	6.700.000	0.15	16.168.500	0.15	16.130.000	0.15	16.130.000	0.15	18.750.000	0.15	18.750.000	0.15	92.628.500	Dinas TPHP
	3.6.3.3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura	%		0.15	6.700.000	0.15	16.130.000	0.15	16.130.000	0.15	16.168.500	0.15	18.750.000	0.15	18.750.000	0.15	92.628.500	Dinas TPHP
	3.6.3.4 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan	%		0.15	19.900.000		21.442.000	0.15	31.442.000	0.15	17.000.000	0.15	40.000.000	0.15	40.000.000	0.15	169.784.000	Dinas TPHP
	3.6.3.5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan	%		0.15	25.200.000	0.15	29.200.000	0.15	29.200.000	0.15	21.600.000	0.15	30.750.000	0.15	30.750.000	0.15	166.700.000	Dinas Perkebunan
	3.6.3.6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	%		0.15	51.250.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	246.250.000	Dinas Perikanan
	3.6.3.7 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	%		0.15	51.250.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	246.250.000	Dinas Perikanan
	3.6.3.8 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pemasaran Ikan	%		0.15	309.794.471	0.15	315.284.590	0.15	321.166.943	0.15	315.284.590	0.15	325.646.557	0.15	325.646.557	0.15	1.912.823.707	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.6.3.9 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	%	na	0,15		0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	100.000.000	Dinas Indag
	3.6.3.10 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	%		0.15	43.763.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	230.400.400	Dinas Koperasi dan UKM
	3.6.3.11 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	%	0.15	0.15	86.027.700	0.15	106.026.000	0.15	106.026.000	0.15	106.026.000	0.15	175.000.000	0.15	175.000.000	0.15	754.105.700	Dlnas Nakertrans
	3.6.3.12 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	%	0.15	0.15	25.000.000	0.15	0	0.15	55.000.000	0.15	55.000.000	0.15	55.000.000	0.15	55.000.000	0.15	245.000.000	Dlnas Nakertrans
	3.6.3.13 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	%	0.15	0.15	50.000.000	0.15	50.000.000	0.15	50.000.000	0.15	50.000.000	0.15	50.000.000	0.15	50.000.000	0.15	300.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.6.3.14 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%		0.15	632.267.000	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	531.540.101	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	3.650.661.101	Dinas PMPK
	3.6.4 Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi Dengan Berbagai Pihak	%	0	0,30	883.466.980	0,30	1.175.300.138	0,30	1.225.300.138	0,30	1.135.126.638	0,30	1.325.300.138		1.325.300.138	0,30	7.069.794.170	
	3.6.4.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%		0.15	632.267.000	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	531.540.000	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	3.650.661.000	Dinas PMPK
	3.6.4.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	%		0.15	251.199.980	0.15	553.586.638	0.15	603.586.638	0.15	603.586.638,00	0.15	703.586.638	0.15	703.586.638	0.15	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
	3,7 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	**Indeks Kabupaten Layak Anak**	**Kategori**	**Pratama**	**Pratama**	**22.915.095**	**Pratama**	**196.087.995**	**Madya**	**196.087.995**	**Madya**	**183.843.680**	**Madya**	**255.712.800**	**Madya**	**255.712.800**	**Madya**	**1.110.360.365**	**Dinas PPPA DALDUKKB**
	3.7.1 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	40	50	12.775.095	60	15.375.195	70	15.375.195	80	33.130.880	90	75.000.000		75.000.000	90	226.656.365	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.7.1.1 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan DuniaUsaha	%	40	50	6.775.095	60	7.687.598	70	7.687.598	80	16.565.440	90	37.500.000	90	37.500.000	90	113.715.730	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.7.1.2 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	40	50	6.000.000	60	7.687.598	70	7.687.598	80	16.565.440	90	37.500.000	90	37.500.000	90	112.940.635	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.7.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	10.140.000	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800		50.712.800	100	263.704.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.7.2.1 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	100	10.140.000	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	263.704.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.7.3 Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	n/a	5	0	10	130.000.000	15	130.000.000	20	100.000.000	25	130.000.000	25	130.000.000	25	620.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.7.3.1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	n/a	5		10	130.000.000	15	130.000.000	20	100.000.000	25	130.000.000	25	130.000.000	25	620.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3,8 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**%**	**1,51**	**0,9**	**6.086.374.605**	**0,9**	**6.213.374.605**	**0,9**	**6.213.374.605**	**0,9**	**6.213.374.605**	**0,9**	**6.514.374.605**	**0,9**	**6.514.374.605**	**0,9**	**37.755.247.630**	**Dinas PPPA DALDUKKB**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.8.1 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%		0,9		0,9	18.000.000		18.000.000		18.000.000		250.000.000		250.000.000		554.000.000	
	3.8.1.1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%		0,9		0,9	18.000.000	0,9	18.000.000	0,9	18.000.000	0,9	250.000.000	0,9	250.000.000	0,9	554.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.2 Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	81,4	81,9	6.086.374.605	82,4	6.114.374.605	82,9	6.114.374.605	83,4	6.114.374.605	83,9	6.114.374.605	83,9	6.114.374.605	83,9	36.658.247.630	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.2.1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	%	11	10,5	6.086.374.605	10	6.114.374.605	9,5	6.114.374.605	9	6.114.374.605	8,5	6.114.374.605	8	6.114.374.605	8	36.658.247.630	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.3 Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	10	10	0	10	81.000.000	10	81.000.000	10	81.000.000	10	150.000.000	50	150.000.000	50	543.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.3.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	%	10	10		10	32.400.000	10	32.400.000	10	32.400.000	10	60.000.000	50	60.000.000	50	217.200.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.3.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	10	10		10	16.200.000	10	16.200.000	10	16.200.000	10	30.000.000	50	30.000.000	50	108.600.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja	%	10	10		10	16.200.000	10	16.200.000	10	16.200.000	10	30.000.000	50	30.000.000	50	108.600.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3.8.3.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Keluarga	%	10	10		10	16.200.000	10	16.200.000	10	16.200.000	10	30.000.000	50	30.000.000	50	108.600.000	Dinas PPPA DALDUKKB
	3,9 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	**Indeks Desa Membangun**	**Poin**	**0,6541**	**0,6558**	**9.840.751.114**	**0,6583**	**8.767.082.434**	**0,6608**	**8.333.181.534**	**0,6633**	**7.921.121.434**	**0,6658**	**8.712.582.536**	**0,6683**	**8.657.582.536**	**0,6683**	**52.232.301.588**	**Dinas PMPK**
	3.9.1 Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Poin	3,00	3,05	3.819.654.500	3,13	3.819.654.500	3,19	3.330.753.600	3,25	3330753600	3,29	3.330.753.600	3,29	3.330.753.600	3,29	20.962.323.400	Dinas PMPK
	3.9.1.1 PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%		10	55.000.000	14	55.000.000	16	55.000.000	18	55000000	20	55.000.000	23	55.000.000	23	330.000.000	Dinas PMPK
	3.9.1.2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%		7	200.403.600	10	200.403.600	14	200.403.600	21	200403600	23	200.403.600	25	200.403.600	25	1.202.421.600	Dinas PMPK
	3.9.1.3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%		100	809.843.400	100	809.843.400	100	320.942.500	100	320942500	100	320.942.500	100	320.942.500	100	2.903.456.800	Dinas PMPK
	3.9.1.4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%		100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342259000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	2.053.554.000	Dinas PMPK
	3.9.1.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%		43	2.412.148.500	43	2.412.148.500	51	2.412.148.500	55	2412148500	60	2.412.148.500	66	2.412.148.500	66	14.472.891.000	Dinas PMPK
	3.9.2 Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi	Indeks Desa Membangun Kampung Transmigrasi	Poin	0,6699	0,6766	25.000.000	0,6834	0	0,6902	55.000.000	0,6971	55.000.000	0,7041	55.000.000	0,711	0	0,7111	190.000.000	Dinas Nakertrans
	3.9.2.1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Kelompok	55	11	25.000.000	11	0	11	55.000.000	11	55.000.000	11	55.000.000	11		11	190.000.000	Dinas Nakertrans

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.9.3	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	Indeks Desa Membangun Kecamatan Blambangan Umpu	Poin	0,6228	0,6290	773.068.208	0,6353	564.224.713	0,6416	564.224.713	0,6480	564.224.713	0,6545	619.564.615	0,6611	619.564.615	0,6611	3.704.871.577	Kec. B. Umpu
3.9.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	23.693.142	62	26.546.332	63	26.546.332	64	26.546.332	65	50.000.000	65	50.000.000	65	203.332.138	Kec. B. Umpu
3.9.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	61	666.261.300	62	444.564.615	63	444.564.615	64	444.564.615	65	444.564.615	65	444.564.615	65	2.889.084.375	Kec. B. Umpu
3.9.3.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	54.998.816	62	54.998.816	63	54.998.816	64	54.998.816	65	65.000.000	65	65.000.000	65	349.995.264	Kec. B. Umpu
3.9.3.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000		10.000.000	65	50.000.000	Kec. B. Umpu
3.9.3.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	28.114.950	62	28.114.950	63	28.114.950	64	28.114.950	65	50.000.000	65	50.000.000	65	212.459.800	Kec. B. Umpu
3.9.4	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	Indeks Desa Membangun Kecamatan Banjit	Poin	0,6202	0,6264	933.962.350	0,6327	686.321.050	0,6390	686.321.050	0,6454	480.391.000	0,6518	770.105.000	0,6584	770.105.000	0,6584	4.327.205.450	Kec. Banjit
3.9.4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	78.360.050	62	86.375.050	63	86.375.050	64	50.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	501.110.150	Kec. Banjit
3.9.4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	61	743.997.300	62	389.450.000	63	389.450.000	64	290.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	65	2.592.897.300	Kec. Banjit
3.9.4.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	41.000.000	62	55.391.000	63	55.391.000	64	55.391.000	65	125.000.000	65	125.000.000	65	457.173.000	Kec. Banjit
3.9.4.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. Banjit
3.9.4.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	70.605.000	62	145.105.000	63	145.105.000	64	75.000.000	65	145.105.000	65	145.105.000	65	726.025.000	Kec. Banjit
3.9.5	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Baradatu	Indeks Desa Membangun Kecamatan Baradatu	Poin	0,6738	0,6805	933.962.350	0,6874	686.321.050	0,6942	686.321.050	0,7012	480.391.000	0,7082	770.105.000	0,7153	770.105.000	0,7153	4.327.205.450	Kec. Baradatu
3.9.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	78.360.050	62	86.375.050	63	86.375.050	64	50.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	501.110.150	Kec. Baradatu
3.9.5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	61	743.997.300	62	389.450.000	63	389.450.000	64	290.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	65	2.592.897.300	Kec. Baradatu
3.9.5.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	41.000.000	62	55.391.000	63	55.391.000	64	55.391.000	65	125.000.000	65	125.000.000	65	457.173.000	Kec. Baradatu
3.9.5.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. Baradatu
3.9.5.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	70.605.000	62	145.105.000	63	145.105.000	64	75.000.000	65	145.105.000	65	145.105.000	65	726.025.000	Kec. Baradatu
3.9.6	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Kasui	Indeks Desa Membangun Kecamatan Kasui	Poin	0,6494	0,6559	727.173.300	0,6624	433.267.915	0,6691	433.267.915	0,6758	433.067.915	0,6825	433.267.915	0,689	433.267.915	0,6893	2.893.312.875	Kec. Kasui
3.9.6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	23.000.000	62	65.292.915	63	65.292.915	64	65.292.915	65	65.292.915	65	65.292.915	65	349.464.575	Kec. Kasui

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.9.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	61	660.144.000	62	292.975.000	63	292.975.000	64	292.775.000	65	292.975.000	65	292.975.000	65	2.124.819.000	Kec. Kasui
3.9.6.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	23.049.300	62	15.000.000	63	15.000.000	64	15.000.000	65	15.000.000	65	15.000.000	65	98.049.300	Kec. Kasui
3.9.6.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. Kasui
3.9.6.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	20.980.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	270.980.000	Kec. Kasui
3.9.7	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Pakuan Ratu	Indeks Desa Membangun Kecamatan Pakuan Ratu	Poin	0,6397	0,6461	283.525.874	0,6526	283.525.874	0,6591	283.525.874	0,6657	283.525.874	0,6724	283.525.874	0,6791	283.525.874	0,6791	1.701.155.244	Kec. P. Ratu
3.9.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	55.349.978	62	55.349.978	63	55.349.978	64	55.349.978	65	55.349.978	65	55.349.978	65	332.099.868	Kec. P. Ratu
3.9.7.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	106.674.970	62	96.674.970	63	96.674.970	64	96.674.970	65	96.674.970	65	96.674.970	65	590.049.820	Kec. P. Ratu
3.9.7.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kec. P. Ratu
3.9.7.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. P. Ratu
3.9.7.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	71.500.926	62	71.500.926	63	71.500.926	64	71.500.926	65	71.500.926	65	71.500.926	65	429.005.556	Kec. P. Ratu
3.9.8	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Bahuga	Indeks Desa Membangun Kecamatan Bahuga	Poin	0,6414	0,6478	182.424.800	0,6543	177.214.800	0,6609	177.214.800	0,6675	177.214.800	0,6741	225.000.000	0,6809	225.000.000	0,6809	1.164.069.200	Kec. Bahuga
3.9.8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	42.748.900	62	41.848.900	63	41.848.900	64	41.848.900	65	50.000.000	65	50.000.000	65	268.295.600	Kec. Bahuga
3.9.8.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	54.141.000	62	45.571.000	63	45.571.000	64	45.571.000	65	70.000.000	65	70.000.000	65	330.854.000	Kec. Bahuga
3.9.8.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	49.999.000	62	44.999.000	63	44.999.000	64	44.999.000	65	45.000.000	65	45.000.000	65	274.996.000	Kec. Bahuga
3.9.8.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. Bahuga
3.9.8.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	35.535.900	62	34.795.900	63	34.795.900	64	34.795.900	65	50.000.000	65	50.000.000	65	239.923.600	Kec. Bahuga
3.9.9	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Way Tuba	Indeks Desa Membangun Kecamatan Way Tuba	Poin	0,6531	0,6596	216.292.000	0,6662	216.292.000	0,6729	216.292.000	0,6796	216.292.000	0,6864	325.000.000	0,693	325.000.000	0,6933	1.515.168.000	Kec. W. Tuba
3.9.9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	36.000.000	62	36.000.000	63	36.000.000	64	36.000.000	65	75.000.000	65	75.000.000	65	294.000.000	Kec. W. Tuba
3.9.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	80.292.000	62	70.292.000	63	70.292.000	64	70.292.000	65	90.000.000	65	90.000.000	65	471.168.000	Kec. W. Tuba
3.9.9.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	75.000.000	65	75.000.000	65	350.000.000	Kec. W. Tuba

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.9.9.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. W. Tuba
3.9.9.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	75.000.000	65	75.000.000	65	350.000.000	Kec. W. Tuba
3.9.10	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negeri Agung	Indeks Desa Membangun Kecamatan Negeri Agung	Poin	0,6276	0,6339	291.998.248	0,6402	267.048.248	0,6466	267.048.248	0,6531	267.048.248	0,6596	267.048.248	0,666	267.048.248	0,6662	1.627.239.488	Kec.N.Agung
3.9.10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	56.797.952	62	51.797.952	63	51.797.952	64	51.797.952	65	51.797.952	65	51.797.952	65	315.787.712	Kec.N.Agung
3.9.10.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	112.965.120	62	86.715.120	63	86.715.120	64	86.715.120	65	86.715.120	65	86.715.120	65	546.540.720	Kec.N.Agung
3.9.10.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	49.968.688	62	49.968.688	63	49.968.688	64	49.968.688	65	49.968.688	65	49.968.688	65	299.812.128	Kec.N.Agung
3.9.10.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec.N.Agung
3.9.10.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	72.266.488	62	68.566.488	63	68.566.488	64	68.566.488	65	68.566.488	65	68.566.488	65	415.098.928	Kec.N.Agung
3.9.11	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Gunung Labuhan	Indeks Desa Membangun Kecamatan Gunung Labuhan	Poin	0,6510	0,6575	303.863.600	0,6641	303.863.600	0,6707	303.863.600	0,6774	303.863.600	0,6842	303.863.600	0,691	303.863.600	0,6910	1.823.181.600	Kec. G.Labuhan
3.9.11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	58.400.000	62	58.400.000	63	58.400.000	64	58.400.000	65	58.400.000	65	58.400.000	65	350.400.000	Kec. G.Labuhan
3.9.11.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	118.463.600	62	108.463.600	63	108.463.600	64	108.463.600	65	108.463.600	65	108.463.600	65	660.781.600	Kec. G.Labuhan
3.9.11.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kec. G.Labuhan
3.9.11.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. G.Labuhan
3.9.11.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	77.000.000	62	77.000.000	63	77.000.000	64	77.000.000	65	77.000.000	65	77.000.000	65	462.000.000	Kec. G.Labuhan
3.9.12	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Rebang Tangkas	Indeks Desa Membangun Kecamatan Rebang Tangkas	Poin	0,6830	0,6899	206.903.300	0,6968	203.513.100	0,7037	203.513.100	0,7108	203.513.100	0,7179	203.513.100	0,7250	203.513.100	0,7250	1.224.468.800	Kec. R.Tangkas
3.9.12.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	37.303.900	62	33.913.700	63	33.913.700	64	33.913.700	65	33.913.700	65	33.913.700	65	206.872.400	Kec. R.Tangkas
3.9.12.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	73.523.100	62	68.523.100	63	68.523.100	64	68.523.100	65	68.523.100	65	68.523.100	65	416.138.600	Kec. R.Tangkas
3.9.12.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	49.999.600	62	44.999.600	63	44.999.600	64	44.999.600	65	44.999.600	65	44.999.600	65	274.997.600	Kec. R.Tangkas
3.9.12.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. R.Tangkas
3.9.12.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	46.076.700	62	46.076.700	63	46.076.700	64	46.076.700	65	46.076.700	65	46.076.700	65	276.460.200	Kec. R.Tangkas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.9.13	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negara Batin	Indeks Desa Membangun Kecamatan Negara Batin	Poin	0,6621	0,6687	261.326.490	0,6754	262.439.490	0,6822	262.439.490	0,6890	262.439.490	0,6959	262.439.490	0,7028	262.439.490	0,7028	1.573.523.940	Kec.N.Batin
3.9.13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	46.678.800	62	46.678.800	63	46.678.800	64	46.678.800	65	46.678.800	65	46.678.800	65	280.072.800	Kec.N.Batin
3.9.13.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	101.523.244	62	92.636.244	63	92.636.244	64	92.636.244	65	92.636.244	65	92.636.244	65	564.704.464	Kec.N.Batin
3.9.13.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	49.999.950	62	49.999.950	63	49.999.950	64	49.999.950	65	49.999.950	65	49.999.950	65	299.999.700	Kec.N.Batin
3.9.13.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec.N.Batin
3.9.13.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	63.124.496	62	63.124.496	63	63.124.496	64	63.124.496	65	63.124.496	65	63.124.496	65	378.746.976	Kec.N.Batin
3.9.14	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negeri Besar	Indeks Desa Membangun Kecamatan Negeri Besar	Poin	0,6480	0,6545	245.599.094	0,6611	241.399.094	0,6677	241.399.094	0,6743	241.399.094	0,6811	241.399.094	0,6879	241.399.094	0,6879	1.452.594.564	Kec. N. Besar
3.9.14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	43.709.366	62	43.709.366	63	43.709.366	64	43.709.366	65	43.709.366	65	43.709.366	65	262.256.196	Kec. N. Besar
3.9.14.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	99.639.824	62	89.639.824	63	89.639.824	64	89.639.824	65	89.639.824	65	89.639.824	65	547.838.944	Kec. N. Besar
3.9.14.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	49.999.908	62	45.799.908	63	45.799.908	64	45.799.908	65	45.799.908	65	45.799.908	65	278.999.448	Kec. N. Besar
3.9.14.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. N. Besar
3.9.14.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	52.249.996	62	52.249.996	63	52.249.996	64	52.249.996	65	52.249.996	65	52.249.996	65	313.499.976	Kec. N. Besar
3.9.15	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Buay Bahuga	Indeks Desa Membangun Kecamatan Buay Bahuga	Poin	0,6414	0,6478	205.605.000	0,6543	205.605.000	0,6609	205.605.000	0,6675	205.605.000	0,6741	205.605.000	0,6809	205.605.000	0,6809	1.233.630.000	Kec.Buay Bahuga
3.9.15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	43.371.000	62	43.371.000	63	43.371.000	64	43.371.000	65	43.371.000	65	43.371.000	65	260.226.000	Kec.Buay Bahuga
3.9.15.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	82.033.000	62	72.033.000	63	72.033.000	64	72.033.000	65	72.033.000	65	72.033.000	65	442.198.000	Kec.Buay Bahuga
3.9.15.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kec.Buay Bahuga
3.9.15.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec.Buay Bahuga
3.9.15.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	30.201.000	62	30.201.000	63	30.201.000	64	30.201.000	65	30.201.000	65	30.201.000	65	181.206.000	Kec.Buay Bahuga
3.9.16	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Bumi Agung	Indeks Desa Membangun Kecamatan Bumi Agung	Poin	0,6647	0,6714	214.100.000	0,6781	214.100.000	0,6849	214.100.000	0,6917	214.100.000	0,6986	214.100.000	0,7056	214.100.000	0,7056	1.284.600.000	Kec. B. Agung
3.9.16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	36.450.000	62	36.450.000	63	36.450.000	64	36.450.000	65	36.450.000	65	36.450.000	65	218.700.000	Kec. B. Agung

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.9.16.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	82.650.000	62	72.650.000	63	72.650.000	64	72.650.000	65	72.650.000	65	72.650.000	65	445.900.000	Kec. B. Agung
	3.9.16.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kec. B. Agung
	3.9.16.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. B. Agung
	3.9.16.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	45.000.000	62	45.000.000	63	45.000.000	64	45.000.000	65	45.000.000	65	45.000.000	65	270.000.000	Kec. B. Agung
	3.9.17 Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Umpu Semenguk	Indeks Desa Membangun Kecamatan Umpu Semenguk	Poin	0,6529	0,6595	216.292.000	0,6661	202.292.000	0,6727	202.292.000	0,6795	202.292.000	0,6862	202.292.000	0,6931	202.292.000	0,6931	1.227.752.000	Kec. Umpu Semenguk
	3.9.17.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	60	61	36.000.000	62	36.000.000	63	36.000.000	64	36.000.000	65	36.000.000	65	36.000.000	65	216.000.000	Kec. Umpu Semenguk
	3.9.17.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung Yang Diberdayakan	%	60	61	130.292.000	62	56.292.000	63	56.292.000	64	56.292.000	65	56.292.000	65	56.292.000	65	411.752.000	Kec. Umpu Semenguk
	3.9.17.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	61		62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	250.000.000	Kec. Umpu Semenguk
	3.9.17.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. Umpu Semenguk
	3.9.17.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kec. Umpu Semenguk
	3,10 Meningkatnya Pembangunan Gender	**Indeks Pembangunan Gender**	**Poin**	**88,19**	**88,23**	**386.089.900**	**88,27**	**399.099.900**	**88,32**	**399.099.900**	**88,37**	**219.099.900**	**88,44**	**425.000.000**	**88,54**	**425.000.000**	**88,54**	**2.253.389.600**	**Dinas PPPA DALDUK KB**
	3.10.1 Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,3	65,95	341.990.000	66,61	355.000.000	67,28	355.000.000	67,95	175.000.000	68,63	355.000.000	69,32	355.000.000	69,32	1.936.990.000	Dinas PPPA DALDUK KB
	3.10.1.1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang telah menerapkan ARG	%	15	20.00	341.990.000	25.00	355.000.000	27.00	355.000.000	30.00	175.000.000	35.00	355.000.000	45.00	355.000.000	45.00	1.936.990.000	Dinas PPPA DALDUK KB
	3.10.2 Mengurangi Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan	Angka Kekerasan Perempuan	Kasus	28	20	44.099.900	15	44.099.900	10	44.099.900	5	44.099.900	0	70.000.000		70.000.000	0	316.399.600	Dinas PPPA DALDUK KB
	3.10.2.1 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus Kekerasaan pada Perempuan	%	100	100	44.099.900	100	44.099.900	100	44.099.900	100	44.099.900	100	70.000.000	100	70.000.000	100	316.399.600	Dinas PPPA DALDUK KB
	3,11 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	**Cakupan Pembinaan Pemuda**	**%**	**n/a**	**0,01**	**600.000.000**	**0,03**	**583.425.000**	**0,04**	**583.425.000**	**0,06**	**536.312.845**	**0,07**	**683.425.000**	**0,09**	**683.425.000**	**0,09**	**3.670.012.845**	**Dinas Porapar**
	3.11.1 Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda	Persentase Wirausaha Muda	%	n/a	4,41	150.000.000	8,81	145.856.250	13,22	145.856.250	17,62	134.078.211	22,03	145.856.250	26,43	145.856.250	26,43	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	%	n/a	17.62	150.000.000	17.62	145.856.250	17.62	145.856.250	17.62	134.078.211	17.62	145.856.250	17.62	145.856.250	17.62	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.2 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor	Persentase Pemuda Pelopor	%	n/a	0,00	150.000.000	17,62	145.856.250	26,43	145.856.250	35,24	134.078.211	44,05	145.856.250	52,86	145.856.250	52,86	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor	%	n/a	13.22	150.000.000	13.22	145.856.250	13.22	145.856.250	13.22	134.078.211	13.22	145.856.250	13.22	145.856.250	13.22	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.3 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader	Persentase Pemuda Kader	%	n/a	5,88	150.000.000	11,76	145.856.250	17,65	145.856.250	23,53	134.078.211	29,41	145.856.250	29,41	145.856.250	29,41	867.503.211	Dinas Porapar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.11.3.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader	%	n/a	30%	150.000.000	100	145.856.250	100	145.856.250	100	134.078.211	100	145.856.250	100	145.856.250	100	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.4 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	70.58 %	76.47	150.000.000	82.35	145.856.250	88.24	145.856.250	94.12	134.078.211	100.00	145.856.250	100.00	145.856.250	100.00	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	%		5.88	150.000.000	5.88	145.856.250	5.88	145.856.250	5.88	134.078.211	5.88	145.856.250	5.88	145.856.250	5.88	867.503.211	Dinas Porapar
	3.11.5 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Persentase Gugus depan yang ter akreditasi	%	80.00 %	55,4	0	56,98	0	58,57	0	60,16	0	61,75	100.000.000	63,33	100.000.000	63,33	200.000.000	Dinas Porapar
	3.11.5.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan	%		3.97	0	3.97	0	3.97	0	3.97	0	4.13	100.000.000	4.13	100.000.000	4.13	200.000.000	Dinas Porapar
3,12	**Meningkatnya Kualitas Olahraga**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**%**	**29,17**	**30,00**	**640.000.000**	**33,33**	**730.000.000**	**40,00**	**730.000.000**	**46,67**	**630.000.000**	**56,67**	**730.000.000**	**56,67**	**730.000.000**	**56,67**	**4.190.000.000**	**Dinas Porapar**
	3.12.1 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi	%	29.17	33.33	213.334.000	37.50	243.334.000	45.83	243.334.000	54.17	210.000.000	62.50	243.334.000	62.50	243.334.000	62.50	1.396.670.000	Dinas Porapar
	3.12.1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	%		14.29	213.334.000	12.50	243.334.000	11.11	243.334.000	20	210.000.000	16.67	243.334.000	16.67	243.334.000	16.67	1.396.670.000	Dinas Porapar
	3.12.2 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan	Persentase Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	n/a	12.50	213.333.000	25.00	243.333.000	37.50	243.333.000	50.00	210.000.000	62.50	243.333.000	62.50	243.333.000	62.50	1.396.665.000	Dinas Porapar
	3.12.2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	n/a	12.50	213.333.000	12.50	243.333.000	12.50	243.333.000	12.50	210.000.000	12.50	243.333.000	12.50	243.333.000	12.50	1.396.665.000	Dinas Porapar
	3.12.3 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	n/a	16.67	213.333.000	33.33	243.333.000	50.00	243.333.000	66.67	210.000.000	100.00	243.333.000	100.00	243.333.000	100.00	1.396.665.000	Dinas Porapar
	3.12.3.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	n/a	16.67	213.333.000	16.67	243.333.000	16.67	243.333.000	16.67	210.000.000	33.33	243.333.000	33.33	243.333.000	33.33	1.396.665.000	Dinas Porapar
3,13	**Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah**	**Cakupan Pembinaan Kebudayaan**	**%**	**n/a**	**50**	**357.200.000**	**60**	**307.200.000**	**70**	**200.000.000**	**75**	**650.000.000**	**77**	**1.200.000.000**	**80**	**900.000.000**	**80**	**3.614.400.000**	**Dinas P & K**
	3.13.1 Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	n/a	50	200.000.000	60	200.000.000	70	0	75	400.000.000	77	350.000.000	80	350.000.000	80	1.500.000.000	Dinas P & K
	3.13.1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	n/a	50	200.000.000	60	200.000.000	70		75	250.000.000	77	150.000.000	80	150.000.000	80	950.000.000	Dinas P & K
	3.13.1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Pembinaan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya di Way Kanan	%	n/a	0		20		30		40	150.000.000	50	200.000.000	60	200.000.000	60	550.000.000	
	3.13.2 Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	100	107.200.000	100	107.200.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	864.400.000	Dinas P & K
	3.13.2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	100	107.200.000	100	107.200.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	864.400.000	Dinas P & K
	3.13.3 Melestarikan Kesenian Tradisonal	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	n/a	60	0	67	0	70	0	75	-	80	200.000.000	80	200.000.000	80	400.000.000	Dinas P & K
	3.13.4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	n/a	60		67		70		75		80	200.000.000	80	200.000.000	80	400.000.000	Dinas P & K
	3.13.4 Pembinaan Sejarah Lokal	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%	n/a	50	50.000.000		0	65	100.000.000		-	75	200.000.000	75	200.000.000	75	550.000.000	Dinas P & K

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.13.5.1 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%	n/a	50	50.000.000			65	100.000.000			75	200.000.000	75	200.000.000	75	550.000.000	Dinas P & K
	3.13.5 Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	n/a	71,43	0		0	83,33	0	85,71	-		300.000.000		0	88,10	300.000.000	Dinas P & K
	3.13.6.1 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	n/a	71,43				83,33				85,71	300.000.000			88,10	300.000.000	Dinas P & K
	3,14 Mengurangi Dampak Bencana	**Indeks Resiko Bencana**	**Poin**	**131,19**	**131,19**	**9.389.568.700**	**131,19**	**10.148.048.751**	**131,19**	**10.253.005.198**	**131,19**	**11.465.031.351**	**131,19**	**17.640.906.365**	**131,19**	**17.428.213.473**	**131,19**	**76.324.773.839**	**BPBD**
	3.14.1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	n/a	5%	285.000.000	10%	356.000.000	15%	333.582.953	20%	348.000.000	80%	404.427.188	100%	294.624.296	100%	2.021.634.437	**BPBD**
	3.14.1.1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	n/a	5%	285.000.000	10%	356.000.000	15%	333.582.953	20%	348.000.000	80%	404.427.188	100%	294.624.296	100%	2.021.634.437	**BPBD**
	3.14.2 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	n/a	100%	437.290.000	100%	688.890.000	100%	636.200.000	100%	672.740.000	100%	724.690.000	100%	816.800.000	100%	3.976.610.000	**BPBD**
	3.14.2.1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	n/a	100%	437.290.000	100%	688.890.000	100%	636.200.000	100%	672.740.000	100%	724.690.000	100%	816.800.000	100%	3.976.610.000	**BPBD**
	3.14.3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	n/a	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	226.000.000	BPBD
	3.14.3.1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	n/a	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	226.000.000	BPBD
	3.14.4 Meningkatkan Penanganan Bencana	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	%	61.44	62.44	41.019.200	63.44	125.000.000	64.44	164.063.494	65.44	164.063.494	66.44	164.063.494	67.44	164.063.494	67.44	822.273.176	Dinas Sosial
	3.14.4.1 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	%	61.44	62.44	20.509.600	63.44	62.500.000	64.44	82.031.747	65.44	82.031.747	66.44	82.031.747	67.44	82.031.747	67.44	411.136.588	Dinas Sosial
	3.14.4.2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	2	3	20.509.600	4	62.500.000	5	82.031.747	6	82.031.747	7	82.031.747	8	82.031.747	8	411.136.588	Dinas Sosial
	3.14.5 Pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Persentase Penurunan Wilayah Dampak Bencana Banjir	%	0	0	1.629.049.500	1	2.597.158.751	2	2.597.158.751	3	1.758.099.000	4	4.539.771.141		4.539.771.141	5	17.661.008.284	Dinas PU
	3.14.5.1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	%	0	1	1.629.049.500	1	2.597.158.751	2	2.597.158.751	3	1.758.099.000	4	4.539.771.141	5	4.539.771.141	5	17.661.008.284	Dinas PU
	3.14.6 Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	%	0	0	919.210.000	1	290.000.000	2	290.000.000	3	290.000.000	4	290.000.000	5	290.000.000	5	2.369.210.000	Dinas PU
	3.14.6.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi		0	0	919.210.000	1	290.000.000	2	290.000.000	3	290.000.000	4	290.000.000	5	290.000.000	5	2.369.210.000	Dinas PU
	3.14.7 Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	n/a	5	6.000.000.000	5	6.000.000.000	5	6.000.000.000	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	48.543.037.942	Dinas PU
	3.14.7.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	n/a	5	6.000.000.000	5	6.000.000.000	5	6.000.000.000	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	48.543.037.942	Dinas PU

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.14.8	Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	30	46.000.000	30	59.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000		0	30	705.000.000	Satpol PP
3.14.8.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	30	46.000.000	30	59.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000		0	30	705.000.000	Satpol PP
3,15	**Meningkatnya Ketertiban Daerah**	**Cakupan Ketertiban**	**Poin**	**n/a**	**40**	**5.290.513.900**	**45**	**5.218.400.000**	**50**	**5.218.400.000**	**55**	**5.534.313.443**	**60**	**6.043.517.602**	**60**	**6.043.517.602**	**60**	**33.348.662.547**	**Satpol PP**
3.15.1	**Meningkatkan Penegakan Perda**	**Persentase Penegakan PERDA**	**%**	**2,5**	**2,67**	**1.763.504.633**	**3**	**1.739.466.667**	**3,33**	**1.739.466.667**	**3,67**	**1.844.771.148**	**4**	**2.014.505.867**	**100**	**2.014.505.867**	**100**	**11.116.220.849**	**Satpol PP**
3.15.1.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	2,5	2,67	1.763.504.633	3	1.739.466.667	3,33	1.739.466.667	3,67	1.844.771.148	4	2.014.505.867	100	2.014.505.867	100	11.116.220.849	Satpol PP
3.15.2	**Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)**	**%**	**100**	**100**	**1.763.504.633**	**100**	**1.739.466.667**	**100**	**1.739.466.667**	**100**	**1.844.771.148**	**100**	**2.014.505.867**	**100**	**2.014.505.867**	**100**	**11.116.220.849**	**Satpol PP**
3.15.2.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)	%	100	100	1.763.504.633	100	1.739.466.667	100	1.739.466.667	100	1.844.771.148	100	2.014.505.867	100	2.014.505.867	100	11.116.220.849	Satpol PP
3.15.3	**Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten**	**%**	**100**	**100**	**1.763.504.633**	**100**	**1.739.466.667**	**100**	**1.739.466.667**	**100**	**1.844.771.148**	**100**	**2.014.505.867**	**100**	**2.014.505.867**	**100**	**11.116.220.849**	**Satpol PP**
3.15.3.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten	%	100	100	1.763.504.633	100	1.739.466.667	100	1.739.466.667	100	1.844.771.148	100	2.014.505.867	100	2.014.505.867	100	11.116.220.849	Satpol PP
3,16	**Menurunnya Konflik Sosial**	**Angka Konflik Sosial**	**Kasus**	**0**	**0**	**1.465.855.400**	**0**	**1.536.473.000**	**0**	**2.183.376.000**	**0**	**2.072.033.790**	**0**	**2.283.376.000**	**0**	**2.283.376.000**	**0**	**11.824.490.190**	**Kesbangpol**
3.16.1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	20	20	36.140.000	20	153.900.000	20	153.900.000	20	75.000.000	20	153.900.000	100	153.900.000	100	726.740.000	Kesbangpol
3.16.1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kecamatan	15	15	36.140.000	15	153.900.000	15	153.900.000	15	75.000.000	15	153.900.000	75	153.900.000	75	726.740.000	Kesbangpol
3.16.2	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100	100	1.115.015.000	100	1.171.850.000	100	1.171.850.000	100	1.171.850.000	100	1.271.850.000	100	1.271.850.000	100	7.174.265.000	Kesbangpol
3.16.2.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	Kecamatan	100	100	1.115.015.000	100	1.171.850.000	100	1.171.850.000	100	1.171.850.000	100	1.271.850.000	100	1.271.850.000	100	7.174.265.000	Kesbangpol
3.16.3	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	16,67	16,67	61.560.000	18,33	61.530.000	20	61.530.000	21,67	64.087.790	23,33	61.530.000	100	61.530.000	100	371.767.790	Kesbangpol
3.16.3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Orkemas	10	10	61.560.000	11	61.530.000	12	61.530.000	13	64.087.790	14	61.530.000	60	61.530.000	60	371.767.790	Kesbangpol
3.16.4	Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi	Cakupan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	%	100	100	53.140.400	100	53.097.000	100	100.000.000	100	65.000.000	100	100.000.000		100.000.000	100	471.237.400	Kesbangpol
3.16.4.1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kecamatan	100	100	53.140.400	100	53.097.000	100	100.000.000	100	65.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	471.237.400	Kesbangpol
3.16.5	Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	20	20	200.000.000	20	96.096.000	20	96.096.000	20	96.096.000	20	96.096.000	100	96.096.000	100	680.480.000	Kesbangpol

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3.16.5.1 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	dokumen	12	12	200.000.000	12	96.096.000	12	96.096.000	12	96.096.000	12	96.096.000	60	96.096.000	60	680.480.000	Kesbangpol
	3.16.6 Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	0	15	0	20	0	40	600.000.000	60	600.000.000,00	80	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	Sekretariat Daerah (Tapem)
	3.16.6.1 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%		15		20		40		60		80		100		100	0	OPD yang membidangi Pertanahan
	3.16.6.2 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah	%						1	100.000.000	2	100.000.000,00	3	100.000.000	4	100.000.000	4	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3.16.6.3 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	%						1	100.000.000	2	100.000.000,00	3	100.000.000	4	100.000.000	4	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3.16.6.4 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%						2	100.000.000	4	100.000.000,00	6	100.000.000	8	100.000.000	8	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3.16.6.5 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%						2	100.000.000	4	100.000.000,00	6	100.000.000	8	100.000.000	8	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3.16.6.6 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin membuka tanah	%						100	100.000.000	100	100.000.000,00	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3.16.6.7 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupaten	%						2	100.000.000	4	100.000.000,00	6	100.000.000	8	100.000.000	8	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3,17 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Poin**	**73,55**	**73,65**	**690.268.500**	**73,75**	**675.382.450**	**73,85**	**938.979.300**	**73,95**	**795.000.000**	**74,05**	**1.174.276.125**	**74,15**	**1.174.276.125**	**74,15**	**3.050.123.900**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	3.17.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	20,59	20,59	**44.701.000**	23,53	**46.701.000**	26,47	**115.000.000**	29,41	**115.000.000**	32,35	**150.296.825**	35,29	**150.296.825**	35,29	**621.995.650**	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	20,59	20,59	44.701.000	23,53	46.701.000	26,47	115.000.000	29,41	115.000.000	32,35	150.296.825	35,29	150.296.825	35,29	621.995.650	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.2 Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	87,4	84,1	**268.482.150**	84,6	**249.052.150**	85,1	**259.479.300**	85,6	**165.000.000**	86,1	**250.000.000**	86,6	**250.000.000**	86,6	**1.442.013.600**	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.2.1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	87,4	87,4	268.482.150	87,7	249.052.150	88,2	259.479.300	88,7	165.000.000	89,2	250.000.000	89,7	250.000.000	89,7	1.442.013.600	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%	59,367	59,367	**179.056.050**	59,37	**179.600.000**	59,372	**164.500.000**	59,374	**115.000.000**	59,376	**173.979.300**	59,378	**173.979.300**	59,378	**986.114.650**	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.3.1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%	59,365	59,367	179.056.050	59,37	179.600.000	59,372	164.500.000	59,374	115.000.000	59,376	173.979.300	59,378	173.979.300	59,378	986.114.650	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.4 Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	18,94	7,05	**103.974.600**	7,05	**105.974.600**	6,61	**200.000.000**	6,17	**200.000.000**	5,73	**300.000.000**	5,29	**300.000.000**	5,29	**1.209.949.200**	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.4.1 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	18,94	7,05	103.974.600	7,05	105.974.600	6,17	200.000.000	5,29	200.000.000	4,41	300.000.000	3,52	300.000.000	3,52	1.209.949.200	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.5 Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	72,2	73,3	**94.054.700**	77,8	**94.054.700**	80	**200.000.000**	83,3	**200.000.000**	85,6	**300.000.000**	87,8	**300.000.000**	87,8	**1.188.109.400**	Dinas Ketahanan Pangan
	3.17.5.1 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	72,2	73,3	94.054.700	77,8	94.054.700	80	200.000.000	83,3	200.000.000	85,6	300.000.000	87,8	300.000.000	87,8	1.188.109.400	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur																		
4	**Meningkatkan Perekonomian Daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**-1,16**	**2**	**66.566.950.617**	**3**	**62.363.273.737**	**4**	**63.931.515.428**	**5**	**70.455.715.159,48**	**5**	**95.849.618.387**	**5,2**	**95.744.202.387**	**4,03**	**454.911.275.716**	
4,1	**Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**%**	**0,74**	**2**	**9.359.895.156**	**3**	**11.302.669.841**	**4**	**11.031.731.304**	**4,5**	**10.253.341.205,86**	**5**	**12.183.564.352**	**5**	**12.183.564.352**	**3,92**	**66.314.766.210**	
4.1.1	Meningkatkan Produksi Padi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	%		1,86	**2.256.935.200**	1,57	**2.262.550.000**	1,50	**2.314.070.000**	1,55	**2.271.830.000,00**	1,37	**2.333.560.000**	1,46	**2.333.560.000**	1,46	**13.772.505.200**	Dinas TPHP
4.1.1.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	175.040	6.700.000	177.840	16.130.000	180.540	16.130.000	183.390	16.130.000	185.940	18.750.000	188.690	18.750.000	188.690	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.1.2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	175.040	9.735.200	177.840	22.600.000	180.540	22.600.000	183.390	22.600.000	185.940	34.800.000	188.690	34.800.000	188.690	147.135.200	Dinas TPHP
4.1.1.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	175.040	223.000.000	177.840	218.820.000	180.540	225.340.000	183.390	220.600.000	185.940	230.010.000	188.690	230.010.000	188.690	1.347.780.000	Dinas TPHP
4.1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi	Kali Tahun	2,01	2,020	2.000.000.000	2,030	2.000.000.000	2,040	2.000.000.000	2,051	2.000.000.000	2,061	2.000.000.000	2,071	2.000.000.000	2,071	12.000.000.000	Dinas PU
4.1.1.5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	%		100	17.500.000	100	5.000.000	100	50.000.000	100	12.500.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	185.000.000	Dinas Indag
4.1.2	Meningkatkan Produksi Padi Gogo	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Gogo	%	2	11,18	**239.410.000**	9,14	**257.482.600**	8,39	**264.029.300**	7,76	**259230876,00**	7,13	**283.371.576**	6,66	**283.371.576**	6,66	**1.586.895.928**	Dinas TPHP
4.1.2.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	112.173	6.700.000	112.453	16.130.000	228.979	16.130.000	132.760	16.130.000	142.965	18.750.000	153.172	18.750.000	153.172	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.2.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	112.173	223.000.000	112.453	218.753.300	228.979	225.300.000	132.760	220.501.576	142.965	230.021.576	153.172	230.021.576	153.172	1.347.598.028	Dinas TPHP
4.1.2.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	112.173	9.710.000	112.453	22.599.300	228.979	22.599.300	132.760	22.599.300	142.965	34.600.000	153.172	34.600.000	153.172	146.707.900	Dinas TPHP
4.1.3	Meningkatkan Produksi Padi Organik	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Organik	%	30	30	**239.410.000**	30	**257.430.000**	30	**263.971.576**	30	**259.190.000,00**	30	**283.360.000**	30	**283.360.000**	30	**1.586.721.576**	Dinas TPHP
4.1.3.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi Organik	Ton	65	85	6.700.000	105	16.130.000	125	16.130.000	145	16.130.000	165	18.750.000	185	18.750.000	185	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi Organik	Ton	65	85	223.000.000	105	218.720.000	125	225.261.576	145	220.480.000	165	230.010.000	185	230.010.000	185	1.347.481.576	Dinas TPHP
4.1.3.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi Organik	Ton	65	85	9.710.000	105	22.580.000	125	22.580.000	145	22.580.000	165	34.600.000	185	34.600.000	185	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.4	Meningkatkan Produksi Jagung	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Jagung	%		20,49	**239.350.000**	14,27	**257.430.000**	12,58	**263.950.000**	11,30	**259.190.000,00**	9,96	**283.360.000**	9,06	**283.360.000**	9,06	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.4.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Jagung	Ton	114.675	138.175	6.700.000	161.175	16.130.000	184.375	16.130.000	207.875	16.130.000	230.875	18.750.000	253.875	18.750.000	253.875	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.4.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Jagung	Ton	114.675	138.175	222.940.000	161.175	218.720.000	184.375	225.240.000	207.875	220.480.000	230.875	230.010.000	253.875	230.010.000	253.875	1.347.400.000	Dinas TPHP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.1.4.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Jagung	Ton	114.675	138.175	9.710.000	161.175	22.580.000	184.375	22.580.000	207.875	22.580.000	230.875	34.600.000	253.875	34.600.000	253.875	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.5	Meningkatkan Produksi Ubi Kayu	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Ubi Kayu	%		7,50	**239.350.000**	9,77	**257.430.000**	9,12	**263.950.000**	8,35	**259.190.000,00**	7,74	**283.360.000**	7,20	**283.360.000**	7,20	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.5.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	415.692	6.700.000	460.702	16.130.000	506.912	16.130.000	553.122	16.130.000	599.532	18.750.000	646.042	18.750.000	646.042	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.5.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	415.692	222.940.000	460.702	218.720.000	506.912	225.240.000	553.122	220.480.000	599.532	230.010.000	646.042	230.010.000	646.042	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.5.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	415.692	9.710.000	460.702	22.580.000	506.912	22.580.000	553.122	22.580.000	599.532	34.600.000	646.042	34.600.000	646.042	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.6	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	%		7,01	**239.366.800**	5,89	**257.430.000**	6,10	**263.950.000**	5,65	**259190000,00**	5,54	**283.360.000**	4,88	**283.360.000**	4,88	**1.586.656.800**	Dinas TPHP
4.1.6.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	767,2474	6.700.000	815,2474	16.130.000	868,2474	16.130.000	920,2474	16.130.000	974,2474	18.750.000	1024,2474	18.750.000	1024,2474	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.6.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	767,2474	222.956.800	815,2474	218.720.000	868,2474	225.240.000	920,2474	220.480.000	974,2474	230.010.000	1024,2474	230.010.000	1024,2474	1.347.416.800	Dinas TPHP
4.1.6.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	767,2474	9.710.000	815,2474	22.580.000	868,2474	22.580.000	920,2474	22.580.000	974,2474	34.600.000	1024,2474	34.600.000	1024,2474	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.7	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	%		0,75	**239.350.000**	0,68	**257.430.000**	0,70	**263.950.000**	0,71	**259190000,00**	0,82	**283.360.000**	0,74	**283.360.000**	0,74	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.7.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5096,45	6.700.000	5131,45	16.130.000	5167,45	16.130.000	5204,45	16.130.000	5247,45	18.750.000	5286,45	18.750.000	5286,45	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.7.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5096,45	222.940.000	5131,45	218.720.000	5167,45	225.240.000	5204,45	220.480.000	5247,45	230.010.000	5286,45	230.010.000	5286,45	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.7.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5096,45	9.710.000	5131,45	22.580.000	5167,45	22.580.000	5204,45	22.580.000	5247,45	34.600.000	5286,45	34.600.000	5286,45	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.8	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	%		n.a	**239.350.000**	25,00	**257.430.000**	11,11	**263.950.000**	10,00	**259190000,00**	16,67	**283.360.000**	20,00	**283.360.000**	20,00	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.8.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	na	12	6.700.000	16	16.130.000	18	16.130.000	20	16.130.000	24	18.750.000	30	18.750.000	30	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.8.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	na	12	222.940.000	16	218.720.000	18	225.240.000	20	220.480.000	24	230.010.000	30	230.010.000	30	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.8.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	na	12	9.710.000	16	22.580.000	18	22.580.000	20	22.580.000	24	34.600.000	30	34.600.000	30	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.9	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Buah-Buahan Semusim	%		1,15	**239.350.000**	0,80	**257.430.000**	0,60	**263.950.000**	0,66	**259190000,00**	0,72	**283.360.000**	0,72	**283.360.000**	0,72	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.9.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.489	6.700.000	1501	16.130.000	1510	16.130.000	1520	16.130.000	1531	18.750.000	1.542	18.750.000	1542	92.590.000	Dinas TPHP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.1.9.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.489	222.940.000	1501	218.720.000	1510	225.240.000	1520	220.480.000	1531	230.010.000	1.542	230.010.000	1542	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.9.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.489	9.710.000	1501	22.580.000	1510	22.580.000	1520	22.580.000	1531	34.600.000	1.542	34.600.000	1542	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.10	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	%		6,50	**239.350.000**	2,74	**257.430.000**	1,35	**263.950.000**	1,77	**259190000,00**	2,16	**283.360.000**	2,16	**283.360.000**	2,16	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.10.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	213	6.700.000	219	16.130.000	222	16.130.000	226	16.130.000	231	18.750.000	189.754	18.750.000	189.754	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.10.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	213	222.940.000	219	218.720.000	222	225.240.000	226	220.480.000	231	230.010.000	189.754	230.010.000	189.754	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.10.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	213	9.710.000	219	22.580.000	222	22.580.000	226	22.580.000	231	34.600.000	189.754	34.600.000	189.754	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.11	Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	%		0,49	**239.350.000**	0,49	**257.430.000**	0,48	**263.950.000**	0,48	**259190000,00**	0,47	**283.360.000**	0,47	**283.360.000**	0,47	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.11.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	100.277	100.767	6.700.000	101.267	16.130.000	101.757	16.130.000	102.247	16.130.000	102.732	18.750.000	102.732	18.750.000	102.732	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.11.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	100.277	100.767	222.940.000	101.267	218.720.000	101.757	225.240.000	102.247	220.480.000	102.732	230.010.000	102.732	230.010.000	102.732	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	100.277	100.767	9.710.000	101.267	22.580.000	101.757	22.580.000	102.247	22.580.000	102.732	34.600.000	102.732	34.600.000	102.732	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.12	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	%		0,5	**239.350.000**	0,49	**257.430.000**	0,49	**263.950.000**	0,49	**259190000,00**	0,48	**283.360.000**	0,48	**283.360.000**	0,48	**1.586.640.000**	Dinas TPHP
4.1.12.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Tahunan	Ton	184.252	185.167	6.700.000	186088	16.130.000	187003	16.130.000	187921	16.130.000	188833	18.750.000	188833	18.750.000	188833	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.12.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Tahunan	Ton	184.252	185.167	222.940.000	186088	218.720.000	187003	225.240.000	187921	220.480.000	188833	230.010.000	188833	230.010.000	188833	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.12.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Tahunan	Ton	184.252	185.167	9.710.000	186088	22.580.000	187003	22.580.000	187921	22.580.000	188833	34.600.000	188833	34.600.000	188833	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.13	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan	Persentase Peningkatan Produksi Buah-Buahan Tahunan	%		n.a	**239.350.000**	14,29	**259.190.000**	12,50	**259.190.000**	11,11	**259190000,00**	10,00	**283.360.000**	10,00	**283.360.000**	10,00	**1.583.640.000**	**Dinas TPHP**
4.1.13.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Buah Tahunan	Ton	0	6,0	6.700.000	7,00	16.130.000	8,00	16.130.000	9,00	16.130.000	10,00	18.750.000	10,00	18.750.000	10,00	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.13.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Buah Tahunan	Ton	0	6,0	222.940.000	7,00	220.480.000	8,00	220.480.000	9,00	220.480.000	10,00	230.010.000	10,00	230.010.000	10,00	1.344.400.000	Dinas TPHP
4.1.13.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Buah Tahunan	Ton	0	6,0	9.710.000	7,00	22.580.000	8,00	22.580.000	9,00	22.580.000	10,00	34.600.000	10,00	34.600.000	10,00	146.650.000	Dinas TPHP
4.1.14	Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi	%	4	4,0	**36.200.000**	4,10	**39.557.000**	3,90	**65.685.569**	4,00	**31075020,00**	3,80	**84.500.000**	3,80	**84.500.000**	3,80	**341.517.589**	**Dinas TPHP**
4.1.14.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kopi	Ton	8705	9052,0	19.900.000	9420,00	21.442.000	9788,00	31.442.000	10177,00	17.000.000	10567,00	40.000.000	10567,00	40.000.000	10567,00	169.784.000	Dinas TPHP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.1.14.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kopi	Ton	8705	9052,0	9.500.000	9420,00	10.080.000	9788,00	17.543.569	10177,00	8.475.020	10567,00	27.800.000	10567,00	27.800.000	10567,00	101.198.589	Dinas TPHP
4.1.14.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kopi	Ton	8705	9052,0	6.800.000	9420,00	8.035.000	9788,00	16.700.000	10177,00	5.600.000	10567,00	16.700.000	10567,00	16.700.000	10567,00	70.535.000	Dinas TPHP
4.1.15	Meningkatkan Produksi Tanaman Lada	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Lada	%	4	4,2	**36.163.300**	3,80	**39.542.000**	4,20	**65.647.000**	4,00	**31000000,00**	3,90	**84.455.000**	3,90	**84.455.000**	3,90	**341.262.300**	Dinas TPHP
4.1.15.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Lada	Ton	1625	1694	19.900.000	1759	21.442.000	1833	31.442.000	1907	17.000.000	1981	40.000.000	1981	40.000.000	1981	169.784.000	Dinas TPHP
4.1.15.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Lada	Ton	1625	1694	9.463.300	1759	10.070.000	1833	17.525.000	1907	8.450.000	1981	27.775.000	1981	27.775.000	1981	101.058.300	Dinas TPHP
4.1.15.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Lada	Ton	1625	1694	6.800.000	1759	8.030.000	1833	16.680.000	1907	5.550.000	1981	16.680.000	1981	16.680.000	1981	70.420.000	Dinas TPHP
4.1.16	Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	%	4	4,0	**36.200.000**	3,7	**39.557.000**	4,1	**65.685.569**	4,1	**31.075.020**	3,9	**84.500.000**	3,8	**84.500.000**	3,8	**341.517.589**	Dinas Perkebunan
4.1.16.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kakao	Ton	548	570	19.900.000	591	21.442.000	615	31.442.000	640	17.000.000	665	40.000.000	690	40.000.000	690	169.784.000	Dinas Perkebunan
4.1.16.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kakao	Ton	548	570	9.500.000	591	10.080.000	615	17.543.569	640	8.475.020	665	27.800.000	690	27.800.000	690	101.198.589	Dinas Perkebunan
4.1.16.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kakao	Ton	548	570	6.800.000	591	8.035.000	615	16.700.000	640	5.600.000	665	16.700.000	690	16.700.000	690	70.535.000	Dinas Perkebunan
4.1.17	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	%	4	3,9	**36.163.300**	4,0	**39.542.000**	4,0	**65.647.000**	4,0	**31.000.000**	4,0	**84.455.000**	4,0	**84.455.000**	4,0	**341.262.300**	Dinas Perkebunan
4.1.17.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	28755	19.900.000	29899	21.442.000	31097	31.442.000	32336	17.000.000	33631	40.000.000	34967	40.000.000	34967	169.784.000	Dinas Perkebunan
4.1.17.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	28755	9.463.300	29899	10.070.000	31097	17.525.000	32336	8.450.000	33631	27.775.000	34967	27.775.000	34967	101.058.300	Dinas Perkebunan
4.1.17.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	28755	6.800.000	29899	8.030.000	31097	16.680.000	32336	5.550.000	33631	16.680.000	34967	16.680.000	34967	70.420.000	Dinas Perkebunan
4.1.18	Meningkatkan Produksi Tanaman Karet	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet	%	4	3,9	**36.120.000**	4,0	**39.542.000**	4,0	**65.627.000**	3,9	**31.000.000**	3,9	**84.435.000**	3,9	**84.435.000**	3,9	**341.159.000**	Dinas Perkebunan
4.1.18.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Karet	Ton	52605	54670	19.900.000	56856	21.442.000	59110	31.442.000	61440	17.000.000	63865	40.000.000	66385	40.000.000	66385	169.784.000	Dinas Perkebunan
4.1.18.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Karet	Ton	52605	54670	9.440.000	56856	10.070.000	59110	17.525.000	61440	8.450.000	63865	27.775.000	66385	27.775.000	66385	101.035.000	Dinas Perkebunan
4.1.18.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Karet	Ton	52605	54670	6.780.000	56856	8.030.000	59110	16.660.000	61440	5.550.000	63865	16.660.000	66385	16.660.000	66385	70.340.000	Dinas Perkebunan
4.1.19	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa	%	4	3,7	**36.110.000**	4,1	**39.542.000**	4,0	**65.627.000**	4,0	**31.000.000**	4,0	**84.435.000**	4,0	**84.435.000**	4,0	**341.149.000**	Dinas Perkebunan
4.1.19.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa	Ton	3.027	3140	19.900.000	3268	21.442.000	3399	31.442.000	3534	17.000.000	3674	40.000.000	3822	40.000.000	3822	169.784.000	Dinas Perkebunan
4.1.19.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa	Ton	3.027	3140	9.440.000	3268	10.070.000	3399	17.525.000	3534	8.450.000	3674	27.775.000	3822	27.775.000	3822	101.035.000	Dinas Perkebunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4.1.19.3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kelapa	Ton	3.027	3140	6.770.000	3268	8.030.000	3399	16.660.000	3534	5.550.000	3674	16.660.000	3822	16.660.000	3822	70.330.000	Dinas Perkebunan
	4.1.20 Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	%	4	3,3	**36.110.000**	4,3	**39.542.000**	4,1	**65.627.000**	4,0	**31.000.000**	4,8	**84.435.000**	3,6	**84.435.000**	3,6	**341.149.000**	Dinas Perkebunan
	4.1.20.1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	93	19.900.000	97	21.442.000	101	31.442.000	105	17.000.000	110	40.000.000	114	40.000.000	114	169.784.000	Dinas Perkebunan
	4.1.20.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	93	9.440.000	97	10.070.000	101	17.525.000	105	8.450.000	110	27.775.000	114	27.775.000	114	101.035.000	Dinas Perkebunan
	4.1.20.3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	93	6.770.000	97	8.030.000	101	16.660.000	105	5.550.000	110	16.660.000	114	16.660.000	114	70.330.000	Dinas Perkebunan
	4.1.21 Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tebu	%	4	4,0	**36.110.000**	4,0	**39.542.000**	4,0	**65.627.000**	4,0	**31.000.000**	4,0	**84.435.000**	4,0	**84.435.000**	4,0	**341.149.000**	Dinas Perkebunan
	4.1.21.1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tebu	Ton	97850	101763	19.900.000	105825	21.442.000	110060	31.442.000	114454	17.000.000	119022	40.000.000	123778	40.000.000	123778	169.784.000	Dinas Perkebunan
	4.1.21.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tebu	Ton	97850	101763	9.440.000	105825	10.070.000	110060	17.525.000	114454	8.450.000	119022	27.775.000	123778	27.775.000	123778	101.035.000	Dinas Perkebunan
	4.1.21.3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tebu	Ton	97850	101763	6.770.000	105825	8.030.000	110060	16.660.000	114454	5.550.000	119022	16.660.000	123778	16.660.000	123778	70.330.000	Dinas Perkebunan
	4.1.22 Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tembakau	%	4	4,3	**36.110.000**	4,2	**39.542.000**	4,0	**65.627.000**	3,8	**31.000.000**	3,7	**84.435.000**	3,6	**84.435.000**	3,6	**341.149.000**	Dinas Perkebunan
	4.1.22.1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tembakau	Ton	23	24	19.900.000	25	21.442.000	26	31.442.000	27	17.000.000	28	40.000.000	29	40.000.000	29	169.784.000	Dinas Perkebunan
	4.1.22.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tembakau	Ton	23	24	9.440.000	25	10.070.000	26	17.525.000	27	8.450.000	28	27.775.000	29	27.775.000	29	101.035.000	Dinas Perkebunan
	4.1.22.3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tembakau	Ton	23	24	6.770.000	25	8.030.000	26	16.660.000	27	5.550.000	28	16.660.000	29	16.660.000	29	70.330.000	Dinas Perkebunan
	Bidang Peternakan																		
	4.1.23 Meningkatkan Produksi Ternak Sapi	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%		1,02	**253.240.000**	1,00	**266.746.800**	1,02	**273.266.800**	0,98	**268506800,00**	0,98	**298.760.000**	0,98	**298.760.000**	0,98	**1.659.280.400**	Dinas TPHP
	4.1.23.1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	40.522	6.700.000	40.932	16.130.000	41.352	16.130.000	41.762	16.130.000	42.174	18.750.000	42.174	18.750.000	42.174	92.590.000	Dinas TPHP
	4.1.23.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	40.522	222.940.000	40.932	218.720.000	41.352	225.240.000	41.762	220.480.000	42.174	230.010.000	42.174	230.010.000	42.174	1.347.400.000	Dinas TPHP
	4.1.23.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	40.522	23.600.000	40.932	31.896.800	41.352	31.896.800	41.762	31.896.800	42.174	50.000.000	42.174	50.000.000	42.174	219.290.400	Dinas TPHP
	4.1.24 Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kerbau	%		0,49	**253.240.000**	0,52	**266.670.000**	0,62	**273.190.000**	0,48	**268430000,00**	0,48	**298.760.000**	0,48	**298.760.000**	0,48	**1.659.050.000**	Dinas TPHP
	4.1.24.1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.053	6.700.000	3.069	16.130.000	3.088	16.130.000	3.103	16.130.000	3.118	18.750.000	3.118	18.750.000	3.118	92.590.000	Dinas TPHP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.1.24.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.053	222.940.000	3.069	218.720.000	3.088	225.240.000	3.103	220.480.000	3.118	230.010.000	3.118	230.010.000	3.118	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.24.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.053	23.600.000	3.069	31.820.000	3.088	31.820.000	3.103	31.820.000	3.118	50.000.000	3.118	50.000.000	3.118	219.060.000	Dinas TPHP
4.1.25	Meningkatkan Produksi Ternak Kambing	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing	%		0,20	**253.234.600**	0,20	**266.670.000**	0,20	**273.190.000**	0,20	**268430000,00**	0,20	**298.760.000**	0,20	**298.760.000**	0,20	**1.659.044.600**	Dinas TPHP
4.1.25.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.431	6.700.000	52.537	16.130.000	52.643	16.130.000	52.749	16.130.000	52.855	18.750.000	52.855	18.750.000	52.855	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.25.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.431	222.940.000	52.537	218.720.000	52.643	225.240.000	52.749	220.480.000	52.855	230.010.000	52.855	230.010.000	52.855	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.25.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.431	23.594.600	52.537	31.820.000	52.643	31.820.000	52.749	31.820.000	52.855	50.000.000	52.855	50.000.000	52.855	219.054.600	Dinas TPHP
4.1.26	Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	%		1,16	**253.230.000**	1,13	**266.670.000**	1,14	**273.190.000**	1,13	**268430000,00**	1,15	**298.760.000**	1,15	**298.760.000**	1,15	**1.659.040.000**	Dinas TPHP
4.1.26.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.333	6.700.000	9.440	16.130.000	9.549	16.130.000	9.658	16.130.000	9.770	18.750.000	9.770	18.750.000	9.770	92.590.000	Dinas TPHP
4.1.26.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.333	222.940.000	9.440	218.720.000	9.549	225.240.000	9.658	220.480.000	9.770	230.010.000	9.770	230.010.000	9.770	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.26.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.333	23.590.000	9.440	31.820.000	9.549	31.820.000	9.658	31.820.000	9.770	50.000.000	9.770	50.000.000	9.770	219.050.000	Dinas TPHP
4.1.27	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur	Persentase Peningkatan Populasi Ayam Petelur	%		8,58	**253.223.200**	7,32	**266.670.000**	6,82	**273.190.000**	6,39	**268430000,00**	6,00	**298.760.000**	6,00	**298.760.000**	6,00	**1.659.033.200**	Dinas TPHP
4.1.27.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	202.497	6.693.200	218.500	16.130.000	234.503	16.130.000	250.506	16.130.000	266.509	18.750.000	266.509	18.750.000	266.509	92.583.200	Dinas TPHP
4.1.27.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	202.497	222.940.000	218.500	218.720.000	234.503	225.240.000	250.506	220.480.000	266.509	230.010.000	266.509	230.010.000	266.509	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.27.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	202.497	23.590.000	218.500	31.820.000	234.503	31.820.000	250.506	31.820.000	266.509	50.000.000	266.509	50.000.000	266.509	219.050.000	Dinas TPHP
4.1.28	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging	Persentase Peningkatan Populasi Ayam Pedaging	%		2,50	**253.180.000**	2,50	**266.670.000**	2,50	**273.190.000**	2,50	**268430000,00**	2,50	**298.760.000**	2,50	**298.760.000**	2,50	**1.658.990.000**	Dinas TPHP
4.1.28.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	627.363	6.650.000	643.047	16.130.000	659.123	16.130.000	675.601	16.130.000	692.491	18.750.000	692.491	18.750.000	692.491	92.540.000	Dinas TPHP
4.1.28.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	627.363	222.940.000	643.047	218.720.000	659.123	225.240.000	675.601	220.480.000	692.491	230.010.000	692.491	230.010.000	692.491	1.347.400.000	Dinas TPHP
4.1.28.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	627.363	23.590.000	643.047	31.820.000	659.123	31.820.000	675.601	31.820.000	692.491	50.000.000	692.491	50.000.000	692.491	219.050.000	Dinas TPHP
4.1.29	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Bukan Ras	%		2,41	**253.180.000**	2,30	**266.670.000**	2,25	**273.190.000**	2,20	**268430000,00**	2,15	**298.760.000**	2,15	**298.760.000**	2,15	**1.658.990.000**	Dinas TPHP
4.1.29.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.273.795	6.650.000	2.327.295	16.130.000	2.380.795	16.130.000	2.434.295	16.130.000	2.487.795	18.750.000	2.487.795	18.750.000	2.487.795	92.540.000	Dinas TPHP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4.1.29.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.273.795	222.940.000	2.327.295	218.720.000	2.380.795	225.240.000	2.434.295	220.480.000	2.487.795	230.010.000	2.487.795	230.010.000	2.487.795	1.347.400.000	Dinas TPHP
	4.1.29.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.273.795	23.590.000	2.327.295	31.820.000	2.380.795	31.820.000	2.434.295	31.820.000	2.487.795	50.000.000	2.487.795	50.000.000	2.487.795	219.050.000	Dinas TPHP
	4.1.30 Meningkatkan Produksi Ternak Itik	Persentase Peningkatan populasi Ternak Itik	%		1,32	**229.590.000**	1,32	**234.850.000**	1,32	**241.370.000**	1,32	**236610000,00**	1,32	**248.760.000**	1,32	**248.760.000**	1,32	**1.439.940.000**	Dinas TPHP
	4.1.30.1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Itik	Ekor	31.161	31.572	6.650.000	31.989	16.130.000	32.411	16.130.000	32.839	16.130.000	33.273	18.750.000	33.273	18.750.000	33.273	92.540.000	Dinas TPHP
	4.1.30.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Populasi Itik	Ekor	31.161	31.572	222.940.000	31.989	218.720.000	32.411	225.240.000	32.839	220.480.000	33.273	230.010.000	33.273	230.010.000	33.273	1.347.400.000	Dinas TPHP
	4.1.30.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Itik	Ekor	31.161	31.572	23.590.000	31.989	31.820.000	32.411	31.820.000	32.839	31.820.000	33.273	50.000.000	33.273	50.000.000	33.273	219.050.000	Dinas TPHP
	4.1.31 Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	%	4,25	4,73	**25.150.000**	5,00	**29.100.000**	5,00	**39.392.477**	5,00	**31692477,00**	5,00	**41.092.477**	0,00	**41.092.477**	0,00	**207.519.908**	Dinas Perikanan
	4.1.31.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Lele	Ton	641,48	671,81	25.150.000	705,4	29.100.000	740,67	29.100.000	777,7	21.400.000	816,59	30.800.000	816,59	30.800.000	816,59	166.350.000	Dinas Perikanan
	4.1.31.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Lele	Ton	641,48	671,81		705,4		740,67	10.292.477	777,7	10.292.477	816,59	10.292.477	816,59	10.292.477	816,59	41.169.908	Dinas Perikanan
	4.1.32 Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	%	4,1	4,50	**25.150.000**	4,50	**29.100.000**	4,50	**38.850.000**	5,00	**31150000,00**	5,00	**40.550.000**	5,00	**40.550.000**	5,00	**205.350.000**	Dinas Perikanan
	4.1.32.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Nila	Ton	297,71	311,11	25.150.000	325,11	29.100.000	339,74	29.100.000	356,72	21.400.000	374,56	30.800.000	374,56	30.800.000	374,56	166.350.000	Dinas Perikanan
	4.1.32.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Nila	Ton	297,71	311,11		325,11		339,74	9.750.000	356,72	9.750.000	374,56	9.750.000	374,56	9.750.000	374,56	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.33 Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	%	1,5	1,67	**25.150.000**	5,56	**29.100.000**	5,56	**38.850.000**	5,54	**31150000,00**	5,56	**40.550.000**	5,56	**40.550.000**	5,56	**205.350.000**	Dinas Perikanan
	4.1.33.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Gurame	Ton	22,13	22,5	25.150.000	23,75	29.100.000	25,07	29.100.000	26,46	21.400.000	27,93	30.800.000	28	30.800.000	27,93	166.350.000	Dinas Perikanan
	4.1.33.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Gurame	Ton	22,13	22,5		23,75		25,07	9.750.000	26,46	9.750.000	27,93	9.750.000	28	9.750.000	27,93	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.34 Meningkatkan Produksi Ikan Emas	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Emas	%	0,72	0,80	**25.150.000**	1,01	**29.100.000**	1,00	**38.850.000**	1,00	**31150000,00**	1,01	**40.550.000**	1,01	**40.550.000**	1,01	**205.350.000**	Dinas Perikanan
	4.1.34.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Emas	Ton	95,73	96,5	25.150.000	97,47	29.100.000	98,44	29.100.000	99,42	21.400.000	100,42	30.800.000	100	30.800.000	100,42	166.350.000	Dinas Perikanan
	4.1.34.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Emas	Ton	95,73	96,5		97,47		98,44	9.750.000	99,42	9.750.000	100,42	9.750.000	100	9.750.000	100,42	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.35 Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	%	3,5	3,83	**25.150.000**	3,83	**29.100.000**	3,83	**38.850.000**	3,89	**31150000,00**	3,94	**40.550.000**	3,94	**40.550.000**	3,94	**205.350.000**	Dinas Perikanan
	4.1.35.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Patin	Ton	626,57	650,54	25.150.000	675,46	29.100.000	701,34	29.100.000	728,65	21.400.000	757,39	30.800.000	757	30.800.000	757,39	166.350.000	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4.1.35.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Patin	Ton	626,57	650,54		675,46		701,34	9.750.000	728,65	9.750.000	757,39	9.750.000	757	9.750.000	757,39	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.36 Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	%	0,24	0,33	**25.150.000**	2,47	**29.100.000**	2,47	**38.850.000**	2,41	**31150000,00**	2,48	**40.500.000**	2,48	**40.500.000**	2,48	**205.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.36.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Baung	Ton	15,35	15,4	25.150.000	15,78	29.100.000	16,17	29.100.000	16,56	21.400.000	16,97	30.750.000	17	30.750.000	16,97	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.36.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Baung	Ton	15,35	15,4		15,78		16,17	9.750.000	16,56	9.750.000	16,97	9.750.000	17	9.750.000	16,97	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.37 Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya Lainnya	%	0,12	0,17	**25.150.000**	0,17	**29.100.000**	0,17	**38.850.000**	0,17	**31150000,00**	0,17	**40.500.000**	0,17	**40.500.000**	0,17	**205.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.37.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	11,98	12	25.150.000	12,02	29.100.000	12,04	29.100.000	12,06	21.400.000	12,08	30.750.000	12,08	30.750.000	12,08	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.37.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	11,98	12		12,02		12,04	9.750.000	12,06	9.750.000	12,08	9.750.000	12,08	9.750.000	12,08	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.38 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	%	4,43	5,00	**25.150.000**	5,00	**29.100.000**	8,00	**38.850.000**	10,00	**31150000,00**	10,00	**40.500.000**	10,00	**40.500.000**	10,00	**205.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.38.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	23.182.000	24.341.100	25.150.000	25.558.155	29.100.000	27.602.807	29.100.000	30.363.088	21.400.000	33.399.397	30.750.000	33.399.397	30.750.000	33.399.397	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.38.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	23.182.000	24.341.100		25.558.155		27.602.807	9.750.000	30.363.088	9.750.000	33.399.397	9.750.000	33.399.397	9.750.000	33.399.397	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.39 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	%	2,41	3,00	**25.150.000**	3,00	**29.100.000**	5,00	**38.850.000**	5,00	**31150000,00**	10,00	**40.500.000**	10,00	**40.500.000**	10,00	**205.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.39.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	802.958	827.047	25.150.000	851.858	29.100.000	894.451	29.100.000	939.174	21.400.000	1.033.091	30.750.000	1.033.091	30.750.000	1.033.091	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.39.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	802.958	827.047		851.858		894.451	9.750.000	939.174	9.750.000	1.033.091	9.750.000	1.033.091	9.750.000	1.033.091	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.40 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	%	0,92	1,00	**25.150.000**	1,00	**29.100.000**	1,50	**38.850.000**	1,50	**31150000,00**	1,50	**40.500.000**	1,50	**40.500.000**	1,50	**205.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.40.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	271.423	274.137	25.150.000	276.879	29.100.000	281.032	29.100.000	285.247	21.400.000	289.526	30.750.000	289.526	30.750.000	289.526	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.40.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	271.423	274.137		276.879		281.032	9.750.000	285.247	9.750.000	289.526	9.750.000	289.526	9.750.000	289.526	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.41 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Emas	%	1,9	2,00	**25.150.000**	2,00	**29.100.000**	4,00	**38.850.000**	5,00	**31150000,00**	5,00	**40.500.000**	5,00	**40.500.000**	5,00	**205.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.41.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	268.661	274.034	25.150.000	279.515	29.100.000	290.696	29.100.000	305.230	21.400.000	320.492	30.750.000	320.492	30.750.000	320.492	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.41.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	268.661	274.034		279.515		290.696	9.750.000	305.230	9.750.000	320.492	9.750.000	320.492	9.750.000	320.492	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.42 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	%	0,99	1,00	**25.150.000**	1,10	**1.239.100.000**	0,90	**38.850.000**	1,00	**31150000,00**	1,00	**40.500.000**	1,00	**40.500.000**	1,00	**1.415.250.000**	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4.1.42.1 Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	50.000	50.500	25.150.000	51.055	29.100.000	51.515	29.100.000	52.030	21.400.000	52.551	30.750.000	52.551	30.750.000	52.551	166.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.42.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	50.000	50.500		51.055	1.210.000.000	51.515	9.750.000	52.030	9.750.000	52.551	9.750.000	52.551	9.750.000	52.551	1.249.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.43 Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,42	0,45	**60.000.000**	0,50	**70.000.000**	0,52	**109.750.000**	0,52	**109750000,00**	0,52	**259.750.000**	0,52	**259.750.000**	0,52	**869.000.000**	Dinas Perikanan
	4.1.43.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap	Ton	198,71	199,6	60.000.000	200,6	70.000.000	201,65	100.000.000	202,7	100.000.000	203,75	250.000.000	204	250.000.000	203,75	830.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.43.2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Produksi Ikan Tangkap	Ton	198,71	199,6		200,6		201,65	9.750.000	202,7	9.750.000	203,75	9.750.000	204	9.750.000	203,75	39.000.000	Dinas Perikanan
	4.1.44 Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Ikan	%	4,5	4,83	**51.250.000**	4,99	**39.000.000**	5,05	**39.000.000**	5,15	**39000000,00**	5,17	**39.000.000**	5,17	**39.000.000**	5,17	**246.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.44.1 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Ikan	Ton	12,42	13,02	51.250.000	13,67	39.000.000	14,36	39.000.000	15,1	39.000.000	15,88	39.000.000	16	39.000.000	15,88	246.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.45 Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Yang Dipasarkan	%	4,17	5,00	**51.250.000**	5,00	**39.000.000**	5,00	**39.000.000**	5,00	**39000000,00**	5,00	**39.000.000**	5,00	**39.000.000**	5,00	**246.250.000**	Dinas Perikanan
	4.1.45.1 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Ikan Yang Dipasarkan	Ton	13550,54	14228,06	51.250.000	14939,46	39.000.000	15686,44	39.000.000	16470,76	39.000.000	17294,3	39.000.000	17.294	39.000.000	17294,3	246.250.000	Dinas Perikanan
	4.1.46 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Indeks Kelembagaan Petani	Poin	1,34	1,35	**1.216.935.756**	1,37	**1.524.884.000**	1,40	**1.824.884.000**	1,42	**1.583.284.000**	1,44	**2.108.284.000**	1,44	**2.108.284.000**	1,44	**10.366.555.756**	Dinas TPHP
	4.1.46.1 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	67,05	66,09	304.236.756	64,55	352.071.000	63,01	402.071.000	61,46	377.071.000	59,92	452.071.000	59,92	452.071.000	59,92	2.339.591.756	Dinas TPHP
	4.1.46.2 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	32,22	32,76	304.233.000	33,53	352.071.000	34,30	402.071.000	35,07	377.071.000	35,84	452.071.000	35,84	452.071.000	35,84	2.339.588.000	Dinas TPHP
	4.1.46.3 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	0,73	1,16	304.233.000	1,93	352.071.000	2,70	402.071.000	3,47	377.071.000	4,08	452.071.000	4,08	452.071.000	4,08	2.339.588.000	Dinas TPHP
	4.1.46.4 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina	%	0	0	304.233.000	0	352.071.000	0	402.071.000	0	377.071.000	0,15	452.071.000	0,15	452.071.000	0,15	2.339.588.000	Dinas TPHP
	4.1.46.5 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina	%	10	10		10	116.600.000	10	216.600.000	10	75.000.000	10	300.000.000	10,00	300.000.000	10,00	1.008.200.000	Dinas Perkebunan
	4.1.47 Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan	%	59	60	**221.983.000**	61	**259.538.441**	62	**330.967.013**	63	**330.967.012,86**	65	**416.681.299**	65	**416.681.299**	65	**1.976.818.064**	Sekretariat Daerah (SDA)
	4.1.47.1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan	%	59	60	221.983.000	61	259.538.441	62	330.967.013	63	330.967.012,86	65	416.681.299	65	416.681.299	65	1.976.818.064	Sekretariat Daerah (SDA)
4.2	**Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan**	**Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan**	**%**	**-8,37**	**1**	**2.109.966.804**	**3**	**2.445.294.180**	**3,5**	**2.560.588.297**	**4,5**	**2.530.294.180**	**5**	**2.697.465.977**	**6**	**2.697.465.977**	**3,83**	**15.041.075.415**	**Dinas Indag**
	4.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri	Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	0		**309.794.471**		**315.284.590**	20	**321.166.943**	25,3	**315.284.590**	30,7	**325.646.557**	36	**325.646.557**	36	**1.912.823.707**	Dinas Indag
	4.2.1.1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	0		309.794.471		315.284.590	20	321.166.943	25,3	315.284.590	30,7	325.646.557	36	325.646.557	36	1.912.823.707	Dinas Indag

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.2.2	Meningkatkan Produksi Industri Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pangan	%		11,9	**309.794.471**	12,09	**315.284.590**	12,22	**321.166.943**	12,9	**315.284.590**	13,39	**325.646.557**	13,70	**325.646.557**	13,70	**1.912.823.707**	Dinas Indag
4.2.2.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Pangan	Ton	176,2	197,17	309.794.471	221,00	315.284.590	248,00	321.166.943	280,00	315.284.590	317,50	325.646.557	361,00	325.646.557	361,00	1.912.823.707	Dinas Indag
4.2.3	Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik	Persentase Peningkatan Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	%		13	**309.794.471**	14,31	**315.284.590**	19,35	**321.166.943**	21,62	**315.284.590**	22,22	**325.646.557**	22,73	**325.646.557**	22,73	**1.912.823.707**	Dinas Indag
4.2.3.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	Ton	48,00	54,24	309.794.471	62,00	315.284.590	74,00	321.166.943	90,00	315.284.590	110,00	325.646.557	135	325.646.557	135	1.912.823.707	Dinas Indag
4.2.4	Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu	Persentase Peningkatan Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	%		33,3	**309.794.471**	35	**315.284.590**	37,04	**321.166.943**	37,84	**315.284.590**	38,24	**325.646.557**	39,72	**325.646.557**	39,72	**1.912.823.707**	Dinas Indag
4.2.4.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Ton	150	200	309.794.471	270	315.284.590	370	321.166.943	510	315.284.590	705	325.646.557	985	325.646.557	985	1.912.823.707	Dinas Indag
4.2.5	Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal	Persentase Peningkatan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	%		43,86	**309.794.471**	45,02	**315.284.590**	48,37	**321.166.943**	49,53	**315.284.590,29**	50,94	**325.646.557**	52,78	**325.646.557**	52,78	**1.912.823.707**	Dinas Indag
4.2.5.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	Buah	10.306.000	14.826.000	309.794.471	21.500.000	315.284.590	31.900.000	321.166.943	47.700.000	315.284.590,29	72.000.000	325.646.557	110.000.000	325.646.557	110.000.000	1.912.823.707	Dinas Indag
4.2.6	Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi	Persentase Peningkatan Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	%		12	**309.794.471**	14,29	**315.284.590**	15,63	**321.166.943**	16,22	**315.284.590,29**	18,22	**325.646.557**	19,67	**325.646.557**	19,67	**1.912.823.707**	Dinas Indag
4.2.6.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	Pcs	300	336	309.794.471	384	315.284.590	444	321.166.943	516	315.284.590,29	610	325.646.557	730	325.646.557	730	1.912.823.707	Dinas Indag
4.2.7	Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%	0	0	**251.199.980**	20	**553.586.638**	40	**603.586.638**	60	**603.586.638,00**	80	**703.586.638**	80	**703.586.638**	80	**3.419.133.170**	Sekretariat Daerah
4.2.17.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%	0	0	251.199.980	20	553.586.638	40	603.586.638	60	603.586.638,00	80	703.586.638		703.586.638	80	3.419.133.170	Sekretariat Daerah
4.2.8	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase peningkatan Usaha Industri yang memiliki izin berusaha	%		50	**0**	50	**0**	50	**30.000.000**	50	**35000000**	50	**40.000.000**	50	**40.000.000**	20	**145.000.000**	Dinas Indag
4.2.8.1	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%		100		100		100	15.000.000	100	20000000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	85.000.000	Dinas Indag
4.2.8.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	%		10		20		30	15.000.000	40	15000000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	60.000.000	Dinas Indag
4,3	**Meningkatnya Usaha Konstruksi**	**Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi**	**%**	**-2,40**	**2**	**0**	**3**	**1.350.000.000**	**5**	**1.350.000.000**	**6**	**1.350.000.000**	**6**	**1.350.000.000**	**6**	**1.350.000.000**	**6**	**6.750.000.000**	**Dinas PU**
4.3.1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	n/a	10	0	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	6.750.000.000	Dinas PU
4.3.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	n/a	10		10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	6.750.000.000	Dinas PU
4,4	**Meningkatnya Usaha Perdagangan**	**Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**%**	**-0,89**	**2**	**276.200.000**	**3**	**477.200.000**	**5**	**637.200.000**	**6**	**225.000.000**	**6**	**637.200.000**	**6**	**637.200.000**	**6**	**2.890.000.000**	**Dinas Indag**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.4.1	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor	Persentase Peningkatan produk ekspo	%			**0**	25	**180.000.000**	50	**180.000.000**	50	**25.000.000**	75	**180.000.000**	100,0	**180.000.000**	100,0	**745.000.000**	Dinas Indag
4.4.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Produk Ekspor	%			0	42	180.000.000	50	180.000.000	58	25.000.000	67	180.000.000	67	180.000.000	67	745.000.000	Dinas Indag
4.4.2	Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%		40	**23.000.000**	0	**0**	100	**75.000.000**	100	**75.000.000**	100	**75.000.000**	100	**75.000.000**	100	**323.000.000**	Dinas Indag
4.4.2.1	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%	0	40	23.000.000		0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	323.000.000	Dinas Indag
4.4.3	Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan	%		6.9	233.200.000	8.6	257.200.000	10.3	257.200.000	12,1	50.000.000	13,8	257.200.000	15,5	257.200.000	15,5	1.312.000.000	Dinas Indag
4.4.3.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan	%		6.9	233.200.000	8.6	257.200.000	10.3	257.200.000	12,1	50.000.000	13,8	257.200.000	15,5	257.200.000	15,5	1.312.000.000	Dinas Indag
4.4.4	Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang	%		21,4	20.000.000	28,6	40.000.000	32,1	75.000.000	32,1	25.000.000	35,7	75.000.000	39,3	75.000.000	39,3	310.000.000	Dinas Indag
4.4.4.1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang	%		21,4	20.000.000	28,6	40.000.000	32,1	75.000.000	32,1	25.000.000	35,7	75.000.000	39,3	75.000.000	39,3	310.000.000	Dinas Indag
4.4.5	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		50	0	33.3	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Indag
4.4.5.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		50	0	33,3	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Indag
4,5	**Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan**	**Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan**	**%**	**-4,41**	**2**	**570.468.335**	**3**	**507.918.335**	**5**	**973.854.422**	**6**	**494.531.078**	**6**	**1.302.431.748**	**6**	**1.302.431.748**	**6**	**5.151.635.666**	**Dishub**
4.5.1	Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan umum	%	30	30	200.000.000	30	175.000.000	50	400.000.000	60	150.000.000	60	550.000.000	60	550.000.000	60	2.025.000.000	Dishub
4.5.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	%	30	30	200.000.000	30	175.000.000	50	400.000.000	60	150.000.000	60	550.000.000	60	550.000.000	60	2.025.000.000	Dishub
4.5.2	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Poin	-	-	170.468.335	40	157.918.335	70	173.854.422	100	194.531.078	100	202.431.748	100	202.431.748	100	1.101.635.666	Dishub
4.5.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Poin	-	-	170.468.335	40	157.918.335	70	173.854.422	100	194.531.078	100	202.431.748	100	202.431.748	100	1.101.635.666	Dishub
4.5.3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya	Persentase Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Terpasang	%	26	26	200.000.000	28	175.000.000	30	400.000.000	33	150.000.000	35	550.000.000	35	550.000.000	35	2.025.000.000	Dishub
4.5.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	26	26	100.000.000	28	87.500.000	30	200.000.000	33	75.000.000	35	275.000.000	35	275.000.000	35	1.012.500.000	Dishub
4.5.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan	%	47,72	50	100.000.000	52,5	87.500.000	55	200.000.000	57,5	75.000.000	60	275.000.000	60	275.000.000	60	1.012.500.000	Dishub
4,6	**Meningkatnya Usaha Pariwisata**	**Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	**%**	**-3,98**	**2**	**240.000.000**	**4**	**154.372.000**	**6**	**375.000.000**	**7,5**	**375.000.000**	**6**	**614.374.945**	**7,5**	**614.374.945**	**5,50**	**2.373.121.890**	**Dinas Porapar**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.6.1	Meningkatkan Kunjungan Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	n/a	5	240.000.000	5,7	154.372.000	5,4	375.000.000	5,1	375.000.000	5,5	614.374.945	5,5	614.374.945	5,5	2.373.121.890	Dinas Porapar
4.6.1.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan	%	n/a	14.29	70.000.000	14.29	0	14.29	150.000.000	28.57	150.000.000	28.57	250.000.000	28.57	250.000.000	28.57	870.000.000	Dinas Porapar
4.6.1.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	n/a	20	170.000.000	20	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	239.374.945	20	239.374.945	20	848.749.890	Dinas Porapar
4.6.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	%	n/a	20	0	20	154.372.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	654.372.000	Dinas Porapar
4,7	**Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian**	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**N/A**	**9,80**	**599.952.700**	**19,61**	**428.235.300**	**39,22**	**494.451.685**	**63,73**	**494.451.685**	**73,53**	**753.526.514**	**78,43**	**753.526.514**	**78,43**	**3.524.144.398**	**Dlnas KUKM**
4.7.1	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	%	N/A	10	0	15	**0**	20	**0**	25	**0**	30	**150.000.000**	30	**150.000.000**	30	**300.000.000**	Dlnas KUKM
4.7.1.1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha	%	N/A	10		15		20		25		30	150.000.000	40	150.000.000	40	300.000.000	Dlnas KUKM
4.7.2	Meningkatnya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	N/A	70	**232.591.700**	80	**188.168.000**	100	**188.168.000**	100	**188.168.000**	100	**200.000.000**	100	**200.000.000**	100	**1.197.095.700**	Dlnas KUKM
4.7.2.1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	N/A	70	232.591.700	80	188.168.000	100	188.168.000	100	188.168.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	1.197.095.700	Dlnas KUKM
4.7.3	Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	N/A	7	0	12	0	18	**66.216.385**	25	**66.216.385**	35	**125.000.000**	35	**125.000.000**	35	**382.432.770**	Dlnas KUKM
4.7.3.1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	N/A	7		12		18	66.216.385	25	66.216.385	35	125.000.000	35	125.000.000	35	382.432.770	Dlnas KUKM
4.7.4	Meningkatnya Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	N/A	10,5	137.270.600	15,5	114.084.600	30	114.084.600	45	114.084.600	60	152.543.814	60	152.543.814	60	784.612.028	Dlnas KUKM
4.7.4.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	N/A	11	137.270.600	16	114.084.600	45	114.084.600	45	114.084.600	60	152.543.814	60	152.543.814	60	784.612.028	Dlnas KUKM
4.7.5	Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	%	N/A	4	230.090.400	7	125.982.700	10	125.982.700	14	125.982.700	18	125.982.700	25	125.982.700	25	860.003.900	Dlnas KUKM
4.7.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi	%	N/A	4	76.696.800	7	41.994.233	10	41.994.233	14	41.994.233	18	41.994.233	18	41.994.233	18	286.667.967	Dlnas KUKM
4.7.5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi	%	N/A	4	76.696.800	7	41.994.233	10	41.994.233	14	41.994.233	18	41.994.233	18	41.994.233	18	286.667.967	Dlnas KUKM
4.7.5.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi	%	N/A	4	76.696.800	7	41.994.233	10	41.994.233	14	41.994.233	18	41.994.233	18	41.994.233	18	286.667.967	Dlnas KUKM
4,8	**Meningkatnya Usaha Mikro**	**Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk**	**%**	**7,19**	**7,24**	**575.392.200**	**7,29**	**597.375.441**	**7,35**	**668.804.013**	**7,40**	**668.804.013**	**7,45**	**754.518.299**	**7,45**	**754.518.299**	**7,50**	**4.019.412.264**	**Dlnas KUKM**
4.8.1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	0,7	0,72	100.000.000	1,01	100.000.000	1,30	100.000.000	1,59	100.000.000	1,88	100.000.000	2,90	100.000.000	2,90	600.000.000	Dlnas KUKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4.8.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	N/A	0,72	100.000.000	1,01	100.000.000	1,30	100.000.000	7,4	100.000.000	1,88	100.000.000	2,9	100.000.000	2,90	600.000.000	Dlnas KUKM
4..8.2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	N/A	8,33	253.409.200	25,00	237.837.000	41,67	237.837.000	58,33	237837000,00	75,00	237.837.000	100,00	237.837.000	100	1.442.594.200	Dlnas KUKM
4.8.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	N/A	8,33	253.409.200	25,00	237.837.000	41,67	237.837.000	58,33	237.837.000	75,00	237.837.000	100,00	237.837.000	100	1.442.594.200	Dlnas KUKM
4..8.3	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100	416.681.299	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
4.8.3.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100,00	416.681.299	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
4,9	**Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal**	**Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**	**Poin**	**- 28,09**	**6,73**	**293.000.000**	**6,72**	**715.839.500**	**6,71**	**840.000.000**	**6,70**	**770.000.000,00**	**6,70**	**1.070.000.000**	**6,71**	**1.070.000.000**	**6,71**	**4.758.839.500**	**Dinas PMPTSP**
4.9.1	Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT)	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	- 3,00	- 1,00	293.000.000	1,00	715.839.500	2,00	840.000.000	3,00	770.000.000,00	4,00	1.070.000.000	4,00	1.070.000.000	4,00	4.758.839.500	Dinas PMPTSP
4.9.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		25	0	25	160.117.500	25	160.000.000	25	140.000.000	25	240.000.000	25	240.000.000	25	940.117.500	Dinas PMPTSP
4.9.1.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		25	85.000.000	25	105.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	990.000.000	Dinas PMPTSP
4.9.1.3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		0	20.000.000	0	281.222.000	0	280.000.000	0	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	1.421.222.000	Dinas PMPTSP
4.9.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%		0	88.000.000	0	69.500.000	0	150.000.000	0	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	807.500.000	Dinas PMPTSP
4.9.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemberian Izin Lokasi	%	n/a	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	600.000.000	Sekretariat Daerah (Tapem)
4,10	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**%**	**75,22**	**74,00**	**209.226.000**	**75,00**	**238.432.200**	**75,00**	**320.124.550**	**75,00**	**320.802.844,00**	**75,00**	**517.128.000**	**74,80**	**411.712.000**	**74,80**	**2.017.425.594**	**Dinas Nakertrans**
4.10.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan	Cakupan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro	%	-	-	0	-	0	50,00	72.892.350	100,00	63.890.644,00	100,00	125.000.000	100,00	125.000.000	100,00	386.782.994	Dinas Nakertrans
4.10.1.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%	-	-		-		50,00	72.892.350	100,00	63.890.644,00	100,00	125.000.000	100,00	125.000.000	100,00	386.782.994	Dinas Nakertrans
4.10.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja(TKK)	%	96.44	96.5	86.026.000	96.5	106.027.700	96.5	106.027.700	96.5	106.027.700,00	96.5	175.000.000	96.5	175.000.000	96.5	754.109.100	Dinas Nakertrans
4.10.2.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	%			86.026.000	2,62	106.027.700	2,62	106.027.700	3,00	106.027.700,00	3,00	175.000.000	3,50	175.000.000	3,50	754.109.100	Dinas Nakertrans
4.10.3	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	%	3,56	3,50	43.200.000	3,50	44.404.500	3,50	44.404.500	3,50	44.404.500,00	3,50	100.000.000	3,50	100.000.000	3,50	376.413.500	Dinas Nakertrans
4.10.3.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	n/a	10,00	43.200.000	15,00	44.404.500	20,00	44.404.500	25,00	44.404.500,00	30,00	100.000.000	35,00	100.000.000	35,00	376.413.500	Dinas Nakertrans

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4.10.4 Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	96.44	100,00	80.000.000	7,00	88.000.000	100,00	96.800.000	100,00	106.480.000,00	100,00	117.128.000	100,00	11.712.000	100,00	500.120.000	Dinas Nakertrans
	4.10.4.1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	96.44	100,00	123.864.700	7,00	145.784.700	100,00	72.892.350	100,00	63.890.644,00	100,00	125.000.000	100,00	125.000.000	100,00	656.432.394	Dinas Nakertrans
4,11	**Berkembangnya Ekonomi Kreatif**	**Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**%**	**n/a**	**-**	**0**	**4,41**	**154.372.000**	**4,41**	**125.000.000**	**4,41**	**125.000.000**	**4,41**	**125.000.000**	**4,41**	**125.000.000**	**4,41**	**654.372.000**	**Dlnas Porapar**
	4.11.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif	%		14.29	0	40	25.000.000	60	25.000.000	80	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	Dlnas Porapar
	4.11.1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	n/a	20	0	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	Dlnas Porapar
	4.11.2 Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	n/a	-	0	13,33	129.372.000	13,33	100.000.000	13,33	100.000.000	13,33	100.000.000	13,33	100.000.000	13,33	529.372.000	Dlnas Porapar
	4.11.2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Kreatif	%		30	0	100	129.372.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	529.372.000	Dlnas Porapar
4,12	**Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan**	**Persentase Jalan Mantap**	**%**	**52,73**	**48**	**50.495.317.122**	**56,56**	**40.689.449.348**	**58,51**	**42.131.544.144**	**60,5**	**50.482.773.141**	**62,4**	**70.787.727.255**	**62,4**	**70.787.727.255**	**63,4**	**325.374.538.264**	**Dinas PU**
	4.12.1 Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dibangun	%	n/a	5	16.831.772.374	5	12.646.483.116	5	13.343.848.048	5	15.994.257.714	5	22.545.909.085		22.545.909.085		103.908.179.421	Dlnas PU
	4.12.1.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	%	n/a	5	8.415.886.187	5	6.323.241.558	5	6.671.924.024	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	51.954.089.711	Dinas PU
	4.12.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jembatan Yang Dibangun	%	n/a	5	8.415.886.187	5	6.323.241.558	5	6.671.924.024	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	51.954.089.711	Dinas PU
	4.12.2 Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara	%	n/a	20	16.831.772.374	20	12.646.483.116	20	13.343.848.048	20	15.994.257.714	20	22.545.909.085	20	22.545.909.085	20	103.908.179.421	Dinas PU
	4.12.2.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dipelihara	%	n/a	20	8.415.886.187	20	6.323.241.558	20	6.671.924.024	20	7.997.128.857	20	11.272.954.542	20	11.272.954.542	20	51.954.089.711	Dinas PU
	4.12.2.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	%	n/a	20	8.415.886.187	20	6.323.241.558	20	6.671.924.024	20	7.997.128.857	20	11.272.954.542	20	11.272.954.542	20	51.954.089.711	Dinas PU
	4.12.3 Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Direhabilitasi	%	n/a	10	16.831.772.374	10	12.646.483.116	10	13.343.848.048	10	15.994.257.714	10	22.545.909.085	10	22.545.909.085	10	103.908.179.421	Dinas PU
	4.12.3.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi	%	n/a	10	8.415.886.187	10	6.323.241.558	10	6.671.924.024	10	7.997.128.857	10	11.272.954.542	10	11.272.954.542	10	51.954.089.711	Dinas PU
	4.12.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi	%	n/a	10	8.415.886.187	10	6.323.241.558	10	6.671.924.024	10	7.997.128.857	10	11.272.954.542	10	11.272.954.542	10	51.954.089.711	Dinas PU
	4.12.4 Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten	Prosentase jalan yang memiliki saluran drainase	%	19,46	20	0	20,7	2.750.000.000	21,44	2.100.000.000	22,19	2.500.000.000	22,94	3.150.000.000	236,49	3.150.000.000	236,49	13.650.000.000	Dlnas PU
	4.12.4.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	19,46	0		20,7	2.750.000.000	21,44	2.100.000.000	22,19	2.500.000.000	22,94	3.150.000.000	23,58	3.150.000.000	23,58	13.650.000.000	Dinas PU

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4,13	**Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang**	**Ketaatan Terhadap RTRW**	**%**	**n/a**	**100**	**1.531.608.200**	**100**	**2.952.250.000**	**100**	**1.952.250.000**	**100**	**1.952.250.000,00**	**100**	**2.500.000.000**	**100**	**2.500.000.000**	**100**	**13.388.358.200**	**DInas PU**
4.13.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%	50	50	0	50	416.666.667	75	416.666.667	75	416.666.666,67	100	416.666.667	100	416.666.667	100	2.083.333.333	DInas PU
1.13.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%	50	50		50	416.666.667	75	416.666.667	75	416.666.666,67	100	416.666.667	100	416.666.667	100	2.083.333.333	DInas PU
4.13.2	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Cakupan Pemanfaatan Ruang	%	n/a	100		100	416.666.667	100	416.666.667	100	416.666.666,67	100	416.666.667	100	416.666.667	100	2.083.333.333	DInas PU
1.13.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Kesesuaian ijin oleh TKPRD Way Kanan	%	n/a	100		100	416.666.667	100	416.666.667	100	416.666.666,67	100	416.666.667	100	416.666.667	100	2.083.333.333	DInas PU
4.13.3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang	Cakupan Pengendalian Ruang	%	n/a	100		100	416.666.667	100	416.666.667	100	416.666.666,67	100	416.666.667	100	416.666.667	100	2.083.333.333	DInas PU
1.13.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Tindak lanjut pelanggaran tata ruang	%	n/a	100		100	416.666.667	100	416.666.667	100	416.666.666,67	100	416.666.667	100	416.666.667	100	2.083.333.333	DInas PU
4.13.4	Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung Dan Lingkungannya	Cakupan Penataan Gedung dan Lingkungannya	%		120	1.531.608.200	122	1.702.250.000	124	702.250.000	126	702.250.000	128	1.250.000.000	130	1.250.000.000	130	7.138.358.200	DInas PU
4.13.3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	60	1.054.443.200	61	1.452.250.000	62	452.250.000	63	452.250.000	64	1.000.000.000	65	1.000.000.000	65	5.411.193.200	DInas PU
4.13.4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	60	477.165.000	61	250.000.000	62	250.000.000	63	250.000.000	64	250.000.000	65	250.000.000	65	1.727.165.000	DInas PU
4,14	**Terkendalinya Inflasi**	**Laju Inflasi**	**%**	**3-5**	**3-5**	**305.924.100**	**3-5**	**349.865.591**	**3-5**	**470.967.013**	**3-5**	**413.467.013**	**3-5**	**556.681.299**	**3-5**	**556.681.299**	**3-5**	**2.653.586.314**	
4.14.1	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	Cakupan Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	33,33	44,44	17.500.000	44,44	5.000.000	55,56	50.000.000	55,56	12.500.000	66,67	50.000.000	66,67	50.000.000	66,67	185.000.000	Dinas Indag
4.14.1.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	33,33	44,44	17.500.000	44,44	5.000.000	55,56	50.000.000	55,56	12.500.000	66,67	50.000.000	66,67	50.000.000	66,67	185.000.000	Dinas Indag
4.14.2	Terkendalinya Harga Pangan Pokok	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	n/a	CV<10%	66.441.100	CV<10%	85.327.150	CV<10%	90.000.000	CV<10%	70.000.000	CV<10%	90.000.000	CV<10%	90.000.000	CV<10%	491.768.250	Dinas Ketahanan Pangan
4.14.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	n/a	CV<10%	66.441.100	CV<10%	85.327.150	CV<10%	90.000.000	CV<10%	70.000.000	CV<10%	90.000.000	CV<10%	90.000.000	CV<10%	491.768.250	Dinas Ketahanan Pangan
4.14.3	Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100	416.681.299	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah (Perekonomian)
4.14.3.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441	100	330.967.013	100	330.967.012,86	100	416.681.299	100	416.681.299	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah (Perekonomian)

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan ***Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah*** yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka *review* terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan

pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan wakil Bupati juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk:

a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2024.
b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026.
c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM).
d. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
e. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah.
f. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
g. Pemenuhan anggaran fungsi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. (1. DBH Cukai Hasil Tembakau; 2. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan, 3. ADD.).
h. Pemenuhan anggaran Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
i. Pemenuhan anggaran fungsi Pengawasan sekurang-kurangnya 0,75 % dari total belanja APBD diluar gaji.
j. Pemenuhan anggaran fungsi Pengembangan SDM sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja APBD diluar gaji.

3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan

untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Way Kanan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

URAIAN	PROYEKSI					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	543.560.148.845,00	548.775.389.000,00	559.750.896.000,00	565.348.404.000,00	571.001.888.000,00	576.711.907.000,00
Belanja Barang dan Jasa	280.324.377.742,00	289.667.911.957,00	291.702.075.852,00	282.016.653.562,00	285.802.986.089,00	289.568.577.433,00
Belanja Bunga	5.525.425.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	23.052.704.668,00	69.954.268.000,00	70.454.269.000,00	120.954.269.000,00	70.454.269.000,00	70.454.269.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	856.962.656.465,00	913.397.568.957,00	926.907.240.852,00	973.319.326.562,00	932.259.143.089,00	941.734.753.433,00
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	35.226.296.095,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00	36.000.000.000,00	37.000.000.000,00
Belanja Bangunan dan Gedung	29.566.240.339,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	62.939.552.208,00	90.221.982.000,00	97.463.176.000,00	82.636.510.000,00	136.771.723.000,00	146.715.914.000,00
Belanja Modal Aset tetap lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Modal	128.532.088.642,00	156.221.982.000,00	163.463.176.000,00	138.636.510.000,00	198.771.723.000,00	209.715.914.000,00
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	**6.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.600.000.000,00	2.750.000.000,00	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	279.949.999.640,00	289.007.965.000,00	291.898.045.000,00	294.817.025.000,00	297.765.195.000,00	300.742.847.000,00
Jumlah Transfer	**282.449.999.640,00**	**291.507.965.000,00**	**294.498.045.000,00**	**297.567.025.000,00**	**300.565.195.000,00**	**303.642.847.000,00**

URAIAN	PROYEKSI					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
JUMLAH BELANJA	1.273.944.744.747,00	1.363.127.515.957,00	1.387.368.461.852,00	1.412.022.861.562,00	1.434.596.061.089,00	1.458.093.514.433,00

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Way Kanan untuk periode Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Way Kanan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Penyusunan Program berdasarkan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Program Tahun 2021 disusun sesuai dengan program RKPD dan APBD Tahun 2021 yang telah dipetakan sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Sementara program perangkat daerah Tahun 2021 sampai dengan 2026 mengalami penyesuaikan dengan struktur organisasi dan arsitektur kinerja RPJMD dan perangkat daerah sehingga terbentuk *cascade* kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026.

Program perangkat daerah Kabupaten Way Kanan disajikan berdasarkan urusan/fungsi untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka untuk pelaksanaaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan Nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif seperti tabel dibawah ini :

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM NON URUSAN DISETIAP SKPD																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																		
	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
		Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	60,03	61,03	41.000.000	62,03	45.100.000	63,53	49.610.000	65,03	54.571.000	66,53	60.028.100	68,03	60.028.100	68,03	310.337.200	Dikbud
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	Poin	81,56	83,56	15.000.000	84,56	16.500.000	85,56	18.150.000	86,56	19.965.000	87,56	19.965.000	87,56	21.961.500	87,56	111.541.500	Dinas Pendidikan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	%	100	100	299.354.165.739	100	309.667.778.976	100	321.932.240.000	100	330.997.978.454	100	341.705.392.835	100	341.705.392.835	100	1.945.362.948.839	Dinas Pendidikan
	KESEHATAN	Nilai SAKIP DINKES	Poin	61,72	62,72	27.291.500	63,72	35.020.650	65,22	38.522.715	66,72	42.374.987	68,22	46.612.485	69,72	46.612.485	69,72	236.434.822	Dinkes
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Poin	75,71	77,71	61.250.000	78,71	77.875.000	79,71	85.662.500	80,71	94.228.750	81,71	94.228.750	81,71	103.651.625	81,71	516.896.625	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan	%	100	100	93.694.645.943	100	125.677.309.984	100	120.369.486.001	100	109.830.834.705	100	110.527.120.887	100	110.527.120.887	100	670.626.518.407	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan Pengeolaan Keuangan BLUD	%	95	95	17.900.000.000	100	19.690.000.000	100	21.659.000.000	100	23.824.900.000	100	26.207.390.000	100,00	28.828.129.000	100	138.109.419.000	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nilai SAKIP PU	Poin	50,07	52,07	28.500.000	54,07	31.350.000	56,07	34.485.000	58,07	37.933.500	60,07	41.726.850	61,07	41.726.850	61,07	215.722.200	Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Rp	160.101.000	166.505.040		174.510.090		182.147.864		191.275.325		201.992.424				201.992.424	-	Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Rp	6.467.750	6.726.460		7.049.848		7.437.913		7.890.656		8.408.076				8.408.076		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Rp	25.472.250	26.491.140		27.764.753		28.764.753		29.764.753		30.764.753				30.764.753		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Rp	20.000.000	20.800.000		21.800.000		23.000.000		24.400.000		26.000.000				26.000.000		Dinas PU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Poin	75,47	77,47	116.650.000	78,47	128.315.000	79,47	141.146.500	80,47	155.261.150	81,47	155.261.150	81,47	170.787.265	81,47	867.421.065	Dinas PU
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	%	100	100	8.092.619.719	100	8.585.878.743	100	8.824.368.500	100	9.306.805.350	100	10.287.485.885	100,00	10.287.485.885	100	55.384.644.082	Dinas PU
			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	49,16	51,16	23.650.000	53,16	26.015.000	55,16	28.616.500	57,16	31.478.150	59,16	34.625.965	60,16	34.625.965	60,16	179.011.580	Satpol PP
				Nilai SAKIP BPBD	Poin	45,78	49,78	15.000.000	52,78	16.500.000	54,78	18.150.000	56,78	19.965.000	58,78	21.961.500	60,78	21.961.500	60,78	113.538.000	BPBD
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP	Poin	35,42	37,42	217.500.000	38,42	239.250.000	39,42	263.175.000	40,42	289.492.500	41,42	289.492.500	41,42	318.441.750	41,42	1.617.351.750	Dinas Sat Pol PP
				Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Poin	51,66	53,66	20.000.000	54,66	22.000.000	55,66	24.200.000	56,66	26.620.000	57,66	26.620.000	57,66	29.282.000	57,66	148.722.000	BPBD
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP	%	100	100	3.320.712.752	100	3.506.367.412	100	3.817.064.708	100	3.850.661.762	100	3.845.584.112	100,00	3.845.584.112	100	22.185.974.857	Dinas Sat Pol PP
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas BPBD	%	100	100	2.278.767.200	100	2.465.793.060	100	3.061.943.060	100	3.220.848.374	100	3.416.189.874	100,00	3.416.189.874	100	17.859.731.442	BPBD
			SOSIAL	Nilai SAKIP DINSOS	Poin	32,09	37,09	79.940.206	41,09	87.934.227	46,09	96.727.649	51,09	106.400.414	56,09	117.040.456	60,09	117.040.456	60,09	605.083.407	Dimsos
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial	Poin	55,17	57,17	24.200.000	58,17	26.620.000	59,17	29.282.000	60,17	32.210.200	61,17	32.210.200	61,17	35.431.220	61,17	179.953.620	Dimsos
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial	%	100	100	2.908.248.700	100	3.284.305.214	100	3.442.792.764	100	3.430.191.799	100	3.594.770.858	100,00	3.594.770.858	100	20.255.080.193	Dinas Sosial
			TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Nilai SAKIP DINAS NAKERTRANS	Poin	57,43	58,43	19.261.500	59,43	21.187.650	60,93	23.306.415	62,43	25.637.057	63,93	28.200.762	63,93	28.200.762	63,93	145.794.146	Nakertrans
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans	Poin	37,5	39,5	32.000.000	40,5	35.200.000	41,5	38.720.000	42,5	42.592.000	43,5	42.592.000	43,50	46.851.200	43,5	237.955.200	Nakertrans
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans	%	100	100	2.237.688.600	100	2.460.197.775	100	2.582.277.046	100	2.448.356.369	100	2.578.540.708	100,00	2.578.540.708	100	14.885.601.206	Dinas Nakertrans

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB	Poin	31,89	37,89	9.594.600	43,89	10.554.060	48,89	11.609.466	53,89	12.770.413	57,89	14.047.454	60,89	14.047.454	60,89	72.623.446	PPPA DALDUK KB
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB	Poin	50,34	52,34	10.000.000	53,34	11.000.000	54,34	12.100.000	55,34	13.310.000	56,34	13.310.000	56,34	14.641.000	56,34	74.361.000	PPPA DALDUK KB
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB	%	100	100	4.381.274.500	100	4.847.127.820	100	5.043.519.238	100	5.041.148.291	100	5.326.483.889	100,00	5.326.483.889	100	29.966.037.628	Dinas PPPA DALDUK KB
			KETAHANAN PANGAN	Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN	Poin	52,94	54,44	15.000.000	55,94	16.500.000	57,44	18.150.000	58,94	19.965.000	60,44	21.961.500	61,94	21.961.500	61,94	113.538.000	Ketahanan Pangan
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Poin	52,91	54,91	9.100.000	55,91	10.010.000	56,91	11.011.000	57,91	12.112.100	58,91	12.112.100	58,91	13.323.310	58,91	67.668.510	Ketahanan Pangan
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan	%	100	100	1.903.752.400	100	2.053.529.285	100	2.160.545.235	100	2.080.964.537	100	2.183.408.909	100,00	2.183.408.909	100	12.565.609.275	Dinas Ketahanan Pangan
			LINGKUNGAN HIDUP	Nilai SAKIP DINAS LH	Poin	50,26	52,26	26.000.000	54,26	28.600.000	56,26	31.460.000	58,26	34.606.000	60,26	38.066.600	61,26	38.066.600	61,26	196.799.200	Dinas LH
				Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp	27.650.000	28.756.000		30.138.500		31.797.500		33,733,000		35,945,000					35,945,000		Dinas LH
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Poin	53,09	55,09	19.000.000	56,09	20.900.000	57,09	22.990.000	58,09	25.289.000	59,09	25.289.000	59,09	27.817.900	59,09	141.285.900	Dinas LH
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	2.469.934.140	100	2.789.618.005	100	2.780.931.158	100	2.640.105.000	100	2.884.831.389	100,00	2.884.831.389	100	16.450.251.081	Dinas Lingkungan Hidup
			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nilai SAKIP DINAS DUKCAPIL	Poin	17,13	32,13	8.876.000	38,13	9.763.600	43,13	10.739.960	49,13	11.813.956	55,13	12.995.352	60,13	12.995.352	60,13	67.184.219	Dukcapil
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil	Poin	49,3	51,3	12.500.000	52,3	13.750.000	53,3	15.125.000	54,3	16.637.500	55,3	16.637.500	55,30	18.301.250	55,3	92.951.250	Dukcapil
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil	%	100	100	3.304.716.000	100	3.621.495.275	100	4.199.114.784	100	4.196.528.288	100	4.452.725.522	100,00	4.452.725.522	100	24.227.305.391	Dinas Dukcapil
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nilai SAKIP DINAS PMPK	Poin	63,16	64,16	4.870.800	65,16	5.357.880	66,16	5.893.668	67,16	6.483.035	68,16	7.131.338	69,16	7.131.338	69,16	36.868.059	PMPK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	51,77	53,77	5.600.000	54,77	6.160.000	55,77	6.776.000	56,77	7.453.600	57,77	7.453.600	57,77	8.198.960	57,77	41.642.160	PMPK
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	100	4.904.193.685	100	5.395.785.135	100	5.394.633.347	100	5.393.366.380	100	5.491.972.717	100,00	5.491.972.717	100	32.071.923.981	Dinas PMK
	PERHUBUNGAN	Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN	Poin	54,34	55,34	4.500.000	56,34	4.950.000	57,84	5.445.000	59,34	5.989.500	60,84	6.588.450	62,34	6.588.450	62,34	34.061.400	Dinas Perhubungan
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp	38.800.000	40.352.000		42.292.000		44.620.000		47.336.000		50.440.000				50.440.000		Dinas Perhubungan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Poin	48,5	50,5	5.000.000	51,5	5.500.000	52,5	6.050.000	53,5	6.655.000	54,5	6.655.000	54,50	7.320.500	54,5	37.180.500	Dinas Perhubungan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	%	100	100	2.204.886.050	100	2.450.688.195	100	2.649.643.195	100	2.648.493.695	100	2.647.229.245	100,00	2.647.229.245	100	15.248.169.625	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai SAKIP DINAS KOMINFO	Poin	8,78	23,78		33,78	4.500.000	43,78	4.950.000	48,78	5.445.000	53,78	5.989.500	60,78	5.989.500	60,78	26.874.000	Dinas Kominfo
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	0	100.000.000		105.000.000		111.000.000		118,000,000		126,000,000				126,000,000		Dinas Kominfo
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo	Poin	48,15	50,15		51,15	5.000.000	52,15	5.500.000	53,15	6.050.000	54,15	6.050.000	54,15	6.655.000	54,15	29.255.000	Dinas Kominfo
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	%	100	100	2.878.187.954	100	2.367.447.665	100	2.485.345.048	100	2.264.214.816	100	2.376.850.806	100,00	2.376.850.806	100	14.748.897.096	Dinas Kominfo
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM	Poin	31,51	41,51	9.499.700	46,51	10.449.670	51,51	11.494.637	56,51	12.644.101	58,51	13.908.511	60,51	13.908.511	60,51	71.905.129	Koperasi UKM
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	45,69	47,69	11.900.000	48,69	13.090.000	49,69	14.399.000	50,69	15.838.900	51,69	15.838.900	51,69	17.422.790	51,69	88.489.590	Koperasi UKM
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM	%	100	100	2.239.498.100	100	2.411.304.885	100	2.530.693.146	100	2.442.253.105	100	2.562.941.611	100,00	2.562.941.611	100	14.749.632.458	Dinas Koperasi Dan UKM
	PENANAMAN MODAL	Nilai SAKIP DINAS PM PTSP	Poin	48,22	53,22	11.500.000	56,22	12.650.000	57,72	13.915.000	59,22	15.306.500	60,72	16.837.150	62,22	16.837.150	62,22	87.045.800	Dinas PM PTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	541.571.549	463.234.411		486.396.132		514.190.197		546.616.606		583.675.359				583.675.359		Dinas PM PTSP
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMPTSP	Poin	55	57	39.650.000	58	43.615.000	59	47.976.500	60	52.774.150	61	52.774.150	61,00	58.051.565	61	294.841.365	Dinas PM PTSP
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PM PTSP	%	100	100	3.660.064.300	100	4.080.755.015	100	4.087.614.991	100	4.078.081.485	100	4.191.878.737	100,00	4.191.878.737	100	24.290.273.265	Dinas PM PTSP
			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Nilai SAKIP PORAPAR	Poin	31,33	41,33	13.000.000	46,33	14.300.000	51,33	15.730.000	53,33	17.303.000	55,33	19.033.300	60,78	19.033.300	60,78	98.399.600	Porapar
				Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	1.000.000	2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000				6.000.000		Dinas Porapar
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar	Poin	50,8	52,8	22.125.000	53,8	24.337.500	54,8	26.771.250	55,8	29.448.375	56,8	29.448.375	56,80	32.393.213	56,8	164.523.713	Porapar
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar	%	100	100	2.573.534.100	100	2.788.170.555	100	2.802.457.858	100	2.798.207.733	100	2.793.532.596	100,00	2.793.532.596	100	16.549.435.437	Dinas Porapat
			PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Poin	41,73	58,64	9.500.000	59,64	10.450.000	60,64	11.495.000	61,64	12.644.500	62,64	13.908.950	62,64	13.908.950	62,64	71.907.400	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Poin	66,11	68,11	10.500.000	69,11	11.550.000	70,11	12.705.000	71,11	13.975.500	72,11	13.975.500	72,11	15.373.050	72,11	78.079.050	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	%	100	100	2.391.535.800	100	2.386.635.800	100	2.506.411.370	100	2.389.909.658	100	2.543.231.811	100,00	2.543.231.811	100	14.760.956.250	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
			PERIKANAN	Nilai SAKIP DINAS PERIKANAN	Poin	39,59	43,59	7.000.000	48,59	7.700.000	53,59	8.470.000	55,59	9.317.000	58,09	10.248.700	60,09	10.248.700	60,09	52.984.400	Dinas Perikanan
				Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Rp	12.000.000	12.480.000		13.080.000		13.800.000		14.640.000		15.600.000				15.600.000		DInas Perikanan
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan	Poin	46,31	48,31	22.250.000	49,31	24.475.000	50,31	26.922.500	51,31	29.614.750	52,31	29.614.750	52,31	32.576.225	52,31	165.453.225	Dinas Perikanan
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan	%	100	100	2.273.639.100	100	2.438.257.555	100	2.635.040.055	100	2.552.185.835	100	2.754.202.887	100,00	2.754.202.887	100	15.407.528.319	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Nilai SAKIP DINAS PERKEBUNAN	Poin	34,37	36,37	5.000.000	40,37	5.500.000	45,37	6.050.000	50,37	6.655.000	55,37	7.320.500	60,37	7.320.500	60,37	37.846.000	Dinas Perkebunan
				Nilai SAKIP DINAS TPHP	Poin	60,22	61,22	22.446.000	62,22	24.690.600	63,72	27.159.660	65,22	29.875.626	66,72	32.863.189	68,22	32.863.189	68,22	169.898.263	Dinas TPHP
				Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	Rp	134.400.000	139.776.000		141.120.000		149.184.000		158.592.000		169.344.000				169.344.000		Dinas TPHP
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan	Poin	40,5	42,5	4.500.000	43,5	4.950.000	44,5	5.445.000	45,5	5.989.500	46,5	5.989.500	46,50	6.588.450	46,5	33.462.450	Dinas Perkebunan
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP	Poin	71,66	73,66	20.000.000	74,66	22.000.000	75,66	24.200.000	76,66	26.620.000	77,66	26.620.000	77,66	29.282.000	77,66	148.722.000	Dinas TPHP
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan	%	100	100	3.024.154.400	100	3.520.158.385	100	3.619.113.385	100	3.517.963.885	100	3.734.209.110	100,00	3.734.209.110	100	21.149.808.275	Dinas Perkebunan
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas TPHP	%	100	100	10.261.138.500	100	11.132.478.751	100	11.427.809.691	100	11.475.832.402	100	11.994.574.353	100,00	11.994.574.353	100	68.286.408.051	Dinas TPHP
			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Nilai SAKIP DINAS INDAG	Poin	41,27	41,27	12.000.000	60	13.200.000	61,5	14.520.000	63	15.972.000	64,5	17.569.200	65,50	17.569.200	65,5	90.830.400	Dinas Indag
				Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp	186.135.000	193.580.400		202.887.150		214.055.250		227.084.700		241.975.500				241.975.500		Dinas Indag
				Retribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Rp	166.141.000	162.786.640		170.925.972		180.693.170		192.088.235		205.111.166				205.111.166		Dinas Indag
				Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Rp	95.528.000	99.349.120		104.125.520		109.857.200		116.544.160		124,186,400				124,186,400		Dinas Indag
				Retribusi Tera Ulang Timbangan	Rp	0	10.000.000		10.500.000		11.100.000		11.800.000		12.600.000				12.600.000		Dinas Indag
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Indag	Poin	49,53	51,53	10.500.000	52,53	11.550.000	53,53	12.705.000	54,53	13.975.500	55,53	13.975.500	55,53	15.373.050	55,53	78.079.050	Dinas Indag
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag	%	100	100	3.765.987.646	100	4.141.390.566	100	4.433.167.622	100	4.421.171.081	100	4.826.677.288	100,00	4.826.677.288	100	26.415.071.492	Dinas Indag

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	%	30	40	50.000.000	50	55.000.000	60	200.000.000	70	220.000.000	80	242.000.000	80,00	242.000.000	80	1.009.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase IKU Bupati Yang Tercapai	%		60	107.000.000	61	117.700.000	62	150.000.000	63	165.000.000	64	181.500.000	65,00	181.500.000	65	902.700.000	Sekretariat Daerah
				Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH	Poin	60,5	61,5	48.000.000	62,5	52.800.000	64	58.080.000	65,5	63.888.000	67	70.276.800	68,50	70.276.800	68,5	363.321.600	Sekretariat Daerah
				Cakupan SOP Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi	%	60	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	85,00	100.000.000	85	600.000.000	Sekretariat Daerah
				Cakupan Pelayanan Publik yang di Survei	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100,00	100.000.000	100	600.000.000	Sekretariat Daerah
				Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi	%	70	75	50.000.000	80	55.000.000	85	200.000.000	90	220.000.000	100	242.000.000	100,00	242.000.000	100	1.009.000.000	Sekretariat Daerah
				Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah	Poin	62,05	64,05	489.550.000	65,05	538.505.000	66,05	592.355.500	67,05	651.591.050	68,05	651.591.050	68,05	716.750.155	68,05	3.640.342.755	Sekretariat Daerah
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	%	100	100	25.354.831.721	100	24.964.171.515	100	24.469.638.504	100	23.676.665.165	100	23.647.252.432	100,00	23.647.252.432	100	145.759.811.769	Sekretariat Daerah
				Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	2780530250	100	2637280250	100	2901008275	100	3191109103	100	3510220013	100,00	3510220013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
				Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100	2780530250	100	2637280250	100	2901008275	100	3191109103	100	3510220013	100,00	3510220013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
				Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	2780530250	100	2637280250	100	2901008275	100	3191109103	100	3510220013	100,00	3510220013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	%	100	100	2780530250	100	2637280250	100	2901008275	100	3191109103	100	3510220013	100,00	3510220013	100	18.530.367.903	Sekretariat Daerah
			SEKRETARIAT DPRD	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	Poin	62,17	63,17	8.500.000	64,17	9.350.000	65,67	10.285.000	67,17	11.313.500	68,67	12.444.850	70,17	12.444.850	70,17	64.338.200	Sekretariat DPRD
				Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	Poin	61,09	63,09	693.760.000	64,09	763.136.000	65,09	839.449.600	66,09	923.394.560	67,09	923.394.560	67,09	1.015.734.016	67,09	5.158.868.736	Sekretariat DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100	27.916.627.660	100	27.511.982.643	100	28.848.957.475	100	27.345.696.080	100	27.959.162.700	100,00	27.959.162.700	100	167.541.589.258	Sekretariat DPRD
			PERENCANAAN	Nilai SAKIP BAPPEDA	Poin	64,24	65,25	19.540.400	66,25	21.494.440	67,75	23.643.884	69,25	26.008.272	70,75	28.609.100	72,25	28.609.100	72,25	147.905.196	Bappeda
				Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA	Poin	55,91	57,91	50.000.000	58,91	55.000.000	59,91	60.500.000	60,91	66.550.000	61,91	66.550.000	61,91	73.205.000	61,91	371.805.000	Bappeda
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda	%	100	100	3.909.075.600	100	3.950.121.560	100	4.091.108.283	100	4.075.445.773	100	4.322.196.417	100,00	4.322.196.417	100	24.670.144.050	Bappeda
			KEUANGAN	Nilai SAKIP BPKAD	Poin	60,63	61,63	65.288.777	62,63	71.817.655	64,13	78.999.420	65,63	86.899.362	67,13	95.589.298	68,63	95.589.298	68,63	494.183.811	BPKAD
				Nilai SAKIP BAPENDA	Poin	52,71	53,71	8.500.000	55,71	9.350.000	57,71	10.285.000	59,71	11.313.500	61,71	12.444.850	63,71	12.444.850	63,71	64.338.200	BAPENDA
				Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Rp	19.000.000	19.526.959		23.422.532		24.562.532		25.892.532		27.412.532				27.412.532		BPKAD
				Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	Poin	83,09	85,09	20.000.000	86,09	22.000.000	87,09	24.200.000	88,09	26.620.000	89,09	26.620.000	89,09	26.620.000	89,09	146.060.000	BPKAD
				Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA	Poin	58,14	60,14	20.000.000	61,14	22.000.000	62,14	24.200.000	63,14	26.620.000	64,14	26.620.000	64,14	26.620.000	64,14	146.060.000	BAPENDA
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPKAD	%	100	100	36.920.598.932	100	40.315.168.068	100	37.307.364.800	100	37.297.044.858	100	38.133.290.694	100,00	38.133.290.694	100	228.106.758.046	BPKAD
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda	%	100	100	6.826.835.959	100	7.361.545.074	100	7.858.410.074	100	7.854.961.574	100	8.001.168.224	100,00	8.001.168.224	100	45.904.089.129	Bapenda
			KEPEGAWAIAN	Nilai SAKIP BKPSDM	Poin	46,1	51,1	7.088.700	54,1	7.797.570	57,1	8.577.327	59,1	9.435.060	61,1	10.378.566	63,10	10.378.566	63,1	53.655.788	BKPSDM
				Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	Poin	54,03	56,03	37.000.000	57,03	40.700.000	58,03	44.770.000	59,03	49.247.000	60,03	49.247.000	60,03	49.247.000	60,03	270.211.000	BKPSDM
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM	%	100	100	3.250.389.298	100	3.199.470.693	100	3.557.019.349	100	3.547.971.652	100	3.784.092.188	100,00	3.784.092.188	100	21.123.035.370	BKPSDM
			INSPEKTORAT DAERAH	Nilai SAKIP INSPEKTORAT	Poin	70,72	70,97	3.200.000	71,23	3.520.000	71,48	3.872.000	71,74	4.259.200	72	4.685.120	72,30	4.685.120	72,3	24.221.440	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT	Poin	78	80	30.300.000	81	33.330.000	82	36.663.000	83	40.329.300	84	40.329.300	84,00	40.329.300	84	221.280.900	Inspektorat
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	%	100	100	8.364.018.589	100	9.493.864.982	100	9.690.179.982	100	9.586.126.482	100	9.881.667.632	100,00	9.881.667.632	100	56.897.525.299	Inspektorat
			KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan B. Umpu
				Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Kasui
				Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Banjit
				Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Baradatu
				Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Bahuga
				Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Pakuan Ratu
				Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Negeri Agung
				Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Way Tuba
				Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan R. Tangkas
				Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan G. Labuhan
				Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Negara Batin
				Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Negeri Besar
				Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Buay Bahuga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kecamatan Bumi Agung
				Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK	Poin	n/a	5	3.500.000	15	3.850.000	20	4.235.000	25	4.658.500	30	5.124.350	35,00	5.124.350	35	26.492.200	Kec.Umpu Semenguk
				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu	Poin	59,11	61,11	7.700.000	62,11	8.470.000	63,11	9.317.000	64,11	10.248.700	65,11	10.248.700	65,11	10.248.700	65,11	56.233.100	Kecamatan B. Umpu
				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui	Poin	45,5	47,5	7.000.000	48,5	7.700.000	49,5	8.470.000	50,5	9.317.000	51,5	9.317.000	51,50	9.317.000	51,5	51.121.000	Kecamatan Kasui
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Banjit	Poin	48,33	50,33	7.700.000	51,33	8.470.000	52,33	9.317.000	53,33	10.248.700	54,33	10.248.700	54,33	10.248.700	54,33	56.233.100	Kecamatan Banjit
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Baradatu	Poin	45,42	47,42	7.700.000	48,42	8.470.000	49,42	9.317.000	50,42	10.248.700	51,42	10.248.700	51,42	10.248.700	51,42	56.233.100	Kecamatan Baradatu
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga	Poin	47,33	49,33	7.700.000	50,33	8.470.000	51,33	9.317.000	52,33	10.248.700	53,33	10.248.700	53,33	10.248.700	53,33	56.233.100	Kecamatan Bahuga
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Pakuan Ratu	Poin	43,1	45,1	7.700.000	46,1	8.470.000	47,1	9.317.000	48,1	10.248.700	49,1	10.248.700	49,10	10.248.700	49,1	56.233.100	Kecamatan Pakuan Ratu
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Agung	Poin	45	47	7.700.000	48	8.470.000	49	9.317.000	50	10.248.700	51	10.248.700	51,00	10.248.700	51	56.233.100	Kecamatan Negeri Agung
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Way Tuba	Poin	43,88	45,88	7.700.000	46,88	8.470.000	47,88	9.317.000	48,88	10.248.700	49,88	10.248.700	49,88	10.248.700	49,88	56.233.100	Kecamatan Way Tuba
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Rebang Tangkas	Poin	33,41	35,41	7.700.000	36,41	8.470.000	37,41	9.317.000	38,41	10.248.700	39,41	10.248.700	39,41	10.248.700	39,41	56.233.100	Kecamatan R. Tangkas
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Gunung Labuhan	Poin	45,55	47,55	7.700.000	48,55	8.470.000	49,55	9.317.000	50,55	10.248.700	51,55	10.248.700	51,55	10.248.700	51,55	56.233.100	Kecamatan G. Labuhan
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin	Poin	58,8	60,8	7.700.000	61,8	8.470.000	62,8	9.317.000	63,8	10.248.700	64,8	10.248.700	64,80	10.248.700	64,8	56.233.100	Kecamatan Negara Batin
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Besar	Poin	49,33	51,33	7.700.000	52,33	8.470.000	53,33	9.317.000	54,33	10.248.700	55,33	10.248.700	55,33	10.248.700	55,33	56.233.100	Kecamatan Negeri Besar
				Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga	Poin	42,33	44,33	7.700.000	45,33	8.470.000	46,33	9.317.000	47,33	10.248.700	48,33	10.248.700	48,33	10.248.700	48,33	56.233.100	Kecamatan Buay Bahuga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bumi Agung	Poin	38,88	40,88	7.700.000	41,88	8.470.000	42,88	9.317.000	43,88	10.248.700	44,88	10.248.700	44,88	10.248.700	44,88	56.233.100	Kecamatan Bumi Agung
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Umpu Semenguk	Poin	55	57	7.700.000	58	8.470.000	59	9.317.000	60	10.248.700	61	10.248.700	61,00	10.248.700	61	56.233.100	Kec.Umpu Semenguk
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Blambangan Umpu	%	100	100	2.261.847.992	100	2.469.571.487	100	2.605.378.352	100	2.486.156.545	100	2.802.121.506	100,00	2.802.121.506	100	15.427.197.388	Kec Blambangan Umpu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Kasui	%	100	100	2.348.200.400	100	2.641.055.785	100	2.771.960.909	100	2.676.212.300	100	3.024.494.616	100,00	3.024.494.616	100	16.486.418.626	Kec.Kasui
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Banjit	%	100	100	2.054.493.800	100	2.301.015.100	100	2.431.372.516	100	2.490.522.554	100	2.596.411.694	100,00	2.596.411.694	100	14.470.227.358	Kec Banjit
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu	%	100	100	4.087.867.600	100	4.597.833.825	100	4.883.415.288	100	4.708.012.456	100	5.083.602.080	100,00	5.083.602.080	100	28.444.333.329	Kec Baradatu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga	%	100	100	1.375.089.500	100	1.490.545.400	100	1.563.948.969	100	1.604.297.797	100	1.662.552.587	100,00	1.662.552.587	100	9.358.986.840	Kec Bahuga
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Pakuan Ratu	%	100	100	2.319.250.826	100	2.498.092.396	100	2.614.705.545	100	2.697.806.975	100	2.864.394.583	100,00	2.864.394.583	100	15.858.644.908	Kec Pakuan Ratu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Agung	%	100	100	1.336.788.252	100	1.470.087.577	100	1.562.285.568	100	1.579.756.099	100	1.717.386.816	100,00	1.717.386.816	100	9.383.691.128	Kec Negeri Agung
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Way Tuba	%	100	100	1.775.084.000	100	1.907.468.675	100	2.023.934.010	100	2.060.093.991	100	2.110.438.040	100,00	2.110.438.040	100	11.987.456.756	Kec Way Tuba
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Rebang Tangkas	%	100	100	1.226.497.700	100	1.329.175.450	100	1.406.598.178	100	1.429.579.301	100	1.541.965.011	100,00	1.541.965.011	100	8.475.780.651	Kec Rebang Tangkas
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan	%	100	100	1.603.818.700	100	1.727.500.840	100	1.831.751.187	100	1.863.589.846	100	2.016.598.209	100,00	2.016.598.209	100	11.059.856.991	Kec Gunung Labuhan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negara Batin	%	100	100	1.658.425.110	100	1.784.501.420	100	1.887.239.196	100	1.925.945.210	100	2.073.110.125	100,00	2.073.110.125	100	11.402.331.186	Kec. Negara Batin
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Besar	%	100	100	1.499.989.806	100	1.620.924.321	100	1.713.828.162	100	1.748.641.965	100	1.881.980.987	100,00	1.881.980.987	100	10.347.346.228	Kec Negeri Besar
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Buay Bahuga	%	100	100	1.266.938.400	100	1.368.099.070	100	1.443.133.374	100	1.471.559.412	100	1.582.210.133	100,00	1.582.210.133	100	8.714.150.522	Kec Buay Bahuga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bumi Agung	%	100	100	1.074.694.200	100	1.163.991.410	100	1.233.775.481	100	1.248.742.855	100	1.353.903.557	100,00	1.353.903.557	100	7.429.011.060	Kec Bumi Agung
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk	%	100	100	848.856.900	100	940.118.600	100	998.200.485	100	998.963.609	100	1.092.926.805	100,00	1.092.926.805	100	5.971.993.204	Kec. Umpu Semenguk
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL	Poin	46,96	51,96	10.000.000	54,96	11.000.000	56,96	12.100.000	58,46	13.310.000	59,96	14.641.000	54,96	14.641.000	54,96	75.692.000	Badan Kesbangpol
				Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL	Poin	48,82	50,82	40.000.000	51,82	44.000.000	52,82	48.400.000	53,82	53.240.000	54,82	53.240.000	54,82	53.240.000	54,82	292.120.000	Badan Kesbangpol
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol	%	100	100	2.136.428.700	100	2.291.994.305	100	2.398.568.370	100	2.510.196.142	100	2.555.570.915	100,00	2.555.570.915	100	14.448.329.347	Badan Kesbangpol
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	%	n/a	42,67	550.000.000	66,67	700.000.000	80	700.000.000	93,33	400.000.000	96	350.000.000	100	350.000.000	100	3.050.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	%	n/a	46,67	480.000.000	66,67	660.000.000	80	650.000.000	93,33	400.000.000	96	360.000.000	100	360.000.000	100	2.910.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik	%	51,62	53,10	200.000.000	53,83	200.000.000	54,57	500.000.000	56,05	550.000.000	59,00	550.000.000	66,37	550.000.000	66,37	2.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik	%	n/a	44,25	150.000.000	47,20	150.000.000	49,13	250.000.000	53,10	250.000.000	56,05	250.000.000	64,90	250.000.000	64,90	1.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	%	n/a			79,67	250.000.000	87,64	250.000.000	87,64	262.500.000	89,24	270.000.000	91,63	270.000.000	91,63	1.302.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	%	n/a			36,87	205.000.000					44,25	625.000.000	44,25	625.000.000	44,25	1.455.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	%	n/a	42,67	375.000.000	66,67	375.000.000	80	450.000.000	93,33	525.000.000	96	540.000.000	100	540.000.000	100	2.805.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	%	n/a			51,62	610.000.000			60,47	500.000.000					73,75	1.110.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	%	n/a	65	150.000.000	75	150.000.000	85	200.000.000	90	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	%	n/a	35,40	250.000.000	39,68	250.000.000	44,99	300.000.000	47,57	350.000.000	54,57	350.000.000	55	350.000.000	54,57	1.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	%	n/a	38,35	270.000.000	42,77	120.000.000	50,15	75.000.000	59,00	75.000.000	66,37	75.000.000	74	75.000.000	73,75	690.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Akreditasi PAUD	Poin	25,96	27,43	200.000.000	29,50	200.000.000	32,45	200.000.000	36,87	75.000.000	44,25	100.000.000	50	100.000.000	50,15	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	%	n/a	35	340.000.000	40	340.000.000	42,5	680.000.000	50	800.000.000	55	880.000.000	63	880.000.000	62,5	3.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	%	100	100	42.500.000.000	100	42.500.000.000	100	45.000.000.000	100	50.000.000.000	100	46.800.000.000	100	46.800.000.000	100	273.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	65,76	66,61	1.700.000.000	67,46	1.700.000.000	68,14	1.750.000.000	68,99	1.890.000.000	70,27	2.014.193.257	74,53	2.014.193.257	74,53	11.068.386.514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	n/a	25,48	1.200.000.000	31,85	1.200.000.000	35,03	600.000.000	39,81	830.693.257	47,77	900.000.000	52,55	900.000.000	52,55	5.630.693.257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	55,73	57,01	1.000.000.000	60,51	1.000.000.000	63,69	1.000.000.000	66,88	1.000.000.000	70,06	1.000.000.000	73,25	1.000.000.000	73,25	6.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	n/a			31,85	375.000.000	33,44	545.000.000			35,03	500.000.000	38,22	500.000.000	38,22	1.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	52,55	1.800.000.000			57,96	1.825.000.000			63,69	2.000.000.000	63,69	2.000.000.000	63,69	7.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	%	n/a	71,43	225.000.000	76,53	225.000.000	76,53	375.000.000	78,57	375.000.000					81,63	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	%	n/a	66,88	2.500.000.000	70,06	2.500.000.000			73,25	2.000.000.000					79,62	7.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	%	n/a	35	640.000.000	40	640.000.000	42,5	680.000.000	50	700.000.000	55	880.000.000	62,5	880.000.000	62,5	4.420.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	%	100	100	125.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	%	n/a	62,90	250.000.000	68,47	250.000.000	70,86	300.000.000	75,00	320.000.000	77,71	375.000.000	77,71	375.000.000	77,71	1.870.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	%		57,32	75.000.000	63,69	75.000.000	70,06	75.000.000	73,25	75.000.000	76,43	75.000.000	79,62	75.000.000	79,62	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Poin	99,36	99,5	75.000.000	99,65	75.000.000	99,85	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	%	n/a	40	225.000.000	42,86	225.000.000	50,00	262.500.000	53,57	281.250.000	57,14	300.000.000	60,71	300.000.000	60,71	1.593.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	%	100	100	17.850.000.000	100	17.850.000.000	100	17.955.000.000	100	18.060.000.000	100	18.112.500.000	100	18.112.500.000	100	107.940.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	62,40	63,36	4.300.000.000	72,04	6.300.000.000	73,42	1.000.000.000	74,79	850.000.000	77,13	1.700.000.000	79,89	1.700.000.000	79,89	15.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	n/a			54,95	500.000.000			71,43	1.275.000.000					82,42	1.775.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	65,9	69,23	630.000.000			76,92	3.100.000.000			85,71	2.480.000.000	90,11	2.480.000.000	90,11	8.690.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	68,1	71,43	1.015.583.187	76,92	1.250.000.000			80,22	750.000.000	84,62	1.000.000.000	86,81	1.000.000.000	86,81	5.015.583.187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	63,7					71,4	500.000.000			76,9	500.000.000	80,2	500.000.000	80,2	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a			38,5	750.000.000			44,0	750.000.000					51,6	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	%	n/a			49,5	175.000.000			52,7	105.000.000					56,0	280.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Kantin Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a			27,5	350.000.000			38,5	350.000.000					54,9	700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a			44,0	600.000.000	51,6	700.000.000			60,4	800.000.000	60,4	800.000.000	60,4	2.900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	%	n/a	59,52	225.000.000			65,48	750.000.000			71,43	750.000.000	74,40	750.000.000	74,40	2.475.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	%	n/a	40	225.000.000	42,86	225.000.000	50,00	262.500.000	53,57	281.250.000	57,14	300.000.000	60,71	300.000.000	60,71	1.593.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	%	n/a	68,13	1.500.000.000			74,73	1.200.000.000			80,22	1.000.000.000	83,52	1.000.000.000	83,52	4.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	85.643.257	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	535.643.257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	%	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP	%	n/a	64,84	125.000.000	68,02	125.830.187	72,64	250.000.000	75,93	250.000.000	78,13	275.000.000	80,66	275.000.000	80,66	1.300.830.187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%	n/a	76,92	75.000.000	80,22	75.000.000	83,52	75.000.000	86,81	75.000.000	89,01	75.000.000	93,41	75.000.000	93,41	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi SMP	Poin	96,59	96,9	200.000.000	97,2	100.000.000	98,5	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	18,28	3.618.000.000	19,15	3.618.000.000	20,08	3.032.050.000	21,62	2.846.000.000	23,17	1.460.000.000	25	1.460.000.000	24,71	16.034.050.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%	n/a	70,06	200.000.000	73,25	200.000.000	76,43	100.000.000	79,62	200.000.000	85,99	200.000.000	87,58	200.000.000	87,58	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	%	n/a	44,25		48,67		51,62		54,57	70.000.000	59,00	70.000.000	66,37	70.000.000	66,37	210.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD)	%	99,36	99,5		99,65		99,85		100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SMP)	%	n/a	62,64		69,23		73,63		78,02	110.000.000	81,32	110.000.000	85	110.000.000	84,62	330.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Pembinaan Bahan Dan Sastra Yang Penuturannya Dalam Kabupaten	%	n/a	0		20		30		40	150.000.000	50	200.000.000	60	200.000.000	60	550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	93	100	5.000.000.000	100	5.700.000.000	100	5.700.000.000	100	5.700.000.000	100	6.400.000.000	100	6.400.000.000	100	34.900.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	91,7	100	4.522.219.600	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	100	5.300.000.000	100	6.300.000.000	100	6.300.000.000	100	33.022.219.600	Dinas Kesehatan
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir	%	95	100	4.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	32.000.000.000	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	91,2	100	5.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	38.000.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)		7,4	8,5	5.293.387.000	7	5.393.387.000	5,5	5.343.387.000	4	5.343.387.000	4	5.332.087.607	4	5.332.087.607	4	32.037.723.214	Dinas Kesehatan
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	1,9	4,6	2.600.000.000	3,8	2.000.000.000	3	2.000.000.000	2,5	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	12.600.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)		88,8	82	1.500.000.000	84	2.000.000.000	86	2.000.000.000	88	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	11.500.000.000	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	89	100	501.318.551	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.501.318.551	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar	%	38	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar	%	85	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	79	100	550.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.550.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	%	68	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	53	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	29	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	49	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.750.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)	%	80	80	2.000.000.000	83	3.000.000.000	85	3.000.000.000	90	3.200.000.000	90	3.200.000.000	90	3.200.000.000	90	17.600.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)	%	5	10	2.000.000.000	15	3.000.000.000	20	3.000.000.000	25	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	17.000.000.000	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)	%	0	5	2.000.000.000	10	3.000.000.000	15	3.000.000.000	20	3.000.000.000	25	3.000.000.000	25	3.000.000.000	25	17.000.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin	%	100	100	2.000.000.000	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	3.036.831.141	100	17.184.155.705	Dinas Kesehatan
				Status Akreditasi Rumah Sakit	Katagori	Perdana	Madya	13.463.084.406	Madya	10.305.709.500	Madya	10.305.709.500	Utama	5.305.709.500	Utama	5.305.709.500	Paripurna	5.305.709.500	Paripurna	49.991.631.906	RSUD ZAPA
				Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Poin	97	98	200.000.000	98	200.000.000	99	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Kesehatan
				Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	%	6,9	7,1	2.000.000.000	7,2	2.000.000.000	7,3	2.000.000.000	7,4	2.000.000.000	7,5	2.000.000.000	7,6	2.000.000.000	7,6	12.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	%	20	30	1.171.089.700	40	6.603.629.700	50	6.803.629.700	60	7.103.629.700	70	7.603.629.700	70	7.603.629.700	70	36.889.238.200	Dinas Kesehatan
				Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	%	81	83,5	1.000.000.000	85	6.172.525.000	90	6.172.525.000	95	4.361.820.112	100	5.167.307.041	100	5.167.307.041	100	28.041.484.194	RSUD ZAPA
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	72,6	75	246.199.440	78	127.597.940	82	100.000.000	85	137.597.940	90	400.000.000	90	400.000.000	90	1.411.395.320	Dinas Kesehatan
				Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	%	50	50	150.000.000	55	110.000.000	60	113.310.000	65	100.000.000	70	316.105.100	75	316.105.100	75	1.105.520.200	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	%	42	45	142.572.000	45	100.000.000	45	124.287.940	45	100.000.000	45	321.492.840	45	321.492.840	45	1.109.845.620	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	%	100	100	136.204.300	100	156.204.300	100	153.000.000	100	186.904.300	100	360.230.000	100	360.230.000	100	1.352.772.900	Dinas Kesehatan
				Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	%	100	100	250.000.000		230.000.000		233.204.300		256.524.730		399.770.000	100	399.770.000	100	1.769.269.030	Dinas Kesehatan
				Persentase Posyandu Aktif			50	200.000.000	55	200.000.000	60	200.000.000	65	142.775.270	65	140.000.000	65	140.000.000	65	1.022.775.270	Dinas Kesehatan
				Persentase bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	%	50	60	20.000.000	70	83.000.000	80	83.000.000	90	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	435.000.000	RSUD ZAPA
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	%	0	1	1.629.049.500	1	2.432.884.441	2	2.597.158.751	3	1.500.000.000	4	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	16.159.092.692	Dinas PU
				Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	%	0	1	1.629.049.500	1	2.597.158.751	2	2.597.158.751	3	1.758.099.000	4	4.539.771.141	5	4.539.771.141	5	17.661.008.284	Dinas PU
				Indeks Pertanaman Padi	Kali Tahun	2,01	2,020	2.000.000.000	2,030	2.000.000.000	2,040	2.000.000.000	2,051	2.000.000.000	2,061	2.000.000.000	2,071	2.000.000.000	2,071	12.000.000.000	Dinas PU
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	n/a	1	8.205.738.000	2	7.385.000.000	3	7.504.588.000	4	7.504.588.000	5	7.504.588.000	6	7.504.588.000	6	45.609.090.000	Dinas PU
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangkut	%	n/a	90		92	1.600.000.000	94	1.000.000.000	96	1.000.000.000	98	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.600.000.000	Dinas PU
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	0	0	3.958.219.000	1	3.958.219.000	2	4.000.000.000	3	3.058.219.000	4	6.912.500.000	5	6.912.500.000	5	28.799.657.000	Dinas PU
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	19,46	20		20,7	2.750.000.000	21,44	2.100.000.000	22,19	2.500.000.000	22,94	3.150.000.000	24	3.150.000.000	23,58	13.650.000.000	Dinas PU
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	%	0	50	1.054.443.200	50	1.702.250.000	50	702.250.000	50	702.250.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	6.661.193.200	Dinas PU
				Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	60	1.054.443.200	61	1.452.250.000	62	452.250.000	63	452.250.000	64	1.000.000.000	65	1.000.000.000	65	5.411.193.200	DInas PU
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	60	477.165.000	61	250000000	62	250000000	63	250000000	64	250000000	65	250000000	65	1.727.165.000	DInas PU
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	n/a	5	6.000.000.000	5	6.000.000.000	5	6.000.000.000	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	48.543.037.942	Dinas PU
				Proporsi Jalan Yang Dibangun	%	n/a	5	8.415.886.187	5	6.323.241.558	5	6.671.924.024	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	51.954.089.711	Dinas PU
				Proporsi Jembatan Yang Dibangun	%	n/a	5	8.415.886.187	5	6.323.241.558	5	6.671.924.024	5	7.997.128.857	5	11.272.954.542	5	11.272.954.542	5	51.954.089.711	Dinas PU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Proporsi Jalan Yang Dipelihara	%	n/a	20	8.415.886.187	20	6.323.241.558	20	6.671.924.024	20	7.997.128.857	20	11.272.954.542	20	11.272.954.542	20	51.954.089.711	Dinas PU
				Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	%	n/a	20	8.415.886.187	20	6.323.241.558	20	6.671.924.024	20	7.997.128.857	20	11.272.954.542	20	11.272.954.542	20	51.954.089.711	Dinas PU
				Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi	%	n/a	10	8.415.886.187	10	6.323.241.558	10	6.671.924.024	10	7.997.128.857	10	11.272.954.542	10	11.272.954.542	10	51.954.089.711	Dinas PU
				Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi	%	n/a	10	8.415.886.187	10	6.323.241.558	10	6.671.924.024	10	7.997.128.857	10	11.272.954.542	10	11.272.954.542	10	51.954.089.711	Dinas PU
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	n/a	10		10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	1.350.000.000	10	6.750.000.000	Dinas PU
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%	50	50		50	416.666.666,67	75	416.666.666,67	75	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100,00	416.666.666,67	100	2.083.333.333	Dinas PU
				Kesesuaian ijin oleh TKPRD Way Kanan	%	n/a	100		100	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100,00	416.666.666,67	100	2.083.333.333	DInas PU
				Tindak lanjut pelanggaran tata ruang	%	n/a	100		100	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100	416.666.666,67	100,00	416.666.666,67	100	2.083.333.333	DInas PU
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi		0	0	919.210.000	1	290.000.000	2	290.000.000	3	290.000.000	4	290.000.000	5	290.000.000	5	2.369.210.000	Dinas PU
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	1		2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	6	500.000.000	Dinas PU
				Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	%	n/a	0		12,35	1.450.000.000	11,78	1.450.000.000	11,21	1.000.000.000	10,64	1.450.000.000	10,08	1.450.000.000	10,08	6.800.000.000	Dinas PU
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	1		2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	6	500.000.000	Dinas PU
				Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	%	24,5	30		35	200.000.000	40	200.000.000	45	200.000.000	50	200.000.000	60	200.000.000	60	1.000.000.000	Dinas PU
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	%	n/a	20		20	200.000.000	40	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	80	200.000.000	80	1.000.000.000	Dinas PU
1	04	06	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%		15		20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	-	OPD yang membidangi Pertanahan
1	04	07	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah	%						1,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	08	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	%						1,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	09	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%						2,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	8,00	100.000.000,00	8,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%						2,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	8,00	100.000.000,00	8,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin membuka tanah	%						100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	04	12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupaten	%						2,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	8,00	100.000.000,00	8,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	2,5	2,67	1.763.504.633	3	1.739.466.667	3,33	1.739.466.667	3,67	1.844.771.148	4	2.014.505.867	100	2.014.505.867	100	11.116.220.849	Satpol PP
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)	%	100	100	1.763.504.633	100	1.739.466.667	100	1.739.466.667	100	1.844.771.148	100	2.014.505.867	100	2.014.505.867	100	11.116.220.849	Satpol PP
				Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten	%	100	100	1.763.504.633	100	1.739.466.667	100	1.739.466.667	100	1.844.771.148	100	2.014.505.867	100	2.014.505.867	100	11.116.220.849	Satpol PP
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	n/a	5	285.000.000	10	356.000.000	15	333.582.953	20	348.000.000	80	404.427.188	100	294.624.296	100	2.021.634.437	BPBD
				Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	n/a	100	437.290.000	100	688.890.000	100	636.200.000	100	672.740.000	100	724.690.000	100	816.800.000	100	3.976.610.000	BPBD
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	n/a	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	226.000.000	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	30	46.000.000	30	59.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000			30	705.000.000	Satpol PP
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																		
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	%	0,04	1,04		2,04		3,04		4,04		5,04	200.000.000	6,04	200.000.000	6,04	400.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial	Poin	92,00	93	19.000.000	95	11.000.000	96	45.200.000	97	45.200.000	98	45.200.000	100	45.200.000	100	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	17.41	18.41	19.000.000	19.41	11.000.000	20.41	45.200.000	21.41	45.200.000	22.41	45.200.000	23.41	45.200.000	23.41	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	4.8	5.8	19.000.000	6.8	11.000.000	7.8	45.200.000	8.8	45.200.000	9.8	45.200.000	44.418	45.200.000	10.8	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	1,54	2,54	19.000.000	3,54	11.000.000	4,54	45.200.000	5,54	45.200.000	6,54	45.200.000	7,54	45.200.000	7,54	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	1.21	2.21	19.000.000	3.21	11.000.000	4.21	45.200.000	5.21	45.200.000	6.21	45.200.000	7.21	45.200.000	7.21	210.800.000	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	%	1,52	2,52	19.000.000	3,52	11.000.000	4,52	45.200.000	5,52	45.200.000	6,52	45.200.000	7,52	45.200.000	7,52	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial	%	0	1	19.000.000	2	11.000.000	3	45.200.000	4	45.200.000	5	45.200.000	6	45.200.000	6	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	%	1,75	2,75	19.000.000	3,75	11.000.000	4,75	45.200.000	5,75	45.200.000	6,75	45.200.000	7,75	45.200.000	7,75	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	%	12,54	13,54	19.000.000	14,54	11.000.000	15,54	45.200.000	16,54	45.200.000	17,54	45.200.000	18,54	45.200.000	18,54	210.800.000	Dinas Sosial
				Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	%	0,02	1,02	19.000.000	2,02	11.000.000	3,02	45.200.000	4,02	45.200.000	5,02	45.200.000	6,02	45.200.000	6,02	210.800.000	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	6.7	7.7	10.714.286	8.7	195.396.886	9.7	195.396.886	10.7	164.746.694	11.7	164.746.694	44.388	164.746.694	11.7	895.748.138	Dinas Sosial
				Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	%	12,7	12,2	10.714.286	11,7	195.396.886	11,2	195.396.886	10,7	164.746.694	10,2	164.746.694	9,7	164.746.694	9,7	895.748.138	Dinas Sosial
				Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	%	1,02	2,02	10.714.286	3,02	195.396.886	4,02	195.396.886	5,02	164.746.694	6,02	164.746.694	7,02	164.746.694	7,02	895.748.138	Dinas Sosial
				Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%	1,39	2,39	10.714.286	3,39	195.396.886	4,39	195.396.886	5,39	164.746.694	6,39	164.746.694	7,39	164.746.694	7,39	895.748.138	Dinas Sosial
				Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah	%	0,04	1,04	10.714.286	2,04	195.396.886	3,04	195.396.886	4,04	164.746.694	5,04	164.746.694	6,04	164.746.694	6,04	895.748.138	Dinas Sosial
				Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional	%	47,3	47,29	10.714.286	47,28	195.396.886	47,28	195.396.886	47,28	164.746.694	47,28	164.746.694	47	164.746.694	47,28	895.748.138	Dinas Sosial/ Dinas Kesehatan
				Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	%	0	0.15	6.700.000	0.15	16.130.000	0.15	16.168.500	0.15	16.130.000	0.15	18.750.000	0.15	18.750.000	0.15	92.628.500	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	%	61.44	62.44	20.509.600	63.44	62.500.000	64.44	82.031.747	65.44	82.031.747	66.44	82.031.747	67.44	82.031.747	67.44	411.136.588	Dinas Sosial
				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	2	3	20.509.600	4	62.500.000	5	82.031.747	6	82.031.747	7	82.031.747	8	82.031.747	8	411.136.588	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%	-	-		-		50,00	72.892.350,00	100,00	63.890.644,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	386.782.994	Dinas Nakertrans
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	%	0.15	0.15	86.027.700	0.15	106.026.000	0.15	106.026.000	0.15	106.026.000	0.15	175.000.000	0.15	175.000.000	0.15	754.105.700	DInas Nakertrans
				Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,62	1,62	86.026.000,00	2,62	106.027.700,00	2,62	106.027.700,00	3,00	106.027.700,00	3,00	175.000.000,00	3,50	175.000.000,00	3,50	754.109.100	Dinas Nakertrans
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Poin	100	100	43.200.000	100	44.404.500	100	44.404.500	100	44.404.500	100	100.000.000	100	100.000.000	100	376.413.500	Dinas Nakertrans
				Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	n/a	10,00	43.200.000,00	15,00	44.404.500,00	20,00	44.404.500,00	25,00	44.404.500,00	30,00	100.000.000,00	35,00	100.000.000,00	35,00	376.413.500	Dinas Nakertrans
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	96.44	100,00	123.864.700,00	7,00	145.784.700,00	100,00	72.892.350,00	100,00	63.890.644,00	100,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	656.432.394	Dinas Nakertrans
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	%	0.15	0,15	50.000.000	0,15	50.000.000	0,15	50.000.000	0,15	50.000.000	0,15	50.000.000	0,15	50.000.000	0,15	300.000.000	
				Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	%	15	20.00	341.990.000	25.00	355.000.000	27.00	355.000.000	30.00	175.000.000	35.00	355.000.000	45.00	355.000.000	45.00	1.936.990.000	Dinas PPPA DALDUK KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus Kekerasaan pada Perempuan	%	100	100	44.099.900	100	44.099.900	100	44.099.900	100	44.099.900	100	70.000.000	100	70.000.000	100	316.399.600	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	n/a	5		10	130.000.000	15	130.000.000	20	100.000.000	25	130.000.000	25	130.000.000	25	620.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	10		15		15		15		15	100.000.000	15	100.000.000	15	200.000.000	Dinas PPPADALDUK dan KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan DuniaUsaha	%	40	50	6.775.095	60	7.687.598	70	7.687.598	80	16.565.440	90	37.500.000	90	37.500.000	90	113.715.730	Dinas PPPA DALDUKKB
				Persentase Peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	40	50	6.000.000	60	7.687.598	70	7.687.598	80	16.565.440	90	37.500.000	90	37.500.000	90	112.940.635	Dinas PPPA DALDUKKB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	100	10.140.000	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	263.704.000	Dinas PPPA DALDUKKB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	20,59	20,59	44.701.000	23,53	46.701.000	26,47	115.000.000	29,41	115.000.000	32,35	150.296.825	35	150.296.825	35,29	621.995.650	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	87,4	87,4	268.482.150	87,7	249.052.150	88,2	259.479.300	88,7	165.000.000	89,2	250.000.000	90	250.000.000	89,7	1.442.013.600	Dinas Ketahanan Pangan
				Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%		59,367	179.056.050	59,37	179.600.000	59,372	164.500.000	59,374	115.000.000	59,376	173.979.300	59	173.979.300	59,378	986.114.650	Dinas Ketahanan Pangan
				Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%		CV<10%	66.441.100	CV<10%	85.327.150	CV<10%	90.000.000	CV<10%	70.000.000	CV<10%	90.000.000	CV<10%	90.000.000	CV<10%	491.768.250	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	18,94%	7,05	103.974.600	7,05	105.974.600	6,17	200.000.000	5,29	200.000.000	4,41	300.000.000	3,52	300.000.000	3,52	1.209.949.200	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	72,2	73,3	94.054.700	77,8	94.054.700	80	200.000.000	83,3	200.000.000	85,6	300.000.000	87,8	300.000.000	87,8	1.188.109.400	Dinas Ketahanan Pangan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	%		0		100	350.000.000	100		100		100				100	350.000.000	Dinas LH
				Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%		100		100		100	50.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000			100	275.000.000	Dinas LH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	%		20	50.000.000	20	50.000.000	20	170.000.000	20	135.000.000	20	200.000.000	20	300.000.000	20	905.000.000	Dinas LH
				Persentase Sungai Yang Ditangani	%		60	30.000.000	65	30.000.000	75	170.000.000	80	135.000.000	85	200.000.000	90	100.000.000	90	665.000.000	Dinas LH
				Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara	%		55	36.710.200	60	36.710.200	65	60.000.000	70	80.000.000	75	100.000.000	80	50.000.000	80	363.420.400	Dinas LH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	%		30	49.275.478	30	49.275.478	30	150.000.000	30	100.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	798.550.956	Dinas LH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	21,43	37,5	29.916.500,00	53,57	29.916.500	67,86	50.000.000	82,14	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	259.833.000	Dinas LH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa /Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	%	18,87	35,85	38.088.000,00	53,83	38.088.000	69,81	50.000.000	84,91	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	276.176.000	Dinas LH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																		
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan			10	6.172.333	10	6.172.333	10	120.000.000	10	120.000.000	10	170.000.000	10	120.000.000	10	542.344.667	Dinas LH
				Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Air	%		10	6.172.333	10	6.172.333	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	15.000.000	10	222.344.667	Dinas LH
				Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	%		10	6.172.333	10	6.172.333	10	15.000.000	10	15.000.000	10	65.000.000	10	15.000.000	10	122.344.667	Dinas LH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	%		100	17.650.000	100	17.650.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	235.300.000	Dinas LH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	%	2,01	2,05	1.378.392.450	1,92	1.428.392.450	1,03	1.567.207.000	0,97	1.566.881.595	2,02	1.867.207.000	2		2,02	7.808.080.495	Dinas LH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA	Poin	100	100	1.651.090.000	100	1.601.090.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	10.552.180.000	Dinas Dukcapil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Poin	100	100	-	100	95.282.000	100	95.282.000	100	112.913.667	100	412.913.667	100	412.913.667	100	1.129.305.001	Dinas Dukcapil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	0	30	654.453.600	40	716.427.600	60	224.859.000	80	224.859.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	2.320.599.200	Dinas Dukcapil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	0	100	-	100	41.328.000	100	41.328.000	100	41.328.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	623.984.000	Dinas Dukcapil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%		10	55.000.000	14	55.000.000	16	55.000.000	18	55.000.000	20	55.000.000	23	55.000.000	23	330.000.000	Dinas PMPK
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%		7	200.403.600	10	200.403.600	14	200.403.600	21	200.403.600	23	200.403.600	25	200.403.600	25	1.202.421.600	Dinas PMPK
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%		100	809.843.400	100	809.843.400	100	320.942.500	100	320.942.500	100	320.942.500	100	320.942.500	100	2.903.456.800	Dinas PMPK
				Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%		100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	2.053.554.000	Dinas PMPK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%		0.15	632.267.000	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	531.540.101	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	3.650.661.101	Dinas PMPK
				Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%		0.15	632.267.000	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	531.540.000	0.15	621.713.500	0.15	621.713.500	0.15	3.650.661.000	Dinas PMPK
				Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%		43	2.412.148.500	43	2.412.148.500	51	2.412.148.500	55	2.412.148.500	60	2.412.148.500	66	2412148500	66	14.472.891.000	Dinas PMPK
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%		0,9		0,9	18.000.000	0,9	18.000.000	0,9	18.000.000	0,9	250.000.000	0,9	250.000.000	0,9	554.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	%	11	10,5	6.086.374.605	10	6.114.374.605	9,5	6.114.374.605	9	6.114.374.605	8,5	6.114.374.605	8	6.114.374.605	8	36.658.247.630	Dinas PPPA DALDUKKB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	%	10	10		10	32.400.000	10	32.400.000	10	32.400.000	10	60.000.000	50	60.000.000	50	217.200.000	Dinas PPPA DALDUKKB
				Persentase Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	10	10		10	16.200.000	10	16.200.000	10	16.200.000	10	30.000.000	50	30.000.000	50	108.600.000	Dinas PPPA DALDUKKB
				Persentase Pembinaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja	%	10	10		10	16.200.000	10	16.200.000	10	16.200.000	10	30.000.000	50	30.000.000	50	108.600.000	Dinas PPPA DALDUKKB
				Persentase Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Keluarga	%	10	10		10	16.200.000	10	16.200.000	10	16.200.000	10	30.000.000	50	30.000.000	50	108.600.000	Dinas PPPA DALDUKKB
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan	Poin	73	74	100.000.000	75	100.000.000	76	100.000.000	77	100.000.000	78	100.000.000	80	100.000.000	80	600.000.000	Dinas Perhubungan
				Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	%	30	30	200.000.000	30	175.000.000	50	400.000.000	60	150.000.000	60	550.000.000	60	550.000.000	60	2.025.000.000	Dishub
				Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkuran Jalan	Poin	-	-	170.468.335	40	157.918.335	70	173.854.422	100	194.531.078	100	202.431.748	100	202.431.748	100	1.101.635.666	Dishub
				Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	26	26	100.000.000	28	87.500.000	30	200.000.000	33	75.000.000	35	275.000.000	35	275.000.000	35	1.012.500.000	Dishub
				Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan	%	47,72	50	100.000.000,00	52,50	87.500.000,00	55,00	200.000.000,00	57,50	75.000.000,00	60,00	275.000.000,00	60,00	275.000.000,00	60,00	1.012.500.000	Dishub
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	80	81	1.237.000.000	82	2.323.640.000	83	2.323.640.000	84	2.000.000.000	85	2.923.640.000	86	2.923.640.000	86	13.731.560.000	Dinas Kominfo
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	2	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
				Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2,18	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
				Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
				Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	2	2,3	30.000.000	2,55	245.050.000	2,75	245.050.000	3,01	30.000.000	3,25	245.050.000	3	245.050.000	3,25	1.040.200.000	Dinas Kominfo
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha	%	N/A	10		15		20		25		30	150.000.000	40	150.000.000	40	300.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	N/A	70	232.591.700	80	188.168.000	100	188.168.000	100	188.168.000	10	200.000.000	10	200.000.000	15	1.197.095.700	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	N/A	7				18	66.216.385	25	66.216.385	35	125.000.000	35	125.000.000	35	382.432.770	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	N/A	11	137.270.600	16	114.084.600	45	114.084.600	45	114.084.600	60	152.543.814	60	152.543.814	76	784.612.028	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi	%	N/A	4	76.696.800	7	41.994.233	10	41.994.233	14	41.994.233	18	41.994.233	18	41.994.233	25	286.667.967	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi	%	N/A	4	76.696.800	7	41.994.233	10	41.994.233	14	41.994.233	18	41.994.233	18	41.994.233	25	286.667.967	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi	%	N/A	4	76.696.800	7	41.994.233	10	41.994.233	14	41.994.233	18	41.994.233	18	41.994.233	25	286.667.967	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	%		0.15	43.763.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	37.327.400	0.15	230.400.400	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	N/A	0,72	100.000.000	1,01	100.000.000	1,30	100.000.000	7,4	100.000.000	1,88	100.000.000	2,90	100.000.000	2,90	600.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	N/A	8,33	253.409.200	25,00	237.837.000	41,67	237.837.000	58,33	237.837.000	75,00	237.837.000	100	237.837.000	100	1.442.594.200	Dinas Koperasi dan UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		25	-	25	160.117.500	25	160.000.000	25	140.000.000	25	240.000.000	25	240.000.000	25	940.117.500	Dinas PMPTSP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		25	85.000.000	25	105.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	990.000.000	Dinas PMPTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Poin		83.23	737.622.000	83.45	448.900.000	84.15	550.000.000	84.15	400.000.000	85	600.000.000	90	600.000.000	90	3.336.522.000	Dinas PMPTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		0	20.000.000	0	281.222.000	0	280.000.000	0	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	1.421.222.000	Dinas PMPTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%		0	88.000.000	0	69.500.000	0	150.000.000	0	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	807.500.000	Dinas PMPTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	%	n/a	17,62	150.000.000	17,62	145.856.250	17,62	145.856.250	17,62	134.078.211	17,62	145.856.250	17,62	145.856.250	17,62	867.503.211	Dinas Porapar
				Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor	%	n/a	13,22	150.000.000	13,22	145.856.250	13,22	145.856.250	13,22	134.078.211	13,22	145.856.250	13,22	145.856.250	13,22	867.503.211	Dinas Porapar
				Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader	%	n/a	30	150.000.000	100	145.856.250	100	145.856.250	100	134.078.211	100	145.856.250	100	145.856.250	100	867.503.211	Dinas Porapar
				Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	%		5,88	150.000.000	5,88	145.856.250	5,88	145.856.250	5,88	134.078.211	5,88	145.856.250	5,88	145.856.250	5,88	867.503.211	Dinas Porapar
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	%		14,29	213.334.000	12,5	243.334.000	11,11	243.334.000	20	210.000.000	16,67	243.334.000	16,67	243.334.000	16,67	1.396.670.000	Dinas Porapar
				Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	n/a	12,50	213.333.000	12,50	243.333.000	12,50	243.333.000	12,50	210.000.000	12,50	243.333.000	12,50	243.333.000	12,50	1.396.665.000	Dinas Porapar
				Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	n/a	16,67	213.333.000	16,67	243.333.000	16,67	243.333.000	16,67	210.000.000	33,33	243.333.000	33,33	243.333.000	33,33	1.396.665.000	Dinas Porapar
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan	%		3.97	0	3.97	0	3.97	0	3.97	0	4,13	100.000.000	4,13	100.000.000	4,13	200.000.000	Dinas Porapar
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	10	65.000.000	15	73.678.000	15	250.000.000	15	100.000.000	15	250.000.000	15	250.000.000	15	988.678.000	Dinas Kominfo
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Poin	n/a	200		225	50.000.000	250	184.162.600	275	123.640.000	300	243.723.790	350	243.723.790	350	845.250.180	Dinas Kominfo
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	n/a	50	200.000.000	60	200.000.000	70		75	250.000.000	77	150.000.000	80	150.000.000	80	950.000.000	Dinas P & K
				Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	100	107.200.000	100	107.200.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	864.400.000	Dinas P & K
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	n/a	60		67		70		75		80	200.000.000	80	200.000.000	80	400.000.000	Dinas P & K
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%	n/a	50	50.000.000			65	100.000.000			75	200.000.000	75	200.000.000	75	550.000.000	Dinas P & K
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	n/a	71,43				83,33				85,71	300.000.000			88,10	300.000.000	Dinas P & K

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%		20	750.000.000	40	750.000.000	60	750.000.000	80	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	4.500.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%		66	1.500.000.000	75	1.500.000.000	84	1.500.000.000	93	1.500.000.000	98	1.500.000.000	98	1.500.000.000	98	9.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%		20	500.000.000	40	400.000.000	60	400.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	2.200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%		20	2.300.000.000	40	2.300.000.000	50	2.300.000.000	60	2.300.000.000	70	2.300.000.000	90	2.300.000.000	90	13.800.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari			48	250.000.000	48	250.000.000	48	250.000.000	72	250.000.000	96	350.000.000	96	350.000.000	96	1.700.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	%		20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	1.200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%		13	200.000.000	26	200.000.000	40	200.000.000	45	200.000.000	53	300.000.000	66	300.000.000	66	1.400.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%		50	750.000.000	52	652.900.000	57	652.900.000	62	652.900.000	67	752.900.000	72	752.900.000	72	4.214.500.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%		50	1.000.000.000	52	1.000.000.000	57	1.000.000.000	62	1.000.000.000	67	1.000.000.000	72	1.000.000.000	72	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%		50	350.000.000	52	350.000.000	57	350.000.000	62	350.000.000	67	350.000.000	72	350.000.000	72	2.100.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari	%		30	200.000.000	32	200.000.000	37	200.000.000	42	200.000.000	47	250.000.000	52	250.000.000	52	1.300.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
				Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%		20	2.500.000.000	40	2.500.000.000	50	2.500.000.000	60	2.500.000.000	80	2.500.000.000	90	2.500.000.000	90	15.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%		10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	199.500.000	10	1.197.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																		
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	%		10,87	51.000.000	21,74	51.000.000	32,61	75.000.000	43,48	75.000.000	53,35	75.000.000	67,39	75.000.000	67,39	402.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
				Persentase arsip statis yang telah dikelola	%		16,7	51.000.000	20	51.000.000	23	75.000.000	25	75.000.000	28	75.000.000	30	75.000.000	30	402.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	%		5	48.000.000	10		15	150.000.000	20	150.000.000	25	150.000.000	30	150.000.000	30	648.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan Tangkap	Ton	198,71	199,6	60.000.000	200,6	70.000.000	201,65	100.000.000	202,7	100.000.000	203,75	250.000.000	203,8	250.000.000	204,8	830.000.000	Dinas Perikanan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	%		0.15	51.250.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	246.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Lele	Ton	641,48	671,81	25.150.000	705,4	29.100.000	740,67	29.100.000	777,7	21.400.000	816,59	30.800.000	816,59	30.800.000	816,59	166.350.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Nila	Ton	297,71	311,11	25.150.000	325,11	29.100.000	339,74	29.100.000	356,72	21.400.000	374,56	30.800.000	374,56	30.800.000	374,56	166.350.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Gurame	Ton	22,13	22,5	25.150.000	23,75	29.100.000	25,07	29.100.000	26,46	21.400.000	27,93	30.800.000	27,93	30.800.000	27,93	166.350.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Emas	Ton	95,73	96,5	25.150.000	97,47	29.100.000	98,44	29.100.000	99,42	21.400.000	100,42	30.800.000	100,42	30.800.000	100,42	166.350.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Patin	Ton	626,57	650,54	25.150.000	675,46	29.100.000	701,34	29.100.000	728,65	21.400.000	757,39	30.800.000	757,39	30.800.000	757,39	166.350.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Baung	Ton	15,35	15,4	25.150.000	15,78	29.100.000	16,17	29.100.000	16,56	21.400.000	16,97	30.750.000	16,97	30.750.000	16,97	166.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	11,98	12	25.150.000	12,02	29.100.000	12,04	29.100.000	12,06	21.400.000	12,08	30.750.000	12,08	30.750.000	12,08	166.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	23.182.000	24.341.100	25.150.000	25.558.155	29.100.000	27.602.807	29.100.000	30.363.088	21.400.000	33.399.397	30.750.000	33.399.397	30.750.000	33.399.397	166.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	802.958	827.047	25.150.000	851.858	29.100.000	894.451	29.100.000	939.174	21.400.000	1.033.091	30.750.000	1.033.091	30.750.000	1.033.091	166.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	271.423	274.137	25.150.000	276.879	29.100.000	281.032	29.100.000	285.247	21.400.000	289.526	30.750.000	289.526	30.750.000	289.526	166.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	268.661	274.034	25.150.000	279.515	29.100.000	290.696	29.100.000	305.230	21.400.000	320.492	30.750.000	320.492	30.750.000	320.492	166.250.000	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	50.000	50.500	25.150.000	51.055	29.100.000	51.515	29.100.000	52.030	21.400.000	52.551	30.750.000	52.551	30.750.000	52.551	166.250.000	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Lele	Ton	641,48	671,81		705,4		740,67	10.292.477	777,7	10.292.477	816,59	10.292.477	816,59	10.292.477	816,59	41.169.908	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Nila	Ton	297,71	311,11		325,11		339,74	9.750.000	356,72	9.750.000	374,56	9.750.000	374,56	9.750.000	374,56	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Gurame	Ton	22,13	22,5		23,75		25,07	9.750.000	26,46	9.750.000	27,93	9.750.000	27,93	9.750.000	27,93	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Emas	Ton	95,73	96,5		97,47		98,44	9.750.000	99,42	9.750.000	100,42	9.750.000	100,42	9.750.000	100,42	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Patin	Ton	626,57	650,54		675,46		701,34	9.750.000	728,65	9.750.000	757,39	9.750.000	757,39	9.750.000	757,39	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Baung	Ton	15,35	15,4		15,78		16,17	9.750.000	16,56	9.750.000	16,97	9.750.000	16,97	9.750.000	16,97	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	11,98	12		12,02		12,04	9.750.000	12,06	9.750.000	12,08	9.750.000	12,08	9.750.000	12,08	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	23.182.000	24.341.100		25.558.155		27.602.807	9.750.000	30.363.088	9.750.000	33.399.397	9.750.000	33.399.397	9.750.000	33.399.397	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	802.958	827.047		851.858		894.451	9.750.000	939.174	9.750.000	1.033.091	9.750.000	1.033.091	9.750.000	1.033.091	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	271.423	274.137		276.879		281.032	9.750.000	285.247	9.750.000	289.526	9.750.000	289.526	9.750.000	289.526	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	268.661	274.034		279.515		290.696	9.750.000	305.230	9.750.000	320.492	9.750.000	320.492	9.750.000	320.492	39.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	50.000	50.500		51.055	1.210.000.000	51.515	9.750.000	52.030	9.750.000	52.551	9.750.000	52.551	9.750.000	52.551	1.249.000.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Tangkap	Ton	198,71	199,6		200,6		201,65	9.750.000	202,7	9.750.000	203,75	9.750.000	203,75	9.750.000	203,75	39.000.000	Dinas Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	%		0.15	51.250.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	39.000.000	0.15	246.250.000	Dinas Perikanan
				Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pemasaran Ikan	%		0.15	309.794.471	0.15	315.284.590	0.15	321.166.943	0.15	315.284.590	0.15	325.646.557	0.15	325.646.557	0.15	1.912.823.707	Dinas Perikanan
				Produksi Olahan Ikan	Ton	12,42	13,02	51.250.000	13,67	39.000.000	14,36	39.000.000	15,1	39.000.000	15,88	39.000.000	15,88	39.000.000	16,71	246.250.000	Dinas Perikanan
				Produksi Ikan Yang Dipasarkan	Ton	13550,54	14228,06	51.250.000	14939,46	39.000.000	15686,44	39.000.000	16470,76	39.000.000	17294,3	39.000.000	17.294,3	39.000.000	17.294,3	246.250.000	Dinas Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan	%	n/a	14,29	70.000.000	14,29	0	14,29	150.000.000	28,57	150.000.000	28,57	250.000.000	28,57	250.000.000	28,57	870.000.000	Dinas Porapar
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	n/a	20	170.000.000	20	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	239.374.945	20	239.374.945	20	848.749.890	Dinas Porapar

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	n/a	20	-	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	DInas Porapar
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	%	n/a	20	0	20	154.372.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	654.372.000	Dinas Porapar
				Persentase Pengembangan Sumberdaya Kreatif	%		30	-	100	129.372.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	529.372.000	DInas Porapar
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan	%		0.15	6.700.000	0.15	16.168.500	0.15	16.130.000	0.15	16.130.000	0.15	18.750.000	0.15	18.750.000	0.15	92.628.500	Dinas TPHP
				Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura	%		0.15	6.700.000	0.15	16.130.000	0.15	16.130.000	0.15	16.168.500	0.15	18.750.000	0.15	18.750.000	0.15	92.628.500	Dinas TPHP
				Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan	%		0.15	19.900.000		21.442.000	0.15	31.442.000	0.15	17.000.000	0.15	40.000.000	0.15	40.000.000	0.15	169.784.000	Dinas TPHP
				Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan	%		0.15	25.200.000	0.15	29.200.000	0.15	29.200.000	0.15	21.600.000	0.15	30.750.000	0.15	30.750.000	0.15	166.700.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Padi	Ton	171.840	175.040	6.700.000	177.840	16.130.000	180.540	16.130.000	183.390	16.130.000	185.940	18.750.000	188.690	18.750.000	188.690	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	112.173	6.700.000	112.453	16.130.000	228.979	16.130.000	132.760	16.130.000	142.965	18.750.000	153.172	18.750.000	153.172	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Padi Organik	Ton	65	85	6.700.000	105	16.130.000	125	16.130.000	145	16.130.000	165	18.750.000	185	18.750.000	185	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Jagung	Ton	114.675	138.175	6.700.000	161.175	16.130.000	184.375	16.130.000	207.875	16.130.000	230.875	18.750.000	253.875	18.750.000	253.875	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	415.692	6.700.000	460.702	16.130.000	506.912	16.130.000	553.122	16.130.000	599.532	18.750.000	646.042	18.750.000	646.042	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	767,2474	6.700.000	815,2474	16.130.000	868,2474	16.130.000	920,2474	16.130.000	974,2474	18.750.000	1.024,2474	18.750.000	1024,2474	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5096,45	6.700.000	5131,45	16.130.000	5167,45	16.130.000	5204,45	16.130.000	5247,45	18.750.000	5.286,45	18.750.000	5286,45	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	na	12	6.700.000	16	16.130.000	18	16.130.000	20	16.130.000	24	18.750.000	30	18.750.000	30	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.489	6.700.000	1.501	16.130.000	1.510	16.130.000	1.520	16.130.000	1.531	18.750.000	1.542	18.750.000	1.542	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	213	6.700.000	219	16.130.000	222	16.130.000	226	16.130.000	231	18.750.000	189.754	18.750.000	189.754	92.590.000	
				Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	100.277,00	100.767,00	6.700.000	101267	16.130.000	101757	16.130.000	102247	16.130.000	102732	18.750.000	102.732	18.750.000	102.732	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi sayuran Tahunan	Ton	184.252	185.167	6.700.000	186.088	16.130.000	187.003	16.130.000	187.921	16.130.000	188.833	18.750.000	188.833	18.750.000	188.833	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Tahunan	Ton	0	6	6.700.000	7	16.130.000	8	16.130.000	9	16.130.000	10	18.750.000	10	18.750.000	10	92.590.000	Dinas TPHP
				Produksi Tanaman Kopi	Ton	8.705	9.052	19.900.000	9420	21.442.000	9788	31.442.000	10177	17.000.000	10.567	40.000.000	10.567	40.000.000	10.567	169.784.000	Dinas TPHP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Produksi Lada	Ton	1625	1694	19.900.000	1759	21.442.000	1833	31.442.000	1907	17.000.000	1981	40.000.000	1981	40.000.000	1981	169.784.000	Dinas TPHP
				Produksi Kakao	Ton	548	570	19.900.000	591	21.442.000	615	31.442.000	640	17.000.000	665	40.000.000	690	40.000.000	690	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	28755	19.900.000	29899	21.442.000	31097	31.442.000	32336	17.000.000	33631	40.000.000	34967	40.000.000	34967	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Karet	Ton	52605	54670	19.900.000	56856	21.442.000	59110	31.442.000	61440	17.000.000	63865	40.000.000	66.385	40.000.000	66385	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Kelapa	Ton	3.027	3140	19.900.000	3268	21.442.000	3399	31.442.000	3534	17.000.000	3674	40.000.000	3822	40.000.000	3822	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	93	19.900.000	97	21.442.000	101	31.442.000	105	17.000.000	110	40.000.000	114	40.000.000	114	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tebu	Ton	97850	101763	19.900.000	105825	21.442.000	110060	31.442.000	114454	17.000.000	119022	40.000.000	123778	40.000.000	123778	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tembakau	Ton	23	24	19.900.000	25	21.442.000	26	31.442.000	27	17.000.000	28	40.000.000	29	40.000.000	29	169.784.000	Dinas Perkebunan
				Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	40.522	6.700.000	40.932	16.130.000	41.352	16.130.000	41.762	16.130.000	42.174	18.750.000	42.174	18.750.000	42.174	92.590.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.053	6.700.000	3.069	16.130.000	3.088	16.130.000	3.103	16.130.000	3.118	18.750.000	3.118	18.750.000	3.118	92.590.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.431	6.700.000	52.537	16.130.000	52.643	16.130.000	52.749	16.130.000	52.855	18.750.000	52.855	18.750.000	52.855	92.590.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.333	6.700.000	9.440	16.130.000	9.549	16.130.000	9.658	16.130.000	9.770	18.750.000	9.770	18.750.000	9.770	92.590.000	Dinas TPHP
				Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	202.497	6.693.200	218.500	16.130.000	234.503	16.130.000	250.506	16.130.000	266.509	18.750.000	266.509	18.750.000	266.509	92.583.200	Dinas TPHP
				Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	627.363	6.650.000	643.047	16.130.000	659.123	16.130.000	675.601	16.130.000	692.491	18.750.000	692.491	18.750.000	692.491	92.540.000	Dinas TPHP
				Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.273.795	6.650.000	2.327.295	16.130.000	2.380.795	16.130.000	2.434.295	16.130.000	2.487.795	18.750.000	2.487.795	18.750.000	2.487.795	92.540.000	Dinas TPHP
				Populasi Itik	Ekor	31.161	31.572	6.650.000	31.989	16.130.000	32.411	16.130.000	32.839	16.130.000	33.273	18.750.000	33.273	18.750.000	33.273	92.540.000	Dinas TPHP
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	175.040	223.000.000	177.840	218.820.000	180.540	225.340.000	183.390	220.600.000	185.940	230.010.000	188.690	230.010.000	188.690	1.347.780.000	Dinas TPHP
				Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	112.173	223.000.000	112.453	218.753.300	228.979	225.300.000	132.760	220.501.576	142.965	230.021.576	153.172	230.021.576	153.172	1.347.598.028	Dinas TPHP
				Produksi Padi Organik	Ton	65	85	223.000.000	105	218.720.000	125	225.261.576	145	220.480.000	165	230.010.000	185	230.010.000	185	1.347.481.576	Dinas TPHP
				Produksi Jagung	Ton	114.675	138.175	222.940.000	161.175	218.720.000	184.375	225.240.000	207.875	220.480.000	230.875	230.010.000	253.875	230.010.000	253.875	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	415.692	222.940.000	460.702	218.720.000	506.912	225.240.000	553.122	220.480.000	599.532	230.010.000	646.042	230.010.000	646.042	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	767,2474	222.956.800	815,2474	218.720.000	868,2474	225.240.000	920,2474	220.480.000	974,2474	230.010.000	1.024	230.010.000	1024,2474	1.347.416.800	Dinas TPHP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5096,45	222.940.000	5131,45	218.720.000	5167,45	225.240.000	5204,45	220.480.000	5247,45	230.010.000	5.286,45	230.010.000	5286,45	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	na	12	222.940.000	16	218.720.000	18	225.240.000	20	220.480.000	24	230.010.000	30	230.010.000	30	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Semusim	Ton	1472	1489	222.940.000	1501	218.720.000	1510	225.240.000	1520	220.480.000	1531	230.010.000	1.542	230.010.000	1542	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	213	222.940.000	219	218.720.000	222	225.240.000	226	220.480.000	231	230.010.000	189.754	230.010.000	189754	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	100.277,00	100.767,00	222.940.000	101267	218.720.000	101757	225.240.000	102247	220.480.000	102732	230.010.000	102.732	230.010.000	102.732	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi sayuran Tahunan	Ton	184.252	185.167	222.940.000	186.088	218.720.000	187.003	225.240.000	187.921	220.480.000	188.833	230.010.000	188.833	230.010.000	188.833	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi buahan Tahunan	Ton	0	6	222.940.000	7	218.720.000	8	225.240.000	9	220.480.000	10	230.010.000	10	230.010.000	10	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Produksi Tanaman Kopi	Ton	8.705	9.052	9.500.000	9420	10.080.000	9788	17.543.569	10177	8.475.020	10567	27.800.000	10567	27.800.000	10567	101.198.589	Dinas TPHP
				Produksi Lada	Ton	1625	1694	9.463.300	1759	10.070.000	1833	17.525.000	1907	8.450.000	1981	27.775.000	1981	27.775.000	1981	101.058.300	Dinas TPHP
				Produksi Kakao	Ton	548	570	9.500.000	591	10.080.000	615	17.543.569	640	8.475.020	665	27.800.000	690	27.800.000	690	101.198.589	Dinas Perkebunan
				Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	28755	9.463.300	29899	10.070.000	31097	17.525.000	32336	8.450.000	33631	27.775.000	34967	27.775.000	34967	101.058.300	Dinas Perkebunan
				Produksi Karet	Ton	52605	54670	9.440.000	56856	10.070.000	59110	17.525.000	61440	8.450.000	63865	27.775.000	66.385	27.775.000	66385	101.035.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Kelapa	Ton	3.027	3140	9.440.000	3268	10.070.000	3399	17.525.000	3534	8.450.000	3674	27.775.000	3822	27.775.000	3822	101.035.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	93	9.440.000	97	10.070.000	101	17.525.000	105	8.450.000	110	27.775.000	114	27.775.000	114	101.035.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tebu	Ton	97850	101763	9.440.000	105825	10.070.000	110060	17.525.000	114454	8.450.000	119022	27.775.000	123778	27.775.000	123778	101.035.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tembakau	Ton	23	24	9.440.000	25	10.070.000	26	17.525.000	27	8.450.000	28	27.775.000	29	27.775.000	29	101.035.000	Dinas Perkebunan
				Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	40.522	222.940.000	40.932	218.720.000	41.352	225.240.000	41.762	220.480.000	42.174	230.010.000	42.174	230.010.000	42.174	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.053	222.940.000	3.069	218.720.000	3.088	225.240.000	3.103	220.480.000	3.118	230.010.000	3.118	230.010.000	3.118	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.431	222.940.000	52.537	218.720.000	52.643	225.240.000	52.749	220.480.000	52.855	230.010.000	52.855	230.010.000	52.855	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.333	222.940.000	9.440	218.720.000	9.549	225.240.000	9.658	220.480.000	9.770	230.010.000	9.770	230.010.000	9.770	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	202.497	222.940.000	218.500	218.720.000	234.503	225.240.000	250.506	220.480.000	266.509	230.010.000	266.509	230.010.000	266.509	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	627.363	222.940.000	643.047	218.720.000	659.123	225.240.000	675.601	220.480.000	692.491	230.010.000	692.491	230.010.000	692.491	1.347.400.000	Dinas TPHP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.273.795	222.940.000	2.327.295	218.720.000	2.380.795	225.240.000	2.434.295	220.480.000	2.487.795	230.010.000	2.487.795	230.010.000	2.487.795	1.347.400.000	Dinas TPHP
				Populasi Itik	Ekor	31.161	31.572	222.940.000	31.989	218.720.000	32.411	225.240.000	32.839	220.480.000	33.273	230.010.000	33.273	230.010.000	33.273	1.347.400.000	Dinas TPHP
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	40.522	23.600.000	40.932	31.896.800	41.352	31.896.800	41.762	31.896.800	42.174	50.000.000	42.174	50.000.000	42.174	219.290.400	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.053	23.600.000	3.069	31.820.000	3.088	31.820.000	3.103	31.820.000	3.118	50.000.000	3.118	50.000.000	3.118	219.060.000	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.431	23.594.600	52.537	31.820.000	52.643	31.820.000	52.749	31.820.000	52.855	50.000.000	52.855	50.000.000	52.855	219.054.600	Dinas TPHP
				Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.333	23.590.000	9.440	31.820.000	9.549	31.820.000	9.658	31.820.000	9.770	50.000.000	9.770	50.000.000	9.770	219.050.000	Dinas TPHP
				Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	202.497	23.590.000	218.500	31.820.000	234.503	31.820.000	250.506	31.820.000	266.509	50.000.000	266.509	50.000.000	266.509	219.050.000	Dinas TPHP
				Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	627.363	23.590.000	643.047	31.820.000	659.123	31.820.000	675.601	31.820.000	692.491	50.000.000	692.491	50.000.000	692.491	219.050.000	Dinas TPHP
				Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.273.795	23.590.000	2.327.295	31.820.000	2.380.795	31.820.000	2.434.295	31.820.000	2.487.795	50.000.000	2.487.795	50.000.000	2.487.795	219.050.000	Dinas TPHP
				Populasi Itik	Ekor	31.161	31.572	23.590.000	31.989	31.820.000	32.411	31.820.000	32.839	31.820.000	33.273	50.000.000	33.273	50.000.000	33.273	219.050.000	Dinas TPHP
				Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP	Poin	33,5	35	23.590.000	36	31.820.000	37	31.820.000	38	31.820.000	39	50.000.000	40	50.000.000	40	219.050.000	Dinas TPHP
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	175.040	9.735.200	177.840	22.600.000	180.540	22.600.000	183.390	22.600.000	185.940	34.800.000	188.690	34.800.000	188.690	147.135.200	Dinas TPHP
				Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	112.173	9.710.000	112.453	22.599.300	228.979	22.599.300	132.760	22.599.300	142.965	34.600.000	153.172	34.600.000	153.172	146.707.900	Dinas TPHP
				Produksi Padi Organik	Ton	65	85	9.710.000	105	22.580.000	125	22.580.000	145	22.580.000	165	34.600.000	185	34.600.000	185	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Jagung	Ton	114.675	138.175	9.710.000	161.175	22.580.000	184.375	22.580.000	207.875	22.580.000	230.875	34.600.000	253.875	34.600.000	253.875	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	415.692	9.710.000	460.702	22.580.000	506.912	22.580.000	553.122	22.580.000	599.532	34.600.000	646.042	34.600.000	646.042	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	767,2474	9.710.000	815,2474	22.580.000	868,2474	22.580.000	920,2474	22.580.000	974,2474	34.600.000	1.024	34.600.000	1024,2474	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5096,45	9.710.000	5131,45	22.580.000	5167,45	22.580.000	5204,45	22.580.000	5247,45	34.600.000	5.286	34.600.000	5286,45	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	na	12	9.710.000	16	22.580.000	18	22.580.000	20	22.580.000	24	34.600.000	30	34.600.000	30	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Semusim	Ton	1472	1489	9.710.000	1501	22.580.000	1510	22.580.000	1520	22.580.000	1531	34.600.000	1.542	34.600.000	1542	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	213	9.710.000	219	22.580.000	222	22.580.000	226	22.580.000	231	34.600.000	189.754	34.600.000	189754	146.650.000	Dinas TPHP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	100.277,00	100.767,00	9.710.000	101267	22.580.000	101757	22.580.000	102247	22.580.000	102732	34.600.000	102.732	34.600.000	102732	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi sayuran Tahunan	Ton	184.252	185.167	9.710.000	186.088	22.580.000	187.003	22.580.000	187.921	22.580.000	188.833	34.600.000	188.833	34.600.000	188.833	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi buahan Tahunan	Ton	0	6	9.710.000	7	22.580.000	8	22.580.000	9	22.580.000	10	34.600.000	10	34.600.000	10	146.650.000	Dinas TPHP
				Produksi Tanaman Kopi	Ton	8.705	9.052	6.800.000	9420	8.035.000	9788	16.700.000	10177	5.600.000	10567	16.700.000	10567	16.700.000	10567	70.535.000	Dinas TPHP
				Produksi Lada	Ton	1625	1694	6.800.000	1759	8.030.000	1833	16.680.000	1907	5.550.000	1981	16.680.000	1981	16.680.000	1981	70.420.000	Dinas TPHP
				Produksi Kakao	Ton	548	570	6.800.000	591	8.035.000	615	16.700.000	640	5.600.000	665	16.700.000	690	16.700.000	690	70.535.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	28755	6.800.000	29899	8.030.000	31097	16.680.000	32336	5.550.000	33631	16.680.000	34967	16.680.000	34967	70.420.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Karet	Ton	52605	54670	6.780.000	56856	8.030.000	59110	16.660.000	61440	5.550.000	63865	16.660.000	66.385	16.660.000	66385	70.340.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Kelapa	Ton	3.027	3140	6.770.000	3268	8.030.000	3399	16.660.000	3534	5.550.000	3674	16.660.000	3822	16.660.000	3822	70.330.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	93	6.770.000	97	8.030.000	101	16.660.000	105	5.550.000	110	16.660.000	114	16.660.000	114	70.330.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tebu	Ton	97850	101763	6.770.000	105825	8.030.000	110060	16.660.000	114454	5.550.000	119022	16.660.000	123778	16.660.000	123778	70.330.000	Dinas Perkebunan
				Produksi Tembakau	Ton	23	24	6.770.000	25	8.030.000	26	16.660.000	27	5.550.000	28	16.660.000	29	16.660.000	29	70.330.000	Dinas Perkebunan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0		-		-		-		-		-			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	67,05	66,09	304.236.756	64,55	352.071.000	63,01	402.071.000	61,46	377.071.000	59,92	452.071.000	59,92	452.071.000	59,92	2.339.591.756	Dinas TPHP
				Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	32,22	32,76	304.233.000	33,53	352.071.000	34,30	402.071.000	35,07	377.071.000	35,84	452.071.000	35,84	452.071.000	35,84	2.339.588.000	Dinas TPHP
				Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	0,73	1,16	304.233.000	1,93	352.071.000	2,70	402.071.000	3,47	377.071.000	4,08	452.071.000	4	452.071.000	4,08	2.339.588.000	Dinas TPHP
				Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina	%	0	0	304.233.000	0	352.071.000	0	402.071.000	0	377.071.000	0,15	452.071.000	0	452.071.000	0,15	2.339.588.000	Dinas TPHP
				Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina	%	10	10		10	116.600.000	10	216.600.000	10	75.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	1.008.200.000	Dinas Perkebunan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		50	0	33,3	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Indag
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	%	4	6,9	233.200.000	8,6	257.200.000	10,3	257.200.000	12,1	50.000.000	13,8	257.200.000	16	257.200.000	15,5	1.312.000.000	Dinas Indag

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	%		100	17.500.000	100	5.000.000	100	50.000.000	100	12.500.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	185.000.000	Dinas Indag
				Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	n/a	44,44	17.500.000	44,44	5.000.000	55,56	50.000.000	55,56	12.500.000	66,67	50.000.000	66,67	50.000.000	66,67	185.000.000	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Produk Ekspor	Rp	19,440,000		0	42	180.000.000	50	180.000.000	58	25.000.000	67	180.000.000	67	180.000.000	67	745.000.000	Dinas Indag
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang	%	100	21,4	20.000.000	28,6	40.000.000	32,1	75.000.000	32,1	25.000.000	35,7	75.000.000	39	75.000.000	39,3	310.000.000	Dinas Indag
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%	0	40	23.000.000		0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	323.000.000	Dinas Indag
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	%	na	0,15		0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	20.000.000	0,15	100.000.000	Dinas Indag
				Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	0		309.794.471		315.284.590	20	321.166.943	25,3	315.284.590	30,7	325646556,529	36,000	325.646.557	36	1.912.823.707	Dinas Indag
				Produksi Industri Pangan	Ton	176,2	197,17	309.794.471	221	315.284.590	248	321.166.943	280	315.284.590	317,5	325646556,529	361,000	325.646.557	361	1.912.823.707	Dinas Indag
				Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	Ton	48	54,24	309.794.471	62	315.284.590	74	321.166.943	90	315.284.590	110	325646556,529	135,000	325.646.557	135	1.912.823.707	Dinas Indag
				Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Ton	150	200	309.794.471	270	315.284.590	370	321.166.943	510	315.284.590	705	325.646.557	985	325.646.557	985	1.912.823.707	Dinas Indag
				Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	Buah	10.306.000	14.826.000	309.794.471	21.500.000	315.284.590	31.900.000	321.166.943	47.700.000	315.284.590	72.000.000	325.646.557	110.000.000	325.646.557	110.000.000	1.912.823.707	Dinas Indag
				Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	Pcs	300	336	309.794.471	384	315.284.590	444	321.166.943	516	315.284.590	610	325.646.557	730	325.646.557	730	1.912.823.707	Dinas Indag
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	50		100		100		100	15000000	100	20000000	100	25000000	100	25000000	100	85.000.000	Dinas Indag
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	%		10		20		30	15.000.000	40	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	60.000.000	Dinas Indag
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					50.000.000,00	11,00	-											
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI																		Dinas Nakertrans
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	%	0.15	0.15	25.000.000	0.15	-	0.15	55.000.000	0.15	55.000.000	0.15	55.000.000	0.15	55.000.000	0.15	245.000.000	DInas Nakertrans
				Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Kelompok	55	11	25.000.000	11	-	11	55.000.000	11	55.000.000	11	55.000.000	11		11	190.000.000	Dinas Nakertrans

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																		
4	01	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM																		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	%	0	50	151.199.980,00	60	453.586.638,00	70	503.586.638,00	80	503.586.638,00	100	603.586.638,00	100	301.793.319,00	100	2.517.339.851	Sekretariat Daerah
				Persentase peningkatan produk hukum daerah	%	1.286	1.22	151.199.980,00	1.22	453.586.638,00	1.22	503.586.638,00	1.22	503.586.638,00	1.22	603.586.638,00	5,00	301.793.319,00	5	2.517.339.851	Sekretariat Daerah
				Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	%		0	251.199.980	20	553.586.638	40	603.586.638	60	603.586.638	80	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Tapem)
				Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	%		17	251.199.980	33	553.586.638	50	603.586.638	67	603.586.638	83	703.586.638	100	703.586.638	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Tapem)
				Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	2,98	3,2	251.199.980	3,3	553.586.638	3,4	603.586.638	3,5	603.586.638	3,6	703.586.638	4	703.586.638	3,7	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Tapem)
				Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	10	75	251.199.980,00	80	553.586.638,00	85	603.586.638,00	90	603.586.638,00	100	703.586.638,00	100	703.586.638,00	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah
				Cakupan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	100	100	251.199.980,00	100	553.586.638,00	100	603.586.638,00	100	603.586.638,00	100	703.586.638,00	100,00	703.586.638,00	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Kesra)
				Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	251.199.980,00	100	553.586.638,00	100	603.586.638,00	100	603.586.638,00	100	703.586.638,00	100,00	703.586.638,00	100	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Kesra)
				Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	%		0.15	251.199.980,00	0.15	553.586.638,00	0.15	603.586.638,00	0.15	603.586.638,00	0.15	703.586.638,00	0.15	703.586.638,00	0.15	3.419.133.170	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
				Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%	0	0	251.199.980	20	553.586.638,00	40	603.586.638,00	60	603.586.638,00	80	703.586.638	80	703.586.638	80	3.419.133.170	Sekretariat Daerah
				Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000	100	100.000.000	100	600.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	100	221.983.000	100	259.538.441,43	100	330.967.012,86	100	330.967.012,86	100	416.681.298,57	100	416.681.298,57	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
				Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan	%		100	221.983.000	100	259.538.441,43	100	330.967.012,86	100	330.967.012,86	100	416.681.298,57	100	416.681.298,57	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Poin	0	10	221.983.000	15	259.538.441,43	30	330.967.012,86	35	330.967.012,86	40	416.681.298,57	40	416.681.298,57	40	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
				Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan	%	59	60	221.983.000	61	259.538.441,43	62	330.967.012,86	63	330.967.012,86	65	416.681.298,57	65,00	416.681.298,57	65	1.976.818.064	Sekretariat Daerah (SDA)
				Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	100	221.983.000,00	100	259.538.441,43	100	330.967.012,86	100	330.967.012,86	100	416.681.298,57	100,0	416.681.298,57	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah
				Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	%	100	100	221.983.000,00	100	259.538.441,43	100	330.967.012,86	100	330.967.012,86	100	416.681.298,57	100,00	416.681.298,57	100	1.976.818.064	Sekretariat Daerah (Perekonomian)
				Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	100	221.983.000,00	100	259.538.441,43	100	330.967.012,86	100	330.967.012,86	100	416.681.298,57	100,00		100	1.560.136.766	Sekretariat Daerah
4	01	04	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemberian Izin Lokasi	%	n/a	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100	600.000.000	Sekretariat Daerah (Tapem)
4	02		SEKRETARIAT DPRD																		
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA																		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	%		100	13.618.136.900	100	14.707.928.800	100	14.707.928.800	100	14.707.928.800	100	17.707.928.800	100	17.707.928.800	100	93.157.780.900	Sekwan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin		70.25	2.000.000.000	71.50	2.000.000.000	72.30	2.000.000.000	73.50	2.000.000.000	74.25	2.000.000.000	74.50	2.000.000.000	74.50	12.000.000.000	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	01		PERENCANAAN																		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	%	100	100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
				Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu	%		100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
				Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu	%		100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
				Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%		100	293.631.960	100	324.888.800	100	340.488.880	100	340.488.880	100	520.488.880	100	520.488.880	100	2.340.476.280	Bappeda
				Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	10	293.631.960	15	324.888.800	15	340.488.880	15	340.488.880	15	520.488.880	15	520.488.880	15	2.340.476.280	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	200.000.000	100	500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	6.800.000.000	Bappeda
				Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100	291.390.800	100	389.585.400	100	359.206.330	100	859.206.330	100	359.206.330	100	359.206.330	100	2.617.801.520	Bappeda
5	02		KEUANGAN																		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	%		100	52.472.664.816,83	100	53.556.367.650,17	100	54.893.422.586,50	100	64.537.039.615,27	100	53.905.922.586,50	100,00	53.905.922.586,50	100	333.271.339.842	BPKAD
				Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD	%		100	52.472.664.816,83	100	53.556.367.650,17	100	54.893.422.586,50	100	64.537.039.615,27	100	53.905.922.586,50	100,00	53.905.922.586,50	100	333.271.339.842	BPKAD
				Cakupan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	%		60	52.472.664.816,83	61	53.556.367.650,17	62	54.893.422.586,50	63	64.537.039.615,27	64	53.905.922.586,50	65,00	53.905.922.586,50	65	333.271.339.842	BPKAD
				Persentase Penyerapan Anggaran	%		100	52.472.664.816,83	100	53.556.367.650,17	100	54.893.422.586,50	100	64.537.039.615,27	100	53.905.922.586,50	100,00	53.905.922.586,50	100	333.271.339.842	BPKAD
				Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin		1.00	52.472.664.816,83	01.05	53.556.367.650,17	1.10	54.893.422.586,50	1.16	64.537.039.615,27	1.22	53.905.922.586,50	1.28	53.905.922.586,50	1.28	333.271.339.842	BPKAD
				Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Opini	WTP	WTP	52.472.664.816,83	WTP	53.556.367.650,17	WTP	54.893.422.586,50	WTP	64.537.039.615,27	WTP	53.905.922.586,50	WTP	53.905.922.586,50	WTP	333.271.339.842	BPKAD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	60	60	663.349.855	65	663.349.855	70	663.349.855	75,00	663.349.855	80,00	663.349.855	85	663.349.855	85,00	3.980.099.130	BPKAD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	11	4	708.282.528	5	708.282.528	6	1.530.502.738	7	1.802.888.902	8	2.402.220.745	9	2.402.220.745	9	9.554.398.186	Bapenda
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%		4	708.282.528	4,8	708.282.528	5,5	1.530.502.738	6,08	1.802.888.902	6,6	2.402.220.745	6,6	2.402.220.745	6,6	9.554.398.186	Bapenda
5	03		KEPEGAWAIAN																		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	%		90	1.146.597.600	90	989.095.000	90	1.026.581.380	90	1.026.581.380	90	1.026.581.380	90	1.026.581.380	90	6.242.018.120	BKPSDM
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Pelayanan Publik Yang talah mengikuti diklat terkait pelayanan	%	60	60		61	449.608.000	62	253.053.812	63	200.000.000	64	150.000.000	64	150.000.000	64	1.202.661.812	BKPSDM
				Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%		88		88	1.000.000.000	88	500.000.000	88	400.000.000	88	200.000.000	88	200.000.000	88	2.300.000.000	BKPSDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	5	10	158.750.000	10	118.594.568	10	176.189.335	10	176.189.335	10	251.189.335	10	251.189.335	10	1.132.101.908	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	%	1	1	158.750.000	1	118.594.568	1	176.189.335	1	176.189.335	1	251.189.335	1	251.189.335	1	1.132.101.908	Bappeda
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH																		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																		
				Indeks Nilai SAKIP OPD	Poin	47,92	50,34	397.525.000	52,75	441.125.000	55,17	545.970.046	57,58	506.265.344	60	756.265.344	60	756.265.344	60	3.403.416.076	Inspektorat
				Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi	%	48,38	51,61	397.525.000	54,83	441.125.000	58,06	545.970.046	61,29	506.265.344	64,51	756.265.344	64,51	756.265.344	64,51	3.403.416.076	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	%		100	72.712.500	100	62.087.500	100	87.087.500	100	87.087.500	100	121.389.730	100	121.389.730	100	551.754.460	Inspektorat
				Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	43,38	51,61	72.712.500	54,83	62.087.500	58,06	87.087.500	61,29	87.087.500	64,51	121.389.730	64,51	121.389.730,00	64,51	551.754.460	Inspektorat
				Cakupan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	%	48,38	51,61	72.712.500	54,83	62.087.500	58,06	87.087.500	61,29	87.087.500	64,51	121.389.730	64,51	121.389.730	64,51	551.754.460	Inspektorat
				Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	56,25	62,5	72.712.500	68,75	62.087.500	75	87.087.500	81,25	87.087.500	87,5	121.389.730	88	121.389.730	87,5	551.754.460	Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01		KECAMATAN																		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Blambangan Umpu	%	60	61	23.693.142	62	26.546.332	63	26.546.332	64	26.546.332	65	50.000.000	65	50.000.000	65	203.332.138	Kec. B. Umpu
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Banjit	%	60	61	78.360.050	62	86.375.050	63	86.375.050	64	50.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	501.110.150	Kec. Banjit
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Baradatu	%	60	61	78.360.050	62	86.375.050	63	86.375.050	64	50.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	501.110.150	Kecamatan Baradatu
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Kasui	%	60	61	23.000.000	62	65.292.915	63	65.292.915	64	65.292.915	65	65.292.915	65	65.292.915	65	349.464.575	Kecamatan Kasui

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Pakuan Ratu	%	60	61	55.349.978	62	55.349.978	63	55.349.978	64	55.349.978	65	55.349.978	65	55.349.978	65	332.099.868	Kecamatan Pakuan Ratu
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bahuga	%	60	61	42.748.900	62	41.848.900	63	41.848.900	64	41.848.900	65	50.000.000	65	50.000.000	65	268.295.600	Kecamatan Bahuga
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Way Tuba	%	60	61	36.000.000	62	36.000.000	63	36.000.000	64	36.000.000	65	75.000.000	65	75.000.000	65	294.000.000	Kecamatan Way Tuba
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negeri Agung	%	60	61	56.797.952	62	51.797.952	63	51.797.952	64	51.797.952	65	51.797.952	65	51.797.952	65	315.787.712	Kecamatan Negeri Agung
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Labuhan	%	60	61	58.400.000	62	58.400.000	63	58.400.000	64	58.400.000	65	58.400.000	65	58.400.000	65	350.400.000	Kecamatan Gunung Labuhan
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Rebang Tangkas	%	60	61	37.303.900	62	33.913.700	63	33.913.700	64	33.913.700	65	33.913.700	65	33.913.700	65	206.872.400	Kecamatan Rebang Tangkas
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negara Batin	%	60	61	46.678.800	62	46.678.800	63	46.678.800	64	46.678.800	65	46.678.800	65	46.678.800	65	280.072.800	Kecamatan Negara Batin
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negeri Besar	%	60	61	43.709.366	62	43.709.366	63	43.709.366	64	43.709.366	65	43.709.366	65	43.709.366	65	262.256.196	Kecamatan Negeri Besar
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Buay Bahuga	%	60	61	43.371.000	62	43.371.000	63	43.371.000	64	43.371.000	65	43.371.000	65	43.371.000	65	260.226.000	Kecamatan Buay Bahuga
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bumi Agung	%	60	61	36.450.000	62	36.450.000	63	36.450.000	64	36.450.000	65	36.450.000	65	36.450.000	65	218.700.000	Kecamatan Bumi Agung
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Umpu Semenguk	%	60	61	36.000.000	62	36.000.000	63	36.000.000	64	36.000.000	65	36.000.000	65	36.000.000	65	216.000.000	Kecamatan Umpu Semenguk

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Blambangan Umpu	%	60	61	666.261.300	62	444.564.615	63	444.564.615	64	444.564.615	65	444.564.615	65	444.564.615	65	2.889.084.375	Kec. B. Umpu
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Banjit	%	60	61	743.997.300	62	389.450.000	63	389.450.000	64	290.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	65	2.592.897.300	Kec. Banjit
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Baradatu	%	60	61	743.997.300	62	389.450.000	63	389.450.000	64	290.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	65	2.592.897.300	Kecamatan Baradatu
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Kasui	%	60	61	660.144.000	62	292.975.000	63	292.975.000	64	292.775.000	65	292.975.000	65	292.975.000	65	2.124.819.000	Kecamatan Kasui
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan KecamatanPakuan Ratu	%	60	61	106.674.970	62	96.674.970	63	96.674.970	64	96.674.970	65	96.674.970	65	96.674.970	65	590.049.820	Kecamatan Pakuan Ratu
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Bahuga	%	60	61	54.141.000	62	45.571.000	63	45.571.000	64	45.571.000	65	70.000.000	65	70.000.000	65	330.854.000	Kecamatan Bahuga
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Way Tuba	%	60	61	80.292.000	62	70.292.000	63	70.292.000	64	70.292.000	65	90.000.000	65	90.000.000	65	471.168.000	Kecamatan Way Tuba
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negeri Agung	%	60	61	112.965.120	62	86.715.120	63	86.715.120	64	86.715.120	65	86.715.120	65	86.715.120	65	546.540.720	Kecamatan Negeri Agung
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Gunung Labuhan	%	60	61	118.463.600	62	108.463.600	63	108.463.600	64	108.463.600	65	108.463.600	65	108.463.600	65	660.781.600	Kecamatan Gunung Labuhan
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Rebang Tangkas	%	60	61	73.523.100	62	68.523.100	63	68.523.100	64	68.523.100	65	68.523.100	65	68.523.100	65	416.138.600	Kecamatan Rebang Tangkas
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negara Batin	%	60	61	101.523.244	62	92.636.244	63	92.636.244	64	92.636.244	65	92.636.244	65	92.636.244	65	564.704.464	Kecamatan Negara Batin

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negeri Besar	%	60	61	99.639.824	62	89.639.824	63	89.639.824	64	89.639.824	65	89.639.824	65	89.639.824	65	547.838.944	Kecamatan Negeri Besar
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Buay Bahuga	%	60	61	82.033.000	62	72.033.000	63	72.033.000	64	72.033.000	65	72.033.000	65	72.033.000	65	442.198.000	Kecamatan Buay Bahuga
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Bumi Agung	%	60	61	82.650.000	62	72.650.000	63	72.650.000	64	72.650.000	65	72.650.000	65	72.650.000	65	445.900.000	Kecamatan Bumi Agung
				Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Umpu Semenguk	%	60	61	130.292.000	62	56.292.000	63	56.292.000	64	56.292.000	65	56.292.000	65	56.292.000	65	411.752.000	Kecamatan Umpu Semenguk
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Blambangan Umpu	%	60	61	54.998.816	62	54.998.816	63	54.998.816	64	54.998.816	65	65.000.000	65	65.000.000	65	349.995.264	Kec. B. Umpu
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Banjit	%	60	61	41.000.000	62	55.391.000	63	55.391.000	64	55.391.000	65	125.000.000	65	125.000.000	65	457.173.000	Kec. Banjit
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Baradatu	%	60	61	41.000.000	62	55.391.000	63	55.391.000	64	55.391.000	65	125.000.000	65	125.000.000	65	457.173.000	Kecamatan Baradatu
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Kasui	%	60	61	23.049.300	62	15.000.000	63	15.000.000	64	15.000.000	65	15.000.000	65	15.000.000	65	98.049.300	Kecamatan Kasui
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Pakuan Ratu	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kecamatan Pakuan Ratu
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Bahuga	%	60	61	49.999.000	62	44.999.000	63	44.999.000	64	44.999.000	65	45.000.000	65	45.000.000	65	274.996.000	Kecamatan Bahuga
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Way Tuba	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	75.000.000	65	75.000.000	65	350.000.000	Kecamatan Way Tuba

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negeri Agung	%	60	61	49.968.688	62	49.968.688	63	49.968.688	64	49.968.688	65	49.968.688	65	49.968.688	65	299.812.128	Kecamatan Negeri Agung
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Gunung Labuhan	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kecamatan Gunung Labuhan
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Rebang Tangkas	%	60	61	49.999.600	62	44.999.600	63	44.999.600	64	44.999.600	65	44.999.600	65	44.999.600	65	274.997.600	Kecamatan Rebang Tangkas
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negara Batin	%	60	61	49.999.950	62	49.999.950	63	49.999.950	64	49.999.950	65	49.999.950	65	49.999.950	65	299.999.700	Kecamatan Negara Batin
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negeri Besar	%	60	61	49.999.908	62	45.799.908	63	45.799.908	64	45.799.908	65	45.799.908	65	45.799.908	65	278.999.448	Kecamatan Negeri Besar
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Buay Bahuga	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kecamatan Buay Bahuga
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Bumi Agung	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kecamatan Bumi Agung
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Umpu Semenguk	%	60	61		62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	250.000.000	Kecamatan Umpu Semenguk
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Blambangan Umpu	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000		10.000.000	65	50.000.000	Kec. B. Umpu
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Banjit	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kec. Banjit
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Baradatu	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Baradatu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Kasui	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Kasui
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pakuan Ratu	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Bahuga	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Way Tuba	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negeri Agung	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Gunung Labuhan	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Rebang Tangkas	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negara Batin	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negeri Besar	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Buay Bahuga	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Bumi Agung	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Bumi Agung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Umpu Semenguk	%	60			62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Kecamatan Umpu Semenguk
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	%	60	61	28.114.950	62	28.114.950	63	28.114.950	64	28.114.950	65	50.000.000	65	50.000.000	65	212.459.800	Kec. B. Umpu
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Banjit	%	60	61	70.605.000	62	145.105.000	63	145.105.000	64	75.000.000	65	145.105.000	65	145.105.000	65	726.025.000	Kec. Banjit
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Baradatu	%	60	61	70.605.000	62	145.105.000	63	145.105.000	64	75.000.000	65	145.105.000	65	145.105.000	65	726.025.000	Kecamatan Baradatu
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Kasui	%	60	61	20.980.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	270.980.000	Kecamatan Kasui
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Pakuan Ratu	%	60	61	71.500.926	62	71.500.926	63	71.500.926	64	71.500.926	65	71.500.926	65	71.500.926	65	429.005.556	Kecamatan Pakuan Ratu
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Bahuga	%	60	61	35.535.900	62	34.795.900	63	34.795.900	64	34.795.900	65	50.000.000	65	50.000.000	65	239.923.600	Kecamatan Bahuga
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Way Tuba	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	75.000.000	65	75.000.000	65	350.000.000	Kecamatan Way Tuba
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negeri Agung	%	60	61	72.266.488	62	68.566.488	63	68.566.488	64	68.566.488	65	68.566.488	65	68.566.488	65	415.098.928	Kecamatan Negeri Agung
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	%	60	61	77.000.000	62	77.000.000	63	77.000.000	64	77.000.000	65	77.000.000	65	77.000.000	65	462.000.000	Kecamatan Gunung Labuhan
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	%	60	61	46.076.700	62	46.076.700	63	46.076.700	64	46.076.700	65	46.076.700	65	46.076.700	65	276.460.200	Kecamatan Rebang Tangkas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negara Batin	%	60	61	63.124.496	62	63.124.496	63	63.124.496	64	63.124.496	65	63.124.496	65	63.124.496	65	378.746.976	Kecamatan Negara Batin
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negeri Besar	%	60	61	52.249.996	62	52.249.996	63	52.249.996	64	52.249.996	65	52.249.996	65	52.249.996	65	313.499.976	Kecamatan Negeri Besar
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Buay Bahuga	%	60	61	30.201.000	62	30.201.000	63	30.201.000	64	30.201.000	65	30.201.000	65	30.201.000	65	181.206.000	Kecamatan Buay Bahuga
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Bumi Agung	%	60	61	45.000.000	62	45.000.000	63	45.000.000	64	45.000.000	65	45.000.000	65	45.000.000	65	270.000.000	Kecamatan Bumi Agung
				Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	%	60	61	50.000.000	62	50.000.000	63	50.000.000	64	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	300.000.000	Kecamatan Umpu Semenguk
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kecamatan	15	15	36.140.000	15	153.900.000	15	153.900.000	15	75.000.000	15	153.900.000	75	153.900.000	75	726.740.000	Kesbangpol
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kecamatan	100	100	53.140.400	100	53.097.000	100	100.000.000	100	65.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	471.237.400	Kesbangpol
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Orkemas	10	10	61.560.000	11	61.530.000	12	61.530.000	13	64.087.790	14	61.530.000	60	61.530.000	60	371.767.790	Kesbangpol
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	Kecamatan	100	100	1.115.015.000	100	1.171.850.000	100	1.171.850.000	100	1.171.850.000	100	1.271.850.000	100	1.271.850.000	100	7.174.265.000	Kesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standa Pelayanan Publik Di Lingkup Badan Kesbangpol	Poin	100	100	87.360.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	27.110.000	100	222.910.000	Kesbangpol
				Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	dokumen	12	12	200.000.000	12	96.096.000	12	96.096.000	12	96.096.000	12	96.096.000	60	96.096.000	60	680.480.000	Kesbangpol

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Way Kanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Way Kanan diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

8.1. Indikator Makro

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menetapkan indikator makro pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan di tingkat provinsi lampung dan nasional. Proyeksi indikator kinerja makro mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dimuat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,44	67,69	67,99	68,39	68,89	69,39	69,55
2	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	69,40	69,55	69,75	70	70,3	70,6	70,7
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,36	12,38	12,40	12,42	12,44	12,46	12,48
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,70	7,73	7,76	7,79	7,82	7,85	7,88
5	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rp)	Rp	9.102	9.202	9.327	9.477	9.777	10.077	10.427
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,16	2	3	4	5	5	5,2
7	PDRB ADHB (Juta Rp.)	Juta Rp	14.037.767,24-	14.218.522,50	14.718.522,50	15.218.522,50	16.218.522,50	17.218.522,50	18.218.522,50
8	PDRB Perkapita ADHB (Rp.)	Rp	30.925.573,-	30.070.651,70	30.850.444,17	31.613.933,11	33.390.749,05	35.133.352,33	36.842.211,91
9	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	12,90	12,75	12,35	11,90	11,40	10,70	9,99
10	Laju Inflasi	Persen	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
11.	Tingat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,56	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Sumber: Bappeda 2021

8.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Way Kanan. IKU Kabupaten Way Kanan yang disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1,1		Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	50,92	51,13	51,43	51,93	52,43	52,93	53,53	53,93	53,93
	1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	56,09	57,64	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	63,64
	1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	n/a	n/a	80,93	82,84	84,88	87,08	89,43	91,96	91,96
	1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,703	0,563	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750	0,750
	1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	n/a	9,18	9,20	9,22	9,24	9,26	9,28	9,30	9,30
	1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Poin	n/a	9,38	9,40	9,42	9,44	9,46	9,48	9,50	9,50
	1.1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	n/a	4,64	4,95	5,25	5,55	5,85	6,15	6,45	6,45
	1.1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	n/a	419	30	33	36	39	42	45	45
	1.1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Poin	n/a	80	81	82	83	84	85	86	86

Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	1.1.9	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,52	2,05	2,3	2,55	2,75	3,01	3,15	3,25	3,25
	1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan	%	0	0	10	12	14	16	18	20	20
	1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	Poin	n/a	32,39	34,4	36,4	38,4	40,40	42,40	43,40	43,40
2,1		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,840	63,93	67,22	67,83	68,43	69,04	69,10	69,49	69,49
	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	56,37	56,37	58,72	61,14	63,57	65,99	66,10	66,41	66,41
	2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	55,33	58,89	58,34	58,44	58,54	58,64	58,74	58,84	58,84
	2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	82.31	79,05	80,05	80,15	80,25	80,34	80,45	80,55	80,55
	2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang di Kelola	%	80.35	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Poin	25	25	50	100	100	100	100	100	100

Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	2.1.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3	%	n/a	21,43	37,5	53,57	67,86	82,14	100	100	100
	2.1.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup	%	n/a	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52
3,1		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,19	67,44	67,69	67,99	68,39	68,89	69,39	69,55	69,55
	3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,27	69,40	69,55	69,75	70	70,3	70,6	70,7	70,7
	3.1.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35	12,36	12,38	12,4	12,42	12,44	12,46	12,48	12,48
	3.1.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,39	7,70	7,73	7,76	7,79	7,82	7,85	7,88	7,88
	3.1.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan PMKS yang tertangani	%	n/a	5,72	6,72	7,72	8,72	9,72	10,72	11,72	11,72
	3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan	%	n/a	n/a	69,55	69,75	70	70,3	70,6	70,7	70,7

Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	13,07	12,90	12,75	12,35	11,90	11,4	10,7	9,99	9,99
	3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
	3.1.8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,89	1,51	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6489	0,6541	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683	0,6683
	3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,22	88,19	88,23	88,27	88,32	88,37	88,44	88,54	88,54
	3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	Cakupan Pembinaan Pemuda	%	n/a	n/a	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09
	3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	n/a	29,17	30,00	33,33	40,00	46,67	56,67	56,67	56,67
	3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	Cakupan Pembinaan Kebudayaan	%	n/a	n/a	50	60	70	75	77	79	79
	3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19	131,19
	3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	Cakupan Ketertiban	%	n/a	n/a	40	45	50	55	60	65	65
	3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,45	73,55	73,65	73,75	73,85	73,95	74,05	74,15	74,15
4.1		Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17	-1,16	2	3	4	5	5	5,2	4,03
	4.1.1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,01	0,74	2	3	4	4,5	5	5	3,92
	4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	7,58	-8,37	1	3	3,5	4,5	5	6	3,83
	4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	5,61	-2,40	2	3	5	6	6	6	4,67
	4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,15	-0,89	2	3	5	6	6	6	4,67
	4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	8,91	-4,41	2	3	5	6	6	6	4,67
	4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha	%	8,33	-3,98	2	4	6	7,5	6	7,5	5,50

Tujuan /Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Targat Capaian						Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum										
	4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Koperasi Sehat	%	N/A	N/A	9,80	19,61	39,22	63,73	73,53	78,43	78,43
	4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	N/A	7,19	7,24	7,29	7,35	7,40	7,45	7,5	7,50
	4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6,74	-28,09	6,73	6,72	6,71	6,70	6,70	6,70	6,71
	4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,17	75,22	74	75	75	75	75	75	75
	4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	0	0	0	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
	4.1.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	46,48	52,73	48	56,56	58,51	60,5	62,4	63,4	63,4
	4.1.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4.1.14	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5

8.3. Indikator Kinarja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Realisasi Investasi.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Way Kanan tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan PDRB	persen	-1,16	2	3	4	5	5	5,2	5,2	Bappeda
2	Laju Inflasi	persen	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	Bappeda
3	PDRB per kapita	Rupiah	30.925.573,-	30.070.651,70	30.850.444,17	31.613.933,11	33.390.749,05	35.133.352,33	36.842.211,91	36.842.211,91	Bappeda
4	Indeks gini		0,327	0,327	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	Bappeda
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	persen	87,1	87,1	87,47	87,97	88.2	88,4	88,6	88,6	Bappeda
8	Rasio kesenjangan kemiskinan (Tingkat Kedalaman Kemiskinan)	Poin	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	Bappeda
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (proporsi penduduk miskin)	Poin	12,9	12,6	12	11,5	10,97	10,5	10	10	Bappeda
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,44	67,69	67,99	68,39	68,89	69,39	69,39	69,39	Bappeda
11	Angka Melek Huruf	persen	96,14	96,5	97	97,4	97,9	98	98,2	98,2	Dinas P & K
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,70	7,73	7,76	7,79	7,82	7,85	7,88	7,88	Dinas P & K
13	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,40	69,55	69,75	70	70,3	70,6	70,7	70,7	Dinas Kesehatan
14	balita gizi buruk (kasus)	Kasus	6	6	5	4	3	2	2	2	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi balita gizi kurang	persen	5	5	4	4	4	3	3	3	Dinas Kesehatan
16	Cakupan desa siaga aktif	persen	227	227	227	227	227	227	227	227	Dinas PMK
17	Angka Patrisipasi Angkatan Kerja	persen	75,25	75,78	76,11	77,44	78,77	79,22	79,44	79,44	Dinas Nakertrans

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	75,22	74	75	75	75	75	75	75	Dinas Nakertrans
19	Tingkat Pengangguran terbuka	persen	3,56	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	Dinas Nakertrans
20	Rasio penduduk yang bekerja	persen	96,2	96,554	96,6	96,7	96,8	96,9	97,12	97,12	Dinas Nakertrans
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (juta rupiah)	Juta Rupiah	50,21	50,90	51,15	53,15	55,15	57,15	59,15	59,15	Dinas Nakertrans
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	Persen	95,6	96	96,6	96,7	96,8	96,9	40,85	40,85	Dinas Nakertrans
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	persen	25	26	27	28	29	30	31	31,00	Dinas Nakertrans
24	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	persen	62,5	62,5	61,9	61,8	61,7	61,6	61,5	61,5	Dinas Sosial
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	
26	Presentase PAD terhadap pendapatan	persen	3,9	3,9	2,8	3,65	2,85	3,5	4,02	4,02	BPKAD
27	Opini BPK	Kualifikasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	87,40	84,1	84,6	85,1	85,6	86,1	86,6	86,6	Dinas Kratahanan Pangan
29	Penguatan Cadangan Pangan	persen	59,365	59,367	59,370	59,372	59,374	59,376	59,378	59,378	Dinas Kratahanan Pangan
30	Penanganan Daerah Rawan Pangan		18,94	7,05	7,05	6,61	6,17	5,73	5,29	5,29	Dinas Kratahanan Pangan

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
31	Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PkuiaDRB	persen	32,6	32,9	33,12	33,9	34,02	35,1	35,5	35,5	Dinas TPHP
32	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	12,9	12,9	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	Dinas TPHP
33	Produksi sektor pertanian palawija	ton	515.515	565.515	586.967	614.324	653.881	689.258	725.255	725.255	Dinas TPHP
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	11,4	11,4	12	12	12	12	12	12	Dinas Perkebunan
35	Produksi sektor perkebunan	ton	60	60	99.688	100.049	100.169	100.581	100,88	100,88	Dinas Perkebunan
36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas TPHP
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	Dinas Porapar
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	persen	0,41	0,41	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Perikanan
41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	9,5	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10	Dinas Indagsar
42	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	Dinas Indagsar
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	persen	25	25	26	27	28	28,5	29	29	Dinas Indagsar
44	Pertumbuhan industri	persen	2	5,49	5,95	6	6,3	6,6	6,7	6,7	Dinas Indagsar

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	persen	13	13	10	11	12	13	14	14	Dinas Nakertrans
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	**Layanan urusan wajib dasar**										
a	**Pendidikan**										
a.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	55,44	55,44	55,44	55,44	56,71	58,54	60,37	60,37	Dinas P & K
a.2	Angka partisipasi kasar	persen	98,88	98,88	98,88	100	100	100	100	100	Dinas P & K
a.3	Angka Pendidikan yang di Tamatkan										
a.4	Angka Partisipasi Murni	persen	89,6	89,6	95,425	95,85	96,275	96,7	97,075	97,075	Dinas P & K
	- APM SD/MI	persen	99,5	99,5	99,7	99,8	99,9	100	100	100	Dinas P & K
	- APM SMP/MTs	persen	79,2	79,2	91,15	91,9	92,65	93,4	94,15	94,15	Dinas P & K
a.5	Angka Partisipasi Sekolah	persen	98,09	98,09	97,94	97,96	97,98	98,12	98,18	98,18	Dinas P & K
	- Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun	persen	99,72	99,72	99,9	99,92	99,93	99,94	99,95	99,95	Dinas P & K
	- Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun	persen	96,45	96,45	95,98	95,99	96,02	96,3	96,4	96,4	Dinas P & K
a.6	Angka Putus Sekolah										Dinas P & K
	- SD	persen	0,6	0,6	0,65	0,63	0,6	0,5	0,45	0,45	Dinas P & K
	- SMP	persen	0,5	0,5	0,7	0,65	0,62	0,6	0,55	0,55	Dinas P & K
a.7	Angka Kelulusan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P & K
	- SD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P & K
	- SMP	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P & K
a.8	Angka Melanjutkan (AM)										
	- SD/MI ke SMP/MTs	persen	92,5	92,5	93,28	93,3	93,5	93,6	93,74	93,74	Dinas P & K
	- SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	84,65	84,65	84,65	84,65	84,65	85,5	86,5	86,5	Dinas P & K

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
a.9	Pasilitas Pendidikan										
	- Persentase Bangunan Sekolah pendidikan sekolah dasar dalam kondisi baik	persen	92	92	92	92	95	95	95	95	Dinas P & K
	- Persentase Bangunan Sekolah pendidikan SLTP dalam kondisi baik	persen	95	95	95	95	95	100	100	100	Dinas P & K
a.10	Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	persen	68,67	68,67	68,67	68,67	70	70	75	75	Dinas P & K
a.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar										
	- Rasio Guru/Murid sekolah SD	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	00:00	Dinas P & K
	- Rasio Guru/Murid sekolah SMP	persen	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	23:47	Dinas P & K
a.13	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah										
	- Rasio Guru/Murid sekolah SMA	persen	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	22:48	Dinas P & K
	- Rasio Guru/Murid sekolah SMK	persen	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	20:24	Dinas P & K
a.17	Angka melek huruf yang berusia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	persen	96,21	96,21	96,45	96,5	96,55	96,58	96,61	96,61	Dinas P & K
a.18	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak Buta Aksara)	persen	96,21	96,21	96,45	96,5	96,55	96,58	96,61	96,61	Dinas P & K
a.19	Guru yang memenuhi Kualifikasi s1/DIV										
	- Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D4	persen	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	90	90	Dinas P & K

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	- Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4	persen	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	96	96	Dinas P & K
b.	**Kesehatan**										
b.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	per 1000	1,89	19	18	17	16	16	16	19	Dinas Kesehatan
b.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi										
b.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000	0,2	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,17	0,17	Dinas Kesehatan
b.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000	0,9	3	3	3	3	0,38	3	3	Dinas Kesehatan
b.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100000	101,05	217	205	194	183	183	183	183	Dinas Kesehatan
b.6	Rasio Posyandu per satuan balita	poin	0,010630202	0,0099986	0,0121909	0,0101301	0,0103038	0,0104829	0,0104829	0,0104829	Dinas Kesehatan
b.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk	poin	1,32	1,0285009	1,0182792	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
b.8	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	poin	0,0000044	0,0000091	0,0000091	0,0000090	0,0000089	0,0000088	0,0000087	0,0000087	Dinas Kesehatan
b.9	Rasio Dokter per satuan penduduk	poin	0,134	0,2079857	0,2081815	0,2084674	0,2088383	0,2092875	0,2075237	0,2075237	Dinas Kesehatan
b.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
b.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	91,78	90	94	96	98	100	100	100	Dinas Kesehatan
b.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	Kempung Kelurahan	227	227	227	227	227	227	227	227	Dinas Kesehatan

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
b.14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
b.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	persen	7.951	7996	8341	8032	7903	7776	7464	7464	Dinas Kesehatan
b.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100000	4	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
b.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	poin	572	152	152	150	148	146	146	146	Dinas Kesehatan
b.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA	poin	529	152	152	150	148	146	146	146	Dinas Kesehatan
b.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	per 100000	116	453	503	553	600	653	653	653	Dinas Kesehatan
b.21	Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk	per 100000	0	7,35	7,2	7,05	6,9	6,75	6,75	6,75	Dinas Kesehatan
b.22	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	100	60	61	62	63	64	64	64	Dinas Kesehatan
b.23	Proporsi kasus Ttuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	95,67	95,67	90	91	92	93	94	94	Dinas Kesehatan
b.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	poin	28,9	20/100000	20/100000	20/100000	20/100000	20/100000	20/100000	20/100000	Dinas Kesehatan
b.25	Penderita Diare yang ditangani	persen	89,6	85,6	88	90	92	95	95	95	Dinas Kesehatan
b.26	Angka kejadian malaria	kasus	0	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	Dinas Kesehatan
b.27	Tingkat Kematian akibat malaria	persen	0,001	<1	<1	<1	<1	0,1	<1	<1	Dinas Kesehatan

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
b.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	persen	90	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
b.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	persen	100	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	1	Dinas Kesehatan
b.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,031	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Dinas Kesehatan
b.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komperhensip tentang HIV/AIDS	persen	39,9	45	45	50	50	55	55	55	Dinas Kesehatan
b.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
c	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
c.1	**Pekerjaan Umum**										
c.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	23,59	23,59	41,00	46,660	52,49	58,320	64,150	64,150	Dinas PU
c.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	235,14	235,14	n/a	220	225	230	235	235	Dinas PU
c.1.3	Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4 (empat)	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PU
c.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	persen	15,13	23,59	41	46,66	52,49	58,32	64,15	64,15	Dinas PU
c.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PU

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	lima atau bangunan rumah liar										
c.1.7	Persentase rumah tingal bersanitasi	persen	62,55	62,55	80	85	90	100	100	100	Dinas PU
c.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	persen	46,67	46,67	7	14	21	28	35	35	Dinas PU
c.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	2.432	2432,25	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	Dinas PU
c.1.13	Rasio jaringan Irigasi	rasio	59.168	59167,5	78.890	78.890	78.890	78.890	78.890	78.890	Dinas PU
c.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	persen	64,09	64,09	65	70	73	75	77	77	Dinas PU
c.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	324.464	324464	300.000	305.000	310.000	315.000	325.000	325.000	Dinas PU
c.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	persen	75,50	75,5	90	90	80	70	60	60	Dinas PU
c.2	**Penataan Ruang**										
c.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PU
d	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**										
d.1	Rasio rumah layak huni	rasio	400	400	-	8.251	8.032	7.074	6.674	6.674	Dinas PU
d.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0	0	-	-	-	34,362	26,06	26,06	Dinas PU
e.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
e.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Kasus	1	6	6	6	6	6	6	6	Satpol PP
e.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	0,00152	0,00152	0,00023	0,00045	0,00068	0,00136	0,00182	0,00182	Satpol PP
e.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan	persen	64	64	75	75	100	100	100	100	Satpol PP
e,5	Persentase penegakan PERDA	persen	3	18	3	3	3	3	3	3	Satpol PP
f	**Sosial**										
f.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinas Sosial
f.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinas Sosial
f.3	Persentase PMKS skala skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinas Sosial
f.4	Persentase Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	persen	0	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Sosial
f.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan sosial	persen	-28	7,6	22	22	22	24	-16	-16	Dinas Sosial
f.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	-28	7,6	22	22	22	24	25	25	Dinas Sosial

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
f.7	Persentase korban bencana yanag menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	0	60	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
f.8	Persentase korban bencana yanag dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	0	40	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
f.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensi yang telah menerima jaminan sosial	persen	0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	Dinas Sosial
2	**Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**										
a.	**Tenaga Kerja**										
a.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Poin	6	6	5	4	3	2	1	1	Dinas Nakertrans
a.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	poin	1	2	5	5	5	5	5	5	Dinas Nakertrans
a.5	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsosteg	Orang	7.012	7012	7902	7902	7902	7902	7902	7902	Dinas Nakertrans
a.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		20	20	20	20	20	42	50	50	Dinas Nakertrans
a.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		20	20	20	40	40	40	50	50	Dinas Nakertrans
a.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		20	20	20	60	80	80	80	80	Dinas Nakertrans

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
a.12	Rasio lulusan S1/S2/S3										
b.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
b.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	43,80	43,8	48,5	48,6	48,6	48,7	48,8	48,8	Dinas PPPA,PP dan KB
b.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	10	15	15	15	20	20	20	20	Dinas PPPA,PP dan KB
b.3	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	persen	7,89%	0,0789	15	18	20	20	25	25	Dinas PPPA,PP dan KB
b.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	51,10%	0,511	50,18%	52,12%	53,13%	53,35%	53,35%	53,35%	Dinas PPPA,PP dan KB
b.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA,PP dan KB
b.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	persen	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PPPA,PP dan KB
b.9	Cakupan layanan rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitas sosial terlatih oleh perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PPPA,PP dan KB
b.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus	persen	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PPPA,PP dan KB

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	kekerasan terhadap perempuan dan anak										
b.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PPPA,PP dan KB
b.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PPPA,PP dan KB
b.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		90	90	90	95	95	98	98	98	Dinas P & K
b.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		90	90	90	95	95	98	98	98	Dinas P & K
b.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		90	90	90	95	95	98	98	98	Dinas P & K
b.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi		90	90	90	95	95	98	98	98	Dinas P & K
b.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		90	90	90	95	95	98	98	98	Dinas P & K
b.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di stor non pertanian		80	80	80	85	85	85	85	85	Dinas P & K
c.	**Pangan**										
c.1	Ketersediaan pangan utama	poin	183.916	119387,8	102.969	101.366	137.641	173.916	183.916	c.1	Dinas Ketahanan Pangan
c.2	Ketersediaan Energi dan protein perkapita	poin	173	173	60	100	100	100	100,00	c.2	Dinas Ketahanan Pangan
c.3	Pengawasan dan pembinaan keamana pangan		-	-	-	-	-	-	-	c.3	Dinas Ketahanan Pangan

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	c.3.1 Pengawasan Keamanan Pangan di Post Market	lokasi	50	50	15	100	100	100	100		Dinas Ketahanan Pangan
	c.3.2 Pengawasan Pangan Segar di Pre-Market / Sertifikat Prima 3 dan Registrasi Beras	lokasi	15	15	0	2	100	110	108,33		Dinas Ketahanan Pangan
d.	Pertanahan										Dinas Ketahanan Pangan
d.2	Penyelesaian kasus tanah negara		0		0	0	0	0	2	2	
e.	**Lingkungan Hidup**										
e.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Kualifikasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas LH
e.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	Kualifikasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Dinas LH
e.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	Kualifikasi	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Dinas LH
e.4	Hasil pengukuran Indeks kualitas air	persen	58,89	58,34	58,44	58,54	58,64	58,74	58,84	58,84	Dinas LH
e.5	Hasil pengukuran Indeks kualitas Udara	persen	79,05	80,05	80,15	80,25	80,34	80,45	80,55	80,55	Dinas LH
e.6	Hasil pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	persen	56,37	58,72	61,14	63,57	65,99	66,10	66,41	66,41	Dinas LH
e.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang di awasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	izin	252 izin lingkungan		302 izin lingkungan	472 izin lingkungan	530 izin lingkungan	590 izin lingkungan	660 izin lingkungan	660 izin lingkungan	Dinas PM, PTSP

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten										
e.14	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana;	Saparas	22 Sapras sampah yang terdiri dari : 6 gerobak sampah,10 motor sampah, 2 truk sampah, 1 Amrol dan 3 Pick Up Sampah		6 Sapras	8 Sapras	12 Sapras	15 Sapras	20 Sapras	20 Sapras	Dinas LH
e.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;	orang	1	1	1	1	1	2	2	2	Dinas LH
e.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;		0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas LH
e.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, , izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten;	Pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH
e.18	Timbunan sampah yang ditangani;;	Ton	70.036,49	70036,49	62.465	64.521	65.250	65.902	66.561	66.561	Dinas LH
e.19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R;	Persen	74,42%	74,42	-	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas LH
e.20	Persentase cakupan area pelayanan;	Persen	21,43%	21,43%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Dinas LH
e.21	Persentase jumlah sampah yang ditangani;	Persen	5,93%	5,93%			73%	80%	75%	75%	Dinas LH
e.22	Operasionalisasi TPA / TPST / SPA di Kabupaten;	TPA	1 TPA	1 TPA	4 TPA	4 TPA	4 TPA	4 TPA	4 TPA	4 TPA	Dinas LH

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
f.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
f.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	93,57	93,57	93,57	95	95	98	100	100	Dinas Dukcapil
f.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	99,52	99,52	100	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
f.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	17,12	17,12	20	25	30	40	50	50	Dinas Dukcapil
f.4	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Kualifikasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Dukcapil
f.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kualifikasi	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Dukcapil
f.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	93,57	93,57	93,57	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
f.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	99,52	99,52	100	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
g.	**Pemberdayaan Masyarakat Kampung**										
g.1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Kampung	200	205	221	221	221	221	221	221	Dinas PMK
g.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kampung	221	221	221	227	227	227	227	227	Dinas PMK
g.4	Persentase LSM aktif	Persen	89	89	90	90	90	90	90	90	Dinas PMK
g.6	Persentase PKK aktif	Persen	91	91	242	242	242	242	243	243	Dinas PMK
g.7	Persentase Posyandu aktif	Persen	41	46	65	70	75	80	90	90	Dinas PMK
h.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
h.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,86	0,86	1,07	1	0,95	0,9	0,85	0,85	Dinas PPPA,PP dan KB

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
h.3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	46,88%	0,4688	-	-	-	56,57	57,47	57,47	Dinas PPPA,PP dan KB
h.9	Ratio Akseptor KB	Persen	75,4	75,4	75,4	80	80	90	90	90	Dinas PPPA,PP dan KB
h.10	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	Persen	72.624	72624	73	75	80	80	90	90	Dinas PPPA,PP dan KB
h.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	Persen	35,25	35,25	30	25	25	20	10	10	Dinas PPPA,PP dan KB
h.13	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,4	10,4	10	10	9	8	7	7	Dinas PPPA,PP dan KB
h.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	44,69%		50	55	55	60	60	60	Dinas PPPA,PP dan KB
h.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	86,35	86,35	87	87	90	90	95	95	Dinas PPPA,PP dan KB
h.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Persen	71,72	71,72	80	80	90	95	98	98	Dinas PPPA,PP dan KB
h.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	Persen	59,04	59,04	60	65	65	70	70	70	Dinas PPPA,PP dan KB
h.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	Persen	56,29	56,29	58,12	59,12	60,12	61,12	62,12	62,12	Dinas PPPA,PP dan KB
h.19	Pusat Layanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kualifikasi	Tidak Ada	Tidak Ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Dinas PPPA,PP dan KB

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
h.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Orang	1.700		550	700	800	850	900	900	Dinas PPPA,PP dan KB
h.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	Persen	31,44	31,44	32	32	32	32,4	33,1	33,1	Dinas PPPA,PP dan KB
h.23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	orang	2	1,2	2	2	2	2	2	2	Dinas PPPA,PP dan KB
h.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PPPA,PP dan KB
i.	**Perhubungan**										
i.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang Angkutan Umum	108.372	884194	171.500	179.150	184.150	184.150	184.150	184.150	Dinas Perhubungan
i.2	Rasio izin trayek	rasio	0,000051	0,000051	0,000063	0,000067	0,000072	0,000082	0,000082	0,000082	Dinas Perhubungan
i.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Uji Kir	1.250	5592	1.314	1.452	1.645	1.845	1.845	1.845	Dinas Perhubungan
i.4	Jumlah Terminal Bis		0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
i.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	41,34	42,907	52,50%	55,00%	57,50%	60,00%	60	60	Dinas Perhubungan
i.7	Pemasangan Rambu-Rambu	Rambu	2	2,9103	20,00%	23,00%	24,00%	26%	26	26	Dinas Perhubungan
i.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,030	0,03	0,048	0,05	0,06	0,1	0,1	0,100	Dinas Perhubungan
i.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang/ barang	208.372	208372	175.150	176.150	180.150	185.150	185.150	185.150	Dinas Perhubungan

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
i.10	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun										
j.	**Komunikasi dan Informatika**										
j.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	8						8	8	Dinas Kominfo
j.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	76,05	76,05	68	70	73	74	75	75	Dinas Kominfo
j.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	28,37	28,37	29	30	33	34	35	35	Dinas Kominfo
j.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	persen	12,34	12,34	15	17	17	18	20	20	Dinas Kominfo
k.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**										
j.1	Persentase Koperasi aktif	koperasi	714	714	714	714	714	714	714	714	Dinas Koperasi dan UKM
j.4	Persentase Usaha Mikro Kecil.	UMK	8979		8979	8979	8979	8979	8979	8979	Dinas Koperasi dan UKM
l	Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
l.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	18	20.5	35	40	40	45	45	45	Dinas PM, PTSP
l.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rupiah	23 Milyar	23. Milyar	30. Milyar	32. Milyar	35. Milyar	37. Milyar	40. Milyar	40. Milyar	Dinas PM, PTSP
l.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga Kerja	82	100	200	300	300	400	450	450	Dinas Nakertrans
m	**Kependudukan dan Olah Raga**										

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
m.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	persen	70,59%	70,59	71,00%	71,00%	75%	75,00%	80,00%	0,8	Dinas Porapar
m.2	Persentase wirausaha muda		4	4	-	-	15	20	25	25	Dinas Porapar
m.3	Cakupan pembinaan olah raga	persen	8,33%	8,33	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	0,1875	Dinas Porapar
m.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		0	0	3	3	2	2	2	2	Dinas Porapar
m.5	Cakupan pembinaan atlet muda		-	-	-	120	-	-	-	-	Dinas Porapar
m.6	Jumlah atlet berprestasi;		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Porapar
m.7	Jumlah prestasi olah raga		-	-	-	8	-	-	-	-	Dinas Porapar
n	**Statistik**										
n.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Kualifikasi	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Kominfo
n.2	Buku "kabupaten Wayk Kanan dalam angka"	Kualifikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Kominfo
n.3	Buku "PDRB"	Kualifikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Kominfo
o	**Persandian**										
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	3,13%	3,13	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,0313	Dinas Kominfo
p	**Kebudayan**										
p.1	Penyelenggaraan festifal seni dan budaya	Kali	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas P & K
p.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan										
	- Benda Cagar Budaya	Benda	14	14	14	14	14	14	14	14	Dinas P & K
	- Bangunan Cagar Budaya	Bangunan	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas P & K

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	- Situs Cagar Budaya	situs	17	17	17	17	17	17	17	17	Dinas P & K
	- Kawasan Cagar Budaya	kawasan	8	8	8	8	8	8	8	8	Dinas P & K
q	**Perpustakaan**										
q.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8562	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
q.2	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	23.854	23.854	23.854	23.854	23.854	23.854	23.854	23.854	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
q.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
q.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	orang	8.562	8562	8562	8562	8562	8562	8562	8.562	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
q.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	1000	1000	1200	1500	2000	2500	3.000	3.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
r	**Kearsipan**										
r.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	15	15	25	30	32	33	33	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
r.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	35	35	20	25	30	35	35	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	**Layanan Urusan Pilihan**										

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
a	**Pariwisata**										Dinas Porapar
a.1	Kunjungan wisata	Wisatawan	16.200	16.200	15.000	17.001	28.030	32.100	60.200	60.200	Dinas Porapar
a.3	PAD Sektor wisata	rupiah	1.000.000	1.000.000	1000000	3000000	5.000.000	7.000.000	15.000.000	15.000.000	Dinas Porapar
b	**Pertanian / Ketahanan Pangan**										
b.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	persen	33,36	33,36	33,8	34,02	35,01	36,13	36,5	36,5	Dinas TPHP
b.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	13	13	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	Dinas TPHP
b.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	11,4	11,4	12	12	12	12	12	12	Dinas Perkebunan
b.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas TPHP
b.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Ton	4.415	4584,2	4.481	4.581	4.681	4.981	5.081	5.081	Dinas TPHP/Dinas Ketahanan Pangan
d	**Energi dan Sumber Daya**										
d.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	72,29	72,29	79,00	79	81	82	82	82	Bagian SDA
e	**Perdagangan**										
e.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok Pedagang	4	24	5	5	5	5	5	5	Dinas Indagsar
f	**Perindustrian**										
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin	4.014	4014	4.880	4.880	4.885	4.185	4.221	4.221	Dinas Indagsar
g	**Transmigrasi**										

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Persentase transmigrasi swakarsa.	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Nakertrans
h	**Kelautan dan Perikanan**										
h.1	Produksi perikanan	ton	1.909,66	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2200	Dinas Perikanan
h.2	Konsumsi ikan				26,79	27,59	28,42	29,27	30,15	30,15	Dinas Perikanan
h.3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	45	45	50	50	55	55	60	60	Dinas Perikanan
h.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	160	160	200	201	202	203	204	204	Dinas Perikanan
4	**Penunjang Urusan**										
a	**Perencanaan Pembangunan**										
a.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Kualifikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
a.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kualifikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
a.3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Kualifikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
a.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Kualifikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
a.5	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
a.6	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
a.7	Kesatuan rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
b	**Keuangan**										
b.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kualifikasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
b.2	Persentase SILPA	Persen	4,49	5	5,42%	2,62%	1,74%	0,54%	1,19%	1,19%	BPKAD
b.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	4,49	5	5,42%	2,62%	1,74%	0,54%	1,19%	1,19%	BPKAD
b.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD
b.5	Persentase belaja pendidikan (20 %)	Persen	33,01	20	20	20	20	20	20	20	BPKAD
b.6	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	16,06	10	10	10	10	10	10	10	BPKAD
b.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	194,11	127,156	150	150	150	150	150	150	BPKAD
b.8	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	0,188%	0,001212	0,043%	0,073%	0,103%	0,133%	0,163%	0,16%	BPKAD
b.9	Penetapan APBD	Kualifikasi	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	BPKAD
c	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**										
c.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,02	5	6	7,70	5,41	2,28	2	200,00%	BK PSDM
c.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	0,02		4,12	6,96	3,87	0,34	0,02	0,02	BK PSDM

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
c.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	34	34	34	34	34	34	34	34	BK PSDM
c.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	164	165	167	170	175	178	180	180	BK PSDM
c.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	2.913	2.913	5000	5000	5000	5000	5000	5000	BK PSDM
d	**Penelitian dan Pengembangan**										
d.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
d.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
d.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SIDa	Persen	9,6	9,8	10	11	12	13	14	14	Bappeda
d.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
e	**Pengawasan**										
e.1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	52,33	54	55	56	58	59	60	60	Inspektorat
e.2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Inspektorat
e.3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	6	6	6	6	6	6	6	6	Inspektorat
f	**Sekretariat Dewan**										
f.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Kualifikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
f.2	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Kualifikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD
f.3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran Setwan DPRD	Kualifikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD
	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita (juta rupiah)	Juta Rupiah	9,20	9,20	9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,7	Bappeda
2	Nilai Tukar Petani	persen	94,73	102,43	103,50	104,00	104,50	105,00	105,50	105,5	Dinas TPHP
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	persen	45,50	45,5	45,52	45,97	46,00	46,20	46,30	46,3	Bappeda
4	Produktifitas total daerah	ton	14.001.050,00	14.001.050,00	11.235.657,73	12.505.567,95	13.945.396,51	15.565.712,14	17.390.714,05	17.390.714	Bappeda
5	Prosentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	persen	9,05	9,05	10	10	10	10	10	10	Dinas PMK
6	Rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	persen	(3,75)	-3,75	(2,30)	(2,30)	(2,30)	(2,30)	(2,30)	-2,3	Bappeda
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum		0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Ekonomi

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	persen	102,73	102,9	103,00	103,50	104,00	104,50	105,00	105,00	Bagian Ekonomi
9	Angka kriminalitas yang tertangani	poin	425,00	435	450,00	475,00	490,00	500,00	510,00	510	
10	Rasio Ketergantungan	poin	48,44	48,44	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	53	Bappeda

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan dan RPJMN Tahun 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Way Kanan tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Selain itu, RPJMD Kabupaten Way Kanan merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dan semua stakeholder dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan didukung oleh Legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Way Kanan, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Way Kanan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Way Kanan;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Way Kanan berkewajiban untuk menyusun renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, serta menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang disahkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh

kepala SKPD hal ini sesuai dengan pasal 272 ayat (2) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Setiap S K PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
6. Renstra-SKPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–SKPD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
7. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan;
8. Penyusunan RKPD Kabupaten Way Kanan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten;
9. RKPD Kabupaten Way Kanan harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
10. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Way Kanan merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
11. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way

Kanan Tahun 2021-2026, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

12. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pelaku usaha daerah yang tersebar di daerah Kabupaten Way Kanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;
14. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Way Kanan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2026-2046, dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2024-2029, dan RKP Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2025, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi misi RPJMD Tahun 2021-2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemengku kepentingan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Way Kanan mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Way Kanan yang ***unggul dan sejahtera***.

BUPATI WAY KANAN,

Dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012